2025

RENJA

(Rencana Kinerja)

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

LIWA 2024

(0728) 21120

disbunnaklambar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tercurah kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Laampung Barat Tahun 2025 dapat terwujud.

Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 pada hakikatnya merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Penyusunan Renja Tahun 2025 ini berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada Renja Perangkat Daerah sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.

Hasil penyusunan Renja ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 2024

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Lampung Barat,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

YUDHA SETIAWAN, S.I.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19690529 199009 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN..... 3

1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum..... 5
1.3 Maksud dan Tujuan..... 7
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RNJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 14
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD..... 15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN... 16

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional..... 16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 16
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 23

BAB VIII PENUTUP 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Lampung Barat. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui peningkatan produksi komoditas perkebunan, penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis sub sektor perkebunan dimaksud sejalan dengan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Barat diantaranya pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global sebagai upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita masyarakat dimana fokus pembangunan dititikberatkan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tantangan pembangunan perkebunan dan peternakan Lampung Barat ke depan antara lain bagaimana terus meningkatkan produksi, produkitivitas, dan mutu komoditas perkebunan dan peternakan, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk perkebunan dan peternakan, memperkokoh kelembagaan kelompok tani perkebunan dan peternak, dan mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan daerah harus melibatkan seluruh *stake holder* terkait terutama masyarakat, dengan kata lain bahwa masyarakat harus diberdayakan melalui peran aktifnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan di daerah. Untuk itu, dalam merancang program dan kegiatan pembangunan perkebunan dan peternakan Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan format pembangunan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan tetap memperhatikan wawasan lingkungan dan berdimensi masa depan. Untuk itu pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki harus dilakukan secara optimal sehingga memiliki keunggulan kompetitif dengan indikator produksi dan produktivitas yang tinggi, peningkatan mutu dan nilai tambah produk, serta efisiensi dan berkelanjutan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 disesuaikan dengan hasil musrenbang baik tingkat pekon, kecamatan, dan kabupaten, Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan dan Peternakan serta program unggulan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Hal ini ditujukan untuk mengakomodir usulan kegiatan berdasarkan prioritas kebutuhan pembangunan secara *bottom up*.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perkebunan dan peternakan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan dan peternakan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tugas pokok dimaksud, Dinas Perkebunan dan Peternakan mempinyai fungsi:
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan peternakan;
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan dan peternakan;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan dan peternakan;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perkebunan dan peternakan; dan
   e. Pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dimana pada Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPD Tahun 2023 – 2026 Kabupaten Lampung Barat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan program pembangunan Tahun 2025 dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki serta mengupayakan sumber daya lain (swasta) dan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan program-program pembangunan perkebunan dan peternakan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja ini adalah untuk mengakomodir masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan Kabupaten Lampung Barat yang perlu diselesaiakan, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat, terutama peningkatan aspek produksi, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani pekebun dan peternak di Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan RENJA ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dilaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu:

a. Pada urusan Non Urusan yaitu:
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Pada Urusan Pemerintah Bidang Pertanian yaitu:
   1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
   2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
   3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
   4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
   5. Program Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Sub Kegiatan:
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Kegiatan:

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.

Sub Kegiatan:

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi.
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman.
- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.

d. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabuaten/Kota Lain.
   Sub Kegiatan:
   - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
   Kegiatan:

   a. Pengembangan Prasarana Pertanian.
      Sub Kegiatan:
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.

   b. Pengembangan Prasarana Pertanian.
      Sub Kegiatan:
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.
      - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan.

4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
   Kegiatan:

   a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah.
      Sub Kegiatan:
      - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan *Zoonosis* dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

   b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota.
      Sub Kegiatan:

- Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM.

c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   Sub Kegiatan:
   - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

d. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota.
   Sub Kegiatan:
   - Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

e. Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner.
   Sub Kegiatan:
   - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.

5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
   Kegiatan:

   a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
      Sub Kegiatan:
      - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

6) Program Penyuluhan Pertanian.
   Kegiatan:

   a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
      Sub Kegiatan:
      - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.
      - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

Alokasi dana Tahun 2023 sebesar Rp. 7.847.068.553,- terealisasi Rp. 7.563.008.332,- atau sebesar 96,38%. Dari seluruh sub kegiatan tidak terdapat sub kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak mencapai 100 persen.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Lampung Barat. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui peningkatan produksi komoditas perkebunan, penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis sub sektor perkebunan dan peternakan dimaksud sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Barat diantaranya Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan dan Sektor Pariwisata. Pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita masyarakat dimana fokus pembangunan dititikberatkan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Hal tersebut juga selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Lampung yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan.

Pembangunan perkebunan dan peternakan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Tujuan pembangunan perkebunan dan peternakan pada dasarnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tantangan pembangunan perkebunan dan peternakan Lampung Barat ke depan antara lain bagaimana terus meningkatkan produksi, produkitivitas, dan mutu komoditas perkebunan, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk perkebunan, meningkatkan populasi dan nilai tambah ternak, meningkatkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, memperkokoh kelembagaan kelompok tani perkebunan dan peternak, dan mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup.

Mayoritas penduduk Lampung Barat pendapatannya tergantung pada sub sektor perkebunan terutama didominasi oleh beberapa komoditas utama antara lain : Kopi, Kakao, Cengkeh, Lada, Aren dan lainnya. Kabupaten Lampung Barat merupakan produsen kopi robusta terbesar di Propinsi Lampung. Berdasarkan Data Statistik Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat Angka Sementara Tahun 2023 produksi kopi robusta di Lampung Barat mencapai 52.326 Ton dengan luas budidaya kopi mencapai 54.096 Ha, dan produktivitas mencapai 1.046 Kg/Ha/Tahun.

Kemajuan pembangunan perkebunan di Kabupaten Lampung Barat juga didukung oleh adanya Kawasan Klaster Kopi di Kecamatan Air Hitam dan Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditi Kopi di Kecamatan Way Tenong yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Perindustrian, pembangunan Agro Tekno Park Kopi Robusta Liwa Lampung (ATP Korolla) di Kecamatan Sumber Jaya, pembangunan Desa Wisata “Kampoeng Kopi Rigis Jaya” di Kecamatan Air Hitam serta pembangunan Sekolah Kopi di Kecamatan Sumber Jaya.

Kopi Robusta merupakan komoditas perkebunan yang sangat mendominasi di Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu produk unggulan serta merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Areal pertanaman kopi

tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dan budidaya Kopi Robusta telah diusahakan secara turun temurun oleh masyarakat Lampung Barat. Selain komoditas kopi, komoditas aren juga merupakan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor B/336/KPTS/III.2/2014, tanggal 11 September 2014 tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat.

Produk Kopi Robusta Lampung Barat telah mendapat Sertifikasi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan nama "KOPI ROBUSTA LAMPUNG". Selain itu perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Kopi Nasional berdasarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu wilayah pengembangan komoditas kopi yang menunjukkan keberadaan perkebunan kopi di Lampung Barat sangat menentukan eksistensi perkopian nasional.

Dengan keberadaan komoditas Kopi Robusta yang menjadi unggulan perkebunan Lampung Barat, telah dilakukan upaya pedaftaran klon-klon produktif lokal dan pada Tahun 2019 telah dilepas Varietas Unggul Tanaman Kopi Robusta melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 35-38/KPTS/KB.020/2/2019 Tanggal 1 Februari 2019, yaitu Korolla (Kopi Robusta Liwa Lampung) 1 s.d 4. Pada Tahun 2022 telah terdaftar 2 (dua) Varietas Lokal Unggul yaitu Varietas CIPTO dengan Tanda Daftar Daftar Varietas Tanaman Nomor : 1948/PVL/2022 Tanggal 20 Desember 2022 dan Varietas IMAM GIHAM dengan Tanda Daftar Daftar Varietas Tanaman Nomor : 1961/PVL/2022 Tanggal 20 Desember 2022 dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian RI. Pada Tahun 2023 telah didaftarkan kembali 2 (dua) Varietas Lokal Unggul yaitu Varietas DARMANI dan ROHIBAT.

Untuk varietas ROHIBAT telah terbit Tanda Daftar Daftar Varietas Tanaman Nomor : 2161/PVL/2024 Tanggal 26 Februari 2024 dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian RI.

Budidaya Kopi Robusta di Lampung Barat tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang dilakukan secara turun temurun dengan pola budidaya yang bervariasi. Sebagian besar petani telah menerapkan pola mix farming atau pola diversifikasi dengan komoditas lain, tetapi masih terdapat budidaya dengan pola monokultur di sebagian wilayah. Komoditas kopi robusta telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi di kabupaten Lampung Barat.

Sesuai dengan kondisi agroklimat Kabupaten Lampung Barat, beberapa petani milenial yang tergabung dalam komunitas KOPISTA INDONESIA telah mengembanganken suatu inovasi yaitu pengembangan komoditas Kopi Arabika dengan pola tanam Sistem Pagar yaitu pola tanam dalam barisan dimana jarak tanam dalam barisan 1 meter dan antar barisan 2,5 meter. Populasi tanaman dalam 1 Ha dapat mencapai 4.000 batang. Inovasi ini dikembangkan oleh Sdr. Ahmad Supriyono, S.T bersama komunitas Kopista Indonesia yang dimulai di kebun Sdr. Ahmad Spriyono, Kebas, Kel, Sekincau. Luas Tanaman Menghasilkan (TM) 0,5 Ha dengan produksi Tahun 2023 sebanyak 800 Kg atau produktivitas 3,2 Ton/Ha. Tahun ini diperkirakan produksi dapat mencapai 1.000 Kg atau produktivitas 4 Ton/Ha. Replanting (peremajaan) Kopi Arabika telah dilakutan seluas 2,5 Ha di Kebun milik Sdr. Ahmad Supriyono serta ± 30 Ha pada kebun masyarakat yang tersebar dari Sumber Jaya sampai Lumbok Seminung.

Sistem pagar budidaya kopi dengan jenis Kopi Robusta telah diujiterapkankan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung berupa demplot di Kebun Perbibitan milik Provinsi Lampung di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau. Sistem ini juga telah diujicobakan di kebun Sekolah Kopi dengan kombinasi naungan.

Selain produk unggulan kopi dan aren, terdapat beberapa komoditas perkebunan penunjang perekonomian masyarakat Lampung Barat diantaranya kakao, lada, cengkeh, dan kelapa dalam. Berikut ini disajikan perkembangan luas lahan dan produksi beberapa komoditas perkebunan secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perkembangan Luas Lahan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 – 2023

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*
1	Kopi Robusta	54.100	54.106	54.104	54.104	54.104
2	Lada	7.583	7.582	7.469	7.469	7.469
3	Kakao	1.420	1.698	1.689	1.689	1.689
4	Kayu Manis	690	694	645	645	645
5	Kelapa Dalam	511	511	512	512	512
6	Cengkeh	896	897	961	961	961
7	Aren	399	398	405	405	405
8	Kemiri	96	96	97	97	97

Ket : *Angka sementara

Sumber : Laporan Data Statistik Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

Tabel 2 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 – 2023

NO	KOMODITI	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023*	
		Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/th)
1	Kopi Robusta	57.815,2	1.137,1	51.482,5	1.015,8	54.563,2	1.092,7	56.054,4	1.122,5	56.054,4	1.122,5
2	Lada	3.319,7	599,9	3.021,7	534,9	3.061,6	587,6	3.061,6	587,6	3.061,6	587,6
3	Kakao	1.874,7	1.893,1	696,1	882,2	1.093,7	1.200,2	1.093,7	1.200,2	1.093,7	1.200,2
4	Kayu Manis	711,5	1.487,6	784,2	1.632,1	608,3	1.384,7	608,3	1.384,7	608,3	1.384,7
5	Kelapa Dalam	631,4	1.497,9	630,9	1.515,2	459,4	1.013,3	459,4	1.013,3	459,4	1.013,3
6	Cengkeh	82,4	278,0	72,0	236,7	125,1	333,9	125,1	333,9	125,1	333,9
7	Aren	495,4	1.754,2	297,3	1.385,8	296,9	1.302,3	296,9	1.302,3	296,9	1.302,3
8	Kemiri	145,0	2.101,8	119,4	2.270,7	109,1	1.717,6	109,1	1.717,6	109,1	1.717,6

Ket : *Angka sementara

Sumber : Laporan Data Statistik Perkebunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata produksi komoditas unggulan Kopi Robusta setiap tahun mengalami fluktusi dan belum optimalnya produktivitas rata-rata yang dicapai petani kopi di Lampung Barat merupakan sebagian dari permasalahan dalam pengembangan komoditas Kopi Robusta. Secara umum permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Fluktuasi produksi kopi;
2. Pemberian pupuk yang belum sesuai (jenis, dosis dan waktu); Pengenalan kondisi tanah (jenis tanah, PH *dll*) sangat penting dilakukan untuk dapat memberikan pupuk yang sesuai sehingga memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan tanaman kopi.
3. Pemeliharaan kebun yang belum sesuai dengan GAP (*Good Agricultural Practice*);
4. Penurunan kesuburan tanah;
5. Cuaca ekstrim; Lampung Barat mengalami kemarau basah sehingga sampai dengan bulan Januari 2023 ini, pembungaan kopi masih terjadi yang seharusnya sudah selesai pada bulan September-Oktober tahun lalu. Hal ini berakibat pada panjangnya masa panen yang berimplikasi pada :
   - Tingginya serangan PBKo (Penggerek Buah Kopi) karena tidak terputusnya siklus hidup OPT tersebut.
   - Kurangnya tenaga kerja untuk melakukan pemanenan.
6. Rantai kelembagaan bisnis kopi belum terbangun;
7. Tekanan kebutuhan lahan masyarakat baik untuk pemukiman maupun fungsi lain yang mendesak fungsi lahan kebun kopi.

Peningkatan produksi dan produktivitas produk unggulan Kopi Robusta dilaksanakan melalui langkah-langkah yang terpadu, antara lain:

1. Melaksanakan pendaftaran pada klon-klon lokal produktif sehingga dapat dilepaskan sebagai sumber benih.
2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan intensifikasi dan peremajaan tanaman kopi antara lain dengan mengganti tanaman kopi yang sudah berumur tua dan tidak produktif serta penanaman pada lahan-lahan baru;
3. Melaksanakan pengendalian OPT secara terpadu;
4. Meningkatkan kemampuan SDM petani melalui pembinaan dan pendampingan secara kontinu; Mengoptimalkan fungsi SEKOLAH

KOPI sebagai wadah pendidikan non formal bagi petani, masyakat dan pelaku usaha kopi;

5. Peningkatan mutu dan nilai tambah melalui pembinaan pasca panen dan pengolahan serta penyaluran bantuan UPH (Pasca Panen dan Panen) baik dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten;
6. Penyediaan prasarana dan sarana pendukung.
7. Memaksimalkan kelompok masyarakat, kelompok tani dan NGO lainnya dalam rangka membantu untuk keluar dari permasalahan baik teknis maupun non teknis (keuangan).

Subkategori peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasilnya baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas peternakan yang diusahakan di Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 jenis ternak yaitu: Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kuda, Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik, Kelinci, Puyuh, Merpati dan Itik Manila.

Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Lampung Barat tampak pada populasi beberapa jenis ternak seperti dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3 Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023*
A	Jenis Ternak					
1.	Sapi (ekor)	7.628	8.063	7.505	7.606	7.606
2.	Kerbau (ekor)	400	375	375	380	380
3.	Kambing (ekor)	81.204	81.780	80.611	80.722	80.722
4.	Domba	6.182	6.413	6.453	6.498	6.498
5.	Ayam buras	2.259.230	2.300.900	2.301.003	2.319.673	2.319.673
6.	Itik	61.137	68.626	68.907	69.192	69.192
B	Produksi					
1.	Daging (kg)	3.088.000	3.127.000	3..132.935	3..132.935	3..132.935
2.	Telur (butir)	2.150.225	2.160.000	2.161.535	2.161.535	2.161.535
3.	Susu (liter)	63.000	25.000	10.000	10.000	10.000

Ket : *Angka sementara
Sumber : Laporan Data Statistik Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan populasi ternak besar di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung mengalami peningkatan meskipun terdapat fluktuasi. Di Kabupaten Lampung Barat belum terdapat perusahaan *breeding* maupun *feedloter* yang mengelola ternak besar secara intensif dan profesional. Ternak yang ada merupakan ternak masyarakat yang pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan pemerintah diikuti dengan upaya pembinaan yang intensif dari petugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat serta pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi yang dapat meningkatkan produktivitas ternak. Pada hakikatnya upaya kesehatan, termasuk kesehatan hewan, merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional dan pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) sehingga mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan yang meningkat secara optimal.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan hewan adalah dengan membentuk Puskeswan. Disamping pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi yang bersifat individual, Puskeswan juga mengemban amanah yang bersifat publik yakni pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Dalam hal ini Puskeswan merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan kasus dilapangan sehingga dapat melakukan deteksi dini, pelaporan dini dan respon dini (*early warning system*). Diharapkan kasus penyakit hewan menular dapat dikendalikan dan tidak menyebar serta dapat dibebaskan kembali. Munculnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda disebagian besar wilayah Indonesia sangat mengancam populasi ternak, namun dengan kerjasama yang terpadu dari semua pihak, sampai saat ini Lampung Barat masih Nol Kasus atau *Zero Case*.

Kasus terbaru adalah munculnya penyakit *Lumpy Skin Desease* (LSD) yang juga menjangkiti ternak disebagian besar wilayah Indonesia. Di Lampung Barat muncul 174 kasus, namun dengan upaya yang serius, penyakit ini dapat disembuhkan dan ditekan penyebarannya melalui pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi secara menyeluruh dan kontinyu baik vaksin LSD maupun PMK yang telah dilakukan sebelumnya.

Dinas Perkebunan dan Peternakan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dalam pelayanan kesehatan hewan yang berjumlah 6 (enam) Puskeswan untuk melayani 15 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat dapat datang membawa hewan ternaknya ke Puskeswan pada jam kerja untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, vaksinasi dan konsultasi kesehatan hewan. Model pelayanan ini kami sebut sebagai PELAYANAN PASIF.

Disamping Model Pelayanan Pasif, Dinas Perkebunan dan Peternakan juga melaksanakan Model PELAYANAN AKTIF yaitu mendatangi peternak dan pemilik hewan peliharaan dari kandang ke kandang melalui permohonan masyarakat secara berkelompok maupun melalui komunitas-komunitas pecinta hewan ternak.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Lampung Barat sehingga perlu diselenggarakan, dikelola, dan dilindungi secara terencana, terpadu, dan profesional untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah

di masa yang akan datang. Isu-isu strategis yang perlu penanganan dan mendukung pentingnya pembangunan bidang perkebunan dan peternakan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan kebun yang belum sesuai dengan GAP (*Good Agricultural Practice*)
2. Penurunan kesuburan tanah
3. Cuaca ekstrim
4. Rantai kelembagaan bisnis kopi belum terbangun
5. Tekanan kebutuhan lahan masyarakat baik untuk pemukiman maupun fungsi lain yang mendesak fungsi lahan perkebunan
6. Peningkatan kebutuhan pangan hewani seiring dengan peningkatan jumlah penduduk
7. Tingkat kelahiran (terutama ternak ruminansia) yang masih rendah
8. Adanya penyakit ternak yang mengancam populasi
9. Pola budidaya ternak yang masih tradisional

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD yang dientri melalui aplikasi SIPD RI pada Perencanaan 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2023 – 2026 memiliki pagu indikatif sebesar Rp. 11.804.118.229,-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Pekon dan Kecamatan Tahun 2024 untuk perencanaan Tahun 2025 terdapat sebanyak 229 usulan kecamatan yang ditujukan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana Grafik berikut :

Grafik 1. Jumlah Usulan Musrenbang berdasarkan Jenis Usulan.

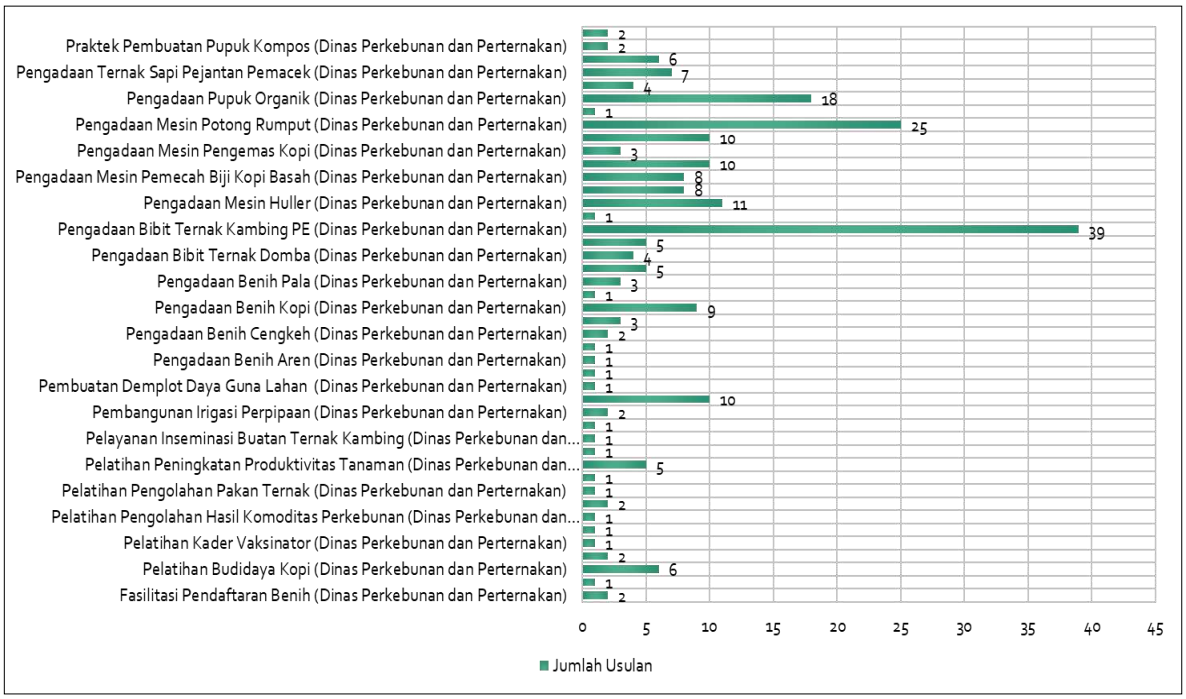

Dari Grafik 1 diatas dapat dilihat bahwa usulan terbanyak adalah Pengadaan Bibit Ternak Kambing PE sebanyak 39 usulan, disusul Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 29 usulan dan Pengadaan Pupuk Organik sebanyak 18 usulan.

Berdasarkan jumlah usulan per kecamatan, berikut ini adalah grafik jumlah usulan dari masing-masing kecamatan pengusul.

Grafik 2. Jumlah Usulan Musrenbang berdasarkan Kecamatan Pengusul

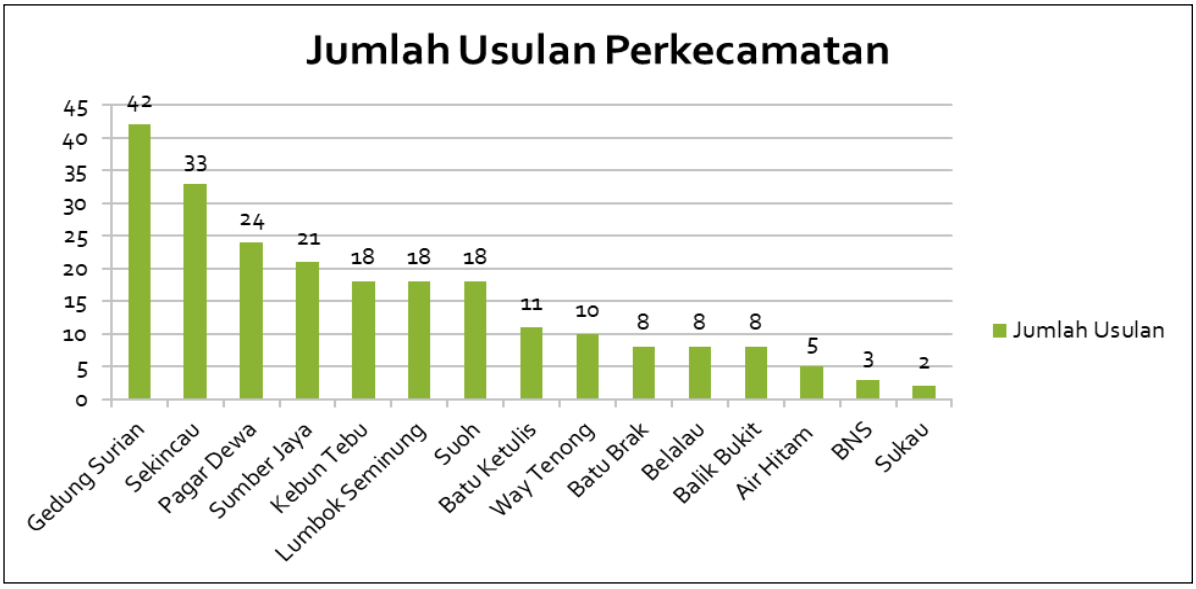

Dari Grafik 2 diatas dapat dilihat bahwa usulan terbanyak berasal dari Kecamatan Gedung Surian sebanyak 42 usulan, disusul Kecamatan Sekincau 33 usulan dan Kecamatan Pagar Dewa 24 usulan.

Setelah dilakukan DESK terhadap usulan kecamatan, terdapat usulan yang diterima, diusulkan melalui APBN dan ditolak. Usulan yang ditolak disebabkan antara lain oleh :

- Usulan bantuan Sapi Pejantan Pemacek dinilai tidak efektif dan disarankan untuk lebih memanfaatkan Inseminasi Ibuatan (IB)
- Usulan bukan kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan
- Komoditas yang diusulkan bukan komoditas perkebunan
- Sudah mendapatkan alokasi bantuan pada tahun sebelumnya

Berikut ini adalah grafik jumlah usulan yang diterima, diusulkan melalui APBN dan ditolak dari masing-masing kecamatan pengusul.

Grafik 3. Jumlah Usulan Musrenbang yang Diterima, Diusulkan melalui APBN dan Ditolak berdasarkan Kecamatan Pengusul

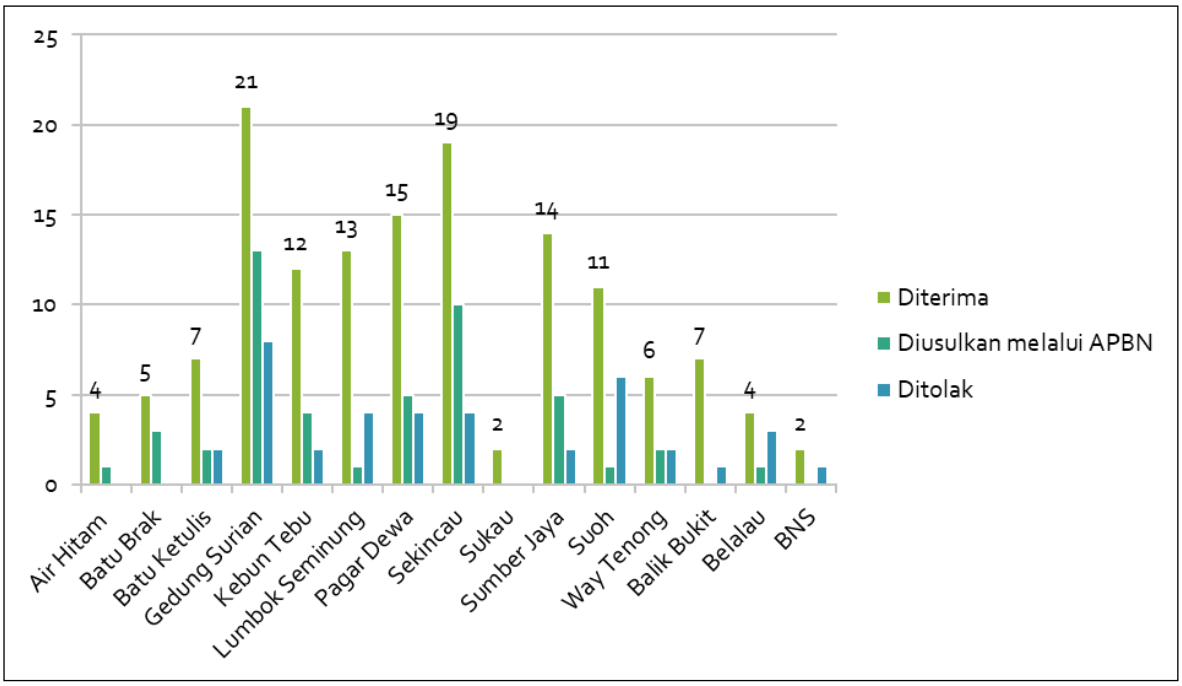

Rekapitulasi usulan kecamatan terdapat sebanyak 141 usulan diterima, 48 usulan diusulkan melalui APBN dan 39 usulan ditolak sebagaimana grafik berikut :

Grafik 4. Rekapituliasi Usulan Usulan Musrenbang yang Diterima, Diusulkan melalui APBN dan Ditolak.

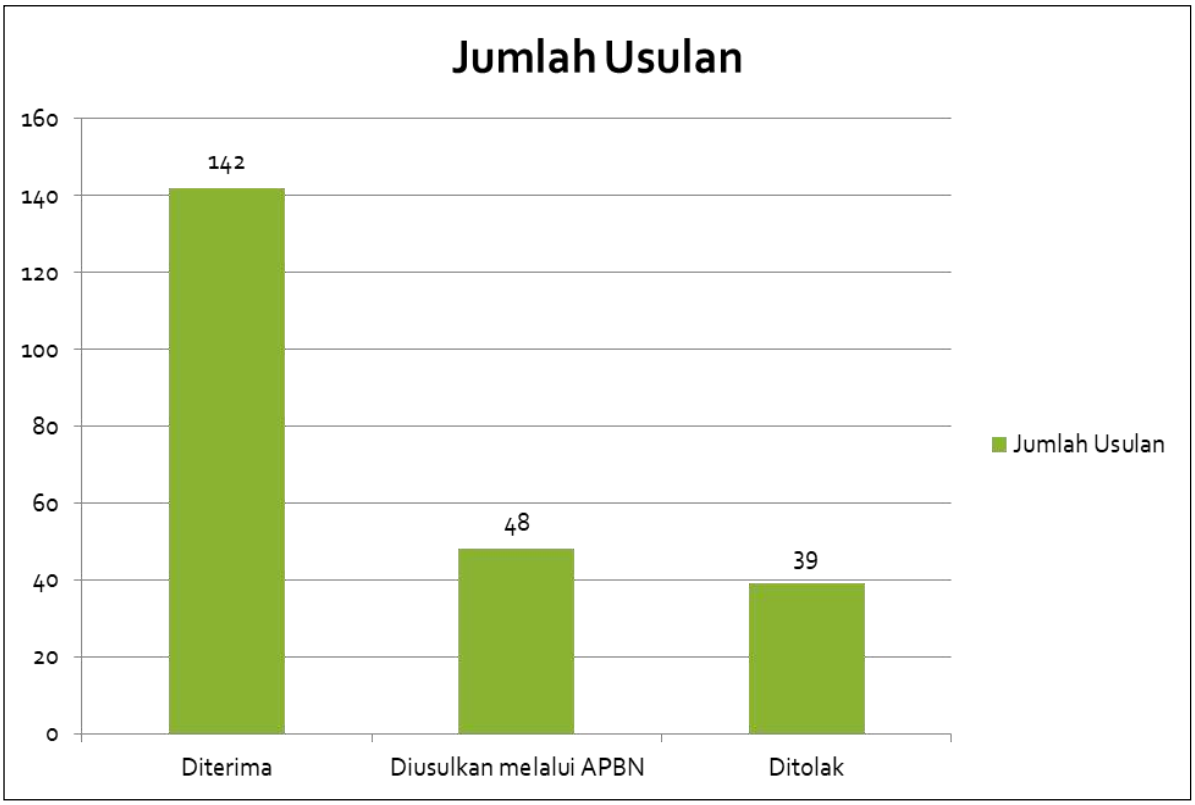

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan dan peternakan Kabupaten Lampung Barat tidak terlepas dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024. Visi Kementerian Pertanian adalah "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

Tujuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat diselaraskan dengan tujuan yang yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal terkait dengan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu :

1. Direktorat Jenderal Perkebunan
2. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Dengan menyelaraskan program kegiatan pada Direktorat Jenderal tersebut di atas, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Infentarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, program-program

yang dilaksanakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat meliputi :

Pada urusan Non Urusan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Urusan Pemerintah Bidang Pertanian yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat adalah :

Tujuan	:	Meningkatnya Nilai Produksi Perkebunan dan Peternakan.
Indikator Tujuan	:	- Nilai Produksi Perkebunan (*juta rupiah) - Nilai Produksi Peternakan (*juta rupiah)
Sasaran	:	Meningkatnya Produksi Perkebunan dan Peternakan.
Indikator Sasaran	:	- Produksi Perkebunan (Ton) - Produksi Peternakan (Ton)

Sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Meningkatnya Nilai Produksi Perkebunan dan Peternakan		Nilai Produksi Perkebunan (*juta rupiah)	1.327.500,93	1.374.627,21	1.423.426,48	1.473.958,12
			Nilai Produksi Peternakan (*juta rupiah)	2.506.989,69	2.595.987,83	2.688.145,39	2.783.574,56
		Meningkatnya Produksi Perkebunan dan Peternakan	Produksi Perkebunan (Ton)	53.164,48	55.051,82	57.006,16	59.029,88
			Produksi Peternakan (Ton)	78.177,89	80.953,21	83.827,05	86.802,91

1.2 Program dan Kegiatan

Target pencapaian sasaran disesuaikan dengan upaya penyelesaian masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan Kabupaten Lampung Barat, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat, terutama peningkatan aspek produksi, peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan serta peningkatan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani pekebun dan peternak di Kabupaten Lampung Barat.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan:
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan:
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- Pengadaan Mebel.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Kegiatan:

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.

Sub Kegiatan:
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi.
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:
- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman.
- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:
- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.

d. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabuaten/Kota Lain.

Sub Kegiatan:

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Kegiatan:

a. Pengembangan Prasarana Pertanian.

Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.

b. Pengembangan Prasarana Pertanian.

Sub Kegiatan:

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan.

4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kegiatan:

a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

- Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM.

c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

d. Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner.

Sub Kegiatan:

- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.

5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Kegiatan:

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

6) Program Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan:

b. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Sub Kegiatan:

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

Pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Lampung Barat merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten), swasta dan masyarakat, sehingga peranan anggaran pemerintah pada sub sektor perkebunan dan peternakan hanya sebagai stimulator (pengungkit) tumbuhnya investasi swasta dan masyarakat. Adapun rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Upaya untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan serta kesehatan dan populasi ternak menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam membantu masyarakat petani khususnya petani pekebun dalam merencanakan upaya antara lain :

a. Memberikan bantuan sarana prasarana pertanian untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh petani dalam pengelolaan perkebunan.
b. Memberikan bantuan ternak sebagai sumber pendapatan petani yang terintegrasi dengan tanaman perkebunan.
c. Meningkatkan pelayanan Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner.
d. Memberikan pelatihan bagi petani.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan Program unggulan Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta mengakomodir penyelesaian masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan Kabupaten Lampung Barat, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat, terutama peningkatan aspek produksi dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani pekebun dan peternak di Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan pembangunan perkebunan dan peternakan Lampung Barat tidak terlepas dari dukungan pendanaan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten walaupun pendanaan tersebut sifatnya hanya merupakan stimulator (pengungkit) untuk tumbuhnya investasi swasta dan masyarakat yang bermuara pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama petani pekebun dan peternak di Kabupaten Lampung Barat.

Agar Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Lampung Barat, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, kemauan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat saja tetapi oleh segenap *stakeholder* baik pusat, provinsi maupun yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 2024

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Lampung Barat,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

YUDHA SETIAWAN, S.I.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19690529 199009 1 002

L A M P I R A N

LAMPIRAN I

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2023

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPD (Renstra) Tahun 2026 (Akhir Periode RPD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d. Tahun Lalu (2023)		RKPD (Renja) Tahun Berjalan (2024)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rpd (Renstra) Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
												Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) (%)									
1	*2*					*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9=8/7 x 100%*		*10=6+8*		*11=10/5 x1 00%*		*12*	*13*
								K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**64.723.615.450**		**7.563.008.350**		**6.474.539.220**		**6.474.539.220**				**14.022.816.052**			**Disbunnak**	
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**64.723.615.450**		**7.563.008.350**		**6.474.539.220**		**6.474.539.220**				**14.022.816.052**				
	3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**81.15 %**	**20.766.352.262**	**75,80 %**	**4.677.459.752**	**81,10 %**	**4.966.845.820**	**0,00 %**	**4.966.845.820**	**0%**		**100 %**	**9.629.574.072**				
	3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**252.890.411**		**18.853.000**		**18.850.000**		**18.850.000**				**37.703.000**				
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41 Dokumen	116.421.806	11 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	100%	100%	21 Dokumen	10.000.000	51%	9%		
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	4 Dokumen	16.011.450	1 Dokumen	3.450.000	1 Dokumen	3.450.000	1 Dokumen	3.450.000	100%	100%	2 Dokumen	6.900.000	50%	43%		
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4 Dokumen	7.889.700	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	1 Dokumen	1.700.000	100%	100%	2 Dokumen	3.400.000	50%	43%		
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	4 Dokumen	6.265.350	1 Dokumen	1.350.000	1 Dokumen	1.350.000	1 Dokumen	1.350.000	100%	100%	2 Dokumen	2.700.000	50%	43%		
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	4 Dokumen	6.265.350	1 Dokumen	1.350.000	1 Dokumen	1.350.000	1 Dokumen	1.350.000	100%	100%	2 Dokumen	2.700.000	50%	43%		
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.664.205	1 Laporan	1.005.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	100%	100%	2 Laporan	2.005.000	50%	43%		
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	44 Laporan	95.372.550	12 Laporan	4.998.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	100%	100%	24 Laporan	9.998.000	55%	10%		
	3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**16.724.425.305**		**4.156.729.538**		**4.391.541.100**		**4.391.541.100**				**8.548.270.638**				
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 Orang	16.683.714.453	45 Orang	4.148.310.538	45 Orang	4.382.722.100	45 Orang	4.382.722.100	100%	100%	90 Orang	8.531.032.638	66%	51%		
	3	27	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	5.949.762	1 Dokumen	929.000	1 Dokumen	1.229.000	1 Dokumen	1.229.000	100%	100%	2 Dokumen	2.158.000	50%	36%		
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	4 Laporan	11.602.500	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	100%	100%	2 Laporan	5.000.000	50%	43%		
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72 Laporan	13.876.590	18 Laporan	2.990.000	18 Laporan	2.990.000	18 Laporan	2.990.000	100%	100%	36 Laporan	5.980.000	50%	43%		
	3	27	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	9.282.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.100.000	1 Dokumen	2.100.000	100%	100%	2 Dokumen	4.100.000	50%	44%		
	3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**91.439.303**		**14.731.500**										0%		
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	45.017.700	1 Dokumen	7.744.000	1 Dokumen	7.760.000	1 Dokumen	7.760.000	100%	100%	2 Dokumen	15.504.000	50%	34%		
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	76 Laporan	46.421.603	19 Laporan	6.987.500	19 Laporan	7.000.000	19 Laporan	7.000.000	100%	100%	38 Laporan	13.987.500	50%	30%		
	3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**92.820.000**		**4.982.500**		**15.000.000**		**15.000.000**				**19.982.500**				
	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	46.410.000	1 Dokumen	4.982.500	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	100%	100%	2 Dokumen	9.982.500	50%	22%		
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	46.410.000	- Orang	-	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	100%	100%	2 Orang	10.000.000	25%	22%		
	3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1.115.185.890**		**207.500.367**		**183.185.720**		**183.185.720**				**390.686.087**				
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.797.947	1 Paket	6.872.000	1 Paket	7.067.000	1 Paket	7.067.000	100%	100%	2 Paket	13.939.000	50%	42%		
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	127.952.370	1 Paket	19.319.400	1 Paket	19.364.400	1 Paket	19.364.400	100%	100%	2 Paket	38.683.800	50%	30%		
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	102.566.100	1 Paket	8.920.000	1 Paket	11.050.000	1 Paket	11.050.000	100%	100%	2 Paket	19.970.000	50%	19%		
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	166.890.360	4 Dokumen	38.960.000	4 Dokumen	41.000.000	4 Dokumen	41.000.000	100%	100%	8 Dokumen	79.960.000	50%	48%		
	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	78.432.900	12 Laporan	6.996.400	12 Laporan	7.000.320	12 Laporan	7.000.320	100%	100%	24 Laporan	13.996.720	50%	18%		
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	606.546.213	2 Laporan	126.432.567	2 Laporan	97.704.000	2 Laporan	97.704.000	100%	100%	4 Laporan	224.136.567	50%	37%		
	3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**418.571.790**		**-**		**16.000.000**		**16.000.000**				**16.000.000**				
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48 Unit	68.686.800	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- Unit	-	0%	0%		
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56 Unit	349.884.990	- Unit	-	1 Unit	16.000.000	1 Unit	16.000.000	100%	100%	1 Unit	16.000.000	2%	5%		
	3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**951.776.280**		**158.001.262**		**190.344.000**		**190.344.000**				**348.345.262**				
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	34.343.400	12 Laporan	7.072.000	12 Laporan	7.400.000	12 Laporan	7.400.000	100%	100%	24 Laporan	14.472.000	50%	42%		
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	440.802.180	12 Laporan	75.449.262	12 Laporan	105.264.000	12 Laporan	105.264.000	100%	100%	24 Laporan	180.713.262	50%	41%		
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	476.630.700	12 Laporan	75.480.000	12 Laporan	77.680.000	12 Laporan	77.680.000	100%	100%	24 Laporan	153.160.000	50%	32%		
	3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.119.243.284**		**116.661.585**		**151.925.000**		**151.925.000**				**268.586.585**				

1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x1 00%		12	13
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	84 Unit	862.715.490	22 Unit	85.786.585	22 Unit	106.050.000	22 Unit	106.050.000	100%	100%	44 Unit	191.836.585	52%	22%		
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	40.975.389	7 Unit	8.805.000	7 Unit	8.805.000	7 Unit	8.805.000	100%	100%	14 Unit	17.610.000	50%	43%		
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	32 Unit	145.937.405	8 Unit	22.070.000	8 Unit	22.070.000	8 Unit	22.070.000	100%	100%	16 Unit	44.140.000	50%	30%		
	3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	69.615.000	- Unit	-	- Unit	15.000.000	- Unit	15.000.000	#DIV/0!	100%	- Unit	15.000.000	0%	22%		
	3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**20 %**	**10.654.322.816**	**2,65 %**	**615.253.380**	**5 %**	**479.953.200**	**0,00 %**	**479.953.200**			**%**	**1.095.206.580**				
	3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**			**4.073.535.648**		**-**		**148.501.000**		**148.501.000**				**148.501.000**				
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	48 Laporan	2.320.500.000	- Laporan	-	12 Laporan	84.230.000	12 Laporan	84.230.000	100%	100%	12 Laporan	84.230.000	25%	4%		
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	48 Laporan	1.753.035.648	- Laporan	-	12 Laporan	64.271.000	12 Laporan	64.271.000	100%	100%	12 Laporan	64.271.000	25%	4%		
	3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**			**4.181.390.168**		**251.468.380**		**331.452.200**		**331.452.200**				**582.920.580**				
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	8 Dokumen	931.265.381	2 Dokumen	44.643.000	2 Dokumen	69.056.000	2 Dokumen	69.056.000	100%	100%	4 Dokumen	113.699.000	50%	12%		
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	3.250.124.787	1 Dokumen	206.825.380	1 Dokumen	262.396.200	1 Dokumen	262.396.200	100%	100%	2 Dokumen	469.221.580	50%	14%		
	3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**464.100.000**		**-**												
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	48 Laporan	464.100.000	- Laporan	-	12 Laporan	41.798.000	12 Laporan	41.798.000	100%	100%	12 Laporan	41.798.000	25%	9%		
	3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain**			**1.935.297.000**		**363.785.000**		**-**		**-**				**363.785.000**				
	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabuaten/Kota Lain yang diadakan	400 Ekor	1.935.297.000	120 Ekor	363.785.000	- Ekor	-	- Ekor	-	#DIV/0!	#DIV/0!	120 Ekor	363.785.000	30%	19%		
	3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**12 %**	**20.727.022.182**	**0.21 %**	**26.328.000**	**3 %**	**38.467.000**	**0 %**	**38.467.000**			**%**	**64.795.000**				
	3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**			**559.804.382**		**26.328.000**		**38.467.000**		**38.467.000**				**64.795.000**				
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	12 Laporan	559.804.382	2 Laporan	26.328.000	2 Laporan	38.467.000	2 Laporan	38.467.000	100%	100%	4 Laporan	64.795.000	33%	12%		
	3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**			**20.167.217.800**		**-**												
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	28 Unit	4.751.775.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- Unit	-	0%	0%		
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	24 Unit	13.248.853.800	- Unit	-	2 Unit	125.000.000	2 Unit	125.000.000	100%	100%	2 Unit	125.000.000	8%	1%		
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	8 Unit	2.166.589.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- Unit	-	0%	0%		
	3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**100 %**	**7.782.270.132**	**100 %**	**667.288.900**	**100 %**	**321.074.000**	**- %**	**321.074.000**			**%**	**988.362.900**				
	3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**693.142.632**		**46.097.500**		**46.588.000**		**46.588.000**				**92.685.500**				
	3	27	04	2.01	0001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	288 Laporan	693.142.632	72 Laporan	46.097.500	- Laporan	-	- Laporan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	72 Laporan	46.097.500	25%	7%		
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	- Laporan		- Laporan	-	72 Laporan	46.588.000	72 Laporan	46.588.000	100%	100%	72 Laporan	46.588.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**			**464.100.000**		**51.943.500**		**53.000.000**		**53.000.000**				**104.943.500**				
	3	27	04	2.02	0006	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	48 Laporan	464.100.000	12 Laporan	51.943.500	- Laporan	-	- Laporan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	12 Laporan	51.943.500	25%	11%		
	3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	12 Laporan		- Laporan		12 Laporan	53.000.000	12 Laporan	53.000.000	100%	100%	12 Laporan	53.000.000	100%	#DIV/0!		
	3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**5.000.677.500**		**505.686.400**		**128.486.000**		**128.486.000**				**634.172.400**				
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan Jasa Medik Veteriner	288 Laporan	5.000.677.500	72 Laporan	505.686.400	72 Laporan	128.486.000	72 Laporan	128.486.000	100%	100%	144 Laporan	634.172.400	50%	13%		
	3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**			**1.624.350.000**		**63.561.500**		**93.000.000**		**93.000.000**				**156.561.500**				
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	96 Laporan	1.624.350.000	Laporan	63.561.500	Laporan	93.000.000	Laporan	93.000.000		100%	- Laporan	156.561.500	0%			
	3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**70 %**	**200.556.174**	**16,67 %**	**17,6**	**0,00 %**	**63.830.000**	**0,00 %**	**63.830.000**			**%**	**63.830.000**				
	3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**			**200.556.174**		**-**		**63.830.000**		**63.830.000**				**63.830.000**				
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	800 Ha	200.556.174	- Ha	-	200 Ha	63.830.000	200 Ha	63.830.000	100%	100%	200 Ha	63.830.000	25%	32%		
	3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**80 %**	**4.593.091.885**	**20 %**	**1.576.678.300**	**20 %**	**604.369.200**	**- %**	**604.369.200**			**%**	**2.181.047.500**				
	3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**			**4.593.091.885**		**1.576.678.300**		**604.369.200**		**604.369.200**				**2.181.047.500**				
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Unit	736.962.954	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- Unit	-	0%	0%		

1	2					3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x1 00%		12	13
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4 Unit	3.062.522.572	1 Unit	70.032.500	1 Unit	518.182.000	1 Unit	518.182.000	100%	100%	2 Unit	588.214.500	50%	19%		
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	40 Unit	793.606.359	35 Unit	1.506.645.800	5 Unit	86.187.200	5 Unit	86.187.200	100%	100%	40 Unit	1.592.833.000	100%	201%		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN						**11.804.118.229,00**							**17.943.616.676,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.804.118.229,00**							**17.943.616.676,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**11.804.118.229,00**							**17.943.616.676,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.912.116.036,00**						**-**	**5.967.291.749,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	23.833.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	72.526.855,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	7.833.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		33.388.800,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.780.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		4.591.950,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.945.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		2.262.700,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.455.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		1.796.850,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.470.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		1.796.850,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1.170.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		1.337.655,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	6.180.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		27.352.050,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.046.897.436,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	4.808.100.889,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	4.036.538.436,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		4.796.425.357,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1.484.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		1.706.342,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.020.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		3.327.500,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.505.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		3.979.690,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.350.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		2.662.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	22.760.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	26.224.028,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	11.085.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		12.910.700,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				19 Laporan	11.675.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		13.313.328,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	21.930.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	26.620.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	11.930.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		13.310.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		13.310.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	263.631.600,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	319.825.990,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.067.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		9.406.177,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.923.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		36.695.670,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.470.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		29.415.100,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	42.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		47.862.760,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	11.125.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		22.493.900,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	157.546.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		173.952.383,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	101.900.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	120.042.890,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	17.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		19.698.800,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	84.700.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		100.344.090,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	184.419.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	272.961.480,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.885.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		9.849.400,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	106.199.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		126.418.380,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	69.335.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		136.693.700,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	246.745.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	320.989.617,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	113.550.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		247.419.590,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	10.550.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		11.751.399,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	37.745.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		41.853.628,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	84.900.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		19.965.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.569.085.300,00**						**-**	**3.055.568.711,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	582.507.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	1.168.255.968,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	506.237.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		665.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	76.270.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		502.755.968,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	311.577.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	1.199.185.743,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	170.225.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		267.079.126,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	141.352.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		932.106.617,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	63.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	133.100.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	63.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		133.100.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	612.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	555.027.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				480 Dosis	612.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		555.027.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.849.038.000,00**						**-**	**5.314.088.017,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	86.438.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	160.547.217,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				3 Laporan	86.438.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		160.547.217,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.762.600.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	5.153.540.800,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	1.048.964.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		1.334.025.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 Unit	373.636.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		3.719.515.800,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				2 Unit	340.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**454.000.000,00**						**-**	**2.231.890.012,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	81.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	198.787.512,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				72 Laporan	81.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		198.787.512,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	68.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	133.100.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				12 Laporan	68.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		133.100.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	212.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	1.434.152.500,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				72 Laporan	212.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		1.434.152.500,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	93.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	465.850.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				24 Laporan	93.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		465.850.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**52.288.940,00**						**-**	**57.517.834,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	52.288.940,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	57.517.834,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				200 Ha	52.288.940,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		57.517.834,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**2.967.589.953,00**						**-**	**1.317.260.353,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	2.967.589.953,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	1.317.260.353,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	162.374.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		211.354.814,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	2.630.506.953,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		878.305.870,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				10 Unit	174.709.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		227.599.669,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	J U M L A H							**11.804.118.229,00**							**17.943.616.676,00**	

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KESEHATAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan Ridho-Nya, Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kinerja (Renja) Perangkaat Daerah (PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat disusun. Rencana Kerja disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjelaskan secara rinci rencana capaian indikator pada tiap-tiap program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026, berdasarkan capaian tahun berjalan .

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Tim Bappeda Kabupaten Lampung Barat serta Tim penyusun Renja PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang telah memberi arahan dan masukan dalam penyusunan Renja PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

Akhirnya kami berharap Renja ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Liwa, 22 Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat

Dr. WIDYATMOKO KURNIAWAN, Sp.B
Pembina TK I. NIP 19700626 200501 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023..... 7
A. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang telah memenuhi target kinerja di tahun 2023..... 7
B. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2023..... 10
C. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang di rencanakan tahun 2023..... 12
D. Faktor-faktor pendukung dan penghambat tercapainya target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023..... 13
E. Implikasi yang ditimbulkan terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat..... 13
F. Kebijakan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat..... 13
2.2 Analisis Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat..... 17
A. Capaian SDGs Sektor Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat 17
B. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023..... 19
C. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023..... 20

D. Analisa Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK)…….....
. 24
E. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023…… 25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023..... 33
A. Hal kritis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat……..… 33
B. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat……..... 34
C. Dampaknya terhadap capaian SPM dan SDGs…….. 34
D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah…… 34
E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024…….. 35
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD…….. 35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…… 41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional……..…….....
43
A. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi 43
B. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda..... 44
C. Peningkatan pengendalian penyakit, peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut..... 44
D. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)..... 45
E. Penguatan Sistem Kesehatan..... 45

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat..... 53
A. Tujuan..... 53
B. Sasaran..... 53
3.3 Program dan Kegiatan..... 53
A. Faktor - Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadapa Rumusan Program Dan Kegiatan 53

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 76

BAB V PENUTUP 115

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.1	T-C.29.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023…….	14
Tabel 2.2.1	Capaian SDGs Sektor Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023...	17
Tabel 2.2.2	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Tahun 2023.....	19
Tabel 2.2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama terhadap target RPJMD 2018 - 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	20
Tabel 2.2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	22
Tabel 2.2.5	TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat……	25
Tabel 2.4.1	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi /Kabupaten/Kota Lampung Barat……	35
Tabel 2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Barat……	40
Tabel 3.2.1	Indikator Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023……..	52
Tabel 3.2.1	Capaian SDGs Sektor Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.....	53
Tabel 3.3.2	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Tahun 2023.....	55
Tabel 3.3.3	TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat…….....	62
Tabel 4.1.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat TA 2025……..	82
Tabel 4.1.2	Detail Sub Kegiatan Tahun 2025……..	100

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh PD sesuai tugas, kewenangan dan fungsinya guna mengoperasionalkan Renja PD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja PD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah sebagai syarat untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja PD memiliki fungsi yang sangat mendasar dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah daerah. Renja PD memiliki hubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan tersebut.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting, penyelenggaraan tugas dan fungsi PD itu sendiri sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal Rancangan Pembangunan Daerah (RPD). Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
3. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RPD, serta

merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

4. Rumusan program/kegiatan/subkegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
5. Program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RPD dan Renstra PD.

Topografi Kabupaten Lampung Barat bervariasi mulai dari dataran rendah hingga tinggi (perbukitan dan pegunungan). Secara astronomis Kabupaten Lampung Barat terletak pada posisi $103^0$35’08”-$104^0$33’51” Bujur Timur dan antara $4^0$47’16”-$5^0$56’42” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 2064.4 $km^{2.}$ Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Lampung Barat memiliki batas-batas : Utara – Kabupaten OKU Selatan, Barat – Kabupaten Pesisir Barat, Selatan – Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus, Timur – Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan. Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 15 Kecamatan berdasarkan Undang-undang no.22 tahun 2013 daratan masing-masing kecamatan, yaitu : Balik Bukit (175,63 km^2), Sukau (223,10km^2), Lombok Seminung (22,40 km^2), Batubrak (261,55 km^2), Belalau (217,93 km^2), Batu Ketulis (203,70 km^2), Suoh (170,77 km^2), Bandar Negeri Suoh (170,85 km^2), Pagar Dewa (110,19 km^2), Sekincau (118,28 km^2), Sumber Jaya (195,38 km^2), Way Tenong (116,67 km^2), Air Hitam (76,23 km^2), Gedung Surian (87,14 km^2), serta Kebun Tebu (14,58 km^2). Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Lampung Barat : 101m-500m : 27,2%, 501m-1000m : 46,9%, 1,001m : 25,9%.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat khususnya di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat,

untuk melaksanakan tugas tersebut maka diperlukan sebuah Rencana Strategis Kesehatan serta Rencana Kerja Dinas Kesehatan.

Sasaran Renstra Dinas Kesehatan periode tahun 2023-2026 adalah Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Kematian Ibu/100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Neonatal/1.000 Kelahiran Hidup, Persentase Balita dibawah Usia Dua Tahun (Baduta) Stunting, Persentase Case Detection Rate (CDR) TBC Paru dan Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular (PTM).

Renja PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 merupakan sebuah dokumen acuan yang menjadi arah pelaksanaan sebuah kegiatan di tahun 2023. Renja ini memuat program-program yang merupakan wujud nyata dari strategi dalam mencapai sebuah tujuan yang telah di tetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Renja mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN /5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan;

24. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
26. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020 - 2024;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
28. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tahun 2022 Tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

    Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangungan Daerah Tahun 2023 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja yaitu sebagai upaya untuk penyampaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD untuk pencapaian target pembangunan kesehatan yang terinci dalam indicator masing-masiong kegiatan sesuai tahapan waktu

pencapaiannya Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan Renja adalah sebagai panduan dalam penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana anggaran, target indikator ouput dan outcome setiap kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. **PENDAHULUAN**

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dari penyusunan dokumen Renja.

BAB II. **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan OPD dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini mendeskripsikan tentang tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai di tahun 2025.

BAB IV. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan seluruh rencana kerja untuk masing-masing sub kegiatan yang telah diindentifikasi dalam percepatan pencapaian indikator kinerja OPD pada tahun 2025 berikut proyeksi sumber pendanaan untuk masing-masing sub kegiatan.

BAB V. **PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

LAMPIRAN

Lampiran berisikan hal-hal yang berkaitan dengan capaian Rencana Kerja Tahun sebelumnya dan Rencana Srategis Tahun 2023-2026 serta Perkiraan Maju Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah perubahan sebanyak Lima Program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 25 kegiatan, jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 59 subkegiatan. Alokasi dana Tahun 2023 untuk Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp. **151.553.511.733** (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Lima Puluh Lima Tiga Ratus Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari alokasi belanja daerah untuk Dinas Kesehatan beserta UPTD BLUD Puskesmas sebesar **Rp. 105.944.814.401** (Seratus Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. **122.882.196.460** (Seratus Duapuluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Pulauh Enam Empat Ratus Enam Puluh Rupiah.) atau 89,55.%. Adapun capaian realisasi subkegiatan sebagai berikut;

A. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja di tahun 2023

   Terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan.) subkegiatan yang realisasinya telah mencapai 100%, antara lain adalah;

   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja luaran berupa 11 dokumen;
   2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian 1 Dokumen
   3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja 1 Dokumen
   4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2021 memiliki indikator berupa 1 Dokumen;
   5. Koordinasi-Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2021 telah terealisasi 1 dokumen;
   6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja tercapai 2 Dokumen

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 telah terealisasi 1 laporan;
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian realisasi fisik 530 orang
9. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan capaian realisasi fisik 1 Dokumen
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan capaian realisasi fisik 1 Dokumen
11. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah terealisasi 1 Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD;
12. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan telah terealisasi sebanyak 5 Dokumen Lapoan Tanggapan Pemeriksaan
13. Koordinasi & Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/TW/Semesteran SKPD Tahun 2023 terealisasi 18 laporan keuangan;
14. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran terealisasi;
15. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian realisasi 21 Dokumen Laporan
16. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2023 dengan indikator Penetapan Kinerja Pegawai dan Pelaksanaan Monev dapat

dilaksanakan;

17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor Tahun 2023 terrealisasi jenis alat listrik sesuai dengan yang direncanakan sebanyak 9 paket;
18. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun 2023 dengan indikator barang cetakan dan penggandaan 9 paket;
19. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 dengan indikator Media Massa Harian yang berlangganan dapat dilaksanakan;
20. Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2023 indikator berupa pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu & Pelaksanaan Rapat Rutin tercapai;
21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2023 tercapai;
22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2023 dengan indikator jumlah laporan surat keluar dan masuk dapat terlaksana sesuai target;
23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023 terlaksana dengan indikator rek listrik, telephon dan air yang telah dibayarkan sesuai tagihan.
24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2023 dengan indikator berupa laporan pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dapat dilaksanakan dan dapat dibayarkan sesuai yang direncanakan;
25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Tahun 2023, indikator berupa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 28 unit telah tercapai.
26. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2023 dengan indikator Jumlah Gedung Kantor Yang Direnovasi/rehabilitasi sebanyak 7 unit gedung dapat dilaksanakan;
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 15 unit
28. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tahun 2023 dengan indikator Jumlah Puskesmas menyelenggarkan Pelayanan & Penunjang Pelayanan BLUD sebanyak 15 Puskesmas;
29. Rehabiltasi dan Pemeliharaan Puskesmas dengan indikator Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 9 unit;
30. Rehabilitasi & Pemeliharaan Faskes Lain terdapat 1 unit Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi;

31. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 dengan indikator Jumlah kendaraan diadakan, Jumlah Sarana Pendukung lainnya diadakan (Sumur Bor), dan Jumlah Sarana Pendukung lain (Generator) telah terealisasi sesuai rencana;
32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2023 dengan indikator Jumlah Ibu Hamil mendapatkan Paket Persalinan telah terealisasi;
33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Tahun 2023Jumlah Peserta Mengikuti Pertemuan Evaluasi Program Yankes Usia Produktif, Jumlah peserta mengikuti pertemuan Cerdik Jiwa, Jumlah buku saku FR PTM telah terlaksana.
34. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas & evaluasi program TBC, Jumlah Monev kegiatan TBC ke Puskesmas, Jumlah Kegiatan konsultasi program & pengambilan logistik telah dilakukan pada taahun 2023 sesuai rencana yang ditetapkan;
35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2023 dengan indikator Jumlah Petugas mengikuti Peningkatan kapasitas & evaluasi program P2 PMS & HIV, Jumlah Monev IMS dan HIV di Puskesmas dan Jumlah kegiatan konsultasi program ke Provinsi Lampung, telah terealisasi;
36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Tahun 2023 dengan indikator Jumlah Pekon yang sudah ODF, dan Jumlah Pekon dilaksanakan Pemicuan 5 Pilar STBM;
37. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Tahun 2023 dengan indikator jumlah media Cetak melaksanakan promkes, Jumlah radio melakukan promkes, Jumlah TV daerah melakukan promkes, dan jumlah cetak (benner, x banner, stiker dan poster) promkes telah dilaksanakan sesuai rencana kerja;
38. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Tahun 2023 dengan indikator Jumlah pekon mengikuti lomba asman dan toga dan pelatihan kader kestrad telah dilakukan sesuai rencana;
39. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Tahun 2023 dengan indikator Jumlah pelayanan kesehatan calon jamaah haji, dan Jumlah Poskotis Yankes Hari Raya telah tercapai sesuai target;
40. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan & Pasca Krisis Kesehatan, Penyelenggaraan Kab / Kota Sehat Tahun 2023 dengan indikator

Jumlah penyediaan logistik penanggulangan krisis kesehatan, Jumlah peserta mengikuti pertemuan krisis Konsultasi, Monev ke puskesmas, Jumlah buku Panduan Krisis dan Buku saku telah tercapai;

41. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota Tahun 2023 dengan indikator jumlah Puskesmas yang melakukan penilaian reakreditasi;
42. Pengelolaan Data & Informasi Kesehatan Tahun 2023 dengan luaran dokumen Profil Dinas Kesehatan Lampung Barat;
43. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab Tahun 2023 dengan indikator SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya tercapai sesuai target;
44. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan IRT dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi. Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh IRT Tahun 2023 dengan indikator: Jumlah Pelaku Usaha IRTP diberikan bimtek dan Jumlah sarana IRTP dikendalikan dan diawasi dalam rangka pre market telah dilakukan;
45. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan dan minuman IRT yang Beredar & Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Tahun 2023 dengan indikator Jumlah sarana PIRT diawasi dalam rangka post market 2. Jumlah Sampel PIRT yang diuji telah dilaksanakan sesuai rencana dan mencapai target.

B. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2023

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 21 (dua puluh satu) subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai mencapai 100% yaitu :

1. kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN khususnya pembayaran insentif tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan COVID-19 dikarenakan turunnya kasus COVID-19 dan perubahan cara perhitungan insentif tenaga Kesehatan ASN;
2. kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai dikarenakan biaya yang ditawarkan tidak sesuai dengan pagu dana yang tersedia;

3. kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dikarenakan Narasumber kegiatan berasal dari internal pemerintah kabupaten Lampung Barat sehingga tidak diberikan honorarium;
4. kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dikarenakan perbedaan antara harga yang tersedia dengan standar satuan harga pada DPA;
5. kegiatan Pengadaan Obat Vaksin dikarenakan terlambat dan tidak tersedianya beberapa jenis komponen barang pada e katalog dan perbedaan antara harga yang tersedia dengan standar satuan harga pada DPA;
6. kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dikarenakan terlambat dan tidak tersedianya beberapa jenis komponen barang pada e katalog dan perbedaan antara harga yang tersedia dengan standar satuan harga pada DPA;
7. kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dikarenakan perbedaan peraturan mengenai pelayanan Jaminan Persalinan sehingga menyebabkan dana tidak dapat terserap;
8. kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana/berpotensi bencana dikarenakan turunnya kasus Covid 19 sehingga tracing yang dilakukan juga menurun dan perbedaan antara harga yang tersedia pada beberapa belanja dengan standar satuan harga pada DPA;
9. kegiatan Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat dikarenakan perbedaan antara harga yang tersedia pada beberapa belanja pada hasil survey penetapan Harga Perkiraan Sementara proses pengadaan barang dan jasa dengan standar satuan harga pada DPA;
10. Penilaian dan Penyelenggaraan Kab / Kota Sehat Tahun 2023 tidak terealisasi karna Kabupaten Lampung Barat Tidak Masuk dalam Kualifikasidan Kategori kabupaten/kota sehat tahun 2023;
11. Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan dikarenakan menurunnya kasus Covid 19 dan Kejadian Luar Biasa lainnya sehingga kegiatan surveilans yang dilakukan juga menurun;
12. kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular dikarenakan terlambatnya pelaksanaan kegiatan akibat penataan DAK Non Fisik oleh Kementerian Kesehatan dan pandemi Covid 19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan;

13. kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dikarenakan menurunnya jumlah kepesertaan JKN PBI Pusat dan Daerah (45.357 orang) sehingga mengakibatkan nilai kapitasi yang diterima oleh Puskesmas juga menurun;
14. kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dikarenakan Laboratorium RSUD AU telah dapat melakukan pemeriksaan PCR dan turunnya kasus Covid 19;
15. kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas dikarenakan realisasi pemakaian listrik dan telephone pada Puskesmas dibawah pagu yang telah dianggarkan pada DPA;
16. kegiatan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya dikarenakan terlambatnya pelaksanaan kegiatan akibat Penataan DAK Non Fisik dan efektifitas perjalanan dinas distribusi obat vaksin dan bahan habis pakai dikarenakan dilakukan bersamaan dengan distribusi logistik penanganan Covid 19;
17. kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dikarenakan ditiadakannya pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan selama masa pandemi Covid 19;
18. kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu dikarenakan menurunnya kasus Covid 19 dan selesainya masa pandemi sehingga belanja pelayanan perawatan pasien Covid 19 tidak terealisasi seluruhnya;
19. kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar dikarenakan turunnya kasus Covid 19 dan perubahan cara perhitungan insentif tenaga Kesehatan Non ASN;
20. kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dikarenakan tidak terpenuhinya kuota tenaga Kesehatan dengan perjanjian kerja bersumber dana DAK Non Fisik dan premi asuransi Kesehatan yang telah dianggarkan untuk tenaga Kesehatan dengan perjanjian kerja tidak dapat direalisasikan karena beberapa tenaga Kesehatan masih memiliki Asuransi Kesehatan sendiri (JKN KIS atau dibayarkan oleh pihak ketiga lainnya);
21. kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan terlambatnya pelaksanaan kegiatan akibat penataan DAK Non Fisik oleh Kementerian Kesehatan dan pandemi Covid 19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan;
22. kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota.

C. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang di rencanakan tahun 2023

Realisasi program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 tidak ada yang melebihi 100% dan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan

D. Faktor-faktor pendukung dan penghambat tercapainya target kinerja tahun 2023

1. Faktor pendukung

   Adanya komitmen bersama yang kuat dari pimpinan sampai penanggung jawab program/kegiatan/subkegiatan untuk melaksanakan program/kegiatan /subkegiatan yang telah disusun sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah disetujui.

2. Faktor penghambat

   Adanya pandemi covid-19 mengakibatkan terbatasnya kegiatan di luar ruangan seperti pertemuan dan mengumpulkan Puskesmas untuk kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

   Salah satu subkegiatan tidak mencapai target adalah pemberian insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan covid-19, Hal ini disebabkan adanya penurunan kasus covid-19 pada semester kedua tahun 2023 sehingga insentif yang dibayarkan disesuaikan dengan realisasi jumlah penemuan kasus.

E. Implikasi yang ditimbulkan terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah

Terhambatnya cakupan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat di tingkat Kabupaten sampai tingkat Puskesmas.

F. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab

Program/kegiatan/subkegiatan yang belum tercapai pada Tahun 2023 tetap diajukan sebagai program/kegiatan/subkegiatan di dalam Renja PD pada tahun berikutnya.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2021 / Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=7/6	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**82**	**poin**		**81,5**	**poin**	**81,5**	**100%**	**81,6**	**81,5**	**poin**	**82**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disediakan**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	**100**	100%	100	**325**	**%**	**81**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	**100**	100%	100	**325**	**%**	**81**
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentese Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**0**	**%**	**0**		0	**25**	**%**	**25**
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	**100**	100%	100	**325**	**%**	**81**
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**%**	**100**	100%	100	**325**	**%**	**81**
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	**100**	**%**	**100**	**0**	**%**	**0**		0	**25**	**%**	**25**
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dan disediakan**	**100**	%	**100**	**100**	%	**100**	100%	100	**400**	%	**100**
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**100**	%	**100**	**0**	%	**0**		100	**25**	%	**25**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD**	**17**	unit kerja	**0**	**16**	unit kerja	**16**	100%	16	**64**	unit kerja	**16**

1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**89**	**poin**							**87**	**poin**	**87**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Yankes UKM UKP**	**100**	%	**100**	**100**	%	**100**	100%	100	**400**	%	**100**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SPM**	**95**	%		**76**	%	**76**	100%	76	**162**	%	**54**
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**12**	dokumen		**4**	dokumen	**4**	100%	4	**14**	dokumen	**5**
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan penerbitan izin**	**100**	%							**40**	%	**40**
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standart**	**75**	**%**		**90**	**%**	**90**	100%	90	**360**	**%**	**90**
1.02.03.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**12**	dokumen							**6**	dokumen	**50**
1.02.03.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**85**	%		**100**	%	**100**	100%	100	**350**	%	**88**
1.02.03.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	%	**100**	**100**	%	**100**	100%	100	**300**	%	**75**
1.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**90**	**%**	**90**	**75**	**%**	**75**	100%	75	**290**	**%**	**73**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mendapatkan penerbitan izin**	**31**	unit							**29**	unit	**50**

1.02.03.2.02	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**100**	%		**100**	%	**100**	100%	100	**310**	%	**78**
1.02.03.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**100**	%									
1.02.03.2.05	**Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan**	**Persentase Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan**	**100**	%									
1.02.03.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga**	**Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga**	**100**	%		**100**	%	**100**	100%	100	**300**	%	**75**
1.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Keluarga berPHBS**	**50**	%		**23,8**	%	**24**	100%	23,8	**71**	%	**24**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	%		**100**	%	**100**	100%	100	**300**	%	**75**
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota**	**Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota**	**100**	%		**100**	%	**100**	100%	100	**300**	%	**75**
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	%		**100**	%	**100**	100%	100	**300**	%	**75**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja berisikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja yang secara sistematis menggambarkan tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah yang telah diambil. Selain itu, di bab ini juga dijelaskan tentang capaian realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja di setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Di tahun 2023 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Untuk mengukur capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil kinerja, evaluasi dan juga pengukuran kinerja dilakukan dengan metode penghitungan berdasarkan capaian kinerja terhadap target per masing-masing sasaran dengan cara kuantitatif.

A. Capaian SDGs Sektor Kesehatan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan global yang baru menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Sustainable Development Goals (SDGs) disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 Septermber 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Dalam mendukung capaian SDGs Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 memiliki capaian sebagai berikut;

Tabel 2.2.1
Capaian SDGs Sektor Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 (tahun 2024 belum ada data)

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2022)	Tahun 2023		Target 2025
					Target	Capaian	
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun							
2.1.1(a)	Prevalensi Balita Kurang Gizi (Underweight)	Dinas Kesehatan	Persen	6,83%	7,80%	10,94 %	7,5
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula							

2.2.1*	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	Dinas Kesehatan	Persen	10,97	24	10,94	22
2.2.1(a)	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	Dinas Kesehatan	Persen	5,68	7,53	5,12	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/*wasting* (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	Persen (*Wasting*)	5,43	7,8	7,5	7,5
			Persen (*Obesitas*)	-	-	-	-
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	Persen	14,32	42	14,95	39
2.2.2(b)	Persentase remaja yang mengkonsumsi *Fe* (zat besi)	Dinas Kesehatan	Persen	82,95	52	92,2	54
2.2.2(c)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	Persen	76,75	45	84,66	50
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup							
3.1.1(a)	Kasus Kematian Ibu	Dinas Kesehatan	Kasus	4	6	8	6
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Persen	95,22	95	94,29	96
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	93,43	93	94,03	94
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000							
3.2.1(a)	Kasus Kematian Balita	Dinas Kesehatan	Kasus	16	23	25	21
3.2.2(a)	Kasus Kematian Neonatal	Dinas Kesehatan	Kasus	21	23	20	21
3.2.2(b)	Kasus Kematian Bayi	Dinas Kesehatan	Kasus	3	23	25	21
3.2.2(c)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 Persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Persen	93,5	95	95,3	95
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3.3.2(a)	Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/*case notification rate*) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Persen	69,090	172,00	74,8	172
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	API per	<1	<1	0	<1

			1000 penduduk				
3.3.3(a)	Angka kesakitan positif malaria (API) per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	API per 1000 penduduk	0	0	0	<1
3.3.5(c)	Angka kesakitan (*incidence rate*) DBD per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Incidence Rate	31,434	<49	2,6	<49
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan							
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Kabupaten /Kota	-	-	-	-
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang							
3.8.1(a)	*Unmet need* pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen				
3.8.2(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen		100	78,55	100
3.8.2(b)	Rasio Puskesmas	Dinas Kesehatan	Persen	1,4707	1,4649	1,00	1,00
3.8.2(c)	Jumlah Apotek PRB (Program Rujuk Balik)	Dinas Kesehatan	Apotek	0	1	2	2
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *the Doha Declaration* tentang *the TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua							
3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	90,86	100

B. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkan dengan target yang ditetapkan sebelumnya. SPM pelayanan dasar kesehatan tahun 2023 yang terdiri dari 12 indikator telah dilaksanakan yang hasilnya dapat dilihat pada table 2.2

Tabel 2.2.2
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal			Realisasi	KET
	Indikator	Nilai Nasional	Nilai Daerah		
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	100	98.64	Profil 2022
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan	100	100	24.48	Profil
	pelayanan persalinan sesuai standar				2022
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	79.53	Profil 2022
4	Setiap balita mendapatkan yankes sesuai standar	100	100	100	Profil 2022
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	99.93	Profil 2022
6	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	84.08	Profil 2022
7	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	99.32	Profil 2022
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	99.13	Profil 2022
9	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	97.26	Profil 2022
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	75.78	Profil 2022
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	99.99	Profil 2022
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	100	87.09	Profil 2022

Jika dilihat dari tabel capaian SPM diatas terlihat bahwa 12 indikator yang dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan belum mencapai target yang telah di tetapkan.

C. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama terhadap target RPJMD 2018 - 2023
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	67,84	67,65	99,71
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kelahiran Hidup	110	38.04	165
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kelahiran Hidup	3,9	2.28	142
4	Prevalensi Balita Stunting	%	10,94	5.29	152
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	88.61	103%

Sesuai RPJPMD 2018-2023 dan reviu Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023, sehingga Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam pencapaian IKU yang capaianya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pencapaian Usia Harapan Hidup sebesar 99,71% dengan kategori ***Kinerja Sangat Baik***, meskipun jika dilihat nilai capaian tersebut belum sepenuhnya seratus persen
2. Pencapaian Target Angka Kematian Ibu di bawah 110/100.000 KH 165 % masuk dalam kategori ***Kinerja sangat baik*** menjadi indkator bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di tahun 2023 terkait pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan, di Tahun 2023 terdapat 1 kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung Barat.
3. Pencapaian target Angka Kematian Bayi sesuai target RPJMD adalah sebesar 3,9/1.000 KH. Meskipun jika disandingkan dengan Renstra Dinas Kesehatan terdapat perbedaan indicator yang ditetapkan yaitu Reviu Renstra Dinas Kesehatan menetapkan Angka Kematian Neonatus sebagai IKU. Hal ini dilakukan mengingat sebagian besar kematian Bayi (0-12 bulan) terjadi pada masa neonates (0-28 hari) sebagai percepatan upaya untuk menekan, mencegah kematian dengan deteksi, upaya preventif, keterpaduan pelaksanaan dan dengan dukungan penyediaan sarana – prasarana pelayanan kesehatan dalam pencegahan kematian

bayi. Sepanjang tahun 2023 jumlah kelahiran hidup sebanyak 5.258.orang dengan kasus kematian sebanyak 10 kasus dari seluruh kematian bayi, sehingga secara statistik AKB tercatat sebesar 1,1 / 1.000 KH Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target. Kasus kematian bayi di Lampung Barat secara keseluruhan terjadi pada periode neonatus atau usia 0-28 hari dengan faktor penyebab antara lain Asfiksi, BBLR, kelainan kongenital, aspirasi dan pneumonia sebagai penyebab kematian. Pencapaian indikator AKB sebesar 142, % termasuk dalam

Kategori Kinerja Sangat Baik

Indikator ke-4 yaitu Persentase kasus gizi buruk ditangani tidak di

temukan kasus di tahun 2023 Peran serta seluruh komponen internal dan eksternal memiliki dampak yang signifikan dalam penanganan kasus gizi buruk dimana sektor eksternal yaitu pemerintahan pekon ikut berperan aktif dalam pemantauan dan juga pemberian intervensi terkait temuan stunting di wilayahnya yang di buktikan dengan penganggaran intervensi terkait kesehatan minimal 8 % dari jumlah pendanaan APBDes.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut;

Tabel 2.2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kelahiran Hidup	110	38,04	165
2	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Kelahiran Hidup	3,9	2,28	142
3	Persentase Baduta Stunting	%	10,49	5,29	152
4	Persentase CDR (Case Detection Rate)	%	71	43,9	61,11
5	Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	%	24,8	34	129

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Target Angka Kematian Ibu Tahun 2023 adalah 110/100.000 KH. Pada Tahun

2023 AKI Kabupaten Lampung Barat ada 145/100.000 KH dengan nilai capaian 165%, berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 maka kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat masuk dalam ***Kategori Kinerja Sangat Baik***.

2. Target Angka Kematian Neonatal tahun 2023 sesuai RPJMD adalah sebesar 4,1/1.000 KH. Untuk tahun 2023 nilai capaian AKN Kabupaten Lampung Barat adalah 3,9/1.000 KH dengan nilai capaian 142% berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 maka kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat masuk dalam ***Kategori Kinerja Sangat Baik.***
3. Persentase Baduta Stunting Tahun 2023 berdasarkan RPJMD memiliki nilai target 24 %. Berdasarkan nilai Realisasi tahun 2023 Persentase Baduta Stunting Tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat adalah 5,29 dengan nilai capaian 152%, berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 maka kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat masuk dalam ***Kategori Kinerja Sangat Baik.***
4. Persentase CDR (Case Detection Rate) TB Tahun 2023 adalah 71%. Pada Tahun 2023 capaian Persentase CDR TB Kabupaten lampung Barat adalah 43,39 dengan nilai capaian 61,11 %, berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 maka kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat masuk dalam ***Kategori Kinerja Kurang.***
5. Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Tahun 2023 adalah 34%. Pada Tahun 2023 realisai angka kesakitan penyakit tidak menular Kabupaten Lampung Barat adalah 24,08 dengan nilai capaian 129,18 %, berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 maka kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat masuk dalam ***Kategori Kinerja Sangat Baik.***

Grafik 2.2.1
Target dan Realisasi Pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan

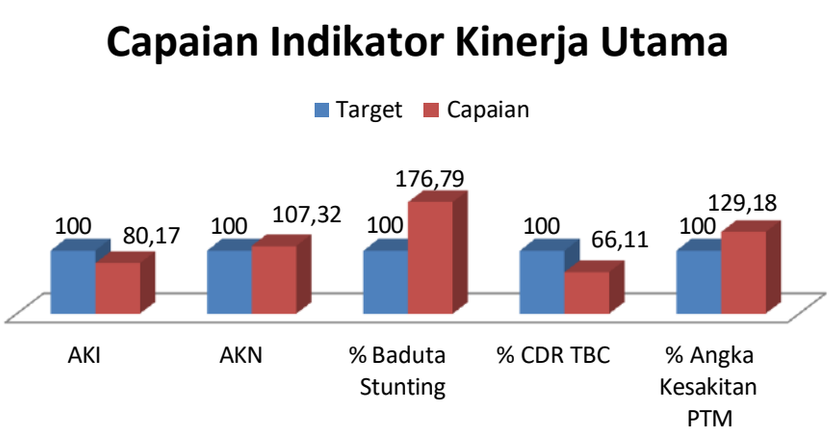

Tabel TC 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP OPD	82	poin	81,5	81,5	81,7	81,8	81,5	81,5	81,7	81,8	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disediakan	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	1	1	100	100	1	1	100	100	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentese Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	1	1	100	100	1	1	100	100	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	1	1	100	100	1	1	100	100	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1	1	100	100	1	1	100	100	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100	%	0	0	100	100	0	0	100	100	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dan disediakan	100	%	1	1	100	100	1	1	100	100	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	%	1	1	100	100	1	1	100	100	

1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD	17	unit kerja	15	15	16	16	15	15	16	16	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	Poin	100	100	86	87	100	100	86	87	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Yankes UKM UKP	100	%	54	54	100	100	54	54	100	100	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SPM	95	%	1	1	80	85	1	1	80	85	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12	dokumen	45	45	3	3	45	45	3	3	

1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan penerbitan izin	100	%	0	0	100	100	0	0	100	100	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standart	75	%	90	90	60	65	90	90	60	65	
1.02.03.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	12	dokumen	100	100	3	3	100	100	3	3	
1.02.03.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	85	%	100	100	70	75	100	100	70	75	

1.02.03.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	90	%	65	65	75	80	65	65	75	80	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mendapatkan penerbitan izin	31	Unit			28	29			28	29	

1.02.03.2.02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	%	150	150	100	100	150	150	100	100	
1.02.03.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.02.03.2.05	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Persentase Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	100	%	0	0	100	100	0	0	100	100	

1.02.03.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	100	%	0	30	100	100	0	30	100	100	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga berPHBS	50	%	82	68	35	40	82	68	35	40	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	175	183	100	100	175	183	100	100	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota	100	%	60	62	100	100	60	62	100	100	

1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	0	0	100	100	0	0	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan melakukan pemetaan atas isu-isu penting yang menjadi fokus penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut agar tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dapat tercapai dengan optimal, efektif dan efisien. Pada periode saat ini, adanya pandemi covid-19 adalah faktor yang paling berpengaruh dalam pencapaian target kinerja yang diharapkan. Namun demikian kondisi-kondisi lain seperti sosial dan budaya, stigma masyarakat atas kasus-kasus kesehatan tertentu serta kondisi politik juga merupakan hal penting yang harus di antisipasi.

A. Hal kritis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut;
   1. Masih tingginya kasus kematian Ibu dan Bayi pada tahun 2023;
   2. Rendahnya cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2023;
   3. Rendahnya cakupan skrining kesehatan sesuai standar pada masyarakat usia 15 s.d. 59 tahun pada Tahun 2023;
   4. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar pada masyarakat usia lanjut pada Tahun 2023;
   5. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan hipertensi Tahun 2021;
   6. Masih adanya Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita dan anak baduta tahun 2023;
   7. Masih adanya kasus anemia pada ibu hamil tahun 2023;
   8. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan utamanya yang berkaitan dengan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat akibat masih adanya pandemi Covid-19;
   9. Konsentrasi saat ini lebih pada pencegahan, penanganan & penanggulangan Covid-19;
   10. Adanya penonaktifan kartu peserta JKN PBI Pusat dengan jumlah yang cukup signifikan;
   11. Situasi Politik dalam masa transisi sehingga dapat mempengaruhi kebijakan publik;
   12. Penambahan UPT Dinas Kesehatan Lampung Barat yaitu RSUD Alimuddin Umar pada tahun 2022.

B. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan fungsi Dinas Kesehatan.
   1. Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan.
   2. Keterbatasan rekrutmen tenaga untuk memenuhi kebutuhan.
   3. Akses pelayanan terhadap masyarakat yang harus terus diperbaiki.
   4. Dukungan sistem informasi komunikasi yang belum merata di seluruh wilayah

kabupaten.

5. Upaya promotif dan preventif yang belum optimal pada penyakit menular dan tidak menular.
6. Di Kabupaten Lampung Barat hanya ada satu Puskesmas dengan layanan PONED.
7. Terbatasnya Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

C. Dampaknya terhadap capaian SPM dan SDGs

Terkait adanya masalah dan hambatan yang ada, mengakibatkan capaian indikator SPM dan SDGs di Kabupaten Lampung Barat belum optimal.

D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Indikator SPM dan SDGs menjadi prioritas yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui kebijakan terkait anggaran serta komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun peluang yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat antara lain;

1. Program pendidikan beasiswa kedokteran;
2. Program Ambulance Hebat di seluruh Kecamatan;
3. Program pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan tenaga kontrak daerah, pegawai tidak tetap daerah dan perawat pekon;
4. Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat telah terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI dengan status Puskesmas Rawat Inap;
5. Puskesmas telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Tahun 2023;
6. Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi standar sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai Permenkes 43 Tahun 2019;
7. Pelayanan Kesehatan pada wilayah terpencil dan perbatasan;
8. Dukungan fasilitas Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi;
9. Dukungan Anggaran DAK Fisik dan Non Fisik;
10. Jaminan JKN PBI Luar Kuota bersumber APBD;
11. Di Kabupaten Lampung Barat terdapat dua FKRTL Tipe C yaitu RS milik Pemerintah RSUD Alimuddin Umar dan RS swasta RSIA Bunda.

E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2023

1. Penguatan Pelayanan BLUD melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Peningkatan Cakupan Layanan Kesehatan, Penambahan layanan PONED,

Rencana Pembangunan Rumah Sakit Pratama sebagai upaya mendekatkan akses layanan rujukan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

3. Pemenuhan kebutuhan SDMK dan Peningkatan mutu dan kompetensi SDMK melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Pemenuhan obat essensial dan alat kesehatan sesuai standar melalui Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
5. Peningkatan kegiatan Promotif dan preventif melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil telaahan kebutuhan-kebutuhan pada saat proses penyusunan RKPD dilaksanakan. Telaahan kebutuhan dimaksud berupa indikator kinerja yang diharapkan, program dan kegiatan yang akan diusulkan serta kebutuhan pagu dana indikatif yang diperlukan.

Telahan kebutuhan dilakukan berdasarkan adanya masukan dan saran dari hasil review RPD dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah oleh Kementerian PAN RB, Review Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda, Hasil Musrenbang dan juga kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerinthn Kab. /Kota**	**Lampung Barat**	**Jumlah Bidang/Urusan dilaksanakan**	**1**	**110.730.211.601**	**Program Penunjang Urusan Pemrintahn Kab /Kota**	**Lampung Barat**	**Nilai SAKIP OPD**	**81,7**	**110.730.211.601**	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun & disediakan	100%	202.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**11**	202.000.000	
								Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	5		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	56.514.439.321	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**665**	56.514.439.321	
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**2**		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**19**		
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**2**		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentese Pelaksanaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	23.792.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**27**	23.792.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	131.185.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	131.185.500	
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas-Fungsi Mengikuti Pendidikan & Pelatihan	12		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaa Administrasi Umu Perangkat Daerah	100%	1.461.120.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	**10**	1.461.120.500	
								Jumlah Paket Peralatan & Perlengkapan Kantor Disediakan	**4**		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**1**		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**1**		
								Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan Disediakan	**9**		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**9**		
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**13**		

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**24**		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	116.225.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3	116.225.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dan disediakan	100%	874.961.080	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dan disediakan	**40**	874.961.080	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	4.446.374.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	**121**	4.446.374.000	
9	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD	16 Unit	46.960.114.200	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD	16 Unit	46.960.114.200	
II	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Lampung Barat**	**Persentase Pemenuhan UKP dan UKM**	**100%**	**173.676.299.129**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Lampung Barat**	**Persentase Capaian SPA Puskesmas**	**86**	**173.676.299.129**	
								Persentase Puskesmas terakreditasi madya	**100**		
								Persentase FKTP dan FKTL melaksanakan SISRUTE	**100**		
								Persentase Masyarakat memiliki JKN	**70**		
								Persentase persalinan di fasyankes	**95**		
								Prevalensi Balita Wasting	**7**		
								Persentase capaian 5 pilar STBM	**30**		
								Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular	**78**		
								Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular	**78**		
								Persentase Capaian IDL	**100**		
								Persentase Puskesmas melaksanakan SIK	**100**		
								Akreditasi RSUD AU Utama	**100**		
								Persentase Capaian SPA RSUDAU	**58**		
								Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	**100**		
								BOR RSUDAU	**40**		
								ALOS RSUD AU	**4**		

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Tersedianya Obat dan BHP RSUDAU**	**100**			Kegiatan Hasil Musrenba
								Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana RSUD AU	**100**			
								Persentase Puskesmas mendapatkan penyediaan dan pemeliharaan SPA	**100**			
								Persentase ketersediaan rasio tempat tidur RS/1000 penduduk	**100**			
								Persentase tersedianya Obat, Vaksin dan BHP Puskesmas	**100**			
								Persentase Puskesmas dan Faskes Lainnya menerima distribusi obat, vaksin dan BHP	**100**			
								Persentase Puskesmas melaksanakan PIS-PK	**100**			
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	39.719.489.975	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Nilai SPM KIA Gizi**	**75**	39.719.489.975		
								Nilai SPM Penyakit Menular	**80**			
								Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ	**80**			
								Jumlah Puskesmas Terakreditasi	**15**			
								Jumlah Peserta JKN	**220.000**			
								Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119	**100**			
								Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan	**4**			
								Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm	**100**			
								Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan	**100**			
								Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional	**100**			
								Nilai SPM (RSUD AU)	**80**			
								Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU	**100**			
								Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS	**100**			
								Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU)	**100**			
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	3 Dokumen	230.750.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	3 Dokumen	230.750.000		
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,		Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	100%	437.975.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan		Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan	100%	437.975.000		

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota		Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan penerbitan izin			Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota		penerbitan izin			
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Lampung Barat**	**Persentase Fasyankes yang memenuhi standar ketenagaan**	**60%**	**14.453.607.000**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Lampung Barat**	**Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standart**	**60**	**14.453.607.000**	
								Persentase SDMK RSUDAU yang memenuhi standart	**100**		
								Persentase Nakes RSUDAU yangditingkatkan mutu dan kompetensinya	**100**		
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab /Kota		Jumlah Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab /Kota	3 Dokumen	22.975.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	22.975.000	
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP & UKM di Wilayah Kab /Kota		Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	70%	14.138.827.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**1**	14.138.827.000	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terpenuhi Sesuai Standar	**437**		
								Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**1**		
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab /Kota		Persentase Pengmbangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab	100%	291.805.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab /Kota		Jumlah SDMK Tingkat Kabupaten / Kota yang dikembangkan mutu dan ditingkatkan kompetensinya	190	291.805.000	
IV	**Program Farmasi, Alat Kesehatan dan Sediaan Makanan dan Minuman**	**Lampung Barat**	**Persentase Pengndalian & Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alkes & Makanan Minuman**	**75%**	**348.000.000**	**Program Farmasi, Alat Kesehatan dan Sediaan Makanan dan Minuman**	**Lampung Barat**	**Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**75**	**348.000.000**	
								Persentase Pemeriksaan Laik Hygine Sentra Produksi dan Distribusi Makanan	**100**		
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mendapatkan	28 Sarana	48.000.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan mendapatkan izin	49%	48.000.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penerbitan izin								
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga & Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makmin tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT		Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang diproduksi oleh IRT	100%	120.000.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT		Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah yang diterbitkan sesuai ketentuan	40%	120.000.000	
2	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan & Depot Air Minum (DAM)		Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) : Jasa Boga, Rumah Makan dan Depot Air Minum (DAM)	100%	30.000.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%	30.000.000	
3	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan		Persentase Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	100%	20.000.000	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan		Persentase Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	100%	20.000.000	
4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT		Persentase Pemeriksaan & TL Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi &produk makanan minuman IRT	100%	130.000.000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT		Persentase Pemeriksaan & TL Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT	40%	130.000.000	
V	Program Permberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Lampung Barat	Persentase Keluarga berPHBS	35%	2.866.345.000	Program Permberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Lampung Barat	Persentase Keluarga berPHBS	35%	2.866.345.000	
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab./Kota		Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan PSM dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.297.501.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan PSMt dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil peningkatan upaya promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan, Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1.297.501.000	
2	Pelaksanaan Sehat		Persentase Pelaksanaan	100%	1.553.117.000	Pelaksanaan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi	**1**	1.553.117.000	

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota			dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
								Jumlah Kelauarga melaksanakan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesga & Lingkungan dengan menerapkan PHBS	**300**		
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pngmbangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah KabKota	100%	15.727.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervise pengembangan dan pelaksanaan UKBM	100%	15.727.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses perencanaan usulan kegiatan dilakukan berbagai tahapan-tahapan baik dilingkungan internal Perangkat Daerah maupun eksternal. Dalam lingkup internal dilakukan mekanisme usulan mulai dari tingkat Puskesmas, Rumah Sakit dan Bidang Program. Sementara itu pada lingkup eksternal penjaringan usulan masyarakat dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pekon/Desa, Musrenbang Kecamatan yang kemudian dilakukan pembahasan dengan Tim terkait di tingkat Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti dengan Musrenbang Kabupaten. Adapun untuk usulan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituangkan dalm Pokok Pikiran (Pokir) yang juga dilanjutkan dengan pembahasan bersama Tim Pembahas terkait.

Pembahasan dilakukan untuk menelaah apakah usulan-usulan tersebut sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan yang diterapkan, urgensi dan kemanfaatan kepada masyarakat, serta aspek-aspek perencanaan lain yang relevan. Pembahasan dilakukan juga agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi atas usulan dan pendanaan baik internal OPD maupun lintas OPD.

Berikut adalah penelaahan atas usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Barat
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Program Pemenuhan UKP & UKM				
A	Kegiatan Penyediaan Fasyankes				
1	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Sumber Jaya	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	3 Unit	Prioritas Kecamatan
2	Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Bronjong)	Kebun Tebu	Rehabilitasi Puskesmas antisipasi terjadinya longsor Jumlah Alkes, Sarpras yang dilakukan pemeliharaan dan Rehabilitasi Oleh Puskesmas	1 Unit	Prioritas Kecamatan
	Paving dan Pagar Puskesmas	Balik Bukit		200 m	Prioritas 2 Tk Kec
		BNS			
		Kenali		1000 m	
		Sumber Jaya		212 m	
	Rehab Puskesmas	Sekincau		1 Unit	Rehab Berat/Pembangunan Baru (DAK)
	Bronjong Lahan Puskesmas	Sekincau			
3	Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Alkes, Sarpras yang dilakukan pemeliharaan dan Rehabilitasi Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		
	Paving dan Pagar Pustu	Batu Brak			Pustu Kembahang (Prioritas 2 Kec)
		BNS			Pustu Cipta Waras
	Pagar Pustu	Gedung Surian		1 x 50 M2	Pustu Pura Mekar
		Sumber Jaya		97 m	Pustu Sukajaya
	Rehabilitasi Pustu	Batu Brak		1 Unit	Pustu Teba Liokh (Prioritas 1 Kec)
		Batu Ketulis		1 Unit	Pustu Luas
		Sekincau		1 Unit	Pustu Waspada

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Way Tenong		1 Unit	Pustu Tanjung Raya
4	Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Sarpras Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Lakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Balik Bukit		3 Unit	Prioritas 3 Tk Kec/DAK
		BNS		1 Unit	
		Kebun Tebu		2 Unit	
		Sukau		1 Unit	
		Sumber Jaya		1 Unit	
5	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Medik Lainnya		Jumlah Alkes/Penunjang Medik Lainnya disediakan		
	Pengadaan Alat Kesehatan	Gedung Surian			Pustu Cipta Waras
6	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Lainnya		Jumlah Prasarana Fasyankes disediakan		
	Sarana Air Bersih	Gedung Surian			Pustu Tri Mulyo
		Way Tenong			Pustu Mutar Alam
	Pusling Roda 2	Kebun Tebu		1 Unit	
		Sukau		1 Unit	
B	Kegiatan Penyediaan Yankes UKM UKP Rujukan Tk Daerah Kab/Kota				
1	Kegiatan Pengelolaan Gizi Masyarakat (PMT)	Sekincau	Jumlah Dokumen Pengelolaan Gizi Masyarakat		
		Sumber Jaya			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja PD sebagai dokumen wajib yang harus disusun mengacu pada Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan. Adapun Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan dapat di uraikan sebagai berikut;

A. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi Mencakup:

1. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana; Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia;
2. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;
3. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

B. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda Mencakup:
   1. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
   2. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
   3. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
   4. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti (evidence based policy) termasuk fortifikasi pangan;
   5. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);
   6. Penguatan sistem surveilans gizi;
   7. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
   8. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

C. Peningkatan pengendalian penyakit, peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut. Mencakup:
   1. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok;
   2. Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;
   3. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
   4. Pengendalian resistensi antimikroba;
   5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat

D. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mencakup:
   1. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, Upaya

Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;

2. Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antar moda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara;
3. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;
4. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat;
5. Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan;

E. Penguatan Sistem Kesehatan

1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, difokuskan pada:
   a) Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan;
   b) Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;
   c) Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya;
   d) Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan;
   e) Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;
   f) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
   g) Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
   h) Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online;

i) Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health care) dan gugus pulau;
j) Pengembangan dan peningkatan kualitas RS;
k) Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3).

2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan difokuskan pada;
   a) Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis
   b) Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
   c) Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
   d) Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
   e) Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
   f) Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
   g) Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar;
   h) Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat Kesehatan, difokuskan pada;
   a) Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk;
   b) Penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik;
   c) Peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional;
   d) Pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences;
   e) Pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri.
4. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan, difokuskan pada;
   a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
   b) Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;

c) Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry;
d) Penguatan data rutin;
e) Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, termasuk big data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan;
f) Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti;
g) Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta;
h) Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah
i) Penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

5. Penguatan Pelaksanan JKN

Difokuskan pada peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan kesehatan (supply side) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit, penerapan active purchasing termasuk perbaikan sistem pembayaran fasilitas pelayanan kesehatan dan pengembangan mekanisme cost- sharing, penguatan Health Technology Assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan pedoman nasional pelayanan kesehatan, peningkatan penyedia pelayanan kesehatan sesuai standar di seluruh wilayah terutama melalui kerjasama dengan swasta, integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS kesehatan untuk penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.

4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2023-2026. Kementerian Kesehatan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) Sasaran Strategis, dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2020-2024. Delapan Sasaran Strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat dilaksanakan melalui strategi:
   a) Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta melalui sistem rujukan terpadu dan berkesinambungan semenjak ANC;
   b) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir, termasuk imunisasi;
   c) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan;
   d) peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan dalam mendeteksi dini faktor risiko kematian;
   e) Peningkatan penyediaan darah setiap saat dibutuhkan;
   f) Perbaikan pencatatan kematian ibu dan kematian bayi di fasyankes dan masyarakat melalui pengembangan PS2H (Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati);
   g) Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS;
   h) Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai UCI (Universal Child Immunization) sampai level desa;
   i) Peningkatan cakupan ASI eksklusif;
   j) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;
   k) Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi sampai tingkat desa;
   l) Peningkatan cakupan dan mutu intervensi spesifik mulai dari remaja, ibu hamil, bayi, dan anak balita;
   m) Penguatan kampanye nasional dan strategi komunikasi untuk perubahan perilaku sampai pada keluarga;

n) Penguatan puskemas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting;
o) Penguatan sistem surveilans gizi;
p) Pendampingan ibu hamil untuk menjamin asupan gizi yang berkualitas;
q) Pendampingan baduta untuk mendapatkan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, dan stimulasi perkembangan yang adekuat;
r) Promosi pembudayaan hidup sehat, melalui edukasi literasi kesehatan;
s) Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus;
t) Meningkatkan metode/cara promosi kesehatan, melalui TV spot, leaflets, booklet, media sosial, dan sebagainya;
u) Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, UKS dan lingkungan kerja sehat;
v) Melakukan aksi multisektoral untuk mendorong penyediaan ruang terbuka publik, aktivitas fisik (olah raga), stop smoking, penurunan polusi udara, dan peningkatan lingkungan sehat;
w) Mendorong regulasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan /Health in All Policy (HiAP).

2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan Dilaksanakan melalui strategi:
   a) Peningkatan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan (FKTP dan FKRTL) yang difokuskan pada daerah yang akses secara fisik masih terkendala (DTPK), di mana untuk wilayah perkotaan lebih didorong peran swasta;
   b) Pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional penyediaan fasyankes
   c) Penyempurnaan standar pelayanan kesehatan;
   d) Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk laboratorium kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan);
   e) Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying health care) dan gugus pulau;

f) Penguatan Health Technology Assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan clinical pathway;
g) Penguatan kemampuan RS Khusus;
h) Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem, melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem koordinasi jejaring dan jaringan puskesmas, penguatan promotif, preventif dan penemuan dini kasus melalui penguatan UKBM, praktek mandiri, klinik pratama, penguatan aksi multisektoral melalui pelibatan seluruh stakeholder, dan penguatan konsep wilayah kerja;
i) Penguatan kepemimpinan dan manajemen di dinas kesehatan dan puskesmas dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem;
j) Perbaikan pengelolaan limbah medis fasyankes & pengendalian B3

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan melalui strategi:
   a) Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan SPM Bidang Kesehatan;
   b) Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor terpadu, dan pengendalian vektor secara biologis;
   c) Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
   d) Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat;
   e) Peningkatan akses air bersih dan perilaku higienis;
   f) Penguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk kegawatdaruratan kesehatan masyarakat;
   g) Peningkatan advokasi dan komunikasi;
   h) Peningkatan program pencegahan resistensi antibiotika, penyakit zoonosis, keamanan pangan, manajemen biorisiko;
   i) Penguatan sistem laboratorium nasional, termasuk laboratorium kesehatan masyarakat untuk penguatan surveilans;
   j) Penguatan reporting dan real time surveillance untuk penyakit berpotensi wabah dan penyakit baru muncul (new emerging diseases);
   k) Membangun sistem kewaspadaan dini;
   l) Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat;
   m) Peningkatan kemampuan daerah termasuk SDM.

4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan dilakukan melalui strategi:
    a) Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas, dengan melakukan pembinaan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas;
    b) Menerapkan sistem data dan informasi pengelolaan logistik obat secara terintegrasi antara sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan;
    c) Penguatan regulasi sistem pengawasan pre dan post market alat kesehatan, melalui penilaian produk sebelum beredar, sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi termasuk pengawasan barang impor Border dan Post Border, dan penegakan hukum;
    d) Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, melalui penciptaan iklim ramah investasi, optimalisasi hubungan kerjasama luar negeri, membangun sinergi Academic-Bussiness-Government-Community-Innovator (A-B-G-C-I), hilirisasi, serta fasilitasi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan ke arah biopharmaceutical, vaksin, natural, Active Pharmaceutical Ingredients (API) kimia dan industri alat kesehatan teknologi tinggi;
    e) Mendorong tersedianya vaksin halal melalui penyusunan roadmap vaksin halal;
    f) Mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri dengan mengutamakan pemanfaatan komponen lokal serta penggunaan alat kesehatan dalam negeri melalui promosi, advokasi, dan pengawasan implementasi regulasi;
    g) Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dan alat kesehatan tepat guna di masyarakat serta pemanfaatan kearifan lokal melalui Gerakan Bugar dengan Jamu dan pemanfaatan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI).
5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar dilakukan melalui strategi:
    a) Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar;
    b) Pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai standar;
    c) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional (penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian penyakit);

d) Afirmasi pendidikan tenaga kesehatan strategis untuk wilayah DTPK;
e) Pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan standar jumlah nakes dengan pendekatan insentif yang memadai dan perbaikan regulasi;
f) Meningkatkan kapasitas tenaga kader kesehatan di UKBM (posyandu, posbindu) dan memberikan reward yang memadai sesuai kinerja yang ditetapkan.

6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan Meningkatkan pembiayaan kesehatan dilakukan melalui strategi:
   a) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBN, khususnya terkait Upaya Kesehatan Masyarakat;
   b) Pemenuhan pembiayaan kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN;
   c) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari APBD minimal 10% dari APBD;
   d) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan oleh swasta.
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatkan sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan melalui strategi:
   a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
   b) Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM Bidang Kesehatan;
   c) Integrasi, interoperabilitas, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry;
   d) Penguatan manajemen kesehatan di kabupaten/kota dalam kerangka otonomi pembangunan kesehatan;
   e) Mendorong sinergisme perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
   f) Mendorong penerapan revolusi mental dan reformasi birokrasi;
   g) Mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah;
   h) Meningkatkan pendekatan manajemen berbasis kinerja;
   i) Meningkatkan jumlah unit yang masuk dalam kategori WBK dan WBBM.

8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan untuk pengambilan keputusan dilakukan melalui strategi:
    a) Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk mendukung pencapaian pembangunan kesehatan sesuai dengan RPJMN Bidang Kesehatan dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024;
    b) Menguatkan jejaring penelitian kesehatan dan jejaring laboratorium guna memperkuat sistem penelitian kesehatan nasional ;
    c) Meningkatkan riset untuk penguatan data rutin baik di fasilitas kesehatan dan masyarakat;
    d) Meningkatkan diseminasi dan advokasi hasil penelitian untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk perbaikan kebijakan dan program kesehatan;
    e) Mengembangkan dashboard sistem informasi pembangunan kesehatan yang real time;
    f) Meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan pemanfaatan data hasil penelitian dan data rutin;
    g) Mengembangkan poros kebijakan guna peningkatan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk perumusan dan perbaikan kebijakan kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat

A. Tujuan

Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 yaitu **“ Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat”** dengan indikator Usia Harapan Hidup dengan terget 67,84 tahun.

B. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah **“Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”** melalui indikator sasaran sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah :

Tabel 3.2.1
Indikator Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023

No	Indikator	Target
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	110/100.000 KH
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	3,9/1.000 KH
3	Presentase Balita Stunting	10,94%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%

3.3 Program Dan Kegiatan

A. Faktor - Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadapa Rumusan Program Dan Kegiatan

1. Capaian SDGs Sektor Kesehatan

   Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan global yang baru menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Sustainable Development Goals (SDGs) disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 Septermber 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Dalam mendukung capaian SDGs Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 memiliki capaian sebagai berikut;

Tabel 3.3.1
Capaian SDGs Sektor Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2020)	Tahun 2021		Target 2022
					Target	Capaian	
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun							
2.1.1(a)	Prevalensi Balita Kurang Gizi (Underweight)	Dinas Kesehatan	Persen	6,83%	7,80%	10,94 %	7,5
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta Manula							
2.2.1*	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	Dinas Kesehatan	Persen	10,97	24	10,94	22

2.2.1(a)	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	Dinas Kesehatan	Persen	5,68	7,53	5,12	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/*wasting* (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	Persen (*Wasting*)	5,43	7,8	7,5	7,5
			Persen (*Obesitas*)	-	-	-	-
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	Persen	14,32	42	14,95	39
2.2.2(b)	Persentase remaja yang mengkonsumsi *Fe* (zat besi)	Dinas Kesehatan	Persen	82,95	52	92,2	54
2.2.2(c)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	Persen	76,75	45	84,66	50
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup							
3.1.1(a)	Kasus Kematian Ibu	Dinas Kesehatan	Kasus	4	6	8	6
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Persen	95,22	95	94,29	96
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	93,43	93	94,03	94
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000							
3.2.1(a)	Kasus Kematian Balita	Dinas Kesehatan	Kasus	16	23	25	21
3.2.2(a)	Kasus Kematian Neonatal	Dinas Kesehatan	Kasus	21	23	20	21
3.2.2(b)	Kasus Kematian Bayi	Dinas Kesehatan	Kasus	3	23	25	21
3.2.2(c)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 Persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Persen	93,5	95	95,3	95
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3.3.2(a)	Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/*case notification rate*) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Persen	69,090	172,00	74,8	172
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	API per 1000 penduduk	<1	<1	0	<1

3.3.3(a)	Angka kesakitan positif malaria (API) per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	API per 1000 penduduk	0	0	0	<1
3.3.5(c)	Angka kesakitan (*incidence rate*) DBD per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Incidence Rate	31,434	<49	2,6	<49
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan							
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Kabupaten /Kota	-	-	-	-
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang							
3.8.1(a)	*Unmet need* pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen				
3.8.2(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen		100	78,55	100
3.8.2(b)	Rasio Puskesmas	Dinas Kesehatan	Persen	1,4707	1,4649	1,00	1,00
3.8.2(c)	Jumlah Apotek PRB (Program Rujuk Balik)	Dinas Kesehatan	Apotek	0	1	2	2
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *the Doha Declaration* tentang *the TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi Semua							
3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	90,86	100

C. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkan dengan target yang ditetapkan sebelumnya. SPM pelayanan dasar kesehatan tahun 2023 yang terdiri dari 12 indikator telah dilaksanakan yang hasilnya dapat dilihat pada table 2.3

Tabel Tabel 3.3.2
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Tahun 2023

No	Standar Pelayanan Minimal			Realisasi	KET
	Indikator	Nilai Nasional	Nilai Daerah		
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	100	83,27	Profil 2022
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	100	81,38	Profil 2022
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	85,97	Profil 2022
4	Setiap balita mendapatkan yankes sesuai standar	100	100	83,74	Profil 2022
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	86,03	Profil 2022
6	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	84,22	Profil 2022
7	Setiap masyarakat Lampung Barat usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	100	100	88,72	Profil 2022

	kesehatan sesuai standar				
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	72,75	Profil 2022
9	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	Profil 2022
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	95,42	Profil 2022
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	100	68,47	Profil 2022
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	100	100	Profil 2022

Jika dilihat dari tabel capaian SPM diatas terlihat bahwa 12 indikator yang dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan belum mencapai target yang telah di tetapkan.

Pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan kerja keras yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, bukan hanya tergantung pada sumber daya kesehatan yang ada, namun juga harus melibatkan partisipasi dan peran aktif lintas sektor terkait, masyarakat pada umumnya serta sektor swasta. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang kesehatan secara nasional, tujuh sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan.

Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 sebagai upaya pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan, baik itu melalui berbagai kegiatan yangdilaksanakan pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat kecamatan melalui pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Lampung Barat. Untuk menunjang pelaksanaan program kesehatan di tingkat puskesmas dibutuhkan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu hal yang masih menjadi kendala hingga saat ini adalah jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang serta distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan antara puskesmas yang satu dengan puskesmas yang lain.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten**

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA PD
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA PD
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan PD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD
5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD
7. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran

c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PD
2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah PD
3. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada PD
4. Sub Kegiatan Rekonsiliasi & Penyusunan Laporan BMD pada PD
5. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada PD
6. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah PD

d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
4. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
9. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD

f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

i) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasaran Pendukungnya
2. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
5. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
6. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
7. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
8. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9. Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
10. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
12. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
13. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
16. Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obt, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

b) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Sekolah Dasar
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut

8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Sub Kegiatan Pengelolaan Yankes Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Terinfeksi HIV
13. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
14. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat
15. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
16. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
17. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
18. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
19. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
20. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
21. Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
22. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
23. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
24. Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
25. Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium
26. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
27. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
28. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
29. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
30. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
31. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
32. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
33. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

34. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
35. Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
36. Sub kegiatan Koordinasi dan sinkoronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
37. Sub Kegiatan Pengelolaan dan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

c) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

d) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit kelas C, D dan Fasilitas kesehatan lainnya
2. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3. Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Yankes Rujukan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

a) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

1. Pengendalian perizinan praktik tenaga Kesehatan
2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan

b) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar
3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan

c) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Farmasi, Alat Kesehatan dan Sediaan Makanan dan Minuman

a) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha

Mikro Obat Tradisional (UMOT)

b) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1. Sub Kegiatan Pengendalian & Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga & Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Diproduksi oleh IRT

c) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

d) Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan

e) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga

1. Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
2. Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat

b) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

Tabel TC-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lampung Barat
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4	5		6	7	8	9		10
	TUJUAN									
	Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		67,84	Tahun				68	Tahun	
	SASARAN									
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		110	/100.000 KH				105	/100.000 KH	
			3,9	/1.000 KH				3,8	/1.000 KH	
			10,94	%				10,8	%	
			86	%				87	%	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA**	**Lampung Barat**	**82**	**poin**	**214.244.309.273**			**81,8**	**poin**	**112.178.767.792**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Lampung Barat**	**10**	**dokumen**	**91.150.000**	**DAU**		**10**	**dokumen**	**327.474.000**
		Lampung Barat	5	**dokumen**				**5**	dokumen	
		Lampung Barat	12	**dokumen**				**12**	dokumen	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Barat	11	dokumen	18.420.000			8	dokumen	55.000.000

1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Lampung Barat	1	dokumen	12.855.000			1	dokumen	20.000.000
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	Lampung Barat	1	dokumen	16.125.000			1	dokumen	20.000.000
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA PD	Lampung Barat	1	dokumen	12.855.000			1	dokumen	20.000.000
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD	Lampung Barat	1	dokumen	12.855.000			1	dokumen	20.000.000
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Lampung Barat	1	laporan	6.160.000			1	laporan	8.000.000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Barat	12	laporan	11.880.000			12	laporan	25.000.000
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Lampung Barat**	**665**	**orang**	**47.030.424.159**	**DAU**		**692**	**orang**	**58.802.599.712**

		Lampung Barat	**2**	**laporan**				**2**	**laporan**	
		Lampung Barat	**19**	**laporan**				**19**	**laporan**	
		Lampung Barat	**2**	**dokumen**				**2**	**dokumen**	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Barat	525	orang	47.001.224.159			550	orang	47.991.883.617
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Lampung Barat	1	dokumen	4.600.000			1	dokumen	4.485.600
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PD	Lampung Barat	1	dokumen	2.700.000			1	dokumen	2.620.000
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Lampung Barat	1	laporan	4.000.000			1	laporan	3.950.000
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Lampung Barat	5	dokumen	3.000.000			5	dokumen	3.050.000
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD	Lampung Barat	18	laporan	11.000.000			18	laporan	16.600.000

1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan &Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Lampung Barat	2	dokumen	3.900.000			2	dokumen	3.800.000
		Lampung Barat	1	laporan	3.250.000			1	laporan	3.550.000
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Lampung Barat**	**21**	**dokumen**	**31.000.000**			**27**	**dokumen**	**25.200.000**
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada PD	Lampung Barat	21	laporan	31.000.000			6	laporan	3.550.000
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Lampung Barat**	**2**	**dokumen**	**45.095.600**	**DAU**		**2**	**dokumen**	**137.071.500**
		Lampung Barat	**12**	**orang**				**12**	**orang**	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lampung Barat	1	dokumen	20.299.200			1	dokumen	55.000.000
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lampung Barat	2	orang	10.000.000			2	orang	10.000.000

1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Lampung Barat	47	orang	14.796.400			47	orang	12.971.500
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Lampung Barat**	**10**	**paket**	**270.141.800**	**DAU**		**10**	**paket**	**1.520.120.500**
			4	**paket**				**4**	**paket**	
			1	**paket**				**1**	**paket**	
			1	**paket**				**1**	**paket**	
			9	**paket**				**9**	**paket**	
			9	**paket**				**9**	**paket**	
			13	**paket**				**13**	**paket**	
			24	**paket**				**24**	**paket**	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampung Barat	9	paket	13.550.000			9	paket	13.648.000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lampung Barat	3	paket	31.210.800			3	paket	47.265.500

1.02.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lampung Barat	9	paket	43.000.000			7	paket	101.500.000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lampung Barat	6	dokumen	6.840.000			4	dokumen	4.500.000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lampung Barat	1	laporan	11.754.000			1	laporan	23.232.000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Lampung Barat	12	laporan	163.787.000			12	laporan	220.000.000

1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Lampung Barat**	**40**	**laporan**	294.510.400	**DAU**		40	**laporan**	**915.211.080**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lampung Barat	2	laporan	2.750.000			2	laporan	3.750.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lampung Barat	1	laporan	78.800.000			1	laporan	117.850.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lampung Barat	1	laporan	211.960.400			1	laporan	174.611.080
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Lampung Barat**	**121**	**unit**	242.124.000	**DAU**		121	**unit**	**2.490.540.000**
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lampung Barat	28	unit	177.450.000			28	unit	386.080.000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kant& Bangunan Lain	Lampung Barat	7	unit	54.814.000			7	unit	55.950.000

1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lampung Barat	15	unit	9.860.000			15	unit	18.510.000
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Lampung Barat**	**16**	**unit kerja**	44.000.000	**DAU/BLUD**		16	**unit kerja**	**47.945.800.000**
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Lampung Barat	15	unit kerja	44.000.000			15	unit kerja	19.945.800.000
		Lampung Barat	1	unit kerja	27.964.114.200			1	unit kerja	28.000.000.000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Lampung Barat**	**86**	**%**	**128.760.914.781**			**87**	**%**	**75.633.757.700**
			100	**%**				**100**	**%**	
			100	**%**				**100**	**%**	
			70	**%**				**72**	**%**	
			95	**%**				**96**	**%**	
			7	**%**				**7**	**%**	
			30	**%**				**40**	**%**	
			78	**%**				**80**	**%**	

			78	**%**				**80**	**%**	
			100	**%**				**100**	**%**	
			100	**%**				**100**	**%**	
			100	**%**				**100**	**%**	
			58	**%**				**60**	**%**	
			100	**%**				**100**	**%**	
			40	**%**				**45**	**%**	
			4	**hari**				**4**	**hari**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Lampung Barat**	**100**	**%**	103.934.553.506	**DAU/ DAK/ DBH**		100	**%**	**29.126.037.300**
		Lampung Barat	**100**	**%**				100	**%**	
		Lampung Barat	**100**	**%**				100	**%**	
		Lampung Barat	**100**	**%**				100	**%**	
			100	**%**				100	**%**	
			100	**%**				100	**%**	
			100	**%**				100	**%**	
			100	**%**				100	**%**	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasaran Pendukungnya	Lampung Barat	1	unit	52.896.440.000				unit	

1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Lampung Barat	3	unit	10.810.000.000					
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Lampung Barat	5	unit	1.066.500.000			10 Unit	unit	3.350.000.000
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Lampung Barat	5	unit	1.165.040.000			8 Unit	unit	800.000.000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Lampung Barat	11	unit	1.780.120.000			3 Unit	unit	430.000.000
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Lampung Barat	8	unit	801.520.000			5 Unit	unit	548.000.000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Lampung Barat	3	unit	10.810.000			4	unit	2.000.000.000

1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Lampung Barat	1362	unit	30.527.689.861			50	unit	2.000.000.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Lampung Barat	753	unit	385.133.600			292	unit	352.500.000
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Lampung Barat	2	paket	4.128.978.045			1	paket	6.000.000.000
1.02.02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obt, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan & Minuman ke Pusk serta Fasilitas Kesehatan Lain	Lampung Barat	15	paket	103.052.000			12	paket	150.000.000
1.02.02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Lampung Barat	1175	Keluarga	267.650.000			69276	Keluarga	825.537.300
	Operasional Pelayanan fasilitas Kesehatan Lainnya	Lampung Barat	4	Unit	98.510.000			4	Unit	100.000.000
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**		**85**	**%**	24.948.824.275			90	**%**	**45.798.745.400**

			80					83	**%**	
			80					83	**%**	
			15	**unit**				15	**unit**	
			220.000	**orang**				230.000	**orang**	
		Lampung Barat	**100**	**%**				100	**%**	
			4	**jenis**				4	**jenis**	
			100	**%**		**DAU/ DAK/ DBH**		100	**%**	
			100	**%**				100	**%**	
			100	**%**				100	**%**	
			80	**%**				85	**%**	
			100	**%**				100	**%**	
			100	**%**				100	**%**	
			100	**%**				100	**%**	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Lampung Barat	350	orang	69.450.000			400	orang	2.602.814.200

1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin	Lampung Barat	300	orang	25.000.000			300	orang	640.000.000
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Lampung Barat	1425	bayi	18.000.000			2850	bayi	427.500.000
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Lampung Barat	6.350	balita	32.000.000			12700	balita	314.400.000
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Lampung Barat	50.500	orang	130.000.000			1	dokumen	165.000.000
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Lampung Barat	300	orang	180.000.000			375	orang	275.000.000
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Lampung Barat	18.000	orang	35.000.000			18000	orang	165.000.000
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Lampung Barat	3.000	orang	354.242.188			3000	orang	165.000.000
2 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Lampung Barat	517	orang	85.000.000			520	orang	265.000.000
2 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Lampung Barat	5000	orang	420.113.850			3000	orang	304.511.000
2 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV	Lampung Barat	4.000	orang	95.943.540			4100	orang	144.894.500
2 02 02 2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Lampung Barat	1	Dokumen	150.000.000					
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	9.600.000.000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Lampung Barat	1	dokumen	33.169.500			1	dokumen	4.207.911.100
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Lampung Barat	1	dokumen	22.500.000			1	dokumen	25.000.000

1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Lampung Barat	2	dokumen	548.975.000			1	dokumen	50.000.000
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen	464.895.500			1	dokumen	143.158.400
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen	126.380.000			1	dokumen	2.900.000.000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Lampung Barat		orang					orang	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Lampung Barat	1	dokumen	75.000.000			1	dokumen	55.000.000
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Lampung Barat	3	dokumen				3	dokumen	504.000.000
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen	230.000.000			2	dokumen	700.000.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Lampung Barat	1	dokumen	877.549.517			1	dokumen	2.488.889.200
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Lampung Barat	1	dokumen	17.068.961.880			2	dokumen	6.944.400.000
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Lampung Barat	0	orang	-			100	orang	150.000.000

1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Lampung Barat	70	paket	49.500.000			20	paket	85.000.000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Lampung Barat	1	dokumen	32.500.000			1	dokumen	40.000.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Lampung Barat	1	dokumen	31.140.000			1	dokumen	45.000.000
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Lampung Barat	0	unit	-			1	unit	5.000.000.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	999.967.000
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Lampung Barat	1	dokumen	98.510.000			1	dokumen	150.000.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab./Kota	Lampung Barat	15	unit	421.960.000			17	unit	888.300.000
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)PSC 119	Lampung Barat	1	unit	2.791.350.000			1	unit	3.800.000.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Lampung Barat	400	orang	45.000.000				orang	
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Lampung Barat	10	orang	47.550.000				orang	

1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Lampung Barat	200	orang	107.167.800				orang	
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Lampung Barat	3	orang	80.000.000				orang	
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan Kesehatan Ibu dan anak	Lampung Barat	6350	Balita	185.935.500					
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Lampung Barat**	**3**	**dokumen**	42.537.000	**DAU/ DAK/ DBH**		3	**dokumen**	**205.000.000**
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen	42.537.000			1	dokumen	45.000.000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	10.000.000
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Lampung Barat	5					6		120.000.000
1.02.02.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Lampung Barat	1	dokumen	16.230.000,00					
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasyankes Tingkat Kab /Kota**	**Lampung Barat**	**24**	**%**		**DAU/ DAK/ DBH**		24	**unit**	**503.975.000**
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit kelas C, D dan Fasilitas kesehatan lainnya	Lampung Barat	1	Dokumen	25.000.000			25	unit	12.975.000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Lampung Barat	15	unit (puskesmas)				15	unit (puskesmas)	252.000.000
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Yankes Rujukan	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	200.000.000
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Lampung Barat**	**60**	**%**				**65**	**%**	**14.679.477.000**
			100					**100**	**%**	

			100					**100**	**%**	
1.02.03.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**Lampung Barat**	**3**	**dokumen**		**DAU/ DAK/ DBH**		3	**dokumen**	**22.975.000**
1 02 03 2.01 01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen	5.000.000			1	dokumen	10.000.000
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik nakes	Lampung Barat	1	dokumen	35.000.000			2	dokumen	12.975.000
1.02.03.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota**	**Lampung Barat**	**1**	**dokumen**		**DAU/ DAK/ DBH**		1	**dokumen**	**14.362.002.000**
			437	**orang**				439	**orang**	
			1	**dokumen**				1	**dokumen**	
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan SDM Kesehatan	Lampung Barat	1	dokumen	40.000.000			5	dokumen	20.000.000
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standard	Lampung Barat	275	orang	3.447.285.200			275	orang	6.704.027.000
		Lampung Barat	162	orang				164	orang	7.625.000.000
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan	Lampung Barat	2	dokumen				2	dokumen	12.975.000
1.02.03.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab /Kota**	**Lampung Barat**	**190**	**orang**		**DAU/ DAK/ DBH**		192	**orang**	**294.500.000**

1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	150	orang	1.002.043.000			150	orang	250.000.000
		Lampung Barat	40	orang				42	orang	44.500.000
1.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Lampung Barat**	**75**	**%**	**348.000.000**			**80**	**%**	**365.000.000**
			100	**%**				**100**	**%**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Lampung Barat**	**49**	**%**		**DAU/ DAK/ DBH**		50	**%**	**52.500.000**
1.02.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Lampung Barat	1	dokumen	107.154.000			1	dokumen	17.500.000
1.02.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Lampung Barat	28	sarana				29	sarana	35.000.000
1.02.03.2.02	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Lampung Barat	**40**	**%**		**DAU/ DAK/ DBH**		41	**%**	**125.000.000**

1.02.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Lampung Barat	1	dokumen	115.285.000.			1	dokumen	125.000.000
1.02.03.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Lampung Barat	**100**	**%**		**DAU/ DAK/ DBH**		100	**%**	**30.000.000**
1.02.03.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	30.000.000
1.02.03.2.05	**Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan**	Lampung Barat	**100**	**%**		**DAU/ DAK/ DBH**		100	**%**	**20.000.000**
1.02.03.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	20.000.000
1.02.03.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT**	Lampung Barat	**40**	**%**		**DAU/ DAK/ DBH**		41	**%**	**137.500.000**
1.02.04.2.06.01	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Lampung Barat	34	unit	178.305.000			28	unit	120.000.000
1.02.04.2.06.02	Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Lampung Barat	1	dokumen				1	dokumen	17.500.000

1.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	Lampung Barat	**35**	**%**				40	**%**	**2.867.917.700**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota**	Lampung Barat	**1**	**%**	88.532.000	**DAU/ DAK/ DBH**		1	**%**	**1.297.501.000**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	Lampung Barat	1	dokumen	88.532.000			1	dokumen	1.297.501.000
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota**	Lampung Barat	**1**	**dokumen**		**DAU/ DAK/ DBH**		1	**dokumen**	
		Lampung Barat	**300**	**Keluarga**				300	**Keluarga**	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Lampung Barat	1	dokumen	29.470.000			1	dokumen	35.000.000
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Lampung Barat	300	Keluarga				350	Keluarga	53.921.000
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Lampung Barat	**1**	**dokumen**	94.376.000	**DAU/ DAK/ DBH**		1	**dokumen**	**17.299.700**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Lampung Barat	1	dokumen	94.376.000			1	dokumen	17.299.700

Rumah sakit Alimudin Umar

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	RSUD Alimuddin Umar					44.390.345.595,00					49.737.974.050,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					44.390.345.595,00					49.737.974.050,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					44.390.345.595,00					49.737.974.050,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.826.707.495,00					39.013.974.050,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					41.987.500,00					45.000.000,00
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	2 dokumen Dokumen	-	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen Dokumen	6.500.000,00
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 dokumen Dokumen	-	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen Dokumen	8.000.000,00
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 dokumen Dokumen	-	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen Dokumen	5.000.000,00
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 dokumen Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen Dokumen	5.500.000,00
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 dokumen Dokumen	-	5.987.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen Dokumen	5.000.000,00
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 dokumen Laporan	-	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen Laporan	5.000.000,00
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 laporan Laporan	-	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan Laporan	10.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.777.775.995,00					10.778.360.495,00
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	146 Orang/bulan	-	10.764.860.495,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	146 Orang/bulan	10.764.860.495,00
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	4.365.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.500.000,00
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	18 Laporan	-	4.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.000.000,00
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	3.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.000.000,00
1.02.01.2.05.0005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					61.150.000,00					88.939.000,00
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	8.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	28.939.000,00
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	10 Orang	-	52.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	60.000.000,00
1.02.01.2.06.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.149.318.000,00					1.063.000.000,00
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	269.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	220.000.000,00
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	210.000.000,00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	225.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	230.000.000,00
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	275.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	280.000.000,00
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	5 Dokumen	-	5.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	7.000.000,00
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	7.683.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.000.000,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	106.735.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	42.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					155.025.000,00					176.225.555,00
1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	36.225.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	36.225.555,00
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	118.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	140.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					558.118.000,00					674.500.000,00
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	4.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.500.000,00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	524.998.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	550.000.000,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	28.920.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.070.165.000,00					1.233.000.000,00
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	16 Unit	-	178.075.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	288.000.000,00
1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	100.000.000,00

1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	30 Unit	-	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	100.000.000,00
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	100.000.000,00
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	6 Unit	-	207.090.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	220.000.000,00
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	26 Unit	-	410.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	425.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD					25.013.168.000,00					24.954.949.000,00
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit Kerja	-	25.013.168.000,00	Pendapatan dari BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	24.954.949.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					2.512.263.100,00					2.849.000.000,00

	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1.589.848.600,00				1.850.000.000,00
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	35 Unit	-	399.810.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	35 Unit	500.000.000,00
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan									
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	105.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit	100.000.000,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	10 Unit	-	899.738.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	1.000.000.000,00
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	35 Unit	-	185.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	35 Unit	250.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					843.560.500,00					911.000.000,00
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	92.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	95.000.000,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 dokumen Orang	-	50.007.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 dokumen Orang	65.000.000,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	378.985.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	400.000.000,00
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 fasilitas Unit	-	87.655.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 fasilitas Unit	106.000.000,00
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	74.994.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	80.000.000,00
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 fasilitas Unit	-	159.919.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 fasilitas Unit	165.000.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					38.989.000,00					40.000.000,00
1.02.02.2.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										
		Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	38.989.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	40.000.000,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					39.865.000,00					48.000.000,00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										

		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	39.865.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	48.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					3.051.375.000,00					7.875.000.000,00
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					3.006.375.000,00					7.825.000.000,00
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	168 Orang	-	3.006.375.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	168 Orang	7.825.000.000,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					45.000.000,00					50.000.000,00
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	-	45 Orang	-	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	45 Orang	50.000.000,00
						44.390.345.595,00					**49.737.974.050,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025

Rencana Kerja dan kerangka pendanaan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat diarahkan untuk memperbaiki status kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, upaya mencapai SPM bidang kesehatan (termasuk pemulihan pasca pandemi covid 19) serta agenda kerja Bupati Lampung Barat dengan memperhatikan isu-isu global, nasional dan kebijakan Nasional sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel IV.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan dan RS Alimudin Umar
Kabupaten Lampung Barat TA 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
			Target 2025		Pagu Indikatif
1	2	3	4		5
	TUJUAN				
	Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	**Usia Harapan Hidup**	67,84	Tahun	
	SASARAN				
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	**Angka Kematian Ibu/100.000 KH**	110	/100.000 KH	
		Angka Kematian Bayi/1.000 KH	3,9	/1.000 KH	
		Persentase Balita Stunting	10,94	%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86	%	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**79,05**	**poin**	**123.850.857.637**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**11**	**dokumen**	
		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	5	**dokumen**	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	**dokumen**	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	**18.420.000**
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RSUD AU)	2	dokumen	5.500.000

1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	dokumen	**12.855.000**
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD (RSUD AU)	1	dokumen	**7.500.000**
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	dokumen	**16.125.000**
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (RSUD AU)	1	dokumen	4.500.000
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1	dokumen	**12.855.000**
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD (RSUD AU)	1	dokumen	5.000.000
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1	dokumen	**12.855.000**
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (RSUD AU)	1	dokumen	**5.987.500**
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	**6.160.000**
		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (RSUD AU)	1	dokumen	**4.500.000**
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	**11.880.000**
		Jumlah dokumen Evaluasi kinerja (RSUD Alimuddin Umar)	12	laporan	**9.000.000**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**665**	**orang**	**62.165.883.253**
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**2**	**laporan**	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD & Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**19**	**laporan**	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**2**	**dokumen**	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	525	orang	47.001.224.159
		Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (RSUDAU)	146	orang	**10.777.775.995**
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan & pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	1	dokumen	**4.600.000**
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1	dokumen	**2.700.000**

1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	laporan	**4.000.000**
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (RSUD AU)	2	laporan	**4.365.500**
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	5	dokumen	**3.000.000**
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD & Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan /semesteran SKPD	18	laporan	**11.000.000**
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (RSUD AU)	18	laporan	**4.800.000**
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2	dokumen	**3.900.000**
		Jumlah dokumen Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (RSUD AU)	1	laporan	3.750.000
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**27**	**dokumen**	**31.000.000**
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	6	laporan	**31.000.000**
1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**2**	**dokumen**	**139.167.050**
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**12**	**orang**	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	dokumen	20.299.200
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai RSUDAU	1	dokumen	8.650.000
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	2	orang	**10.000.000**

		Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi (RSUD AU)	10	orang	**52.500.000**
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	47	orang	**14.796.400**
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan**	**10**	**paket**	**3.787.841.926**
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**4**	**paket**	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**1**	**paket**	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**1**	**paket**	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**9**	**paket**	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**9**	**paket**	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**13**	**paket**	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**24**	**paket**	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9	paket	**13.550.000**
		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (RSUD AU)	1	paket	60.000.000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	paket	**31.210.800**
		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (RSUD AU)	1	paket	**269.860.000**
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (RSUD AU)	1	paket	**200.000.000**
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor (RSUDAU)	1	paket	**225.000.000**
1.02.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7	paket	43.000.000
		Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (RSUD AU)	2	paket	275.000.000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	dokumen	**6.840.000**
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (RSUD Alimuddin Umar)	5	dokumen	**5.040.000**
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu/makan minum tamu yang dipenuhi	1	laporan	**11.754.000**
		Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu/makan minum tamu yang dipenuhi (RSUD AU)	12	laporan	**7.683.000**

1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	**163.787.000**
		Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (RSUD AU)	12	laporan	**106.735.000**
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	dokumen	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	**3**	**unit**	
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RSUDAU)	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (RSUD AU)	1	unit	**36.225.000**
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RSUD Alimuddin Umar)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (RSUD AU)	2	unit	**118.800.000**
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dan disediakan**	**40**	**laporan**	**962.457.188**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	**2.750.000**
		Jumlah laporan Surat Menyurat (RSUD AU)	12	laporan	**4.200.000**
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	laporan	78.800.000
		Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RSUD AU)	12	laporan	524.998.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	1	laporan	**211.960.000**
		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD AU)	12	laporan	28.920.000
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**121**	**unit**	**4.891.011.400**
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28	unit	**177.450.000**
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya (RSUD AU)	16	unit	**178.075.000**
1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (RSUD Alimuddin Umar)	Jumlah perijinan dan pemeliharaan alat besar Lainnya yang disediakan	3	unit	**100.000.000**
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (RSUD AU)	15	unit	**75.000.000**
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (RSUD AU)	5	unit	**1000.000.000**

1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kant& Bangunan Lain	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	7	unit	**54.814.000**
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/ rehabilitasi (RSUD AU)	6	unit	207.090.000
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	15	unit	**9.860.000**
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lain yang dipelihara (RSUD AU)	26	unit	**410.000.000**
1.02.01.2.09.12	Pemeliharaan /Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1	ha	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah Peningkatan Pelayanan Unit Kerja BLUD**	**16**	**unit kerja**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	15	unit kerja	44.000.000
		Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD AU)	1	unit kerja	**25.013.168.000**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Capaian SPA Puskesmas**	**86**	**%**	**191.043.929.042**
		Persentase Puskesmas terakreditasi madya	**100**	**%**	
		Persentase FKTP & FKTL melaksanakan SISRUTE	**100**	**%**	
		% Masyarakat memiliki JKN	**70**	**%**	
		%persalinan di fasyankes	**95**	**%**	
		Prevalensi Balita Wasting	**7**	**%**	
		Persentase capaian 5 pilar STBM	**30**	**%**	
		Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Menular	**78**	**%**	
		Persentase Capaian Pencegahan Penyakit Tidak Menular	**78**	**%**	
		Persentase Capaian IDL	**100**	**%**	
		Persentase Puskesmas melaksanakan SIK	**100**	**%**	
		Akreditasi RSUD AU Utama	**100**	**%**	
		Persentase Capaian SPA RSUDAU	**58**	**%**	
		Persentase Sarana Fasilitas Pelayanan yang tersedia dan terpelihara	**100**	**%**	
		BOR RSUDAU	**40**	**%**	
		ALOS RSUD AU	**4**	**hari**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	**Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana penunjang pelayanan kesehatan RSUD AU**	**100**	**%**	
		Persentase Tersedianya Obat dan BHP RSUDAU	**100**	**%**	
		Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana RSUD AU	**100**	**%**	

1.02.02.2.01	**Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Puskesmas mendapatkan penyediaan dan pemeliharaan SPA**	**100**	**%**	
		Persentase ketersediaan rasio tempat tidur RS/1000 penduduk	**100**	**%**	
		Persentase tersedianya Obat, Vaksin dan BHP Puskesmas	**100**	**%**	
		Persentase Puskesmas dan Faskes Lainnya menerima distribusi obat, vaksin dan BHP	**100**	**%**	
		Persentase Puskesmas melaksanakan PIS-PK	**100**	**%**	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasaran Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	unit	**52.896.440.000**
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Faskes Lainnya yang dibangun	1	unit	
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5	unit	1.066.500.000
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (RSUD AU)	35	unit	399.810.000
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7	unit	**1.165.040.000**
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	11	unit	**1.780.120.000**
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	8	unit	**801.520.000**
		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah DinasTenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (RSUDAU)	2	unit	**105.300.000**
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3	unit	**10.810.000.000**
		Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan (RSUD AU)	2	unit	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12	unit	
		Jumlah Prasarana dan pendukung Fasyankes yang Disediakan (RSUD AU)	3	unit	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.362	unit	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan (RSUD AU)	10	unit	**899.738.600**
1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	paket	**2.451.135.045**

		Jumlah Obat, Vaksin yang disediakan (RSUD AU)	1	paket	
1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1	paket	**1.677.843.000**
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan (RSUD AU)	1	paket	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Alimuddin Umar)	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan (RSUDAU)	2	unit	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUDAU)	Jumlah Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (RSUDAU)	2	unit	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpeliharan Sesuai Standar	753	unit	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (RSUD AU)	20	unit	**185.000.000**
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obt, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan & Minuman ke Pusk serta Fasilitas Kesehatan Lain	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obt, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	15	Puskesmas	**103.052.000**
1.02.02.2.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatn Puskesmas	1.175	Keluarga	**267.650.000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Nilai SPM KIA Gizi**	**75**	**%**	
		Nilai SPM Penyakit Menular	**80**		
		Nilai SPM Penyakit Tidak Menular dan ODGJ	**80**		
		Jumlah Puskesmas Terakreditasi	**15**	**unit**	
		Jumlah Peserta JKN	**220.000**	**orang**	
		Persentase Puskesmas terintegrasi PSC 119	**100**	**%**	
		Jumlah Jenis media yang digunakan dalam promosi kesehatan	**4**	**jenis**	
		Persentase Puskesmas melaksanakan program 5 pilar stbm	**100**	**%**	
		Persentase Puskesmas melaksanakan surveilans kesehatan	**100**	**%**	
		Persentase Faskes lainnya mendapatkan operasional	**100**	**%**	
		Nilai SPM (RSUD AU)	**80**	**%**	
		Persentase pengelolaan pelayanan Rawat Jalan RSUD AU	**100**	**%**	
		Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dan operasional pelayanan RS	**100**	**%**	
		Persentase pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU)	**100**	**%**	

1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	350	orang	**69.450.000**
		Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (puskesmas)	15	Puskesmas	545.886.000
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300	orang	**25.000.000**
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas)	15	Puskesmas	**100.124.000**
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1425	bayi	**18.000.000**
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.350	balita	**32.000.000**
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Sekolah Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (puskes)	5.000	anak	363.509.500
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapat kan pelayanan kesehatan sesuai standar	50.500	orang	**130.000.000**
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300	orang	**180.000.000**
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18.000	orang	**35.000.000**
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah PenderitaDiabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.000	orang	**354.242.188**
2 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	517	orang	**85.000.000**
2 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Esuai Standar	5.000	orang	**420.113.850**
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Esuai Standar (Puskesmas)	15	Unit	259.100.000
2 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.000	orang	**95.943.540**
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar(Puskesmas)	15	Unit	67.800.000
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	dokumen	**150.000.000**
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	dokumen	**33.169.500**
		Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas)	15	Unit	3.094.479.100

1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelola pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1	dokumen	**22.500.000**
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelola pelayanan kesehatan lingkungan	1	dokumen	**50.000.000**
		Jumlah dokumen hasil pengelola pelayanan kesehatan lingkungan	1	dokumen	498.975.000
		Jumlah dokumen hasil pengelola pelayanan kesehatan lingkungan (Puskesmas)	15	unit	64.500.000
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Promosi kesehatan	5	media	**464.895.500**
		Jumlah dokumen Pelayanan Promosi Kesehatan yang disediakan (RSUD Alimuddin Umar)	1	dokumen	92.000.000
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2	dokumen	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	dokumen	126.380.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas)	15	unit	520.138.500
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang terlayani	45	orang	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (RSUD Alimuddin Umar)	1	dokumen	**50.007.000**
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3	dokumen	
		Jumlah dokumen laporan pengelolaan upaya kesehatan khusus (RSUD AU)	1	dokumen	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan &Pasca Krisis Kesehatan	1	dokumen	**230.000.000**
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	1	dokumen	**877.549.517**
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	**17.068.961.880**
		Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Jamkesmas (RSUD AU)	12	dokumen	378.985.000
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan sekolah	0	orang	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	70	paket	**49.500.000**

1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1	dokumen	**32.500.000**
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar Fasyankes melalui Pelayanan *Telemedicine* untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	11	fasilitas	
		Terlaksananya pelayanan Telemedicine di RSUD Alimuddin Umar	1	fasilitas	**87.655.500**
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0	unit	
		Jumlah dokumen Operasional Pelayanan RS (RSUD Alimuddin Umar)	1	**dokumen**	**74.994.000**
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	dokumen	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	dokumen	**98.510.000**
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab./Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	15	unit	**421.960.000**
1.02.02.2.02.36	Investigasi awal Kejadian Tidak diharapkan (KIPI)dn pemberian obat massal	Jumlah dokumen Hasil Investigasi awal kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan pemberian Obat Massal)	1	Dokumen	31.140.000
		Jumlah dokumen Hasil Investigasi awal kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan pemberian Obat Massal) puskesmas	15	Unit	51.000.000
		Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota yang terakreditasi (RSUD AU)	1	fasilitas	159.919.000
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah *Public Safety Center* (PSC119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPDGT)	10	unit	**2.791.350.000**
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		orang	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	400	orang	**45.000.000**
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas)	15	unit	214.500.000
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	orang	**47.550.000**
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas)	15	Unit	19.000.000

1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	200	orang	**107.167.800**
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	3	orang	**80.000.000**
1.02.02.2.02.43	Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten /Kota	1	Dokumen	16.230.000
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**3**	**dokumen**	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	dokumen	**42.537.000**
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Puskesmas)	15	unit	2.258.834.400
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (RSUD Alimuddin Umar)	1	dokumen	38.989.000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	dokumen	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	5		
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasyankes Tingkat Kab /Kota**	**Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota mendapatkan penerbitan izin**	**24**	**%**	
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit kelas C, D dan Fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan yang dikendalikan, Diawasi dan ditindaklanjuti Perizinannya	1	unit	**25.000.000**
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu Fasilitas Kesehatan	15	unit (puskesmas)	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu Fasilitas Kesehatan (RS AU)	1	unit	**39.865.000**
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Yankes Rujukan	Jumlah Dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	dokumen	
1.02.02.2.04.46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Ibu hamil dan Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	350 6.350	Ibu hamil Balita	185.935.500 -
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase Fasyankes memenuhi SDMK sesuai Standart**	**60**	**%**	
		Persentase SDMK RSUDAU yang memenuhi standart	**100**		-
		Persentase Nakes RSUDAU yangditingkatkan mutu dan kompetensinya	**100**		-
1.02.03.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**Jumlah Dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**3**	**dokumen**	

1 02 03 2.01 01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik tenaga kesehatan	1	dokumen	**5.000.000**
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik nakes	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	1	dokumen	**35.000.000**
1.02.03.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**1**	**dokumen**	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terpenuhi Sesuai Standar	**437**	**orang**	
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**1**	**dokumen**	
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan SDM Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen	**40.000.000**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	275	orang	**3.447.285.200**
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasyankes (RSUD AU)	168	orang	3.006.375.000
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan	2	dokumen	
1.02.03.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab /Kota**	**Jumlah SDMK Tingkat Kabupaten/Kota Yang dikembangkan Mutu dan ditingkatkan kompetensinya**	**190**	**orang**	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	150	orang	**1.002.043.000**
		Jumlah SDMK Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya (RSUD AU)	45	orang	**45.000.000**
1.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**75**	**%**	
		Persentase Pemeriksaan Laik Hygine Sentra Produksi dan Distribusi Makanan	**100**	**%**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, serta UMOT yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan**	**49**	**%**	
1.02.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	dokumen	**107.154.000**

1.02.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)		sarana	
1.02.03.2.02	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase SPPIRT yang diterbitkan sesuai ketentuan**	**40**	**%**	
1.02.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	1	dokumen	**115.285.000**
1.02.03.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**100**	**%**	
1.02.03.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	dokumen	
1.02.03.2.05	**Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan**	**Persentase Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan**	**100**	**%**	
1.02.03.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1	dokumen	
1.02.03.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga**	**Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan**	**40**	**%**	
1.02.04.2.06.01	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	27	unit	**178.305.000**
1.02.04.2.06.02	Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah data perizinan industri rumah tangga yang dikelola dalam rangka tindak lanjut pengawasan	1	dokumen	

1.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Keluarga berPHBS**	**35**	**%**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat**	**1**	**%**	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan,advokasi,kemitraan,dan pemberdayaan masyarakat	1	dokumen	**88.532.000**
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat**	**1**	**dokumen**	
		Jumlah Kelauarga melaksanakan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	**300**	**Keluarga**	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bessih dan sehat	1	dokumen	
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesdaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluargadan lingkungan dengan ber PHBS	1	Dokumen	**29.470.000**
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)**	**1**	**dokumen**	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil BIMTEK DAN Supervisi UKBM	1	dokumen	**94.376.000**
		Jumlah dokumen hasil BIMTEK DAN Supervisi UKBM puskesmas	15	unit	222.452.000

Tabel IV.2

Detail Sub Kegiatan Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan terdiri dari Dokumen Renstra, Cascading, Pohon Kinerja, Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RSUD AU)	Penyusunan Dokumen Perencanaan terdiri dari Dokumen Renstra, Cascading, Pohon Kinerja, Renja, Perubahan Renja, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program dan melalui koordinasi dengan TAPD
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan dilaksanakan berdasarkan usulan masing-masing program melalui koordinasi dengan TAPD
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA dilaksanakan setelah dilakukan pembahasan RKA bersama dengan TAPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan DPA dilaksanakan setelah dilakukan pembahasan RKA bersama dengan TAPD

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA dilaksanakan setelah dilakukan pembahasan RKA bersama dengan TAPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA dilaksanakan setelah dilakukan pembahasan RKA bersama dengan TAPD
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dilaksanakan berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dilaksanakan berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun anggaran
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di tetap dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD AU)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang telah di tetap dalam satu tahun anggaran dan sampai dengan tahun pelaksanaan renstra
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan merupakan kegiatan yang diperuntukaan untuk pembayaarn gaji dan tunjangan kinerja bagi pegawai ASN Dinas kesehatan, pegawai 15 Puskesmas & Pegawai Pustu Se-Kabupaten Lampung Barat sejumlah 525 pegawai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD AU)	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan berdasarkan jumlah pegawai RSUD AU yang menerima gaji dan tunjangan
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Suatu bentuk kegiatan penatausahaan keuangan dengan memferivikasi: - Semua dokumen pengajuan pencairan dari PPTK (BKP, NPD dan kelengkapan administrasi lainya) - memferifikasi Dokumen pencairan SPP dan SPM GU-UP-TU dan LS - Memferivikasi semua laporan pertanggungjawaban
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Melaksanakan koordinasi ke BPKAD terkait penatausahaan akuntansi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, yaitu mengsinkronkan hasil penjurnalan realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatan
1.02.01.2.02.05	Koordinasi & Penyusunan Lap.Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi laporan keuangan akhir tahun dengan bidang yang ada di Dinkes dan Puskesmas atas capaian pendapatan dan belanja per program, perkegiatan dan sub kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dilaksanakan berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun anggaran

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
	SKPD (RSUD AU)	
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Menyiapkan dan mengkoordinasikan ke Bidang2 dan puskesmas yang ada di Dinkes terhadap seluruh bahan tanggapan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Menyusun laporan adminstrasif, fungsional, LRA dll, dan mengkoordinasikan laporan keuangan ke bidang dan Puskesmas per program, kegiatan dan sub kegiatan atas capaian belanja dan pendapatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (RSUD AU)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD berdasarkan data target dan realisasi kinerja dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Menyusun laporan prognosis berdasarkan realisasi anggaran belanja dan pendapatan dan membuat estimasi realisasi belanja kegiatan per program, kegiatan dan sub kegiatan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran (RSUD AU)	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran berdasarkan data target dan realisasi Anggaran dari masing-masing program dan dilakukan pembahasan dengan program terkait dalam satu tahun
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah yaitu mengakomodir rencana kebutuhan barang, baik barang habis pakai ataupun belanja modal
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Menginventarisir atau melaksanakan pengecekan barang dan aset tetap kemudian mengsinkronkan data antara Kartu iventaris barang (KIB) dengan kondisi dan keberadaan barang baik yang ada di Dinkes, Puskesmas dan Pustu
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Melaksanakan pembinaan dan monitoring ke Puskesmas terakait penatausahaan aset bagaimana mencatat dan melaporkan barang yang telah di beli
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melaksanakan rekonsiliasi atas laporan barang yang telah disusun oleh pengurus barang Dinkes dengan BPKAD dan rekonsiliasi antara Puskesmas dengan Dinkes
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Melaksanakan penatausahaan aset yaitu menyusun seluruh laporan barang baik barang habis pakai maupun modal baik secara manual maupun dalam bentuk aplikasi berupa laporan SPPAT, KIB, KIR, laporan persediaan barang, laporan mutasi barang, kartu pemeliharaan, kartu pengeluaran, kartu penerimaan dll)

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- Menertibkan pemanfaatan barang milik daerah agar tidak disalahgunakan oleh penerima manfaat barang misal penggunaan kendaraan Dinas, ditertibkan dengan dibuatkannya SK pengguna kendaraan, berita acara pemakaian kendaraan, surat peminjaman aset apabila ada peminjam dll
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pembuatan name tag pegawai sebanyak 100 pcs
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	pertemuan sinkronisasi dan pengolahan data ASN untuk keperluan administrasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK
1.02.01.2.05.04	Koordinasi & Pelaksanaan SIMPEG	pertemuan guna desiminasi dan refreshing penerapan sistem informasi kepegawaian dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	penetapan kinerja pegawai sebanyak 1 kali dan monev kepegawaian sebanyak 1 kali
1.02.01.2.05.09	Pendidikan & Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan PNS dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 10 orang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (RSUD AU)	pendidikan dan pelatihan Pegawai RSUDAU dengan jumlah pesengiriman peserta sebanyak 2 orang
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	sosialisasi peraturan perundang-undangan terbarukan dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang terdiri dari 30 org dari puskesmas, 15 orang dinkes, 2 orang UPT IFK
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik seperti lampu, kabel, sakelar sebanyak 9 jenis
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSUDAU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , mencukupi kebutuhan penerangan/peralatan listrik kantor
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti laptop, sound system, dll sebanyak 4 unit
	Penyediaan Peralatan &	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , penyediaan bahan-bahan perlengkapan kantor guna penunjang pelayanan RS

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Perlengkapan Kantor (RSU AU)	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (RSUD AU)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , kegiatan yang mendukung penyediaan peralatan rumah tangga berupa alat tenun dan instalasi gizi
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (RSUD AU)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ,penyediaan bahan bahan logistik kantor, guna penunjang pelayanan rs
1.02.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan bahan cetakan dan penggandaan sebanyak 7 jenis (amplop, kertas kop, map, blangko disposisi, sticker kode barang, kalender/block note)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (RSUD AU)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , kegiatan pengadaan cetak rekam medis pasien
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran langganan surat kabar harian umum sebanyak 4 SKHU (Lampung post, tribun lampung, radar lampung, radar lambar)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (RSUD AU)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jumlah surat kabar, majalah , langganan jurnal yang masuk ke RSUD AU setiap bulan
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	makan minum kunjungan tamu dilaksanakan tentative dalam kurun waktu 12 bulan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (RSUD AU)	Fasilitasi Kunjungan Tamu berdasarkan banyaknya kunjungan tamu yang datang ke RSUD AU
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (RSUD AU)	Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa perjalanan dinas dilakukan baik di dalam daerah maupun luar daerah kabupaten
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (peserta 100 orang) dan pengadaan software dan hardware
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Daerah	
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(RSUD AU)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, penggadaan gedung bangunan
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RSUD AU)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, guna mendukung gedung admisntrasi maupun gedung kesehatan dan alat kesehatan
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan materai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat berdasarkan jumlah materai dan ongkos pengiriman paket setiap bulan
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dinkes sebanyak 3 rekening, pembayaran rekening listrik puskesmas lama sebanyak 18 rekening; pembayarana internet sebanyak 5 rekening, pembayaran telepon sebanyak 1 rekening dan pembayaran air sebanyak 1 rekening
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berdasarkan jumlah pemakaian listrik, telpon, internet dan air setiap bulannya
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan alat-alat kebersihan kantor sebanyak 16 jenis, ATK sebanyak 20 jenis dan upah tenaga kebersihan sebanyak 3 orang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, & Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	penyediaan BBM, servis, suku cadang dan pajak kendaraan dinas sebanyak 8 mobil dan 20 motor
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, & Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, & Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan beradasarkan berapa besar pajak yang dibayarkan pada setiap kendaraan baik roda empat maupun roda dua
1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Perizinan Alat Besar (RSUD AU)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar , untuk alat besar, seperti genset dan oxigen generator, dll
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	
	Pemeliharaan Mebel (RSAU)	Pemeliharaan Mebel , pengdaan meubel dan furniture
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RSUD AU)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, guna memelihara peralatan dan mesin lainnya
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung sebanyak 6 gedung (gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F)
	Pemeliharaan/Rehab Gedung Bangunan Lain (RSAU)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, rehab gedung kantor
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pembelian BBM 1 unit genset dan pemeliharaan komputer sebanyak 1 unit dan laptop sebanyak 9 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (RSUD AU)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berdasarkan bahan habis pakai dan jasa cleaning servise kebersihan RSUD AU
1.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi berupa pemasangan bronjong/penahan longsor pada area lahan fasyankes yang rawan longsor
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. Melaksanakan kegiatan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja BLUD di Puskesma Se-Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah peserta 45 orang dimana masing-masing Puskesmas mengirimkan 3 orang terdiri Kasubbag TU, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD. 2. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD di 15 Puskesmas

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD AU)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, pelayanan kesehatan yang bersumber dana BLUD
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasaran Pendukungnya	Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tipe D Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Untuk Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kebun Tebu 3 unit, Air Hitam 1 unit, Buay Nyerupa 1 unit dan Lombok 3 unit
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD AU)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit berdasarkan pemeliharaan gedung maupun diluar gedung
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi berat Puskesmas Sekincau agar menyesuaikan 14 Puskesmas lainnya yang sudah sesuai prototyfe Kementerian Kesehatan
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala di Puskesmas Pembantu di Tebaliokh, Luas, Betung, Rowo Rejo, Mekar Sari dan Sumber Alam
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Puskesmas Liwa,Kebun Tebu, BNS dan Buay Nyerupa
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (RSUD AU)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan berdasarkan pemeliharaan rumah medis, rumah paramedis
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Puskesmas Keliling Roda Dua 15 Unit untuk tenaga promkes di 15 Puskesmas

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD AU)	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan , Penggadaan gedung yang mendukung pelayanan kesehatan RS
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan prasarana air bersih Pustu tri mulyo, paving block Puskesmas BNS, Cipta Waras dan Kembahang, Pagar Puskesmas Liwa, Kenali, Sumber Jaya, Gedung Surian, sekincau, Srimulyo dan Fajar Bulan dan Solar cell Puskesmas Batu Brak
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD AU)	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Pengadaan instalasi pendukung palayanan kesehatan RS
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang untuk Puskesmas Liwa, Buay Nyerupa, Pagar Dewa, Air Hitam, Batu Brak, Sumber Jaya dan Sri Mulyo
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasyankes (RSUDAU)	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sebagai penunjang pelayanan RS
1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar juga vaksin (kecuali vaksin rutin) berdasarkan RKO tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKO dengan tim RKO terpadu Dinkes (18 org) dan pertemuan penyusunan RKO dengan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org), perjadin monev ke Puskesmas
	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD AU)	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19
1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar berdasarkan Rencana Kebutuhan Bahan Habis Pakai tahun berjalan, pertemuan penyusunan RKBHP dengan tim RKBHP terpadu Dinkes (18 org) dan Apoteker/pengelola farmasi Puskesmas (15 org)
	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai (RSUD AU)	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai, Penyeidaan Bahan habis pakai guna pelayanan penanganan covid-19
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Alimuddin Umar)	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, guna pemeliharaan gedung
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD AU)	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD Alimuddin Umar)

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kalibrasi rutin berkala alat kesehatan di 15 Puskesmas
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUDAU)	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilakukak untuk memelihara/mengganti suku cadang alat kesehatan
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obt, Vaksin, BMHP , Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pendistribusian Obat, Vaksin dan BMHP dari Kabupaten ke seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat
1.02.02.2.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Terdiri dari Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi lintas program/lintas sektor puskesmas (2 kali, dengan jumlah peserta 55 orang), Pertemuan Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program di tingkat Kab/Kota (2 kali pertemuan daring dengan jumlah peserta 20 orang, 2 kali pertemuan offline dengan jumlah peserta 30 orang), Pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi awal dan Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS-PK (68.276 keluarga)
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota**	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan paket persalinan sebanyak 350 paket, Pengadaan Buku KIA sebanyak 2900 buah , Dana Hibah Profesi IBI sebanyak 1 (satu) paket, Pendataan sasaran ibu hamil sebanyak 1675 orang, deteksi resiko tinggi ibu hamil 335 orang, penyeliaan fasilitatif 2 kali, pertemuan sosialisasi program dan monitoring evaluasi program di Kabupaten sebanyak 8 kali
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran dan operasional RTK sebanyak 13 buah, Makan Minum Ibu Hamil dan pendamping yang tinggal di RTK sebanyak 1200 kali, Biaya transportasi rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 742 kali rujukan
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah pada bayi baru lahir sebanyak 4.275 kali kunjungan untuk 15 puskesmas selama satu tahun, dan satu kali kunjungan terdiri dari 1 orang tenaga kesehatan dan dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk satu bayi. Kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan neonatal esensial setelah lahir usia 6 jam sampai 28 hari, pemeriksaan kesehatan dengan pendekatan MTBM, pemberian Vitamin K untuk bayi yang lahir tidak di fasyankes dan belum mendapatkan injeksi vitamin K1,

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
		Imunisasi hepatitis B untuk bayi <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu yang dilaksanakan di 260 posyandu yang dilaksanakan oleh 3 orang tenaga kesehatan setiap puskesmas selama 9 bulan dengan jumlah sasaran balita adalah 6.350. Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah penimbangan berat badan, pengukuran panjang/tinggi badan, pemantauan perkembangan melalui pemeriksaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang, pemberian kapsul vitamin A, dan pemberian imunisasi dasar lengkap, edukasi dan informasi
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Sekolah Dasar	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk transportasi untuk tenaga kesehatan dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang meliputi pendataan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar sebanyak orang, pelaksananaan skrening kesehatan yang terdiri dari penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indra, dan memberikan tindak lanjut hasil skreening dengan penyuluhan atau rujukan jika diperlukan. Dilaksanakan di 250 Sekolah Dasar, kegiatan selama 1 kali, jumlah tenaga kesehatan 5 orang masing-masing Puskesmas.
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cetak Buku Saku (1428 Buku),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Usia Produktif, (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Orientasi Upaya Berhenti Merokok/UBM (1 kali/thn) untuk menunjang pelayanan kesehatan pada usia produktif
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan sebanyak 2 kali yaitu 1 kali untuk orientasi penggunaan panduan praktis caregiver lansia sebanyak 45 peserta dan 1 kali panduan pengisian buku Kartu Menuju Sehat lansia dengan jumlah peserta 60 peserta. Selain itu transportasi untuk tenaga kesehatan masing-masing 1 orang perpuskesmas dengan jumlah lansia yang dilakukan pendampingan atau kunjungan rumah sebanyak 150 orang perpuskesmas dengan jumlah total adalah 2250 lansia dan kegiatan pendampingan dilakukan sebanyak 2 kali. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah penetapan sasaran lansia sebanyak 2250 orang, pelayanan edukasi dan pelayanan skrining yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku beresiko, memberikan penyuluhan kesehatan dan rujukan jika diperlukan.
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Belanja Tensi Duduk (117 Unit) Untuk menunjang pelayanan kesehatan penderita hipertensi di fasyankes dan posbindu sesuai standar
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Yankes Penderita Diabetes Melitus	Belanja Bahan Medis Habis Pakai/BMHP Alkohol Swab (497 Kotak),Blood Lancet (498 Kotak),Strip Gula Darah (550 Kotak) untuk menujang pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di fasyankes dan posbindu sesuai standar
2 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penggandaan SDQ (46.130 lbr),Jumlah Penggandaan SRQ-20 (26.000 lbr),Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi ODGJ (2 kali/thn),Jumlah Peserta Pertemuan Posbindu Cerdik Jiwa (1 kali /thn) untuk menunjang pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar.
2 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program TBC dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang, Rapat Penyusunan Rencana Kerja Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) TBC. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak &Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
		&Luar Daerah.
2 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Risiko Teronfeksi HIV, dengan kegiatan Pertemuan dan Evaluasi Capaian Program HIV dengan Pengelola Program TBC di Puskesmas sebanyak 45 orang. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, serta belanja modal komputer jinjing/laptop.
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Penyediaan ADS (12.000 buah), RDT antigen covid (2.500 buah), insentif pengelola imunisasi (16 orang), Insentif vaksinator covid (501 orang)
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Makanan Tambahan untuk ibu hamil miskin sebanyak 625 ibu hamil dan balita miskin sebanyak 3926 balita, kemudian DAK Stunting yang terdiri dari Rencana Aksi 1 sampai dengan Rencana Aksi 8, dan kegiatan pertemuan sosialisasi dan evaluasi program kesehatan gizi masyarakat sebanyak 8 kali pertemuan
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Sosialisasi Aplikasi SIPGAR kepada pengelola program kesehatan olahraga puskesmas 15 orang, evaluasi program kegiatan kesehatan kerja puskesmas 15 orang, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka monitoring dan konsultasi program
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pemicuan 5 pilar STBM 16 pekon, updating studi environment health risk assessment (EHRA) 68 pekon, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan melalui cetak dan media (tv,radio,skhu,online)di kabupaten Lampung Barat
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (RSUDAU)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, melalui media baik media elektronik, dan media cetak
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pertemuan petugas imunisasi (30 orang), Pertemuan petugas surveilans (30 orang), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Dinkes Provinsi (9 paket), Perjalanan koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Kemenkes (1 paket)
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA untuk pelayanan atau pemeriksaan kepada pengguna napza

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2025
	Jiwa dan NAPZA (RSUD AU)	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terdiri dari Pelaksanaan Kegiatan P3K (Rutin dan Insidentil), Poskotis Hari raya (2 kali) Idul Fitri (15 hari) & Nataru (10 hari) , Pelaksanaan sunatan massal (150 peserta), Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Haji (45 orang), Pemeriksaan kesehatan CJH dan vaksinasi meningitis CJH (1 kali), Hibah PPNI
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (RSUD AU)	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus berdasarkan biaya pengobatan tangungan negara pasien yang tidak memiliki kartu JKN
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pertemuan petugas kesehatan (1 kali), koordinasi dan konsultasi ke Dinkes Provinsi (5 paket), Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan ke Kemenkes (2 paket), Pengadaan Kit Peralatan Krisis Kesehatan (7 set)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Melalui Pertemuan, Sosialisasi dan Evaluasi Capain Program Pentakit Menular 45 orang 2 kali dalam 1 tahun. Dengan kegiatan penunjang antara lain belanja ATK, Bahan Komputer, Bahan cetak, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah. Belanja APD petugas fogging, Belanja RDT DBD NS, dan belanja bahan kimia pengendalian vektor (Abate dan Insectisida)
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembiayaan JKN PBI/PBPU Pemda (15820 jiwa), Bayi Baru Lahir (300 jiwa), Subsidi kls III aktif (8000 jiwa), Bimtek JKN ke Puskesmas (15 Puskesmas), Pertemuan Pengelola JKN dan P-Care Puskesmas dua kali sebanyak 30 org.
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSUD AU)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan kepada pasien JKN PBI, Jampersal dan tanggungan negara berupa Makanan Pendamping kepada keluarga pasien diberikan sehari 3 x selama pasien dirawat
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Penggandaan Fomulir Assist (30.000 lembar),Perjalanan Dinas Dalam Rangka Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Di Fasyankes dan Sekolah (6 Paket),Pertemuan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA (1 kali/thn)
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Perjalanan dinas ke Wilayah Puskesmas (7 paket), Perjalanan dinas luar daerah (13 paket), komputer jinjing (2 unit)
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Pembinaan kecamatan sehat penilaian kabupaten sehat 5 kecamatan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka pembinaan, monitoring dan konsultasi
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar Fasyankes melalui Pelayanan Telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (4 Puskesmas), Terlaksananya Sosialisasi Telemedicine Bagi Petugas di Puskesmas (75 orang)
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan (RSUD AU)	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Kesehatan , penyediaan melalui jarak jauh/konsultasi jarak jauh
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan RS	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD AU)	Operasional Pelayanan Rumah Sakit , Membiayai oprasional kegiatan yang berhubungan dengan managemen RS untuk meningkatkan administrasi pelayanan di RS
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Puskesmas dan Pustu Se- Kabupaten Lampung Barat yaitu operasional pembayaran Listrik, telpon, gaji satpam, gaji clening service dan pemeliharaan gedung Puskesmas dan Pustu
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional kantor UPT IFK, Operasional kendaraan dinas dan lapangan, pengambilan obat, vaksin dan BMHP ke Propinsi dan Honor tenaga kebersihan dan keamanan UPT IFK
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terdiri dari Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal (3 kali), Workshop Pendukung Akreditasi Puskesmas (1 Kali Pertemuan dengan jumlah peserta 30 orang), Peningkatan dan penilaian mutu eksternal/ Survey re Akreditasi (1 kali), Pertemuan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (12 kali dengan jumlah peserta 40 orang), Pertemuan Lokakarya Mini Lintas Sektor (4 kali dengan jumlah peserta 70 orang)
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (RSUD AU)	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, Kegiatan penilaian mutu pelayanan RS oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Operasional Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Operasional PSC 119 (1 Unit), Terlaksananya Pembinaan Tim Ambulan Hebat Kecamatan (15 Kecamatan), Terintegrasi nya Ambulans PSC 119 dengan RSAU Liwa, Jumlah Tim Ambulan Hebat Mendapatkan Pelatihan (80 orang), PSC 119 Memiliki call center 119 dan terintegrasi dengan NCC Kemkes (2 paket)
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (RSUDAU)	Pengelolaan Data dan Informasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Profil Kesehatan
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan berbasis elektronik terpadu
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pengadaan Komputer/Laptop, Server, dan perangkat lunak serta langganan jaringan internet
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas**	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit kelas C, D &Fasilitas kesehatan lainnya	Pendampingan, visitasi dan pemberian rekomendasi perizinan Rumah Sakit Pratama Tipe D sesuai dengan Permenkes 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko Sektor Kesehatan
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelaksanaan Pengukuran Indikator Nasional Mutu dan Indeks Keselamatan Pasien
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (RSUDAU)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan , melalui palatihan kepada tenaga fungsional tenaga kesehatan
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Yankes Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Lampung Barat (15 Upt Puskesmas), Terlaksananya pertemuan operator sisrute di Kabupaten (45 org)
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	
1.02.03.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	
1 02 03 2.01 01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Pelayanan pemberian rekomendasi surat izin praktik bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta visitasi Praktik Mandiri yang akan diterbitkan secara online melalui aplikasi perizinan PTSP Kabupaten Lampung Barat
1 02 03 2.01 02	Pembinaan & Pengawasan Tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik nakes	Pembinaan dan Pengawasan perizinan praktik tenaga kesehatan baik yang bekerja di fasyankes dan praktik mandiri di wilayah Kabupaten Lampung Barat
1.02.03.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan serta upaya yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan. Pemerataan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui penugasan khusus tenaga

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
		kesehatan berbasis tim (Tim Nusantara Sehat) atau individual di Puskesmas Terpencil dan sangat terpencil. Pendayagunaan SDMK bertujuan dapat didistribusikan dan dimanfaatkannya SDM Kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	Pembayaran gaji tenaga kesehatan PTTD/TKDDokter 15 orang (Dokter Gigi dan Dokter Umum), Administrasi: 1 orang, Analis: 4 orang, Bidan Desa: 64 orang, Bidan: 16 orang, Farmasi: 1 orang, Kesehatan Lingkungan: 2 orang, Kesehatan Masyarakat: 2 orang, Perawat Gigi: 4 orang, Tenaga Perawat: 25 orang, masyarakat mendapat beasiswa pendidikan dokter: 15 orang)
	Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar (RSUDAU)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar , pemberian insentif diberikan kepada tenaga fungsional medis /non medis dan instalasi penunjang
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan	Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan mutu sebagai bagian daripengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan juga ditujukan untuk memberikanperlindungan terhadap masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesehatan dan konsumenpelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan melaksanakan standardisasi, sertifikasi dan lisensi,dengan meningkatkan Kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya sepertiOrganisasi Profesi Kesehatan, dan pemerintah daerah
1.02.03.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan tenaga kesehatan didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi pelatihan aparatur kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi pelatihan yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan
1.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat**	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Tradisional (UMOT)	
1.02.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait pemutakhiran data sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT. Peserta pertemuan sebanyak 40 orang, terdiri dari 10 orang dari Dinkes (Kadis,Sekretaris,Kabid SDK,Subkoor Farmakmin,Pengelola Farmakmin,Subkoor SDMK, Subkoor Sarpras Alkes,Subkoor JKN Kestrad,Subag Perencanaan, Staf bidang SDK) dan 30 orang dari 15 Puskesmas (Kepala Puskesmas dan Pengelola Program)
1.02.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan ke minimal 28 sarana (23 Apotek, 2 Toko Obat, 1 Toko Alkes, 2 Optikal)
1.02.03.2.02	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	
1.02.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan bagi 80 orang pemilik/ penanggung jawab IRTP yang ingin mendapatkan SPPIRT, rapat penerbitan SPPIRT, rapat pengkajian ulang SPPIRT, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan pre market IRTP
1.02.03.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat**	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
	Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
1.02.03.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Monitoring dan evaluasi, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
1.02.03.2.05	**Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan**	
1.02.03.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	
1.02.03.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT**	
1.02.04.2.06.01	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman IRT yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Sampling terhadap 27 produk IRTP untuk dilakukan pengujian keamanan pangan, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan post market ke minimal 60 sarana IRTP, pertemuan untuk membahas hasil pengawasan label dan iklan pangan dengan KPID/pakar iklan, pertemuan desk CAPA dengan pelaku 15 usaha IRTP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
1.02.04.2.06.02	Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Rapat/ pertemuan/ koordinasi terkait pemutakhiran data sarana Industri Rumah Tangga Pangan serta Produk Pangan Industri Rumah Tangga dengan peserta 40 orang. Peserta rapat sejumlah 10 orang dari Dinkes (Kabid SDK, Subkoor Farmakmin, Pengelola Farmakmin, Staf Bid. SDK, dan 6 orang tenaga PKP/DFI Dinkes), 30 orang dari Puskesmas (Kepala Puskesmas dan PKP/DFI Puskesmas)
1.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemintraan, Peningkatan PSM dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab /Kota**	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat dengan Sosialisasi program posyandu dengan peserta 75 orang, KIE DAN Bimtek Keamanan Pangan dengan peserta 250 orang, kegiatan BOK baik oleh kabupaten maupun puskesmas,perjalanan dinas ke kecamatan/puskesmas
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota**	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Pada Masyarakat Dengan pertemuan peserta 150 orang dari 15 kecamatan dan perjalanan dinas ke 15 kecamatan serta kegiatan BOK oleh kabupaten maupun Puskesmas di kabupaten lampung barat
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat melalui pembinaan secara intensif kepada 300 keluarga terpilih,cetak leaflet,stiker dan spanduk , makan dan minum,batuan transport peserta pendukung kegiatan serta perjalanan dinas dalam wilayah diKabupaten Lampung Barat

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 difokuskan untuk menjawab isu-isu strategis dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya bidang kesehatan. Fokus Prioritas Pembangunan Kesehatan tahun 2025 serta di fokuskan pada upaya pencapaian SPM, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Penurunan Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Penanggulangan stunting, Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pengendalian penyakit serta beberapa permasalahan kesehatan terkait dengan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di Kabupaten Lampung Barat, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Penyusunan Renja PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam RPD Tahun 2023-2026. Hasil penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam proses penyusunan anggaran (RKA) tahun 2025, serta sebagai bahan evaluasi selanjutnya. Komitmen dari berbagai pihak terkait untuk konsisten dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan hal terpenting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan. Rencana Kinerja Bidang Kesehatan dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaran pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan.

Tujuan utama pembangunan kesehatan adalah menciptakan taraf hidup sehat bagi masyarakat maupun lingkungan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh seluruh rencana program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga segala hambatan dan tantangan dapat dihadapi bersama.

Demikianlah Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 ini kami buat, dan dengan dilaksanakannya Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2025 diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Lampung Barat serta kebijakan pemerintah di bidang kesehatan.

Liwa, 22 Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat

Dr. WIDYATMOKO KURNIAWAN, Sp.B
Pembina TK INIP. 19700626 200501 1 007

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

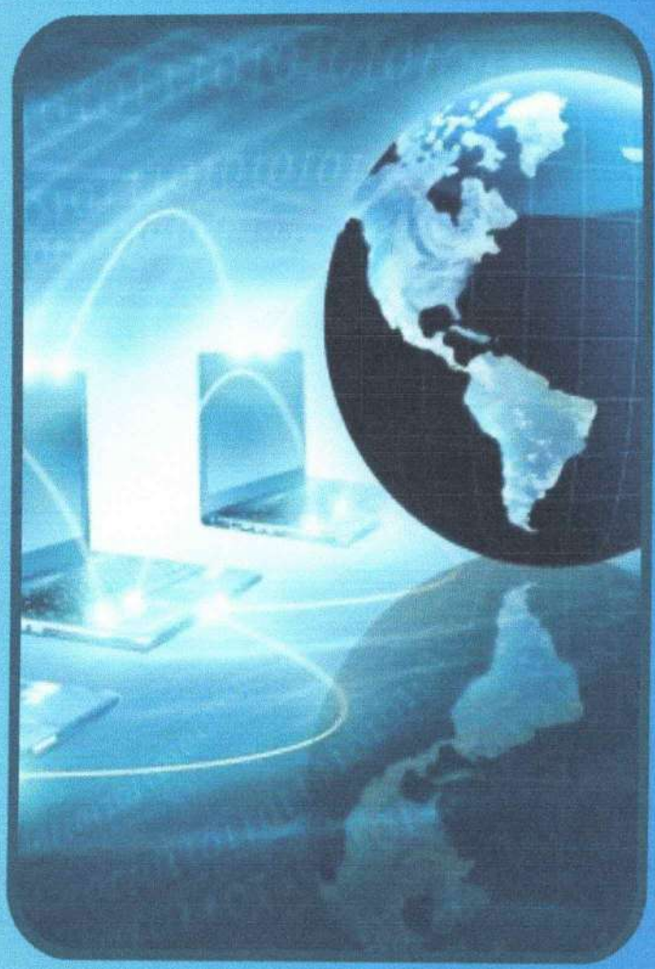

RENJA 2025

DINAS KOMINFO LAMBAR @KOMINFOLAMBAR DISKOMINFO LAMBAR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan RENJA ini.

Penyusunan RENJA ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang terlibat dalam penyusunan RENJA ini, dan atas kerjasama yang baik dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Liwa, Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Munandar, S.Sos.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197007241996031003

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 5

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 6

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 7

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 7

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 9

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 9

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 9

3.3 Program, Kegitan dan Subkegiatan 10

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15

BAB V PENUTUP 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2017 Pasal 126 ayat (1), disebutkan bahwa Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra OPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, serta menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka Menyusun rencana teknis kegiatan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan

tugas dan fungsi satuan kerja yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, Lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergi yang akan dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja ini adalah:

a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.
b. Melakukan evaluasi serta analisis kinerja OPD pada tahun anggaran sebelumnya, agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;
c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat; dan
d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Awal Renja OPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan dan membahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab II merupakan Bab yang menguraikan tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : Bab III merupakan Bab yang menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV : Bab IV merupakan Bab yang berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : Bab V merupakan Bab yang berisikan penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023, dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 Program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 11 kegiatan dan subkegiatan termasuk subkegiatan rutin sebanyak 38 subkegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk belanja daerah sebesar Rp. 7.250.786.693,- terealisasi sebesar Rp. 7.093.356.073,- atau (97,83%).

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 2 (dua) subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100% yaitu:

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi fisik/output sebesar 62,88%. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100% karena telah sesuai dengan tagihan air, listrik dan telepon.

2. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi fisik/output sebesar 62,95%. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100% karena peralatan dan mesin sebagian besar masih dalam kondisi baik dan tidak memerlukan pemeliharaan.

Rata-rata Pencapaian indiKator keluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas yang bersifat pelayanan publik kepada masyarakat, yang meliputi bidang Informasi. Pelayanan publik tersebut berkaitan dengan memberikan akses internet gratis, Menerima dan menyalurkan aspirasi Masyarakat kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan peningkatan penyebaran informasi secara cepat dan tepat.

Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat atas sasaran yang telah ditetapkan pada TA. 2023 adalah sebagai berikut :

- Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Publik, pencapaian indikator kinerjanya adalah :
  a. Nilai Indeks SPBE dengan target 2,0 Poin, terealisasi sampai dengan tahun 2023 yaitu 2,76 Poin dengan predikat baik, capaian 138% (berdasarkan hasil evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung). Nilai indeks SPBE tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,6 poin.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil *review* pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan Informasi Teknologi di pemerintah daerah diberbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya :

1. Pembangunan Teknologi Informasi saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Kurangnya SDM di bidang Teknologi Informasi baik dilingkup Bidang Kominfo maupun seluruh Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat
3. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan *stakeholders* maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal.

Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, di samping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*Media Center*) dan pengembangan Keterbukaan Informasi Publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumberdaya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kompeten yang dapat merancang, menggunakan dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat diberbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak hanya

dilingkungan Bidang Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Barat.

Meningkatkan sistem layanan kepemerintahan (*e-Government*) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem *e-Government* Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi *e-Government* sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Lampung Barat.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi *e-Government*, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala. Hal–hal tersebut merupakan tantangan bagi pengembangan IT di daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT Kabupaten Lampung Barat yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi Modern.

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel Lampiran I.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah. Karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas dan fungsi tugas yang bersifat pelayanan publik kepada masyarakat, yang meliputi bidang Informasi. Pelayanan

publik tersebut berkaitan dengan memberikan akses internet gratis, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan peningkatakan penyebaran informasi secara cepat dan tepat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki program dan kegiatan berdasarkan usulan masyarakat Lampung Barat. Hanya saja, terdapat usulan masyarakat yang diakomodir di dalam kegiatan, yaitu usulan Proposal Pemasangan Wifi di Pekon/Kecamatan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penguatan managemen komunikasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan manajemen komunikasi, diarahkan pada perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan yang sehat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya saing ditingkat global. Dengan harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi inter operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika diseluruh penjuru Indonesia seperti telepon, siaran televisi, siaran radio, surat kabar/majalah, media tradisional, internet dan media komunikasi dan informatika yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

a) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis Informasi dan Teknologi.

2. Sasaran Strategis

Selanjutnya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Publik, dengan Indikator Kinerja Utama:
    1. Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

1. Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Sebagai OPD yang memiliki tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas yang bersifat pelayanan publik kepada masyarakat, yang meliputi bidang Informasi. Pelayanan publik tersebut berkaitan dengan memberikan akses internet gratis, Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan peningkatakan penyebaran informasi secara cepat dan tepat.

a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas yang bersifat pelayanan publik kepada masyarakat, yang meliputi bidang Informasi. Pelayanan publik tersebut berkaitan dengan memberikan akses internet gratis, Menerima dan menyalurkan aspirasi Masyarakat kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan peningkatakan penyebaran informasi secara cepat dan tepat.

b) Dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan Nilai Indeks SPBE.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

2.1 Urusan Pemerintah wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan

1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub.Kegiatan

1. Pengadaan Mebel

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub.Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub.Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

A. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub.Kegiatan

1. Relasi Media
2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

A. Kegiatan Pengelolaan *e-goverment* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub.Kegiatan

1. Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
2. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
3. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

A. Kegiatan Penyelenggara Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

A. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
3. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2023 serta perkiraan pendanaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kode				Kegiatan/Sub.Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
02	**16**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**3.364.793.893**
02	**16**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.801.500**
02	16	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.150.700
			2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.711.500
			2.01.03	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.813.500
			2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.444.000
			2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	6.767.500
			2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	999.800
			2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.914.500
02	**16**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.805.924.633**
			2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.800.374.633
			2.02.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.500.000
			2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.050.000
			2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000
02	**16**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.213.500**
			2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.213.500
02	**16**	**01**	**2.05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.333.500**
			2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.333.500
02	**16**	**01**	**2.06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**276.871.200**
			2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.658.000
			2.06.02	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor	37.370.000
			2.06.05	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	31.708.400
			2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.060.000
			2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.064.800
			2.06.09	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.010.000

02	**16**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.800.000**
			2.07.05	Pengadaan Mebel	6.800.000
02	**16**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.756.000**
			2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.175.000
			2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.200.000
			2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.381.000
02	**16**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**145.093.560**
			2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	79.300.000
			2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.318.560
			2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.475.000
02	**16**	**02**		**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**4.232.047.000**
02	**16**	**02**	**2.01**	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**4.232.047.000**
			2.01.14	Relasi Media	2.971.612.000
			2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	276.099.200
			2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	745.021.200
			2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	133.748.400
			2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	105.566.200
02	**16**	**03**		**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**1.072.077.300**
02	**16**	**03**	**2.02**	**Kegiatan Pengelolaan *E-goverment* dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.072.077.300**
			2.02.15	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	467.967.000
			2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	402.593.000
			2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	201.508.300
2	**20**	**02**		**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**147.039.000**
2	**20**	**02**	**2.01**	**Kegiatan Penyelenggara Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**147.039.000**
			2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	21.713.000
			2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	125.326.000
2	**21**	**02**		**Urusan Pemerintah Bidang Persandian**	**433.051.150**
2	**21**	**02**	**2.01**	**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**433.051.150**
			2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	147.169.150
			2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	179.198.000
			2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	106.684.000
Jumlah Anggaran					**9.249.008.343**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengadakan Kerjasama Digital Media dalam hal Media Layanan Informasi Publik bagi masyarakat, Operasional Tim Bankom dan Pelayanan *Call* 112 akan selalu siap memberikan Informasi kepada masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Demikianlah uraian Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024, sebagai rencana tahunan dan bagian dari perencanaan stratejik dan rencana umum jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini berisi program-program prioritas yang direncanakan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, diemban oleh seluruh aparatur, dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Pada tahap pembahasan nanti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Barat yang akan mempertimbangkannya dengan melihat prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Liwa, Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,

Munandar, S.Sos.
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP 197007241996031003

LAMPIRAN I

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2024

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NAMA PD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) pada s.d. Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s.d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capain Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yg dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 = 6+8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	16			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	2	16			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
1	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP PerangkatDaerah Dinas Kominfo	81,43	%	11.695.798.000	81,43%	2.870.456.110	81,43%	3.136.219.160	81,43%	3.136.219.160	100	100	81,43%	6.006.675.270	100	100		
	2	16	01	2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	Dok	241.734.800	81,43%	31.899.600	81,43%	34.827.200	81,43%	34.827.200	100	100	81,43%	66.726.800	100	100	Dinas Kominfo	
	2	16	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 8 Dokumen	32	Dok	32.716.800	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	100	100	16	10.000.000	50	31		
	2	16	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen	4	Dok	34.960.000	1	6.118.000	1	6.045.600	1	6.045.600	100	100	2	12.163.600	50	35		
	2	16	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen	4	Dok	27.368.000	1	4.789.400	1	4.789.400	1	4.789.400	100	100	2	9.578.800	50	35		
2	2	16	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen	4	Dok	41.890.000	1	5.235.000	1	5.235.000	1	5.235.000	100	100	2	10.470.000	50	25		
	2	16	01	2.01.05	Koordinasi san Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perubahan yang disusun 1 Dokumen	4	Dok	27.184.000	1	4.757.200	1	4.757.200	1	4.757.200	100	100	2	9.514.400	50	35		
	2	16	01	2.01.06	Koordimasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Kinerja Ikhtisar Realisasi yang disusun 1 Dokumen	4	Laporan	4.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100	100	2	2.000.000	50	50		
	2	16	01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dok	48	Laporan	73.616.000	12	5.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	100	100	24	13.000.000	50	18		
2	2	16	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun 4 Dokumen	4	Dok	9.210.413.200	4	2.432.387.101	4	2.690.311.100	4	2.690.311.100	100	100	4	5.122.698.201	4	100	Dinas Kominfo	
	2	16		2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah 12 Bulan	30	Orang/Bulan	9.188.213.200	30	2.426.837.101	30	2.684.761.100	30	2.684.761.100	100	100	60	5.111.598.201	200	56		
	2	16		2.02.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah 1 Dokumen	4	Laporan	10.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	100	100	2	5.000.000	50	50		
	2	16		2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah 1 Dokumen	4	Laporan	4.200.000	1	1.050.000	1	1.050.000	1	1.050.000	100	100	2	2.100.000	50	50		
	2	16		2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah 1 Dokumen	4	Dokumen	8.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100	100	2	4.000.000	50	50		
	2	16	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	4	Dokumen	16.968.000	1	3.903.000	1	3.903.000	1	3.903.000	100		2	7.806.000	50		Dinas Kominfo	
	2	16	01	2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	16.968.000	1	3.903.000	1	3.903.000	1	3.903.000	100	100	2	7.806.000	50	46		
	2	16	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29	Orang	17.448.000	1	4.362.000	1	4.333.500	1	4.333.500				8.695.500		50	Dinas Kominfo	
	2	16	1	2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	17.448.000	1	4.362.000	1	4.333.500	1	4.333.500			2	8.695.500	50	50		
3	2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya	24	Laporan	684.804.000	6	206.422.172	6	215.054.800	6	215.054.800				421.476.972			Dinas Kominfo	
	2	16	01	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Listrik Bangunan Kantor yang disediakan	44	paket	18.632.000	11	4.658.000	11	4.658.000	11	4.658.000	100	100	22	9.316.000	50	50		
	2	16	01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Perlengkapan Kantor yang disusun 3jenis	20	paket	84.000.000	5	1.000.000	5	16.000.000	5	16.000.000	100	100	10	17.000.000	50	20		

	2	16	01	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang dan Penggandaan yang sediakan	44	paket	125.636.000	11	19.903.200	11	20.803.200	11	20.803.200	100	100	22	40.706.400	50	32		
	2	16	01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 SKHU	12	Dokumen	12.240.000	3	3.060.000	3	3.060.000	3	3.060.000	100	100	6	6.120.000	50	50		
	2	16	01	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Faslitasi Kunjungan Tamu 12 Bulan	48	Laporan	35.936.000	12	8.268.200	12	8.558.600	12	8.558.600	100	100	24	16.826.800	50	47		
	2	16	01	2.06.09	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Konsultasi SKPD 12 Bulan	48	Laporan	408.360.000	12	169.532.772	12	161.975.000	12	161.975.000	100	100	24	331.507.772	50	81		
	2	**16**	**1**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah**	**16**	**Unit**	**61.600.000**	4	-	4	-	4	-				-				
	2	**16**	**1**	**2.07.05**	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	Unit	61.600.000	4	-	4	-	4	-			8	-	50	-		
4	**2**	**16**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16**	**Laporan**	**586.290.000**	**4**	**83.344.842**	**4**	**71.181.000**	**4**	**71.181.000**				**154.525.842**			**Dinas Kominfo**	
				2.08.01	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan Administrasi Surat Menyurat Target 12 Bulan, Realisasi 12 Bulan	8	Laporan	17.400.000	2	3.964.000	2	1.600.000	2	1.600.000	100	100	4	5.564.000	50	32		
				2.08.02	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik target 12 bulan, realisasi 12 bulan	3	Laporan	116.800.000	3	18.359.842	3	29.200.000	3	29.200.000	100	100	6	47.559.842	200	41		
				2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 Sub Oraganisasi	4	Laporan	452.090.000	3	61.021.000	3	40.381.000	3	40.381.000	100	100	6	101.402.000	150	22		
5	**2**	**16**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**3**	**Jenis**	**876.540.000**	**3**	**108.137.395**	**3**	**116.608.560**	**3**	**116.608.560**				**224.745.955**			**Dinas Kominfo**	
	2	16	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10 unit	10	unit	561.320.000	10	81.209.885	10	79.300.000	10	79.300.000	100	100	20	160.509.885	200	29		
	2	16	01	2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang disusun yang dipemelihara 19 unit	25	unit	159.700.000	19	17.207.510	19	27.318.560	19	27.318.560	100	100	38	44.526.070	152	28		
	2	16	01	02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	155.520.000	2	9.720.000	2	9.990.000	2	9.990.000			4	19.710.000	200	13		
	2	**16**	**02**		**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Penyebaran Keterbukaan Informasi Publik**	**70**	**Poin**	**26.597.361.019**	65	**3.255.073.797**	65	**3.008.384.135**	65	**3.008.384.135**				**6.263.457.932**				
	2	**16**	**02**	**2.01**	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Kota yang disusun 8 jenis**	**6**	**Jenis**	**26.597.361.019**	6	3.255.073.797	6	3.008.384.135	6	3.008.384.135	6		6	**6.263.457.932**	6		**Dinas Kominfo**	
	2	16	02	2.01.02	monitoring opini dan aspirasi publik (Mobil Pacik+SMS Center)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8	Dokumen	1.823.447.764	2	86.808.688	2	68.824.335	2	68.824.335	100	100	4	155.633.023	50	9		
	2	16	02	2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	48	Dokumen	2.088.301.488	365	113.428.548	365	83.494.400	365	83.494.400	100	100	730	196.922.948	1520,833	9		
	2	16	02	2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dokumen	4.606.791.189	3	337.943.906	3	338.034.800	3	338.034.800	100	100	6	675.978.706	50	15		
	2	16	02	2.01.07	Layanan hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1600	layanan	15.783.750.274	400	2.482.704.928	400	2.385.179.600	400	2.385.179.600	100	100	800	4.867.884.528	50	31		
	2	16	02	2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	48	Dokumen	1.495.070.304	120	61.730.044	120	54.221.600	120	54.221.600	100	100	240	115.951.644	500	8		
	2	16	02	2.01.13	Penyediaan/PengadaanSarana dan PrasaranaPendukung Informasidan Komunikasi PublikPemerintah DaerahKabupaten/Kota (Dinas Komunikasi danInformatika	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	48	unit	800.000.000	12	172.457.683	12	78.629.400	12	78.629.400	100	100	24	251.087.083	50	31		
	2	**16**	**03**		**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan TIK 44 PD**	**60**	**%**	**7.791.721.792**	**40**	**360.741.900**	**40**	**620.967.000**	**40**	**620.967.000**	**44**		**44**	**981.708.900**	**44**			
	2	**16**	**03**	**2.01**	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Domain dan Sub-Domain yang terpelihara, OPD yang Terhubung dengan Jaringan Intra,**	**4**	**Dokumen**	**972.813.933**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**				**0**				
	2	**16**	**03**	**2.01.03**	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	19	Unit	972.813.933	**0**	0	**0**	0	**0**	0			0	-	0	-		

	2	**16**	**03**	**2.02**	**Kegiatan Pengelolaan e-goverment dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengelolaan Egoverment**	**8**	**Dokumen**	**6.818.907.859**	**1**	**360.741.900**	**1**	**620.967.000**	**1**	**620.967.000**				**981.708.900**				**Dinas Kominfo**	
	2	16	03	02.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4	Unit	1.518.767.250	1	0	1	332.818.000	1	332.818.000			2	332.818.000	50	22		
	2	16	03	2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan MasterplanSmart City	4	Dokumen	5.300.140.609	1	360.741.900	1	288.149.000	1	288.149.000	100	100	2	648.890.900	50	12		
	2	**20**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Jumlah Buku LBDA dan PDRB, Buku Promosi (Kopi) Investasi 150 Buku**	**100**	**%**	**646.046.000**	**71**	**121.914.100**	**71**	**123.001.000**	**71**	**123.001.000**				**244.915.100**				
	2	**20**	**02**		**Kegiatan Penyelenggara Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen, Jumlah Buku LBDA, PDRB, Promosi Investasi (Kopi) 150 Buku**	**8**	**Dokumen**	**646.046.000**	**3**	**121.914.100**	**3**	**123.001.000**	**3**	**123.001.000**				**244.915.100**				**Dinas Kominfo**
	2	20	2	2.01.01	Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan,Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis danDiseminasi Data Statistik Sektoral Diseminasi Data Statistik Sektoral	4	Dokumen	519.111.000	3	100.704.100	3	101.287.000	3	101.287.000	100	100	6	201.991.100	150	39		
	2	20	2	2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM	112	orang	126.935.000	28	21.210.000	28	21.714.000	28	21.714.000	100	100	56	42.924.000	50	34		
	2	**21**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Jumlah Seluruh Informasi / Jumlah seluruh yang diamankan 5 model Persandian**	**100**	**%**	**2.590.315.275**	**100**	**198890050**	**100**	**253110250**	**100**	**253110250**	**5**		**5**	**452000300**	**5**			
	2	**21**	**02**		**Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /Kota**	**Jumlah Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 3 Sub Oraganisasi**	**16**	**Laporan/ Dokumen**	**2.590.315.275**	**4**	**198890050**	**4**	**253110250**	**4**	**253110250**	**3**		**3**	**452000300**	**3**		**Dinas Kominfo**	
	2	21	2	02.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4	Dokumen	465.088.200	1	0	1	0	1	0			2	-	50	-		
	2	21	2	2.01.02	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60	Laporan	674.022.450	15	68.940.650	15	76.629.450	15	76.629.450	100	100	30	145.570.100	50	22		
	2	21	2	2.01.02	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbaris elektronik dan Non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24	Laporan	696.142.000	6	69.655.400	6	116.166.800	6	116.166.800	100	100	12	185.822.200	50	27		
	2	21	2	2.01.03	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15	PD	755.062.625	15	60.294.000	15	60.314.000	15	60.314.000	100	100	30	120.608.000	200	16		

Disusun
Liwa, Januari 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MUKHLISAR, S.Sos
NIP.197007241996031003

Dievaluasi
Liwa, Januari 2024
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AGUSTANTO BASMAR, SP, M.Si
NIP. 196903021998031007

PERSIAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**9.249.008.343,00**							**9.942.325.368,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.249.008.343,00**							**9.942.325.368,00**	
	-	**-**						**8.668.918.193,00**							**9.304.220.868,00**	
1.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Indeks Keterbukaan Informasi Publik***	**70 %**			**70 %**	**4.232.047.000,00**						**70 %**	**4.423.662.556,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang Terkelola*	-			6 jenis	4.232.047.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Publik	-	4.423.662.556,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	2.971.612.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Publik		3.309.473.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				1 Komunitas	276.099.200,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Publik		247.135.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				2 Permohonan	745.021.200,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Publik		603.807.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				2 Rekomendasi	133.748.400,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Publik		147.123.256,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	105.566.200,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Publik		116.122.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Prosentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE***	**50 %**			**50 %**	**1.072.077.300,00**						**50 %**	**1.179.285.030,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Egoverment*	-			2 Dokumen	1.072.077.300,00			-	Pembangunan Infrastruktur 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah	-	1.179.285.030,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	467.976.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah		514.773.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				44 unit	402.593.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah		442.852.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				1 Perangkat Daerah	201.508.300,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Perangkat Daerah		221.659.130,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	-						**147.039.000,00**							**161.744.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan***	**85 %**			**85 %**	**147.039.000,00**						**85 %**	**161.744.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen, Jumlah Buku LBDA, PDRB, Statistik Sektoral*	-			300 Buku	147.039.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	161.744.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				28 Orang	21.713.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		23.885.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				60 Persentase	125.326.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		137.858.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	-						**433.051.150,00**							**476.360.500,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan***	**100 %**			**100 %**	**433.051.150,00**						**100 %**	**476.360.500,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah*	-			4 Model persandian	433.051.150,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	-	476.360.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				15 Laporan	147.169.150,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		161.890.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				6 Laporan	179.198.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		197.117.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				15 Perangkat Daerah	106.684.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		117.352.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	-						**8.668.918.193,00**							**9.304.220.868,00**	
1.	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo***	**81,43 %**			**81,43 %**	**3.364.793.893,00**						**81,43 %**	**3.701.273.282,00**	
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun 4 Dokumen*	-			4 Dokumen	2.805.924.633,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	3.086.517.096,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.050.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.155.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	4.213.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	4.634.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.064.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		13.271.280,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	188.010.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		206.811.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah*	-			4 Paket	6.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	7.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	6.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 laporan	70.756.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	77.831.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.175.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.492.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	27.200.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		29.920.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	40.381.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		44.419.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	-			3 Jenis	145.093.560,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	159.602.916,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	79.300.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		87.230.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	27.318.560,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		30.050.416,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	38.475.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		42.322.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			25 Dokumen	50.801.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	55.881.650,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.711.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		9.582.650,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8.150.700,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.965.770,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.813.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.494.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.444.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		11.488.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.767.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.444.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	999.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.099.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	8.914.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		9.805.950,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun 4 Dokumen*	-			4 Dokumen	2.805.924.633,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	3.086.517.096,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	2.800.374.633,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.080.412.096,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	JUMLAH							**9.249.008.343,00**							**9.942.325.368,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(RENJA-OPD)

DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

TAHUN 2025

DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Mawar No. 1, Way Mengaku. Telp/Fax. (0728) 21086, Liwa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas petunjuk dan pertolonganNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) OPD Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 – 2026.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

Liwa, 9 Maret 2024

KEPALA DINAS
KOPERASI UKM, DAN PERDAGANGAN,
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TRI UMARYANI, S.P, M.Si
NIP.19751229 199902 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dan perangkatnya, untuk melaksanakantugas-tugas pemerintahan umum. Undang-undang mengamanatkan untuk membuat dan menyusun perencanaan pembangunan daerah secara periodik yang akan digunakan sebagai acuan serta pedoman dalam melaksanakan tugas.

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transisi, yang disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) mengingat Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang masa kepemimpinan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2022. Selanjutnya berdasarkan RPD yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan pelaksanaan Program dan kegiatan tahun perencanaan.

Organisasi Perangkat Daerah menindaklanjuti RPD yang tel;ah disusun menjadi dokumen Rencana Strategis sesuai bidang urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah dimaksud, yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja Tahunan yang disusun secara periodik.

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat terhitung mulai bulan Januari 2024 berubah nomenklatur menjadi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan berdadarkan Peraturan Daerah Nomor tahun 2023.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah disusunnya Rencana Strategis perubahan yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2024 – 2026.

Rencana Kerja yang disusun saat ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dari Renstra OPD Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan Renja OPD ini memerlukan pemikiran yang matang untuk mensinergikan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis dan kemungkinan pelaksanaannya. Perencanaan kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi diawali dengan penataan program dari tingkat pusat di kementerian terkait sampai ke tingkat kabupaten di tingkat pelaksana yang ada pada satuan kerja. Penyusunan Renja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2025 ini mendukung perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat yang sangat teknis yaitu pada urusan wajib Koperasi dan urusan pilihan industri dan perdagangan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah danrencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
6. Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

1.3.2. Tujuan

Meningkatkan peran, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN RENJA OPD

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 9 program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 17 kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk subkegiatan rutin sebanyak 38 sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja Daerah sebesar Rp. 18.424.991.230,- terealisasi sebesar Rp.18.033.195.569 atau 97.87 persen. Rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 100 persen.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Perkiraan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Target capaian 2023	Realisasi	%
(1)	(2)	(4)		
1.	Persentase Koperasi Sehat	27		
2.	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	10%		
3.	Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)	905,17		
4.	Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)	365,57		

Tabel diatas merupakan perkiraan pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023.

2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan mengacu pada hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat serta sasaran RPJMD, maka **isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi** di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
    a. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional. Keberadaan usaha koperasi sebagai Badan Hukum resmi yang diakui negara merupakan bukti keseriusan pemerintah

membangun ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong. Usaha Koperasi diharapkan mampu menjawab permasalahan ekonomi masyarakat pada umumnya dan ekonomi anggotanya pada umumnya. Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana menjadikan usaha koperasi menjadi usaha yang maju, modern, dan kompetitif. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan sebuah upaya strategis dan serius dari Pemerintah Daerah mengingat tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit, baik yang berasal dari sisi internal maupun dari eksternal. Selain itu, permasalahan koperasi yang tidak aktif bahkan terkategori layak untuk dilakukan pembubaran juga masih menjadi permasalahan yang serius bagi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan di tahun – tahun mendatang.

b. Sektor strategis lainnya adalah sektor UMKM. Saat ini sektor tersebut menjadi perhatian pemerintah, bagaimana menjadikan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang tumbuh, kuat dan berkembang dan naik kelas usaha maupun jangkauan produksi dan pemasarannya. Beberapa hal yang disiapkan pemerintah antara lain pusat – pusat inkubasi, akses pemasaran dan juga pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasaan Tahun 2023 mendapat alokasi Pembanguanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang merupakan pusat layanan inkubasi bisnis yang memiliki outcome Peningkatan Skala Usaha UMKM serta tumbuhnya wirausaha pemula di Kabupaten Lampung Barat. Pembangunan PLUT di Wilayah Kabupaten Lampung Barat diharapkan mampu menjadi sebuah upaya besar yang akan mendorong peningkatan usaha bagi UMKM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

2. Urusan Pilihan Perdagangan

Berbicara masalah perdagangan, isu strategis yang berkembang adalah permasalahan kenaikan harga – harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting,

perlindungan konsumen, serta peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. Semua hal diatas akan sangat mempengaruhi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus hadir dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan disektor perdagangan tersebut. Oleh karenya diperlukan strategi, kebijkan dan program kegiatan yang nyata dan menyasar langsung pada permasalahan – permasalahan yang ada.

3. Urusan Pilihan Perindustrian

Perindustrian merupakan satu dari berbagai sektor usaha bagi UKM. Kabupaten Lampung Barat bukan merupakan wilayah pengembangan industri skala besar, mengingat 65% wilayahnya merupakan daerah konservasi Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang harus tetap lestari. Akan tetapi Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah penghasil bahan baku industri agro yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Kabupaten Lampung Barat adalah wilayah pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang berbasis agroindustri. Jumlah IKM Kabupaten Lampung Barat per Desember 2021 adalah 823 IKM yang tersebar di Kecamatan – Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Pertumbuhan dan peningkatan omset IKM diharapkan mampu untuk meningkatkan share PDRB sektor industri di Lampung Barat, yang artinya akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana merumuskan sebuah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan peningkatan omset IKM tersebut. Tantangan yang dihadapi pada tahun – tahun mendatang adalah bagaimana menjadikan skala Usaha Industri Kecil Menengah menjadi usaha yang produktif, kompetitif dan memiliki jejaring pemasaran yang luas hingga keluar daerah dan juga luar negeri. Pada tahun 2023 Kementrian Perindustrian Republik Indonesia melalui Dana

Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik memberikan Penugasan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan Peningkatan Kualitas IKM berbasis Sentra IKM melalui Revitalisasi Sentra IKM dengan lokus Sentra IKM Kopi Robusta Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, yakni pembangunan Lamban Promosi bagi IKM. Pengelolaan Lamban Promosi tersebut akan disandingkan dengan Pengelolaan PLUT yang diharapkan sinergi yang dilakukan akan menghasilkan output dan outcome yang maksimal.

Pada tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor tahun 2023, terjadi dinamisasi Organisasi Perangkat Daerah, dimana urusan Perindustrian tidak lagi menjadi bagian dari Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terlampir

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Masyarakat pada kegiatan Forum Gabungan OPD/DESK sebagai rangkaian Musrenbang Kabupaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah usulan
1.	Kredit Lunak Bagi Koperasi dan UMKM	3 usulan
2.	Bantuan Alat Produksi Bagi UMKM/IKM	2 usulan
3.	Pelatihan UMKM	2 usulan
4.	Pembangunan/rehabilitasi Pasar Pemda	4 usulan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat selaras dengan visi pembangunan nasional yakni "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik,
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan masing-masing kementrian yang menangani urusan perindustrian dan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Kebijakan masing-masing kementrian yang menangani urusan Koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Identifikasi Kebijakan Nasional

NO	**KEBIJAKAN**	**SUMBER**	**KETERANGAN**
1	**2**	**3**	**4**
1	Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern	Renstra Koperasi UKM	
2	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang mampu berdaya saing di pasar Domestik dan Global		
3	Terwujudnya kementerian koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi		

3.5 Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi
2. Meningkatnya peyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi
3. Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional
4. Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri
5. Menigkatnya jumlah UKM yang dibina, dan
6. Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM
7. Pemantauan harga bahan pangan pokok penting
8. Peningkatan pemahaman dan ketaatan para stakeholder terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen
9. Pertumbuhan ekspor melalui pembinaan dan dukungan bagi

pelaku ekspor

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya Kontribusi Subsektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pendapatan Perkapita

   Sasaran :

   a. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan

   b. Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat

Rencana target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 4.1 Target Pencapaian Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-			
			2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Pendapatan Perkapita	26,78 juta	28,04 juta	29,42 juta	30,92 juta

3.4 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan sektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdaganga yang sejalan dengan RPJM Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, maka untuk program prioritas tahun 2023 baik melalui dana APBD maupun APBN, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan program-program sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- ✓ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- ✓ Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- ✓ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Pengadaan Mebel
- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- ✓ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainya

i) Peningkatan Pelayanan BLUD

- ✓ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

a) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota

- ✓ Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengeawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

3) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

a) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

- ✓ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

4) PROGRAM PERLINDUNGAN KOPERASI

a) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukrisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

5) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO

a) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

- ✓ Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- ✓ Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- ✓ Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- ✓ Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

- ✓ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

6) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
   a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
      - ✓ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
      - ✓ Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
   b) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya
      - ✓ Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
      - ✓ Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
7) PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
   a) Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota
      - ✓ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
      - ✓ Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
   b) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - ✓ Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan
      - ✓ Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

8) PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
   a) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
      - ✓ Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang
      - ✓ Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal
9) PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
   a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
      - ✓ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

- ✓ Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi
1	*2*	*3*	*7*	*8*	*9*
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	77.94	4,846,686,719	Lampung Barat
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Daerah yang disusun	11 dokumen	20,020,000	Lampung Barat

		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	5 dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen		
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	5,500,000	Lampung Barat
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	2,420,000	Lampung Barat
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	2,420,000	Lampung Barat
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2,420,000	Lampung Barat
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	2,420,000	Lampung Barat

2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	2,420,000	Lampung Barat
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	2,420,000	Lampung Barat
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	3,604,824,619	Lampung Barat
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 laporan		
		Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	1 laporan		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen		
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	3,598,169,619	Lampung Barat

2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 laporan	3,025,000	Lampung Barat
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	4 laporan	1,210,000	Lampung Barat
2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	2,420,000	Lampung Barat
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	15,297,900	Lampung Barat
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		
2.17.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	2,000,000	Lampung Barat
2.17.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	13,297,900	Lampung Barat
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	30,250,000	Lampung Barat
2.17.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	18,150,000	Lampung Barat

2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	12,100,000	Lampung Barat
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 paket	417,474,200	Lampung Barat
		Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket		
		Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket		
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	4 dokumen		
		Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan		
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 paket	2,662,000	Lampung Barat
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	60,500,000	Lampung Barat

2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	78,650,000	Lampung Barat
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	4 dokumen	115,216,200	Lampung Barat
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	9,196,000	Lampung Barat
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	151,250,000	Lampung Barat
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	4 paket	111,650,000	Lampung Barat
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	33,000,000	Lampung Barat
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	36,300,000	Lampung Barat
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	42,350,000	Lampung Barat
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	317,020,000	Lampung Barat

		Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan		
		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan		
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2,420,000	Lampung Barat
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	121,000,000	Lampung Barat
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	193,600,000	Lampung Barat
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	38 unit	287,800,000	Lampung Barat
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	181,500,000	Lampung Barat
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	36,300,000	Lampung Barat
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	3 unit	70,000,000	Lampung Barat

	atau Bangunan lainya	yang dipelihara/direhabilitasi			
2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penujang pelayanan	1 unit kerja	42,350,000	Lampung Barat
2.17.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penujang pelayanan	1 unit kerja	42,350,000	Lampung Barat
			2 unit kerja		
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	35%	121,000,000	Lampung Barat
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	58 unit usaha	121,000,000	Lampung Barat
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengeawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksanaan dan pengawasan	58 unit usaha	121,000,000	Lampung Barat

2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	6%	54,500,000	Lampung Barat
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	20 orang	54,500,000	Lampung Barat
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	20 orang	54,500,000	Lampung Barat
2,17,06	PROGRAM PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	15%	96,800,000	Lampung Barat
2,17,06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	45 orang	96,800,000	Lampung Barat
2,17,06.2.01.05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukrisasi usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan	45 orang	96,800,000	Lampung Barat

		restrukturisasi usaha			
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Persentase UMKM terfasilitasi	9.00%	1,276,350,000	Lampung Barat
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	11.642 unit usaha	1,276,350,000	Lampung Barat
		Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	10 unit usaha		
		Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	29 unit usaha		
		Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan	363 unit usaha		

		Terhadap usaha mikro			
		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	25 orang		
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	10 unit usaha	163,350,000	Lampung Barat
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	29 unit usaha	60,500,000	Lampung Barat
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	500 unit usaha	750,000,000	Lampung Barat
2.17.07.2.01.05	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	11.642 unit usaha	242,000,000	Lampung Barat
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	25 orang	60,500,000	Lampung Barat
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				

	PERDAGANGAN				
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	60.00%	92,800,950,000	Lampung Barat
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	92,601,300,000	Lampung Barat
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 unit		
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	92,565,000,000	Lampung Barat
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 unit	36,300,000	Lampung Barat
3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 dokumen	199,650,000	Lampung Barat
		Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	1 dokumen		
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 dokumen	163,350,000	Lampung Barat

3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	1 dokumen	36,300,000	Lampung Barat
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	3%	590,000,000	Lampung Barat
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	1 Laporan	450,000,000	Lampung Barat
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	0		
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	48 Laporan	70,000,000	Lampung Barat
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang	1 dokumen	380,000,000	Lampung Barat

	berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota			
			5 laporan		
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	1 dokumen	140,000,000	Lampung Barat
		Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	5 laporan		
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah dokumen Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	1 dokumen	70,000,000	Lampung Barat
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	5 laporan	70,000,000	Lampung Barat
3.30.06.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTTP tertera sah	9.00%	306,117,000	Lampung Barat
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	235 unit	306,117,000	Lampung Barat

		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	100 orang		
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	285 unit	204,987,000	Lampung Barat
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	100 orang	101,130,000	Lampung Barat
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	6.90%	450,200,000	Lampung Barat dan Luar Kabupaten
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	21 UMKM	450,200,000	Lampung Barat dan Luar Kabupaten
		Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	21 UMKM		
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	305,000,000	Lampung Barat dan Luar Kabupaten

3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM	145,200,000	Lampung Barat dan Luar Kabupaten

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 2025 ini disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Koperasi UKM dan Perdagangan dan Pasar secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksaan Renja Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Hasil kinerja Rencana Kerja OPD Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan yang telah disusun akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja OPD tahun berikutnya sehingga kinerja OPD dapat terukur dan berkesinambungan.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Rencana Kerja ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dengan meningkatnya peran bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di Kabupaten Lampung Barat secara siginifikan.

Penulis juga menyadari atas segala kekurangan dalam penyampaian pada Renja Tahun 2025, maka mohon kiranya kritik serta saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan pada penyusunan berikutnya.

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) tahun yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) tahun yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																Dinas Koperindag	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																Dinas Koperindag	
	2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	77.95	18,199,799,300	81,96	3,304,186,905	77.93	3,206,237,420	77.93	3,206,237,420							Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan Daerah yang disusun**	38 dokumen	64,974,000	11 dokumen	19,999,900	11 dokumen	19,998,700	11 dokumen	19,998,700	100	100.00	22 dokumen	19,999,900	57.9	30.78	Dinas Koperindag	
			Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	20 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		100		10 dokumen		50		Dinas Koperindag	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		100		20 dokumen		50		Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44 dokumen	9,282,000	11 dokumen	5,000,000	11 dokumen	5,000,000	11 dokumen	5,000,000	100	100.00	22 dokumen	5,000,000	50	53.87	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4 dokumen	9,282,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	100	100.00	2 dokumen	2,000,000	50	21.55	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4 dokumen	9,282,000	1 dokumen	1,999,900	1 dokumen	1,998,700	1 dokumen	1,998,700	100	100.00	2 dokumen	1,999,900	50	21.55	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4 dokumen	9,282,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	100	100.00	2 dokumen	2,000,000	50	21.55	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	4 dokumen	9,282,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	100	100.00	2 dokumen	2,000,000	50	21.55	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	9,282,000	1 laporan	2,000,000	1 laporan	2,000,000	1 laporan	2,000,000	100	100.00	2 laporan	2,000,000	50	21.55	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 dokumen	9,282,000	10 dokumen	5,000,000	12 dokumen	5,000,000	12 dokumen	5,000,000	100	100.00	24 dokumen	5,000,000	63.157895	53.87	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	35 orang/bulan	3,965,307,081	31 orang/bulan	2,860,414,719	35 orang/bulan	2,635,946,000	35 orang/bulan	2,635,946,000	100	100.00	35 orang/bulan	3,075,629,564	100	77.56	Dinas Koperindag	
			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	4 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100		2 laporan		50		Dinas Koperindag	
			Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100		2 laporan		50		Dinas Koperindag	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100		2 dokumen		50		Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	13,800,913,390	31 orang/bulan	2,854,915,019	35 orang/bulan	2,630,446,800	35 orang/bulan	2,630,446,800	100	100.00	35 orang/bulan	3,070,129,864	100	22.25	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	4 laporan	11,602,500	1 laporan	2,499,800	1 laporan	2,499,600	1 laporan	2,499,600	100	100.00	2 laporan	2,499,800	50	21.55	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 laporan	4,641,000	4 laporan	999,900	4 laporan	999,600	4 laporan	999,600	100	100.00	8 laporan	999,900	50	21.54	Dinas Koperindag	

	2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4 dokumen	9,282,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	100	100.00	2 dokumen	2,000,000	50	21.55	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	**4 dokumen**	59,624,590	**1 dokumen**	2,000,000	**1 dokumen**	2,000,000	**1 dokumen**	2,000,000	100	100.00	**2 dokumen**	2,000,000	50	3.35	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	4 dokumen	8,000,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	100	100.00	2 dokumen	2,000,000	50	25.00	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	51,004,590	1 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0		0 dokumen	-	0	0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**	8 dokumen	116,025,000	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	4,999,800	2 dokumen	4,999,800	100	100.00	4 dokumen	5,000,000	50	4.31	Dinas Koperindag	
			Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang		2 orang		0 orang		0 orang		0		0 orang		0		Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 dokumen	69,615,000	2 dokumen	5,000,000	2 dokumen	4,999,800	2 dokumen	4,999,800	100	100.00	4 dokumen	5,000,000	50	7.18	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	46,410,000	2 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0		0 orang	-	0	0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan**	12 paket	1,601,237,820	3 paket	171,150,220	3 paket	207,142,400	3 paket	207,142,400	100	100.00	6 paket	143,709,500	100	8.97	Dinas Koperindag	
			Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket		1 paket		1 paket		1 paket		0		2 paket		0		Dinas Koperindag	
			Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket		2 paket		2 paket		2 paket		100		2 paket		100		Dinas Koperindag	
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	16 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		100		8 dokumen		100		Dinas Koperindag	
			Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	48 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100		24 laporan		100		Dinas Koperindag	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100		2 laporan		100		Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	10,210,200	3 paket	2,253,200	3 paket	2,253,200	3 paket	2,253,200	100	100.00	6 paket	2,253,200	100	22.07	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	232,050,000	1 paket	1,295,420	0 Paket	16,000,000	0 Paket	16,000,000	0	100.00	1 Paket	-	12.5	0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	301,665,000	2 paket	39,669,300	2 paket	42,292,200	2 paket	42,292,200	100	100.00		39,672,300	100	13.15	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	16 dokumen	441,916,020	4 dokumen	10,385,000	4 dokumen	10,385,000	4 dokumen	10,385,000	100	100.00	8 dokumen	10,385,000	50	2.35	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	48 laporan	35,271,600	12 laporan	5,320,000	12 laporan	5,319,000	12 laporan	5,319,000	100	100.00	24 laporan	5,320,000	50	15.08	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 laporan	580,125,000	12 laporan	112,227,300	12 laporan	130,893,000	12 laporan	130,893,000	100	100.00	24 laporan	86,079,000	50	14.84	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	19 paket	331,665,000	5 paket											0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	3 paket	99,300,000	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0		0 paket	-	0	0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 paket	139,230,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0		0 unit	-	0	0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7 unit	162,435,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0		0 unit	-	0	0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat**	48 laporan	1,039,584,000	12 laporan	134,015,451	12 laporan	185,553,100	12 laporan	185,553,100	100	100.00	24 laporan	165,770,300	50100	15.95	Dinas Koperindag	
			Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 laporan		12 laporan												Dinas Koperindag	
			Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 laporan		12 laporan												Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48 laporan	9,282,000	12 laporan	1,900,000	12 laporan	2,000,000	12 laporan	2,000,000	100.00	100.00	24 laporan	2,000,000	50.00	21.55	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 laporan	287,742,000	12 laporan	48,840,151	12 laporan	117,470,000	12 laporan	117,470,000	100.00	100.00	24 laporan	61,970,000	50.00	21.54	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 laporan	742,560,000	12 laporan	83,275,300	12 laporan	66,083,100	12 laporan	66,083,100	100.00	100.00	24 laporan	101,800,300	50.00	13.71	Dinas Koperindag	

	2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara**	148 unit	997,815,000	27 unit	111,606,615	36 unit	115,022,420	36 unit	115,022,420	100.00	100.00	63 unit	144,575,000	42.57	14.49	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	696,150,000	10 unit	77,095,115	11 unit	80,475,000	11 unit	80,475,000	100.00	100.00	11 unit	12,124,000	100.00	1.74	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	56 unit	139,230,000	14 unit	12,124,000	14 unit	12,432,000	14 unit	12,432,000	100.00	100.00	14 unit	12,124,000	100.00	8.71	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	162,435,000	3 unit	22,387,500	3 unit	22,115,420	3 unit	22,115,420	100.00	100.00	3 unit	22,387,500	100.00	13.78	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penujang pelayanan**	1 unit kerja	162,435,000	1 unit kerja	19,140,000	1 unit kerja	35,575,000	1 unit kerja	35,575,000	100.00	100.00	1 unit kerja	35,575,000	100.00	21.90	Dinas Koperindag	
	2.17.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penujang pelayanan	1 unit kerja	162,435,000	1 unit kerja	19,140,000	1 unit kerja	35,575,000	1 unit kerja	35,575,000	100.00	100.00	1 unit kerja	35,575,000	100.00	21.90	Dinas Koperindag	
	2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi aktif**	36%	464,100,000	33%	-	33%	-	34%	-	100.00		34%	-	94.44	0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	60 unit usaha	464,100,000	20 unit usaha	-	0 unit usaha	-	0 unit usaha	-	0.00		20 unit usaha	-	33.33	0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	60 unit usaha	464,100,000	20 unit usaha	-	0 unit usaha	-	0 unit usaha	-	0.00		20 unit usaha	-	33.33	0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya**	8%	**393,235,500**	9.6%	133,893,500	2%	140,801,900	2%	140,801,900	100.00	100.00	12%	133,893,500	150.00	34.05	Dinas Koperindag	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	16.16%	393,235,500	11.90%	133,893,500	4.04%	140,801,900	4.04%	140,801,900	100.00	100.00	15.94%	133,893,500	98.64	34.05	Dinas Koperindag	
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	80 orang	393,235,500	60 orang	133,893,500	60 orang	140,801,900	60 orang	140,801,900	100.00	100.00	120 orang	133,893,500	150.00	34.05	Dinas Koperindag	
	2,17,06	**PROGRAM PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%**	18%	371,280,000	2%	15,000,000	12%	15,000,000	12%	15,000,000	100.00	100.00	12%	15,000,000	66.67	4.04	Dinas Koperindag	
	2,17,06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	180 orang	371,280,000	45 orang	15,000,000	20 orang	82,936,000	20 orang	82,936,000	0.00	100.00	65 orang	15,000,000	36.11	4.04	Dinas Koperindag	
	2,17,06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukrisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	180 orang	371,280,000	45 orang	15,000,000	20 orang	82,936,000	20 orang	82,936,000	0.00	100.00	65 orang	15,000,000	36.11	4.04	Dinas Koperindag	
	2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO**	**Persentase UMKM terfasilitasi**	12.00%	3,317,597,000	7.40%	286,476,500	3.00%	610,126,100	8.00%	610,126,100	100.00	100.00	8.00%	286,376,500	66.67	8.63	Dinas Koperindag	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	12.806 unit usaha	3,317,597,000	12.583 unit usaha	286,476,500	0 unit usaha	610,126,100	0 unit usaha	610,126,100	0.00	100.00	12.583unit usaha	286,376,500	98.26	8.63	Dinas Koperindag	
			Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	40 unit usaha		0 unit usaha		10 unit usaha		10 unit usaha		0.00		10 unit usaha		25.00		Dinas Koperindag	
			Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	111 unit usaha		0 unit usaha		0 unit usaha		0 unit usaha		0.00		0 unit usaha		0.00		Dinas Koperindag	

			Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	1.419 unit usaha		0 unit usaha		361 unit usaha		361 unit usaha		0.00		361 unit usaha		25.44		Dinas Koperindag	
			Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	100 orang		25 orang		145 orang		145 orang		100		230 orang		170		Dinas Koperindag	
																		Dinas Koperindag	
	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	8.750 unit usaha	928,200,000	12.583 unit usaha	-	10.584 unit usaha	-	12.583 unit usaha	-	0.00		12.583 unit usaha	-	98.26	0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	40 unit usaha	626,535,000	0 unit usaha	-	10 unit usaha	12,278,000	10 unit usaha	12,278,000	0.00	100.00	0 unit usaha	-	25.00	0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	111 unit usaha	232,050,000	0 unit usaha	-	0 unit usaha	-	0 unit usaha	-	0.00		0 unit usaha	-	0.00	0.00	Dinas Koperindag	
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	1.419 unit usaha	-	0 unit usaha	-	361 unit usaha	224,094,000	361 unit usaha	224,094,000	0.00	100.00	361 unit usaha	-	25.44		Dinas Koperindag	
	2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	100 orang	570,125,000	85 orang	286,476,500	145 orang	373,754,100	145 orang	373,754,100	100.00	100.00	230 orang	286,376,500	230.00	50.23	Dinas Koperindag	
	2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase wirausaha pemula**	1.00%	36,622,131,000	0.21%	7,148,730,677	0.00%	-	0.00%	-	100.00		0.25%	7,210,987,318	100.00	19.69	Dinas Koperindag	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	8.750 unit usaha	36,622,131,000	723 unit usaha	7,148,730,677	0. unit usaha	-	0. unit usaha	-	100		2.600. unit usaha	7,210,987,318	100	19.69	Dinas Koperindag	
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	8.750 unit usaha	36,622,131,000	723 unit usaha	7,148,730,677	0. unit usaha	-	0. unit usaha	-	100		2.600. unit usaha	7,210,987,318	100	19.69	Dinas Koperindag	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															#DIV/0!	Dinas Koperindag	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**															#DIV/0!	Dinas Koperindag	
	3.30.03.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi**	80.00%	355,941,495,000	10.00%	305,143,462	20%	71,599,503,450	20%	71,599,503,450	-	100.00	20%	81,261,000	-	0.02	Dinas Koperindag	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 unit	355,175,730,000	1 unit	223,882,462	1 unit	71,518,242,450	1 unit	71,518,242,450	0	100.00	2 unit		25	0.00	Dinas Koperindag	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20 unit		0 unit		0 unit		0 unit		0		0 unit		0		Dinas Koperindag	
																		Dinas Koperindag	
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 unit	355,036,500,000	1 unit	223,882,462	1 unit	71,518,242,450	1 unit	71,518,242,450	0	100.00	2 unit	-	25	0.00	Dinas Koperindag	
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20 unit	139,230,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0		0 unit	-	0	0.00	Dinas Koperindag	
	3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	4 dokumen		1 dokumen	81,261,000	1 dokumen	81,261,000	1 dokumen	81,261,000	100	100.00	2 dokumen	81,261,000	50		Dinas Koperindag	
			Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	4 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0		0 dokumen		0		Dinas Koperindag	
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	4 dokumen	626,535,000	1 dokumen	81,261,000	1 dokumen	81,261,000	1 dokumen	81,261,000	100	100.00	2 dokumen	81,261,000	50	12.97	Dinas Koperindag	
	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	4 dokumen	139,230,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0		0 dokumen	-	0	0.00	Dinas Koperindag	

	3.30.04.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**%rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting**	3%	2,300,000,000	0.14%	61,875,300	3%	78,125,000	3%	78,125,000	100	100.00	3%	52,125,000	100	2.27	Dinas Koperindag	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	4 Laporan	1,768,575,000	1 Laporan	61,875,300	1 Laporan	78,125,000	1 Laporan	78,125,000	100	100.00	2 Laporan	52,125,000	50	2.95	Dinas Koperindag	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	192 laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0		0 Laporan		0		Dinas Koperindag	
	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	192 Laporan	282,900,000	48 Laporan	61,875,300	48 Laporan	78,125,000	48 Laporan	78,125,000	100	100.00	96 Laporan	52,125,000	50	18.43	Dinas Koperindag	
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	4 Laporan	1,485,675,000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-			0 Laporan	-		0.00	Dinas Koperindag	
																		Dinas Koperindag	
	3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan**	4 dokumen	531,425,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0		0 dokumen	-	0	0.00	Dinas Koperindag	
			Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	20 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0		0 Laporan		0		Dinas Koperindag	
																		Dinas Koperindag	
	3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah dokumen Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	4 dokumen	261,425,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0		0 dokumen	-	0	0.00	Dinas Koperindag	
	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	20 laporan	270,000,000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0		0 Laporan	-	0	0.00	Dinas Koperindag	
	3.30.06.	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**%Alat UTTP tertera sah**	22.46%	1,063,102,125	8.00%	54,516,700	5.07%	55,571,000	5.07%	55,571,000	100	100.00	13.07%	55,001,000	58.2	5.17	Dinas Koperindag	
	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang**	1.640 unit	1,063,102,125	394 unit	54,516,700	185 unit	55,571,000	185 unit	55,571,000	100	100.00	579 unit	55,001,000	35.3	5.17	Dinas Koperindag	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	400 orang		0 orang		0 orang		0 orang				0 orang				Dinas Koperindag	
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	1.640 unit	774,472,125	394 unit	54,516,700	235 unit	55,571,000	235 unit	55,571,000	100	100.00	579 unit	55,001,000	35.3	7.10	Dinas Koperindag	
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	400 orang	288,630,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0		0 orang	-	0	0.00	Dinas Koperindag	
	3.30.07.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**%Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya**	25.10%	1,736,920,000	10.09%	71,552,652	5.70%	41,997,500	5.70%	41,997,500	100	100.00	15.79%	41,997,500	62.9	2.42	Dinas Koperindag	
	3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota**	60 UMKM		15 UMKM	71,552,652	18 UMKM	41,997,500	18 UMKM	41,997,500	100	100.00	33 UMKM	41,997,500	55.00		Dinas Koperindag	
			Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	60 UMKM		15 UMKM												Dinas Koperindag	
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	60 UMKM	1,180,000,000	15 UMKM	-		-		-	0			-	0	0.00	Dinas Koperindag	
	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	60 UMKM	556,920,000	15 UMKM	71,552,652	18 UMKM	41,997,500	18 UMKM	41,997,500	100	100.00	33 UMKM	41,997,500	55	7.54	Dinas Koperindag	

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI
IGAH DAN PERDAGANGAN
JNG BARAT

TRI UMIYANI, S.P, M.Si
NIP. 19751229 199902 2 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN						**22.371.459.369,00**							**30.252.529.016,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.975.887.569,00**							**8.417.213.891,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**5.975.887.569,00**							**8.417.213.891,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Koperindag***	**82,96 %**			**82,96 %**	**4.501.794.069,00**						**82,96 %**	**6.517.698.891,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen penganggaran daerah yang disusun* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen 11 Dokumen 10 Laporan	20.019.700,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur	-	22.022.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		6.050.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.420.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.662.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.419.700,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.662.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.420.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.662.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.420.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.662.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.420.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.662.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.420.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.662.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN* *Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran* *Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			1 laporan 1 dokumen 1 Laporan 31 orang/bulan	3.604.824.619,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur	-	3.961.713.381,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	3.598.169.619,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		3.957.986.581,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.025.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		3.327.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1.210.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		133.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.420.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		266.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	-			1 dokumen	2.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur	-	16.627.690,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		14.627.690,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			2 orang	22.965.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	116.025.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	10.965.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		69.615.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	12.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		46.410.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD* *Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan* *Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan* *Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan* *Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*	-			4 Laporan 1 Laporan 2 Paket 2 Paket 4 Dokumen 3 Paket	333.131.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	1.601.257.820,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.662.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		10.210.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	56.215.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		232.050.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	78.650.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		301.685.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	35.385.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		441.916.020,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.196.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		35.271.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	151.023.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		580.125.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket mebel yang disediakan* *Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan* *jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*	-			1 Paket 2 Unit 2 Unit	127.198.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur	-	118.580.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	17.098.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		36.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	30.900.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		39.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	79.200.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		42.350.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik* *Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan* *Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*	-			1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	214.994.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur	-	348.722.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.420.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.662.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	121.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		133.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	91.574.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		212.960.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya* *Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara* *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*	-			22 Unit 8 Unit 3 Unit	140.982.950,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur	-	286.165.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	79.375.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		199.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	13.112.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		39.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	48.495.950,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		46.585.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penujang pelayanan*	-			1 unit kerja	35.678.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi dan UMKM	-	46.585.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	35.678.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi dan UMKM		46.585.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi aktif***	**35 %**			**35 %**	**119.064.000,00**						**35 %**	**133.100.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota*	-			58 unit	119.064.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi	-	133.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				58 Unit Usaha	119.064.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi		133.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya***	**6 %**			**6 %**	**154.500.000,00**						**6 %**	**157.500.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian*	-			20 orang	154.500.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi	-	157.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				20 Orang	154.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi		157.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Jumlah Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5% Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%***	**14 unit usaha**			**13 unit usaha 12 %**	**96.800.000,00**						**14 unit usaha**	**106.480.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha*	-			45 Orang 45 Orang	96.800.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi	-	106.480.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				45 Unit Usaha	96.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi		106.480.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase UMKM terfasilitasi***	**9 %**			**9 %**	**1.103.729.500,00**						**9 %**	**1.502.435.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan* *Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro* *Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan* *Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro*	-			25 Orang 10 unit usaha 29 Unit Usaha 500 Unit Usaha	1.103.729.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi dan UMKM	-	1.502.435.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				10 Unit Usaha	130.225.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi dan UMKM		179.685.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				20 Unit Usaha	48.695.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi dan UMKM		66.550.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				500 Unit Usaha	358.067.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi dan UMKM		825.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				11642 Unit Usaha	136.672.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi dan UMKM		266.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				25 Orang	430.070.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi dan UMKM		165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**16.395.571.800,00**							**21.835.315.125,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**16.395.571.800,00**							**21.835.315.125,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Pasar Rakyat yang direvitalisasi Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi***	**6,29% %**			**1,57 % 60 %**	**15.337.769.800,00**						**1,57 %**	**20.354.860.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*	-			5 unit 2 Unit	15.051.470.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat dan Pedagang	-	20.039.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	15.000.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat dan Pedagang		20.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	51.470.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat dan Pedagang		39.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan* *Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan*	-			1 Dokumen 1 Dokumen	286.299.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat dan Pedagang	-	314.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat dan Pedagang		275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	36.299.800,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat dan Pedagang		39.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting***	**3,00 %**			**3,00 %**	**520.312.000,00**						**3,00 %**	**625.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota* *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan*	-			1 Laporan 1 Laporan	404.402.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat	-	475.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				48 Laporan	73.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	331.402.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%*	-			1 Dokumen 1 Laporan	115.910.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan														
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				0 Dokumen	53.810.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				5 Laporan	62.100.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***% Alat UTTP tertera sah***	**9.4 %**			**9.4 %**	**100.000.000,00**						**9.4 %**	**360.735.125,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina*	-			285 unit 100 Orang	100.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat dan Pedagang	-	360.735.125,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				285 Unit	65.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat dan Pedagang		235.735.125,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	35.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat dan Pedagang		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya***	**11 %**			**11 %**	**437.490.000,00**						**11 %**	**494.720.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota* *Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi*	-			21 UMKM 21 UMKM	437.490.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi dan UMKM	-	494.720.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				15 UMKM	298.950.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi dan UMKM		335.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				15 UMKM	138.540.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Koperasi dan UMKM		159.720.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H							**22.371.459.369,00**							**30.252.529.016,00**	

Tabel Sumberdana Persubkegiatan pada Renja Tahun 2025 dan Checklist Dukungan Subkegiatan Terhadap Program Prioritas Kabupaten dan Nasional Tahun 2025

No	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Sumberdana				Dukungan Subkegiatan Terhadap Program Prioritas Kabupaten dan				
						Komitmen Daerah			Prioritas Nasional	
		DAK Fisik	DAK Non Fisik	SELAIN DAK	TOTAL	Literasi	Konservasi	Tangguh Bencana	Stunting	Inflasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**5,480,061,569**	**5,480,061,569**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			**5,480,061,569**	**5,480,061,569**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**4,501,794,069**	**4,501,794,069**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**20,019,700**	**20,019,700**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5,500,000	**5,500,000**					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2,420,000	**2,420,000**					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2,419,700	**2,419,700**					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2,420,000	**2,420,000**					
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2,420,000	**2,420,000**					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2,420,000	**2,420,000**					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,420,000	**2,420,000**					
					-					
					-					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**3,604,824,619**	**3,604,824,619**					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3,598,169,619	**3,598,169,619**					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3,025,000	**3,025,000**					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			1,210,000	**1,210,000**					
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2,420,000	**2,420,000**					
					-					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**2,000,000**	**2,000,000**					
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2,000,000	**2,000,000**					
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-	-					
					-					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**22,965,000**	**22,965,000**					
	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			10,965,000	**10,965,000**					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12,000,000	**12,000,000**					
					-					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**333,131,000**	**333,131,000**					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			2,662,000	**2,662,000**					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			56,215,000	**56,215,000**					
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan			78,650,000	**78,650,000**					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			35,385,000	**35,385,000**					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			9,196,000	**9,196,000**					

No	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Sumberdana				Dukungan Subkegiatan Terhadap Program Prioritas Kabupaten dan				
						Komitmen Daerah			Prioritas Nasional	
		DAK Fisik	DAK Non Fisik	SELAIN DAK	TOTAL	Literasi	Konservasi	Tangguh Bencana	Stunting	Inflasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			151,023,000	**151,023,000**					
					-					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**127,198,000**	**127,198,000**					
	Pengadaan Mebel			17,098,000	**17,098,000**					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30,900,000	**30,900,000**					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			79,200,000	**79,200,000**					
					-					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**214,994,800**	**214,994,800**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2,420,000	**2,420,000**					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			121,000,000	**121,000,000**					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			91,574,800	**91,574,800**					
					-					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**140,982,950**	**140,982,950**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			79,375,000	**79,375,000**					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			13,112,000	**13,112,000**					
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainya			48,495,950	**48,495,950**					
					-					
	Peningkatan Pelayanan BLUD			**35,678,000**	**35,678,000**					
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			35,678,000	**35,678,000**					
					-					
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			**119,064,000**	**119,064,000**					
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota			**119,064,000**	**119,064,000**					
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengeawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			119,064,000	**119,064,000**					
					-					
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		**133,250,000**	**21,250,000**	**154,500,000**					
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		**133,250,000**	**21,250,000**	**154,500,000**					
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		133,250,000	21,250,000	**154,500,000**					
					-					
	PROGRAM PERLINDUNGAN KOPERASI			**96,800,000**	**96,800,000**					

No	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Sumberdana				Dukungan Subkegiatan Terhadap Program Prioritas Kabupaten dan				
						Komitmen Daerah			Prioritas Nasional	
		DAK Fisik	DAK Non Fisik	SELAIN DAK	TOTAL	Literasi	Konservasi	Tangguh Bencana	Stunting	Inflasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**96,800,000**	**96,800,000**					
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukrisasi usaha			96,800,000	**96,800,000**					
					-					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO		**362,576,000**	**741,153,500**	**1,103,729,500**					
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		**362,576,000**	**741,153,500**	**1,103,729,500**					
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			130,225,000	**130,225,000**					
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			48,695,000	**48,695,000**					
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			358,067,000	**358,067,000**					
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			136,672,500	**136,672,500**					
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		362,576,000	67,494,000	**430,070,000**					
					-					
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**11,400,571,800**	**11,400,571,800**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			**11,400,571,800**	**11,400,571,800**					
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4,995,000,000		**10,342,769,800**	**15,337,769,800**					
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**4,995,000,000**		**10,056,470,000**	**15,051,470,000**					
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4,995,000,000		10,005,000,000	**15,000,000,000**					
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			51,470,000	**51,470,000**					
					-					
	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya			**286,299,800**	**286,299,800**					
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			250,000,000	**250,000,000**					
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			36,299,800	**36,299,800**					
					-					
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			**520,312,000**	**520,312,000**					
	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota			**404,402,000**	**404,402,000**					
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan			73,000,000	**73,000,000**					√

No	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Sumberdana				Dukungan Subkegiatan Terhadap Program Prioritas Kabupaten dan				
						Komitmen Daerah			Prioritas Nasional	
		DAK Fisik	DAK Non Fisik	SELAIN DAK	TOTAL	Literasi	Konservasi	Tangguh Bencana	Stunting	Inflasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			331,402,000	**331,402,000**					√
					-					
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**115,910,000**	**115,910,000**					
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan			53,810,000	**53,810,000**					
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			62,100,000	**62,100,000**					
					-					
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			**100,000,000**	**100,000,000**					
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan			**100,000,000**	**100,000,000**					
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang			65,000,000	**65,000,000**					
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal			35,000,000	**35,000,000**					
					-					
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			**437,490,000**	**437,490,000**					
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			**437,490,000**	**437,490,000**					
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			298,950,000	**298,950,000**					
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			138,540,000	**138,540,000**					
TOTAL		**4,995,000,000**	**495,826,000**	**16,880,633,369**	**22,371,459,369**					

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(RENJA-OPD)

Tahun 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja–OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat di maksudkan menjadi pegangan perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Urusan Dinas Lingkungan Hidup tahun tersebut dengan biaya anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Untuk dapat menyusun Rencana Kerja (Renja-OPD) yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap, karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) ini melibatkan seluruh Pejabat dan Staf. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan diskusi yang mendalam dan terjadi komunikasi timbal balik antara pimpinan dan staf. Sehingga, tersusun keputusan-keputusan sistematis yang akhirnya menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Semoga Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.Amiin.

Liwa, 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.MH.
PEMBINA UTAMA MUDA/III.c
NIP.19730912 199903 1 003

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun Lalu Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....17
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD 23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 28
3.3. Program dan Kegiatan 28

BAB IV. PENUTUP…….....32

LAMPIRAN I
LAMPIRAN II SIPD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial, kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 tidak boleh lepas dari beberapa hal:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dapat lebih optimal.
2. Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup pada tahun sebelumnya. Pernyataan di atas dapat diartikan, bahwa Pembangunan yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2024 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2025.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun satu tahun berikutnya sekaligus mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip–prinsip Pembangunan Partisipatif dan Berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dimana organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah (RENJA OPD) sebagai bahan utama Penyusunan Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dan Pedoman Penyusunan RAPBD tahun 2025

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Lampung Barat menyusun Rencana kerja (RENJA) OPD yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi,Visi ,Misi,Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026. Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan dokuman yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2026. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan dokumen perencanaan teknis kegiatan tahunan untuk menjabarkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran / hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu pendek dari tujuan.

Indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan DAK, Oleh karenanya landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 1991 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
9. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Serta Kedudukan Keuangan Gebernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampanh rumah tangga;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Penggantian Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 pada tanggal 18 September 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

35. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lampung Barat 2010 – 2030;
36. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat
37. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat 2005-2025
38. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2012-2017
39. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 793);
40. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan tahunan menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang merupakan bagian dari tindak lanjut pelaksanaan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026.

41. Tujuan yang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2001-2004 yang menegaskan Pemerintah Daerah Menyusun Dokumen Perencanaan dalam bentuk Program Pembangunan Daerah (Propeda) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

    ingin dicapai dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah :

1. Merumuskan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran , Tujuan,serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat;
2. Mengidentifikasi rencana pencapaian target dan indikator kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2025;
3. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan dan membahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan , serta Sistimatika Penulisan.

BAB II : Bab II marupakan Bab memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dan lampiran Renstra, menganalisis Kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan indikator kinerja, serta membahas isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat , Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

BAB III : Bab III merupakan Bab yang menguraikan tentang tujuan dan sasaran Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dikaitkan dengan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran target kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, serta uraian program dan kegiatan yan berisi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program

BAB IV : Bab IV merupakan Bab yang berisikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

BAB V : Bab V merupakan Bab yang berisikan Penutup yang terdiri dari Lampiran I dan Lampiran II (Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD))

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kanupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai Program dan Kegiatan dengan Jumlah Program termasuk program rutin sebanyak 3 Program, Kegiatan 9 dan 28 Sub. Kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja Langsung sebesar ***Rp. 14.317.193.217,- (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah)*** terealisasi sebesar Rp. ***14.001.071.984,- (Empat Belas Milyar Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)*** atau ***97.79*** persen.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan

2.1.1. Urusan Pilihan yang dilaksanakan

2.1.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari seluruh sub.Kegiatan terdapat sebanyak 1 Sub. Kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 yaitu adalah

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :**

   Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Pagu Program sebesar Rp. 7.366.798.303,- terealisasi sebesar Rp. 7.119.455.210,- atau setara dengan 96.64 %. Indikator dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

   Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan dengan Target pada tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 97 %.

   Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Adanya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Target 33 Unit Terealisasi 25 Unit di karenakan. Mobil Hiline BE 9334 Mz, Mobil BE 9322 MZ,Sepeda Motor R2 BE 5473MZ,Sepeda Motor R2 BE 5029 MZ,Sepeda Motor R2 BE 7750 YA,Mobil Truck Sampah/Dump Truck R6 BE 4664 MZ, Mobil Truck Sampah/Dump Truck R6 BE 4067 MZ dan Mobil tangki Air B 8465 DP dikarenakan Surat-Surat Kendaraan Tidak Lengkap (dalam Proses) sedangkan KIR di Kabupaten Lampung Barat tidak Bisa melakukan Uji KIR dan Uji KIR ada di Lampung Tengah sedangkan Kendaraan Operasional beroperasi maka anggaran di kembalikan ke KAS Daerah.

2. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

   Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pagu Program sebesar Rp. 5.217.026.914,- terealisasi sebesar Rp. 5.154.416.774,- atau setara dengan 98.80 %. . Indikator Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah :

   Jumlah Total Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Target 100 % pada Tahun 2023 terealisasi 100 %.

3. **Program Pengelolaan Persampahan**

   Program Pengelolaan Persampahan Pagu Program sebesar Rp. 1.733.368.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.727.200.000,- atau setara dengan 100% . Indikator Program Pengelolaan Persampahan adalah :

   Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun dengan Target 44.682,52 Ton/Tahun pada Tahun 2023 terealisasi 4.252,62 Ton/ Tahun.

Rata –rata pencapaian indicator keluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 97.79 %

Rumus yang digunakan untuk perhitungan IKLH kabupaten/Kota melalui aplikasi IKLH (https://ppkl.menlhk.go.id/ iklh/login) adalah IKLH = (0,376 X IKA)+(0,405 X IKU)+(0,219 X IKL)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH Kabupaten Lampung Barat sesuai Dengan SE 04/MENLHK/SETJEN/KUM.I/4/2021 dengan **Target 65.99 Point** dan **capaian 70.55 Point Predikat "Baik"**
IKLH Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan **Target 69.09 Point** dan **capaian 69.91 Point Predikat "Sedang"**
IKLH Nasional Tahun 2023 dengan **Target 69.48 Point** dan **capaian 72.48 Point Predikat "Baik"**

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai satuan kerja yang melaksanakan urusan bidang Pertamanan,Kebersihan,Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kinerjanya berpedoman kepada dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Juga Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang membidangi urusan Pertamanan,Kebersihan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup . Sedangkan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis yaitu:

1. **Tujuan Tiga : Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan serta Tangguh Bencana**

   Sasaran 3.2 Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

   IKU Sasaran RPJMD adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

   Tujuan Renstra 2023 -2026 adalah Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

   Sasaran Renstra 2023-2026 adalah

   1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
   2. Meningkatnyan Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau
   3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan

   Indikator Kinerja Utama Renstra 2023 -2026 adalah

   1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Target 2023 65.99 Point
   2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Target 2023 3%
   3. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi Target 2023 43.21 Point

4. Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan Target 2023 15 %
5. Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi Target 2023 20%
6. Persentase Jumlah Sampah Tertangani Target 2023 73%
7. Persentase Jumlah Sampah Tekurangi Target 2023 27%

untuk mencapai sasaran tersebut 3 Program di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 yang terdiri dari :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH, yang dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
      1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
      4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
      1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
      5. Fasilitas Kunjanga Tamu
      6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2). PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegaiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
   1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
   2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
   3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

3). PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
   1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Untuk mencapai tujuan 1 meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam melalui (1) Meningkatnya RTH sebagai sarana rekreasi taman kota; (2) Meningkatnya pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan ; (3) Meningkatnya sarana dan prasarana persampahan ; (4) Meningkatnya kualitas sumber mata air. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan sistem dan pengelolaan

sanitasi serta lingkungan hidup secara partisipatif dengan memberi peran yang sebesar – besarnya kepada masyarakat melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan. Pengelolaan sampah dilakukan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah yang salah satu keluarannya adalah Operasional pengelolaan persampahan yaitu kurangnya armada pengangkut sampah di setiap daerah yaitu sarana dan prasarana persampahan seperti kurangnya kontainer sampah di berbagai wilayah karena komposisi terbesar merupakan sampah bahan organik sebesar 65% dari total keseluruhan sampah. Sedangkan untuk prosentase sampah volume sampah yang terkelola sampai dengan tahun 2023 adalah 67,92 %. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan adalah prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti dan prosentase usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan. Realisasi dari indikator prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti adalah 80% sedangkan untuk realisasi dari indikator prosentase usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan adalah 100%.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak lepas dari pengelolaan ruang terbuka hijau publik yang dalam hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Capaian dari indikator prosentase luas ruang terbuka hijau publik adalah 100%.

1.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah , beberapa Isu penting yang bersifat strategis dan masalah-masalah mendesak yang memerlukan penyelesaian diantaranya :

Beberapa isu strategis yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat diantaranya :

1. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
   a. Pengendalian dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas menjadi tugas dan kewenangannya;
   b. Perumusan program kerja rutin maupun pembangunan dari sumber data yang ada sebagai bahan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan;
   c. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dinas lingkungan hidup lintas sektoral, propinsi, nasional dan internasional;
   d. Fasilitasi pengembangan kegiatan kelembagaan serta forum masyarakat yang melakukan pelestarian lingkungan hidup;
   e. Pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai sistem pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
   f. Perumusan petunjuk pembinaan dan pengembangan dinas lingkungan hidup serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas;
   g. Pengoordinasian, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas lingkungan hidupguna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya;
   h. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya;
   i. Pemberian masukan, usul, serta saran dan pertimbagan kepada bupati baik dalam menyusun kebijakan pemecahan masalah maupun dalam rangka pembinaan yang berkaitan dalam pengembangan dinas;
   j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan dinas kepada pimpinan; dan
   k. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris

1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
   a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan SekretariatDinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
   b. Penyiapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
   c. Perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
   d. Pengoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;
   e. Penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
   f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
   g. Penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
   h. Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana Pendapatan Domestik Brutodan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
   i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
   j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Umum dan Perencanaan

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis pada sub bagian umum, kepegawaian dan perencanaan.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
   b. Penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan di sub bagian umum dan Perencanaan;
   c. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan; 127 d. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
   d. Memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
   e. Pelaksanaan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran tugas;
   f. Penyusunan dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Dinas;
   g. Pengumpulan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja di lingkungan Dinas ;
   h. Pelaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Dinas ;
   i. Inventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah.
   j. Penyiapan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana Pendapatan Domestik Brutodan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya.
   k. Penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

l. Penyusunan dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program Dinas , semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;

m. Penyiapan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;

n. Penyiapan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik daerah

o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan

p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

4. Sub Bagian Keuangan

1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan Dinas.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b. Penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan di bagian keuangan;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;

d. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

e. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;

f. Pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);

g. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
h. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
i. Pelaksanaan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
j. Penyiapan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
l. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

1) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaankebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
2) Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan rencana serta program kerja dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang menjadi tugas dan kewenangannya;
   b. Perumusan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
   c. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
   d. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
   e. Penentuan daya dukung, daya tampung, baku mutu dan baku mutu sumber pencemar serta kriteria baku kerusakan lingkungan;
   f. Penyusunan kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme perizinan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;

g. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) serta tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan daerah;
h. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar, kualitas air, udara, tanah;
i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan;
j. Pelakuan penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
k. Penyusunan kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
l. Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
m. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan bidang Lingkungan Hidup;
o. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
p. Pengembangan pelaksanaan pemberian penghargaan daerah bidang Lingkungan Hidup;
q. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
r. Pelaksanaan perlindungan, pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
s. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
t. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
u. Penetapan kebijakan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
v. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
w. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan

x. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Kebersihan

1) Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas didalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring bidang kebersihan, meliputi layanan kebersihan,sarana dan prasarana kebersihan serta pengelolaan sampah limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana serta program kerja dibidang kebersihan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. Perumusan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan;
c. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
d. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
e. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
f. Pelakuan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
g. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
h. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
i. Pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
j. Pelakuan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
k. Pelakuan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
l. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
m. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

n. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
o. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
p. Penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
q. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
r. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
s. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
t. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
u. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
v. Penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
w. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
x. Penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
y. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
z. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
aa. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
bb. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;

cc. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan;

dd. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah bahan berbahaya dan beracundilakukan;

ee. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;

ff. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

gg. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Pertamanan

1) Kepala Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pertamanan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana serta program kerja dibidang pertamanan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b. Perumusan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertamanan;

c. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dibidang pertamanan;

d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan pengelolaan pertamanan lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;

e. Penyusunan dan menyiapkan rencana operasional penataan, pemeliharaan pertamanan diwilayah Kabupaten;

f. Pengembangan kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas;

g. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pertamanan sebagai pertanggung jawaban;

h. Penyiapan bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan;
i. Penyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
j. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
k. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
l. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
m. Penyusunan kegiatan penerangan jalan secara umum;
n. Pelaksanaan inventarisasi jumlah titik lampu yang mengalami kerusakan;
o. Pelaksanaan survey lokasi rencana pemasangan titik lampu jalan;
p. Penyiapan bahan serta melaksanakan penataan taman, pemasangan dan perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan penerangan jalan secara umum;
q. Penyiapan bahan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan penataan taman serta jaringan penerangan jalan secara umum;
r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan Seksi Penerangan jalan umum;
s. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan Pengendalian dan Penataan Kota lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
t. Penyusunan dan menyiapkan rencana operasional dibidang Pengendalian dan Penataan Kota di wilayah Kabupaten;
u. Pengembangan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas; dan

v. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Isu strategis tentang kondisi lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat yang sedang berkembang adalah masih tingginya tingkat pencemaran air, udara dan tanah. Kemampuan daya dukung kota dan daya dukung lingkungan alamiah semakin berkurang untuk meregenerasi berbagai permasalahan lingkungan yang semakin komplek akibat pembangunan yang mengakibatkan berbagai pencemaran tersebut.

A. PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan global (global warming) menjadi isu lingkungan yang paling penting saat ini karena besarnya dampak yang ditimbulkan di seluruh wilayah bumi ini. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan. Peningkatan suhu udara ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, utamanya CO2 sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia,seperti transportasi, industri, penggunaan zat Freon (CFC) untuk berbagai keperluan,dan sebagainya. Secara umum, pemanasan global akan menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan seperti iklim yang tidak stabil, peningkatan permukaan air laut, kecenderungan meningkatnya suhu secara global, gangguan ekologis (baik terhadap manusia, hewan dan tumbuhan), dan dampak sosial ekonomi. Melihat dampak yang begitu besar tersebut, perlu segera diambil langkah untuk mengendalikan atau memperkecil efek dari pemanasan global. Langkah yang paling menentukan adalah menghilangkan zat karbon dan mengurangi produksi gas rumah kaca lainnya. Cara menghilangkan karbon di udara yang paling mudah adalah dengan memperbanyak pepohonan (daerah hijau) oleh karena itu adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Taman Kota di Kabupaten lampung Barat.

B. PENCEMARAN AIR, UDARA DAN TANAH

Kondisi air di Kabupaten Lampung Barat saat ini secara umum belum tercemar. Namun ada beberapa lokasi yang memang perlu mendapat perhatian lebih intens dari pemerintah, yaitu Sungai way robok hulu,sungai way warekuk,sungai way sinda lapai,sungai way robok hilir,sungai way jurak,sungai way salang,sungai way

semangka,danau lebar,danau asam dll. Sungai dan danau tersebut belum banyak yang tercemar hanya terdapat penggali pasir dan batu sehingga air keruh. Sedangkan untuk kondisi udara dan tanah di Kabupaten Lampung Barat masih relatif belum tercemar.

Laju deforestasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun juga telah memicu meningkatnya penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Lampung Barat seperti menigkatnya kawasan hutan kritis yang berakibat erosi, banjir, tanah longsor, sedimentasi tinggi, penurunan kualitas air, fluktuasi debit air, serta mengakibatkan hilangnya plasma nuftah dan berkurangnya keanekaragaman hayati, serta rusaknya habitat satwa langka yang dilindungi sehingga satwa-satwa tersebut sering mengganggu permukiman penduduk. Menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2007 telah mencanangkan terwujudnya Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi. Dalam mendukung upaya tersebut maka dipandang perlu untuk segera melakukan percepatan dalam program-program pembangunan yang terkait dengan permasalahan kualitas lingkungan hidup khususnya konservasi.

C. PENGELOLAAN SAMPAH

Masalah persampahan Kabupaten Lampung Barat masih terdapat sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka serta pembakaran sampah sehingga menyebabkan pencemaran udara. Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut. Selain masalah sampah di sungai, timbunan sampah di berbagai tempat terbuka berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, lalat, kecoak, dan tikus. Keberadaan lalat, nyamuk, dan tikus yang merupakan vector (pembawa) berbagai macam penyakit menjadi salah satu indikator seberapa baik kualitas lingkungan. Bahkan diindikasikan bahwa penyebab pemanasan global bukan hanya karena produksi CO2 yang berlebihan, tapi juga disebabkan oleh zat CH4 yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah yang akan terbawa ke atmosfir dan merusak lapisan ozon. Selain hal di atas pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah.

Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu reduce (pengurangan), reuse (memakai kembali), dan recycle (mendaur ulang).

Sejalan dengan uraian-uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada saat ini tengah bergiat mengembangkan program-program dalam menyongsong pencapaian **Kota Liwa sebagai Kota Adipura** untuk kategori kota kecil. Program-program yang terkait langsung di dalam upaya keberhasilan pencapaian predikat Kota Adipura tersebut diantaranya;

- Program pembinaan dan peningkatan kebersihan kota
- Program peningkatan fungsi dan sebaran pohon peneduh kota (Program peningkatan Ruang Terbuka Hijau – RTH)
- Program pembinaan dan penataan keindahan kota
- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan
- Program Pengaduan izin Lingkungan

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah upaya Pengendalian pencemarandan dan kerusakan lingkungan dari limbah padat dan cair dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat secara umum, khususnya dalam wilayah Kota Liwa .

b. Masalah yang Mendesak

Status lingkungan hidup daerah merupakan sarana yang penting dalam mengkomunikasikan informasi mengenai lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta membantu pengambil keputusan dalam menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan dan merencanakan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pasal 62, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang **mewajibkan** pemerintah baik Nasional maupun Daerah menyediakan Informasi Lingkungan Hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Selain itu

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/kabupaten/Kota).

Permasalahan yang dipandang mendesak bagi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Barat yang perlu segera mendapatkan perhatian dan penanganan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan sistem Informasi Lingkungan (SIL) bagi Kabupaten Lampung Barat.
2. Penyusunan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
3. Rehabilitasi lahan kritis, sumber mata air, dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
4. Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam.
5. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Lingkungan hidup, diantaranya; Penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), serta Analisis Laboratorium dan pegawai yang memiliki sertifikasi AMDAL.
7. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
8. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana RTH dan taman kota.
9. Peningkatan jumlah pemasangan dan sebaran titik lampu penerangan jalan serta pemeliharaan lampu jalan dengan dukungan daya listrik yang optimal.

Permasalahan dan Solusi antara lain :

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 ini tidak dijumpai permasalahan dan kendala yang berarti, hanya terdapat realisasi yang mencapai 97.79 % karena ada yang terkendala waktu sudah hampir tutup anggaran. Dan berikutnya pemakaian anggaran sesuai dengan kebutuhan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, sehingga pada prior itas pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya tingkat pencemaran air ,tanah dan udara yang di tindaklanjuti untuk indeks kualitas lingkungan hidup seperti indeks kualitas air,indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud.

Sesuai dengan tupoksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat terhadap Kebijakan Nasional dilakukan melalui tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2009 Kabupaten Lampung Barat dicanangkan sebagai Kabupaten Konservasi. Berkenaan dengan penataan ruang, kebijakan sebagai kabupaten konservasi ini dapat dijadikan muatan dasar tujuan penataan ruang. Oleh karena itu penataan ruang Kabupaten lampung Barat diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sumber daya kelautan dan agro dengan menjaga kelestarian dan fungsi kawasan lindung (konservasi) serta melalui waspada terhadap ancaman bahaya alam melalui mitigasi bencana. Salah satu peranan rencana penataan ruang adalah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah (kecamatan) dan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat kota (ibukota kabupaten) atau pada kawasan tertentu saja. Hal ini juga berkenaan dengan penciptaan sistem perkotaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu , terdapat pusat-pusat permukiman yang perlu didorong pertumbuhannya dan ada pula yang hanya cukup dikendalikan sesuai potensinya, bahkan mungkin dibatasi.

Ada beberapa Impikasi Rencana kajian serta Kebijakan Kabupaten Lampung Barat terhadap Lingkungan Hidup yaitu :

1. Penetapan Struktur Ruang
2. Penetapan Pola Keruangan
3. Penetapan Kawasan Strategis.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra), yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu 4 (Empat) Tahun ke depan dari Tahun 2023 s/d 2026.

Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (Satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2023 s/d 2026 sebagai berikut : ***"Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup"***

Sasaran yang ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (OPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca
3. Meningkatnyan Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan

3.3. Program dan kegiatan

1. Rumusan dan Program dan Kegiatan

   Faktor factor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

   a. Sebagai OPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan lingkungan hidup,kebersihan dan pertamanan .Dinas Lingkungan Hidup adalah kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
   b. Dalam rangka pencapaian indicator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup,kebersihan dan pertamanan.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

   Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

   1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dilaksanakan melalui kegiatan :
      a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH, yang dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
   1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
   4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
   1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   5. Fasilitas Kunjanga Tamu
   6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
   1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2. Pengadaan Alat Besar
   3. Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
   4. Pengadaan Mebel
   5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat
   3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
   4. Pemeliharaan Mebel
   5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2). PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan :
   1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan :
   1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
   2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
   3. Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

3). PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
   1. Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
   2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
   3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui sub. Kegiatan :

1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

4). PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dilaksanakan melalu sub.Kegiatan :

1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
2. Pengelolaan Kebun Raya
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

5). PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :

1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3.

6). PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :

1.Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

2.Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

7). PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH,DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegaiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

b. Kegiatan ` Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :

1. Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

8). PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegaiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
   1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
   2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
   3. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

9). PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakn melalui Sub.Kegiatan :
   1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10). PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
   1. Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
   2. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
   3. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
   4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
   5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
   6. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
   7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta, dilaksanakn melalui Sub. Kegiatan :
   1. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
   1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
   2. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
   3. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat telah menyusun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat akan berusaha untuk Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan selain dari APBD juga akan berusaha untuk mendapatkan Dana dari Provinsi/Pusat dengan Penjabaran sebagai berikut :

4.1. Program dan kegiatan

1. Rumusan dan Program dan Kegiatan

   Faktor factor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

   a. Sebagai OPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan lingkungan hidup,kebersihan dan pertamanan .Dinas Lingkungan Hidup adalah kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

   b. Dalam rangka pencapaian indicator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup,kebersihan dan pertamanan.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

   Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

   1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dilaksanakan melalui kegiatan :

      a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :

         1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
         2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
         3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
         4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
         5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
         6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
         7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH, yang dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
    1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
    4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
    5. Fasilitas Kunjanga Tamu
    6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
    1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2. Pengadaan Alat Besar
    3. Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
    4. Pengadaan Mebel
    5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dilaksanakan melalui sub.Kegiatan :
    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub.kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
4. Pemeliharaan Mebel
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2). PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui kegiatan :
   1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan :
   1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
   2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
   3. Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

3). PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sub.kegiatan :
   1. Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
   2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
   3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui sub. Kegiatan :
   1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

4). PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dilaksanakan melalu sub.Kegiatan :

1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
2. Pengelolaan Kebun Raya
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

5). PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :

1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3.

6). PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

7). PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH,DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :

a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegaiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

b. Kegiatan ` Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dilaksanakan melalui Sub.Kegiatan :
   1.Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

8). PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
   a. Kegaiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
      1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
      2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
      3. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

9). PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
   a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakn melalui Sub.Kegiatan :
      1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10). PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
   a. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
      1. Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
      2. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
      3. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
      4. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
      5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
      6. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
      7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

   b. Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta, dilaksanakn melalui Sub. Kegiatan :
      1. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta, dilaksanakan melalui Sub. Kegiatan :
   1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
   2. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
   3. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Tabel Detail Sub Kegiatan Tahun 2025

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub. Kegiatan Tahun 2025
2	11				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Penyusunan Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut sebanyak 1 Dokumen
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penyusunan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rekomendasi Lingkungan yang diterbitkan sebanyak 10 Kali
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Penyusunana Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di

						Kabupaten/Kota sebanyak 1 Laporan
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota seluas 8 Hektar
2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara 14 Ha
						Jumlah Titik Lampu Penerangan Jalan yang terpasang dan terpelihara sebanyak 80 Titik
						Jumlah Bangunan Taman dan Nomenclatur yang terpelihara sebanyak 2 Nomenclatur terdiri dari Pembangunan Jembatan Bangunan Atas type 3 (Gelagar IWF dan Lantai Jembatan) sebanyak 8 M² dan Pemasangan Bronjong bangunan Taman hamtebiu sebanyak 130 M²
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebanyak 1 Orang
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	
2	11	05	2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyusunana Dokumen Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1 Dokumen
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penyusunan Laporan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah

						B3 sebanyak 1 Laporan
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan atas Rekomendasi izin Lingkungan yang telah dikeluarkan sebanyak 20 Pelaku Usaha
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan sebanyak 1 Dokumen
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Pendampingan Pembinaan

						Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup sebanyak 1 Dokumen
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidu	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat sebanyak 50 Orang
2	11	08	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH sebanyak 1 Lembaga
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sekolah Adiwiyata yang dibina Sebanyak 15 Sekolah
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota sebanyak 1 Dokumen
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Penyusunana Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali sebanyak 1 Laporan
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sampah yang dilakukan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampai keTPA/TPST/SPAKabupaten/Kota Sampah sebanyak 44682 Ton
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Hari Peduli Sampah Nasional sebanyak 500 Orang
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi

					Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan sebanyak 10 kali
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Pengelolaan Persampahan di TPA selama 12 Bulan

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD

LAMPIRAN II : (HASIL ENTRY SIPD)

LAMPIRAN I
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Lampung Barat

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daera dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja)Tahun Berjalan yang di evaluasi (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang di evaluasi (tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)			Target Program, Kegiatan dan Subkegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
(1)				(2)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)			9=8/7x100%			10=6+8			11			12	13			
						K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.			
2	**11**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup**	**81.99**	**%**	**Rp 33,113,719,088**	**81.96**	**%**	**Rp 7,119,455,210**	**81.97**	**%**	**Rp 3,886,346,990**	**0**	**%**	**Rp -**	**0**	**%**	**Rp -**	**81.97**	**%**	**Rp 3,886,346,990**	**81.96**	**%**	**Rp 7,119,455,210**	**DLH**	
2	**11**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**28**	**Dokumen**	**Rp 286,972,433**	**28**	**Dokumen**	**Rp 36,847,000**	**28**	**Dokumen**	**Rp 57,887,200**	**0**	**Dokumen**	**Rp -**	**0**	**Dokumen**	**Rp -**	**28**	**Dokumen**	**Rp 57,887,200**	**28**	**Dokumen**	**Rp 36,847,000**	**DLH**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	111,800,332	11	Dokumen	Rp 9,976,000	11	Dokumen	Rp 10,000,000	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	11	Dokumen	Rp 10,000,000	11	Dokumen	Rp 9,976,000	DLH	
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	19,395,563	1	Dokumen	Rp 4,490,000	1	Dokumen	Rp 4,550,000	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 4,550,000	1	Dokumen	Rp 4,490,000	DLH	
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	17,240,500	1	Dokumen	Rp 4,000,000	1	Dokumen	Rp 4,000,000	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 4,000,000	1	Dokumen	Rp 4,000,000	DLH	
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	Dok	17,240,500	1	Dokumen	Rp 2,800,000	1	Dokumen	Rp 2,800,200	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 2,800,200	1	Dokumen	Rp 2,800,000	DLH	
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	17,240,500	1	Dokumen	Rp 3,000,000	1	Dokumen	Rp 3,312,000	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 3,312,000	1	Dokumen	Rp 3,000,000	DLH	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	17,240,500	1	Laporan	Rp 2,800,000	1	Laporan	Rp 3,225,000	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -	1	Laporan	Rp 3,225,000	1	Laporan	Rp 2,800,000	DLH	
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	86,814,538	12	Laporan	Rp 9,781,000	12	Laporan	Rp 10,000,000	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -	12	Laporan	Rp 10,000,000	12	Laporan	Rp 9,781,000	DLH	
2	**11**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**4**	**Dokumen**	**Rp 13,819,998,592**	**4**	**Dokumen**	**Rp 2,981,544,704**	**4**	**Dokumen**	**Rp 3,165,413,500**	**0**	**Dokumen**	**Rp -**	**0**	**Dokumen**	**Rp -**	**4**	**Dokumen**	**Rp 3,165,413,500**	**4**	**Dokumen**	**Rp 2,981,544,704**	**DLH**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang/Bulan	Rp 13,777,543,861	35	Orang/Bulan	Rp 2,971,694,704	35	Orang/Bulan	Rp 3,155,208,500	0	Orang/Bulan	Rp -	0	Orang/Bulan	Rp -	36	Orang/Bulan	Rp 3,155,208,500	35	Orang/Bulan	Rp 2,971,694,704	DLH	
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Laporan	Rp 15,085,438	1	Laporan	Rp 3,500,000	1	Laporan	Rp 3,514,000	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -	2	Laporan	Rp 3,514,000	1	Laporan	Rp 3,500,000	DLH	
2	11	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	Laporan	Rp 14,438,919	8	Laporan	Rp 3,350,000	8	Laporan	Rp 3,430,000	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -	8	Laporan	Rp 3,430,000	8	Laporan	Rp 3,350,000	DLH	
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dok	Rp 12,930,375	1	Dok	Rp 3,000,000	1	Dok	Rp 3,261,000	0	Dok	Rp -	0	Dok	Rp -	1	Dok	Rp 3,261,000	1	Dok	Rp 3,000,000	DLH	
2	**11**	**01**	**2.03**	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disusun**	**4**	**Dok**	**Rp 56,384,193**	**1**	**Dok**	**Rp 5,773,000**	**1**	**Dok**	**Rp 5,818,200**	**0**	**Dok**	**Rp -**	**0**	**Dok**	**Rp -**	**1**	**Dok**	**Rp 5,818,200**	**1**	**Dok**	**Rp 5,773,000**	**DLH**	
2	11	01	2.03	05	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	Rp 56,384,193	1	Dok	Rp 5,773,000	1	Dok	Rp 5,818,200	0	Dok	Rp -	0	Dok	Rp -	1	Dok	Rp 5,818,200	1	Dok	Rp 5,773,000	DLH	
2	**11**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1**	**Dok**	**Rp 173,844,582**	**1**	**Dok**	**Rp 10,417,000**	**1**	**Dok**	**Rp 70,417,600**	**0**	**Dok**	**Rp -**	**0**	**Dok**	**Rp -**	**1**	**Dok**	**Rp 70,417,600**	**1**	**Dok**	**Rp 10,417,000**	**DLH**	
2	11	01	2.05	05	Monitoring ,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dok	Rp 89,797,144	4	Dok	Rp 10,417,000	4	Dok	Rp 10,417,600	0	Dok	Rp -	0	Dok	Rp -	4	Dok	Rp 10,417,600	4	Dok	Rp 10,417,000	DLH	
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8	Orang	Rp 84,047,438	0	Orang	Rp -	4	Orang	Rp 60,000,000	0	orang	Rp -	0	orang	Rp -	4	Orang	Rp 60,000,000	0	Orang	Rp -	DLH	
2	**11**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah paket pengadaan administrasi umum**	**8**	**Paket**	**Rp 1,455,217,159**	**8**	**Paket**	**Rp 186,235,630**	**8**	**Paket**	**Rp 191,844,600**	**0**	**Paket**	**Rp -**	**0**	**Paket**	**Rp -**	**8**	**Paket**	**Rp 191,844,600**	**8**	**Paket**	**Rp 186,235,630**	**DLH**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	Paket	11,954,563	12	Paket	Rp 2,770,000	12	Paket	Rp 2,858,200	0	Paket	Rp -	0	Paket	Rp -	12	Paket	Rp 2,858,200	12	Paket	Rp 2,770,000	DLH	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	108,184,138	0	Paket	Rp -	2	Paket	Rp 33,960,800	0	Paket	Rp -	0	Paket	Rp -	2	Paket	Rp 33,960,800	0	Paket	Rp -	DLH	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8	Paket	284,554,453	2	Paket	Rp 40,400,000	2	Paket	Rp 19,500,600	0	Paket	Rp -	0	Paket	Rp -	2	Paket	Rp 19,500,600	2	Paket	Rp 40,400,000	DLH	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24	Dokumen	33,877,583	4	Dokumen	Rp 8,280,000	4	Dokumen	Rp 10,320,000	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	4	Dokumen	Rp 10,320,000	4	Dokumen	Rp 8,280,000	DLH	
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	25,205,611	12	Laporan	Rp 6,240,000	12	Laporan	Rp 6,412,000	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -	12	Laporan	Rp 6,412,000	12	Laporan	Rp 6,240,000	DLH	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	991,440,813	20	Laporan	Rp 128,445,630	20	Laporan	Rp 118,793,000	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -	20	Laporan	Rp 118,793,000	20	Laporan	Rp 128,445,630	DLH	

2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**4**	**Unit**	**Rp 105,860,980**	**0**	**unit**	**Rp -**	**1**	**unit**	**Rp 17,098,000**	**0**	**unit**	**Rp -**	**0**	**unit**	**Rp -**	**1**	**unit**	**Rp 17,098,000**	**0**	**unit**	**Rp -**	**DLH**	
2	11	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unt	Rp 105,860,980	0	unit	Rp -	1	Unit	Rp 17,098,000	0	unit	Rp -	0	unit	Rp -	1	Unit	Rp 17,098,000	0	unit	Rp -	DLH	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6**	**Sub Organisasi**	**Rp 15,490,942,896**	**6**	**Sub Organisasi**	**Rp 3,711,017,381**	**6**	**Sub Organisasi**	**Rp 129,671,020**	**0**	**Sub Organisasi**	**Rp -**	**0**	**Sub Organisasi**	**Rp -**	**6**	**Sub Organisasi**	**Rp 129,671,020**	**6**	**Sub Organisasi**	**Rp 3,711,017,381**	**DLH**	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	Rp 12,930,375	12	Laporan	Rp 2,900,000	12	Laporan	Rp 3,000,000	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -	12	Laporan	Rp 3,000,000	12	Laporan	Rp 2,900,000	DLH	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	336	Laporan	Rp 14,918,635,663	109	Laporan	Rp 3,639,360,491	109	Laporan	Rp 61,300,000	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -	109	Laporan	Rp 61,300,000	109	Laporan	Rp 3,639,360,491	DLH	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	Rp 559,376,858	12	Laporan	Rp 68,756,890	12	Laporan	Rp 65,371,020	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -	12	Laporan	Rp 65,371,020	12	Laporan	Rp 68,756,890	DLH	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**20**	**Unit**	**Rp 1,724,498,253**	**25**	**Unit**	**Rp 187,620,495**	**25**	**Unit**	**Rp 248,196,870**	**0**	**Unit**	**Rp -**	**0**	**Unit**	**Rp -**	**25**	**Unit**	**Rp 248,196,870**	**25**	**Unit**	**Rp 187,620,495**	**DLH**	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	unit	Rp 1,293,037,500	25	unit	Rp 85,833,650	25	Unit	Rp 134,900,000	0	unit	Rp -	0	unit	Rp -	25	Unit	Rp 134,900,000	25	unit	Rp 85,833,650	DLH	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	unit	Rp 53,592,094	2	unit	Rp 16,646,845	2	Unit	Rp 16,810,000	0	unit	Rp -	0	unit	Rp -	2	Unit	Rp 16,810,000	2	unit	Rp 16,646,845	DLH	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2	Unit	Rp 377,868,659	2	Unit	Rp 85,140,000	2	Unit	Rp 96,486,870	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	2	Unit	Rp 96,486,870	2	Unit	Rp 85,140,000	DLH	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten**	**100**	**%**	**Rp 4,477,562,500**	**0**	**%**	**Rp -**	**0**	**%**	**Rp -**	**0**	**%**	**Rp -**	**0**	**%**	**Rp -**	**0**	**%**	**Rp -**	**0**	**%**	**Rp -**	**DLH**	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Akademi dan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	2	Dokumen	Rp 922,500,000	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	DLH	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/Kota yang disusun	2	Dokumen	Rp 922,500,000	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	DLH	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	5	Dokumen	Rp 3,555,062,500	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	DLH	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	Rp 1,400,000,000	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	DLH	
2	11	02	2.02	03	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	4	Dokumen	Rp 2,155,062,500	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	DLH	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air (IKA)**	**58.84**	Point	Rp 5,085,947,500	**66.06**	Point	Rp -	**58.64**	Point	Rp -	**0**	Point	Rp -	**0**	Point	Rp -	**58.64**	Point	Rp -	**66.06**	Point	Rp -	**DLH**	
						Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.34			90.52			84.14			0			0			84.14			90.52			DLH	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut**	4	Dokumen	Rp 5,085,947,500	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	DLH	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan	4	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		0	Dokumen		DLH	
						Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	4	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		0	Dokumen		DLH	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4	Dokumen	Rp 1,293,037,500	1	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	DLH	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen	Rp 1,724,050,000	1	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	DLH	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	4	Dokumen	Rp 2,068,860,000	1	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	DLH	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Indeks Kualitas Lahan (IKL)**	**52.82**	**Point**	**Rp 56,247,131,250**	**41.33**	**Point**	**Rp -**	**47.86**	**Point**	**Rp -**	**0**	**Point**	**Rp -**	**0**	**Point**	**Rp -**	**47.86**	**Point**	**Rp -**	**41.33**	**Point**	**Rp -**	DLH	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Ha	Rp 56,247,131,250	0	Ha	Rp -	0	Ha	Rp -	0	Ha	Rp -	0	Ha	Rp -	0	Ha	Rp -	0	Ha	Rp -	DLH	
						Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	45.26	Ha		0	Ha		0	Ha		0	Ha		0	Ha		0	Ha		0	Ha		DLH	
						Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4.2	Ha		0	Ha		0	Ha		0	Ha		0	Ha		0	Ha		0	Ha		DLH	
						Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		DLH	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1	Unit		0	Unit		0	Unit		0	Unit		0	Unit		0	Unit		0	Unit		DLH	

2	**11**	**04**	**2.01**	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Ha	Rp	3,232,593,750	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	DLH	
2	**11**	**04**	**2.01**	03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	41.26	Ha	Rp	8,620,250,000	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	DLH	
2	**11**	**04**	**2.01**	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11	Ha	Rp	43,101,250,000	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	0	Ha	Rp	-	DLH	
2	**11**	**04**	**2.01**	06	Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1	Orang	Rp	1,293,037,500	0	Orang	Rp	-	0	Orang	Rp	-	0	Orang	Rp	-	0	Orang	Rp	-	0	Orang	Rp	-	0	Orang	Rp	-	0	Orang	Rp	-	DLH	
2	**11**	**05**			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	20	%	Rp	862,025,000	0	%	Rp	-	0	%	Rp	-	0	%	Rp	-	0	%	Rp	-	0	%	Rp	-	0	%	Rp	-	0	%	Rp	-	DLH	
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Jumlah Fasilitasi Pemeriksaan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	Rp	862,025,000	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	DLH	
2	**11**	**05**	2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemeriksaan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	Rp	862,025,000	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	DLH	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang Izin Lingkungan**	**80**	**%**	~~**Rp**~~	~~**1,293,037,500**~~	**80**	**%**	~~**Rp**~~	-	**80**	**%**	~~**Rp**~~	-	**80**	**%**	~~**Rp**~~	-	**80**	**%**	~~**Rp**~~	-	**80**	**%**	~~**Rp**~~	-	**80**	**%**	~~**Rp**~~	-	DLH	
2	**11**	**06**	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Pemeriksaan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80	Laporan	Rp	1,293,037,500	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	DLH	
2	**11**	**06**	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Pemeriksaan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80	Laporan	Rp	1,293,037,500	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	0	Laporan	Rp	-	DLH	
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat**	**4**	**%**	~~**Rp**~~	~~**615,000,000**~~	**0**	**%**	~~**Rp**~~	-	**0**	**%**	~~**Rp**~~	-	**0**	**%**	~~**Rp**~~	-	**0**	**%**	~~**Rp**~~	-	**0**	**%**	~~**Rp**~~	-	**0**	**%**	~~**Rp**~~	-	DLH	
2	**11**	**07**	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengaturhutan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengaturhutan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal	4	Dokumen	Rp	615,000,000	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	DLH	
2	**11**	**07**	2.01	01	Pengakuan, MHA dan Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengaturhutan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengaturhutan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengaturhutan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal	4	Dokumen	Rp	615,000,000	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	DLH	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan dan Kelkutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**100**	**%**	**Rp**	**3,017,087,500**	**100**	**%**	**Rp**	**5,154,416,774**	**100**	**%**	**Rp**	**8,141,223,215**	**100**	**%**	**Rp**	-	**100**	**%**	**Rp**	-	**100**	**%**	**Rp**	**8,141,223,215**	**100**	**%**	**Rp**	**5,154,416,774**	DLH	
2	**11**	**08**	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terfasilitasi yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4	Lembaga			2	Lembaga			1	Lembaga			0	Lembaga			0	Lembaga			1	Lembaga			1	Lembaga			DLH	
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen	Rp	3,017,087,500	1	Dokumen	Rp	5,154,416,774	1	Dokumen	Rp	8,141,223,215	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen	Rp	8,141,223,215	1	Dokumen	Rp	5,154,416,774	DLH	
						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200	Orang			50	Orang			50	Orang			0	Orang			0	Orang			50	Orang			50	Orang			DLH	
2	**11**	**08**	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terfasilitasi yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4	Lembaga	Rp	862,025,000	2	Lembaga	Rp	1,943,183,649	1	Lembaga	Rp	770,444,100	0	Lembaga	Rp	-	0	Lembaga	Rp	-	1	Lembaga	Rp	770,444,100	1	Lembaga	Rp	1,943,183,648	DLH	
2	**11**	**08**	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen	Rp	1,293,037,500	1	Dokumen	Rp	293,432,326	1	Dokumen	Rp	2,553,805,915	0	Dokumen	Rp	-	0	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen	Rp	2,553,805,915	1	Dokumen	Rp	293,432,326	DLH	
2	**11**	**08**	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200	Orang	Rp	862,025,000	50	Orang	Rp	2,917,800,800	50	Orang	Rp	4,816,973,200	0	Orang	Rp	-	0	Orang	Rp	-	50	Orang	Rp	4,816,973,200	50	Orang	Rp	2,917,800,800	DLH	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan**	10	%	Rp	1,724,050,000	0%	%	Rp	-	0%	%	Rp	-	0%	%	Rp	-	0%	%	Rp	-	0%	%	Rp	-	0%	%	Rp	-	DLH	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Pilantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH**	1	Entitas	Rp	1,724,050,000	0	Entitas	Rp	-	0	Entitas	Rp	-	0	Entitas	Rp	-	0	Entitas	Rp	-	0	Entitas	Rp	-	0	Entitas	Rp	-	DLH	
2	**11**	**09**	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Pilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Pilantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	Entitas	Rp	1,724,050,000	-	Entitas	Rp	-	-	Entitas	Rp	-	-	Entitas	Rp	-	-	Entitas	Rp	-	-	Entitas	Rp	-	-	Entitas	Rp	-	DLH	

2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun**	46,467.29	Ton/tahun	0	5.353,01	Ton/tahun	Rp 1,727,200,000	45,746	Ton/tahun	Rp 3,355,207,000	0	Ton/tahun	Rp -	0	Ton/tahun	Rp -	45,746	Ton/tahun	Rp 3,355,207,000	5.353,01	Ton/tahun	Rp 1,727,200,000	DLH	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan**	1	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		0	Dokumen		DLH	
						Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurulangan dan Pemanfaatan Kembali	1	Laporan		0	Laporan		1	Laporan		0	Laporan		0	Laporan		1	Laporan		0	Laporan		DLH	
						Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	45.746	Ton/tahun		0	Ton/tahun		45,473,62	Ton/tahun		0	Ton/tahun		0	Ton/tahun		45,473,62	Ton/tahun		0	Ton/tahun		DLH	
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan	1	Kelompok		0	Kelompok		1	Kelompok		1	Kelompok		1	Kelompok		1	Kelompok		0	Kelompok		DLH	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama	1	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		0	Dokumen		DLH	
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		1	Dokumen		0	Dokumen		DLH	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk	2	Unit		0	Unit		2	Unit		0	Unit		0	Unit		2	Unit		0	Unit		DLH	
2	**11**	**11**	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1	Dokumen	Rp 1,508,543,750	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	DLH	
2	**11**	**11**	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaurulangan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurulangan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	Laporan	Rp 1,293,037,500	0	Laporan	Rp -		Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -		Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -		
2	**11**	**11**	2.01	03	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pemampahan	Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	8	Kelompok	Rp 1,939,556,250	0	Kelompok	Rp -	0	Kelompok	Rp -	0	Kelompok	Rp -	0	Kelompok	Rp -	0	Kelompok	Rp -	0	Kelompok	Rp -	DLH	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Pemampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Pemampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	Dokumen	Rp 34,481,000,000	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	0	Dokumen	Rp -	DLH	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pemampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3	Unit	Rp 2,370,568,750	4	Unit	Rp 1,727,200,000	2	Unit	Rp 3,355,207,000	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	2	Unit	Rp 3,355,207,000	4	Unit	Rp 1,727,200,000	DLH	
					Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	45.746	Ton/tahun	Rp 12,930,375,000	0	Ton/tahun	Rp -	45.746	Ton/tahun	Rp -	0	Ton/tahun	Rp -	0	Ton/tahun	Rp -	45.746	Ton/tahun	Rp -	0	Ton/tahun	Rp -	DLH	

Liwa, 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.MH.
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP.19738912 199903 1 003

LAMPIRAN II

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Target Akhir Periode RPD/Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2023		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
													Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
																	Nasional	Daerah					
1					2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	11				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**81.99**	**%**	**81.96**	**%**	**81.97**	**%**	**81.98%**	**Rp 8,470,259,052**	**Kab. Lampung Barat**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√		**Aparatur dan Masyarakat**	**81.99%**	**Rp 8,893,772,004**	**DLH**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**JumlahDokumen Capaian Perencanaan, Penggagaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**28**	**Dokumen**	**28**	**Dokumen**	**28**	**Dokumen**	**28 Dokumen**	**Rp 73,405,553**	**Kab. Lampung Barat**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√		**Aparatur dan Masyarakat**	**28 Dokumen**	**Rp 77,075,830**	**DLH**
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	11	Dokumen	11	Dokumen	11 Dokumen	Rp 28,597,748	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Dokumen Renstra, cascading, pohon kinerja	Aparatur dan Masyarakat	11 Dokumen	Rp 30,027,635	DLH
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,961,250	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 5,209,313	DLH
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,410,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 4,630,500	DLH
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,410,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Aparatur dan Masyarakat	1Dokumen	Rp 4,630,500	DLH
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,410,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 4,630,500	DLH
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2 Laporan	Rp 4,410,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	Rp 4,630,500	DLH
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12 Laporan	Rp 22,206,555	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Pelaksanaan Rapat Koordinasi	Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	Rp 23,316,883	DLH
2	**11**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Dokumen**	**4**	**Dokumen**	**4**	**Dokumen**	**4 Dokumen**	**3,535,059,528**	**Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√		**Aparatur dan Masyarakat**	**4 Dokumen**	**Rp 3,711,812,504**	**DLH**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang/Bulan	35	Orang/Bulan	35	Orang/Bulan	35 orang/Bulan	Rp 3,524,199,903	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan	Aparatur dan Masyarakat	35 orang	3,700,409,898	DLH
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1 Laporan	Rp 3,858,750	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	4,051,688	DLH
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	18 Laporan	Rp 3,693,375	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera SKPD	Aparatur dan Masyarakat	18 Laporan	3,878,044	DLH
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1 Dokumen	Rp 3,307,500	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	3,472,875	DLH
2	**11**	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Dok**	**1**	**Dok**	**1**	**Dok**	**1 Dokumen**	**14,422,685**	**Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√		**Aparatur dan Masyarakat**	**1 Dokumen**	**Rp 15,143,819**	**DLH**
2	11	01	2.03	05	Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang MilikDaerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1 Dokumen	14,422,685	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 15,143,819	DLH
2	**11**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1**	**Dok**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dok**	**1 Dokumen**	**Rp 44,468,235**	**Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√		**Aparatur dan Masyarakat**		**Rp 46,691,647**	**DLH**
2	11	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dok	1	Dokumen	4	Dok	4 Dokumen	Rp 22,969,485	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan melaksanakan perjalanan Dinas 29 paket dan rapat koordinasi 12 kali 50 orang	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 24,117,959	DLH
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	0	Orang	4	Orang	2 orang	Rp 21,498,750	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Aparatur dan Masyarakat	2 orang	Rp 22,573,688	DLH
2	**11**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasiannya**	**8**	**Paket**	**32**	**Paket**	**8**	**Paket**	**8 Paket**	**Rp 372,234,429**	**Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√		**Aparatur dan Masyarakat**	**8 Paket**	**Rp 390,846,150**	**Dinas Perikanan**
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	Paket	1	Jenis	12	Paket	12 Paket	Rp 3,057,894	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan Komponen	Aparatur dan Masyarakat	12 Paket	Rp 3,210,789	DLH
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	0	Unit	2	Paket	1 Paket	Rp 27,672,750	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan Peralatan	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	Rp 29,056,388	DLH
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	3	Jenis	2	Paket	2 Paket	Rp 72,787,050	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan Barang	Aparatur dan Masyarakat	2 Paket	Rp 76,426,403	DLH
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	4	SKHU	4	Dokumen	6 Dokumen	Rp 8,665,650	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√	Penyediaan Bahan	Aparatur dan Masyarakat	6 Dokumen	Rp 9,098,933	DLH

2	**11**	**01**	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	12	Bulan	12	Laporan	12 Laporan	Rp	6,447,420	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	Rp	6,769,791	DLH
2	**11**	**01**	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	12	Bulan	20	Laporan	12 Laporan	Rp	253,603,665	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	Rp	266,283,848	DLH
2	**11**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**12**	**Unit**	**0**	**Unit**	**1**	**Unit**	**3 unit**	**Rp**	**27,078,503**	**Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√		**Aparatur dan Masyarakat**	**1 Unit**	**Rp**	**28,432,428**	**DLH**
2	**11**	**01**	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelelur yang diadakan	12	Unit	0	Unit	1	Unit	3 unit	Rp	27,078,503	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Pengadaan Mebel 1 unit	Aparatur dan Masyarakat	1 Unit	Rp	28,432,428	DLH
2	**11**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**48**	**Laporan**		**Laporan**	**4**	**Sub Organisasi**	**4 Sub organisasi**	**Rp**	**3,962,475,460**	**Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√		**Aparatur dan Masyarakat**	**4**	**Rp**	**4,160,599,233**	**DLH**
2	**11**	**01**	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12 Laporan	Rp	3,307,500	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	Rp	3,472,875	DLH
2	**11**	**01**	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	336	Laporan	109	Laporan	109	Laporan	84 Laporan	Rp	3,816,083,250	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur dan Masyarakat	84 Laporan	Rp	4,006,887,413	DLH
2	**11**	**01**	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12 Laporan	Rp	143,084,710	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan	Rp	150,238,946	DLH
2	**11**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**20**	**Unit**	**100**	**%**	**100**	**%**	**25unit**	**Rp**	**441,114,660**	**Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√		**Aparatur dan Masyarakat**	**25unit**	**Rp**	**463,170,393**	**DLH**
2	**11**	**01**	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	unit	25	unit	25	Unit	25 Unit	Rp	330,750,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Aparatur dan Masyarakat	25 Unit	Rp	347,287,500	DLH
2	**11**	**01**	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8	unit	2	unit	2	Unit	2 unit	Rp	13,708,485	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Pemeliharaan Peralatan dan	Aparatur dan Masyarakat	2 Unit	Rp	14,393,909	DLH
2	**11**	**01**	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2 unit	Rp	96,656,175	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Aparatur dan Masyarakat	2 Gedung	Rp	101,488,984	DLH
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten**	**100**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**2 Dokumen**		**1,575,000,000**	**Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√		**Dokumen KLHS dan RPPLH**	**Aparatur dan Masyarakat**	**1 Dokumen**	**Rp**	**1,157,625,000**	**DLH**
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Akademi dan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0 Dokumen		472,500,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Dokumen RPPLH	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	Rp	-	DLH
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/Kota yang disusun	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1 Dokumen		**472,500,000**	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Dokumen RPPLH	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	Rp	-	DLH
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	2 Dokumen		**1,102,500,000**	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Dokumen KLHS Lingkungan	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen		**1,157,625,000**	DLH
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RP/JPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RP/JPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1 Dokumen		**551,250,000**	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Dokumen KLHS Lingkungan	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	578,812,500	DLH
2	11	02	2.02	03	Pembuatan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1 Dokumen		551,250,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Dokumen KLHS Lingkungan	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	578,812,500	DLH
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air (IKA)**	**58.84**	**Point**	**66.06**	**Point**	**58.64**	**Point**	**58.74 Point**	**Rp**	**1,300,950,000**	**Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	√			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Aparatur dan Masyarakat**	**58.84 Point**	**Rp**	**1,365,997,500**	**DLH**
						Indeks Kualitas Udara (IKU)	**84.34**		**90.52**		**84.14**		**84.24 Point**					√					**84.34 Point**			
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut**	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen			Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√				Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen			DLH
						dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	**1 Dokumen**	**Rp**	**1,300,950,000**	**Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan,**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	√				Aparatur dan Masyarakat	**1 Dokumen**	**Rp**	**1,365,997,500**	
						Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen			Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√				Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen			DLH
2	**11**	**03**	2.01	01	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	Rp	330,750,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√			Dokumen Indeks Kualitas	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	347,287,500	DLH
2	**11**	**03**	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	Rp	441,000,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√			Pengendalian emis	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	463,050,000	DLH
2	**11**	**03**	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	**Rp**	**529,200,000**	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√			Pelaksanaan dan Pengerukan	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	Rp	555,660,000	DLH
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Indeks Kualitas Lahan (IKL)**	**52.82**	**Point**	**41.33**	**Point**	**47.86**	**Point**	**50.34 Point**		**14,387,625,000**	**Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	√				**Aparatur dan Masyarakat**	**61**	**Rp**	**15,107,006,250**	DLH
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Ha	0	Ha	0	Ha	8 Ha					√	√		Penanggulangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan di kabupaten Lampung Barat serta Pemeliharaan	Aparatur dan Masyarakat	8 Ha			DLH
						Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	45.26	Ha	0	Ha	0	Ha	44.26 Ha			Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√				45.26 Ha			DLH
						Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4.2	Ha	0	Ha	0	Ha	3.53 Ha		**14,387,625,000**				√				4.2 Ha	Rp	15,107,006,250	DLH
						Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1	Orang	0	Orang	0	Orang	1 Orang						√				1 Orang			DLH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1	Unit	0	Unit	0	Unit	1 Unit						√				1 Unit			DLH
2	**11**	**04**	**2.01**	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Ha	0	Ha	0	Ha	8 Ha	Rp	826,875,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√			Pemeliharaan dan	Aparatur dan Masyarakat	8 Ha		868,218,750	DLH
2	**11**	**04**	**2.01**	03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	41.26	Ha	0	Ha	0	Ha	44.26 Ha	Rp	2,205,000,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√			Aparatur dan Masyarakat	45.26 Ha	Rp	2,315,250,000	DLH
2	**11**	**04**	**2.01**	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11	Ha	0	Ha	0	Ha	3.53 Ha	Rp	11,025,000,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Penyiraman	Aparatur dan Masyarakat	4.2 Ha	Rp	11,576,250,000	DLH
2	**11**	**04**	**2.01**	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1	Orang	0	Orang	0	Orang	1 Orang	Rp	330,750,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Rehap kolam Peninjauan	Aparatur dan Masyarakat	1 Orang	Rp	347,287,500	DLH
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendlian Bahan Berbahya dan Beracun (B3)**	**20**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	**30%**		**220,500,000**	**Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√		**Pemimbasan dan pemantauan ke pelaku usaha**	**Aparatur Masyarakat dan Pelaku Usaha**	**30%**	**Rp**	**231,525,000**	**DLH**
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1 Dokumen		220,500,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Pembimasan dan pemantauan	Aparatur Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Dokumen	Rp	231,525,000	DLH
2	**11**	**05**	2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1 Dokumen		**220,500,000**	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Pembimasan dan pemantauan ke pelaku usaha di	Aparatur Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Dokumen	Rp	231,525,000	DLH

2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang Izin Lingkungan**	**80**	**%**	**80**	**%**	**80**	**%**	**80%**	**330,750,000**	**Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√		**Pembinaan dan Pengawasan untuk**	**Aspartur,Kelompok Masyarakat dan Pelaku**	**80%**	Rp	347,287,500	DLH
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	20 Laporan	330,750,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Pembinaan dan Pengawasan untuk	Aspartur,Kelompok Masyarakat dan Pelaku	20 Laporan	Rp	347,287,500	DLH
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	20 Laporan	330,750,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Pembinaan dan Pengawasan untuk	Aspartur,Kelompok Masyarakat dan Pelaku	20 Laporan	Rp	347,287,500	DLH
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase Pengakuan Masyarakat Hukum Adat**	**4**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	1 Dokumen	**300,000,000**	**Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**		√			**Kelompok Masyarakat**	1 Dokumen	Rp	315,000,000	DLH
2	**11**	**07**	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1 Dokumen	**300,000,000**	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√			Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	Rp	315,000,000	DLH
2	**11**	**07**	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1 Dokumen	Rp	300,000,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√			Kelompok Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Rp	315,000,000	DLH
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan dan Kelestarian Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	100%	**771,750,000**	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√			Aparatur ,Masyarakat dan Pelaku Usaha	100%	Rp	810,337,500	DLH
2	**11**	**08**	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4	Lembaga	2	Lembaga	1	Lembaga	1 Lembaga	771,750,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√			Aparatur ,Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Lembaga	Rp	810,337,500	DLH
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen					√				1 Dokumen			
						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200	Orang	50	Orang	50	Orang	50 Orang					√				50 Orang			
2	**11**	**08**	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar	4	Kelompok	2	Kelompok	1	Kelompok	1 Lembaga	Rp 220,500,000	Kab. Lampung Barat, Semua	Dana Transfer Umum - Dana		√			Aparatur ,Masyara	1 Lembaga	Rp	231,525,000	DLH
2	**11**	**08**	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	Rp 330,750,000	Kab. Lampung Barat, Semua	Dana Transfer Umum - Dana		√			Aparatur ,Masyara	1 Dokumen	Rp	347,287,500	DLH
2	**11**	**08**	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200	Orang	50	Orang	50	Orang	50 Orang	Rp 220,500,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√			Aparatur ,Masyara kat dan	50 Orang	Rp	231,525,000	DLH
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan**	10	%	0%	%	0%	%	**10 %**	**441,000,000**	Kab. Lampung Barat, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√				Sekolah, kalpatar u,kelom	**10 %**	Rp	463,050,000	DLH
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai**	1	Entitas	0	Entitas	0	Entitas	**1 Entitas**	**441,000,000**	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√				Sekolah, kalpatar u,kelom	**1 Entitas**	Rp	463,050,000	DLH
2	**11**	**09**	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	Entitas	-	Entitas	-	Entitas	1 Entitas	**441,000,000**	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√			Pembinaan dan Pemasarsuan 15 Sekolah	Sekolah, kalpatar u,kelompok pedoli	1 Entitas	Rp	463,050,000	DLH
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Jumlah Sampah yang Terkolola /Ton/Tahun**	46,467.29	Ton/tahun	3,353,01	Ton/tahun	45,746	Ton/tahun	46.007,22 Ton/Tahun	**13,946,625,000**	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Sosialisasi tentang Implemen	Kelompok Masyarakat	**46.467,29 Ton/Tahun**	Rp	14,643,956,250	DLH
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	13,946,625,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√				Kelompok Masyarakat Perikana	1 Dokumen			DLH
						Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurun Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1 Dokumen		Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√			Kelompok Masyarakat Perikana	1 Dokumen			DLH
						Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	45.746	Ton/tahun	0	Ton/tahun	45,473,62	Ton/tahun	1 Dokumen		Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Penyusunan Data dan Informasi	Kelompok Masyarakat Perikana	1 Dokumen			DLH
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	Kelompok	0	Kelompok	1	Kelompok	3 Unit Usaha		Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√			Kelompok Masyarakat Perikana	3 Unit Usaha	Rp	14,643,956,250	DLH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	3 Unit Usaha		Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Pemanfaatan Diversifikasi dan sertifikasi	Kelompok Masyarakat Perikana	3 Unit Usaha			DLH
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	25 Pelaku usaha		Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√			Kelompok Masyarakat Perikana	25 Pelaku usaha			DLH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	Unit	0	Unit	2	Unit	25 Pelaku usaha		Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Pengadaan Freezer 25 unit, Mesin	Kelompok Masyarakat Perikana	25 Pelaku usaha			DLH
2	**11**	**11**	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	Rp 385,875,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	√	√		1 Dokumen Jaknatanal	Masyarakat,Antoriu m, Bank	1 Dokumen	Rp	405,168,750	DLH
2	**11**	**11**	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaurian Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurian Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	Laporan	0	Laporan		Laporan	1 Laporan	Rp 330,750,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Daur Ulang Sampah	Masyarakat,Antoriu m, Bank	1 Laporan	Rp	347,287,500	DLH
2	**11**	**11**	2.01	03	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan	8	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	2 Kelompok	Rp 496,125,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Sosialisasi Pengelolaan	Aparatur, Masyarakat,Antoriu	2 Kelompok	Rp	520,931,250	DLH
2	**11**	**11**	2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat,	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	Rp 8,820,000,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√			Masyarakat,Antoriu m, Bank	1 Dokumen	Rp	9,261,000,000	DLH
2	**11**	**11**	2.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Penanganan	3	Unit	4	Unit	2	Unit	2 Unit	Rp 606,375,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		Pengadaan Sarana dan	Masyarakat,Antoriu	2 Unit	Rp	636,693,750	DLH
2	**11**	**11**	2.01		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	45.746	Ton/tahun	0	Ton/tahun	45.746	Ton/tahun	46.007,22 Ton/Tahun	Rp 3,397,500,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		√		aan dan Pengawasan Pengelola	Masyarakat,Antoriu m, Bank Sampah,K	46.467,29 Ton/Tahun	Rp	3,472,875,000	DLH

Liwa, 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.MH.
PEMBINA UTAMA MUDA/II.c
NIP.19730612 199903 1 003

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(RENJA - OPD) TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,hidayah dan karunia-Nya sehingga Dinas PPKBPPPA dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) DPPKBPPPA Tahun 2025 . Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PPKBPPPA tahun 2025 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2025, adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPKBPPPA Tahun 2025 adalah Antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran,fungsi daalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPKBPPPA selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2025
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing masing program dan kegiatan PPKBPPPA tahun 2025
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan PPKBPPPA tahun 2025.
5. Sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi PPKBPPPA Kabupaten Lampung Barat tahun 2025..

Semoga Rencana Kerja (Renja) PPKBPPPA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh DPPKBPPPA Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 15 Januari 2024
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

M DANANG HARISUSENO, SAg.MH
NIP. 197011212000031003

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR ----------ii
DAFTAR ISI ----------iii
BAB I PENDAHULUAN ----------1
1.1. Latar Belakang ----------
1.2 Landasan Hukum----------
1.3 Maksud dan tujuan----------
1.4 Sistematika Penulisan ----------

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ---------
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ----------
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Data Pencapaian Pembangunan ----------
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD----------
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD----------
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH ----------
3.1 Telaahan terhadap kebijkan Nasional ----------
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ----------
3.3. Program dan Kegiatan dan Subkegiatan ----------

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH ----------
BAB V PENUTUP----------

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

1.

Tabel T.C.29
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun.2023

Dinas PPKBPPPA

Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah SAMPAI dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja tahun 2023		Tingkat Realisasi	Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		
													Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun 2023		Tingkat capaian realisasi target renstra
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	2	bidang												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	dok	54	dok	18	dok	18	dok	100 %	18	dok	90	dok	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersusun	25	dok	15	dok	5	dok	5	dok	100 %	5	dok	25	dok	100.0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	15	dok	9	dok	1	dok	1	dok	100 %	3	dok	13	dok	86.7
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	5	dok	3	dok	1	dok	5	dok	100 %	1	dok	9	dok	180.0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	25	dok	15	dok	5	dok	3	dok, bulan	100 %	5	dok	23	dok	92.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi SKPD yang tersusun dan pelaksanaan rapat Koordinasi	10	dok, Bulan	6	dok, bulan	2	dok, bulan	2		100 %	2	dok, bulan	10	dok, bulan	100.0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun**	60	bulan	36	bulan	12	bulan			100 %	12	bulan	48	bulan	80.0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang di tersedia	60	Bulan	36	bulan	12	Bulan	12	bulan	100 %	12	Bulan	60	Bulan	100.0

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteranyang di susun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang di susun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Formal**	12	orang	6	Orang	3	orang				3	orang	9	orang	75.0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	orang	6	Orang		orang	0	Orang			orang	6	orang	50.0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah sub organisasi yang**	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100 %	12	bulan	60	bulan	100.0

	dilaksanakan pengadministrasian umumnya														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	Jenis	30	jenis	9	Jenis	9	Jenis	100 %	15	Jenis	54	Jenis	112.5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	125	jenis	75	jenis	25	jenis	25	jenis	100 %	23	jenis	123	jenis	98.4
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	60	jenis	36	jenis	12	jenis	12	jenis	100 %	10	jenis	58	jenis	96.7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	20	SKHU	12	skhu	5	SKHU	5	SKHU	100 %	6	SKHU	23	SKHU	115.0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi Kunjungan Tamu	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100 %	12	bulan	60	bulan	100.0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100 %	12	bulan	60	bulan	100.0

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah	Jumlah barang daerah yang diadakan	456	unit	134	unit		unit	6	unit		9	unit	149	unit	32.7
Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerja, Jumlah Kursi Kerja , meja rapat, kursi rapat	37	unit	0.000	unit	15	unit	3	unit	100 %	7	unit	10	unit	27.0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer Jumlah Komputer Note Book, Jumlah Printer, Generator set	15	unit	1	unit	9	unit	9	unit	100 %	7	unit	17	unit	113.3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Meter Gordin 15 paket, Jumlah Almari 7, Jumlah Filing Kabinet 12	19	unit	1	unit	15	paket	15	paket	100 %	19	paket	35	paket	184.2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	100	%		%	####				%	######	%	#VALUE!
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar 2000	10,000	surat	6000	surat	2000	surat				2000	surat	8000	surat	80.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpon,Air dan Listrik	7	rek	7	rek	7	rek	7	rek	100 %	7	rek	7	rek	100.0

	322 rekening dan spedy														
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	125	jenis	75	jenis	47	jenis	47	jenis	100 %	47	jenis	169	jenis	135.2
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Aparatur, tenaga honor, penjaga kantor dan biaya ADM keuangan	81	orang	45	orang	20	orang	20	orang	100 %	15	orang	80	orang	98.8
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%								31	unit	31	unit	31.0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil 6 unit dan jumlah motor 41 unit yang terpelihara	235	unit	124	unit	30	unit	29	unit	97%	30	unit	183	unit	77.9
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	4	Gedung	2	Gedung	1	gedung	1	gedung	100 %	1	gedung	4	gedung	100.0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Genset yang dipelihara 1 unit, Komputer 6 unit , Printer 4 unit dan peralatan	78	unit	45	unit	0	unit	0	unit	100 %	15	unit	60	unit	76.9

	perlengkapan mupen 6														
													0		#DIV/0!
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang melakukan perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender	100	%	100	%								100		100.0
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah KewenanganKabupaten/ Kota		100	Orang			50	orang	50	Orang	100 %	50	orang	100	orang	100.0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta yJumlah peserta nyang ikut Advokasi dan fasilitasi PUGang ikut dalam pembentukan Puspaga dan jumlah puspaga dibentuk	300	Orang	100	orang	50	Orang	50	Orang	100 %	50	Orang	200	Orang	66.7

Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten kota													0		#DIV/0!
Pengembangan komunikasi. Informasi dan EdukasiPemberdayaan Perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah peserta pembinaan P3KSS	60	orang								60	orang	60	orang	100.0
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100	%										0		0.0
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		936	Orang										0		0.0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan dan pencegahan KDRT	936	orang	296	Orang	60	orang	60	orang	100 %	50	orang	406	orang	43.4
Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan di Lampung Barat												0		#DIV/0!
Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban	Jumlah desa ramah perempuan	2	desa			0	0		0	#DIV/0!	2	desa	2	desa	100.0

kekerasan kewenangan kab/kota	dibentuk														
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	32,5	%										0		#VALUE!
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		617	Orang										0		0.0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang dilatih menjadi Satgas/Kader Gerakan Sayang Ibu	1585	Orang	936	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	0	Orang	936	Orang	59.1
Pelaksanaan Komunikasi. Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang ikut dalam pembentukan Puspaga dan jumlah puspaga dibentuk	750	Orang	300	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	50	Orang	350	Orang	46.7
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan yang akan menjadi warga binaan	750	Orang	300	Orang	150	orang	150	orang	100 %	0	orang	450	orang	60.0

	peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera 150 orang														
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													0		#DIV/0!
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang dilatih menjadi Satgas/Kader Gerakan Sayang Ibu	4,10 20,1 5	Pekon, Orang, Kec	300	ORANG	0	orang	-	0ramg		30	orang	330	orang	#VALUE!
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan satgas P2TPA	225	Orang	-	-	21	Orang	21	orang		0	Orang	######	Orang	#VALUE!
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-150	Orang										0		0.0

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		450,15	Orang, Satgas	360	Orang, stgas	20	orang, satgas	-	orang		20	orang, satgas	380	orang,satgas	#VALUE!
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Gender Anak yang terupdate	50	buku										0		0.0
Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-50	Buku										0		0.0
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Profil data gender yang tersusun	250	buku	150	Buku	50	Buku	50	buku	100 %	50	buku	250	buku	100.0
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian nilai evaluai kabupaten Layak Anak	800	Point										0		0.0
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		60,15	Orang, Kec										0		#VALUE!
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan	Jumlah Peserta Sosialisasi Kabupaten Layak Anak dan jumlah	2,286	Kelompok, Orang	2,286	orang	75,136	Orang	####	orang		45	Orang	######	Orang	#VALUE!

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	peserta sosialisasi anak Berhadapan dengan Hukum														
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan forum anak dan terpilihnya duta anak lampung barat	180, 15	Orang, Kec	60, 15	Orang, kec	60	Orang	60	orang	100 %	60	Orang	######	Orang	#VALUE!
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-1 , 30	Lokasi, Sekolah										0		#VALUE!
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Junlah taman bermain ramah anak dalam upaya persiapan KLA	5	lokasi	3	Lokasi	1	Lokasi	1	lokasi	100 %	0	LOKASI	4	LOKASI	80.0
Pengembangan KIE pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tk daerah	Junlah taman bermain ramah anak										1	lokasi	1	lokasi	#DIV/0!

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pendampingan anak yang membutuhkan perlindungan khusus	90%	%										0		0.0
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											100	orang	100	orang	#DIV/0!
Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten	Jumlah peserta rapat koordinasi dan sosialisasi perlindungan khusus anak serta TPPO'										100	orang	100	orang	#DIV/0!
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		150	Orang										0		0.0
Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO	650	Orang	350	Orang	150	Orang	0		0%			350		53.8

Penyediaan layanan Pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota	Jumlah kasus yang tertangani										15	kecamatan	15	kecamatan	#DIV/0!
Penguatan **dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak**													0		#DIV/0!
Kooordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak										45	orang	45	orang	#DIV/0!
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi jangka panjang	30	%					35	%	#DIV/0!			35		116.7
Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dg pemda kab/kot dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk													0		#DIV/0!

Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadapkependudukan , KB , dan pemabngunaan keluarga (Program KKBPK)	jumlah akseptor yang dilayani selama kegiatan										3340	Orang	3340	Orang	#DIV/0!
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		25,28	Buku, Rumah Data										0		#VALUE!
Penyusunan Profil Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Buku Profil perkembangan Penduduk	145	buku	95	buku	25	buku	25	BUKU	100%			120		82.8
Penyediaan data dan informasi keluarga	tersedianya formn data pencegahan stunting										15	kec	15	kec	#DIV/0!
Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	tersedianya jaringan internet dan pengolahan data										15	kec	15	kec	#DIV/0!
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Rumah Dataku yang terbentuk	*100	Pekon	0	pekon	15	pekon	15	pekon	100%	0	pekon	15	pekon	#VALUE!
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGABERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif	78	%										0		0.0

Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		150, 15	Kali, Kec, Orang										0		#VALUE!
Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	terlaksananya koordinasi pencegahan stunting									3	kl		3	kl	#DIV/0!
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBK sesuai kearifan budaya lokal	tersedianya media KIE cetak									1	kl		1	kl	#DIV/0!
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah pelaksanaan KIE Program KKBPK melalui mobil unit pelayanan	150	Kali	54	kali	10	kl	10	kl	100 %			64		42.7
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)	tersedianya operasional lokakarya mini TK Desa pencegahan stunting									15	kec		15	kec	#DIV/0!
Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluh KKBPK	tersedianya pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluh KKBPK									15	kec		15	kec	#DIV/0!

Pengendalian Program KKBPK	tersedianya operasional audit stunting										15	kec	15	kec	#DIV/0!
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	15 kecamatan, 150 kali	15, 290	Kec, Orang										0		#VALUE!
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan. Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Kecamatan yang menerima sarana Operasional Balai PLKB	75	Kec	45	kec	15	kec	15	kec	100 %	0		60		80.0
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah peserta bimbingan teknis bagi Petugas Pos Pembantu KB Desa dan Petugas Sub Pos Pembina KB Desa dan kader IMP	1450	Orang	100	orang	50	orang	0		0%	15	kec	115	kec	#VALUE!
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		57200, 15, 3, 80	Pus, Kec, Kelompok, Orang										0		#VALUE!

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	terdistribusinya alat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan									#DIV/0!	15	kec	15	kec	#DIV/0!
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan KB									#DIV/0!	1111	akseptor	1111	aksep tor	#DIV/0!
penyusunan rencana kebutuhan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan KB									#DIV/0!	55480	aksept or	55480	aksep tor	#DIV/0!
Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	tersedianya operasional koordinasi pelayanan difaskes									#DIV/0!	15	kecamatan	15	kecamatan	#DIV/0!
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapat Pelayanan KB	272465	Orang	159425	orang	55840	orang	55840	orang	100%	55840	orang	271105	orang	99.5
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pembangunan dan penyediaan peralatan/ perlengkapan Balai Penyuluh KB Kecamatan	62	Kec	32	kec	15	kec	15	kec	100%	0		47		75.8

Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi. serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Kelompok Pelaksana Terbaik PIK KR Tingkat Kabupaten	15	Kelompok	6	Kelompok	3	Kelompok	3	Kelompok	100 %	0		9		60.0
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Pengelola Pasilitas Kesehatan/ Klinik KB yang ikut pelatihan pencatatan dan pelaporan hasil Pelayanan KB	375	orang	150	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	0		150		40.0
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													0		#DIV/0!
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pekon Terbaik Pelaksana Kegiatan Kesrak PKK KB Kesehatan dan terlaksananya penilaian	15	Pekon	9	Pekon	3	pekon	3	pekon juara	100 %			12		80.0

	Lomba serta tersalurkannya dana hibah														
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung Keluarga Berkualitas yang terbina									#DIV/0!	44	pekon	44	pekon	#DIV/0!
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah PUS yang di layani KB selama kegiatan Baksos	18000	Orang, Kec	10800	orang	3340	orang	0	Orang	0%	0		10800		60.0
		15	kec							#DIV/0!	0		0		0.0
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah peserta pelatihan dan pekon yang terbina	544	orang	408	orang	136	orang	136	orang	100 %	6	Pekon	550	Pekon	101.1
		236	pekon	177	pekon	59	pekon			0%			177		75.0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		30	%							#DIV/0!			0		0.0
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										#DIV/0!			0		#DIV/0!

Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB). Bina Keluarga Remaja (BKR). Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL). Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Junlah kelompok BKB Terbaik dan jumlah Kader BKB,BKR,BKL yang dilatih, jumlah pengelola dan kader yang mengikuti harganas	15	Kelompok	9	kelompok	3	kelompok	3	kelompok	100 %	3	kelompok	15	kelompok	100.0
Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	tersedianya sarana dan prasarana BKB KIT Stunting dan siap nikah bagi kelompok BKB	0	kec	0		0		-		#DIV/0!	15	kec	15	kec	#DIV/0!
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola UPPKS yang dilatih'	680	orang	136	Orang	136	orang	136	orang	100 %	72	orang	344	orang	50.6
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	JJumla kelompok PIKR yang mengikuti sosialisasi	300	orang	180	orang	60	orang	60	orang	100 %	8	kelompok	248	kelompok	82.7

Keluarga/UPPKS)															
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta ikut penyuluhan penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS	300	orang	170	orang	50	orang	50	orang	100 %	0		220		73.3
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	tersedianya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga									#DIV/0!	15	kecamatan	15	kecamatan	#DIV/0!

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Sasaran Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR	%	69	76,8%	%
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	69	65.92	
3	IPKA	%	63,76	75.35	
4	IPHA	%	59.03	61,78	

Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL).

penghitungan mCPR, yaitu: Jumlah wanita kawin usia 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang sedang menggunakan metode KB modern dibagi dengan jumlah pasangan usia subur seluruhnya. Prevalensi dinyatakan dalam satuan persen (%).

realisasi mCPR di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Laporan SIGA bulan desember 2023 adalah 76,8% , Dimana pengguna PUS dengan KB modern sejumlah 37.294 PUS dan jumlah seluruh PUS kab LB 49.358.

Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	% PUS yang tidak terlayani/Un Meet Need	%	17	8,2%	
2	PA MKJP	%	25	22,7	
3	% Pekon menjadi Kampung KB	%	17	25,7	
4	% OPD yang memanfaatkan GDPK	%	21	0	
5	I Bangga		52,52	60,31	

6	MUKP		19,5	20	
7	Anggaran Responsif Gender APBD	%	3		
8	Prevalensi Perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang	%	2		
9	Terpenuhinya Hak2 anak		Madya	Madya	
10	% Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	60	100	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Persentase % PUS yang tidak terlayani/Un Meet Need, dengan capaian kinerja 257%, % Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif dan % Pekon menjadi Kampung KB

Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukan pada indicator Terpenuhinya Hak2 anak yang ditargetkan mendapatkan status Kabupaten Layak Anak madya, dan diperoleh Madya pada tahun ini .

Capaian kinerja yang tidak mencapai target adalah pada indicator Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang , % OPD yang memanfaatkan GDPK, MUKP

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya indicator Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang adalah :

1. Masih banyak WUS yang tidak mau menggunakan MKJP dengan alasan masih menginginkan anak, dan juga rasa takut menggunakan alkon MKJP
2. Stok Alokon yang terbatas dari propinsi , dan daerah tidak mengadakan stok alkon .

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya indicator % OPD yang memanfaatkan GDPK adalah dikarenakan Grand Desain Pembangunan Kependudukan nya belum dibuat pada tahun 2023, dan baru dapat teranggarkan pada tahun 2024 ini.

2.2.2. Urusan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Data Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2023

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	TAHUN
		2023
A. Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum	Kasus	
1. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum		
(a) Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku	Orang	
(b) Jumlah Perempuan Sebagai Korban	Orang	
2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum	Orang	
(a) Jumlah Anak Sebagai Pelaku	Orang	2
(b) Jumlah Anak Sebagai Korban	Orang	7
(c) Jumlah Anak Sebagai Saksi	Orang	0
B. Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		
1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan		
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	2
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	0
2. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan		
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	7
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	0
C. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak	Unit	
1. Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)/ P2TP2A	Unit	1
2. LPAI (Lembaga perlindungan anak Indonesia)		1
3. KPAI (Komisi Perlindungan anak Indonesia)		1

Sumber Data: Dinas KBPP&PPPA Tahun 2023

Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 sebagian besar (85%) adalah kasus persetubuhan / pencabulan/ pelecehan seksual pada anak dibawah umur, 15% adalah kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatka kematian pada anak. Kasus persetubuhan terjadi pada 9 anak yang tersebar di Pekon Bumi Agung

Sedangkan kasus perempuan yang mengalami kekerasan terjadi 50 % kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 50% adalah kasus pemerkosaan.

Anak- anak yang berhadapan dengan hukum 50% adalah kasus pencurian dan 50% adalah kasus keterlibatan anak-anak dalam penggunaan narkoba

Tabel 2.1.

Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Eksekutif dan Legislatif Tahun 2020 – 2023

Tahun	Jumlah Perempuan sebaga anggota DPRD		Jumlah Perempuan sebaga Aparat Negeri Sipil (ASN)	
	Jumlah (or	%	Jumlah (or	%
2020	5	14,28	1.992	52,35
2021	6	17,14	2.017	53,32
2022	6	17,14	2.058	53,46

Sumber: Data Dinas PPKBPPPA, Tahun 2023

Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung.

Partisipasi perempuan diparlemen saat ini di kabupaten Lampung Barat 17,14% sedangkan pada Lembaga eksekutif 53,46%.

Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang public.

Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik

Tabel 2.2.
Perkembangan IPG dan IDG Tahun 2020 – 2022

Uraian	2020	2021	2022
IPG (%)	92,95	93,00	93,4
IDG (%)	68,24	69,14	65,92

IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.
Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.
Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living)

Di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 IPG 93 Point, capaian ini mengalami kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya,

Tabel 2.3.
Data Keluarga Berencana tahun 2023

Keluarga Berencana	Satuan	TAHUN
		2023
1. Jumlah Pasangan Usia Subur		
1. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB	Pasang	49358
2. Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode		
1. Suntik KB	Orang	22.638
2. Obat/Pil KB	Orang	5.521
3. IUD/Spiral	Orang	440
4. Susuk/implant	Orang	8.052
5. Kondom	Orang	1.093
6. Mal	Orang	6
7. Spermatisida	Orang	0
8. Vasektomi/MOP	Orang	11
9. Tubektomi /MOW	Orang	163
3. Sarana Dan Prasarana KB		
1. Jumlah Alat Peraga KB / genre kit	Kit	
2. Jumlah Balai KB	Balai Penyuluh KB	15
3. Unit Pelayanan KB		
4. Jumlah Tenaga Klinik KB**	Orang	
5. Jumlah Petugas KB**	Orang	
6. Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan**	Institusi	136
7. Jumlah Kelompok Bina Keluarga**	Kelompok	
BKB	Kelompok	131
BKR	Kelompok	131
BKL	Kelompok	131

Sumber: Dinas PPKBPPPA Tahun 2023

Tabel 2.4.

Pencapaian Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023
1	Laju pertumbuhan penduduk	0.93
2	Angka kelahiran total (TFR)	2,48
3	Persentase peserta KB Aktif	77%
4	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	76,8
5	Angka usia kawin pertama	20
6	Persentase Pengetahuan PUS tentang/Cara Kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	
7	Persentase Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB -Posyandu-PAUD)	
8	Persentase Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22,7
9	Persentase Remaja yang dibina tentang Kesehatan Reproduksi	50%
10	Jumlah Pusat Informasi Konseling - Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-RR) yang aktif	20

Sumber: Dinas PPKBPPPA Tahun 2023

Angka kelahiran Total (TFR) Kabupaten Lampung Barat masih diatas TFR Provinsi Lampung. TFR Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah 2,21%, artinya Kabupaten Lampung Barat masih harus menurunkan 0,27%. Untuk peserta KB Aktif pada Tahun 2023 77%,

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian dan Provinsi dan implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- **Isu Strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan**

a. Bonus Demografi

Pembangunan di Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing , yaitu SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan pembangunan diarahkan diantaranya melalui peningkatan produktifitas Angkatan kerja , peningakatn kualitas anak , perempuan dan pemuda. Salah satu factor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total (TFR).

Struktur penduduk dengan dengan proporsi usia produktif lebih tinggi merupakan peluang kita mendapatkan bonus demografi. Maka untuk tetap menjaga struktur tersebut harus menjaga TFR pada level tertentu Bonus demografi merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sector pembangunan

b. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga

Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup , akan lebih komprehensif apabila dimulai dari tahapan perencanaan kehidupan berkeluarga, merencanakan jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan merupakan fase

penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1000 Hari Pertama Kehidupan, Penddidikan anak usia dini , usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas

c. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern

Adanya penurunan 4% pengguna kontrasepsi modern dari hasil SDKI tahun 2012 dan 2017, khususnya dikalangan usia produktif /pasangan usia muda disebabkan karena rendahnya pengetahuan pasangan usia muda terhadap Kesehatan reproduksi , dan rendahnya informasi tentang KB.

d. Rendahnya pemahaman remaja tentang Kesehatan reproduksi

Kendala yang ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait Kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga . Indikator ini ditunjukan pada angka kelahiran umur 15-19 tahun (ASFR) yang masih relative tinggi

e. Kebutuhan ber KB pada PUS yang belum terlayani (Un Meet Need)

Hasil SUPAS 2015 menunjukan 18,3% dan menunjukan penurunan pada tahun 2016 menjadi 15,8% , meningkat Kembali menjadi 17,5% pada tahun 2017. Dan di Propinsi Lampung pada tahun 2021 hasil Pendatan Keluarga diperoleh angka 15,6% dan Lampung Barat 16,4% .

Beberapa alasan Wanita tidak mau ber Kb adalah karena takut efek samping KB, Sebagian lagi karena memang tidak ingin ber KB

- **Isu terkait Pengarusutamaan Gender**

a. Masih adanya ketimpangan Gender , yang ditunjukan dengan indicator IPG 93 point

Hal ini menunjukan terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dimana pembangunan

perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Pembangunan laki-laki sudah berstatus “tinggi” dengan IPM di atas 70 sedangkan pembangunan perempuan masih dikisaran angka 60-an dan berstatus “sedang”. Hal inilah yang menyebabkan IPG Kabupaten Lampung Barat masih berada di bawah 100 dalam kurun waktu 2010-2020. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung berdasarkan tiga komponen yaitu persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi, serta persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Capain IDG Provinsi Lampung termasuk dalam kategori rendah, masih jauh dibandingkan dengan capaian Nasional. Hal ini dikarenakan masih rendahnya capaian dari ke tiga komponen penyusun IDG (keterlibatan perempuan di parlemen yaitu 20%, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi sebesar 50,75% dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja 29,38%). IDG Kabupaten Lampung Barat 68,24.

- **Isu tentang Perlindungan terhadap Anak**

Kasus- kasus kekerasan lebih banyak dijumpai di kalangan perempuan dan anak, namun banyak kasus yang tidak terlaporkan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil telaahan kebutuhan-kebutuhan pada saat proses penyusunan RKPD dilaksanakan. Telaahan kebutuhan dimaksud berupa indikator kinerja yang diharapkan, program dan kegiatan yang akan diusulkan serta kebutuhan pagu dana indikatif yang diperlukan

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	Lampung Barat	Jumlah Bidang/Urusan dilaksanakan	2 bidang urusan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	Lampung Barat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	79,02		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disediakan	100%		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disediakan	100%		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		
3	Administrasi		Persentese	100%		Administrasi		Persentese	100%		

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dan	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	100%		

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
			disediakan					disusun dan disediakan			
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	4.446.374.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	4.446.374.000	

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses perencanaan usulan kegiatan dilakukan berbagai tahapan-tahapan yaitu penjaringan usulan masyarakat dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pekon/Desa, Musrenbang Kecamatan yang kemudian dilakukan pembahasan dengan Tim terkait di tingkat Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti dengan Musrenbang Kabupaten.

Pembahasan dilakukan untuk menelaah apakah ususlan-usulan tersebut sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan yang diterapkan, urgensi dan kemanfaatan kepada masyarakat, serta aspek-aspek perencanaan lain yang relevan. Pembahasan dilakukan juga agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi atas usulan dan pendanaan baik internal OPD maupun lintas OPD.

Berikut adalah penelahaan atas usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Barat
Nama Perangkat Daerah : Dinas PPKBPPPA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana				
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan dan Alat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Di daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Kecamatan se-kab LB	Jumlah akseptor MKJP		
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alakon) dan	Kecamatan se-kab LB			

	sarana Penunjang pelayanan KB				
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK				

1. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran dinas

   Meningkatnya kespesertaan KB Pada PUS

2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**6,576,134,900**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**193,284,000**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**			**48,376,000**
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,376,000
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**144,908,000**
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	7,528,000
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5,300,000
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	132,080,000
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**3,129,778,800**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**			**1,024,157,100**
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,375,000
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,910,000
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,372,100
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		234,000,000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	607,500,000

2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		40,000,000
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**652,800,000**
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	652,800,000
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**			**512,486,700**
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,515,000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	262,220,200
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191,094,000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		9,657,500
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	40,000,000
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			**940,335,000**
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157,791,000
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	759,000,000
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,544,000
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**3,253,072,100**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**3,253,072,100**
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,055,000
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,607,720,000
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,728,400

2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	13,353,500
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,420,700,000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	33,515,200

2. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah Dana
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**482,909,000**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**			**258,031,000**
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	258,031,000
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**224,878,000**
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Sumber Jaya, Sindang Pagar; Kab. Lampung Barat, Kebun Tebu, Tribudi Syukur	224,878,000
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**105,893,000**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**61,440,000**
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	61,440,000
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**			**44,453,000**
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Belalau, Semua Kelurahan; Kab. Lampung Barat, Batu Brak, Semua Kelurahan	44,453,000
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**120,381,000**
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**94,437,000**
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,437,000

2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**25,944,000**
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	25,944,000
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**43,690,000**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**43,690,000**
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,690,000
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**194,349,000**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**			**153,349,000**
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	75,101,000
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	78,248,000
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**			**41,000,000**
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Air Hitam, Gunung Terang	41,000,000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**537,777,800**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**111,568,000**
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111,568,000
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**363,099,800**
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	363,099,800
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**63,110,000**
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kelurahan	63,110,000

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub keguatan sebagai berikut :

1. Program 10 program pendukung sasaran kabupaten dan 1 program penunjang urusan
2. Kegiatan : 26 kegiatan
3. Sub Kegiatan : 80 Sub kegiatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kerja dan pendanaan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah cara untuk mencapaian keberhasilan progrom. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya Rencana kerja dan pendanaan tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada. Adapun Anggaran Rencana kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat yang direncanakan untuk periode tahun 2023 beserta prognosisnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas PPKBPPPA Lampung Barat TA 2024

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu sementara
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**13,801,625,880**
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	80.00%	**3,991,451,000**
01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	**19 dokumen**	**34,000,000**
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	4,500,000
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	6,500,000
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	3,500,000
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4,000,000
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4,000,000
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	3,500,000
01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumkah dokumen Evaluasi kinerja	4 dokumen	8,000,000
01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan PD yang dilaksanakan	**100%**	**2,644,301,000**
01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	28 orang	2,631,801,000
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	3,500,000

01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	5,000,000
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 lap	4,000,000
01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan	100%	**15,000,000**
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 orang	15,000,000
01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan	100%	**199,500,000**
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	6,000,000
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 jenis	8,000,000
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	20,000,000
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 SKHU	8,000,000
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu/makan minum tamu yang dipenuhi	12 bulan	7,500,000
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	150,000,000
01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	**515,000,000**

	Daerah	Daerah yang dilaksanakan		
01.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	14 unit	45,000,000
01.2.07 .06	Pengadaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya	4 Unit	50,000,000
01.2.07 .09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan	1 unit	400,000,000
01.2.07 .11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	20,000,000
01.2.0 8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**178,000,000**
01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Surat Menyurat	12 laporan	5,000,000
01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	33,000,000
01.2.08 .03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 laporan	25,000,000
01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	115,000,000
01.2.0 9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**405,650,000**
01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya	30	350,000,000
01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	10,650,000
01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/rehabilitasi	1	45,000,000

	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
2.08	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**37,79**	**2,739,484,500**
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Meningkatnya anggaran responsif gender pada APBD	10%	**333,031,000**
2.08.02.2.01	**PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER(PUG) pada LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	Jumlahperangkat daerah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi kebijakan PUG dan PPRG	**55(OPD dan Kec)**	**333,031,000**

2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	55 OPD	258,031,000
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	55 OPD	75,000,000
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensip	50%	**603,906,500**
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah peserta yang diedukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	**120 orang**	**170,000,000**
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten	1 dokumen	80,000,000
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten	55 OPD	90,000,000
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab kota	6 layanan	**167,100,500**
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	5 orang	95,000,000
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sigkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah layanan tindak lanjut bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi	6 layanan	72,100,500

2.08.03.2.03	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Sumber Daya Manusia lembaga Penyedia Layananan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab yang**	**60 orang**	**266,806,000**
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 laporan	76,806,000
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	70 orang	100,000,000
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	90,000,000
2.08.04.	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	% kader perempuan yang dibina	20%	**265,000,000**
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kader P3KSS dan GSI yang dibina	150 orang	**175,000,000**
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten	55 Perangkat Daerah	85,000,000

2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	90,000,000
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pekon terbaik pelaksana P3KSS dan GSI	1 pekon	**90,000,000**
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 lembaga	90,000,000
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	% OPD yang memanfaatkan data pilah gender	30%	**125,000,000**
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Data terpilah Gender yang tersusun	50 buku	125,000,000
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia	50 buku	65,000,000
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55 buku	60,000,000
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHN HAK ANAK**	Terpenuhinya Hak-hak anak	580	**715,000,000**

2.08.06.2.01.	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota**	Jumlah Perangkat daerah yang diadvokasi	**55 PD**	**100,000,000**
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non PemerintahnMedia dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada OrganisasiPemerintah, Non Pemerintah, media dan dunia usaha	25 organisasi	100,000,000
2.08.06.2.02.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	jumlah lembaga penyedia yang mengikuti bimktek	3 lembaga	615,000,000
2.08,06,2.02.01	Penyedia Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	60 orang	100,000,000
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 set	65,000,000
2.08.06.202.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten?Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 dokumen	450,000,000
2.08.07	**PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	60%	**697,547,000**
2.08.07.2.01.	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah**	jumlah Perangkat daerah yang diadvokasi	55 PD	**162,724,000**

	Kabupaten/Kota			
2.08.07.2.01.01	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Progran dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak Kewenagan Kabupate/Kota	55 PD	112,724,000
2.08.07.201.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumalah Dokumen Hasil Koordinas dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kwengan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50,000,000
2.08.07.2.02	**Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabuapten/Kota**	**Jumlah layanan yang disediakan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**	3 (Layanan :Konseling, penjangkauan, pendampingan)	**434,823,000**
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan	20 orang	91,000,000
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sigkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab kota	20 orang	189,943,000
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenagnan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindal Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Singkronisasi Bagi Anakyang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 (Layanan konseling)	103,880,000
2.08,06,2.02.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan edukasi Anakyang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kumunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) anaknyang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	3	50,000,000

2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindunga Khusus tingkat Daerak Kabupaten/Kota**	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan	12 orang	**100,000,000**
2.08.07.2.03.01	Kooordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	Jumlag laporan Kooordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	1 laporan	100,000,000
2.14.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**7,070,690,380**
2.14.02	**Program Pengendalian Penduduk**	% masyarakat yang terpapar bangga kencana	70%	**645,000,000**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dg pemda kab/kot dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk**	Jumlah dokumen GDPK disusun	1 dokumen	**350,000,000**
2.14.02.2.01.01	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadapkependudukan , KB , dan pemabngunaan keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadapkependudukan , KB , dan pembngunaan keluarga (Program KKBPK)	1 dok	**150,000,000**
2.14.02.2.02	Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota	jumlah dokumen Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota	20 dok	250,000,000
2.14.02.2.10	Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	dokumen hasil pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	2 dok	50,000,000
2.14.02.2.01.15	pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK	jumlah laporan rapat pengendalian program bangga kencana (KKBPK)	1 laporan	50,000,000
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga	50 dok	**295,000,000**

2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga	50 dok	75,000,000
2.14.02.2.02.08	Pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat intergrasi program KKBPK di sektor lain	Jumlah rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat intergrasi program KKBPK di sektor lain	59 unit	75,000,000
2.14.02.2.02.11	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	5 dokumen	10,000,000
2.14.02.2.02.12	pencatatan dan pengumpulan data keluarga	jumlah data dan dan informasi keluarga pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1 laporan	135,000,000
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 dokumen	132,000,000
2.14.03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana**	Peserta KB Aktif (PA) MKJP	25%	4,187,000,000
		% PUS yang tidak terlayani/ Unmeet need	16%	
2.14.03 2.01	**Pelaksanaan Advokasi Komunikasi dan Informasi edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kecamatan	4 kali	**190,000,000**
2.14.03 2.01.01	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga ,kependudukan , dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	8 org	60,000,000
2.14.03 2.01.02	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen KIE Program Bangga Kencana	4 dok	50,000,000
2.14.03 2.01.04	Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	4 dok	80,000,000

2.14.03 2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 laporan	240,000,000
2.14.03 2.01.07	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Jumlah Laporan hasil pengelolaan operasioanl dan srana di balai penyuluhan bangga kencana (pembangunan keluarga , kependudukan dan KB	15 laporan	600,000,000
2.14.03 2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	1 laporan	45,000,000
2.14.03 2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas KB**	Persentaser peserta KB Baru	80%	**210,000,000**
2.14.03 2.02.01	Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB	**15 organisasi**	50,000,000
2.14.03 2.02.02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB PLKB yang tersedia	15 Unit	100,000,000
2.14.03 2.02.04	Penggerakan kader IMP	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan kader IMP	136 orang	60,000,000
2.14.03 2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan pelayanan KB di Faskes dan jejaringnya	**12 bulan**	**2,387,000,000**
2.14.03 2.03.01	pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	1 laporan	12,000,000
2.14.03 2.03.02	peningkatam kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kb	Jumlah akseptor Peningkatan Komptensi Pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB	45 orang	75,000,000

2.14.03 2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	**1000 orang**	**250,000,000**
2.14.03 2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana Penunjang pelayanan KB	1 dokumen	200,000,000
2.14.03 2.03.06	penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit sarana penunjang pelayanan KB	15 unit	1,600,000,000
2.14.03 2.03.08	Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	100,000,000
2.14.03 2.03.09	Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	15 orang	90,000,000
2.14.03 2.03.10	Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	50 orang	60,000,000
2.14.03 2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi dan Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB**	**Jumlah kampung KB berkembang dan Mandiri**	**5 pekon berkembang, 1 mandiri**	**1,400,000,000**
2.14.03 2.04.01	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah organisasi yang mendapatkan Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	7 organisasi	250,000,000
2.14.03 2.04.02	Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Jumlah dokumen hasil Integrasi Pembangunan lintas sektor di kampung KB	15 dokumen	150,000,000
2.14.03 2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan	59 pekon	800,000,000

		Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		
2.14.03 2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan Pembinaan dan Pelatihan Kampung KB	1 laporan	200,000,000
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	indeks pembangunan keluarga	52,52	2,238,690,380
2.14.04 .2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok kegiatan yang dibina	52%	2,238,690,380
2.14.04 .2.01.0 1	Pembentukkan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 kelompok	200,000,000
2.14.04 .2.01.0 2	Pengadaan saranan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah Unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	15 unit	78,000,000
2.14.04 .2.01.0 3	Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah laporan hasil Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	1 laporan	100,000,000
2.14.04 .2.01.0 4	Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah kader Pengelola dan pelaksana kader ketahanan dan kesejhahteraan keluarga (BKB, BKL, PPPKS , PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS	72 orang	90,000,000

2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Tersedianya kader Pengelola dan Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	645 orang	1,425,000,000
2.14.04.2.01.07	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	1 laporan	85,000,000
2.14.04.2.01.08	Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejaterahan Keluarga menjadi orang tua hebat , generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat , generasi berencana, kelanjutusiaan dan keuangan keluarga)	1 laporan	141,155,380
2.14.04.2.01.09.	Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	jumlah dokumen hasil Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	1 dokumen	119535000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat .

Sebagai sebuah dokumen perencanaan organisasi, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak yang ada dalam Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Kabupaten Lampung Barat Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat dalam rangka perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

Liwa, Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

M. DANANG HARISUSENO, S.Ag.,M.H

NIP. 19701121 200003 1 003

Tabel T.C.29

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra
Dinas PPKBPPA Tahun 2021
Kabupaten Lampung
Barat

Dinas PPKBPPPA

Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah SAMPAI dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja tahun 2021		Tingkat Realisasi	Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		
													Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun 2022		Tingkat capaian realisasi target renstra
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	2	bidang	2	bidang	2	bidang	2	bidang	100 %	2	bidang	2	bidang	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	dok	54	dok	18	dok	18	dok	100 %	18	dok	90	dok	100

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersusun	25	dok	15	dok	5	dok	5	dok	100 %	5	dok	25	dok	100.0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	15	dok	9	dok	1	dok	1	dok	100 %	3	dok	13	dok	86.7
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	5	dok	3	dok	1	dok	5	dok	100 %	1	dok	9	dok	180.0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	25	dok	15	dok	5	dok	3	dok, bulan	100 %	5	dok	23	dok	92.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi SKPD yang tersusun dan pelaksanaan rapat Koordinasi	10	dok, Bulan	6	dok, bulan	2	dok, bulan	2		100 %	2	dok, bulan	10	dok, bulan	100.0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun**	60	bulan	36	bulan	12	bulan			100 %	12	bulan	48	bulan	80.0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang di tersedia	60	Bulan	36	bulan	12	Bulan	12	bulan	100 %	12	Bulan	60	Bulan	100.0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteranyang di susun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang di susun	5	dok	3	dok	1	dok	1	dok	100 %	1	dok	5	dok	100.0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Formal**	12	orang	6	Orang	3	orang				3	orang	9	orang	75.0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	orang	6	Orang		orang	0	Orang			orang	6	orang	50.0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya**	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100 %	12	bulan	60	bulan	100.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	Jenis	30	jenis	9	Jenis	9	Jenis	100 %	15	Jenis	54	Jenis	112.5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	125	jenis	75	jenis	25	jenis	25	jenis	100 %	23	jenis	123	jenis	98.4
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	60	jenis	36	jenis	12	jenis	12	jenis	100 %	10	jenis	58	jenis	96.7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	20	SKHU	12	skhu	5	SKHU	5	SKHU	100 %	6	SKHU	23	SKHU	115.0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi Kunjungan Tamu	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100 %	12	bulan	60	bulan	100.0

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bulan	36	bulan	12	bulan	12	bulan	100 %	12	bulan	60	bulan	100.0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang daerah yang diadakan	456	unit	134	unit		unit	6	unit		9	unit	149	unit	32.7
Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerja, Jumlah Kursi Kerja , meja rapat, kursi rapat	37	unit	0.000	unit	15	unit	3	unit	100 %	7	unit	10	unit	27.0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer Jumlah Komputer Note Book, Jumlah Printer, Generator set	15	unit	1	unit	9	unit	9	unit	100 %	7	unit	17	unit	113.3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Meter Gordin 15 paket, Jumlah Almari 7, Jumlah Filing Kabinet 12	19	unit	1	unit	15	paket	15	paket	100 %	19	paket	35	paket	184.2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	100	%		%	###				%	#VALUE!	%	#VALUE!
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar 2000	10,000	surat	6000	surat	2000	surat				2000	surat	8000	surat	80.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpon,Air dan Listrik 322 rekening dan spedy	7	rek	7	rek	7	rek	7	rek	100 %	7	rek	7	rek	100.0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	125	jenis	75	jenis	47	jenis	47	jenis	100 %	47	jenis	169	jenis	135.2
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Aparatur, tenaga honor, penjaga kantor dan biaya ADM keuangan	81	orang	45	orang	20	orang	20	orang	100 %	15	orang	80	orang	98.8

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%							31	unit	31	unit	31.0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobi l 6 unit dan jumlah motor 41 unit yang terpelihara	235	unit	124	unit	30	unit	29	unit	97%	30	unit	183	unit	77.9
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	4	Gedung	2	Gedung	1	gedung	1	gedung	100%	1	gedung	4	gedung	100.0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Genset yang dipelihara 1 unit, Komputer 6 unit , Printer 4 unit dan peralatan perlengkapan mupen 6	78	unit	45	unit	0	unit	0	unit	100%	15	unit	60	unit	76.9
													0		#DIV/0!
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang melakukan perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender	100	%	100	%								100		100.0
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		100	Orang			50	orang	50	Orang	100%	50	orang	100	orang	100.0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta yJumlah peserta nyang ikut Advokasi dan fasilitasi PUGang ikut dalam pembentukan Puspaga dan jumlah puspaga	300	Orang	100	orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	200	Orang	66.7

	dibentuk														
Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten kota													0		#DIV/0!
Pengembangan komunikasi. Informasi dan EdukasiPemberdayaan Perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah peserta pembinaan P3KSS	60	orang							60	orang		60	orang	100.0
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100	%										0		0.0
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		936	Orang										0		0.0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan dan pencegahan KDRT	936	orang	296	Orang	60	orang	60	orang	100 %	50	orang	406	orang	43.4
Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan di Lampung Barat												0		#DIV/0!

Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah desa ramah perempuan dibentuk	2	desa			0	0		0	#DIV/0!	2	desa	2	desa	100.0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	32,5	%										0		#VALUE!
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		617	Orang										0		0.0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang dilatih menjadi Satgas/Kader Gerakan Sayang Ibu	1585	Orang	936	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	0	Orang	936	Orang	59.1
Pelaksanaan Komunikasi. Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang ikut dalam pembentukan Puspaga dan jumlah puspaga dibentuk	750	Orang	300	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	50	Orang	350	Orang	46.7
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan yang akan menjadi warga binaan peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera 150 orang	750	Orang	300	Orang	150	orang	150	orang	100%	0	orang	450	orang	60.0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam													0		#DIV/0!

Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota															
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang dilatih menjadi Satgas/Kader Gerakan Sayang Ibu	4,10 20,1 5	Pekon , Orang , Kec	30 0	ORAN G	0	ora ng	-	0ram g		30	oran g	330	orang	#VALUE!
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan satgas P2TPA	225	Orang	-	-	21	Or ang	21	oran g		0	Ora ng	#VA LUE !	Oran g	#VALUE!
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-150	Orang										0		0.0
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		450, 15	Orang , Satgas	36 0	Orang , stgas	20	ora ng, sat gas	-	oran g		20	oran g,sa tgas	380	orang ,satg as	#VALUE!
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Gender Anak yang terupdate	50	buku										0		0.0
Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-50	Buku										0		0.0

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Profil data gender yang tersusun	250	buku	150	Buku	50	Buku	50	buku	100 %	50	buku	250	buku	100.0
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian nilai evaluai kabupaten Layak Anak	800	Point										0		0.0
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		60, 15	Orang , Kec										0		#VALUE!
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Kabupaten Layak Anak dan jumlah peserta sosialisasi anak Berhadapan dengan Hukum	2, 286	Kelompok, Orang	2, 286	orang	75, 136	Orang	###	orang		45	Orang	#VALUE!	Orang	#VALUE!
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan forum anak dan terpilihnya duta anak lampung barat	180, 15	Orang , Kec	60, 15	Orang ,kec	60	Orang	60	orang	100 %	60	Orang	#VALUE!	Orang	#VALUE!
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		-1 , 30	Lokasi , Sekolah										0		#VALUE!
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Junlah taman bermain ramah anak dalam upaya persiapan KLA	5	lokasi	3	Lokasi	1	Lokasi	1	lokasi	100 %	0	LOKASI	4	LOKASI	80.0

Pengembangan KIE pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tk daerah	Junlah taman bermain ramah anak										1	lokasi	1	lokasi	#DIV/0!
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pendampingan anak yang membutuhkan perlindungan khusus	90%	%										0		0.0
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											100	orang	100	orang	#DIV/0!
Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten	Jumlah peserta rapat koordinasi dan sosialisasi perlindungan khusus anak serta TPPO'										100	orang	100	orang	#DIV/0!
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		150	Orang										0		0.0
Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO	650	Orang	350	Orang	150	Orang	0		0%			350		53.8
Penyediaan layanan Pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota	Jumlah kasus yang tertangani										15	kecamatan	15	kecamatan	#DIV/0!

Penguatan **dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak**													0		#DIV/0!
Kooordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak										45	orang	45	orang	#DIV/0!
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi jangka panjang	30	%					35	%	#DIV/0!			35		116.7
Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dg pemda kab/kot dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk													0		#DIV/0!
Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadapkependudukan , KB , dan pemabngunaan keluarga (Program KKBPK)	jumlah akseptor yang dilayani selama kegiatan										3340	Orang	3340	Orang	#DIV/0!
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		25, 28	Buku, Rumah Data										0		#VALUE!
Penyusunan Profil Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Buku Profil perkembangan Penduduk	145	buku	95	buku	25	buku	25	BUKU	100 %			120		82.8

Penyediaan data dan informasi keluarga	tersedianya formn data pencegahan stunting										15	kec	15	kec	#DIV/0!
Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	tersedianya jaringan internet dan pengolahan data										15	kec	15	kec	#DIV/0!
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Rumah Dataku yang terbentuk	*100	Pekon	0	pekon	15	pekon	15	pekon	100 %	0	pekon	15	pekon	#VALUE!
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif	78	%										0		0.0
Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		150, 15	Kali, Kec, Orang										0		#VALUE!
Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	terlaksananya koordinasi pencegahan stunting										3	kl	3	kl	#DIV/0!
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBK sesuai kearifan budaya lokal	tersedianya media KIE cetak										1	kl	1	kl	#DIV/0!
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah pelaksanaan KIE Program KKBPK melalui mobil unit pelayanan	150	Kali	54	kali	10	kl	10	kl	100 %			64		42.7

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)	tersedianya operasional lokakarya mini TK Desa pencegahan stunting										15	kec	15	kec	#DIV/0!
Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluh KKBPK	tersedianya pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluh KKBPK										15	kec	15	kec	#DIV/0!
Pengendalian Program KKBPK	tersedianya operasional audit stunting										15	kec	15	kec	#DIV/0!
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	15 kecamatan, 150 kali	15, 290	Kec, Orang										0		#VALUE!
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan. Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Kecamatan yang menerima sarana Operasional Balai PLKB	75	Kec	45	kec	15	kec	15	kec	100 %	0		60		80.0
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah peserta bimbingan teknis bagi Petugas Pos Pembantu KB Desa dan Petugas Sub Pos Pembina KB Desa dan kader IMP	1450	Orang	100	orang	50	orang	0		0%	15	kec	115	kec	#VALUE!
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah		57200, 15, 3, 80	Pus, Kec, Kelompok, Orang										0		#VALUE!

Kabupaten/Kota															
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	terdistribusinya alat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan									#DIV/0!	15	kec	15	kec	#DIV/0!
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan KB									#DIV/0!	1111	akseptor	1111	akseptor	#DIV/0!
penyusunan rencana kebutuhan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan KB									#DIV/0!	55480	akseptor	55480	akseptor	#DIV/0!
Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	tersedianya operasional koordinasi pelayanan difaskes									#DIV/0!	15	kecamatan	15	kecamatan	#DIV/0!
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapat Pelayanan KB	272465	Orang	159425	orang	55840	orang	######	orang	100%	55840	orang	271105	orang	99.5
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pembangunan dan penyediaan peralatan/ perlengkapan Balai Penyuluh KB Kecamatan	62	Kec	32	kec	15	kec	15	kec	100%	0		47		75.8

Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi. serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Kelompok Pelaksana Terbaik PIK KR Tingkat Kabupaten	15	Kelompok	6	Kelompok	3	Kelompok	3	Kelompok	100 %	0		9		60.0
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Pengelola Pasilitas Kesehatan/ Klinik KB yang ikut pelatihan pen catatan dan pelaporan hasil Pelayanan KB	375	orang	150	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	0		150		40.0
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													0		#DIV/0!
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pekon Terbaik Pelaksana Kegiatan Kesrak PKK KB Kesehatan dan terlaksananya penilaian Lomba serta tersalurkannya dana hibah	15	Pekon	9	Pekon	3	pekon	3	pekon juara	100 %			12		80.0
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung Keluarga Berkualitas yang terbina									#DIV/0!	44	pekon	44	pekon	#DIV/0!
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah PUS yang di layani KB selama kegiatan Baksos	18000	Orang, Kec	10800	orang	3340	orang	0	Orang	0%	0		10800		60.0

		15	kec							#DIV/0!	0		0		0.0
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah peserta pelatihan dan pekon yang terbina	544	orang	408	orang	136	orang	136	orang	100 %	6	Pekon	550	Pekon	101.1
		236	pekon	177	pekon	59	pekon			0%			177		75.0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		30	%							#DIV/0!			0		0.0
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										#DIV/0!			0		#DIV/0!
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB). Bina Keluarga Remaja (BKR). Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL). Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Junlah kelompok BKB Terbaik dan jumlah Kader BKB,BKR,BKL yang dilatih, jumlah pengelola dan kader yang mengikuti harganas	15	Kelompok	9	kelompok	3	kelompok	3	kelompok	100 %	3	kelompok	15	kelompok	100.0
Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	tersedianya sarana dan prasarana BKB KIT Stunting dan siap nikah bagi kelompok BKB	0	kec	0		0		-		#DIV/0!	15	kec	15	kec	#DIV/0!

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola UPPKS yang dilatih'	680	orang	136	Orang	136	orang	136	orang	100 %	72	orang	344	orang	50.6
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumla kelompok PIK R yang mengikuti sosialisasi	300	orang	180	orang	60	orang	60	orang	100 %	8	kelompok	248	kelompok	82.7
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta ikut penyuluhan penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS	300	orang	170	orang	50	orang	50	orang	100 %	0		220		73.3
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	tersedianya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga									#DIV/0!	15	kecamatan	15	kecamatan	#DIV/0!

LAMPIRAN I RENJA

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tah 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**100**	**13,823,745,880**			**100**	**14,405,191,**
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA	Liwa	80.00%	**3,991,451,000**	APBD		80.00%	**3,666,201,0**

01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		**19 dokumen**	**34,000,000**	APBD		**19 dokumen**	**38,000,000**
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dokumen	4,500,000	APBD		7 dokumen	5,000,000
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	6,500,000	APBD		1 dokumen	7,000,000
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4 dokumen	3,500,000	APBD		4 dokumen	4,000,000
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	4,000,000	APBD		1 dokumen	4,500,000
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	4,000,000	APBD		1 dokumen	4,500,000
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		1 dokumen	3,500,000	APBD		1 dokumen	4,000,000
01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumkah dokumen Evaluasi kinerja		4 dokumen	8,000,000	APBD		4 dokumen	9,000,000
01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan PD yang dilaksanakan		**100%**	**2,644,301,000**	APBD		**100%**	**2,645,201,0**
01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		28 orang	2,631,801,000	APBD		28 orang	2,631,801,0

01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		2 laporan	3,500,000	APBD		2 laporan	3,500,000
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		18 laporan	5,000,000	APBD		18 laporan	5,500,000
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 lap	4,000,000	APBD		1 lap	4,400,000
01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan		100%	**15,000,000**	APBD		100%	**15,000,000**
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3 orang	15,000,000	APBD		3 orang	15,000,000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan		100%	**199,500,000**	APBD		100%	**229,000,000**
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		14 jenis	6,000,000	APBD		14 jenis	6,500,000
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		24 jenis	8,000,000	APBD		24 jenis	9,000,000
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		10 jenis	20,000,000	APBD		10 jenis	22,000,000

01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		6 SKHU	8,000,000	APBD		6 SKHU	8,500,000
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu/makan minum tamu yang dipenuhi		12 bulan	7,500,000	APBD		12 bulan	8,000,000
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan		12 bulan	150,000,000	APBD		12 bulan	175,000,000
01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		100%	**515,000,000**	APBD		100%	**115,000,000**
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		14 unit	45,000,000	APBD		30 unit	50,000,000
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya		4 Unit	50,000,000	APBD		4 unit	50,000,000
01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan		1 unit	400,000,000	APBD		0 UNIT	
01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	20,000,000	APBD		1 unit	15,000,000
01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	**178,000,000**	APBD		100%	**183,000,000**

01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Surat Menyurat		12 laporan	5,000,000	APBD		12 laporan	6,000,000
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 laporan	33,000,000	APBD		12 laporan	35,000,000
01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1 laporan	25,000,000	APBD		1 laporan	27,000,000
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 laporan	115,000,000	APBD		12 laporan	115,000,000
01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	**405,650,000**	APBD		100%	**441,000,000**
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya		30	350,000,000	APBD		30	385,000,000
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 unit	10,650,000	APBD		15 unit	11,000,000
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/rehabilitasi		1	45,000,000	APBD		1	45,000,000
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								

2.08	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**2,761,604,500**	APBD		**38,00**	**3,025,230,8**
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Meningkatnya anggaran responsif gender pada APBD		10%	**333,031,000**	APBD		**10%**	***345,000,000***
2.08.02. 2.01	**PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER(PUG) pada LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	Jumlahperangkat daerah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi kebijakan PUG dan PPRG		**55(OPD dan Kec)**	**333,031,000**	APBD		**55(OPD dan Kec)**	**345,000,000**
2.08.02. 2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		55 OPD	258,031,000	APBD		55 OPD	265,000,000
2.08.02. 2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		55 OPD	75,000,000	APBD		55 OPD	80,000,000
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensip		50%	**603,906,500**	APBD		**60%**	**675,297,150**
2.08.03. 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah peserta yang diedukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan		**120 orang**	**170,000,000**	APBD		**120 orang**	**187,000,000**
2.08.03. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten		1 dokumen	80,000,000	APBD		1 dokumen	88,000,000
2.08.03. 2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten		55 OPD	90,000,000	APBD		55 OPD	99,000,000

2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab kota		6 layanan	**167,100,500**	APBD		6 layanan	**183,810,550**
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		5 orang	95,000,000	APBD		10 orang	104,500,000
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sigkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah layanan tindak lanjut bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi		6 layanan	72,100,500	APBD		6 layanan	79,310,550
2.08.03.2.03	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Sumber Daya Manusia lembaga Penyedia Layananan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab yang**		**60 orang**	**266,806,000**	APBD		**60 orang**	**304,486,600**
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kewenangan Kabupaten/Kota Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		1 laporan	76,806,000	APBD		1 laporan	84,486,600
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		70 orang	100,000,000	APBD		70 orang	121,000,000

2.08.03. 2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen	90,000,000	APBD		1 dokumen	99,000,000
2.08.04.	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	% kader perempuan yang dibina		20%	**265,000,000**	APBD		20%	**291,500,000**
2.08.04. 2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kader P3KSS dan GSI yang dibina		150 orang	**175,000,000**	APBD		150 orang	**192,500,000**
2.08.04. 2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten		55 Perangkat Daerah	85,000,000	APBD		55 Perangkat Daerah	93,500,000
2.08.04. 2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		2 laporan	90,000,000	APBD		2 laporan	99,000,000
2.08.04. 2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pekon terbaik pelaksana P3KSS dan GSI		1 pekon	**90,000,000**	APBD		1 pekon	**99,000,000**
2.08.04. 2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan		15 lembaga	90,000,000	APBD		15 lembaga	99,000,000

		Kabupaten/Kota							
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	% OPD yang memanfaatkan data pilah gender		30%	**125,000,000**	APBD		**40%**	**135,000,000**
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Data terpilah Gender yang tersusun		50 buku	125,000,000	APBD		55 buku	135,000,000
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia		50 buku	65,000,000	APBD		55 buku	70,000,000
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		55 buku	60,000,000	APBD		55 buku	65,000,000
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHN HAK ANAK**	Terpenuhinya Hak-hak anak		580	**715,000,000**	APBD		590	**786,500,000**
2.08.06.2.01.	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota**	Jumlah Perangkat daerah yang diadvokasi		**55 PD**	**100,000,000**	APBD		**55 PD**	**110,000,000**

2.08.06. 2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non PemerintahnMedia dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada OrganisasiPemerintah, Non Pemerintah, media dan dunia usaha		25 organisasi	100,000,000	APBD		25 organisasi	110,000,000
2.08.06. 2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak Ank kewenangan kabupaten /kota		1 dokumen				1 dokumen	200,000,000
2.08.06. 2.02.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	jumlah lembaga penyedia yang mengikuti bimktek		3 lembaga	615,000,000	APBD		3 lembaga	676,500,000
2.08,06, 2.02.01	Penyedia Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		60 orang	100,000,000	APBD		60 orang	110,000,000
2.08.06. 2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		2 set	65,000,000	APBD		2 set	71,500,000
2.08.06. 202.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten?Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kwalitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		15 dokumen	450,000,000	APBD		15 dokumen	495,000,000
2.08.07	**PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif		60%	**719,667,000**				**791,933,700**

2.08.07.2.01.	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah Perangkat daerah yang diadvokasi		55 PD	**162,724,000**	APBD		**62%**	**178,996,400**
2.08.07.2.01.01	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Progran dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak Kewenagan Kabupate/Kota		55 PD	112,724,000	APBD		**55 PD**	**123,996,400**
2.08.07.201.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumalah Dokumen Hasil Koordinas dan Singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kwengan Kabupaten/Kota		1 dokumen	50,000,000	APBD		1 dokumen	55,000,000
2.08.07.2.02	**Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabuapten/Kota**	**Jumlah layanan yang disediakan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**		3 (Layanan :Konseling, penjangkauan, pendampingan)	**330,943,000**	APBD		**3 (Layanan :Konseling, penjangkauan, pendampingan)**	**363,937,300**
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan		20 orang	91,000,000	APBD		20 orang	100,000,000
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sigkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab kota		20 orang	189,943,000	APBD		3	208,937,300

2.08,06, 2.02.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan edukasi Anakyang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kumunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) anaknyang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota		3	50,000,000	APBD		**1 laporan**	55,000,000
2.08.07. 2.03	**Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindunga Khusus tingkat Daerak Kabupaten/Kota**	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan		12 orang	**226,000,000**	APBD		1 laporan	**249,000,000**
	Kooordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah	jumlah laporan Kooordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah		**1 laporan**	100,000,000	APBD		**1 laporan**	110,000,000
2.08.07. 2.03.01	Kooordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	Jumlag laporan Kooordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota		1 laporan	76,000,000	APBD		1 dokumen	84,000,000
	Kooordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah tingkat daerah kabupaten	jumlah dokumen Kooordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah tingkat daerah kabupaten		1 dokumen	50,000,000			1 dokumen	55,000,000
2.14.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**7,070,690,380**				**7,713,759,4**
2.14.02	**Program Pengendalian Penduduk**	% masyarakat yang terpapar bangga kencana		70%	**645,000,000**	APBD		**70.00%**	**715,500,000**
2.14.02. 2.01	**Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemda provinsi dg pemda kab/kot dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk**	Jumlah dokumen GDPK disusun		1 dokumen	**350,000,000**	APBD		1 dokumen	**395,000,000**

2.14.02. 2.01 .01	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadapkependudukan , KB , dan pemabngunaan keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadapkependudukan , KB , dan pembngunaan keluarga (Program KKBPK)		1 dok	**150,000,000**	APBD		1 dok	**165,000,000**
2.14.02. 2.02	Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota	jumlah dokumen Penyusunan dan pemanfaatan GDPK tingkat kab kota		20 dok	250,000,000	APBD		20 dok	275,000,000
2.14.02. 2.10	Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	dokumen hasil pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal		2 dok	50,000,000	APBD		2 dok	60,000,000
2.14.02. 2.01. 15	pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK	jumlah laporan rapat pengendalian program bangga kencana (KKBPK)		1 laporan	50,000,000	APBD		1 laporan	60,000,000
2.14.02. 2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga		50 dok	**295,000,000**	APBD		50 dok	**320,500,000**
2.14.02. 2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga		50 dok	75,000,000	APBD		50 dok	80,000,000
2.14.02. 2.02.08	Pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat intergrasi program KKBPK di sektor lain	Jumlah rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat intergrasi program KKBPK di sektor lain		59 unit	75,000,000	APBD		59 unit	80,000,000
2.14.02. 2.02.11	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia		5 dokumen	10,000,000	APBD		APBD	12,000,000
2.14.02. 2.02.12	pencatatan dan pengumpulan data keluarga	jumlah data dan dan informasi keluarga pencatatan dan pengumpulan data keluarga		1 laporan	135,000,000	APBD		APBD	148,500,000
2.14.02. 2.02.13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		12 dokumen	132,000,000	APBD		12 dokumen	132,000,000

2.14.03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana**	Peserta KB Aktif (PA) MKJP		25%	4,187,000,000	APBD		28%	4,535,700,0
		% PUS yang tidak terlayani/ Unmeet need		16%		APBD		14%	
2.14.03 2.01	**Pelaksanaan Advokasi Komunikasi dan Informasi edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kecamatan		4 kali	**190,000,000**	APBD		4 kali	**209,000,000**
2.14.03 2.01.01	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga ,kependudukan , dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja		8 org	60,000,000	APBD		8 org	66,000,000
2.14.03 2.01.02	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen KIE Program Bangga Kencana		4 dok	50,000,000	APBD		4 dok	55,000,000
2.14.03 2.01.04	Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang		4 dok	80,000,000	APBD		4 dok	88,000,000
2.14.03 2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) , dan Mini Lokakarya (Minilok)		4 laporan	240,000,000	DAK NON FISIK		**DAK NON FISIK**	264,000,000
2.14.03 2.01.07	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Jumlah Laporan hasil pengelolaan operasioanl dan srana di balai penyuluhan bangga kencana (pembangunan keluarga , kependudukan dan KB		15 laporan	600,000,000	DAK NON FISIK		**DAK NON FISIK**	660,000,000

2.14.03 2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK		1 laporan	45,000,000	APBD		**APBD**	49,500,000
						APBD			
2.14.03 2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas KB**	Persentaser peserta KB Baru		80%	**210,000,000**	APBD		80%	**231,000,000**
2.14.03 2.02.01	Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB		**15 organisasi**	50,000,000	APBD		APBD	55,000,000
2.14.03 2.02.02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB PLKB yang tersedia		15 Unit	100,000,000	APBD		APBD	110,000,000
2.14.03 2.02.04	Penggerakan kader IMP	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan kader IMP		136 orang	60,000,000	APBD		APBD	66,000,000
2.14.03 2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan pelayanan KB di Faskes dan jejaringnya		**12 bulan**	**2,387,000,000**	APBD		**APBD**	**2,625,700,0**
2.14.03 2.03.01	pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya		1 laporan	12,000,000	APBD		**APBD**	13,200,000
2.14.03 2.03.02	peningkatam kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kb	Jumlah akseptor Peningkatan Komptensi Pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB		45 orang	75,000,000	APBD		**APBD**	82,500,000
2.14.03 2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)		**1000 orang**	**250,000,000**	DAK NON FISIK		**1000 orang**	275,000,000

2.14.03 2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana Penunjang pelayanan KB		1 dokumen	200,000,000	APBD		1 dokumen	220,000,000
2.14.03 2.03.06	penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit sarana penunjang pelayanan KB		15 unit	1,600,000,000	DAK NON FISIK		15 unit	1,760,000,0
2.14.03 2.03.08	Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	110,000,000
2.14.03 2.03.09	Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Reproduksi serta hak-hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan		15 orang	90,000,000	APBD		15 orang	99,000,000
2.14.03 2.03.10	Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi		50 orang	60,000,000	APBD		50 orang	66,000,000
2.14.03 2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi dan Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB**	**Jumlah kampung KB berkembang dan Mandiri**		**5 pekon berkembang, 1 mandiri**	**1,400,000,000**	APBD		**5 pekon berkembang, 1 mandiri**	**1,470,000,0**
2.14.03 2.04.01	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah organisasi yang mendapatkan Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		7 organisasi	250,000,000	APBD		7 organisasi	210,000,000
2.14.03 2.04.02	Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Jumlah dokumen hasil Integrasi Pembangunan lintas sektor di kampung KB		15 dokumen	150,000,000	APBD		15 dokumen	160,000,000
2.14.03 2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		59 pekon	800,000,000	DAK NON FISIK		59 pekon	880,000,000

2.14.03 2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan Pembinaan dan Pelatihan Kampung KB		1 laporan	200,000,000	APBD		1 laporan	220,000,000
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	indeks pembangunan keluarga		52,52	2,238,690,380	APBD		54	**2,462,559,4**
2.14.04. 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok kegiatan yang dibina		52%	2,238,690,380	APBD		52%	2,462,559,4
2.14.04. 2.01.01	Pembentukkan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk		6 kelompok	200,000,000	APBD		6 kelompok	**220,000,000**
2.14.04. 2.01.02	Pengadaan saranan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah Unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)		15 unit	78,000,000	APBD		15 unit	**85,800,000**
2.14.04. 2.01.03	Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah laporan hasil Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)		1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	**110,000,000**
2.14.04. 2.01.04	Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah kader Pengelola dan pelaksana kader ketahanan dan kesejhahteraan keluarga (BKB, BKL, PPPKS , PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS		72 orang	90,000,000	APBD		72 orang	**99,000,000**

2.14.04. 2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Tersedianya kader Pengelola dan Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)		645 orang	1,425,000,000	DAK FISIK		645 orang	**1,567,500,0**
2.14.04. 2.01.07	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK R , dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKKS)		1 laporan	85,000,000	APBD		1 laporan	**93,500,000**
2.14.04. 2.01.08	Promosi dan sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejaterahan Keluarga menjadi orang tua hebat , generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat , generasi berencana, kelanjutusiaan dan keuangan keluarga)		1 laporan	141,155,380	APBD		1 laporan	**155,270,918**
2.14.04. 2.01.09.	Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	jumlah dokumen hasil Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK		1 dokumen	119535000	APBD		1 dokumen	131488

SISTEMATIKA RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah …… Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak ….. program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak ……kegiatan dan jumlah subkegiatan termasuk subkegiatan rutin sebanyak ……subkegiatan. Alokasi dana tahun 2022 untuk Belanja Daerah sebesar Rp…… terealisasi sebesar Rp…….. atau …..persen. Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak ……. subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu : 1. Subkegiatan …….. realisasi fisik/output sebesar …….persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena …… 2. Subkegiatan …….. realisasi fisik/output sebesar …….persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena …… 3. Dst Rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2022 adalah sebesar …….persen. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP LAMPIRAN I LAMPIRAN II Catatan : Secara Rinci Sistematika Penyusunan dapat melihat pada Permendagri 86 Tahun

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Lampung Barat

Kode	Urusan/ Bidang Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Target Akhir Periode RPD/Renstra Tahun 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Perkiraan maju rencana tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Pagu Indikator	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN**				**14.398.618.509,0**				**13,507,548,100.00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**6,141,754,200.00**				**5,779,705,920.00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA (%)**	80%	**80**	**3.890.796.000,00**				**3,505,305,500.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	108 Dok	**27 dokumen**	**41,000,000**	(Balik Bukit, Balik Bukit)		27	**45,000,000**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40 dokumen	10 dokumen	5,500,000	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.00	6,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4 dok	1 dokumen	7,500,000	(Balik Bukit, Balik Bukit)		1	8,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dok	1 dokumen	4,500,000	(Balik Bukit, Balik Bukit)		1.00	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4 dok	1 dokumen	5,000,000	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	5,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dok	1 dokumen	5,000,000	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 dok	1 dokumen	4,500,000	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.00	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	48 dok	12 dokumen	9,000,000	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12.00	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan PD yang dilaksanakan (%)		**100%**	**2,646,801,000**	(Balik Bukit, Balik Bukit)		100	**2,647,301,000**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	112 orang	28 orang	2,631,801,000	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29.00	2,631,801,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 laporan	2 laporan	4,000,000	(BALIK BUKIT, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2	4,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	72 laporan	18 laporan	6,000,000	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18	6,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4 laporan	1 lap	5,000,000	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.00	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan (%)		100	10.000.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)			**30,000,000**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
								100	10,000,000	
2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 dok	3	10.000.000,00	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	3	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	28 dokumen	3 orang	10,000,000					
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan		100%	**263,500,000**	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	100	**257,500,000**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	56 paket	14 paket	7,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14 paket	7,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96 paket	24 paket	10,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	24 paket	11,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 paket	10 paket	29,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	10 paket	3,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 SKHU	6 SKHU	9,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	6 SKHU	7,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48 laporan	12 laporan	8,500,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	12 laporan	9,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 bulan	12 bulan	200,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	12 bulan	220,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
						(Jakarta, luar daerah provinsi lampung, dan	Dana Transfer Umum-Dana			
						(Balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana			
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		100%	**105,000,000**	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	100%	**70,000,000**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	59 unit	15 unit	35,000,000	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	0 unit	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	2 unit	50,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	2	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit			(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	1 unit	20,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	1 unit	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	**194,655,000**	(balik bukit, Balik Bukit)		100%	**201,000,000**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48 laporan	12 laporan	6,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	12 laporan	6,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	12 laporan	40,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	12 laporan	45,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	1 laporan	30,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	1 laporan	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 laporan	12 laporan	118,655,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	12 laporan	120,000,000	
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	**377,500,000**	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	100%	**377,500,000**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	120 unit	30	320,500,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	30	320,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60 unit	15 unit	12,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	15 unit	12,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1	45,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	1	45,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya anggaran responsif gender pada APBD (%)**		**3.5**	**646,239,500.00**				**668,080,500.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana**
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi kebijakan PUG dan PPRG (Perangkat Daerah)		55	323.159.000,00	(Way Mengaku, Balik Bukit)		**55(OPD dan Kec)**	**370,000,000**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	172 dokumen	0	0	(Way Mengaku, Kec. Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	43 OPD	0	0	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan		55	323.080.500,00	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan		55 orang	80,000,000	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55 orang	85,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 dok	275,000,000	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dok	285,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun**		**70%**				**80%**	**679,774,552**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga**
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah**	Jumlah peserta yang diedukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan		**120 orang**	**205,700,000**	(Balik Bukit, Balik Bukit)		**120 orang**	**215,380,000**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	4 dok	1 dokumen	96,800,000	(liwa, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana	1 dokumen	106,480,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	55 OPD	55 OPD	108,900,000	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana	55 OPD	108,900,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan**	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab kota		6	76.360.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)		6 layanan	**95,965,766**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(Layanan)	6 layanan	6 layanan	87,241,605	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6 layanan	368,428,786	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah**	Jumlah Sumber Daya Manusia lembaga Penyedia Layananan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten /kota yang				(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	**60 orang**	**368,428,786**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	4 laporan	1 laporan	92,935,260	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	102,228,786	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	280 orang	70 orang	133,100,000	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 orang	146,410,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4 dok	1 dokumen	108,900,000			1 dokumen	119,790,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**% keluarga berkualitas (%)**		**30**	**456,000,000.00**				**220,000,000.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga**
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		43	200.000.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)		150 orang	**472,925,000**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	102,850,000			55 Perangkat Daerah	113,135,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	4 dokumen	1 dokumen	220,000,000	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	240,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8 laporan	2 laporan	108,900,000			2 laporan	119,790,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah**	Pekon terbaik pelaksana P3KSS dan GSI (Desa)		1	256.000.000,00	(Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		1 pekon	**119,790,000**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		15 lembaga	108,900,000	(Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 lembaga	119,790,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**% data gender dan anak yang terupdate**		**50%**	70,000,000			**60%**	**75,000,000**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga**
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Jumlah Profil Data terpilah Gender yang tersusun (Buku)		55 buku	70,000,000	(balik Bukit, Balik Bukit)		55 buku	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	200 buku	50 buku	70,000,000	(Way Mengaku, Kec. Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 buku	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Terpenuhinya Hak-hak anak (Kategori)**		**Madya**	**147,556,000.00**				**121,000,000.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah , mediadan dunia usaha		25	147.556.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)		**55 PD**	**133,100,000**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media	25 organisasi	25 organisasi	121,000,000	(balik bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 organisasi	133,100,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
						(5 kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	jumlah lembaga penyedia yang mengikuti bimktek (Lembaga)		3 lembaga	559,650,000	(Balik Bukit, Balik Bukit)		3 lembaga	615,615,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	240 orang	60 orang	121,000,000	Balik Bukit		60 orang	133,100,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8 dokumen	2 dokumen	78,650,000	Sekincau, Sukau		2 dokumen	86,515,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	15 dokumen	15 dokumen	360,000,000	Balik Bukit		15 dokumen	396,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang**			**742,826,700.00**				**785,259,370.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga**
				62						
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup**				356.447.000,00			**55 PD**	**#VALUE!**	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu (Kegiatan)		3 kegiatan	200.000.000,00	(balik bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 kegiatan		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota		75	100.000.000,00	(Balik bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		1 dokumen	163,346,000	
				60	100.000.000,00	(balik bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)				
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	20 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	50,541,700	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		30.00	50.541.700,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota(Dokuman)		1 dokumen	148,497,000	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan	1	109.700.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
						(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)				
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				307.069.300,00				337.776.230,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)		20 layanan	22	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Khusus-Dana	20 layanan	373,890,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				79.310.400,00				87.241.440,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK(Orang)				(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**7,873,209,309.00**				**7,727,842,180.00**	
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**0.00**				**0.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**% OPD yang menggunakan GDPK**		**27**	**1,557,500,000.00**				**1,632,500,000.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga**
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah dokumen GDPK disusun (Dokumen)		1	1.105.000.000,00	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		1	1.170.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	80 dok	20 dok	205,000,000	(Balik Bukit, Balik Bukit)			275.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
	Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	dokumen hasil pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal		2 dok	70,000,000	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana	2 dok	80,000,000	
						(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana			

2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		7	220.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
						(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana			
						(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana			
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		2 dok	70,000,000	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dok	80,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
						(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana			
						(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana			
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal (Kegiatan)				(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal (Kegiatan)				(Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				(Seluruh Kecamatan Kabupaten Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	DANA UMUM	1		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan)				(Lanpung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Dokumen)				(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)		1	462.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	25 dokumen	5 dokumen	12000000	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Dana Transfer Khusus-Dana	5 dokumen	13,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
						(Way Mengaku, Balik Bukit)				
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	4 laporan	1 laporan	148,500,000	(15 Faskes, KAB. LAMPUNG BARAT)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1 laporan	163,350,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
						(15 Faskes, KAB. LAMPUNG BARAT)				
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	48 dokumen	12 dokumen	132000000	(15 kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Khusus-Dana	12	132000000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.14.02.2.02.0015		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,				(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
						(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana	59		
						(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)				
2.14.02.2.02.0020		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)		50		(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50	85.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
				50						
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP (%)**		**29**	**3,746,785,000.00**				**3,278,975,000.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan**
		% PUS yang tidak terlayani/Unmeet need		**6,3%**						
		% Pekon yang menjadi kampung KB (%)		**72.79**						
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya**	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kecamatan (Kali)				(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		4	1.120.875.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga ,kependudukan , dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra		8 organisasi	66,000,000			8 organisasi	72600000	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	4 lap	1	49,500,000	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Khusus-Dana	1	54450000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	60 laporan	1 laporan	660000000	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	15	726000000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	16 dokumen	4	264.000.000,00	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4	290400000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	16 dokumen	4	88.000.000,00	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6	96800000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai	16 dokumen	4	55000000	(Semua Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)			60500000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
								4		
2.14.03.2.01.0014		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	8 organisasi					8	4.375.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Persentaser peserta KB Baru (%)		80		(Kecamatan se-kab Lampung Barat, KAB.		80	66.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	544 orang	136	66000000	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	136 orang	72600000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
	Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB /PLKB			55000000			15 org	60500000	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta**	Pelaksanaan pelayanan KB di Faskes dan jejaringnya (Bulan)		12	684.200.000,00	(Kecamatan se Kab Lampung Barat, KAB.		12	684.200.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk		1.00	13.200.000,00	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	1 lapora	14520000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
		Jumlah akseptor Peningkatan Komptensi Pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB								
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	4000 orang	1000	275.000.000,00	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	1000	302500000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	4 dokumen	1	220.000.000,00	(15 kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	242000000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	4 laporan	1	110.000.000,00	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1	121000000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
				15	110.000.000,00	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)				
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		50	66.000.000,00	(Kelurahan Way Mengaku, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50	72600000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan**	Jumlah kampung KB berkembang dan Mandiri (Desa)		5	1.319.000.000,00	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)		5	1.407.900.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)		7.00	210.000.000,00	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 organisasi	230000000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
				15						
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB(Dokumen)		1	9.000.000,00	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1	9.900.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
				30						

2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB(Laporan)		1 laporan	230000000	(Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.00	240000000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
						(136 Desa/Kelurahan, KAB. LAMPUNG BARAT)				
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		59	880.000.000,00	(15 Kecamatan Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	59	1064800000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
				30	880.000.000,00	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)				
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indeks pembangunan Keluarga (%)**		**54**	**2,568,924,309.00**				**2,816,367,180.00**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase kelompok kegiatan yang dibina (%)		52	2.568.924.309,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)		52	2.816.367.180,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 laporan	1	170798010	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	113135000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 laporan	1	102850000	(15 Kecamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	102.850.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	60 kelompok	15	94380000	(15 Kecaamatan, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	15	103818000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		72	108900000	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72	119790000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)		1.00	121000000	(15 Kecamatan Lampung Barat, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.00	133100000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
				40						
2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		1	144637500	(Pembinaan Pencegahan Kasus Stunting di Pekon Locus Stunting, KAB.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	159101085	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
						(15 Pekon Lucus Stunting, KAB. LAMPUNG BARAT)				
2.14.04.2.01.0024		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan						645	1.724.250.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
2.14.04.2.01.0026		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)		15	99.000.000,00	(15 Kelompok PIK R, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15	99.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)		6	242000000	(Balik Bukit, KAB. LAMPUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6	266200000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Lampung Barat

Dinas PPKBPPPA

NO	KODE	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD		Realisasi capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d tahun lalu (tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**											
	2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PPKB PPPA (%)**	80%		80%				80%		80%	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	108 Dok	158,000,000		30,673,000		35,909,000		35,909,000		
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40 dokum	21,000,000	*10.00*	5,000,000	*10.00*	5,000,000	*10.00*	5,000,000	100	
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4 dok	29,000,000	*1*	6,262,000	*1*	6,262,000	*1*	6,262,000	100	
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4 dok	17,000,000	*1.00*	2,845,000	*1.00*	4,000,000	*1.00*	4,000,000	100	
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4 dok	19,000,000	*1*	4,023,000	*1*	4,500,000	*1*	4,500,000	100	
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4 dok	19,000,000	*1*	3,943,000	*1*	7,147,000	*1*	7,147,000	100	
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4 dok	17,000,000	*1.00*	3,600,000	*1.00*	4,000,000	*1.00*	4,000,000	100	
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	48 dok	36,000,000	*12.00*	5,000,000	*12.00*	5,000,000	*12.00*	5,000,000	100	
	2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan PD yang dilaksanakan (%)	**100%**	10,583,604,000		2,812,367,598				2,812,367,598		

	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	112 orang	10,527,204,000	*28.00*	2,794,116,598	*28.00*	2,686,834,100	*28.00*	2,686,834,100	100	
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8 laporan	15,500,000	*2*	7,488,000	*2*	3,625,000	*2*	3,625,000	100	
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	72 laporan	22,500,000	*18*	5,000,000	*18*	5,000,000	*18*	5,000,000	100	
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4 laporan	18,400,000	*1.00*	5,763,000	*1.00*	2,534,600	*1.00*	2,534,600	100	
	2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan (%)	100%	**120,000,000**		**5,875,000**		**10,000,000**		**10,000,000**		
	2.08.01.2.05.0009	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	104 dok	80,000,000	*0*	5,875,000		-	*0*		#DIV/0!	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	*2*	10,000,000		10,000,000		
	2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian PPKBPPPA yang dilaksanakan (%)		**959,500,000**		**126,427,950**		**132,281,550**		**132,281,550**		
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	56 paket	27,000,000	*2*	6,186,500	*2*	4,748,250	*2*	4,748,250	100	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	96 paket	38,000,000	*0*	6,310,850	*0*	12,371,500	*0*	12,371,500	#DIV/0!	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	40 paket	84,000,000	*2*	17,853,000	*2*	17,852,800	*2*	17,852,800	100	
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24 SKHU	32,500,000	*6*	8,060,000	*6*	7,560,000	*6*	7,560,000	100	
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48 laporan	33,000,000	*12*	4,062,600	*12*	4,064,000	*12*	4,064,000	100	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48 bulan	745,000,000	*42*	83,955,000	*42*	85,685,000	*42*	85,685,000	100	
	2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan(%)		**805,000,000**		**-**		**30,120,000**		**30,120,000**		
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	59 unit	130,000,000	*0.00*	0.00	0.00	0.00	*0.00*	0.00		
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12 unit	200,000,000	*0.00*	0.00	0.00	15000000.00	*0.00*	15000000.00		
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 unit	400,000,000	*0.00*	0.00			*0.00*			
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5 unit	75,000,000	*0.00*	0.00		15120000.00	*0.00*	15120000.00		
	2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		**3,303,670,000**		**114,153,000**		**59,687,000**		**59,687,000**		
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48 laporan	23,370,000	*1*	3,900,000		2,200,000	*1*	2,200,000	100	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48 laporan	153,000,000	*12.00*	24,860,000		25,910,000	*12.00*	25,910,000	100	
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4 laporan	112,000,000	*1*	25,000,000			*1*		100	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 laporan	3,015,300,000		60,393,000		31,577,000		31,577,000		
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		**1,507,650,000**		**337,564,740**		**233,630,000**		**233,630,000**		
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	120 unit	1,282,000,000	*30*	313,300,000		214,400,000	*30*	214,400,000	100	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60 unit	45,650,000	*4.00*	7,400,000		8,430,000	*4.00*	8,430,000	100	
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 unit	180,000,000	*0.00*	16,864,740		10,800,000	*0.00*	10,800,000		
	2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya anggaran responsif gender pada APBD (%)**										
	2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi kebijakan PUG dan PPRG (Perangkat Daerah)										
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	172 dokun	320,000,000	*1.00*	-			*1.00*		100	
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	43 OPD	1,083,031,000	*43.00*	-			*43.00*		100	
	2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)										
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)			*55.00*	296,193,000		176,193,000	*55.00*	176,193,000	100	
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)			*1*	81,727,500		0.00	*1*	0.00	100	
	2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**prevalensi perempuan usia 15 s/d 64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan teakhir (%)**										
	2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah peserta yang diedukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan (Orang)		778,080,000		43,795,500	-	43,795,500		43,795,500		-
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4 dok	371,280,000	*1.00*	0.00		0.00	*1.00*	0	100	
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	55 OPD	406,800,000	*43*	43,795,500		43,795,500	*43*	43,795,500	100	
	2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia lembaga Penyedia Layananan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten /kota yang mendapaat peningkatan kapasitas (Orang)										

	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4 laporan	356,456,646	*0*	0.00		0.00	*0*	0.00		
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	280 orang	500,510,000	*0.00*	296,193,000		0.00	*0.00*			
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4 dok	417,690,000	*0*	0.00		0.00	*0*			
	2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**% keluarga berkualitas (%)**										
	2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (OPD)										
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	55 Perangkat Daerah	394,485,000	*0*	0.00		0.00	*0*			
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	4 dokumen	849,945,500	*0*	0.00		0.00	*1.00*		#DIV/0!	
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8 laporan	417,690,000	*0*	0.00		43,048,000	*0*	43,048,000		
	2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pekon terbaik pelaksana P3KSS dan GSI (Desa)										
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60 lembaga	417,690,000	*0.00*	0.00		151,588,500	*0.00*	151,588,500		
	2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**% data gender dan anak yang terupdate (%)**										
	2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Profil Data terpilah Gender yang tersusun (Buku)				0.00		0.00		0.00		
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)			*0*	0.00		0.00	*0*	0.00		
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	200 buku	270,000,000	*50*	0.00		0.00	*50*	0.00	100	
	2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Terpenuhinya Hak-hak anak (Kategori)**										

	2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah , mediadan dunia usaha (Organisasi)										
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)	25 organisasi	464,100,000	*5*	65,048,000	5	65,047,700	*5*	65,047,700	100	
	2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	jumlah lembaga penyedia yang mengikuti bimktek (Lembaga)	3 lembaga	2,151,765,000								
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	240 orang	464,100,000		0.00		0.00	*0*	0.00		
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8 dokumen	301,665,000		0.00		0.00	*0*	0.00		
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	15 dokumen	1,386,000,000		0.00		0.00	*0*	0.00		
	2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (%)**										
	2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu (Kegiatan)			*0.00*				*0.00*			
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)	20 Perangkat Daerah	193,845,570	*30.00*	93,072,400		34,999,800	*30.00*	34,999,800	100	
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota (Dokuman)			*1*	0.00		101,500,000	*1*	101,500,000	100	
		Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten kota					109,700,000		0.00		0.00		
	2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)				0.00		69,020,000		69,020,000		
	2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											
		Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab				*180.00*	74,596,000		-	0.00	0.00	0	

	UPT PPA												
		Program perlindungan Perempuan											
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab											
	2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab kota (Layanan)	6 layanan	334,618,421	*16*	67,761,900		76,359,000	*16*	76,359,000	100	
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)										
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)			*20*	186,741,700		211,996,100		211,996,100		
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**											
	2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											
	2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**% OPD yang menggunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan (%)**										
	2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Jumlah dokumen GDPK disusun (Dokumen)										
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	80 dok	1,075,000,000	*0*	0.00		0.00	*0*	0.00		
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)			*100000000*	100,000,000		113,000,000	*100000000*	113,000,000	100	
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal (Kegiatan)			*2*	56,800,000		56,800,000	*56800000*	56,800,000	2.84E+09	
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal (Kegiatan)	8 dokumer	260,000,000	*2*	60,362,500		32,224,700	*2*	32,224,700	100	
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)			*1*	0.00		0.00	*1*	0.00	100	
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		200 dok	330,000,000	*50*	27,500,000		27,500,000	*50*	27,500,000	100	

		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan					26,926,400		16,362,800		16,362,800		
	2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Dokumen)										
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	25 dokumen	47,200,000	*5*			0.00	*5*	0.00	100	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	4 laporan	595,350,000	*1*			104,400,000	*1*	104,400,000	100	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	48 dokumen	528,000,000	*12*	154,200,000		111,600,000	*12*	111,600,000	100	
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)			*59*			0.00	*59*	0.00	100	
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	200 dok	330,000,000	*50*			0.00		0.00		
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program bangga kencana							60,000,000		60,000,000		
	2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP (%)**										
			% PUS yang tidak terlayani/Unmeet need (%)										
			% Pekon yang menjadi kampung KB (%)										
	2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kecamatan (Kali)										
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	4 lap	260,000,000	*1*	160,000,000		80,000,000	*1*	80,000,000	100	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	60 laporan	2,646,000,000	*15*	722,249,900		504,400,000	*15*	504,400,000	100	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	16 laporan	1,058,400,000	*4*	195,000,000		225,000,000	*4*	225,000,000	100	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	16 dokumen	352,800,000	*4*	150,000,000		150,000,000	*4*	150,000,000	100	
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	16 dokumen	220,500,000	*0.00*	0.00		0.00	*0.00*	0.00		

	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	8 organisasi	264,600,000	*0.00*	0.00		200,000,000	*0.00*	200,000,000		
	2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Persentaser peserta KB Baru (%)										
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	544 orang	264,600,000	*136*	505,600,000		408,000,000	*136*	408,000,000	100	
	2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan pelayanan KB di Faskes dan jejaringnya (Bulan)										
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	**4 laporan**	52,920,000	*1.00*	26,926,400		17,100,000	*1.00*	17,100,000	100	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	4000 orang	1,102,500,000	*1000*	586,264,100.00		593,214,000.00	*1000*	593,214,000.00	100	
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	4 dokumen	882,000,000	*1*	16,200,000		0.00	*1*	0.00	100	
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	4 laporan	441,000,000	*1*	32,100,000		17,550,000	*1*	17,550,000	100	
	2.14.03.2.03.0010	Promosi dan konseling lesehatan reproduksi , serta hak hak reproduksi difaskes dan kelompok kegiatan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	180 orang	330,750,000	*50*	0.00		0.00	*50*	0.00	100	
	2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Jumlah kampung KB berkembang dan Mandiri (Desa)										
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	28 organisasi	910,000,000	*7.00*	0.00		0.00	*7.00*	0.00	100	
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)			*1*	0.00		152,750,000	*1*	152,750,000	100	
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)	4 laporan	890,000,000	*1.00*	0.00			*1.00*		100	
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	59 pekon	3,712,800,000	*59*	691,000,000		575,000,000	*59*	575,000,000	100	
	2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indeks pembangunan Keluarga (%)**										
	2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase kelompok kegiatan yang dibina (%)										
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi	4 laporan	655,102,119	*0*	0.00			*0*			

	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi	4 laporan	394,485,000	1	0.00			1		100	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	60 kelompok	361,998,000	0.00	360,000,000		300,000,000	0.00	300,000,000		
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan			72	0.00			72		100	
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan			1.00	0.00			1.00			
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Terserasinya iPengga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung			1	0.00			1		100	
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader)			645	0.00			645		100	
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	645 orang		15	1,354,500,000			15	1,354,500,000	100	
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan	15		0				0			
	2 14 04 2.02 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							645,000,000		645,000,000		
	2 14 04 2.02 00	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							709,500,000		709,500,000		

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
K	Rp	K	Rp		
10=6+8		10=8			
80%		80%			
	66,582,000		30,673,000		
20	10,000,000	20	5,000,000		
2	12,524,000	2	6,262,000		
2	6,845,000	2	2,845,000		
2	8,523,000	2	4,023,000		
2	11,090,000	2	3,943,000		
2	7,600,000	2	3,600,000		
24	10,000,000	24	5,000,000		
#VALUE!	5,624,735,196		2,812,367,598		

56	5,480,950,698	56	2,794,116,598		
4	11,113,000	4	7,488,000		
36	10,000,000	36	5,000,000		
2	8,297,600	2	5,763,000		
#VALUE!	15,875,000		5,875,000		
0	5,875,000	#DIV/0!	5,875,000		
2	10,000,000				
#VALUE!	**258,709,500**		**111,157,950**		
4	10,934,750	4	6,186,500		
0	18,682,350	#DIV/0!	6,310,850		
4	35,705,800	4	17,853,000		
12	15,620,000	12	8,060,000		
24	8,126,600	24	4,062,600		
84	169,640,000	84	68,685,000		
#VALUE!	30,120,000				
0	-		0.00		
0	15,000,000		0.00		
0	-		0.00		
0	15,120,000		0.00		
#VALUE!	173,840,000		114,153,000		
1	6,100,000	1	3,900,000		
12	50,770,000	12	24,860,000		
1	25,000,000	1	25,000,000		

0	91,970,000		60,393,000		
0	-				
#VALUE!	571,194,740		337,564,740		
30	527,700,000	30	313,300,000		
4	15,830,000	4	7,400,000		
0	27,664,740		16,864,740		
#VALUE!	-				
#VALUE!	-				
1	-	1			
43	-	43			
#VALUE!	-				
55	472,386,000	55			
1	81,727,500	1			
#VALUE!	0.00				
#VALUE!	0.00				
1	0.00	1			
43	87,591,000	43			
#VALUE!	0.00				

0	0.00				
0	0.00				
0	0.00				
0	0.00				
#VALUE!	0.00				
#VALUE!	0.00				
0	0.00				
0	0.00	#DIV/0!			
0	43,048,000				
#VALUE!	-				
0	151,588,500				
#VALUE!	-				
#VALUE!	-				
0	-				
50	-	50			
#VALUE!	-				

#VALUE!	-				
10	130,095,700	10			
#VALUE!	-				
0	-				
0	-				
0	-				
#VALUE!	-				
#VALUE!	-				
0	-				
30	128,072,200	30			
1	101,500,000	1			
0	109,700,000				
#VALUE!	-				
#VALUE!	-				
0	69,020,000				
0	-				
180	74,596,000	#DIV/0!			

0	-				
0	-				
0	-				
0	-				
16	144,120,900	16			
	-				
20	398,737,800				
0	-				
#VALUE!	-				
#VALUE!	-				
#VALUE!	-				
#VALUE!	-				
0	-				
100000000	213,000,000	1E+08			
2	113,600,000	7.04E-08			
2	92,587,200	2			
1	-	1			
50	55,000,000	50			

0	43,289,200			
#VALUE!	-			
5	-	5		
1	104,400,000	1		
12	265,800,000	12		
59	-	59		
50	-			
#VALUE!	-			
#VALUE!	-			
#VALUE!	-			
#VALUE!	-			
1	240,000,000	1		
15	1,226,649,900	15		
4	420,000,000	4		
4	300,000,000	4		
0	-			

0	200,000,000			
#VALUE!	-			
136	913,600,000	136		
#VALUE!	-			
1	44,026,400	1		
1000	1,179,478,100	1000		
1	16,200,000	1		
1	49,650,000	1		
50	-	50		
#VALUE!	-			
7	-	7		
1	152,750,000	1		
1	-	1		
59	1,266,000,000	59		
#VALUE!	-			
#VALUE!	-			
#VALUE!	-			
0	-			

1	-	1		
0	660,000,000			
72	-	72		
1	-			
1	-	1		
645		645		
15	2,709,000,000			
		15		
0	-			

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RENJA

RENCANA KERJA

Tahun 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MERDEKA
BELAJAR

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan atau panduan untuk memudahkan mencapai tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Keterkaitan antara perencanaan di OPD dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat akan mempermudah pengembangan pembiayaan bersama untuk program-program yang akan dilakukan.

Sebagai sebuah dokumen yang utuh, Renja-PD tidak berdiri sendiri atau terpisah dari rencana pembangunan keseluruhan tingkat Kabupaten. Renja-PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Kabupaten yang terkait dengan sektor –sektor lain. Dokumen ini menyajikan latar belakang tentang pentingnya dilakukan penyusunan Renja-PD, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksankan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Atas jasa, bantuan, kerjasama, kritik, dan saran yang baik dari semua pihak dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terima kasih.

Lampung Barat, 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Barat

NOWO WIBAWONO, S.Pd.
NIP. 19691010 199412 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... P - 1

DAFTAR ISI ..... I - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 20

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Ca an Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dae 9

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 11

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 47

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 49

3.3. Program dan Kegiatan 51

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB V PENUTUP 88

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau dis ut juga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah merupakan okumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dalam satu tahun. Sebagai okumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan I bupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang memiliki arti penting dalam n ndukung penyelenggaraan pembangunan daerah mengingat

Renja Dinas Pendidikan dan kebudayaan adalah merupakan penjabaran da visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah ercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selain itu Ren ana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2025 ini merupakan acuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun p encanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran KA) tahun 2025 dan selanjutnya Renja OPD ini adalah merupakan salah satu intr nen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebuc yaan guna mengetahui sudah sejauh mana ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan dan ebudayaan sebagai wujud kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat D erah dalam mendukung rencana program pemerintah daerah, maka sejak awal tahapar penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alu penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 008 Tetang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksar an Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabu aten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan P nerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran N gara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik I ionesia Nomor 3689);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (I mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengel aan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indone a Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 00);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangar usat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba an Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diul h, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan edua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemb an Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
9. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman P binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Ne ara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rep lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pe endalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Ne ara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 4563);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyel garaan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggun awaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informas aporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tetang Tahapan, T a Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem angunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang ta Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Ca Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangk Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta ata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Recana Pe angunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Be a Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 20 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupate Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2(3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung arat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 201 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2 22 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Rancangan Renja Perangkat Daerah

   Rancangan Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamp ıg Barat memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dila ıanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan m ndorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanaka meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru ndikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKP , serta menunjukan prakiraan maju. Rancangan Renja Dinas Pendidikan Dan Ke udayaan Kabupaten Lampung Barat telah dibahas dalam forum OPD yang disele garakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

2. Tujuan Rancangan Renja Perangkat Daerah

   Tujuan Rancangan Renja Perangkat Daerah ini adalah menyajikan data nformasi hasil kegiatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan sekaligus eval asi yang mengungkapkan keberhasilan yang dicapai, analisis kinerja Perangka Daerah, serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menentukan kebijakan pe idikan di masa yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu da Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dae ah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan dan Subkegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 da Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dan Pencapaian F encanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan ebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	REALISASI 2024	PAIAN %
1	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Angka Pertisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	100	55,94	5,94
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah dasar)	100	97,99	7,99
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	60	12,36	20,6
		Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	Persentase WBTB Terverifikasi	27,70	11,68	2,17
			Persentase Cagar Budaya Daerah terverifikasi	43,58	23,80	4,62

Untuk mencapai Indikator Kinerja utama pada Perangkat Daerah Dinas Pe idikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 dilaksanakan berb ai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak Program, 1 Program untuk UPT Lamban Pancasila. dengan kegiatan termasuk k iatan rutin sebanyak 19 kegiatan dan 4 kegiatan Lamban Pancasila. Dengan Aloka dana tahun 2024 untuk belanja Operasi Sebesar Rp. 279.620.654.400,- dan Belanja M dal sebesar Rp. 20.709.092.400,- mendukung terlaksananya tujuan dan sasaran renca kerja 2024 dapat dilihat pada perincian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai ber ut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K a. Indikator Kinerja pada tahun 2024 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pe didikan dan

Kebudayaan dengan target Program 80,29% total pagu Rp. 232.91 040.000,- terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Da rah target 11 Dokumen, Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun de gan target 4 Dokumen, Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah denga target 12 Laporan total pagu kegiatan Rp. 24.401.400,- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indicator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN target 1898/12 Orang/Bulan total pagu Rp. 232.25 803.500,- Kegiatan Administarasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indica or Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, target Dokumen total pagu Rp. 17.230.000,- Kegiatan Administrasi umum perangkat dae h dengan indicator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu an Kantor yang Disediakan, target 10 Paket, Jumlah Paket Barang Ce kan dan Penggandaan yang Disediakan, target 11 Paket, Jumlah Paket Pe atan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan target 36 paket, Jumlah Doku en Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, target 3 Dokumen, Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, target 5 Laporan, Juml Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target 10 aket, total pagu Rp. 195.624.100,- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan emerintah Daerah dengan indicator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Men rat, target 12 lapora, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Da a Air dan Listrik yang Disediakan, target 12 laporan, Jumlah Laporan Penye aan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, target 12 Laporan, tal pagu 388.580.000,- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah denga indicator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipe ara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, target 43 Unit total pagu Rp. 181.2 900,-

B. **Program Pengelolaan Pendidikan**. Indikator Kinerja pada tahun 2 23 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan tar t 19,56%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat, target 102,19, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat, target 102,52, total pagu Rp. 65.83 534.700,-. Terdiri dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kegiatan P ngelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kegiatan Pengelolaan endidikan Nonformal/Kesetaraan.

C. **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM.** Indikator kinerja progra Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan, dengan total gu Rp. 26.359.000,-

D. **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA.** Indikat kinerja program Jumlah bahasa dan sastra yang terlestarikan, dengan total gu Rp. 60.209.000,-.

E. **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN.** Indikator kinerja progr n Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai W B target 11 WBTB total pagu Rp. 592.347 .000,-.

F. **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL.** Indika kinerja program Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan dengan target 8 Orang. Total pagu Rp. 323.850.000,-

G. **PROGRAM PENGEMBANGAN PELESTARIAN DAN PENGELOLA CAGAR BUDAYA,** Indikator kinerja program Jumlah Cagar Budaya peringkat abupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan dengan target 12 ca budaya, total pagu Rp. 200.772.500,-

Hasil capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan K udayaan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 dari seluruh Pr gram dan Kegiatan telah memenuhi target namun masih ada beberapa ke tan yang belum terealisasi secara maksimal. Dari total Pagu belanja Dae h sebesar Rp. 298.027.052.078,- terealisasi Rp. 290.457.568.233,-. Sehingg total rata-rata capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh sub kegiatan p a seluruh program yaitu :

- Capaian Kinerja = 92,62%
- Capaian Anggaran = 97.46%

Sedangkan rata-rata pencapaian indicator keluaran pada tahun 2024 elum dapat diukur dikarekan data untuk pengukuran didapat pada akhir tahun berjala

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, maka dapat dilakukan an sis atas nilai capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Dengan a alisis ini akan diketahui kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki untuk pe ngkatan kinerja pada masa yang akan datang. Dari analisis capaian kinerja kegiatan se rti yang tampak pada lampiran, nilai capaian Dinas Pendidikan pada tahun 2023 dapat katakan ***Kurang*** karena rata-rata mencapai nilai sebesar 54,26% s.d. 100%. Hal ini me njukkan bahwa komitmen dalam pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.

Berdasarkan Target Indikator Kinerja Renstra Dilihat dari capaian target indi tor APS PAUD hanya tercapai 59,15%, jika dilihat dari target indicator APS PAUD tida tercapai hal ini dikarenakan ada sekitar 55,94% penduduk usia 5-6 tahun tidak engikuti Pendidikan anak usia dini. Kondisi ini dapat disebabkan karena masi adanya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini. S dangkan untuk indicator APS Pendidikan Kesetaraan hanya tercapai 12,36% dala hal ini Kabupaten Lampung Barat memiliki 12 PKBM untuk menampung masya kat usia sekolah yang putus sekolah atau tidak bersekolah di Pendidikan Formal. S dangkan Indikator urusan Kebudayaan yaitu Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan n Cagar Budaya Daerah dengan indicator Persentase WBTB Terverifikasi tercapai 42 7% dan Indikator Persentase Cagar Budaya Daerah terverifikasi tercapai 54,62%.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daera

2.3.1. Faktor-faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja organisasi (misi) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Ba t sangat dipengaruhi oleh terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik antar in nsi dan masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, sehingga kesukse n dalam melaksanakan program-program pembangunan di bidang pendidikan erupakan kesuksesan bersama seluruh masyarakat khususnya *stake holder* pendidikan.

2.3.2. Hambatan / Kendala Pencapaian Kinerja

Belum meratanya kualitas mutu pendidikan menjadi suatu masalah y g dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat secara kesel uhan, hal ini terjadi dikarenakan belum meratanya penyebaran tenaga Pendidik, s ana dan prasarana yang dapat menunjang mutu pendidikan seperti ketersediaanya buk pelajaran dan buku penunjang lainnya, laboratorium dan media pembelajaran lainnya.

2.3.3. Strategi Pemecahan Masalah

Dari hasil analisis capaian kinerja organisasi, telah di identifikasikan bebera a faktor yang menjadi hambatan/kendala dalam pelaksanaan program dan kegiat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hambata endala tersebut akan diambil langkah Pengalokasian anggaran untuk peningka mutu pendidikan dijadikan prioritas utama untuk tahun yang akan datang, m lakukan pendataan terutama untuk mengetahui sekolah yang memang membutuhka sarana penunjang peningkatan mutu, meningkatkan bantuan bagi pendidik yan ada di Kabupaten Lampung Barat terutama daerah sulit dan pemerataan guru.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 202 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Pendidikan dan Kebuda an
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINER DAN KERANGKA PEND AAN		
				TARGET 2025	PAGU	IKATIF
1	2	3	4	8		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			329.4	826.700,00
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			329.4	826.700,00
1.	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			231.8	134.800,,00
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (%)	***80,30***		
2.	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			97.4	528.900,00
			- Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	***19,77***		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat (%)	***101,17***		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat (%)	***112,50***		
3.	1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**				885.000,00
			Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan (Jenis)	***2***		

4.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	*Jumlah sastra Llisan yang terlestarikan (Jenis)*	2	9	8.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.58	41.500,00
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.58	41.500,00
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0,00
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	*Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai WBTB (Objek)*	12	1.1	18.000,00
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	*Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan (Orang)*	18	1.6	06.000,00
5.	2.22.04	*PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH*	*Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah*	50		7.753.500
6.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	*Jumlah Objek di duga Cagar Budaya kabupaten yang terverifikasi, terlindungi dan dikembangkan*	23	7	64.000,00
		JUMLAH			335.1	673.190,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat m ampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan ebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang dan Pokokm Pikiran Dewan sebagai salu an formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan. Usulan M srenbang dan Pokir Dewan akan diakomodasi dalam Rencana Kerja OPD dalam hal i usulan masyarakat dari musrenbang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Usulan Musrenbang Kecamatan

NO	ID USULAN	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KO	KECAMATAN
1	903062	ARI DARMANTO.SH.	Kelurahan / Desa	Pembangunan WC/Jamban Sekolah (SD)	Disekolah masih terbatas pembangunan WC atau jamban yang layak pakai	Desa Lombok, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Lumbok Seminung
2	913307	KARTO SUWIRYO,S.Pd.	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Lapangan Sering Becek	Pemangku 1 Giham Sukamaju, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sekincau
3	913340	KARTO SUWIRYO,S.Pd.	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Sering terjadi becek	Pemangku 6 Giham Sukamaju, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sekincau
8	917461	KARTO SUWIRYO,S.Pd.	Kelurahan / Desa	Pembangunan WC/Jamban Sekolah (SD)	Kurangnya Fasilitas WC di sekolah	Pemangku 3 Pasar Baru, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sekincau
12	918364	Buchori SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Halaman Sekolah Becek atau bergenang Air Saat hujan	SDN 1 dan 2 Tri Mulyo, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Gedung Surian
14	921145	DEDE SUHERLI	Kelurahan / Desa	Pengadaan Komputer dan Jaringan (SD)	kekurangan laptop/komputer memerlukan pengadaan alat berbasis komputer/laptop, 10 unit	SDN 1 Mekar Jaya, Kab. Lampung Barat , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Gedung Surian
21	927812	ABD.RACHMAN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum adanya Pagar Sekolah, sepanjang 320 meter	Pemangku 1 Atar Kuwau, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Batu Ketulis
23	939397	ABD.RACHMAN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pembangunan Pagar / tembok sekolah untuk penahan tanah sepanjang 320 Meter	Pmk 1 atarku wau, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Batu Ketulis
24	941917	NASUTION	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pagar Keliling sekolah SD.N CAMPANG	Campang Tiga PMK 4, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Batu Ketulis

					TIGA,karna belum adanya pagar 1 Unit			
28	954628	NOFIANTO	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum Ada Pagar di SDN 2 Jagaraga	Pemangku Serumpun , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sukau
32	958234	ENDRA GUNAWAN	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Masih Kurangnya Alat - Alat Kesenian Adat Lampung Seperti Baju Adat, Perlengkapan Tari Sembah dll, untuk sanggar Seni di Pekon Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	Pekon Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Balik Bukit
35	958676	ENDRA GUNAWAN	Kelurahan / Desa	Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar (SD)	Perlunya bantuan meubelair untuk SDN 01 Pekon Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dikarenakan Meubelair yang lama sudah banyak yang sudah tidak layak pakai lagi	Pemangku Penataran Pekon Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Balik Bukit
38	958924	ENDRA GUNAWAN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SMP)	Perlunya Lahan Parkir yang layak untuk SMPN 04 Liwa yang berlokasi di Pekon Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	Pekon Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Balik Bukit
46	969881	ENDRA GUNAWAN	Kelurahan / Desa	Pembangunan WC/Jamban Sekolah (SD)	Perlunya Pembangunan WC/Jamban Sekolah dan Sumur Bor untuk SDN 01 Pekon Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.	Pekon Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Balik Bukit
49	978998	CALIM	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Belum memiliki alat Amanatak arak-arakan/pengiring pengantin beserta seragam	pekon Gedung Surian, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Gedung Surian

50	980232	Subandi, SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Keadaan halaman sekolah SDN Tiga Jaya masih berupa tanah lapang, sehingga ketika musim hujan keadaannya becek dan ketika musim kemarau keadaanya berdebu sehingga mengganggu aktivitas belajar	GUMBIB 1, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	Sekincau
51	987588	Subandi, SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan WC/Jamban Sekolah (SD)	Belum tersedianya jamban di SDN Tiga Jaya	Pemangku 1, Gumbib 1, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	Sekincau
53	987644	Subandi, SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Perumahan Dinas Guru (SMP)	Belum adanya rumah dinas di SMPN 3 Sekincau	Pemangku 1, Gumbib 1, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	Sekincau
56	993941	Dedi Gunawan, SH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	roboh atau rusak berat sejak 2019	Pemangku Suka Mulya, Pekon Cipta Mulya/SMPN 1 Kebun Tebu, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	Kebun Tebu
57	994080	Dedi Gunawan, SH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	lahan becek, tidak ada fasilitas olahraga	Pekon Cipta Mulya, Kebun Tebu/SDN 1 Cipta Mulya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	Kebun Tebu
59	994715	JUARSAH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum Ada Pagar	SDN 2 Sekincau Kecamatan Sekincau, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	Sekincau
60	994749	JUARSAH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	Rusak Berat	SMPN 1 Sekincau, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	Sekincau
61	994933	JUARSAH	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah (SD)	Rusak Berat	SDN 1 Sekincau, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	Sekincau
68	997763	JUARSAH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Halaman Masih Tanah	SDN 1 dan SDN 2 Sekincau, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	Sekincau
70	997860	CALIM	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pagar Belum Memadai, 70 m	Pekon Gedung Surian, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	Gedung Surian

73	997991	CALIM	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Halaman Tergeang Air Saat Hujan dan Menyebabkan Becek, Sering terpeleset, 50x50 Meter	Pekon Gedung Surian, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Gedung Surian
79	998324	CALIM	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	Pagar pada belakang sekolah belum terpagar hingga masih bisa di akses sembarang orang	Pekon Gedung Surian, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Gedung Surian
81	999087	Subarka	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Untuk Terpantaunya Keluar masuk Anak sekolah Melalui jalur pintu masuk sekolah	Campang Muara Jaya I, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Kebun Tebu
82	999155	Subarka	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	Untuk Terpantaunya Keluar masuk Anak sekolah Melalui jalur pintu masuk sekolah	Sinar Harapan Muara Jaya I, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Kebun Tebu
83	999551	Subarka	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	perlunya pembangunan vaving block supaya kegiata upacara dan kegiatan di luar gedung sekolah terasa lebih nyaman	Campang Muara jaya I, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Kebun Tebu
84	999608	Subarka	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SMP)	perlunya pembangunan vaving block supaya kegiata upacara dan kegiatan di luar gedung sekolah terasa lebih nyaman	Sinar Harapan Muara Jaya I, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Kebun Tebu
85	1000502	CALIM	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (TK)	Pagar Pada tk yang berada pada pekon gedung surian belum memadai	Pekon Gedung Surian, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	Gedung Surian
89	1018502	Subandi, SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SMP)	Keadaan halaman sekolah SMP N 03 Sekincau masih berupa tanah lapang, sehingga ketika musim hujan keadaannya becek dan ketika musim kemarau keadaanya berdebu sehingga mengganggu aktivitas belajar	Pemangku 1, Gumbib 1, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	Sekincau

93	1020341	Setiawati	Kelurahan / Desa	Pembangunan Ruang Kelas (SMP)	kurangnya ruang kelas , perlunya pembangunan ruang kelas baru 9 x 10 M	SMPN 1 Sumberjaya , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Sumber Jaya
94	1020454	Setiawati	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	pagar ambruk, perlunya pembangunan pagar P : 200 M , T: 2 M	SMPN 1 Sumberjaya , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Sumber Jaya
95	1020564	Setiawati	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah (SD)	rumah rusk parah, perlunya rehab berat 2 Unit	SDN 1 Sukapura. Kab Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
98	1020809	Setiawati	Kelurahan / Desa	Pembangunan Ruang Kelas (SD)	kurang nya ruang kelas , perlunya pembangunan ruang kelas baru 3 Unit	SDN 1 Sukapura , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
99	1021072	Setiawati	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	perlunya pemerataaan untuk halaman sekolah dan lahar parkir 1000 M2	SDN 2 Sukapura, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
103	1025290	SOFIAN HADI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	tidak punya pagar yang layak /TIDAK STANDAR	pemangku 7, SMPN 1 BATU BRAK PEKON KEGERINGAN, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Batu Brak
104	1026707	Samsu Kendar	Kelurahan / Desa	Pembangunan Ruang Kelas (SD)	Jumlah Siwa dan Jumlah Gedung tidak sesuai	Pemangku Ciptasari II, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampun	Kebun Tebu
108	1027506	SAMSI S.IP	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	KURANGNYA SARANA ATAU ALAT KESENIAN	KEMBAHANG, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampun	Batu Brak
109	1028036	MAT RIADI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pembangunan pagar Tembok penahan tanah,karena Terdapat longsor di belakang SDN luas sepanjang 30 Meter	Pekon Laus, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Batu Ketulis
112	1032865	HERPIN ADYA	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Ruang Kelas (SD)	kurang memadainya ruang kelas sehingga mengganggu kenyamanan dalam KBM	pmk 2 , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Batu Brak
113	1032957	HERPIN ADYA	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	pagar sd yang tidak memadai sehingga keamanan dan kenyamanan murid kurang	pmk 2, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Batu Brak

114	1033223	HERPIN ADYA	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	belum adanya alat kesenian	negeri ratu, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Batu Brak
115	1033279	HERPIN ADYA	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah (SD)	tidak memadainya rumah dinas	negeri ratu, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Batu Brak
119	1046392	IWAN SUSANTO	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum Mempunyai Pagar Sejak Berdirinya SD	Pekon Teba Liokh , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Batu Brak
122	1049854	Heri Subagio	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	belum ada pagar untuk sekolah dasar negeri waspada	sdn waspada, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Sekincau
126	1076081	SYAFRAWI.SH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Ruang Kelas (SD)	Gedung Sekolah Rusak 2 Lokal Perlu Renovasi Demi Peningkatan Belajar Mengajar Disekolah.	Pekon Keagungan, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Lumbok Seminung
127	1079244	Farid Wajdi, S.AB	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	Banyak nya siswa dan siswi bolos sekolah	SMP N 2 KEBUN TEBU, Pekon Tribudimakmur, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Kebun Tebu
129	1079301	Farid Wajdi, S.AB	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SMP)	masih numpang di halaman rumah warga kaena Belum Ada fasilitas parkir di dalam Sekolah	SMP N 2 KEBUN TEBU, Pekon Tribudimakmur, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Kebun Tebu
130	1079333	Farid Wajdi, S.AB	Kelurahan / Desa	Pengadaan Laptop untuk SMP	Tidak adanya fasilitas leptop untuk mendukung pembelajaran di Sekolah tersebut	SMP N 2 KEBUN TEBU, Pekon Tribudimakmur, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Kebun Tebu
131	1083358	ANTON CABARA	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum Terdapatnya Pagar Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukaraja	Pemangku 1 dan Pemangku 2, Desa Sukaraja, Kab Lampung Barat	Kab. Lampung B	Batu Brak
134	1083467	ANTON CABARA	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah (SD)	Rumah Dinas Guru/Kepala Sekolah yang tidak layak huni butuh renovasi	Pemangku 1 , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Batu Brak

135	1086036	SUKRUL SATIRMANUDIN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	halamaan mash tanah bila musim hujan tergenang air Perlunya pengerasan halam upacara 20 x 20 M	SDN 1 Simpangsari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Sumber Jaya
137	1086069	SUKRUL SATIRMANUDIN	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan (SD)	Persupstakaan rusak parah , perlunya rehab seluas 6 x 9 M	SDN 1 Simpangsari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Sumber Jaya
140	1086466	Wiwin Wardoyo	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum adanya Pagar Sepanjang 180 M	SDN I Sukajaya, Pekon Sukajaya , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Sumber Jaya
141	1087048	Sutan Sahril	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum adanya Pagar Sepanjang 300 M	SDN 4 Way Petai , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Sumber Jaya
142	1087060	Sutan Sahril	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Halaman upacara masih tanah , perlunya pengerasan paping blok 20 x 40 M	SDN 4 Way Petai , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Sumber Jaya
143	1087081	Sutan Sahril	Kelurahan / Desa	Pembangunan WC/Jamban Sekolah (SD)	Kurangnya Toilet untuk siswa , perlunyan pembangunan toilet 1 Unit	SDN 4 Way Petai, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Sumber Jaya
144	1087116	Sutan Sahril	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Perlunya pengersan lapangan upacara dengan pemasangan paping blok seluas 20 x 40 M	SDN 1 dan SDN 2 Way Petai , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Sumber Jaya
145	1090048	YUL KHAIDIR	Kelurahan / Desa	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (SMP)	Prasarana Air bersih yang ada di pekon Tawan Suka Mulya saat ini sangat memperihatinkan dan tidak layak lagi. sehingga terkadang masyarakat memapaatkan air danau untuk di konsumsi sehari-hari	PMK Suka Mulya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Lumbok Seminung
146	1093421	MUHAIMIN,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Lapangan Upacara SDN Sidodadi rusak berat	Pemangku Melati 2 Pekon Sidodadi Kecamatan Air Hitam, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Air Hitam

147	1094052	DEDE SUHERLI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	fasilitas belum memadai, perlu dilakukan peningkatan dengan paving blok dengan volume	SDN 2 Mekar Jaya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampun	arat Gedung Surian
150	1094720	ANDERI	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Belum Memiliki Seragam grup orkes gambus dan alat musik gendang, 1 set 1 grup	Pekon Pura Mekar, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampun	rat Gedung Surian
157	1095260	ANDERI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum semua area sekolah memiliki pagar, panjang 20 m dan tinggi 2 m lanjutan, sering dilewati masyarakat sehingga saat hujan lapangan menjadi rusak	SDN 2 Pura Mekar, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampun	rat Gedung Surian
158	1095285	ANDERI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Halaman becek saat hujan, 40 x 40 m	SDN 2 Puramekar, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampun	rat Gedung Surian
161	1095445	ANDERI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	Belum semua area sekolah tercover pagar, 100 m	SMPN 1 Gedung Surian, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampun	at Gedung Surian
163	1099593	Heri Setiyawan Abdullah A.md.	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	lapangan belum di paving dan perlu di paving seluas 50M X 50M	SD N Sumber agung pekon ringin sari, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampun	at Suoh
165	1105718	SARNADA	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pagar sudah rusak, perlu direhap karna membahayakan siswa sekolah sekitar 150 M	SDN Pekon Balak , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	at Batu Brak
166	1108056	SUDRIMAN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum adanya pagar sepanjang 250 M	SDN 1 Sindang Pagar , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	at Sumber Jaya
169	1108713	Sutan Sahril	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Ruang Kelas (SD)	Ruang Kelas Rusak parah 1 Unit	SDN 4 Way Petai, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	at Sumber Jaya

171	1108962	JOHAN SAFRI, S.T	Kelurahan / Desa	Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar (SD)	fasilitas sekolah sudah tidak layak lagi karena sudah melewati masa umur barang, dan pagar seoklah tidak lagi ada.	SDN 2 Tanjung raya pemangku Tanjung Baru, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sukau
173	1109305	JOHAN SAFRI, S.T	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	sekolah tidak mempunyai pagar sehingga menimbulkan rawan pencurian fasilitas sekolah dari luar	SDN 2 TANJUNG RAYA PEMANGKU TANJUNG BARU, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sukau
174	1109326	JOHAN SAFRI, S.T	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	sekolah tidak mempunyai pagar sehingga menimbulkan rawan pencurian fasilitas sekolah dari luar	SDN 1 TANJUNG RAYA PEMANGKU PELITA RAYA, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sukau
183	1109937	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Perlunyan pemasangan Papingb Blok 3000 pcs	SDN 3 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
184	1109974	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Ruang Kelas (SD)	Gedung rusak parah, perlunya rehab 3 lokal kelas	SDN 3 Tugusari, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
185	1110011	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Ruang Kelas (SD)	Kurangnya Ruang Kelas , perlunyan penambahan ruang kelas Lantai 2 sebanyak 3 Lokal	SDN 3 Tugusari, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
186	1110043	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar (SD)	Meubeler sudah rusak , perlunya penambahan meubeler 90 set	SDN 3 Tugusari, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
187	1110066	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	kurangnya area hijau ,perlunya pembangunan taman di area sekolah	SDN 3 Tugusari, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
188	1110086	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah (SD)	Rumah dinas guru rusak parah 1 Unit	SDN 3 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya

189	1110114	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah (SD)	Rumah dinas Rusak Parah, Peerlunya rehab rumah dinas guru 2 unit	SDN 4 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
190	1110150	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Perlunya pemasangan Paving Blok seluas 400 M	SDN 4 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
191	1110212	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan (SD)	Gedung Perpustakaan Rusak , Perlunya rehabilitasi	SDN 4 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
192	1110244	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belumaadanya pagar sepanjang 150 M	SDN 4 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
193	1110307	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Ruang Kelas (SD)	Perlunya Rehab Kelas 1 Unit	SDN 4 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sumber Jaya
197	1114528	M.SANIMBAR	Kelurahan / Desa	Pembangunan Ruang Kelas (SD)	'Ruang Kelas Hampir Ambruk	TAPAK SIRING , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sukau
200	1119905	Juyanto	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum selesainya pembangunan Pagar di SDN 1 dan SDN 2 Tribudisyukur	1. SDN 1 Tribudisyukur di pemangku Setiabudi 2. SDN 2 Tribudisyukur di Pemangku Budikarya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Kebun Tebu
203	1120653	Juyanto	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Belum adanya Alat Kesenian Tradisional padahal masyarakat Tribudisyukur sangat antusian untuk bisa melestarikan alat kesenian tradisional	Pekon Tribudisyukur, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Kebun Tebu
204	1121008	TRI WEDARTI,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pagar Keliling SDN Suka Damai	Pemangku Tunas Jaya Pekon Suka Damai Kecamatan Air Hitam , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Air Hitam

210	1123978	Gunadi Saputra	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Karna Pagar Lingkungan SD di Pekon Lombok Timur Belum Ada	Dusun Sidodadi, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung B	Lumbok Seminung
211	1124116	Gunadi Saputra	Kelurahan / Desa	Pembangunan Ruang Kelas (SD)	masih kurangnya Ruangan Belajar di SD Pekon Lombok Timur	Dusun Sidodadi, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Lumbok Seminung
213	1124276	Gunadi Saputra	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Lapangan Olahraga di Pekon Lombok Timur Memiliki Kontur Yang tidak Rata, Jadi di perlukan Perataan Lapangan Agar Kegiatan dapat berjalan dengan baik	Dusun Sidodadi, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Lumbok Seminung
214	1124315	Jaimin	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	pembangunan pagar sekolah SDN Sukamarga	Sukamarga, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Suoh
215	1124342	Gunadi Saputra	Kelurahan / Desa	Pembangunan WC/Jamban Sekolah (SD)	Masih Kurangnya Fasilitas WC/Jamban Sekolah SD	Dusun Sidodadi, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Lumbok Seminung
216	1124797	Gunadi Saputra	Kelurahan / Desa	Pengadaan Komputer dan Jaringan (SD)	Masih Belum adanya Fasilitas Komputer dan Jaringan Masih sulit di SD Lombok Timur	Dusun Sidodadi, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Lumbok Seminung
217	1124810	SUNAYAH	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Perlengkapan Singa depok dan Seragam Cakra buana 30 stel Perlengkapan Belum Memadai	Pengurus Cakra Buana Pemangku Kampung PS , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Gedung Surian
218	1125047	SUNAYAH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Halaman Sekolah Becek atau bergenang Air Saat hujan, 40x30 M	SDN 1 CIPTAWARAS Pemangku Waras Jaya, Kab. Lampung Barat , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Gedung Surian
219	1125155	SUNAYAH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pagar Sekolah Roboh Saat Terkena Hujan Lebat	SDN 1 CIPTAWARAS, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Gedung Surian
222	1126912	M.SANIMBAR	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Ruang Kelas (SMP)	'Ruang Kelas Hampir Ambruk	SMPN 1 ATAP SUKAU, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sukau
224	1127012	Tunggono	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Sering terjadi ketidaktertiban di sekolah sehingga membutuhkan pembangunan pagar 375m persegi	SDN 1 Banding Agung, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Suoh
225	1127051	M.SANIMBAR	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	'Belum Adanya Pagar Sekolah Keliling	SDN 1 TAPAK SIRING, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung	Sukau

226	1127098	Tunggono	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Halam licin, dan rawan kecelakaan ringan/jatuh sehingga membutuhkan pengadaan paving blok 200m persegi	SDN 1 Banding Agung, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Suoh
229	1127253	M SANIMBAR	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	LAPANGAN MASI TANAH ANAK ANAK SERING TERPELESET BECEK SAAT UPACARA	SDN 1 TAPAK SIRING, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Sukau
231	1127466	Anton Cahyadi	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	belum ada pagar pengaman volume60x50m	SD N Waysuluh, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Suoh
232	1127494	M SANIMBAR	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	LAPANGAN MASI TANAH ANAK ANAK SERING TERPELESET BECEK SAAT UPACARA	SDN 2 TAPAK SIRING, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Sukau
233	1127592	Tunggono	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Sering terjadi ketidaktertiban proses pembelajaran dan agar lebih aman sehingga membutuhkan pagar 200m	SDN 2 Banding Agung, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Suoh
235	1127776	M SANIMBAR	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	BELUM LENGKAPNYA PERALATAN KESENIAN	TAPAK SIRING, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Sukau
236	1128019	Tunggono	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Sering terjadi ketidaktertiban dan agar keamanan terjaga membutuhkan melanjutkan pembangunan pagar sepanjang 100m	SDN 3 Banding Agung, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Suoh
238	1128414	Anton Cahyadi	Kelurahan / Desa	Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3 Set/paket	roworejo, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Suoh
243	1132350	ANDERI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Sampah pasar pemda yang ikut masuk ke area sekolah (20 m) menyebabkan area sekolah menjadi bau, perlu dipagar agar	Pemangku Bungin I, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Gedung Surian

					tidak mengganggu KBM			
245	1132398	ANDERI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Halaman belakang sd belum memiliki pagar dan rawan karena dekat dengan jalan lingkungan masyarakat (50 m) ketika hujan halaman jadi rusak karena di lewati masyarakat	Pemangku Mekar Sari, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam g Barat	Gedung Surian
252	1143245	HARSONO	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	Pagar keliling SMPN 1 Air Hitam belum selesai, masih ada kekurangan sepanjang 500 meter.	Pemangku Simpang Sari Pekon Sinar Jaya , Kab. Lampung Barat	Kab. Lam g Barat	Air Hitam
253	1144107	Wiwin Wardoyo	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Ruang Kelas (SD)	Gedumng Rusak Parah, Perlunya Rehab Gedung Kelas 1 Unit	SDN 1 Sukajaya , Kab. Lampung Barat	Kab. Lam g Barat	Sumber Jaya
254	1144157	Wiwin Wardoyo	Kelurahan / Desa	Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar (SD)	Meubeler sudah tidak layak pakai, perlunya penambahan meubeler 100 Set	SDN 1 Sukajaya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam g Barat	Sumber Jaya
255	1144268	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum ada pagar keliling, perlunya pembangunan pagar keliling	SDN 2 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lam g Barat	Sumber Jaya
256	1144371	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Ruang Kelas (SD)	Ruang Kelas Rusak , Perlunya Rehab Gedung kelas 1 Unit	SDN 2 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lam g Barat	Sumber Jaya
257	1144439	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar (SD)	Perlunya Penambahan Meubeler 100 Set	SDN 2 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lam g Barat	Sumber Jaya

258	1144524	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah (SD)	Rumah dinas guru rusak, perlunya rehab 2 Unit	SDN 1 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Sumber Jaya
259	1144623	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	lapangan perlu pengerasan paving blok 30 x 43 M	SDN 1 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Sumber Jaya
260	1144723	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan (SD)	Perpustakaan Rusak Parah perlunya Rehab Berat Perpustakaan 1 Unit	SDN 1 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Sumber Jaya
261	1144841	Amir Syafarudin,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan WC/Jamban Sekolah (SD)	Kurangnyan Wc , Perlunya Pembangunan Wc Murid 2 Unit	SDN 1 Tugusari , Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Sumber Jaya
263	1145334	Sutan Sahril	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah (SD)	Perlunya Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Kepala Sekolah	SDN 4 Way Petai, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Sumber Jaya
264	1146042	Siswadi aziz	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum Ada untuk keamanan murid	SDN Turga, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Belalau
265	1146505	Alexander Metias,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	rusak berat	SDN I Bedudu, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Belalau
266	1147247	Alexander Metias,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Rusak Berat	SDN II Bedudu, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Belalau
267	1153611	SUNANDAR	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	BELUM ADA	ALAT SENI ORKES, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Belalau
269	1166008	HASNUL MUBAROK,S.H.,	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Tidak adanya pagar membahayakan bagi siswa siswi	SDN 2 Pampangan, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Sekincau
277	1171101	ALAMSYAH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	lapangan masih tanah merah dan becek	SDN negeri jaya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lam	g Barat Bandar Negeri Suoh

278	1171273	FUAT HASIM	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	belum ada paving blok	SDN Sukajadi II Pekon Suoh, Kab. Lampung Barat	Kab. Lamp	Barat	Bandar Negeri Suoh
280	1171497	TRI WALUYO	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	belum ada pagar	SDN tri mekar jaya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lamp	Barat	Bandar Negeri Suoh
283	1184692	ANGGI ISMANTO	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	Pagar keliling SMPN 2 Air Hitam sepanjang 100 meter di Pekon Srimenanti belum selesai	Pekon Srimenanti Kecamatan Air Hitam, Kab. Lampung Barat	Kab. Lamp	Barat	Air Hitam
284	1184694	ANGGI ISMANTO	Kelurahan / Desa	Pengadaan Komputer dan Jaringan (SMP)	Komputer di SMPN 2 Air Hitam sudah mulai tidak bisa difungsikan karena rusak, untuk itu kami sengusulkan sebanyak 20 Unit Komputer baru	Pekon Srimenanti, Kab. Lampung Barat	Kab. Lamp	Barat	Air Hitam
285	1184697	ANGGI ISMANTO	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SMP)	Lapangan upacara S dan Parkir kendaraan SMPN 2 Air Hitam Darurat	SMPN 2 Air Hitam Pekon Srimenanti, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Air Hitam
286	1185038	MUHAIMIN,SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pagar Keliling SDN Sidodadi Sepanjang 200 meter belum selesai	Pemangku Melati 2 , Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Air Hitam
288	1206466	FUAT HASIM	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	belum ada pagar	Pmk. Sukajadi II Pekon Suoh, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Bandar Negeri Suoh
289	1222385	Asmara Nita, SE	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum ada	SD I Hujung, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Belalau
290	1224019	ALAMSYAH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	belum ada pagar	Pmk. Bunga Lote Pekon Negeri Jaya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Bandar Negeri Suoh
292	1226934	SELAMAT,SH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Tidak mempunyai pagar yang layak/standar	Pemangku 03, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Batu Brak
294	1227053	ASBIR YUSRON	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	alat orkes belum lengkap	pekon gunung sugih, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Balik Bukit

295	1232208	DARIKSON EKA PUTRA,S.IP	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	pembinaan kelompok seni buadaya masyarakat	sukajadi, Kab. Lampung Barat	Kab. Lamp	Barat Sukau
297	1236053	Fhitri Aydi, S.Sos	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Rusak	SD N 1 Sinar Luas, Kab. Lampung Barat	Kab. Lamp	Barat Kebun Tebu
298	1236406	Fhitri Aydi, S.Sos	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Belum Ada	SD N 1 Sinar Luas, Kab. Lampung Barat	Kab. Lamp	Barat Kebun Tebu
299	1244233	RIZA IRWANDA	Kelurahan / Desa	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (SMP)	Air bersih merupakan Kebutuhan Primer Bagi masyarakat Pekon Suka Banjar, Saat ini sarana penunjang ketersediaan air bersih khususnya di Pemangku 1 san 4 masih belum memadai dan jauh dari kelayakan, sehingga asupan air bersih sangat terganggu.	Sumber air Way Tuba, Pemangku 4 Pekon Suka Banjar. Kecamatan Lumbok Seminnung Kabupaten LAmpung Barat., Kab. Lampung Barat	Kab. Lamp	Barat Lumbok Seminung
301	1274864	YUSRIN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	kondisi sudah sangat memprihatikan terutama di halaman belakang	SDN 3 Way Mengaku, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	arat Balik Bukit
303	1275422	SAMSUAR	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Ruang Kelas (SD)	Ruang Kelas yang mulai retak mengakibatkan kegiatan belajar dan mengajar terganggu.	Pemangku Kerambai, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	arat Sukau
304	1280524	TAKZIM	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	halaman kotor dan berdebu seluas 1.476	sd n 1 sukarame, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	arat Balik Bukit
306	1281701	AGUSRIN	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Tingginya animo masyarakat untuk mempelajari alat Musik Tradisional	Lingkungan Negara Batin, Jati Mulyo II dan Suka Negeri, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	arat Balik Bukit
311	1304661	MAT RIADI	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Kekurangan alat orkes (alat Kesenian Tradisional) di Pekon Luas sebanyak 1 SET	Pekon Luas, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	arat Batu Ketulis

312	1305120	AMIR MAHMUD	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Pengadaan ALAT HADROH/MAWALAN untuk Mempekuat Budaya Islami Pekon Kubu Liku Jaya Sebanyak 1 Paket	Pekon Kubuliku Jaya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lamp	Barat	Batu Ketulis
313	1306349	SAHRIL	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pembangunan pagar sekolah SDN Wayngison sepanjang 150 Meter	Pekon Way Ngison, Kab. Lampung Barat	Kab. Lamp	Barat	Batu Ketulis
314	1318021	ARUMAN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Pembangunan Taman Lapangan dengan Paving Blok seluas 50 Meter Persegi di SDN 1 Bakhu	Pekon Bakhu, Kab. Lampung Barat	Kab. Lamp	Barat	Batu Ketulis
317	1344624	ERNA RISNAWATI,SE.MM	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum ada	Pagar Keliling SDN 4 Pajar Bulan, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Way Tenong
318	1344649	ERNA RISNAWATI,SE.MM	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Belum ada	Pagar Keliling SDN 1 dan SDN 2 Pajar Bulan, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Way Tenong
319	1345000	JUNAEDI SOPANTONO	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Rusak	Paving Blok SDN 3 Karang Agung, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Way Tenong
320	1345067	JUNAEDI SOPANTONO	Kelurahan / Desa	Rehabilitasi Ruang Kelas (SD)	Rusak	Rehab Gedung SDN 1 Karang Agung, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Way Tenong
322	1348221	ARNAN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	rusak	Pembangunan pagar keliling SMPN 2 Way Tenong, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Way Tenong
323	1348247	ARNAN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SMP)	rusak	Pembuatan paping halam SMPN 2 Way Tenong, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Way Tenong
324	1348258	ARNAN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Rusak	Pembangunan pagar keliling SDN 1 Sukananti, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu	Barat	Way Tenong

326	1348632	DAIM B	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Rusak	Pembangunan pagar keliling,, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Way Tenong
329	1349397	UMAR SUKI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	RUSAK	Paping Blok Halaman SDN 1 Padang Tambak, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Way Tenong
330	1349432	UMAR SUKI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Rusak	Paping Blok halaman SDN 4 Padang Tambak, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Way Tenong
331	1349513	UMAR SUKI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Rusak	Paping Blok halaman SDN 3 Padang Tambak, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Way Tenong
332	1349543	UMAR SUKI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Rusak	Pagar Keliling SDN 3 Padang Tambak, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Way Tenong
338	1407239	HARYADI ARNANDO	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pembangunan Pagar SDn 1 marga jaya	SDN 1 Marga Jaya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
339	1410134	ROSDANI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pembangunan Pagar SDS Batu Hitam 20 M Pekon Pagar Dewa	Pekon Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
340	1410158	ROSDANI	Kelurahan / Desa	Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar (SD)	Pengadaan Meubelair SDS Batu Hitam Pekon Pagar Dewa sebanyak 12 Paket	Pekon Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
341	1410184	ROSDANI	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pembangunan Pagar Sekolah SDS Pekon Pagar Dewa 40 Meter	Pekon Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
342	1410216	ROSDANI	Kelurahan / Desa	Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar (SD)	Pengadaan Meubelair SDS Pagar Dewa sebanyak 8 Paket	Pekon Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
343	1410379	ROSDANI	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Pengadaan peralatan kesenian sebanyak 6 paket	Pekon Pagar Dewa, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
349	1410934	WIRIANTO, SH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pembangunan Talud penahan tanah ruang belajar SD Basungan	Pekon Basungan, Kab. Lampung	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa

					Pekon Basungan 105 M	Barat		
360	1410942	WIRIANTO, SH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SMP)	Pembangunan Pagar SMPN 1 Pagar Dewa Pekon Basungan 250 M	Pekon Basungan, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
359	1411598	KOMARONI	Kelurahan / Desa	Alat Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Pengadaan peralatan kesenian jaranan 1 paket	Pekon Mekar Sari, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
361	1411687	ANILAH RAMAYANTI TASWIDAH	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Tembok Penahan Tanah (TPT) SDN Sidodadi pemangku 01 50 M	Pekon Sidodadi, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
363	1412410	MUHAMAT YAMIN	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Pembangunan Pagar SD Sukamulya 500 M	Pekon Suka Mulya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
364	1412691	FEBRA SAPUTRA	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	Pembangunan Paving SDN 1 Sukajaya 1.000M	Pekon Suka Jaya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
365	1412696	FEBRA SAPUTRA	Kelurahan / Desa	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (SMP)	Pengadaan air bersih SDN 1 Sukajaya 1 unit	Pekon Suka Jaya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
367	1412709	FEBRA SAPUTRA	Kelurahan / Desa	Pembangunan Pagar (SD)	Tanah penahan SDN 1 Sukajaya 100M	Pekon Suka Jaya, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa
372	1412936	SULISTYO	Kelurahan / Desa	Pembangunan Taman Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir/Paving (SD)	pembangunan paving SD 1 paket	Pekon Sidomulyo, Kab. Lampung Barat	Kab. Lampu Barat	Pagar Dewa

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi pembangunan nasional terkait pembangunan pendidikan dan ke udayaan, diantaranya ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan r asyarakat Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak serta mempu ai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. P merataan pembangunan pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu keharu an untuk menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan anta elompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, khususnya wilayah desa inggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbud serta mendukung t capainya kebijakan

pada level nasional, Kemendikbud menetapkan lima sasaran strat jis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan ke erhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat ke erhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diuk dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program. Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Pend ikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	24
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,20	42,62	45,21	47,81	10
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97	104,48	102,98	101,49	00
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	00
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39	90,59	92,80	00
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47	34,56	35,62	36,64	63
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang						
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3,25	3,5	3,7	
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,2	58,2	59,2	60,2	2
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5	27,4	28,3	29,2	1
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Nilai	-	394	-	-	6
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Nilai	-	385	-	-	8
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	Nilai	-	399	-	-	2
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	47,10	48,30	49,70	51,10	60

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 2.8	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64,77	65,25	65,72	66,20	66,70
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47,43	48,33	49,22	50,11	51,00
IKSS 2.10	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	12	18	23	31	40
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	69,0	71,8	74,6	77,4	80,0
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik						
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30	35	40	45	50
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10	15	22,5	31	40
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10	15	22,5	31	40
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan						
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	skor	510	515	520	525	530
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	orang	34.000	50.000	66.000	82.000	98.000
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	55,5	57,3	59,1	60,9	62,7
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, da Akuntabel						
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71,5	73	74,5	76	77,5
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	Indeks	81	82	82	83	84
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78	81	85	87	91

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam kaitannya dengan Arah Kebijakan Umum pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan adalah :

TUJUAN I

Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan						
Indikator Tujuan	Satuan	Target				
		2023	2024	2025	2026	
Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,08	8,09	8,10		8,11
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,27	12,28	12,29		12,3

SASARAN I

Meningkatnya mutu layanan Pendidikan					
Indikator Sasaran	Satuan	Target			
		2023	2024	2025	2026
Angka Pertisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	%	100	100	100	100
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah dasar)	%	100	100	100	100
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan	%	40	50	60	70

TUJUAN II

Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya daerah					
Indikator Tujuan	Satuan	Target			
		2023	2024	2025	2026
Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	%	13,30	15,50	17,70	20,00
Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	%	2,4	6,4	10,4	14,4

SASARAN II					
Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah					
Indikator Sasaran	Satuan	Target			
		2023	2024	2025	2026
Persentase WBTB Terverifikasi	%	16,60	22,20	27,70	33,30
Persentase Cagar Budaya Daerah terverifikasi	%	35,4	39,24	43,58	48,1

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung Pendidikan Nasional dan mewujudkan vis lan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat meliputi pro(am :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b. Program Pengelolaan Pendidikan;
c. Program pengembangan kurikulum;
d. Program Pengembangan Bahasa dan sastra;
e. Program pengembangan kebudayaan;
f. Program pengembangan kesenian tradi sional;
g. Program Pembinaan Sejarah;
h. Pelestrarian dan pengelolaan cagar budaya.

a. Rencana Kinerja Tahun 2025

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 menguraikan tentang Perjanjia Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan F formasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kine a pada Dasarnya adalah lembar/dokumen yang disertai dengan indikator kinerja Melalui Perjanjian Kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakata antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarka tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang c epakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkut , tetapi termasuk kenerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tah -tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga encakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung barat telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2023-2026

Selanjutnya indikator target sasaran dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel

Indikator Target Sasaran Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Meningkatnya layanan Pendidikan	Angka Pertisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	100
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah dasar)	100
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan	60%
2	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya daerah	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	Persentase WBTB Terverifikasi	27,... %
			Persentase Cagar Budaya Daerah terverifikasi	43,... %

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi rumusan rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifmya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 disajikan pada table berikut :

Tabel
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN		RANGKA
				TARGET 2025	PAGU IN	ATIF (Rp)
1	2	3	4	8		
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			**33**	**8.868.200,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**32**	**7.826.700,00**
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**32**	**7.826.700,00**
1,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	**9**	**9.528.900,00**
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	5	0.351.400,00
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang		5.000.000,00
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang		0.000.000,00
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang		0.000.000,00
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit		0.000.000,00
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit		0.000.000,00

	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		00.000.000,00
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	13 Unit		40.000.000,00
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah				
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	8 Paket		8.000.000,00
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	615 Peserta Didik		1.456.400,00
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	711 Orang		5.000.000,00
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	179 Orang		4.174.000,00
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	247 Satuan Pendidikan		3.486.000,00
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	216 Satuan Pendidikan	2	9.080.000,00
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	432 Orang		3.611.000,00

	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	7 Ruang		05.000.000,00
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1.262.000,00
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	41 Komunitas		4.017.000,00
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7199 Paket		3.115.000,00
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru				
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang		0.000.000,00
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4.000.000,00
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				

			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	500 Orang		27.238.000,00
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	247 Satuan Pendidikan		4.912.000,00
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang		0.000.000,00
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	31000 Peserta Didik		0,00
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket	3	0.000.000,00
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	31	5.507.000,00
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				

			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		50.000.000,00
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang		0.000.000,00
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		0.000.000,00
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir				
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	2 Unit		0.000.000,00
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	2	0.000.000,00
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1	8.000.000,00
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				

			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		20.000.000,00
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		8.000.000,00
	1.01.02 2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		0.000.000,00
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah				
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket		9.120.000,00
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	747 Peserta Didik		0.057.700,00
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	387 Orang	1	9.739.000,00
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pert				

			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	180 Orang		9.806.000,00
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	61 Satuan Pendidikan		4.656.000,00
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	61 Satuan Pendidikan	1	3.270.000,00
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	120 Orang		6.048.000,00
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		8.877.000,00
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		7.053.000,00
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				

			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	61 Satuan Pendidikan		45.965.000,00
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru				
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang		00.000.000,00
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang		2.538.300,00
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6877 Paket		1.877.000,00
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		6.000.000,00
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket		7.500.000,00

	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-		27.218.500.00
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit		50.000.000.00
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD				
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	10 Paket		0.000.000,00
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5560 Peserta Didik		0.00
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	140 Orang		6.000.000,00
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	176 Satuan Pendidikan		4.846.000,00
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD				
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	176 Satuan Pendidikan		1.392.500,00
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	352 Orang		460.000,00

	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	188 Orang		219.000,00
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		202.000,00
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		827.000,00
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang		600.000,00
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru				
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang		000.000,00
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta didik		0,00
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				

			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	164 Orang		92.000,00
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		250.000,00
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		0,00
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	5 Paket		0,00
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	176 Satuan Pendidikan		0,00
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		0,00
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				

			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		430.000,00
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	2	452.000,00
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1435 Peserta Didik		470.200,00
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan		0.061.800,00
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan		5.144.000,00
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang		5.174.000,00
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		602.000,00
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		0,00
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru				
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		0,00
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		0,00
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah				
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket		0,00
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit		0,00
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				

			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket		0,00
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		0,00
2,	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	-	-		**2.885.000,00**
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-		0,00
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	500 Orang		0,00
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-		2.885.000,00
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen		2.885.000,00
3,	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	-	-		**3.278.000,00**

	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		78.000.00
	1.01.06.2.01.0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota				
			Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	0 Kamus		0,00
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota				
			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 Bahasa		0,00
	1.01.06.2.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota				
			Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Publikasi		0,00
	1.01.06.2.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota				
			Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	3 Orang		0,00
	1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota				
			Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	4 Buku		0,00
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				

			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Peserta Didik		78.000,00
	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	1 Dokumen		0,00
4.	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	**231.8**	**134.800,00**
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		75.000,00
	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		75.000,00
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		27.400,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		125.000,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		44.000,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		15.000,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		28.000,00
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		09.400,00
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	231	303.500,00
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2161/12 Orang/bulan	231	362.700,00
	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		.736.600,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan		5.729.600,00
	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen		0,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tnwulana n/Semesteran SKPD	29 Laporan		0.000.000,00
	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		2.474.600,00
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		7.536.000,00
	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		536.000,00
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		000.000,00
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		696.900,00
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		3.736.000,00
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket		4.558.300,00
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		8.869.600,00
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		060.000,00
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		160.000,00
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		313.000,00
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		5.426.000,00
	-	Pengadaan Mebel				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		5.426.000,00
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0,00
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		8.370.000,00

	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		30.000,00
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		360.000,00
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		680.000,00
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		800.000,00
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a				apangan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit		0.800.000,00
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0.000.000,00

	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		727.400,00
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		106.000,00
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			3	**1.041.500,00**
	-	-			3	**1.041.500,00**
1,	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	-	-	1	**2.718.000,00**
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		4.366.500,00
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12 Objek		4.366.500,00
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				

			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang		0,00
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		351.500,00
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek		972.500,00
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan		8.379.000,00
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Pr... Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				...si dan

			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	5 Sertifikat		0,00
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		0.000.000,00
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek		0,00
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	100 Orang		0,00
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				

			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	8 Unit		000.000,00
2,	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	-	-		**2.606.000,00**
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		2.606.000,00
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	52 Orang		9.449.000,00
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				

			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	34 Lembaga		53.157.000,00
3,	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	-	-		**97.753.500,00**
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		97.753.500,00
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	150 Orang		97.753.500,00
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	4 Unit		0,00

	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	5 Dokumen		0,00
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	-	-		**57.964.000,00**
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-		34.127.000,00
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20 Objek		23.397.000,00
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya				

			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek		0.730.000,00
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-		3.837.000,00
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	7 Objek		4.921.000,00
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek		2.660.500,00
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya				

			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	3 Objek		6.255.500,00
		UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)				**26.804.990,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**26.804.990,00**
	-	-				**26.804.990,00**
1,	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	-	-		**15.000.000,00**
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		15.000.000,00
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	9 Objek		15.000.000,00
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				

			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	600 Orang		0,00
2.	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-		11.804.990,00
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		9.160.000,00
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		4.160.000,00
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		65.000.000,00
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		30.970.120,00
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		31.410.120,00
	-	Pengadaan Mebel				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		89.560.000,00

	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		58.763.150,00
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan		7.490.000,00
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan		2.760.000,00
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		9.690.000,00

	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		3.209.800,00
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		2.911.720,00
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		8.668.000,00
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		8.763.150,00

	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		5.613.350,00
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		2.911.720,00
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		4.243.720,00
	JUMLAH				33	**5.673.190,00**

BAB V
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah dan pembangunan pendidikan yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Renja-OPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 pada prinsipnya menjelaskan: (1) Pendahuluan, (2) Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu, (3) Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, dan (4) Penutup. Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian terbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat.

4.2. Saran

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ta un 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acu untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang dan langka langkah perbaikan ditingkat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan ya g akan dilaksanakan, disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pel sanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ampung Barat.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna menca i target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cerma dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sum er daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai fak r yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah p cepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan asalah-masalah aktual dibidang Pendidikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan komitmen dan dukungan semua pi k untuk memperteguh pelaksanaan kegiatan sehingga tidak hanya menjadi wa na dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasik dalam penyelenggaraan sistem yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan ertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Untuk pelaksanaan pro m dan kegiatan diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan nggaran menjadi lebih efektif.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optin l sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi m kanisme manajemen internal organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Ke udayaan Kabupaten Lampung Barat akan ditingkatkan untuk secara pro aktif mem itor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Lampung Barat

No	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) s.d. Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10 / 5 X 100		12	13
	Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.1..0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
	Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.1..0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																	
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**80,31%**	**883.895.790.510**	**71,76%**	**217.542.504.987**	**75%**		**71,76%**		**95,68**	**0**	**71,76%**	**217.542.504.987**	**95,68**	**24,61**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
	1.01.01.2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**38 Dokumen**	**700.000.000**	**11**	**24.501.000**	8	**24.400.900**	0	-	-	**0**	11	**24.501.000**	**28,95**	**3,50**		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**4 Dokumen**		1		1		0		-		1	-	**25,00**	-		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**4 Dokumen**		1		1		0		-		1	-	**25,00**	-		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**4 Dokumen**		1		1		0		-		1	-	**25,00**	-		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	**4 Dokumen**		1		1		0		-		1	-	**25,00**	-		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**48 Laporan**		12		12		0		-		12	-	**25,00**	-		
	1.01.01.2,01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	150.000.000	11	10.000.000	8	10.000.000	0	**0,00**	-	**0**	**1100,00%**	**10.000.000**	**28,95**	**6,67**		
	1.01.01.2,01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	100.000.000	1	1.172.500	1	1.172.500	0	**0,00**	-	**0**	**100,00%**	**1.172.500**	**25,00**	**1,17**		
	1.01.01.2,01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	100.000.000	1	1.048.000	1	1.048.000	0	**0,00**	-	**0**	**100,00%**	**1.048.000**	**25,00**	**1,05**		
	1.01.01.2,01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	100.000.000	1	1.180.000	1	1.180.000	0	**0,00**	-	**0**	**100,00%**	**1.180.000**	**25,00**	**1,18**		
	1.01.01.2,01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Laporan	150.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	0	**0,00**	-	**0**	**1200,00%**	**10.000.000**	**25,00**	**6,67**		

	1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**2260/12 orang/ bulan**	**876.748.857.069**	**1963/12**	**216.712.712.487**	1898/12	**232.254.278.970**	1898/12	**20.989.064.148**	1898/12	**9,03710547**	**1898/12**	**237.701.776.635**	**1898/12**	**27,11**		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**48 dokumen**		**12**		12		-		-		**1200,00%**	-	**25,00**			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**24 Laporan**		**6**		6		-		-		**600,00%**	-	**25,00**			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Laporan		5		0		0		-		500,00%	-	25,00			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**116 Laporan**		**29**		29		-		-		**2900,00%**	-	**25,00**			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**4 dokumen**		**1**		1		0		-		**100,00%**	-	**25,00**			
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1963/12 orang/ bulan	876.638.209.430	1898/12	216.692.771.587	1898/12	232.231.862.700	1898/12	20.989.064.148	1898/12	**9,04**	**1898/12**	**237.681.835.735**	**1898/12**	**27,11**		
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 dokumen	8.060.443	12	1.736.790	12	1.736.790	0	0,00	-	**0**	**1200,00%**	**1.736.790**	**25,00**	**21,55**		
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24 Laporan	13.615.274	6	5.729.700	6	5.729.700	0	0,00	-	**0**	**600,00%**	**5.729.700**	**25,00**	**42,08**		
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Laporan	11.485.961	5	2.474.890	5	2.474.890	0	0,00	-	**0**	**500,00%**	**2.474.890**	**25,00**	**21,55**		
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	116 Laporan	66.000.000	29	10.000.000	29	10.000.000	0	0,00	-	**0**	**2900,00%**	**10.000.000**	**25,00**	**15,15**		
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	11.485.961	1	2.474.890	1	2.474.890	0	0,00	-	**0**	**100,00%**	**2.474.890**	**25,00**	**21,55**		
	1.01.01,2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**	**4 Lapioran**	**11.602.500**	**1**	**16.812.400**	**1**	**16.812.400**			-	**0**	**100,00%**	**16.812.400**	**25,00**	**144,90**		
	1.01.01,2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	4 Laporan	11.602.500	1	16.812.400	1	16.812.400			-	**0**	**100,00%**	**16.812.400**	**25,00**	**144,90**		
	1.01.01,2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen** Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**4 Dokumen**	**260.000.000**	**1**	**2.475.000**	**1**	**17.230.000**	-	-	-	**0**	**100,00%**	**2.475.000**	**25,00**	**0,95**		

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		0		1				-	0	0,00%	-	-	-		
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	200.000.000	1	2.475.000	1	2.230.000	0	0,00	-	0	100,00%	2.475.000	25,00	1,24		
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	60.000.000	0	-	1	15.000.000	0	0,00	-	0	0,00%	-	-	-		
	1.01.01,2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**40 paket**	**1.553.853.100**	**10**	**195.624.100**	**10**	**181.201.900**	0	-	-	0	10	195.624.100	25,00	12,59		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**144 paket**		**36**		**36**		0		-		36	-	25,00			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**44 paket**		**11**		**11**		0		-		11	-	25,00			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**12 dokumen**		**3**		**3**		0		-		3	-	25,00			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**20 Laporan**		**5**		**5**		0		-		5	-	25,00			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**48 Laporan**		**12**		**12**		0		-		12	-	25,00			
	1.01.01,2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 paket	41.751.000	10	13.917.000	10	3.901.000	0	0,00	-	0	10	13.917.000	25,00	33,33		
	1.01.01,2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	144 paket	217.363.050	36	72.454.350	36	24.898.300	0	0,00	-	0	36	72.454.350	25,00	33,33		
	1.01.01,2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44 paket	113.069.250	11	37.689.750	11	57.869.600	0	0,00	-	0	11	37.689.750	25,00	33,33		
	1.01.01,2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	9.180.000	3	3.060.000	3	3.060.000	0	0,00	-	0	3	3.060.000	25,00	33,33		
	1.01.01,2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	12.510.000	5	4.170.000	5	4.160.000	0	0,00	-	0	5	4.170.000	25,00	33,33		
	1.01.01,2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	192.999.000	12	64.333.000	12	87.313.000	0	0,00	-	0	12	64.333.000	25,00	33,33		
	1.01.01,2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya disediakan**	**15 Unit**	**142.500.000**	-	**0**	**5**	**61.910.800**	**0**	**0**	-	**0**	-	-	-	-		
	1.01.01,2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya disediakan	15 Unit	142.500.000	0	-	5	61.910.800	0	0	-	0	-	-	-	-		
							388.580.000		175.880.000		3.200.732		1,82	12	391.780.732	25,00	20,28		
		Pemerintahan Daerah	Menyusun											12		25,00			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang **Disediakan**	**48 laporan**		12		12											

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**48** laporan		**12**		12						12		25,00			
	1.01.01,2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	6.787.800	12	1.330.000	12	1.330.000			-		**0,00**	**12**	**1.330.000**	**25,00**	**19,59**	
	1.01.01,2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	472.000.000	12	150.960.000	12	72.360.000	2	3.200.732	**15,67**	**4,42**	**14**	**154.160.732**	**29,17**	**32,66**		
	1.01.01,2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	854.290.000	12	236.290.000	12	100.190.000			-	0,00	12	236.290.000	25,00	27,64		
	1.01.01,2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**43 unit**	**2.025.341.146**	**43**	**201.800.000**	42	**180.800.000**	0	-	-	**0**	**43**	**201.800.000**	**100,00**	**9,96**		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	**1 unit**		**1**		2				-		**1**	-	**100,00**			
	1.01.01,2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 unit	1.425.341.146	43	187.800.000	42	170.800.000	0	0,00	-	**0**	**43**	**187.800.000**	**100,00**	**13,18**		
	1.01.01,2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	600.000.000	2	14.000.000	2	10.000.000	0	0,00	-	**0**	**2**	**14.000.000**	**100,00**	**2,33**		
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**19,41%**	**416.425.765.237**	**19,33**	**74.538.251.500**	**19,56**	**65.830.533.700**	**19,33**		**99**	**0**	**39**	**74.538.251.500**	**19.917,57**	**17,90**		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	**100,00%**		**99,63**		**102,19**		**99,63**		**97**		**199**	-	**19.926,00**			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	**100,00%**		**105,51**		**102,52**		**105,51**		**103**		**211**	-	**21.102,00**			
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Jumlah prasarana sekolah Dasar yang dibangun**	**75 Ruang**	**222.102.138.514**	**26**	**43.811.703.700**	**13**	**37.603.168.300**	-	**1.117.014.465**	-	**2,970532845**	**26**	**44.928.718.165**	**34,67**	**20,23**		
			Jumlah sarana (Meubelair) Sekolah Dasar yang tersedia	**45 Paket**		**14**		**20**		-		-		**14**	-	**31,11**			
			Jumlah prasarana sekolah Dasar yang direhab	**262 Ruang**		**89**		**20**		-		-		**89**	-	**33,97**			
			Jumlah sarana (TIK) Sekolah Dasar yang tersedia	**120 Paket**		**40**		**1**		-		-		**40**	-	**33,33**			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	**27.612 Paket**				**6.630**		-		-		-	-	-			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	**988 Satuan pendidikan**				**216**		-		-		-	-	-			
			Kompetisi/Lomba																
			Akademik dan Non Akademik																
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	**2.844 Orang**		**711**		**428**		-		-		**711**	-	**25,00**			

			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4.712 Orang				-					-	-	-			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	**988 Satuan pendidikan**		-		**216**		-		-	-	-	-			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	**864 Satuan pendidikan**		**216**		**216**		**216**		**100,00**		**432**	-	**50,00**			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	**1.728 Orang**		-		**432**				-		-	-	-			
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	2.121.240.000	5	455.483.000	3	615.000.000	-	-	-	**0**	**5**	**455.483.000**	**100,00**	**21,47**		
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang	1.075.000.000	10	615.798.000	-	-	-	-	-	**0**	**10**	**615.798.000**	**50,00**	**57,28**		
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	16 Ruang	1.725.000.000	10	232.018.000	-	-	-	-	-	**0**	**10**	**232.018.000**	**62,50**	**13,45**		
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	3.465.000.000	10	153.145.000	1	150.000.000	-	-	-	**0**	**10**	**153.145.000**	**50,00**	**4,42**		
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	16 Unit	2.832.000.000	-	-		-	-	-	-	**0**	-	-	-	-		
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/KepalaSekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Ruang	8.235.000.000	-	-		-	-	-	-	**0**	-	-	-	**0**		
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Ruang	-	-	-		-	-	-	-	**0**	-	-	-	**0**		
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	-	-	140.636.000	3	412.500.000	-	-	-	**0**	-	**140.636.000**	-	**0**		
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	90 Unit	850.500.000	0	-		-	-	-	-	**0**	-	-	-	-		
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	45 Paket	10.940.000.000	181	-	20	1.160.500.000	-	-	-	**0**	**181**	-	**402,22**	-		
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	- Paket	-		5.960.000.000		-	-	-	-	**0**	-	**5.960.000.000**	-	**0**		
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- Peserta Didik	-	34.548	1.861.460.000					-	0	34.548	1.861.460.000	-	0		
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Perasa Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Perasa Siswa yang Tersedia	120 Paket	-	100	500.000.000	1	600.000.000	-	-	-	**0**	**100**	**500.000.000**	**83,33**	-		
			Penyediaan Tenaga Kependidikan dan Non Akademik																
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.844,00 Orang	736.444.000	586	1.693.200.000	428	2.220.000.000				0	586	1.693.200.000	20,60	231,80		

	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Kadir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan kompetensi dan Kualifikasi	4712 Orang	8.848.800.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	985 Satuan Pendidikan	3.650.000.000	-	-	216	70.645.000	-	-	-	**0**	-	-	-	-		
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	216 Satuan Pendidikan	1.880.000.000	216	26.384.020.000	216	26.179.080.000	216	1.117.014.465	**100,00**	**4,266820931**	**432**	**27.501.034.465**	**200,00**	**1.462,82**		
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1728 Orang	120.939.620.558	-	-	432	61.116.000			-	**0**	-	-	-	-		
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	- Ruang	1.040.000.000	1	916.072.000	7	1.442.000.000			-	**0**	**1**	**916.072.000**	-	**88,08**		
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	-	-	-					-	-	-	-	-	-		
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen		3	181.062.600					-	-	**3**	**181.062.600**	**25,00**	-		
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	27.612 Paket	-	6.090	1.403.098.100	6.630	1.265.878.500			-	**0**	**6.090**	**1.403.098.100**	**22,06**	-		
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	-	-	-	6	1.200.000.000			-	**0**	-	-	-	-		
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	80 Unit	1.746.500.000	-	394.500.000	3	158.008.000			-	**0**	-	**394.500.000**	-	**22,59**		
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang				31	246.656.000			-	**0**	-	-	-	-		
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	216,00 Satuan Pendidikan	12.250.000.000	0	-	216	77.456.000			-	**0**	-	-	-	-		
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	60 Ruang	3.545.000.000	51	2.921.200.000	17	1.625.000.000			-	**0**	**51**	**2.921.200.000**	**85,00**	**82,40**		
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah prasarana sekolah menengah pertama dibangun**	98 Ruang	146.103.731.123	29	22.820.046.800	7	20.556.205.200		622.340.612	-	**3,03**	**29**	**23.442.387.412**	**29,59**	**16,05**		
			Jumlah sarana (Meubelair sekolah) menengah	22 Paket		7		11				-	-	**7**	-	**31,82**	-		
			Jumlah prasarana sekolah **menengah pertama direhab**	20 Ruang		0		3				-	-	**0**	-	**45,00**	-		
			Jumlah sarana (TIK sekolah) menengah pertama yang tersedia	20 Paket		0		3				-	-	**0**	-	**45,00**	-		
			Jumlah Perlengkapan Peserta yang Tersedia	26.378 Paket		5.685		6.187				-	-	**5.685**	-	**21,55**	-		

		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	69.800 Peserta Didik		15.500							-	-	15.500	-	22,21	-		
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2.088 Peserta Didik		-							-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.544 Orang		383			385				-	-	383	-	24,81	-		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikas	1.476 Orang		-														
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	336 Satuan Pendidikan		84			61				-	-	84	-	25,00	-		
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	240 Satuan Pendidikan		60			61			61	100,00	-	121	-	50,42	-		
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	480 Orang					122				-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	2.315.000.000		-		1	259.000.000			-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang	4.630.000.000	10	284.874.000	1	130.000.000				-	0	10	284.874.000	50,00	6,15		
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.135.000.000		-						-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	15 Ruang	3.370.000.000	3	417.536.000	1	286.000.000				-	0	3	417.536.000	20,00	12,39		
1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	- Ruang	-		-						-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	- Unit	-		-						-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit	618.200.000		-						-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	11 Unit	955.000.000		-	2	300.000.000				-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	57 Unit	4.965.000.000		-						-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	40 Unit	5.500.000.000		-	2	380.000.000				-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40 Ruang	5.035.000.000	40	1.122.648.000	11	1.100.000.000				-	0	40	1.122.648.000	100,00	22,30		
		Sekolah	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat										0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	2.339.500.000															

1.01.02.2.02.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Ruang	2.457.300.000	10	532.945.000	3	518.000.000	-	-	-	0	10	532.945.000	100,00	22,61		
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	2.218.000.000	10	283.844.000	2	235.373.000	-	-	-	0	10	283.844.000	50,00	12,80		
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	22 Paket	4.800.000.000	8	280.000.000	11	473.000.000	-	-	-	0	8	280.000.000	36,36	5,83		
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	-	97	2.134.000.000	-	-	-	-	-	0	97	2.134.000.000	-	-		
1.01.02.2.02.0029	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-		-		-			-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-		-	-	-			-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0031	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-			-	-	-			-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	61.788 Orang	-	15.447	1.141.737.000	-	-	-	-	-	-	15.447	1.141.737.000	25,00	-		
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	23 Paket	2.875.000.000	15	250.000.000	3	170.775.000			-	0	15	250.000.000	65,22	8,70		
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2.988 Peserta Didik	719.808.000		-	-	121.464.900			-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.544	5.815.392.000	308	1.044.875.000	385	1.521.739.000			-	0	308	1.044.875.000	19,75	17,97		
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikas	2.087 Orang	2.800.000.000		-					-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	61 Satuan Pendidikan	1.615.000.000		-	61	51.038.000			-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	61 Satuan Pendidikan	56.783.457.344	61	13.245.220.000	61	13.078.270.000	61	622.340.612	100,00	4,758585134	122	13.867.560.612	200,00	24,42		
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	480 Orang	922.000.000		-	122	50.000.000			-	0	-	-	-	-		
												0						
1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang									0						
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	780.548.800	3	187.637.200					-	0	3	187.637.200	25,00	25,00		

1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	60.800 Peserta Didik	7.828.094.000		-	432	119.824.000			-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang	2.483.000.000		-					-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang				224	199.147.500			-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	26.378 Paket	16.535.779.779	2.887	1.536.271.600	6.187	1.220.373.800			-	0	5.887	1.536.271.600	22,32	9,13		
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	2.822.000.000	5	358.459.000		345.000.000			-	0	5	358.459.000	50,00	12,70		
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun**	47 Unit	**36.723.515.500**	4	**5.797.760.900**		**5.466.736.000**		**196.059.500**	-	**3,592983068**	4	**5.993.820.500**	**8,51**	**16,32**		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	34 Unit		6		4			-	-	-	6	-	**17,65**	-		
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	22 Unit				3			-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Ruang								-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	30 Paket		6						-	-	6	-	**20,00**	-		
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	48 Paket				2				-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	8 Paket		2						-	-	2		**25,00**			
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19.200 Peserta Didik		4.800						-	-	**4.800**	-	**25,00**	-		
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1.200 Peserta Didik								-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	560 Orang		140		374			-	-	-	**140**	-	**25,00**	-		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.536 Orang								-	-	-	-	-	-		
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	404 Satuan Pendidikan								-	-	-	-	-	-		
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	176 Satuan Pendidikan		176		176			-	-	-	**176**	-	**100,00**	-		
		dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD											**352**	-	**24,72**	-		
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	34 Unit	3.490.000.000	5	812.059.500	4	469.153.000			-	0	5	812.059.500	14,71	23,27		

1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	22 Unit	1.661.005.000	5	619.168.000	3	547.008.000	-	-	-	0	5	619.168.000	22,73	34,32		
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	1.170.000.000							-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	30 Paket	2.250.000.000	10	278.460.500					-	-	10	278.460.500	33,33	12,38		
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	48 Paket	1.261.500.000			2	30.060.000			-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	22.240 Peserta Didik	1.132.000.000	5.560	281.120.000					-	-	5.560	281.120.000	25,00	24,83		
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0 Paket								-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belaja	1.200 Peserta Didik	220.000.000							-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.03.0014	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	- Satuan Pendidikan								-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	560 Orang		133	298.892.900	374	792.000.000	-	-	-	-	133	298.892.900	23,75	-		
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1536 Orang	500.000.000	-	-					-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	404 Paket	1.000.000.000	-	-					-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	176 Satuan Pendidikan	16.075.444.000	176	3.307.420.000	176	3.021.330.000	176	196.059.600	100,00	6,489181917	352	3.503.479.600	200,00	21,79		
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.424 Orang	283.500.000	-	-	350	32.460.000	-	-	-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	4 Dokumen	100.000.000	1	15.645.000	1	107.785.000	-	-	-	0	1	15.645.000	25,00	15,65		
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	47 Unit	3.995.000.000							-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan ruang kelas baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	-	-	-	1	252.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-		
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Siswa Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	8 Paket	740.000.000	2	184.995.000	2	185.000.000	-	-	-	0	2	184.995.000	25,00	25,00		
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun**	**4 Unit**	**11.496.380.000**		**2.108.740.100**		**2.214.424.200**		**27.066.000**	-	**1,22**	-	**2.136.806.100**	-	**18,58**		
		Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/ Berat																
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		2						-	-	2	-	40,00	-		

		Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	12 Paket									-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	**8 Paket**									-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	**8 Paket**									-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	7800 Peserta Didik		615							-	-	**615**	-	**7,88**	-		
		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	**24 Satuan Pendidikan**		6							-	-	6	-	25,00			
		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	**48 Satuan Pendidikan**		12							-	-	**12**	-	**25,00**	-		
		Jumlah Tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam mengelola Dana BOP pada Sekolah Non Formal/Kesetaraan	**120 Orang**		30							-	-	**30**	-	**25,00**	-		
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	1.000.000.000	-	0						-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.04.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit		-	0						-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.04.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Unit	935.000.000		0						-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.04.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	425.000.000	-	0						-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.04.0005	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		-	0						-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.04.0006	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		-	0						-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.04.0007	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	12 Unit	900.000.000	-	0						-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.04.0008	Pengadaan Alat Rumah [illegible]	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non [illegible]	Paket		-	0						-	-	-	-	-	-		
1.01.02.2.04.0009	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	[illegible]																
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		-	0			780.430.200			-	-	-	-	-	-		

1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	8 Unit	960.000.000	-	0					-	-	-	-	-				
1.01.02.2.04.0012	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	7.800 Peserta Didik	1.261.540.000	615						-	-	615	-	7,88	-			
1.01.02.2.04.0013	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	12 Satuan Pendidikan	-	12	990.430.100					-	-	12	990.430.100	100,00				
1.01.02.2.04.0014	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	-	-						-	-	-	-	-	-			
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- Orang	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	48 Satuan Pendidikan	2.080.000.000	-	-	12	224.694.000			-	0	-	-	-	-			
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	48 Satuan Pendidikan	3.054.840.000	11	1.118.310.000	12	1.153.144.000	12	27.066.000	100,00	2,347148318	23	1.146.376.000	47,92	37,49			
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	120 Orang	80.000.000	30	-	24	14.349.000			-	0	30	-	25,00	-			
1.01.02.2.04.0019	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	- Ruang	-	-						-	-	-	-	-	-			
1.01.02.2.04.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Ruang	-	-						-	-	-	-	-	-			
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen				1	41.807.000			-	0	-	-	-	-			
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	- Peserta Didik	-	-						-	-	-	-	-	-			
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan**	**3 Mata Pelajaran**	**1.836.084.000**	-	0	2	26.359.000	-	-	-	0	-	-	-	-			
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	**2.205 Orang**	**1.600.000.000**	-	0	-	0			-	-	-	-	-	-			
		Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya															

1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**	**Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun**	4 Dokumen	236.084.000	-		1	26.359.000				0	-	-	-	-		
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	236.084.000	-		1	26.359.000	-	-	-	0	-	-	-	-		
1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**Jumlah bahasa dan sastra yang terlestarikan**	10 sastra	**3.725.000.000**	-	10												
1.01.06.2.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun**	**4 Dokumen**				1					-	-	-	-	-		
1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	4 Dokumen	500.000.000	-		1	60.209.000				0	-	-	-	-		
2	**Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait pelayanan dasar**																	
2.22	**Urusan pemerintahan bidang kebudayaan**			**33.168.173.000**		**1.801.823.300**		**1.502.604.100**				-	-	**1.801.823.300**	-	**5,43**		
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan Dan ditetapkan sebagai WBTB**	**18 WBTB**	**14.625.000.000**	10	1.204.542.000		592.347.000				-	10	**1.204.542.000**	**55,56**	**8,24**		
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan**	**48 Objek**	**3.625.000.000**	12	**88.546.000**		-				-	12	**88.546.000**	**25,00**	**2,44**		
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	**400 Orang**									-	-	-	-	-		
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	48 Objek	1.900.000.000	4	88.546.000		-	-	-	-	-	4	**88.546.000**	**8,33**	**4,66**		
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata kebudayaan	400 Orang	1.725.000.000	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**	**Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan**	**20 Objek**	**6.150.000.000**	5	**47.347.000**	-	**47.347.000**	-	-	-	-	5	**47.347.000**	**25,00**	**0,77**		
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	12 Laporan															

			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	**20 Sertifikat**		5						-		5		25,00	-		
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	20 Objek	950.000.000	-						-	-	-	-	-	-		
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	12 Laporan	4.000.000.000	1	47.347.000	25	47.347.000			-	0	1	47.347.000	8,33	1,03		
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan**	**20 Objek**	**4.850.000.000**	-	**1.058.649.000**	-	**545.000.000**			-	-	-	**1.058.649.000**	-	**21,83**		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	**300 Orang**	-							-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	**32 Unit**		6						-	-	**6**	-	**18,75**	-		
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	20 Objek	950.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	300 Orang	1.350.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	32 Unit	2.550.000.000	6	1.058.649.000	12	545.000.000			-	-	**6**	**1.058.649.000**	**18,75**	**41,52**		
	2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan**	**75 Orang**	**7.725.000.000**	50	393.758.000	18	323.850.000	18	-	**100,00**	0	**68**	**393.758.000**	**90,67**	**5,10**		
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)**	**188 Orang**	**7.725.000.000**	18	393.758.000	18	323.850.000		-	-	0	**18**	**393.758.000**	**9,57**	**5,10**		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang	**34 Lembaga**		34					-	-	-	**34**	-	**100,00**	-		
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	188 Orang	2.000.000.000	18	206.350.000		161.350.000		-	-		18	206.350.000	9,57	5,10		

2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	34 Lembaga	3.725.000.000	34	187.408.000	34	162.500.000	-	-	-	-	34	187.408.000	100,00	3,27							
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah terbinanya sumber daya manusia terhadap data dan informasi sejarah**	**75 Orang**	**2.190.000.000**	-	-		-					-	-	-	-						
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sumber Daya** Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi **yang Diberdayakan**	**550 Orang**	**2.190.000.000**	-	-		-		-			-	-	-	-						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	**15 Unit**																			
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	**18 Dokumen**																			
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	550 Orang	850.000.000	-	-		-		-			-	-	-	-						
2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	15 Unit	750.000.000	-	-		-		-			-	-	-	-						
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	18 Dokumen	590.000.000	-	-		-		-			-	-	-	-						
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan**	**22 Cagar Budaya**	**6.700.000.000**	19	**203.523.300**		**200.772.500**	-	-	-		**0**	**19**	**203.523.300**	**86,36**	**3,04**						
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan**	**400 Objek**	**2.500.000.000**	100	**127.596.500**		**124.846.100**	-	-	-		**0**	**100**	**127.596.500**	**25,00**	**5,10**						
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	**18 Objek**		3								-	3	-	16,67	-						
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	400 Objek	1.300.000.000	50	60.392.700	100	57.644.800	-	-	-		**0**	**50**	**60.392.700**	**12,50**	**4,65**						
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	18 Objek	1.200.000.000	3	67.203.800	5	67.201.300	-	-	-		**0**	**3**	**67.203.800**	**16,67**	**5,60**						
													-	-	-	-	-						
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi**	**80 Objek**	**4.200.000.000**	19	**75.926.800**		**75.926.400**	-	-	-		**0**	**19**	**75.926.800**	**23,75**	**1,81**						
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	**20 Objek**		10								-	10	-	50,00	-						
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	**14 Objek**										-	-	-	-	-						
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	80 Objek	1.545.000.000	7	75.926.800		75.926.400	-	-	-		-	**7**	**75.926.800**	**8,75**	**4,91**						
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	20 Objek	1.155.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	14 Objek	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	UPT LAMBAN PANCASILA			**1.928.173.000**				**385.634.600**															
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG**			**1.928.173.000**				385.634.600															
	KABUPATEN/KOTA																						
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum** Perangkat Daerah	**Jumlah Paket Komponen** Instalasi Listrik/Penerangan **Bangunan Kantor yang Disediakan**	**21 paket**	**260.753.000**																			
		Jumlah Paket Peralatan **dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	135 paket																				

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**15 paket**							-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**36 Laporan**							-	-	-	-	-	-		
	1.01.01,2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 paket	24.000.000			7	4.800.000	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	
	1.01.01,2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135 paket	99.833.000			45	19.966.600	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	
	1.01.01,2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	40.300.000			5	8.060.000			-	0	-	-	-	-	-	
	1.01.01,2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	96.570.000			12	19.314.000	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	
	1.01.01,2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	30 Unit	707.500.000		-		141.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.01.01,2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	30 Unit	707.500.000		-	6	141.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.01.01,2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	36 **laporan**	**835.800.000**		-		**167.160.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan								-	-	-	-	-	-		
	1.01.01,2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	375.000.000		-	12	75.000.000	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	
	1.01.01,2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	460.800.000		-	12	92.160.000	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	
	1.01.01,2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi**	**unit**	**124.120.000**		-		**24.824.000**		-	-	**0**	-	-	-	-	-	
	1.01.01,2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	124.120.000		-	1	24.824.000	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	

Barat, 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Barat

PERSIAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**333.038.868.200,00**							**377.337.271.490,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**329.457.826.700,00**							**369.012.271.490,00**	
	-	-						**329.457.826.700,00**							**369.012.271.490,00**	
1	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-			-	**97.489.528.900,00**						-	**90.611.486.703,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	53.580.351.400,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	47.430.791.218,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	1.065.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	620.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM	-		360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	1.300.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang				6 Unit	1.190.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua	DANA TRANSFER	-	Peningkatan	-		870.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
										FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD		kualitas Sumberdaya Manusia				
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	675.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		655.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	100.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				13 Unit	640.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				8 Paket	1.508.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				615 Peserta Didik	171.456.400,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		182.611.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan				711 Orang	2.046.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		2.212.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perididik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				179 Orang	124.174.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				247 Satuan Pendidikan	63.486.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				216 Satuan Pendidikan	26.179.080.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		28.935.513.858,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				432 Orang	123.611.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				7 Ruang	1.005.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Pendidikan				1 Dokumen	91.262.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua	DANA TRANSFER	-	Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				41 Komunitas	124.017.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				7199 Paket	3.848.115.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		4.224.976.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	900.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	384.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				500 Orang	727.238.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan				247 Satuan Pendidikan	154.912.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua	DANA TRANSFER	-	Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	7.000.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				31000 Peserta Didik	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.515.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				26 Paket	3.240.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	31.385.507.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	28.533.813.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	750.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				8 Ruang	1.100.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	900.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	180.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	2.300.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	1.888.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	720.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	848.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua	DAK FISIK-BIDANG P	-	Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia	-		472.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	480.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		468.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				6 Paket	729.120.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				747 Peserta Didik	190.057.700,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		178.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				387 Orang	1.479.739.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				180 Orang	69.606.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pengawasan				61 Satuan Pendidikan	44.656.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				61 Satuan Pendidikan	13.078.270.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		14.524.813.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				120 Orang	98.048.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	38.877.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	67.053.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				61 Satuan Pendidikan	45.965.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	700.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOS REGULER SMP	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				200 Orang	272.538.300,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				6877 Paket	4.061.877.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	736.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		566.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	607.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	10.227.218.500,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	9.786.882.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				10 Unit	2.350.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG P	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Su	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				10 Paket	1.000.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5560 Peserta Didik	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				140 Orang	786.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		780.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				176 Satuan Pendidikan	44.846.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				176 Satuan Pendidikan	3.021.392.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		4.116.882.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana				352 Orang	32.460.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				188 Orang	42.219.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	64.202.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	106.827.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				6 Ruang	166.600.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	1.275.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi Tingkat Akademik				150 Peserta didik	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua	DANA TRANSFER	-	Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia	-		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				164 Orang	254.992.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	200.250.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				5 Paket	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				176 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah				2 Ruang	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua	DAK FISIK-BIDANG P		Peningkatan kualitas			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												kualitas Sumberdaya Manusia				
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	882.430.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	2.296.452.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	4.860.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1435 Peserta Didik	824.470.200,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	240.061.800,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				12 Satuan Pendidikan	1.165.144.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah				30 Orang	15.174.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	51.602.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				1 unit	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	-	-			-	**22.885.000,00**						-	**190.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	0,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				500 Orang	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-			-	22.885.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	22.885.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	-	-			-	**93.278.000,00**						-	**1.120.000.000,00**	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	93.278.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	1.120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota														
			Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun				0 Kamus	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi				1 Bahasa	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota														
			Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Publikasi	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan				3 Orang	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi				4 Buku	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Peserta Didik	93.278.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**231.852.134.800,00**						-	**277.090.784.787,00**	
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	34.775.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	34.775.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Perencanaan	-	-			-	41.727.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.125.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.144.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.515.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.328.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12.509.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	231.251.803.500,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	275.922.152.887,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2161/12 Orang/bulan	231.231.862.700,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		275.891.452.887,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.736.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	5.729.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				5 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				29 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		18.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.474.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	17.536.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2.536.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	15.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	191.696.900,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	317.873.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3.736.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	24.558.300,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	68.869.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.060.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.160.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	87.313.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		168.373.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.426.000,00				Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	25.426.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	108.370.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	333.458.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.330.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.769.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	72.360.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		118.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	34.680.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		213.689.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	180.800.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				43 Unit	170.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	41.727.400,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	20.106.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.581.041.500,00**							**8.325.000.000,00**	
	-	-						**3.581.041.500,00**							8.325.000.000,00	
1	2.22.02	PROGRAM	-	-												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	104.366.500,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				12 Objek	104.366.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	328.351.500,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	249.972.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				3 Laporan	78.379.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				5 Sertifikat	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	700.000.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				100 Orang	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				8 Unit	700.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	-	-			-	**1.652.606.000,00**						-	**2.050.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.652.606.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	2.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				32 Orang	199.449.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				34 Lembaga	1.453.157.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	-	-			-	**37.753.500,00**						-	**625.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	37.753.500,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				150 Orang	37.759.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				4 Unit	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				5 Dokumen	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	-	-			-	**757.964.000,00**						-	**1.700.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						964.127.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				20 Objek	193.397.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	170.730.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	393.837.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				7 Objek	164.921.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				4 Objek	112.660.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				3 Objek	116.955.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)						**2.126.804.990,00**							**3.091.968.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.126.804.990,00**							**3.091.968.000,00**	
	-	-						**2.126.804.990,00**							**3.091.968.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**1.315.000.000,00**						-	**1.860.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.315.000.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	1.860.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				9 Objek	1.315.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		1.300.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Tatanan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				600 Orang	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		560.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
2	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**811.804.990,00**						-	**1.231.968.000,00**	
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	169.160.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	294.320.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	104.160.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		184.320.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			110.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	230.970.120,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	436.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	21.410.120,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		250.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	209.560.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			186.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	158.763.150,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	362.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	47.490.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		57.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	22.760.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya			23.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	9.690.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		28.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	63.209.800,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		190.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	252.911.720,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	139.648.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	248.668.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		89.648.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	158.763.150,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	362.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	15.613.350,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		64.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	252.911.720,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	139.648.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4.243.720,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		50.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	JUMLAH							**335.165.673.190,00**							**380.429.239.490,00**	

PERSIAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA) KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)						**2.126.804.990,00**							**3.091.968.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.126.804.990,00**							**3.091.968.000,00**	
	-	-						**2.126.804.990,00**							**3.091.968.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	-	-			-	**1.315.000.000,00**						-	**1.860.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.315.000.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	1.860.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				9 Objek	1.315.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		1.300.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				600 Orang	0,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		560.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	811.804.990,00						-	**1.231.968.000,00**	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	158.763.150,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	362.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	9.690.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		28.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	22.760.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		23.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	47.490.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		57.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	230.970.120,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	436.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	209.560.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		186.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	158.763.150,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat Aman dan Berbudaya	-		362.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	15.613.350,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		64.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	169.160.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	294.320.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		110.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	104.160.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		184.320.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	252.911.720,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	139.648.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4.243.720,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		50.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	249.665.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		89.648.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	230.970.120,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-	-	436.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	21.410.120,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		250.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	158.763.150,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya	-	-	362.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlongkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	63.209.800,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	-		190.000.000,00	UPT GEDUNG BUDAYA (LAMBAN PANCASILA)
	JUMLAH							**2.126.804.990,00**							**3.091.968.000,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

RENCANA KERJA
RENJA 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat

Jl. Tulip No. 2 Way Mengaku Liwa

Telp. (0728) 21164
Fax (0728) 21164

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang merupakan implementasi tahunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai arti strategis karena Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah setiap tahun. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraaan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Liwa, Januari 2024

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KESBANG DAN POLITIK

BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 197109241998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... *i*

DAFTAR ISI..... *ii*

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

1.4. Sistematikan Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 8

2.3. Isu-isu penting penyelengaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 10

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 11

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 15

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 15

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 16

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 18

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23

4.1. Rencana Kerja 23

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah..... 28

BAB V PENUTUP 29

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis PD. Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Renja-PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan rencana tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2023 – 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan perubahan regulasi serta dinamika dan perubahan yang terus berkembang di Kabupaten Lampung Barat. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah, Namun pada sisi lain sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan.

Permasalahan yang menjadi isu strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat seperti :

1. Masuknya era globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, suhu politik di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik akan meningkat sehingga rentan terjadinya konflik/benturan-benturan antar kelompok masyarakat.
3. Semakin meningkatnya kesadaran mayarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
4. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab.

Terkait isu-isu strategis tersebut, maka diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Khususnya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA)-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Rencana Kerja (RENJA)-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini merupakan dokumen perencanaan untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 telah ditetapkan kinerja yang akan dicapai untuk seluruh indikator kinerja juga ditetapkan nilai kuantitatif yang dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pada akhir periode pelaksanaannya. Rencana Kerja menjelaskan berkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
13. Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan pada penjabaran program yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan yang bersumber dari berbagai aspirasi yang ada.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis 4 (empat) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja ini adalah :

a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.
b. Menetapkan indikator kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja OPD agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.
c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Lampung Barat;

d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun ke dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 6 program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 12 kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 44 sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja Daerah sebesar Rp. 20.415.907.930,- terealisasi sebesar Rp. 20.093.282.352,- atau 98,42 persen.

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran 2023 secara umum telah realisasi fisiknya mencapai 100 persen dan rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 98.49 persen.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja perangkat daerah. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator–indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing–masing kelompok indikator kinerja, dan tingkat pencapaian sasaran instansi yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing–masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Kriteria Capaian hasil Pengukuran Kinerja dengan klarifikasi/rentang dapat terlihat dalam table sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	85% - > 100%	Sangat Berhasil
2	70% - 85%	Berhasil
3	55 % - 70 %	Cukup Berhasil
4	< 55 %	Tidak Berhasil

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dapat terlihat dalam tableberikut ini :

Tabel A.1

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET	REALISASI BERDASARKAN KONDISI REAL
1	Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Konflik SARA	Persentase potensi konflik SARA tidak menjadi peristiwa konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat	Jumlah potensi konflik SARA yang tidak menjadi peristiwa konflik SARA / Jumlah Potensi Konflik SARA x 100%	100%	100%
2	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase lembaga dan ormas aktiv dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang aktiv / Jumlah Ormas Yang Ada di Kabupaten Lampung Barat x 100%	5.26%	6.42%

Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat dikategorikan “Baik”. Dengan demikian diharapkan di masa yang akan datang semua kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan unsur-unsur efektif dan efisien.

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat masih difokuskan pada terciptanya kondusivitas wilayah yang tentram, aman dan tertib pasca pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat melalui pendidikan

politik masyarakat mengingat situasi pasca pelaksaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dapat berpotensi menimbukan kondisi perpecahan dilingkungan masyarakat sebagai akibat dari perbedaan pandangan politik dan perbedaan pilhan pada saat pelakasaan pemilihan tersebut, disamping itu penguatan karakter melalui pendidikan wawasan kebangsaan dan Bela Negara sebagai mandatori kegiatan dari pemerintah pusat akan tetap dilaksanakan sehingga dapat berkontribusi positif terhadap persatuan dan kesatuan wilayah sebagai bagian dari NKRI.

Berpedoman pada isu strategis yang terurai dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Masuknya era globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Memelihara kondusivitas wilayah yang tentram, aman dan tertib pasca pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati yang berpotensi meningkatkan suhu politik di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik sehingga rentan terjadinya konflik/benturan-benturan antar kelompok masyarakat.
3. Memelihara dan meningkatnya kesadaran mayarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
4. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 telah dilakukan reviu terhadap Rancangan Awal RKPD. Hal tersebut dilaksanakan agar Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang telah disusun selaras dengan Rancangan RKPD. Reviu dilaksanakan penyelarasan Tujuan, Sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat :
   "Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat"
   Indicator Tujuan : Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama

2. Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat :
   - **Sasaran 1 :** Menurunnya Konflik SARA.
     Indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Pengurangan Konflik SARA, target tahun 2024 sebesar 100%

     Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran tersebut menggunakan formulasi penghitungan yaitu :

     $$\frac{\textit{Jumlah potensi konflik SARA yang tidak menjadi peristiwa konflik SARA x 100\%}}{\textit{Jumlah Potensi Konflik SARA}}$$

   - **Sasaran 2 : Meningkatnya kesadaran politik masyarakat**
     Dengan indicator :
     1) Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi, target pada tahun 2025 sebesar - %.
        Adapun formulasi penghitungan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran adalah :

Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pesta Demokrasi x 100%
Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih

2) Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah, target tahun 2025 sebesar 5,82%

Adapun formulasi penghitungan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran adalah :

Jumlah Ormas yang aktiv x 100%
Jumlah Ormas Yang Ada
di Kabupaten Lampung Barat

Berikut Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat :

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25 %	3.126.067.900,-	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25 %	3.126.067.900,-	
2	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Lampung Barat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap idiologi dan wawasan kebangsaan	85 %	1.925.610.000,-	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Lampung Barat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap idiologi dan wawasan kebangsaan	85 %	1.925.610.000,-	
3	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Lampung Barat	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	70 %	1.738.212.500,-	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Lampung Barat	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	70 %	1.738.212.500,-	
4	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Lampung Barat	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktiv	65 %	695,450.000,-	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Lampung Barat	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktiv	65 %	695,450.000,-	
5	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Lampung Barat	Persentase menurunya kasus penyakit masyarakat	71 %	1.566.950.000,-	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Lampung Barat	Persentase menurunya kasus penyakit masyarakat	71 %	1.566.950.000,-	
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Lampung Barat	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	1,960,200,000,-	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Lampung Barat	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	1,960,200,000,-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lampung Barat. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tingkat kecamatan diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat tidak terdapat usulan program kegiatan dari masyarakat yang masuk dan perlu tindak lanjut dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati Lampung Barat dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Lampung Barat agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur keseluruhan sistem perencanaan pembangunan maka perencanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen yang berkesinambungan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah, maupun pendek atau tahunan. Secara makro, kinerja pembangunan nasional dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu : (i) pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi; (ii) peningkatan kesejahteraan rakyat; (iii) pengurangan kemiskinan; (iv) pengurangan tingkat kesenjangan antar daerah; (v) peningkatan kualitas hidup rakyat, khususnya pendidikan dan kesehatan; (vi) perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sedangkan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religious, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam kaitan penetapan tujuan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berlandaskan tujuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat yaitu Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya, Aman dan Damai, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menetapkan tujuan perangkat daerah sebagai berikut : ” Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat” dengan indikator Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Sedangkan yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu tahun 2022 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Menurunnya Konflik SARA.

Indikator : Persentase Pengurangan Konflik SARA.

Dengan target pada tahun 2025 sebesar 100%. .

Sasaran 2 : Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

Indikator : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.
Dengan target pada tahun 2024 sebesar - %.

2. Persentase lembaga dan ormas aktiv dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan.
Dengan target pada tahun 2024 sebesar 5,82 %.

Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten lampung Barat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	Sangat Baik (84,5)	Sangat Baik (84,10)	Sangat Baik (84,15)	Sangat Baik (84,20)

Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi		86%		
			Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5,26%	5,54%	5.82%	6,09%

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 antara lain :

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM : PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan :
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kerakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
4. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.
5. Pembentukan Paskibra

PROGRAM : PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

PROGRAM : **PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

Kegiatan : **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.**

Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

PROGRAM : **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.**

Kegiatan : **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.**

Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

PROGRAM : **PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.**

Kegiatan : **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.**

Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan pada penjabarannya dilakukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi perangkat daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah (sekda).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 yang disusun berdasarkan ketentuan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan

dan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah yang direncanakan akan melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan dengan detail rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut :

DETAIL SUB KEGIATAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	DETAIL KHUSUS SUBKEGIATAN TAHUN 2025
1	*2*	*3*
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
8.01.01.1.01	**Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2026
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2026
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2025
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2026
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2025
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2025
8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2025 sejumlah 16 orang
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
8.01.01.1.05.09	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dalam rangka pengelolaan dan penyusunan kebutuhan barang milik daerah yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat

1	2	3
8.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Untuk kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang ada dilingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2025
8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2024
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol

1	2	3
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kerakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara i dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Kec. Lumbok, Way Tenong, Kebun Tebu, Air Hitam
		Pembinaan dan Pemantapan idiologi pancasila dilakukan terhadap 270 orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon, di empat kecamatan yaitu : Air Hitam, BNS, Suoh, Lumbok Seminung
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang)
		Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit
		Diklat Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kecamatan Balik Bukit
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kegiatan ini merupakan sosialisasi terkait kepaskibraan ke sekolah tingkat SLTA serta pembinaan kepada para purnapaskibra Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Kegiatan ini merupakan seleksi dan pembentukan Paskibraka tingkat Kabupaten Lampung Barat dan seleksi peserta untuk ikut seleksi anggota paskibra tingkat Provinsi dan tingkat pusat serta penyediaan perlengkapan untuk pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada saat peringatan HUT kemerdekaan RI.

1	2	3
8.01.03	**PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada pengurus partai politik yang ada diwilayah Kabupaten Lampung Barat - Melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang politik di seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Lampung Barat..
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan berupa pemberian dana hibah kepada Partai Politik yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Lampung Barat dan Hiabah kepada lembaga penyelenggara/pengawas pemilu/pilkada
8.01.04	**PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan buku data base bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan pemberian dana hibah kepada LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kepada Ormas/LSM/Masjid/Lembaga Pendidikan Swasta yang telah memiliki Surat Tanda Lapor Keberadaan di Kabupaten Lampung Barat
8.01.05	**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	

1	2	3
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan dilaksanakan dalam bentuk kajian akademik dan pemetaan P4GN di Lampung Barat
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksnakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta
		Promosi Budaya dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi dianjungan Lampung TMII Jakarta
		Pagelaran seni dan budaya alam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi dianjungan Lampung TMII Jakarta
		Pembinaan Desa Bersinar (Desa bersih Narkoba) dilakukan terhadap 1 Pekon yang ditunjuk di Lampung Barat, dan 30 Kader P4GN Pekon yang ditunjuk. Pembinaan Desa Bersinar dilakukan selama 13 Bulan
		Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu : di Kec. Sumber Jaya, Kec. Way Tenong, Kec. Suoh, Kec. Belalau dan Kec. Sukau. Peserta sosialisasi sebanyak 500 Orang
		Deteksi dini penyalahgunaan narkotika (Tes Urine) dilaksanakan sekali dalam setahun dengan sasaran 600 ASN Pemda Lampung Barat
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Deradikalisasi faham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Sukau dan Kec. Lumbok Seminung
		Sasaran pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 15 Pondok Pesantren diseluruh Kecamatan se Lampung Barat
		Rakor FKUB dilakukan sebanyak 3 kali, di Kec. Balik Bukit dengan peserta seluruh pengurus FKUB.
		Silaturahmi Lintas Agama dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit dengan sasaran 200 Orang utusan dari seluruh lima agama yang dianut penduduk Lampung Barat
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.06	**PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	

1	2	3
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Batu Brak,Sekincau, Batu Ketulis dan Pagar Dewa
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelejen Daerah, Intelejen Kejari Liwa, Intelejen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelejen Polres Lampung Barat
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh usur Fokompimda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan Agama Lampung Barat

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis.

Dana indikatif yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 10.976.490.400,-** (*sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah*). Rencana dana indikatif tersebut dialokasikan untuk membiayai 6 program, 13 kegiatan dan 47 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa, Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197109241998031005

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPD (RENSTRA) Sampai Dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (RENJA) Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (RENJA) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (RENJA) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (RENJA) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (RENSTRA) s.d. Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9 = (8 /7 x 100%)*		*10 = (6 + 8)*		*11 = (10/5 x 100)*		*11*	*12*
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			40,897,065,938		20,093,282,352		30,848,149,719		30,848,149,719				50,941,432,071				
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,45 %	12,029,703,632	73 %	1,764,781,418	76.05 %	1,992,246,000	76.05 %	1,992,246,000	100.00	100.00	75,85 %	3,757,027,418	100.00	31.23	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	31,243,500	11 Dokumen	4,024,000	11 Dokumen	3,884,000	11 Dokumen	3,884,000	100.00	100.00	22 Dokumen	7,908,000	57.89	25.31	Badan Kesbangpol	
		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	19 Dokumen	100,709,700	4 Dokumen	13,320,000	5 Dokumen	15,307,000	5 Dokumen	15,307,000	100.00	100.00	9 Dokumen	28,627,000	47.37	28.43		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Dokumen	118,345,500	14 Dokumen	5,638,000	12 Dokumen	5,664,800	12 Dokumen	5,664,800	100.00	100.00	26 Dokumen	11,302,800	52.00	9.55		
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	31,243,500	11 Dokumen	4,024,000	11 Dokumen	3,884,000	11 Dokumen	3,884,000	100.00	100.00	22 Dokumen	7,908,000	57.89	25.31	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	30,166,500	1 Dokumen	2,321,000	1 Dokumen	3,057,000	1 Dokumen	3,057,000	100.00	100.00	2 Dokumen	5,378,000	50.00	17.83	Badan Kesbangpol	

8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	23,205,000	1 Dokumen	2,340,000	1 Dokumen	2,577,000	1 Dokumen	2,577,000	100.00	100.00	2 Dokumen	4,917,000	50.00	21.19	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	20,884,500	1 Dokumen	2,840,000	1 Dokumen	3,078,000	1 Dokumen	3,078,000	100.00	100.00	2 Dokumen	5,918,000	50.00	28.34	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokume Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	26,453,700	1 Dokumen	2,616,000	1 Dokumen	3,068,000	1 Dokumen	3,068,000	100.00	100.00	2 Dokumen	5,684,000	50.00	21.49	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	25,525,500	2 laporan	3,203,000	2 laporan	3,527,000	2 laporan	3,527,000	100.00	100.00	4 laporan	6,730,000	50.00	26.37	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah	48 laporan	92,820,000	12 laporan	5,638,000	12 laporan	5,664,800	12 laporan	5,664,800	100.00	100.00	24 laporan	11,302,800	50.00	12.18	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	56 **Orang/ Bulan**	**8,353,800,000**	**14 Orang/ Bulan**	**1,474,631,523**	**14 Orang/ Bulan**	**1,641,969,700**	**14 Orang/ Bulan**	**1,641,969,700**	**100.00**	**100.00**	**28 Orang/ Bulan**	**3,116,601,223**	**50.00**	**37.31**	**Badan Kesbangpol**	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 **Dokumen**	**16,243,500**	**1 Dokumen**	**2,206,000**	**1 Dokumen**	**2,542,000**	**1 Dokumen**	**2,542,000**	**100.00**	**100.00**	**2 Dokumen**	**4,748,000**	**50.00**	**29.23**	**Badan Kesbangpol**	

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 **Dokumen**	**19,492,200**	**2 Dokumen**	**3,631,000**	**2 Dokumen**	**3,563,000**	**2 Dokumen**	**3,563,000**	**100.00**	**100.00**	**4 Dokumen**	**7,194,000**	**50.00**	**36.91**	**Badan Kesbangpol**	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 **Dokumen**	**37,128,000**	**2 Dokumen**	**4,448,000**	**2 Dokumen**	**2,494,000**	**2 Dokumen**	**2,494,000**	**100.00**	**100.00**	**4 Dokumen**	**6,942,000**	**50.00**	**18.70**	**Badan Kesbangpol**	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	8,353,800,000	14 Orang	1,474,631,523	14 Orang	1,641,969,700	14 Orang	1,641,969,700	100.00	100.00	28 Orang	3,116,601,223	50.00	37.31	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	16,243,500	1 Dokumen	2,206,000	1 Dokumen	2,542,000	1 Dokumen	2,542,000	100.00	100.00	2 Dokumen	4,748,000	50.00	29.23	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 Dokumen	19,492,200	2 Dokumen	3,631,000	2 Dokumen	3,563,000	2 Dokumen	3,563,000	100.00	100.00	4 Dokumen	7,194,000	50.00	36.91	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	37,128,000	2 Dokumen	4,448,000	2 Dokumen	2,494,000	2 Dokumen	2,494,000	100.00	100.00	4 Dokumen	6,942,000	50.00	18.70	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24 Dokumen**	**70,000,000**	**1 Dokumen**	**9,501,000**	**1 Dokumen**	**11,234,000**	**1 Dokumen**	**11,234,000**	**100.00**	**100.00**	**2 Dokumen**	**20,735,000**	**8.33**	**29.62**	**Badan Kesbangpol**	
8.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	9,501,000	1 Dokumen	11,234,000	1 Dokumen	11,234,000	100.00	100.00	2 Dokumen	20,735,000	8.33	29.62	Badan Kesbangpol	

8.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**4 Dokumen**	**54,541,032**	**1 Dokumen**	**10,336,000**	**1 Dokumen**	**12,872,000**	**1 Dokumen**	**12,872,000**	**100.00**	**100.00**	**2 Dokumen**	**23,208,000**	**50.00**	**42.55**	**Badan Kesbangpol**	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**24 Orang**	**70,000,000**	**0 Orang**	**-**	**- Orang**	**-**	**- Orang**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**- Orang**	**-**	**-**	**0.00**	**Badan Kesbangpol**	
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	54,541,032	1 Dokumen	10,336,000	1 Dokumen	12,872,000	1 Dokumen	12,872,000	100.00	100.00	2 Dokumen	23,208,000	50.00	42.55	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya	24 Orang	70,000,000	0 Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- Orang	-	-	0.00	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan**	**4 Paket**	**18,749,640**	**1 Paket**	**2,163,600**	**1 Paket**	**2,163,600**	**1 Paket**	**2,163,600**	**100.00**	**100.00**	**2 Paket**	**4,327,200**	**50.00**	**23.08**	**Badan Kesbangpol**	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	**8 Paket**	**116,025,000**	**2 Paket**	**12,670,000**	**2 Paket**	**12,210,000**	**2 Paket**	**12,210,000**	**100.00**	**100.00**	**4 Paket**	**24,880,000**	**50.00**	**21.44**	**Badan Kesbangpol**	
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	**28 Dokumen**	**31,465,980**	**6 Dokumen**	**5,760,000**	**7 Dokumen**	**5,760,000**	**7 Dokumen**	**5,760,000**	**100.00**	**100.00**	**13 Dokumen**	**11,520,000**	**46.43**	**36.61**	**Badan Kesbangpol**	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**4 laporan**	**31,939,362**	**1 laporan**	**3,596,000**	**1 laporan**	**3,596,000**	**1 laporan**	**3,596,000**	**100.00**	**100.00**	**2 laporan**	**7,192,000**	**50.00**	**22.52**	**Badan Kesbangpol**	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**4 laporan**	**762,507,018**	**1 laporan**	**90,560,900**	**1 laporan**	**75,530,000**	**1 laporan**	**75,530,000**	**100.00**	**100.00**	**2 laporan**	**166,090,900**	**50.00**	**21.78**	**Badan Kesbangpol**	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 Paket	18,749,640	1 Paket	2,163,600	1 Paket	2,163,600	1 Paket	2,163,600	100.00	100.00	2 Paket	4,327,200	50.00	23.08	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	8 Paket	116,025,000	2 Paket	12,670,000	2 Paket	12,210,000	2 Paket	12,210,000	100.00	100.00	4 Paket	24,880,000	50.00	21.44	Badan Kesbangpol	

8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	28 Dokumen	31,465,980	6 Dokumen	5,760,000	7 Dokumen	5,760,000	7 Dokumen	5,760,000	100.00	100.00	13 Dokumen	11,520,000	46.43	36.61	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	31,939,362	1 laporan	3,596,000	1 laporan	3,596,000	1 laporan	3,596,000	100.00	100.00	2 laporan	7,192,000	50.00	22.52	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	762,507,018	1 laporan	90,560,900	1 laporan	75,530,000	1 laporan	75,530,000	100.00	100.00	2 laporan	166,090,900	50.00	21.78	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	79 **Unit**	**835,380,000**	**0 Unit**	**-**	**9 Unit**	**55,500,000**	**9 Unit**	**55,500,000**	**100.00**	**100.00**	**9 Unit**	**55,500,000**	**11.39**	**6.64**	**Badan Kesbangpol**	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	322,595,910	Unit		- Unit	-	- Unit	-	-	0.00	- Unit	-	-	0.00	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Unit	118,809,600	Unit		8 Unit	39,500,000	8 Unit	39,500,000	100.00	100.00	8 Unit	39,500,000	22.22	33.25	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	393,974,490	Unit		1 Unit	16,000,000	1 Unit	16,000,000	100.00	100.00	1 Unit	16,000,000	2.78	4.06	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**4 laporan**	**9,282,000**	**1 laporan**	**1,700,000**	**1 laporan**	**1,800,000**	**1 laporan**	**1,800,000**	**100.00**	**100.00**	**2 laporan**	**3,500,000**	**50.00**	**37.71**	**Badan Kesbangpol**	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**4 laporan**	**76,576,500**	**1 laporan**	**11,400,535**	**1 laporan**	**15,840,000**	**1 laporan**	**15,840,000**	**100.00**	**100.00**	**2 laporan**	**27,240,535**	**50.00**	**35.57**		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**4 laporan**	**603,330,000**	**1 laporan**	**48,277,400**	**1 laporan**	**58,169,900**	**1 laporan**	**58,169,900**	**100.00**	**100.00**	**2 laporan**	**106,447,300**	**50.00**	**17.64**		
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	9,282,000	1 laporan	1,700,000	1 laporan	1,800,000	1 laporan	1,800,000	100.00	100.00	2 laporan	3,500,000	50.00	37.71	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	76,576,500	1 laporan	11,400,535	1 laporan	15,840,000	1 laporan	15,840,000	100.00	100.00	2 laporan	27,240,535	50.00	35.57	Badan Kesbangpol	

8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	603,330,000	1	laporan	48,277,400	1	laporan	58,169,900	1	laporan	58,169,900	100.00	100.00	2	laporan	106,447,300	50.00	17.64	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**48**	**Unit**	**672,944,700**	**14**	**Unit**	**60,917,460**	**12**	**Unit**	**62,146,000**	**12**	**Unit**	**62,146,000**	**100.00**	**100.00**	**26**	**Unit**	**123,063,460**	**54.17**	**18.29**	**Badan Kesbangpol**	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	442,774,605	6	Unit	46,181,710	5	Unit	45,300,000	5	Unit	45,300,000	100.00	100.00	11	Unit	91,481,710	55.00	20.66	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	44,530,095	7	Unit	6,635,750	6	Unit	6,846,500	6	Unit	6,846,500	100.00	100.00	13	Unit	13,482,250	54.17	30.28	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	185,640,000	1	Unit	8,100,000	1	Unit	9,999,500	1	Unit	9,999,500	100.00	100.00	2	Unit	18,099,500	50.00	9.75	Badan Kesbangpol	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pemahaman masyarakat terhadap idiologi dan wawasan kebangsaan**	**95**	**Persen**	**5,715,273,600**	**80**	**Persen**	**699,612,800**	**80**	**Persen**	**1,011,884,840**	**80**	**Persen**	**1,011,884,840**	**100.00**	**100.00**	**160**	**Persen**	**1,711,497,640**	**168.42**	**29.95**	**Badan Kesbangpol**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	**2000**	**Orang**	**1,038,519,000**	**50**	**Orang**	**639,835,300**	**100**	**Orang**	**62,257,000**	**100**	**Orang**	**62,257,000**	**100.00**	**100.00**	**150**	**Orang**	**702,092,300**	**7.50**	**67.61**	**Badan Kesbangpol**	

		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**1004 Orang**	**1,554,254,600**	**80 Orang**	**59,777,500**	**100 Orang**	**56,417,000**	**100 Orang**	**56,417,000**	**100.00**	**100.00**	**180 Orang**	**116,194,500**	**17.93**	**7.48**		
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**16 laporan**	**122,500,000**	**0 laporan**	**-**	**- laporan**	**-**	**- laporan**	**-**	**0.00**	**0.00**	**- laporan**	**-**	**-**	**0.00**		
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	**3 Dokumen**	**750,000,000**	**0 Dokumen**	**-**	**1 Dokumen**	**193,897,000**	**1 Dokumen**	**193,897,000**	**100.00**	**100.00**	**1 Dokumen**	**193,897,000**	**33.33**	**25.85**		
		Jumlah Paskibra	**150 Orang**	**2,250,000,000**	**0 Orang**	**-**	**50 Orang**	**699,313,840**	**50 Orang**	**699,313,840**	**100.00**	**100.00**	**50 Orang**	**699,313,840**	**33.33**	**31.08**		
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kerakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 Orang	1,038,519,000	50 Orang	639,835,300	100 Orang	62,257,000	100 Orang	62,257,000	100.00	100.00	150 Orang	702,092,300	7.50	67.61	Badan Kesbangpol	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1004 Orang	1,554,254,600	80 Orang	59,777,500	100 Orang	56,417,000	100 Orang	56,417,000	100.00	100.00	180 Orang	116,194,500	17.93	7.48	Badan Kesbangpol	

8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 laporan	122,500,000	0 laporan	-	- laporan	-	- laporan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- laporan	-	-	0.00	Badan Kesbangpol	
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Dokumen	750,000,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	193,897,000	1 Dokumen	193,897,000	100.00	100.00	1 Dokumen	193,897,000	33.33	25.85	Badan Kesbangpol	
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibra	150 Orang	2,250,000,000	0 Orang	-	50 Orang	699,313,840	50 Orang	699,313,840	100.00	100.00	50 Orang	699,313,840	33.33	31.08	Badan Kesbangpol	
8.01.03	**PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat**	**72 Persen**	**7,270,588,250**	**69 Persen**	**15,648,700,519**	**69 Persen**	**23,039,839,829**	**69 Persen**	**23,039,839,829**	**100.00**	**100.00**	**138 Persen**	**38,688,540,348**	**191.67**	**532.12**	**Badan Kesbangpol**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**1982 Orang**	**1,153,725,000**	**212 Orang**	**166,949,200**	**213 Orang**	**400,000,000**	**213 Orang**	**400,000,000**	**100.00**	**100.00**	**425 Orang**	**566,949,200**	**21.44**	**49.14**	**Badan Kesbangpol**	

		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1880 Orang	1,544,067,500	210 Orang	177,763,250	160 Orang	102,547,500	160 Orang	102,547,500	100.00	100.00	370 Orang	280,310,750	19.68	18.15	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Laporan	4,572,795,750	10 Laporan	15,303,988,069	10 Laporan	22,537,292,329	10 Laporan	22,537,292,329	100.00	100.00	20 Laporan	37,841,280,398	50.00	827.53	Badan Kesbangpol	

8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1982 Orang	1,153,725,000	212 Orang	166,949,200	213 Orang	400,000,000	213 Orang	400,000,000	**100.00**	**100.00**	**425** Orang	**566,949,200**	**21.44**	**49.14**	Badan Kesbangpol	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1880 Orang	1,544,067,500	210 Orang	177,763,250	160 Orang	102,547,500	160 Orang	102,547,500	100.00	100.00	370 Orang	280,310,750	19.68	18.15	Badan Kesbangpol	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Laporan	4,572,795,750	10 Laporan	15,303,988,069	10 Laporan	22,537,292,329	10 Laporan	22,537,292,329	100.00	100.00	20 Laporan	37,841,280,398	50.00	827.53	Badan Kesbangpol	

8.01.04	**PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktiv**	**70 Persen**	**2,559,905,456**	**55 Persen**	**467,278,250**	**55 Persen**	**457,042,000**	**55 Persen**	**457,042,000**	**100.00**	**100.00**	**110 Persen**	**924,320,250**	**157.14**	**36.11**	**Badan Kesbangpol**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun**	**4 Dokumen**	**546,978,978**	**1 Dokumen**	**24,418,750**	**1 Dokumen**	**29,055,000**	**1 Dokumen**	**29,055,000**	**100.00**	**100.00**	**2 Dokumen**	**53,473,750**	**50.00**	**9.78**	**Badan Kesbangpol**	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**540 Orang**	**1,644,575,478**	**116 Orang**	**442,859,500**	**60 Orang**	**427,987,000**	**60 Orang**	**427,987,000**	**100.00**	**100.00**	**176 Orang**	**870,846,500**	**32.59**	**52.95**	**Badan Kesbangpol**	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**362 laporan**	**368,351,000**	**0 laporan**	**-**	**- laporan**	**-**	**- laporan**	**-**	**0.00**	**0.00**	**- laporan**	**-**	**-**	**0.00**	**Badan Kesbangpol**	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	546,978,978	1 Dokumen	24,418,750	1 Dokumen	29,055,000	1 Dokumen	29,055,000	100.00	100.00	2 Dokumen	53,473,750	50.00	9.78	Badan Kesbangpol	

8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	540 Orang	1,644,575,478	116 Orang	442,859,500	60 Orang	427,987,000	60 Orang	427,987,000	100.00	100.00	176 Orang	870,846,500	32.59	52.95	Badan Kesbangpol	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	362 laporan	368,351,000	0 laporan	-	- laporan	-	- laporan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- laporan	-	-	0.00	Badan Kesbangpol	
8.01.05	**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	**Persentase menurunya kasus penyakit masyarakat**	**74 Persen**	**6,360,095,000**	**71 Persen**	**386,762,940**	**71 Persen**	**391,255,900**	**71 Persen**	**391,255,900**	**100.00**	**100.00**	**142 Persen**	**778,018,840**	**191.89**	**12.23**	**Badan Kesbangpol**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun**	**2 Dokumen**	**368,351,000**	**0 Dokumen**	**-**	**- Dokumen**	**-**	**- Dokumen**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**- Dokumen**	**-**	**-**	**0.00**	**Badan Kesbangpol**	

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4400 Orang	4,420,115,000	40 Orang	185,304,140	40 Orang	175,842,500	40 Orang	175,842,500	100.00	100.00	80 Orang	361,146,640	1.82	8.17	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	1,278,018,000	30 Orang	125,730,500	160 Orang	133,103,000	160 Orang	133,103,000	100.00	100.00	190 Orang	258,833,500	9.50	20.25	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 laporan	293,611,000	1 laporan	75,728,300	1 laporan	82,310,400	1 laporan	82,310,400	100.00	100.00	2 laporan	158,038,700	12.50	53.83	Badan Kesbangpol	

8.01.05.2.01.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	368,351,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0.00	0.00	- Dokumen	-	-	0.00	Badan Kesbangpol	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4400 Orang	4,420,115,000	40 Orang	185,304,140	40 Orang	175,842,500	40 Orang	175,842,500	100.00	100.00	80 Orang	361,146,640	1.82	8.17	Badan Kesbangpol	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	1,278,018,000	30 Orang	125,730,500	160 Orang	133,103,000	160 Orang	133,103,000	100.00	100.00	190 Orang	258,833,500	9.50	20.25	Badan Kesbangpol	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 laporan	293,611,000	1 laporan	75,728,300	1 laporan	82,310,400	1 laporan	82,310,400	100.00	100.00	2 laporan	158,038,700	12.50	53.83	Badan Kesbangpol	

8.01.06	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	6,961,500,000	100 %	1,126,146,425	100 %	3,955,881,150	100 %	3,955,881,150	100.00	100.00	100 %	5,082,027,575	100.00	73.00	Badan Kesbangpol	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	464,100,000	25 Orang	21,187,550	25 Orang	22,000,000	25 Orang	22,000,000	100.00	100.00	50 Orang	43,187,550	12.50	9.31	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 laporan	928,200,000	11 laporan	16,405,650	11 laporan	131,793,500	11 laporan	131,793,500	100.00	100.00	22 laporan	148,199,150	50.00	15.97	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	5,569,200,000	4 Dokumen	1,088,553,225	4 Dokumen	3,802,087,650	4 Dokumen	3,802,087,650	100.00	100.00	8 Dokumen	4,890,640,875	50.00	87.82	Badan Kesbangpol	

8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	464,100,000	25 Orang	21,187,550	25 Orang	22,000,000	25 Orang	22,000,000	100.00	100.00	50 Orang	43,187,550	12.50	9.31	Badan Kesbangpol	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 laporan	928,200,000	11 laporan	16,405,650	11 laporan	131,793,500	11 laporan	131,793,500	100.00	100.00	22 laporan	148,199,150	50.00	15.97	Badan Kesbangpol	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	5,569,200,000	4 Dokumen	1,088,553,225	4 Dokumen	3,802,087,650	4 Dokumen	3,802,087,650	100.00	100.00	8 Dokumen	4,890,640,875	50.00	87.82	Badan Kesbangpol	
				40,897,065,938		**20,093,282,352**		**30,848,149,719**		**30,848,149,719**				**50,941,432,071**				

LAMPIRAN II
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lampung Barat

esatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD/Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2024		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Penjelasan Ditail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target Kinerja	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah					
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																		
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**43,859,815,760**		**20,093,282,352**		**30,848,149,719**		**10,976,490,400**								**15,180,707,170**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**76,45 %**	**12,181,258,410**	**73 %**	**1,764,781,418**	**76.05 %**	**1,992,246,000**	**76,25 %**	**3,126,067,900**							**76,45 %**	**3,455,473,820**	**Badan Kesbangpol**
8.01.01.1.01	**Perencanaan, Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**41 Dokumen**	**31,962,000**	**11 Dokumen**	**4,024,000**	**11 Dokumen**	**3,884,000**	**11 Dokumen**	**4,235,000**							**8 Dokumen**	**19,568,500**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	**19 Dokumen**	**108,170,800**	**4 Dokumen**	**10,117,000**	**4 Dokumen**	**11,780,000**	**4 Dokumen**	**21,356,000**							**5 Dokumen**	**28,802,700**	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**50 Dokumen**	**111,415,500**	**14 Dokumen**	**8,841,000**	**14 Dokumen**	**9,191,800**	**14 Dokumen**	**30,855,000**							**12 Dokumen**	**33,940,500**	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41 Dokumen	31,962,000	11 Dokumen	4,024,000	11 Dokumen	3,884,000	11 Dokumen	4,235,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2026		8 Dokumen	19,568,500	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	31,668,000	1 Dokumen	2,321,000	1 Dokumen	3,057,000	1 Dokumen	7,865,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2026		1 Dokumen	8,651,500	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	24,360,000	1 Dokumen	2,340,000	1 Dokumen	2,577,000	1 Dokumen	6,050,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2025		1 Dokumen	6,655,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	11,551,900	1 Dokumen	2,840,000	1 Dokumen	3,078,000	1 Dokumen	544,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2026		1 Dokumen	5,909,500	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokume Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	27,770,400	1 Dokumen	2,616,000	1 Dokumen	3,068,000	1 Dokumen	6,897,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025		1 Dokumen	7,586,700	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	26,796,000	2 laporan	3,203,000	2 laporan	3,527,000	2 laporan	6,655,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2025		2 laporan	7,320,500	Badan Kesbangpol

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah	48 laporan	97,440,000	12 laporan	5,638,000	12 laporan	5,664,800	12 laporan	24,200,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2025		12 laporan	26,620,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	58 **Orang/ Bulan**	**8,353,800,000**	**14 Orang/ Bulan**	**1,474,631,523**	**14 Orang/ Bulan**	**1,641,969,700**	**16 Orang/ Bulan**	**2,178,000,000**							**14 Orang/ Bulan**	**2,395,800,000**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 **Dokumen**	**17,052,000**	**1 Dokumen**	**2,206,000**	**1 Dokumen**	**2,542,000**	**1 Dokumen**	**4,235,000**							**1 Dokumen**	**4,658,500**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 **Dokumen**	**20,462,400**	**2 Dokumen**	**3,631,000**	**2 Dokumen**	**3,563,000**	**2 Dokumen**	**5,082,000**							**2 Dokumen**	**5,590,200**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 **Dokumen**	**38,976,000**	**2 Dokumen**	**4,448,000**	**2 Dokumen**	**2,494,000**	**2 Dokumen**	**9,680,000**							**2 Dokumen**	**10,648,000**	**Badan Kesbangpol**
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang	8,353,800,000	14 Orang	1,474,631,523	14 Orang	1,641,969,700	16 Orang	2,178,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2026 sejumlah 16 orang		14 Orang	2,395,800,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	17,052,000	1 Dokumen	2,206,000	1 Dokumen	2,542,000	1 Dokumen	4,235,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2025		1 Dokumen	4,658,500	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 Dokumen	20,462,400	2 Dokumen	3,631,000	2 Dokumen	3,563,000	2 Dokumen	5,082,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2025		2 Dokumen	5,590,200	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	38,976,000	2 Dokumen	4,448,000	2 Dokumen	2,494,000	2 Dokumen	9,680,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2025		2 Dokumen	10,648,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**58,190,000**	**1 Dokumen**	**9,501,000**	**1 Dokumen**	**11,234,000**	**1 Dokumen**	**15,000,000**							**1 Dokumen**	**16,500,000**	**Badan Kesbangpol**
8.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	58,190,000	1 Dokumen	9,501,000	1 Dokumen	11,234,000	1 Dokumen	15,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dalam rangka pengelolaan dan penyusunan kebutuhan barang milik daerah yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat		1 Dokumen	16,500,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**4 Dokumen**	**55,833,710**	**1 Dokumen**	**10,336,000**	**1 Dokumen**	**12,872,000**	**1 Dokumen**	**14,219,900**							**1 Dokumen**	**14,219,920**	**Badan Kesbangpol**

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**24 Orang**	**70,000,000**	**0 Orang**	**-**	**- Orang**	**-**	**6 Orang**	**20,000,000**							**6 Orang**	**20,000,000**	**Badan Kesbangpol**
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	55,833,710	1 Dokumen	10,336,000	1 Dokumen	12,872,000	1 Dokumen	14,219,900	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Untuk kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang ada dilingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat		1 Dokumen	14,219,920	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya	24 Orang	70,000,000	0 Orang	-	- Orang	-	6 Orang	20,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol		6 Orang	20,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan**	**4 Paket**	**19,682,880**	**1 Paket**	**2,163,600**	**1 Paket**	**2,163,600**	**1 Paket**	**4,888,400**							**1 Paket**	**5,377,240**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	**8 Paket**	**121,800,000**	**2 Paket**	**12,670,000**	**2 Paket**	**12,210,000**	**2 Paket**	**30,250,000**							**2 Paket**	**33,275,000**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	**28 Dokumen**	**33,032,160**	**6 Dokumen**	**5,760,000**	**7 Dokumen**	**5,760,000**	**7 Dokumen**	**8,203,800**							**7 Dokumen**	**9,024,180**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**4 laporan**	**33,529,104**	**1 laporan**	**3,596,000**	**1 laporan**	**3,596,000**	**1 laporan**	**8,327,220**							**1 laporan**	**9,159,942**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**4 laporan**	**800,459,856**	**1 laporan**	**90,560,900**	**1 laporan**	**75,530,000**	**1 laporan**	**198,800,580**							**1 laporan**	**218,680,638**	**Badan Kesbangpol**
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 Paket	19,682,880	1 Paket	2,163,600	1 Paket	2,163,600	1 Paket	4,888,400	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025		1 Paket	5,377,240	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	8 Paket	121,800,000	2 Paket	12,670,000	2 Paket	12,210,000	2 Paket	30,250,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025		2 Paket	33,275,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	28 Dokumen	33,032,160	6 Dokumen	5,760,000	7 Dokumen	5,760,000	7 Dokumen	8,203,800	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025		7 Dokumen	9,024,180	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	33,529,104	1 laporan	3,596,000	1 laporan	3,596,000	1 laporan	8,327,220	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan makanan dan minuman tamu Kantor Kesbangpol Tahun 2025		1 laporan	9,159,942	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	800,459,856	1 laporan	90,560,900	1 laporan	75,530,000	1 laporan	198,800,580	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2025		1 laporan	218,680,638	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	79 **Unit**	**876,960,000**	**0 Unit**	**-**	**9 Unit**	**55,500,000**	**22 Unit**	**217,800,000**							**22 Unit**	**239,580,000**	**Badan Kesbangpol**

1	2	3	4			5			6			7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	Unit	338,652,720	0	Unit	-	-	Unit	-	2	Unit	84,107,100	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit		2	Unit	92,517,810	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	Unit	124,723,200	0	Unit	-	8	Unit	39,500,000	10	Unit	30,976,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol		10	Unit	34,073,600	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	Unit	413,584,080	0	Unit	-	1	Unit	16,000,000	10	Unit	102,716,900	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol		10	Unit	112,988,590	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**3**	**laporan**	**9,744,000**	**1**	**laporan**	**1,700,000**	**1**	**laporan**	**1,800,000**	**1**	**laporan**	**2,420,000**							**1**	**laporan**	**2,662,000**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		**laporan**	**80,388,000**	**1**	**laporan**	**11,400,535**	**1**	**laporan**	**15,840,000**	**1**	**laporan**	**19,965,000**							**1**	**laporan**	**21,961,500**	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		**laporan**	**633,360,000**	**1**	**laporan**	**48,277,400**	**1**	**laporan**	**58,169,900**	**1**	**laporan**	**157,300,000**							**1**	**laporan**	**173,030,000**	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	9,744,000	1	laporan	1,700,000	1	laporan	1,800,000	1	laporan	2,420,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ ekspedisi		1	laporan	2,662,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	80,388,000	1	laporan	11,400,535	1	laporan	15,840,000	1	laporan	19,965,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol		1	laporan	21,961,500	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	633,360,000	1	laporan	48,277,400	1	laporan	58,169,900	1	laporan	157,300,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol		1	laporan	173,030,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**48**	**Unit**	**706,440,000**		**Unit**	**60,917,460**	**12**	**Unit**	**62,146,000**	**12**	**Unit**	**175,450,000**							**12**	**Unit**	**192,995,000**	**Badan Kesbangpol**
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	464,813,160	6	Unit	46,181,710	5	Unit	45,300,000	5	Unit	115,440,050	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2025		5	Unit	126,984,055	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	46,746,840	7	Unit	6,635,750	6	Unit	6,846,500	6	Unit	11,609,950	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol		6	Unit	12,770,945	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	194,880,000	1	Unit	8,100,000	1	Unit	9,999,500	1	Unit	48,400,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol		1	Unit	53,240,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pemahaman masyarakat terhadap idiologi dan wawasan kebangsaan**	**95 Persen**	**4,948,923,600**	**75 Persen**	**699,612,800**	**80 Persen**	**1,011,884,840**	**85 Persen**	**1,925,610,000**							**95 Persen**	**2,211,897,600**	**Badan Kesbangpol**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	**2000 Orang**	**1,078,103,600**	**50 Orang**	**639,835,300**	**100 Orang**	**62,257,000**	**500 Orang**	**277,816,000**							**500 Orang**	**305,897,600**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**1004 Orang**	**1,495,820,000**	**80 Orang**	**59,777,500**	**100 Orang**	**56,417,000**	**251 Orang**	**317,794,000**							**251 Orang**	**436,000,000**	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**16 laporan**	**125,000,000**	**0 laporan**	**-**	**- laporan**	**-**	**4 laporan**	**30,000,000**							**4 laporan**	**40,000,000**	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	**3 Dokumen**	**750,000,000**	**0 Dokumen**	**-**	**1 Dokumen**	**193,897,000**	**1 laporan**	**300,000,000**							**4 laporan**	**330,000,000**	
		Jumlah Paskibra	**150 Orang**	**2,250,000,000**	**0 Orang**	**-**	**50 Orang**	**699,313,840**	**50 Dokumen**	**1,000,000,000**							**1 Dokumen**	**1,100,000,000**	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kerakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 Orang	1,078,103,600	50 Orang	639,835,300	100 Orang	62,257,000	500 Orang	277,816,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara i dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Kec. Lumbok, Way Tenong, Kebun Tebu, Air Hitam		500 Orang	305,897,600	Badan Kesbangpol

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Pembinaan dan Pemantapan idiologi pancasila dilakukan terhadap 270 orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon, di empat kecamatan yaitu : Air Hitam, BNS, Suoh, Lumbok Seminung				
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1004 Orang	1,495,820,000	80 Orang	59,777,500	100 Orang	56,417,000	251 Orang	317,794,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang) Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit Diklat Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kecamatan Balik Bukit		251 Orang	436,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 laporan	125,000,000	0 laporan	-	- laporan	-	4 laporan	30,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		4 laporan	40,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Dokumen	750,000,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	193,897,000	1 Dokumen	300,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kegiatan ini merupakan sosialisasi terkait kepaskibraan ke sekolah tingkat SLTA serta pembinaan kepada para purnapaskibra Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran		1 Dokumen	330,000,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibra	150 Orang	2,250,000,000	0 Orang	-	50 Orang	699,313,840	50 Orang	1,000,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kegiatan ini merupakan seleksi dan pembentukan Paskibraka tingkat Kabupaten Lampung Barat dan seleksi peserta untuk ikut seleksi anggota paskibra tingkat Provinsi dan tingkat pusat serta penyediaan perlengkapan untuk pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada saat peringatan HUT kemerdekaan RI.		50 Orang	1,100,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.03	**PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat**	**72 Persen**	**10,058,928,750**	**68 Persen**	**15,648,700,519**	**69 Persen**	**23,039,839,829**	**70 Persen**	**1,738,212,500**							**72 Persen**	**5,067,795,750**	**Badan Kesbangpol**
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	**991 Orang**	**353,725,000**	**212 Orang**	**166,949,200**	**213 Orang**	**400,000,000**	**- Orang**	**-**						**0 Orang**	**-**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	**1430 Orang**	**1,654,808,500**	**210 Orang**	**177,763,250**	**160 Orang**	**102,547,500**	**250 Orang**	**450,000,000**						**250 Orang**	**495,000,000**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	**40 Laporan**	**8,050,395,250**	**10 Laporan**	**15,303,988,069**	**10 Laporan**	**22,537,292,329**	**10 Laporan**	**1,288,212,500**						**10 Laporan**	**4,572,795,750**	**Badan Kesbangpol**

1	2	3	4		5		6		7		8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	991	Orang	353,725,000	212	Orang	166,949,200	213	Orang	400,000,000	-	Orang	-	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					0	Orang	-	Badan Kesbangpol
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1430	Orang	1,654,808,500	210	Orang	177,763,250	160	Orang	102,547,500	250	Orang	450,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada pengurus partai politik yang ada diwilayah Kabupaten Lampung Barat Melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang politik di seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Lampung Barat.		250	Orang	495,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40	Laporan	8,050,395,250	10	Laporan	15,303,988,069	10	Laporan	22,537,292,329	10	Laporan	1,288,212,500	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kegiatan berupa pemberian dana bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Lampung Barat dan Hiabah kepada lembaga penyelenggara/ pengawas pemilu/pilkada		10	Laporan	4,572,795,750	Badan Kesbangpol
8.01.04	**PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktiv**	**70**	**Persen**	**2,655,240,000**	**50**	**Persen**	**467,278,250**	**55**	**Persen**	**457,042,000**	**60**	**Persen**	**659,450,000**					**70**	**Persen**	**725,395,000**	**Badan Kesbangpol**
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun**	**4**	**Dokumen**	**574,204,176**	**1**	**Dokumen**	**24,418,750**	**1**	**Dokumen**	**29,055,000**	**1**	**Dokumen**	**142,608,180**					**1**	**Dokumen**	**156,868,998**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**540**	**Orang**	**1,726,432,176**	**116**	**Orang**	**442,859,500**	**60**	**Orang**	**427,987,000**	**135**	**Orang**	**428,773,180**					**135**	**Orang**	**471,650,498**	**Badan Kesbangpol**

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**362 laporan**	**354,603,648**	**0 laporan**	**-**	**- laporan**	**-**	**90 laporan**	**88,068,640**							**92 laporan**	**96,875,504**	**Badan Kesbangpol**
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	574,204,176	1 Dokumen	24,418,750	1 Dokumen	29,055,000	1 Dokumen	142,608,180	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan buku data base bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat		1 Dokumen	156,868,998	Badan Kesbangpol
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	540 Orang	1,726,432,176	116 Orang	442,859,500	60 Orang	427,987,000	135 Orang	428,773,180	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan pemberian dana hibah kepada LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.		135 Orang	471,650,498	Badan Kesbangpol
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	362 laporan	354,603,648	0 laporan	-	- laporan	-	90 laporan	88,068,640	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kepada Ormas/LSM/Masjid/Lembaga Pendidikan Swasta yang telah memiliki Surat Tanda Lapor Keberadaan di Kabupaten Lampung Barat		92 laporan	96,875,504	Badan Kesbangpol
8.01.05	**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	**Persentase menurunya kasus penyakit masyarakat**	**74 Persen**	**6,402,545,000**	**70 Persen**	**386,762,940**	**71 Persen**	**391,255,900**	**72 Persen**	**1,566,950,000**							**74 Persen**	**1,723,645,000**	**Badan Kesbangpol**
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun**	**1 Dokumen**	**258,351,000**	**- Dokumen**	**-**	**- Dokumen**	**-**	**- Dokumen**	**-**							**0 Dokumen**	**-**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**4400 Orang**	**4,524,865,000**	**40 Orang**	**185,304,140**	**40 Orang**	**175,842,500**	**1,100 Orang**	**1,152,250,000**							**1100 Orang**	**1,267,475,000**	**Badan Kesbangpol**

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**2000 Orang**	**1,317,818,000**	**30 Orang**	**125,730,500**	**160 Orang**	**133,103,000**	**500 Orang**	**337,800,000**							**500 Orang**	**371,580,000**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**16 laporan**	**301,511,000**	**1 laporan**	**75,728,300**	**1 laporan**	**82,310,400**	**4 laporan**	**76,900,000**							**4 laporan**	**84,590,000**	**Badan Kesbangpol**
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	258,351,000	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Dokumen		Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4400 Orang	4,524,865,000	40 Orang	185,304,140	40 Orang	175,842,500	1100 Orang	1,152,250,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksnakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta Promosi Budaya dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi dianjungan Lampung TMII Jakarta Pagelaran seni dan budaya alam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi dianjungan Lampung TMII Jakarta Pembinaan Desa Bersinar (Desa bersih Narkoba) dilakukan terhadap 1 Pekon yang ditunjuk di Lampung Barat, dan 30 Kader P4GN Pekon yang ditunjuk. Pembinaan Desa Bersinar dilakukan selama 14 Bulan		1100 Orang	1,267,475,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu : di Kec. Gedung Surian, Kec. Pagar Dewa, Kec. Batu Brak, Kec. Air Hitam, dan Kec. Batu Ketulis. Peserta sosialisasi sebanyak 500 Orang Deteksi dini penyalahgunaan narkotika (Tes Urine) dilaksanakan sekali dalam setahun dengan sasaran 600 ASN Pemda Lampung Barat				
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	1,317,818,000	30 Orang	125,730,500	160 Orang	133,103,000	500 Orang	337,800,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Deradikalisasi faham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Gedung Surian dan Kec. Kebun Tebu Sasaran pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 15 Pondok Pesantren diseluruh Kecamatan se Lampung Barat Rakor FKUB dilakukan sebanyak 3 kali, di Kec. Balik Bukit dengan peserta seluruh pengurus FKUB. Silaturahmi Lintas Agama dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit dengan sasaran 200 Orang utusan dari seluruh lima agama yang dianut penduduk Lampung Barat		500 Orang	371,580,000	Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 laporan	301,511,000	1 laporan	75,728,300	1 laporan	82,310,400	4 laporan	76,900,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		4 laporan	84,590,000	Badan Kesbangpol
8.01.06	**PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat**	**100 %**	**7,612,920,000**	**100 %**	**1,126,146,425**	**100 %**	**3,955,881,150**	**100 %**	**1,960,200,000**							**100 %**	**1,996,500,000**	**Badan Kesbangpol**

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**	**400 Orang**	**487,200,000**	**25 Orang**	**21,187,550**	**25 Orang**	**22,000,000**	**100 Orang**	**121,000,000**							**100 Orang**	**133,100,000**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	**44 laporan**	**974,400,000**	**11 laporan**	**16,405,650**	**11 laporan**	**131,793,500**	**11 laporan**	**242,000,000**							**11 laporan**	**266,200,000**	**Badan Kesbangpol**
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	**16 Dokumen**	**6,151,320,000**	**4 Dokumen**	**1,088,553,225**	**4 Dokumen**	**3,802,087,650**	**4 Dokumen**	**1,597,200,000**							**4 Dokumen**	**1,597,200,000**	**Badan Kesbangpol**
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	487,200,000	25 Orang	21,187,550	25 Orang	22,000,000	100 Orang	121,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Batu Brak,Sekincau, Batu Ketulis dan Pagar Dewa		100 Orang	133,100,000	Badan Kesbangpol
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 laporan	974,400,000	11 laporan	16,405,650	11 laporan	131,793,500	11 laporan	242,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelejen Daerah, Intelejen Kejari Liwa, Intelejen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelejen Polres Lampung Barat		11 laporan	266,200,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	6,151,320,000	4 Dokumen	1,088,553,225	4 Dokumen	3,802,087,650	4 Dokumen	1,597,200,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh usur Fokompimda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan Agama Lampung Barat		4 Dokumen	1,597,200,000	Badan Kesbangpol
				43,859,815,760		**20,093,282,352**		**30,848,149,719**		**10,976,490,400**								**15,180,707,170**	

LAMPIRAN III
DETAIL SUB KEGIATAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	DETAIL KHUSUS SUBKEGIATAN TAHUN 2025
1	*2*	*5*
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
8.01.01.1.01	**Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2026
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2026
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2025
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2026
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2025
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2025
8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2025 sejumlah 14 orang
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu Kantor Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2025
8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi

1	2	5
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kerakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara i dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Kec. Lumbok, Way Tenong, Kebun Tebu, Air Hitam
		Pembinaan dan Pemantapan idiologi pancasila dilakukan terhadap 270 orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon, di empat kecamatan yaitu : Air Hitam, BNS, Suoh, Lumbok Seminung
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang)
		Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit
		Diklat Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kecamatan Balik Bukit
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kegiatan ini merupakan sosialisasi terkait kepaskibraan ke sekolah tingkat SLTA serta pembinaan kepada para purnapaskibra Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Kegiatan ini merupakan seleksi dan pembentukan Paskibraka tingkat Kabupaten Lampung Barat dan seleksi peserta untuk ikut seleksi anggota paskibra tingkat Provinsi dan tingkat pusat serta penyediaan perlengkapan untuk pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada saat peringatan HUT kemerdekaan RI.
8.01.03	**PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	

1	2	5
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada pengurus partai politik yang ada diwilayah Kabupaten Lampung Barat
		- Melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang politik di seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Lampung Barat..
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan berupa pemberian dana bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Lampung Barat dan Hiabah kepada lembaga penyelenggara/pengawas pemilu/pilkada
8.01.04	**PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan buku data base bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan pemberian dana hibah kepada LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kepada Ormas/LSM/Masjid/Lembaga Pendidikan Swasta yang telah memiliki Surat Tanda Lapor Keberadaan di Kabupaten Lampung Barat
8.01.05	**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksnakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta
		Promosi Budaya dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi dianjungan Lampung TMII Jakarta
		Pagelaran seni dan budaya alam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi dianjungan Lampung TMII Jakarta
		Pembinaan Desa Bersinar (Desa bersih Narkoba) dilakukan terhadap 1 Pekon yang ditunjuk di Lampung Barat, dan 30 Kader P4GN Pekon yang ditunjuk. Pembinaan Desa Bersinar dilakukan selama 14 Bulan
		Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu : di Kec. Gedung Surian, Kec. Pagar Dewa, Kec. Batu Brak, Kec. Air Hitam, dan Kec. Batu Ketulis. Peserta sosialisasi sebanyak 500 Orang
		Deteksi dini penyalahgunaan narkotika (Tes Urine) dilaksanakan sekali dalam setahun dengan sasaran 600 ASN Pemda Lampung Barat
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Deradikalisasi faham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Gedung Surian dan Kec. Kebun Tebu
		Sasaran pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 15 Pondok Pesantren diseluruh Kecamatan se Lampung Barat

1	2	5
		Rakor FKUB dilakukan sebanyak 3 kali, di Kec. Balik Bukit dengan peserta seluruh pengurus FKUB.
		Silaturahmi Lintas Agama dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit dengan sasaran 200 Orang utusan dari seluruh lima agama yang dianut penduduk Lampung Barat
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.06	**PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Batu Brak,Sekincau, Batu Ketulis dan Pagar Dewa
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelejen Daerah, Intelejen Kejari Liwa, Intelejen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelejen Polres Lampung Barat
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh usur Fokompimda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan Agama Lampung Barat

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Tulip No.1 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21158

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan menjadi pegangan perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun tersebut dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

Semoga Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kita semua. Amin

L i w a, 19 Maret 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

Drs. SYAEKHUDDIN,MM

NIP. 19680913 198909 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU..... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 19

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 19

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD .....

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 22

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional .....

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 22

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25

BAB V PENUTUP 29

Lampiran I

Lampiran II

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Lampung Barat yang merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Lampung harus memiliki program pembangunan yang terpadu yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan yang menyentuh masyarakat pada tatanan terbawah. Program pembangunan yang dilaksanakan merupakan perubahan yang mendasar dan mengandung semangat desentralisasi, berpola pada pendekatan wilayah, pendekatan kemasyarakatan dan sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat. Perubahan mendasar tersebut adalah tuntutan Kabupaten/Kota untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagai upaya peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam matra perencanaan yang tertata secara baik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dimana UU ini dinilai memiliki keberpihakan yang cukup kuat

terhap desa untuk lebih mandiri dan lebih sejahtera. Asas rekognisi dan subsidiaritas yang ikut melandasi pengembangan substansi UU Desa merupakan kata kunci penting yang mengandung konsekuensi diberikannya kewenangan yang lebih luas dan alokasi anggaran lebih besar kepada desa guna mendukung kemandirian desa.

Berbagai peluang dan kesempatan menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa bersama masyarakatnya, baik dalam memperbaiki sistem, menata kelembagaan desa hingga meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa serta lembaga yang ada di desa. UU Desa setidaknya berisi beberapa kata kunci penting yang membuat desa berbeda dari sebelumnya, baik dilihat dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon akan menjadi salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya pada tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat.

b. Tujuan

Meningkatkan peran, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan RENJA-OPD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan keterkaitan dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Pada bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja-OPD tahun 2024 dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan Kegiatan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaiaan Renstra OPD s.d Tahun 2024

Lampiran 2 : Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program sebanyak 5 (empat) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan. Dan jumlah sub kegiatan sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2024 untuk Belanja Daerah sebesar **Rp 5.457361.916,-** terealisasi sebesar **Rp 5.164.199.705,-** atau **94,63** %.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 38 subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya mencapai 100 persen

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan berhubungan dengan masyarakat dan pemerintahan pekon dan kelurahan, dimana seluruh program dan kegiatannya mengarah kepada masyarakat, pekon dan kelurahan sesuai dengan urusan bidangnya yakni pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk mengukur sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Tahun 2025, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain

indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil kinerja, evaluasi kinerja juga menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran.

Adapun perkiraan capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

PERKIRAAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun 2024
1	Persentase Desa mandiri	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan pekon secara partisipatif	Persentase pekon dengan status mandiri	39,69%

Persentase Pekon dengan Status Mandiri

= Jumlah Pekon Mandiri x 100%

Jumlah Pekon

= 52 x 100%

131

= 39,69%

Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) lampung Barat 2024

Pencapaian Sasaran indikator kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Indikator I :

NO	*Indikator Kinerja*	*Target*	*Realisasi*	*%*
1	Persentase pekon dengan status mandiri	39,69%	48,09%	121%

Capaian Kinerja pada Tahun 2024 capaian Realisasi **melampui** Target yang direncanakan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan dan memfungsikan sumberdaya aparatur pemerintahan serta peningkatan Pekon/Kelurahan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan Pekon/Kelurahan.
3. Mendorong pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana pekon tertinggal.
5. Mendorong masyarakat miskin dengan menumbuhkan usaha ekonomi produktif.
6. Peningkatan kualitas para pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
7. Mendorong tumbuhnya semangat swadaya gotong royong bagi masyarakat dan Pemerintahan Pekon.
8. Mensosialisasikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.
9. Melengkapi sarana dan prasarana kantor.
10. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana desa memiliki kewenangan guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

11. Berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) pada Tahun 2015.
12. Perlu adanya Tim Pendamping Desa yang bertugas mengawal dan membantu pihak desa yang menerima Dana Desa terkait alokasi dan pertanggungjawaban administratif dana tersebut

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting yang menjadi **masalah-masalah mendesak** yaitu antara lain :

1. Masih kurangnya Tenaga Pengelola kegiatan dan Administrasi Keuangan yang bersertifikat.
3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon belum optimal.
4. Masihnya rendahnya kualitas Pokjanal Posyandu Kecamatan/Pekon/Kelurahan dan Kader Posyandu.
6. Keterisoliran pekon dan pemanfaatan kawasan potensial.
7. Berkurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun Desa/Pekon/Kelurahan.
8. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagai upaya meningkatkan hasil karya TTG di wilayah Kabupaten.
9. Pengentasan Kemiskinan.
10. Sarana dan Prasarana Pekon/kelurahan yang belum memadai
11. Penertiban Daerah Otonomi Baru (Desa/Pekon)
12. Pengelolaan Keuangan Pekon yang belum maksimal dalam tertib administrasinya.
13. Pembinaan, pengembangan dan perkuatan desa, administrasi dan kelembagaan desa secara bertahap terus dilaksanakan.
14. Kelembagaan Kemasyarakatan di Pekon/Kelurahan yang belum optimal.

15. Kualitas Aparatur Pemerintahan Pekon/Kelurahan masih perlu ditingkatkan.
16. Pendataan dan Pemutakhiran Profil Pekon setiap tahun di up Date.
17. Administrasi Pemerintahan Pekon/Kelurahan yang belum maksimal.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mempunyai **tantangan** dalam melaksanakan tupoksi, Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah :

1. Masih banyaknya Pekon Mandiri;
2. Menurunnya semangat swadaya gotong royong masyarakat;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam Pemanfaatan TTG dan SDA;
4. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola bantuan.
5. Kurangnya kapasitas pegawai baik jumlah maupun kualitas.

Sedangkan **peluang** yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah :

1. Adanya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Potensi SDA yang belum dikembangkan.
3. Lembaga Masyarakat yang semakin baik.
4. Meningkatnya mobilitas informasi.
5. Adanya pegawai yang mengisi formasi jabatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dilihat dari Rencana Program dan Kegaiatan yang ada di Rancangan awal RKPD sudah sesuai dan selaras dengan Program Kegiatan yang ada di Rancangan awal Renja 2025, adapun Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Awal Renja adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan
      a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      d) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
      b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional
   b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENATAAN DESA
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

1) Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
   a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
      1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
      1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
      2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
      3) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
      4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
      5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
      6) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
      7) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
      8) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
      9) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
   a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
5) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
6) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
7) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Nihil

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Untuk tahun 2025 belum ada kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon yang akan dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Desa	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan pekon secara partisipatif	Persentase Desa mandiri	37,40 %	39,69 %	41,22 %	42,75 %

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Berdasarkan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat, maka akan dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENATAAN DESA

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

a. Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
c. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
d. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
h. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
j. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
c. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
e. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
g. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2025 semestinya dapat dilakukan melalui beberapa sumber pembiayaan antara lain APBN, APBD Provinsi Lampung maupun APBD Kabupaten Lampung Barat.

Pada tahun 2025 sumber pembiayaan program kegiatan DPMP Kabupaten Lampung Barat hanya melalui APBD Kabupaten Lampung Barat sedangkan dari dana APBN maupun APBD Provinsi Lampung belum mendapat alokasi bantuan dana.

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	TARGET
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**3.339.098.543**	82 Poin
2	Program Penataan Desa	**1.412.266.800**	100%
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	**275.283.400,**	2,29%
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	**3.486.950.850**	100%
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	**1.633.060.900**	75%

Adapun anggaran belanja langsung tersebut dipergunakan untuk pembiayaan program, kegiatan, Sub Kegiatan sebagai berikut :

13. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN, dengan jumlah anggaran Rp **10.146.660.493,00** terdiri atas 11 kegiatan dan 47 Sub kegiatan yaitu
    1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
        a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
            a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
            b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
            c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
            d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
            e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
            f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
            g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

        b. Kegiatan Administrasi Keuangan
            a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
            b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
            c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
            d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

operasional

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENATAAN DESA

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

a. Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

c. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

d. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

h. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

j. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba

Desa dan Kelurahan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

h. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

i. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

j. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

k. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

l. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

m. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

n. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB V
PENUTUP

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur dan berkelanjutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon telah berupaya memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA - OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini, diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon untuk tahun 2025 sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.

Rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat di tahun 2025.

L i w a, 19 Maret 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON

Drs. SYAEKHUDDIN,MM
NIP. 19680913 198909 1 002

LAMPIRAN 1

Rekapan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) s.d Tahun 2026 (Akhir Priode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)			Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100%		100%	3,328,555,700	100%	10,780,490,828	100%	4,710,605,530	100%	19.145	100%	7,999,701,930	100%	31.632	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		URUSA PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		100%	679,738,849,254	100%	2,427,354,800	100%	4,095,765,595	100%	2,573,120,630	100%	15.890	100%	5,000,475,430	100%	26.385	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
	2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Jumlah Bidang Urusan yang Dilaksanakan**	28 Dokumen	5,536,150,557	28 Dokumen	2,427,354,800	28 Dokumen	4,095,765,595	28 Dokumen	2,573,120,630	28 Dokumen	15.890	28 Dokumen	5,000,475,430	28 Dokumen	26.385	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat daerah	48 Dokumen 65 Laporan	48,813,021	6 Dokumen 13 Laporan	33,664,000		45,412,350	6 Dokumen 13 Laporan	33,664,000	6 Dokumen 13 Laporan	5.869	6 Dokumen 13 Laporan	67,328,000	5 Dokumen 13 Laporan	12.449	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	38 Dokumen	6,121,522	2 Dokumen	4,999,900	8 Dokumen	4,306,750	2 Dokumen	4,999,800	2 Dokumen	1.161	2 Dokumen	9,999,700	2 Dokumen	1.634	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5,483,136	1 Dokumen	6,825,100	1 Dokumen	7,848,750	1 Dokumen	6,825,000	1 Dokumen	0.870	1 Dokumen	13,650,100	1 Dokumen	2.489	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5 Dokumen	5,483,136	1 Dokumen	5,725,100	1 Dokumen	6,583,750	1 Dokumen	5,725,000	1 Dokumen	0.870	1 Dokumen	11,450,100	1 Dokumen	2.088	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Dokumen	5,483,136	1 Dokumen	3,764,900	1 Dokumen	4,329,750	1 Dokumen	3,765,000	1 Dokumen	0.870	1 Dokumen	7,529,900	1 Dokumen	1.373	Dinas Pemberdayaan	Liwa
	2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan	5 Dokumen	5,483,136	1 Dokumen	5,050,000	1 Dokumen	5,807,500	1 Dokumen	5,050,200	1 Dokumen	0.870	1 Dokumen	10,100,200	1 Dokumen	1.842	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan hasil Koordinasi	1 Laporan	1,843,452	1 Laporan	2,299,000	1 Laporan	2,643,850	1 Laporan	2,299,000	1 Laporan	0.870	1 Laporan	4,598,000	1 Laporan	2.494	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	18,915,504	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	13,892,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	0.360	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	0.529	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	10 Dokumen 15 Laporan	4,161,487,680	27 Orang/Bulan	2,036,970,100		3,144,077,805	27 Orang/Bulan	2,206,753,400	27 Orang/Bulan	3.530	27 Orang/Bulan	4,243,723,500	27 Orang/Bulan	4.225	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya	135 0rang/Bulan	4,146,621,126	26 0rang/Bulan	2,029,460,100	27 0rang/Bulan	3,135,441,305	26 0rang/Bulan	2,199,243,400	26 0rang/Bulan	0.701	26 0rang/Bulan	4,228,703,500	26 0rang/Bulan	1.020	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhit Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi	5 Laporan	6,121,522	4 Laporan	3,110,000	1 Laporan	3,576,500	4 Laporan	1,890,200	4 Laporan	0.529	4 Laporan	5,000,200	4 Laporan	0.817	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	10 Laporan	5,247,019	1 Laporan	1,890,000	2 Laporan	2,173,500	1 Laporan	3,110,000	1 Laporan	1.431	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	0.953	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	3,498,013	2 Dokumen	2,510,000	2 Dokumen	2,886,500	2 Dokumen	2,509,800	2 Dokumen	0.869	2 Dokumen	5,019,800	2 Dokumen	1.435	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.05	Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Dokumen	17,490,063		-	2 Dokumen	11,500,000		-		-		-		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
	2.13.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawa yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Dokumen	17,490,063			2 Dokumen	11,500,000									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Koantor yang disediakan	120 Paket, 20 Dokumen, 120 Laporan	427,843,092	8 Paket	111,949,600		378,192,450	8 Paket	147,949,400	8 Paket	4	8 Paket	259,899,000	8 Paket	4.845	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Instalasi Listrik/Bangunan kantor yang disediakan	40 Paket	9,215,515	1 Paket	3,149,000	8 Paket	3,622,500	1 Paket	3,149,000	1 Paket	0.869	1 Paket	6,298,000	1 Paket	0.683	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	35 Paket	123,958,500			7 Paket	113,038,100		16,000,000		0.142		16,000,000		0.129	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	45 Paket	74,359,001	9 Paket	31,846,600	9 Paket	52,319,250	9 Paket	32,251,400	9 Paket	0.616	9 Paket	64,098,000	9 Paket	0.862	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	6,926,065	4 Dokumen	5,010,000	4 Dokumen	5,761,500	4 Dokumen	5,010,000	4 Dokumen	0.870	4 Dokumen	10,020,000	4 Dokumen	1.447	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pasilitasi Kunjungan Tamu Perbulan	60 Laporan	11,060,716	12 Laporan	5,355,000	12 Laporan	8,797,500	12 Laporan	5,355,000	12 Laporan	0.609	12 Laporan	10,710,000	12 Laporan	0.968	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	202,323,295	12 Laporan	66,589,000	12 Laporan	194,653,600	12 Laporan	86,184,000	12 Laporan	0.443	12 Laporan	152,773,000	12 Laporan	0.755	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	3010 Laporan	323,668,123	2 Laporan	130,736,100		235,529,660	2 Laporan	121,822,580	2 Laporan	2	2 Laporan	252,558,680	2 Laporan	3.548	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2970 Laporan	6,296,423	1Laporan	6,440,000	594 Laporan	7,406,000	1Laporan	6,440,000	1Laporan	0.870	1Laporan	12,880,000	1Laporan	2.046	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan	20 Laporan	54,696,673	1 Laporan	19,250,000	4 Laporan	35,891,500	1 Laporan	21,500,000	1 Laporan	0.599	1 Laporan	40,750,000	1 Laporan	0.745	Dinas Pemberdayaan	Liwa
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	262,675,028	1 Laporan	105,046,100	4 Laporan	192,232,160	1 Laporan	93,882,580	1 Laporan	0.488	1 Laporan	198,928,680	1 Laporan	0.757	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa

2.13.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah yang di adakan	110 Unit	556,848,579	12 Unit	114,035,000		281,053,330	12 Unit	62,931,250	12 Unit	0.985	12 Unit	176,966,250	12 Unit	1.318	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	45 Unit	314,987,630	9 Unit	91,250,000	9 Unit	214,423,480	9 Unit	47,750,000	9 Unit	0.223	9 Unit	139,000,000	9 Unit	0.441	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60 Unit	13,729,699	12 Unit	5,190,000	12 Unit	8,797,500	12 Unit	5,190,000	12 Unit	0.590	12 Unit	10,380,000	12 Unit	0.756	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna Lainnya	Jumlah Yunit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit	228,131,250	1 Unit	17,595,000	1 Unit	57,832,350	1 Unit	9,991,250	1 Unit	0.173	1 Unit	27,586,250	1 Unit	0.121	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata	100%	1,847,402,269	100%	307,070,000		1,228,060,275	100%	1,101,766,600	100%	0.897	100%	1,408,836,600	100%	1.087	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan,Penghapusan, Penggabungan dan Perubaha	1330 Pekon, 10 Unit	1,847,402,269	131 Pekon	307,070,000		1,228,060,275	131 Pekon	1,101,766,600	131 Pekon	1	131 Pekon	1,408,836,600	131 Pekon	1.087	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan,Penggabungan dan perubahan Status Desa	Jumlah Desa Yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Status Desa	665 Pekon	182,651,764			131 Pekon	138,110,975				-		-		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	665 Pekon	368,857,023			131 Pekon	110,067,650				-		-		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	10 Unit	1,295,893,482	2 Unit	307,070,000	1 Pekon	979,881,650	2 Unit	1,101,766,600	2 Unit	1.124	2 Unit	1,408,836,600	2 Unit	1.087	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29%	318,560,957	2,29%	39,459,000		240,877,850	2,29%	39,459,300	2,29%	0.164	2,29%	39,459,000	2,29%	0.124	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan	5 Dokumen	318,560,957		39,459,000		240,877,850		39,459,300		0.164		39,459,000		0.124	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan	5 Dokumen	318,560,957	1 Dokumen	39,459,000	1 Dokumen	240,877,850	1 Dokumen	39,459,300	1 Dokumen	0.164	1 Dokumen	39,459,000	1 Dokumen	0.124	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100%	606,316,820,315	100%	317,282,400			100%	357,327,100	100%		100%	674,609,500	100%	2.111	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanan Pemabngunan Desa	3280 Dokumen, 71265 Orang, 50 Pekon, 5 Laporan	606,316,820,315	393 Dokumen	317,282,400		3,588,988,483	393 Dokumen	357,327,100	393 Dokumen	2	393 Dokumen	674,609,500	393 Dokumen	2.111	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Desa	1965 Dokumen	365,056,387	2 Dokumen	61,030,500	393 Dokumen	276,035,075	2 Dokumen	59,188,500	2 Dokumen	0.214	2 Dokumen	120,219,000	2 Dokumen	0.329	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Keuangan Desa	10 Dokumen	121,606,123	2 Dokumen	79,958,000	2 Dokumen	91,951,700	2 Dokumen	47,585,500	2 Dokumen	0.518	2 Dokumen	127,543,500	2 Dokumen	1.049	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur pemerintahan Desa yang mengikuti Pembinaan peningkatan Kapasitas	70740 Orang	308,993,892	60 Orang	79,168,500	393 Orang	233,643,775	60 Orang	5,698,000	60 Orang	0.024	60 Orang	84,866,500	60 Orang	0.275	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan lembaga Kerja sama Antar Desa (kerjasama antar desa)	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	5 Dokumen	297,331,063	131 Pekon	47,125,500	1 Dokumen	124,043,600	131 Pekon	39,255,000	131 Pekon	0.316	131 Pekon	86,380,500	131 Pekon	0.291	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil penyelenggaran pemilihan Penggangkatn dan pemberhentian Kepala Desa	5 Laporan	2,150,280,374			1 Laporan	1,625,920,888				-		-		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Propil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	630 Dokumen	368,107,261,940			136 Dokumen	278,341,975		43,595,500		0.157		43,595,500		0.000	Dinas Pemberdayaan	Liwa
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	655 Dokumen	175,094,840,740			131 Dokumen	132,396,855				-		-		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Liwa
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan peningkatan Kapasitas	525 Orang	299,545,457			105 Orang	226,499,400		49,236,000		0.217		49,236,000		0.164	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang dipasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas desa	50 Pekon	199,986,089			10 Pekon	151,218,215				-		-		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evalusi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	5 Dokumen	59,371,918,250	1 Dokumen	49,999,900	1 Dokumen	448,937,000	1 Dokumen	112,768,600	1 Dokumen	0.251	1 Dokumen	162,768,500	1 Dokumen	0.003	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	75%	65,719,915,157	60%	237,389,500	100%	1,626,798,625	60%	638,931,900	60%	2.195	60%	876,321,400	60%	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit, 4 Lembaga, 25 Dokumen, 10 Laporan	65,719,915,157	4 Lembaga	237,389,500.00	4 Lembaga	1,626,798,625.00	4 Lembaga	638,931,900.00	4 Lembaga	2.195	4 Lembaga	876,321,400.00	4 Lembaga	1.925		
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi terkait penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna	10 Dokumen	22,345,903,850			2 Dokumen	168,962,600		51,289,500.00		0.304		51,289,500		0.002	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa

2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt,Rw,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna	20 Lembaga	41,864,669,863			4 Lembaga	316,557,050		149,576,900.00		0.473		149,576,900		0.004	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasaran Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi terkait pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	5 Unit	256,507,736			1 Unit	193,956,700				-		-		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Eknomi Masyarakat dan pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi pembinaan pelaksanaan TTG bagi pemerintah desa dan masyarakat pekon	5 Dokumen	216,368,042			1 Dokumen	163,605,325				-		-		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat dan Peringatan BBGRM	5 Laporan	225,074,291	1 Laporan	49,990,000	1 Laporan	170,188,500	1 Laporan	49,990,000	1 Laporan	0.294	1 Laporan	99,980,000	1 Laporan	0.444	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 Laporan	183,478,360	1 Laporan	84,515,000	1 Laporan	138,736,000	1 Laporan	60,276,500	1 Laporan	0.434	1 Laporan	144,791,500	1 Laporan	0.789	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahtraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahtraan Keluarga	5 Dokumen	627,913,015	1 Dokumen	102,884,500	1 Dokumen	474,792,450	1 Dokumen	327,799,000	1 Dokumen	0.690	1 Dokumen	430,683,500	1 Dokumen	0.686	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
						3,328,555,700	1 Dokumen	10,780,490,828		4,710,605,530		19.145		7,999,701,930		31.632		

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

Drs. SYAEKHUDDIN,MM
NIP. 19680913 198909 1 002

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON						**10.146.660.493,00**							**14.276.651.125,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.146.660.493,00**							**14.276.651.125,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**10.146.660.493,00**							**14.276.651.125,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PMP***	**80 %**			**80 %**	**3.339.098.543,00**						**80 %**	**5.435.442.903,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perangkat daerah*	-			11 Dokumen	48.727.800,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	59.949.170,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	20.063.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6.825.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		10.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.725.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.707.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.765.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.050.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.680.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.299.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.490.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		18.372.170,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Banyaknya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran Banyaknya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Keunagan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN*	-			2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 27 Org/Bulan	2.563.032.773,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	4.159.041.125,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	2.555.523.373,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.146.621.125,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.890.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.729.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	3.109.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.874.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2.509.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.817.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*	-			2 Dokumen	15.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	13.225.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	15.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		13.225.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perungang-undangan yang disediakan* *Jumlah LaporanFasilitasi Kunjungan tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan* *Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan* *Jumlah Perkantoran dan perlengkapan Kantor yang disediakan*	-			4 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 9 Paket 8 Paket 2 Paket 7 Paket	314.270.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	411.375.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	4.165.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9.700.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		69.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	60.167.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		60.192.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	6.625.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.619.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.116.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		11.634.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	223.497.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		257.429.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	95.183.750,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	109.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	6.683.750,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		7.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	88.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		102.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat* *Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	-			2 Laporan 4 Laporan	148.381.720,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	311.393.508,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	8.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		9.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	41.240.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		47.466.508,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	98.641.720,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		254.227.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara*	-			12 Unit	154.502.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	371.209.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	77.750.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		283.575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	10.260.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		11.634.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	66.492.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		76.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata***	**7,63 %**			**7,63 %**	**1.412.266.800,00**						**7,63 %**	**1.624.108.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan,Penghapusan, Penggabungan dan Perubaha Status Desa* *Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya* *Jumlah Sarana dan Prasarana Desa*	-			5 Pekon 131 Pekon 1 Pekon	1.412.266.800,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon	-	1.624.108.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				131 Desa	158.827.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		182.651.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				1 Desa	126.576.800,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		145.564.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Unit	1.126.863.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		1.295.893.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat***	**2,29 %**			**2,29 %**	**275.283.400,00**						**2,29 %**	**318.560.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan*	-			1 Dokumen	275.283.400,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon	-	318.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	275.283.400,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		318.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Pekon Tertib Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**3.486.950.850,00**						**100 %**	**4.746.434.487,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* *Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti pembinaan Peningkatan Kapasitas* *Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa* *Jumlah dokumen hasil evalusi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan* *Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga Kerja Sama antar Desa* *Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa* *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Desa* *Jumlah Dokumen Keuangan Desa* *Jumlah Dokumen Profil Desa* *Jumlah laporan Hasil penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa*	-			105 Orang 393 Orang 10 Pekon 1 Dokumen 1 Dokumen 131 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 136 Dokumen 1 Laporan	3.486.950.850,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon	-	4.746.434.487,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				2 Dokumen	245.101.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		365.056.386,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				2 Dokumen	105.397.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		121.606.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				393 Orang	265.149.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		308.993.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	121.346.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		164.047.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1.334.253.750,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		2.150.280.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				136 Dokumen	281.481.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		368.107.261,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				131 Dokumen	104.046.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		175.094.840,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				131 Orang	260.471.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		299.545.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				10 Desa	253.428.200,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		199.986.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	516.276.900,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Desa/Pekon		593.719.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif***	**70 %**			**70 %**	**1.633.060.900,00**						**70 %**	**2.152.105.735,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa* *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahtraan Keluarga* *Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat* *Jumlah Laporan Hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemastyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 4 Lembaga 1 Unit	1.633.060.900,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	2.152.105.735,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	193.746.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat		223.453.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	283.882.700,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat		418.646.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Unit	187.138.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat		256.507.735,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	82.916.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat		216.368.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	179.991.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat		225.740.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	159.546.200,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat		183.478.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	545.841.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat		627.913.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	J U M L A H							**10.146.660.493,00**							**14.276.651.125,00**	

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

Drs. SYAEKHUDDIN,MM

NIP. 19680913 198909 1 002

2025

RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa
dinas.pupr.lambar@gmail.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sebagai bahan utama Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2024.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Lampung Barat menyusun Renja-OPD yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2024, yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lampung Barat 2010-2030.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025 ini adalah dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri No 86 tahun 2017.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025 adalah untuk dijadikan sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Bab ini mendeskripsikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, analisis kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, review terhadap rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan sumber pendanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 11 (sebelas) program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan, Jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 55 (lima puluh lima) sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 65.885.502.099,- terealisasi sebesar Rp. 65.257.122.526,- atau 99,04%.

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 1 subkegiatan yang realisasi fisik dan kinerjanya:

1. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelayakan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam Rangka Penertiban Sertipikat Laik Fungsi tidak terealisasi 100 % dikarenakan tidak ada rumah yang terkena bencana.

Rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 99,04 persen.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai tahun 2021 adalah:

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.

Jumlah penduduk = 84.030 KK

Jumlah penduduk yang terlayani = 74.248 KK

$$SPM\ Pemenuhan\ Kebutuhan\ Air\ Pokok = \frac{72.056}{84.030} x100\% = 88{,}57\%$$

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Jumlah penduduk = 84.030 KK

Jumlah penduduk yang terlayani = 83.739 KK

$$SPM\ Pelayanan\ Air\ Limbah\ domestik = \frac{83.739}{84.030} x100\% = 99{,}65\%$$

c. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana kabupaten.

Pada tahun 2023 tidak terdapat pemenuhan SPM tersebut dikarenakan tidak rumah yang terkena bencana alam.

d. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten.

Pada tahun 2023 tidak terdapat pemenuhan SPM tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Di Kabupaten Lampung Barat, prasarana dan sarana transportasi hanya terbatas pada perhubungan darat berupa kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih. Secara geografis wilayah ini diuntungkan karena dilalui oleh jalan Lintas Barat Sumatera, akibatnya mobilitas penduduk, barang dan jasa dari dan ke wilayah Kabupaten Lampung Barat ini cukup tinggi.

Di samping jalan negara tersebut sebagai jalan arteri primer di wilayah ini, terdapat juga jaringan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten yang menghubungkan antara wilayah kabupaten dalam Provinsi Lampung maupun dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat itu sendiri.

Jaringan jalan di wilayah Kabupaten Lampung Barat mempunyai panjang total 724 km, menurut statusnya dapat dibedakan menjadi Jalan Nasional dengan panjang 85,00 km (8,92%), Jalan Provinsi dengan panjang 143,47 km (15,06%), dan Jalan Kabupaten sepanjang 724 km

(76,01%). Dengan komposisi panjang jalan yang ada, maka diperlukan penambahan panjang dan peningkatan kondisi jalan kabupaten, sehingga dapat lebih menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. Peningkatan panjang dan kondisi jalan kabupaten tersebut, harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

Tabel Data Jalan Menurut Status Jalan Tahun 2018-2023

No	Status Jalan	Sat	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan Nasional	km	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2	Panjang Jalan Provinsi	km	143,47	143,47	143,47	143,47	143,47	143,47
3	Panjang Jalan Kabupaten	km	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00

Tabel Data Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2018-2022

No	Kondisi Jalan Kabupaten	Sat	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	km	371,414	331,82	338,54	347,27	216,915	
2	Sedang	km	56,99	118,40	116,45	123,36	205,148	
3	Rusak ringan	km	75,604	63,68	109,67	141,60	64,182	
4	Rusak berat	km	219,992	210,10	159,34	111,77	237,755	

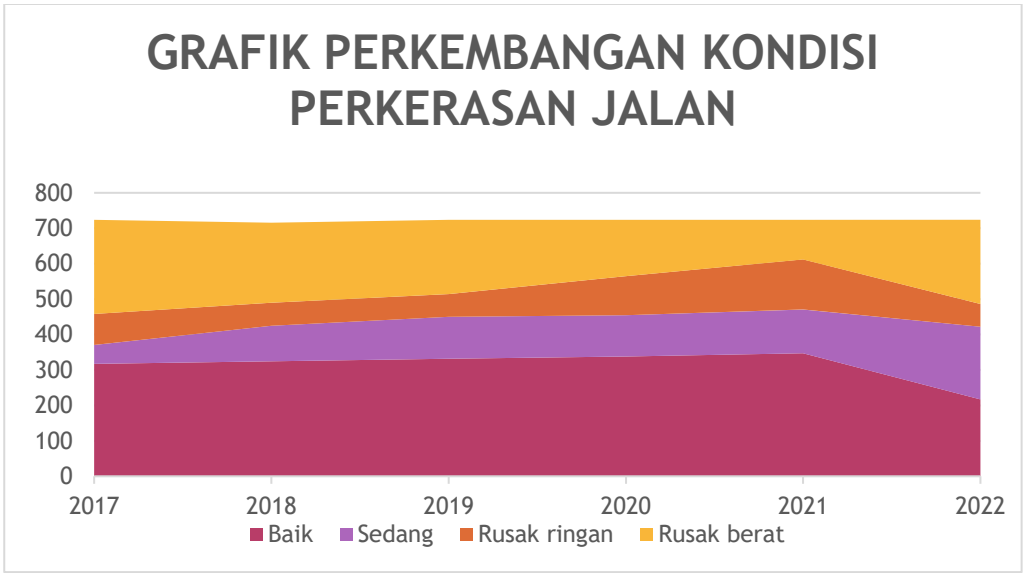

Tabel Data Jalan Menurut Jenis Perkerasan Tahun 2018-2022

No	Jenis Perkerasan	Sat	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aspal/Beton	km	320,4	333,13	325,09	344,22	332,938	
2	Penetrasi macadam	km	94,48	180,11	182,34	197,43	187,637	
3	Telford/ Kerikil	km	78,92	70,14	83,62	61,28	77,322	
4	Tanah/ belum tembus	km	230,2	140,61	132,95	121,07	126,103	

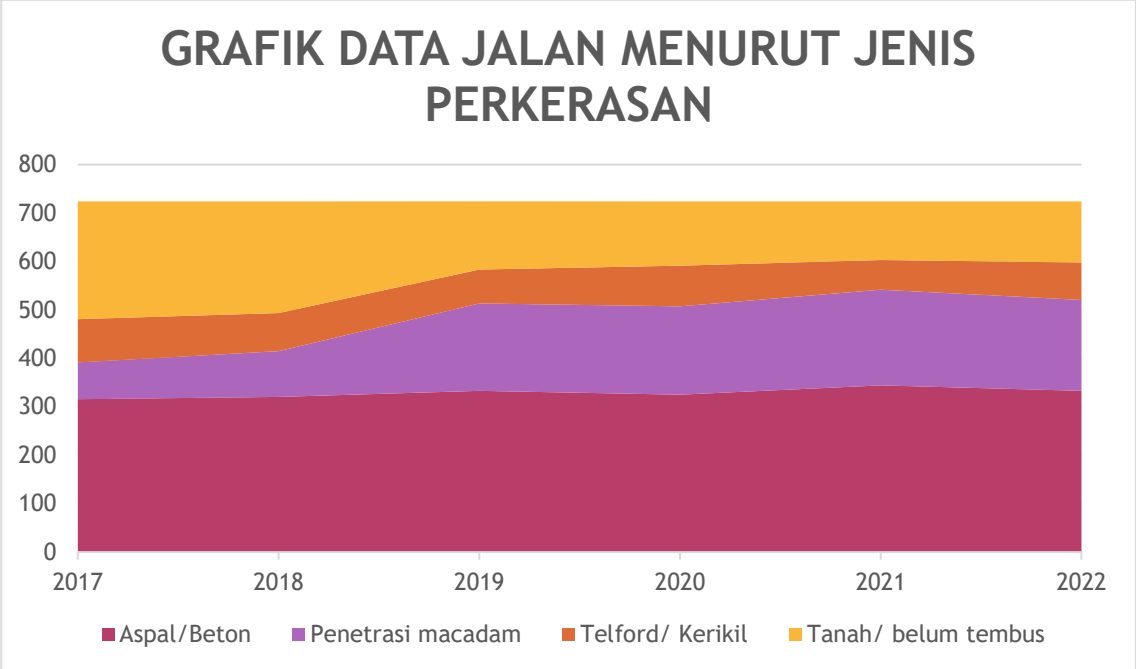

Irigasi merupakan prasarana yang vital dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa ini untuk berdaulat dalam bidang pangan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban mendukung program ketahanan pangan Nasional. Untuk itu perlu dilakukan penetapan target penanganan prasarana irgasi.

Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No. 390 Tahun 2007 tentang Status Daerah Irigasi jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak 171 DI dengan Luas Sawah sebanyak 16.852,39 Ha. Pada akhir tahun 2013 kondisi irigasi baik sebanyak 3.367,58 Ha, kondisi sedang 10.272,83 Ha dan kondisi rusak 3.211,98 Ha dengan Indeks Pertanaman (IP) sebesar 102,51%.

Sesuai SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi jumlah Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan Luas Sawah sebanyak 11.442,51 Ha, hal ini karena adanya penambahan 6 Daerah Irigasi baru. Pada tahun 2021 kondisi infrastruktur irigasi Kabupaten Lampung Barat dari total luas Daerah Irigasi 11.442,51 Ha, Daerah Irigasi dengan kondisi baik seluas 6.407,8 Ha (62,1%), kondisi sedang 2.056,60 Ha (17,97%) dan kondisi rusak 2.978,22,00 Ha (18,12%) dengan Indek Pertanaman (IP) sebesar 169,62

Grafik luas baku irigasi yang belum dikelola

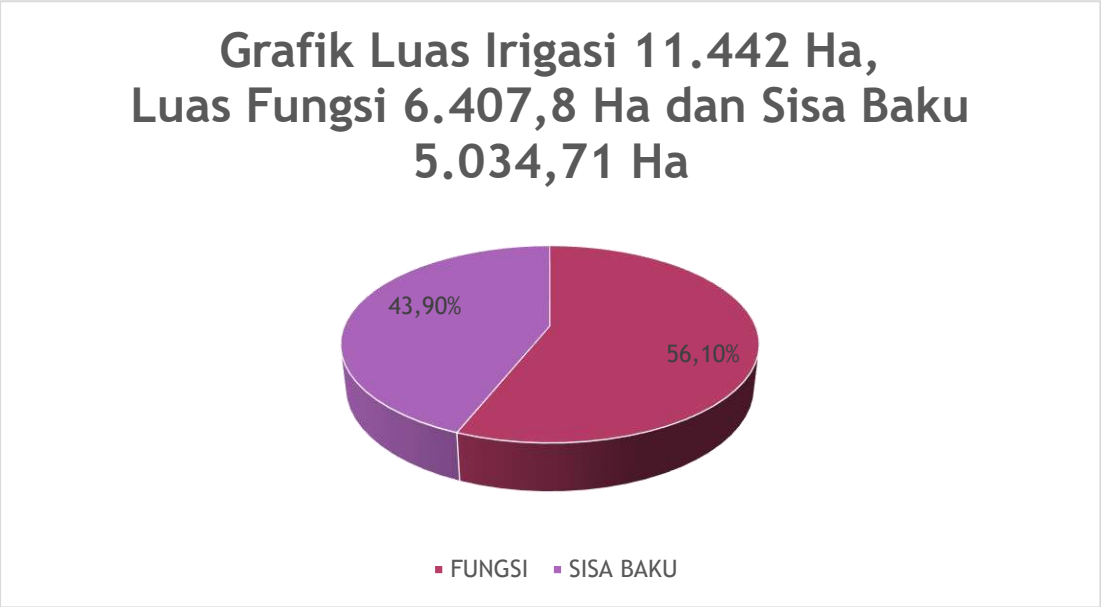

Grafik pada Gambar secara total luas baku irigasi yang belum dikelola atau sisa baku sebesar 43,90% (5.034,71Ha) dan yang telah dikelola atau berfungsi sebesar 56,10% (6.407,8 Ha). Hal ini terjadi karena sebagian daerah irigasi yang dapat diairi merupakan kebun produktif (kopi) dan sebagian lagi merupakan daerah yang rawan banjir terutama daerah Irigasi di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Potensi ini dapat dikembangkan apabila harga komoditas padi dipasaran lebih menguntungkan dari pada komoditas perkebunan dan harus didukung oleh kehandalan kinerja jaringan irigasi. Komitmen untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi harus juga didukung oleh

ketersediaan pendanaan. Upaya ini harus dilakukan dalam rangka mencapai program pemerintah untuk menjadi bangsa yang berdaulat dibidang pangan.

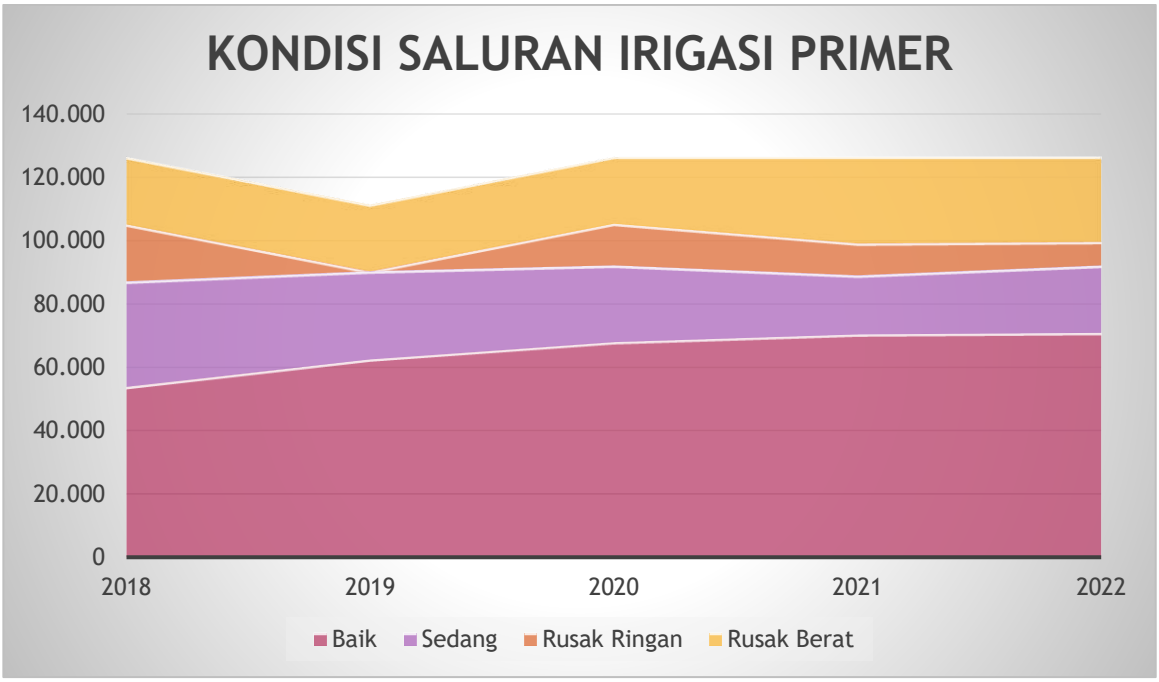

Grafik Kondisi Irigasi Kabupaten Lampung Barat 2018-2022

Ditinjau dari Indeks Pertanaman (IP) terlihat mengalami peningkatan seperti ditunjukan oleh grafik dibawah ini.

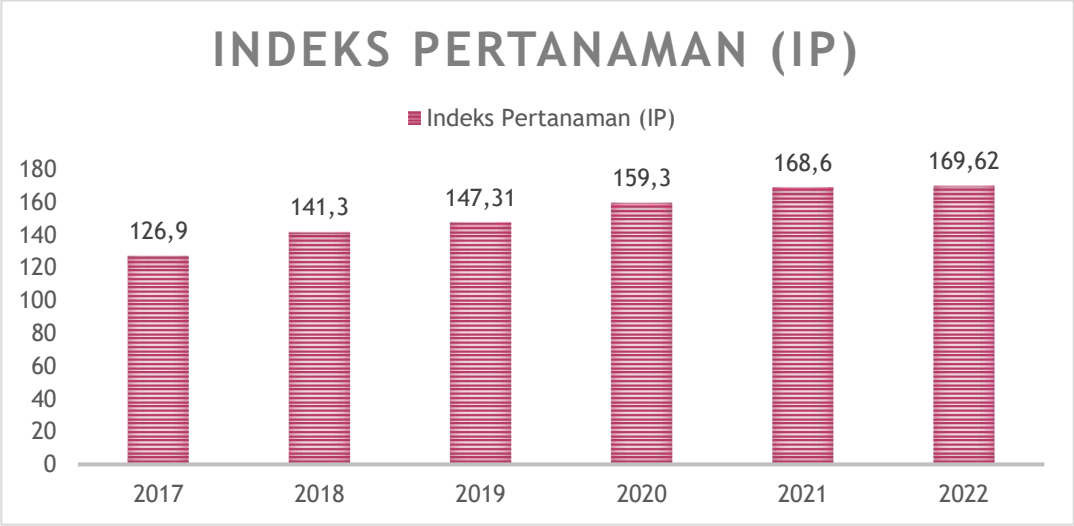

Seluruh desa/kelurahan yang ada di Lampung Barat sudah terlayani SPAM Perdesaan.

SPAM di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

1. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan - SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan.
2. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan – SPAM Perdesaan.

Sedangkan pengelolaan SPAM yang telah dibangun dibagi menjadi :

1. SPAM Perdesaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas/OMS/BUMDES)
2. SPAM Ibukota Kabupaten yang dikelola oleh PDAM Limau Kunci

Pelayanan air bersih khususnya pada darah ibukota kecamatan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci. PDAM ini telah beroperasi sejak tahun 1995 setelah terpisah dari PDAM Kabupaten Lampung Utara.

Total sambungan rumah (SR) PDAM Limau Kunci sebanyak 14.341 SR, dengan SR aktif sebanyak 14.257 unit (data sampai dengan tahun 2020).

Sumber air yang dipakai berasal dari air sungai/ air permukaan dan beroperasi dengan memanfaatkan gravitasi.

Tabel Pelayanan SPAM IKK Kabupaten Lampung Barat

No	Pelayanan Air Bersih	Kapasitas
1	Sumber air baku	Mata Air dan Air Permukaan
2	Kapasitas terpasang	225 liter/detik
3	Cabang/unit pengelolaan	10 unit
4	Jumlah sambungan rumah (SR) terpasang	14.354 SR
5	Jumlah sambungan rumah (SR) aktif	14.270 SR
6	Produksi air	3.589.594 M3
7	Distribusi air	3.440.119 M3
8	Air terjual	2.719.449 M3
9	Sistem operasi dan jam pelayanan	Gravitasi murni/24 jam

Sumber : PDAM Limau Kunci Tahun 2023

Tabel Hasil pembangunan gedung pada kurun waktu 2021 – 2023

Pembangunan

NO	GEDUNG	TAHUN
1.	Pembangunan Masjid Al-Mansyur Pasar Liwa	2021
2.	Pembangunan Barak Kodim 0421	2021
3.	Rehabilitasi Barak Dalmas Polres	2021
4.	Rehabilitasi Satreskim Polres	2021
5.	Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Ketua 2	2020
6.	Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Ketua 1	2020
7.	Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD	2020
8.	Rehabilitasi Rumah Dinas Kasi 3 Dan 4 Kejaksaan	2020
9.	Pembangunan Lamban Pancasila	2022
10.	Pembangunan GSG Bung Karno	2022
11.	Rehabilitasi Masjid Pekon Sidomulyo Pagar Dewa	2022
12.	Rehabilitasi Masjid Pekon Sukajadi BNS	2022
13.	Pembangunan Klinik Kejakasaan Negeri Lambar	2022
14.	Pembangunan Ruang Rapat KPU	2022
15.	Rehabilitasi Kantor Camat Belalau Kabupaten Lambar	2022
16.	Rehabilitasi Kantor Camat Sukau Kabupaten Lambar	2023
17.	Rehabilitasi Rumah Dinas Sekretaris Daerah	2023
18.	Rehabilitasi Kantor Bupati	2023
19.	Pembangunan Landscape Lamban Pancasila	2023
20.	Rehabilitasi Gedung Koramil 422-04 Balik Bukit	2023
21.	Pembangunan Parkiran GSG Bung Karno, Sumber Jaya	2023
22.	Rehabilitasi Lapangan Tembak Kodim Lampung Barat	2023
23.	Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Wakapolres Lampung Barat	2023
24.	Rehabilitasi Mess Kejaksaan Negeri Liwa	2023
25.	Rehabilitasi Ruang SDM Polres Lampung Barat	2023

Permasalahan yang ada di bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai.
2. Kuantitas sumber daya manusia di tingkat pengawas masih kurang.
3. Kondisi topografi dan geografis wilayah Lampung Barat yang bergelombang dan tanah labil.
4. Pelaksanaan konstruksi fisik dengan kondisi alam yang kurang mendukung, seperti curah hujan tinggi, longsor.
5. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai.
6. Rendahnya partipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Rendahnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam ikut memelihara sarana yang telah dibangun.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD 2022 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat sesuai tabel berikut:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD / Renstra OPD Tahun 2023

Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	4	5	6	7	4	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Bidang urusan yang Dilaksanakan**	**3 Urusan**	**7.942.239.650**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Bidang urusan yang Dilaksanakan**	**3 Urusan**	**6.707.683.220**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	26 Dokumen	85.875.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	26 Dokumen	63.786.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	4 Dokumen	5.428.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	4 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen	6.152.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen	16.829.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen	6.155.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen	6.525.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	7.080.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	6.375.000	

		Perencanaan OPD				Perencanaan OPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen	7.180.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen	6.551.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	18 Dokumen	7.180.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	18 Dokumen	6.471.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	18 Dokumen	23.770.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	18 Dokumen	11.035.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.636.935.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.330.510.600	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah periode Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	4.610.315.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah periode Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5.296.540.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	7.870.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	6.245.000	

		Perangkat Daerah				Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	18 Dokumen	8.575.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	18 Dokumen	17.425.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.175.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.300.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	2 Orang	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	2 Orang	16.481.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	2 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	2 Orang		
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan monitoring Pegawai	1 Laporan	16.418.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	156.313.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	122.002.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	4 Jenis	5.988.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	4 Jenis	5.994.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan Dan Penggandaan	8	Jenis	13.700.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan Dan Penggandaan	8	Jenis	25.700.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	4	SKHU	9.360.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	8	SKHU	9.360.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu, Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	12	Kali	7.265.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu, Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	12	Kali	8.915.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	Bulan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	Bulan	72.033.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	275.264.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	134.861.550	
	Surat Menyurat Penyediaan Jasa	Jumlah Surat Masuk, Jumlah Surat Keluar	240	Surat	7.325.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Jumlah Surat Keluar	240	Surat	5.120.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet	72	Rekening	42.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet	72	Rekening	42.800.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	225.139.750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	86.941.550	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masa Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12	Bulan	1.167.851.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masa Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12	Bulan	1.040.041.070	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12	Unit	219.937.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12	Unit	143.025.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	12	Unit	29.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	12	Unit	27.100.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4	Gedung	46.569.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4	Gedung	133.701.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	4	Gedung	728.828.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	4	Gedung	593.501.990	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik**	**1,45**	**Persen**	**64.633.833.880**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik**	**1,45**	**Persen**	**49.268.541.574**	

	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jalan dalam kondisi mantap	10.5	KM	64.633.833.880	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jalan dalam kondisi mantap	10.5	KM	49.268.541.574	
	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun	12	Dokumen	1.109.308.620	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun	12	Dokumen	825.787.100	
	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan	6	Dokumen	649.399.560	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan	6	Dokumen	559.964.800	
	Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun	2.5	KM	8.216.250.000	Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun	2,5	KM	1.318.752.000	
	Rekonstruksi Jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	8	KM	30.686.000.000	Rekonstruksi Jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	8	KM	4.145.736.000	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Terpelihara	100	KM	6.400.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Terpelihara	100	KM	2.539.567.000	
	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	20	Unit	6.757.200.000	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	1	Unit	2.244.000.000	
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Periode penanganan tanggap darurat pada jalan dan jembatan akibat bencana	12	Bulan	350.000.000	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Periode penanganan tanggap darurat pada jalan dan jembatan	12	Bulan	253.945.048	

							akibat bencana			
						Rehabilitasi Jalan	Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	7,158 km	30.941.987.000	
						Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah panjang jalan yang dipelihara secara berkala	1,617 km	1.529.400.000	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi**	**100 Persen**	**150.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi**	**100 Persen**			
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah masyarakat pembinaan jasa konstruksi	30 Orang	150.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah masyarakat pembinaan jasa konstruksi	54 Orang			
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	30 Orang	150.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	54 Orang			
4	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jaringan Irigasi yang berfungsi baik**	**0,9 Persen**	**41.947.067.100**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jaringan Irigasi yang berfungsi baik**	**3 Persen**		**4.863.996.500**	

	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik lokasi yang rawan genangan banjir yang ditangani	6 Lokasi	5.015.988.700	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik lokasi yang rawan genangan banjir yang ditangani	9 Lokasi	822.898.000	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	285.061.700	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	64.222.000	
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	108.463.000	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun			
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,27 Km	507.870.000	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun			

	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	2	Lokasi	794.544.000	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi		
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	1,85	Km	3.317.050.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi /Direstorasi	9 Lokasi	758.676.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi kondisi Baik	2,663	Ha	36.931.078.400	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Irigasi yang berfungsi dengan baik	343 Ha	4.041.098.500
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis	4	Dokumen	169.373.400	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis	1 Dokumen	115.171.000
	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0,303	km	1.258.400.000	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun		
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.906	km	1.425.879.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		192.430.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.654	km	936.398.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		2.815.454.500

	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	22,05	km	28.866.883.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		798.308.000	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Akses Air Bersih**	**1,75**	**Persen**	**7.200.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Akses Air Bersih**	**2**	**Persen**	**549.989.199**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM	3	SR	3.600.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM	3	SR	549.989.199	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	Dokumen	49.989.000	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	3	SR	3.500.000.000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	3	SR	500.000.199	

6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah**	**1,68**	**Persen**	**6.000.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah**	**1,48**	**Pesen**	**2744606000**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani Sanitasi	900	Rumah Tangga	6.000.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan rumah ttangga yang terlayani Sanitasi	7	Lokasi	2744606000	
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki tangki Septik	900	Rumah Tangga	6.000.000.000	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki Septik	7	Lokasi	2744606000	
7	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Saluran Drainase kondisi baik**	**5**	**Pesen**	**2.000.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**persentase penanganan lokasi genangan air**	**5**	**Persen**	**407.514.975**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2,5	Km	2.000.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2	Lokasi	407.514.975	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2,5	Km	2.000.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2	Lokasi	407.514.975	

8	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**21,05 Persen**	**19.022.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase gedung yang dibangun /direhabilitasi**	**60,05 Pesen**	**81.748.200**	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota kondisi baik Panjang Jalan lingkungan yang dibangun	180 Sistem Jaringan	19.022.000.000	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yangdibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota kondisi baik Panjang Jalan lingkungan yang dibangun	0 Sistem Jaringan	0	
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang lingkungan perdesaan yang dibangun	180 Sistem Jaringan	18.000.000.000	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang lingkungan perdesaan yang dibangun			

	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun	7	Dokumen	511.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun			
						Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			81.748.200	
9	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase gedung yang dibangun /direhabilitasi**	**25**	**Persen**	**6.400.000.000**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase gedung yang dibangun /direhabilitasi**	**84**	**Persen**	**2.596.619.231**
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6	Unit	6.400.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10	Gedung	2.596.619.231
	Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan	1	Dokumen	250.000.000	Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan			

		Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5	Dokumen	150.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		308.449.610	
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	6	unit	6.000.000.000	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai		2.213.169.775	

10	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**100**	**Persen**	**558.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**27,53**	**Persen**	**41903500**	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	15	Laporan	158.000.0000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	15	Laporan	158.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian				
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	25	Unit	400.000.000		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	4	Unit		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	25	Unit	400.000.000		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	4	unit		

12	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Perumahan Layak Huni**	**98,57**	**Persen**	**4.600.000.000**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Perumahan Layak Huni**	**98,58**	**Persen**	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	200	Rumah	4.200.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	200	Rumah	4.200.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			
13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan**	**95**	**Persen**	**575.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan**	**85**	**Persen**	**261198800**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, ,Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananaya sosialisasi peraturan perudang-undangan Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	575.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, ,Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananaya sosialisasi peraturan perudang-undangan Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	404.869.200

	Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	404.869.200	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	250.000.000						
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1	Dokumen	125.000.000						
14	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Presentase Jumlah Kasus Yang Tertangani**	**100**	**Persen**	**120.000.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Presentase Jumlah Kasus Yang Tertangani**	**50**	**Persen**	**101.430.000**	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Kasus	120.000.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Kasus	101.430.000	

	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Kasus	120.000.000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Kasus	101.430.000	
15	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Presentase Jumlah Kasus Ganti Rugi Yang Tertangani**	**100 Persen**	**700.000.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Presentase Jumlah Kasus Ganti Rugi Yang Tertangani**			
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	1 Dokumen	700.000.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persil tanah yang diadakan			
16	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Tanah Pemda Yang Bersertifikat**	**72,28 Persen**	**471267500**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Tanah Pemda Yang Bersertifikat**	**68,77 Persen**	**392.878.000**	
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	2000 Laporan	226260000	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		167.380.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	2000	Laporan	226260000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		167.380.000	
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	500	Laporan	245007500	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		225.498.000	
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	500	Laporan	245007500	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		225.489.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan usulan masyarakat diajukan melalui surat ataupun melalui wadah berupa musrenbang, dari tingkat pekon/desa hingga tingkat kabupaten. Adapun penentuan program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan disesuaikan dengan skala prioritas dari program dan kegiatan yang diusulkan dan atas ketersediaan dana APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat mendukung terhadap Kebijakan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kemandirian ekonomi agar keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat terjaga sebagaimana tercermin pada sasaran pokok bidang ekonomi dan bidang sosial.
2. Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sesuai dengan tujuan yang tertera pada Rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Daerah

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
2. Meningkatnya layanan infrastruktur irigasi
3. Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman
4. Meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai RTRW
5. Meningkatnya sertifikasi lahan pemerintahan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.

BAB V
PENUTUP

Sebagai penutup dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku dinas pendukung dari kegiatan berbagai sektor lainnya, dalam penyusunan RENJA-OPD telah diupayakan untuk selaras dan sejalan dengan berbagai kegiatan yang telah disusun oleh Dinas/Instansi lainnya dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang dirangkum melalui Jaring Asmara (Forum Musrenbang Pekon sampai dengan Musrenbang Kabupaten).

Berbagai rencana program kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan skala prioritas untuk masing-masing misi, dalam pelaksanaannya akan memperhatikan dan menyesuaikan dengan kesiapan dana yang dimiliki dan disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

IRANSARI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640912 199703 1 005

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						**255.176.842.627,00**							**154.856.105.384,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**253.990.115.627,00**							**153.796.105.384,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**253.369.627.563,00**							**152.813.200.634,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	**83,5 %**			**83,5 %**	**9.457.986.219,00**						**83,5 %**	**21.545.333.534,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Dae*	-			5 dokumen 11 dokumen 12 dokumen	92.656.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur	-	188.001.088,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	33.771.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		40.076.410,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6.625.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		7.224.668,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.745.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		81.889.775,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.920.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		8.192.305,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8.665.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		9.423.480,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9.190.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		9.556.580,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	18.740.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		31.637.870,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* *Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* *Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	-			1 laporan 63 orang 1 laporan 4 laporan	5.762.103.700,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur	-	6.171.760.485,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	5.729.558.700,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		6.136.329.265,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9.650.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		10.474.970,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	10.495.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		11.413.325,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	12.400.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		13.542.925,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	-			4 dokumen 12 Laporan 12 Laporan 4 paket 8 Paket	198.992.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur	-	208.052.603,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		7.970.028,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	27.725.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		18.234.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	9.360.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		12.458.160,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	13.895.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		9.669.715,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	141.012.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		159.720.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*	-			54 Unit	1.909.330.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur	-	1.646.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1.735.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	61.150.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		66.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	113.180.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		79.860.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			12 Laporan 12 Laporan 240 Laporan	145.302.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur	-	3.063.326.448,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	7.475.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		9.749.575,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		56.966.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	95.027.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		2.996.610.073,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	-			31 Unit	1.349.602.519,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur	-	10.267.782.910,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	121.750.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		292.736.147,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	188.836.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		172.686.965,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	27.100.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		39.663.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	387.291.100,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		61.983.339,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	624.625.419,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		9.700.712.659,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik***	**0,9150,915 %**			**0,9150,915 %**	**55.843.285.800,00**						**0,9150,915 %**	**41.887.067.100,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah titik lokasi yang rawan genangan banjir yang ditangani*	-			6 titik	27.193.442.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	4.955.988.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0031	Rehabilitasi Check Dam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi				2 Unit	2.744.200.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		797.544.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1,85 KM	22.326.300.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		3.317.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0,27 KM	1.549.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		507.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	362.292.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		108.463.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	211.650.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		225.061.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Panjang Jaringan Irigasi kodisi Baik*	-			2.663 KM	28.649.843.800,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	36.931.078.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,8 KM	1.500.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		1.258.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				2 Bendung	9.697.056.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		3.730.760.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0,303 KM	1.663.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		543.385.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,906 KM	4.570.950.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		1.425.879.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,654 KM	9.670.150.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		936.398.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				22,05 KM	1.187.555.800,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		28.866.883.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				4 Dokumen	361.132.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		169.373.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase Peningkatan Akses Air Bersih***	**0,75 %**			**0,75 %**	**3.885.633.000,00**						**0,75 %**	**2.100.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM*	-			300 SR	3.885.633.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	400.788.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				300 Liter/Detik	804.195.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				3 Unit	2.680.650.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak*** ***Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Aman***	**6,72 %**			**1,68 %** **2,00 %**	**3.210.357.490,00**						**1,68 %**	**3.100.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penanganan Rumah tangga dengan Sanitasi layak*	-			900 Rumah Tangga	3.210.357.490,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	3.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				400 Rumah Tangga	3.063.429.490,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	146.928.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase Peningkatan Saluran Drainase kondisi baik***	**75 %**			**75 %**	**2.686.020.000,00**						**75 %**	**2.100.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun*	-			2500 M	2.686.020.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2500 M	1.950.140.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	735.880.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik***	**75 %**			**75 %**	**30.858.668.130,00**						**75 %**	**6.400.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	-			6 Unit	30.858.668.130,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur	-	6.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	249.720.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	30.461.404.530,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				5 Dokumen	147.543.600,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap***	**1,45 %**			**1,45 %**	**146.432.387.924,00**						**1,45 %**	**74.405.800.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Peningkatan Panjang Jalan kondisi Mantap*	-			10.5 KM	146.432.387.924,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	74.405.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				12 Dokumen	627.085.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		1.283.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				2,5 KM	10.531.110.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		9.510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				8 KM	70.248.649.524,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		35.522.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				8 KM	15.077.119.400,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		5.328.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				3 Jembatan	1.224.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		1.389.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				3 Jembatan	21.888.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		7.821.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				742 KM	1.381.884.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				37 KM	18.398.540.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		5.394.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				100 KM	7.056.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		7.408.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan***	**100 %**			**100 %**	**135.007.000,00**						**100 %**	**150.000.000,00**	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan*	-			1 dokumen	135.007.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	135.007.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan***	**100 %**			**100 %**	**860.282.000,00**						**100 %**	**1.125.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, ,Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananaya sosialisasi peraturan perudang-undangan Bidang Penataan Ruang*	-			1 dokumen	421.434.500,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	-	-	625.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	305.055.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	116.379.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, ,Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananaya sosialisasi peraturan perudang-undangan Bidang Penataan Ruang*	-			5 Dokumen	438.847.500,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	-	-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	438.847.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**620.488.064,00**							**982.904.750,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah***	**75 %**			**75 %**	**244.339.064,00**						**75 %**	**582.904.750,00**	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun*	-			25 Unit Rumah	61.824.564,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				25 Unit Rumah	61.824.564,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan danPengembangan Perumahan*	-			15 Laporan	182.514.500,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	182.904.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				15 Laporan	182.514.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		182.904.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase peningkatan rumah Layak Huni***	**0,25 %**			**0,25 %**	**376.149.000,00**						**0,25 %**	**400.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi*	-			1 Dokumen	376.149.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	376.149.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.186.727.000,00**							**1.060.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**1.186.727.000,00**							**1.060.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Persentase Kasus yang Tertangani***	**100 %**			**100 %**	**153.320.000,00**						**100 %**	**110.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 dokumen	153.320.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	153.320.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**2.10.07**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**-**	**-**			**-**	**49.150.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	49.150.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	-	-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				500 Laporan	49.150.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	***Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong***	**100 %**			**100 %**	**984.257.000,00**						**100 %**	**900.000.000,00**	
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	*Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong*	-			1000 Laporan	300.295.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				1000 Laporan	300.295.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.*	-			400 Laporan	683.962.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat	-	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				400 Laporan	683.962.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Infrastruktur 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Aparatur dan Masyarakat		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	J U M L A H							**255.176.842.627,00**							**154.856.105.384,00**	

LAMPIRAN 2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Renja OPD tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD/ Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**03**				**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**														
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**													
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi													
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	44 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	36.433.100	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	11 dokumen	33.121.000	
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.567.880	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 dokumen	5.970.800	
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.444.525	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 dokumen	6.767.750	
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.447.550	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 dokumen	6.770.500	
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8.566.800	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 dokumen	7.788.000	
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8.687.800	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 dokumen	7.898.000	
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	48 Laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 Laporan	28.761.700	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	26.147.000	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan	63 Orang/Tahun	63 Orang/Tahun	63 Orang/Tahun	5.578.481.150	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	63 Orang/bulan	5.071.346.500	
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	1 dokumen	5 dokumen	1 Laporan	9.522.700	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	8.657.000	
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	16 Laporan	4 dokumen	4 dokumen	4 Laporan	10.375.750	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	4 Laporan	9.432.500	
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	12.311.750	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	11.192.500	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Aparatur Yang Mengikuti Diklat**													
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	2 orang	- orang	0 orang	2 orang	12.100.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	2 orang	11.000.000	

					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		24 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	25.000.000	BALIK BUKIT	APBD							
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu														
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianyan Komponen Listrik	16 paket	4 paket	4 paket	4 Paket	7.245.480	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	4 Paket	6.586.800	
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan Dan Penggandaan	32 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	16.577.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	8 Paket	15.070.000	
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	11.325.600	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	4 Dokumen	10.296.000	
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu, Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.790.650	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	7.991.500	
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	145.200.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	132.000.000	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**															
1	**03**	**01**	**2.07**	03	Pengadaan Alat Besar		4 unit	- unit	unit	1 unit	1.500.000.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 unit	1.500.000.000	
1	**03**	**01**	**2.07**	05	Pengadaan Mebel		200 unit	- unit	50 unit	50 unit	60.500.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	50 unit	55.000.000	
1	**03**	**01**	**2.07**	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 unit	- unit	3 unit	3 unit	72.600.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	3 unit	66.000.000	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Perkantoran tepat Waktu**														
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Jumlah Surat Keluar	960 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	270 Laporan	8.863.250	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	270 Laporan	8.057.500	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	51.788.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	47.080.000	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	272.419.098	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	247.653.725	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerahn Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Masa Terpeliharanya Barang Milik Daerah**									Daerah	Aparatur Sipil Negara			
1	**03**	**01**	**2.09**	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	48 Unit	10 unit	10 unit	10 Unit	266.123.770	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 Unit	241.930.700	
				03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Alat Besar	8 Unit	2 unit	2 unit	2 Unit	172.686.965	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	156.988.150	
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	48 Unit	12 unit	12 unit	12 Unit	36.058.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 Unit	32.780.000	
				09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	1 gedung	1 unit	1 Unit	56.348.490	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	51.225.900	
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung milik pemerintah daerah yang dipelihara	16 Unit	4 gedung	4 gedung	4 Unit	881.882.969	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	4 Unit	801.711.790	
01	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Peningkatan Luas Wilayah Bebas Banjir,Persentase jaringan Irigasi yangberfungsi baik**														
01	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Wilayah Bebas Banjir														
01	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	4 Dokumen	1 dokumen	3 dokumen	2 Dokumen	225.061.700	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	255.061.700	
				04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	1 Dokumen	1 dokumen	4 dokumen	1 Dokumen	108.463.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	108.463.000	

				18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah lokasi prasarana pengaman danau yang dibangun	8,00 KM	1 lokasi	9 lokasi	0,27 KM	507.870.000	LUMBOK SEMINUNG	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	0,27 KM	507.870.000	
				31	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah lokasi prasarana pengaman check dam yang dibangun	7 Unit	2 lokasi	6 lokasi	2 Unit	797.544.000	TERSEBAR	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	2 Unit	797.544.000	
				46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan	10,65 KM	9 lokasi	5 lokasi	1,85 KM	3.317.050.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	1,85 KM	3.317.050.000	
01	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Jaringan Irigasi yang berfungsi dengan baik**													
01	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya domen perencanaan teknis	3 Dokumen	1 dokumen	30 dokumen	4 Dokumen	169.373.400	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	4 Dokumen	169.373.400	
				02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun	8,0 KM	- Ha	- Ha	0,8 KM	1.258.400.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	0,8 KM	1.258.400.000	
				03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	1 Bendung	- -	- -	2 Bendung	3.730.760.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	2 Bendung	3.730.760.000	
				04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun	3,624 KM	8 Ha	710 Ha	0,303 KM	543.385.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	0,303 KM	543.385.000	
				08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun	2,616 KM	51 Ha	500 Ha	0,906 KM	1.425.879.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	0,906 KM	1.425.879.000	
				14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun	88,200 KM	18 lokasi	165 lokasi	0,654 KM	936.398.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	0,654 KM	936.398.000	
				21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	88,24 KM	633 Ha	4170 Ha	22,05 KM	28.866.883.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	22,05 KM	28.866.883.000	
01	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Peningkatan Air Minum Layak**													
01	**03**	**03**	**2.01**		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih													
01	**03**	**03**	**2.01**	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya dokumen perencanaan sarana dan prasarana air bersih	1 Dokumen	2 dokumen	- dokumen	1 Dokumen	100.000.000	BALIK BUKIT	APBD	Nasional		Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	100.000.000	
				4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah lokasi sarana dan prasaran air minum yang dibangun	300 SR	140 SR								Masyarakat Lampung Barat	300 SR	3.000.000.000	
							250 liter/detik		250 liter/detik	250 liter/detik	3.000.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD	Nasional					
01	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih													
01	**03**	**05**	**2.01**		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi													
01	03	05	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	500 Rumah Tangga	- -	- -	500 Rumah Tangga	3.000.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD	Nasional		Masyarakat Lampung Barat	500 Rumah Tangga	3.000.000.000	
01	03	05	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang dibangun	100 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	25 Rumah Tangga	25 Rumah Tangga	3.000.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD	Nasional		Masyarakat Lampung Barat	400 Rumah Tangga	3.000.000.000	
				12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi	- -	7 lokasi	105 lokasi	-	-	-					-	-	
01	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**persentase penanganan lokasi genangan air**													
01	**03**	**06**	**2.01**		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-Gorong/Trotoar													
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					1,00 Dokumen	100.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Aparatur	1 Dokumen	100.000.000	

01	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang dibangun	2.500 M	284 meter	430 meter	625 M	2.000.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	2.500 M	2.000.000.000	
01	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Terbangunnya Jalan Lingkungan permukiman**													
01	**03**	**07**	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Jalan lingkungan													
01	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun	80 Sistem Jaringan	10,137 km	253 km	70 Sistem Jaringan	21.000.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	70 Sistem Jaringan	21.000.000.000	
				03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun	6 Sistem Jaringan	1 dokumen	5 dokumen	7 Sistem Jaringan	511.000.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	7 Sistem Jaringan	511.000.000	
01	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase gedung yang dibangun/direhabilitasi**													
01	**03**	**08**	**2.01**		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terbangunnya gedung bangunan negara													
01	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	24 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	6 Dokumen	150.000.000	
				02	Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung negara yang dibangun/direhabilitasi	- -	- -		1 Dokumen	250.000.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	-	-	
				12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	6 unit	6 unit	10 unit	6 Unit	6.000.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	6 unit	6.000.000.000	
01	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik**													
01	**03**	**10**	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Mantap													
01	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun	48 Dokumen	13 dokumen	124 dokumen	12 Dokumen	1.222.000.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	1.164.000.000	
				04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan	24 Dokumen	1 dokumen	9 dokumen	6 Dokumen	715.000.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	6 Dokumen	681.000.000	
							724 km												
				05	Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun	2,50 KM	1,27 km	40 km	2,5 KM	9.058.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	2,5 KM	8.627.000.000	
				08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	8,00 KM	14,55 km	126 km	8 KM	33.831.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	8 KM	32.220.000.000	
				09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	37 KM	- km	- km	37 KM	5.138.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	37 KM	4.894.000.000	
				10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	8 KM	- -	- -	8 KM	5.075.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	8 KM	4.834.000.000	
				11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Terpelihara	100,00 KM	14,58 km	32,5 km	100 KM	7.056.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	100 KM	6.720.000.000	
				12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	4 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	7.449.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	20 M	7.095.000.000	
				18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	40 M	- -	- -	40 M	1.323.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	40 M	1.260.000.000	

				21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Periode penanganan tanggap darurat pada jalan dan jembatan akibat bencana	1 KM	1 tahun	5 tahun	1 KM	385.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	1 KM	367.000.000	
					Rekonstruksi Jalan Desa Strategis			2,465 km											
01	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase pelaku jasa konstruksi yang mengikuti**													
01	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi													
01	03	11	2.04	04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	1 Laporan	- -	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	30 Orang	150.000.000	
01	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan**													
01	**03**	**12**	**2.01**		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen RTRW													
01	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	-	0%	-		Daerah	Aparatur Sipil Negara	- Dokumen		
				02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0 -	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	250.000.000	
				04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	4 Dokumen	- -	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	125.000.000	
1	**3**	**12**	**2.03**		**Kordinasi dan Singkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang**													
1	3	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	2 Dokumen	- -	- -	1 Dokumen	180.000.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	180.000.000	
01	**04**				**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**														
01	**04**	**'02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**													
1	**4**	**2**	**2.03**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun**													
1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	25 Unit Rumah	- -	- -	25 Unit Rumah	400.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	25 Unit Rumah	400.000.000	
01	**04**	**'02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**														
01	04	'02	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana	- -	- unit	- unit	-	-	-					-	-	
01	**04**	**'02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan													
01	04	'02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	15 Laporan	0 -	0 0	15 Laporan	165.900.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	15 Laporan	165.900.000	
01	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Perumahan Layak Huni**													

1	**4**	**3**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi**													
1	4	3	2.01	2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	- -	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	BALIK BUKIT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	400.000.000	
01	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	Tersedianya rumah layak huni bagi MBR													
01	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah MBR yang rehabilitasi	200 Unit Rumah		2500 rumah	200 Unit Rumah	4.200.000.000		APBD		Daerah	Masyarakat Lampung Barat	200 Unit Rumah	4.200.000.000	
				02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	jumlah Dokumen rencana kulitas Pemukian dan perumahan kumuh	- -	- dokumen	- dokumen	-	-	-					-	-	
02					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
02	**10**				**PERTANAHAN**														
02	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Presentase Jumlah Kasus Yang Tertangani**													
02	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya mediasi penyelesaian sengketa pertanahan													
				01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	110.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	90.000.000	
02	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus konflik pertanahan yang diselesaikan	- -	1 kasus	0 kasus	-	-	-					-	-	
02	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Presentase Jumlah Kasus Ganti Rugi Yang Tertangani													
02	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya tanah untuk Pemda Lampung Barat**													
02	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah luas tanah yang diadakan	1 Dokumen	2 percil	10 Ha	1 Dokumen	700.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	700.000.000	
2	**10**	**7**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**														
2	**10**	**7**	**2,01**		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat**													
2	10	7	2,01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam	500 Laporan	- -	- -	500 Laporan	50.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	1.000 Laporan	150.000.000	
02	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Tanah Pemda Yang Bersertifikat**													
02	**10**	**08**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong													

02	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1000 Laporan	24 percil	675 percil	1.000 Laporan	150.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD		Daerah	Aparatur Sipil Negara	450 Laporan	800.000.000	
02	10	08	2.02		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran Atas Hak Tanah	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.												
02	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi	Jumlah - Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1.197 orang	20000 orang	400 Laporan	750.000.000	LAMPUNG BARAT	APBD				-	-	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. NGARI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640912 199703 1 005

RENCANA KERJA (RENJA)

TA. 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas Rahmat dan Karunianya, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat terwujud.

Renja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial, Rencana Kerja tahun lalu sebagai alat yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial periode 2023, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan pembangunan serta visi kabupaten lampung barat. Selain itu Renja ini juga disusun berdasarkan pada RPJMD Periode tahun lalu sebagai wujud Inflementasi pelaksanaan agenda dan sekaligus dimaksud untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Lampung Barat 2023-2026.

Mengingat hal tersebut maka semua Bidang, Seksi dan Staf yang ada di lingkungan Dinas Sosial harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientas pada peningkatan kinerja, untuk mencapai Misi Dinas Sosial “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Lampung Barat yang Berdaya Saing”.

Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang dapat memberikan arahan, menjadi pegangan dalam rangka menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 terlaksana sesuai dengan target tujuan,sasaran terima kasih diucapkan kepada seluruh Pejabat Kabupaten Lampung Barat, yang telah membantu dalam proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaaten Lampung Barat

periode 2025, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Barat,

JAIMIN, S.I.P
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19650814 198503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II 5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 5
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 8
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31
BAB III 34
TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH 34
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat 35
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025 35
BAB IV 36
PENUTUP 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun sejak awal tahapan dalam perencanaan penganggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasipembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencanapembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengahdaerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Hasil evaluasi Renja Tahun lalu dan Hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan. Dengan akan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah. Tentunya, Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah otonom telah menjabarkan sasaran-sasaran pokok, arah kebijakan, program-program dan kegiatan pembangunan yang akan dicapai untuk kurun waktu selama empat tahun.

Dalam kurun waktu tersebut diharapkan akan diperoleh kemajuan dan perkembangan di semua sektor pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Dalam kaitan tersebut maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2007 sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing

menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD untuk periode 4 tahun dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahunnya. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kinerja seluruh OPD di daerah yang bersangkutan.

Renja OPD Dinas Sosial akan digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menentukan skala prioritas yang selanjutnya akan dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan demikian Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD Dinas Sosial menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja dinas agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur. Lebih Lanjut perumusan Rancangan Awal Renja OPD merupakan dokumen tahunan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai selanjutnya dituangkan dalam Dokumen perencanaan yang lebih konkret dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD Dinas Sosial berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
9. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan,Tata cara Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
11. Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja OPD dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki satuan kerja dan mengupayakan sumberdaya lainnya untuk terlibat secara aktif

dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Renja dinas ditujukan untuk mengaplikasikan Program Kerja Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang menjadi ruang lingkup Dinas Sosial ke dalam program-program dan kegiatan untuk direalisasikan. Sehingga diharapkan tujuan pembangunan dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renja 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
Memuat: latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Mmemuat: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RPKD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH
Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai dengan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah Program termasuk program rutin setelah refocusing banyak 4 (empat) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Alokasi dana Tahun 2023 sebesar Rp. 5.261.236.326,- (lima milyar dua ratus dua enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp 5.165.533.973 (lima milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 98,18 persen dengan kriteria penilaian realisasi anggaran **"SANGAT TINGGI"**

Dari seluruh sub kegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya tercapai 100 persen. Berdasarkan indikator sebagaimana yang termuat dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026 tercapai 100%.

Rata-rata pencapaian indicator keluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 100 persen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewengangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 telah menetapkan tujuan

dan sasaran perangkat daerah sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat, ditetapkan Tujuan Dinas Sosial yaitu "**Meningkatnya PMKS Mandiri"**. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkanlah tersebut, Dinas Sosial telah menetapkan Sasaran Strategis, yaitu "**Meningkatnya PMKS yang berdaya"**.

Berikut ini sajian indikator beserta target dan realisasinya yang tertuang dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Terget OPD	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
	Persentase Peningkatan PMKS yang Berdaya	(Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana) / 5	83.91%	87.34%	104.09%

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2023 total target capaian sebesar 419,55% dapat terealisasi sebesar 436,69% sehingga jika dibagi 5 indikator maka realisasi capaiannya sebesar 87.34%. Berikut perhitungan untuk masing-masing formulasi pengukuran indikator sasaran:

1. Penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar 19,55% dapat direalisasikan sebesar 36,69% melebihi dari target yang ditentukan, hal ini disebabkan adanya bantuan dari kementerian social berupa alat bantu disabilitas sebanyak 206 dan pengadaan dari APBD sebanyak 38 unit (466). Adapun rincian PMKS penyandang disabilitas yang tertangani adalah sebagai berikut:
    1) 82 orang Penerima kursi roda
    2) 45 kaca mata
    3) 46 Alat bantu dengar
    4) 1 bantuan permodalan
    5) 8 perawatan Orang ODGJ
    6) 26 tongkat
    7) 36 Sembako dan nutrisi untuk disabilitas

2. Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebanyak 9 orang dan dapat terpenuhi 100% berupa bantuan sembako dan nutrisi tambahan
3. Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti jumlah target sebanyak 49 orang dapat terpenuhi 100% dengan jenis bantuan dan rincian berupa 20 unit kursi roda ditambah dengan bantuan sembako, 7 unit penerima bantuan tongkat dan sembako, serta 23 orang lansia penerima sembako dan nutrisi tambahan.
4. Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti berjumlah 2 orang dapat terpenuhi seluruhnya barupa bantuan sembako dan nutrisi tambahan
5. Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana targetnya yang ditentukan sebanyak 200 paket untuk 400 orang dapat terpenuhi 100%

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memperhatikan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial 2023–2026, dirumuskan dalam kerangka pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang komprehensif dan utuh sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Beberapa isu-isu penting yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat diantaranya:

1. Masih Tingginya Angka Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Barat.
2. Masih Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Belum Mendapat Perhatian dari Pemerintah.
3. Kondisi Geografis kabupaten Lampung Barat, yang merupakan Daerah rawan bencana terutama longsor dan Gempa.
4. Kesenjangan Kesejahteraan Sosial yang cukup Tinggi antara Masyarakat mampu dan tidak mampu.

Dalam menghadapi permasalahan yang ada, perlu dilakukan analisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT, yaitu Strength/Kekuatan, Weakness/Kelemahan, Opportunity/Peluang dan Threath/Ancaman/Tantangan sebagai faktor penentu keberhasilan, dapat digambarkan kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan/*Strength*

1. Dukungan anggaran yang relatif besar.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas.
4. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Dinas Sosial dan OPD lainnya.

b. Kelemahan/ *Weakness*

1. Masih rendahnya SDM yang profesional dibidang kesejahteraan sosial.
2. Kurang memiliki SDM yang terampil dibidang komputerisasi dan pelayanan sosial
3. Masih kurang akuratnya data PMKS

c. Peluang/*Opportunity*

1. Infrastruktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan.
2. Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM.
3. Adanya potensi SDM mitra Dinas Sosial tingkat kecamatan an pekon yang dapat diberdayakan.

d. Ancaman/Tantangan/*Threath*

1. Perkembangan teknologi informasi.
2. Meningkatnya daya kritis masyarakat.

Dengan mengetahui faktor internal dan eksternal tersebut, dapat dilakukan strategi dan kebijakan guna mengatasi permasalahan dan dapat dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya sasaran, tujuan, misi, dan visi. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat diarahkan untuk mendorong peningkatan profesionalisme kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung terselenggaranya pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan hal tersebut diatas dan menyikapi dinamika permasalahan sosial, Dinas Sosial mempunyai tugas “Melaksankan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang sosial. Terkait dengan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Sosial;
4. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Sosial;
5. Pelayanan administrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
5. Bidang Pemberdayaan Sosial;

Sehubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, maka DinasSosial bertanggung jawab dengan program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan diselenggarakan, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian PMKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan kelembagaan kesejahteraa sosial yang ada di masyarakat, serta peran aktif dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yaitu Penanggulangan Kemiskinan terkait penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lampung Barat. Apabila melihat usulan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dan usulan Musrenbang Kabupaten Lampung Barat maka anggaran tersebut cukup memadai, sehingga diharapkan beberapa target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dapat tercapai sesuai RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025. Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Liwa, LB**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**78,95**	**3.930.973.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Liwa, LB**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**78,95**	**3.930.973.000**	
I.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**6.740.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**6.740.000**	**Sesuai kebutuhan**
			Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	**6 dokumen**	**26.960.000**			**Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun**	**6 dokumen**	**26.960.000**	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**14 dokumen**	**34.870.000**			**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**14 dokumen**	**34.870.000**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	6.740.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	6.740.000	Sesuai kebutuhan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	6.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	6.740.000	Sesuai kebutuhan
3.	Koordinasi dan Penyusunan	Liwa, LB	Jumlah dokumen Perubahan RKA	2 dokume	6.740.000	Koordinasi dan Penyusunan	Liwa, LB	Jumlah dokumen Perubahan RKA	2 dokume	6.740.000	Sesuai kebutuha

	Dokumen Perubahan RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	n		Dokumen Perubahan RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	n		n
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.740.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.740.000	Sesuai kebutuhan
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.740.000	Sesuai kebutuhan
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.140.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.140.000	Sesuai kebutuhan
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	31.730.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	31.730.000	Sesuai kebutuhan
II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**28 orang**	**2.875.753.200**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**28 orang**	**2.875.753.200**	**Sesuai kebutuhan**
			Jumlah Laporan	**1**				**Jumlah Laporan**	**1**		

			Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Laporan**	**4.000.000**			**Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Laporan**	**4.000.000**	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**2 Laporan**	**2.500.000**			**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**2 Laporan**	**2.500.000**	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**1 Dokumen**	**3.500.000**			**Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**1 Dokumen**	**3.500.000**	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Liwa, LB	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang	2.865.753.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Liwa, LB	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang	2.865.753.200	Sesuai kebutuhan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	Sesuai kebutuhan
3.	Koordinasi dan Penyusunan	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan	2 Lapora	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan	2 Lapora	2.500.000	Sesuai kebutuha

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	n		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	n		n
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3.500.000	Sesuai kebutuhan
III.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**1 Dokumen**	**19.060.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**1 Dokumen**	**19.060.000**	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	19.060.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	19.060.000	
IV.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**1 dokumen**	**43.871.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**1 dokumen**	43.871.000	**Sesuai kebutuhan**
		Luar LB	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**3 Orang**	**15.000.000**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**Luar LB**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**3 Orang**	15.000.000	**Sesuai kebutuhan**
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	43.871.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	43.871.000	Sesuai kebutuhan
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Luar LB	Jumlah Pegawai Berdasarkan	3 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Luar LB	Jumlah Pegawai Berdasarkan	3 Orang	15.000.000	Sesuai kebutuha

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			n
IV.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan**	**1 Paket**	**350.918.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan**	**1 Paket**	**350.918.000**	**Sesuai kebutuhan**
		Liwa, LB	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**1 Paket**	**21.984.000**		**Liwa, LB**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**1 Paket**	**19.984.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan**	**12 Paket**	**8.800.000**		**Liwa, LB**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan**	**12 Paket**	**18.700.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan**	**8 dokumen**	**43.650.000**		**Liwa, LB**	**Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan**	**8 dokumen**	**40.650.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**12 Laporan**	**14.000.000**		**Liwa, LB**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**12 Laporan**	**12.000.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**12 Laporan**	**9.426.000**		**Liwa, LB**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**12 Laporan**	**8.426.000**	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Liwa, LB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	21.984.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Liwa, LB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	21.984.000	Sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan	Liwa,	Jumlah Paket	1 Paket		Penyediaan	Liwa,	Jumlah Paket	1 Paket		Sesuai

	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LB	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		8.800.000	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LB	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		8.800.000	kebutuhan
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Liwa, LB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	43.650.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Liwa, LB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	43.650.000	Sesuai kebutuhan
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Liwa, LB	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen	14.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Liwa, LB	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen	14.000.000	Sesuai kebutuhan
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Liwa, LB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.426.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Liwa, LB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.426.000	Sesuai kebutuhan
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB dan Luar LB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	253.058.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB dan Luar LB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	253.058.000	Sesuai kebutuhan
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**LB dan Luar LB**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**8 Unit**	**81.900.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**LB dan Luar LB**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Unit**	**81.900.000**	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	LB dan Luar LB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	40.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	LB dan Luar LB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 Unit	40.000.000	Sesuai kebutuhan
2.	Pengadaan Mebeleur	LB dan Luar LB	'Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	4 Unit	5.900.000	Pengadaan Mebeleur	LB dan Luar LB	'Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	3 Unit	5.900.000	Sesuai kebutuhan
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LB dan Luar LB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang desediakan	2 Unit	36.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LB dan Luar LB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang desediakan	5 Unit	36.000.000	Sesuai kebutuhan
VI.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Liwa, LB**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa**	**12 Lapora**	**206.820.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Liwa, LB**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa**	**12 Lapora**	**206.820.000**	**Sesuai kebutuh**

	Pemerintahan Daerah		**Surat Menyurat**	**n**		**Urusan Pemerintahan Daerah**		**Surat Menyurat**	**n**		**an**
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	**12 Laporan**				**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan**	**12 Laporan**		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	**12 Laporan**				**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan**	**12 Laporan**		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	Sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	48.820.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	48.820.000	Sesuai kebutuhan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	150.000.000	Sesuai kebutuhan
VII.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**70 Unit**	**327.951.800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**70 Unit**	**327.951.800**	**Sesuai kebutuhan**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Liwa, LB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	42 Unit	256.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Liwa, LB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	42 Unit	256.420.000	Sesuai kebutuhan

	Lapangan					Lapangan					
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Liwa, LB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	17.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Liwa, LB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	17.500.000	Sesuai kebutuhan
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Liwa, LB	'Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara /direhabilitasi	2 Unit	54.031.800	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Liwa, LB	'Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara /direhabilitasi	2 Unit	54.031.800	Sesuai kebutuhan
B.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Liwa, LB**	**% PSKS yang aktif**	**33,51%**	**427.255.900**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Liwa, LB**	**% PSKS yang aktif**	**33,51%**	**427.255.900**	**Sesuai Kebutuhan**
I.	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota**	**45 Orang**	**72.000.000**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota**	**45 Orang**	**72.000.000**	**Sesuai Kebutuhan**
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	**16 Orang**	**185.499.900**			**Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**16 Orang**	**185.499.900**	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	**3 Lembaga**	**169.756.000**			**Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota**	**3 Lembaga**	**169.756.000**	
1.	Peningkatan Kemampuan	Liwa, LB	Jumlah Orang Mendapat	45 Orang	72.000.000	Peningkatan Kemampuan	Liwa, LB	Jumlah Orang Mendapat	45 Orang	72.000.000	Sesuai Kebutuha

	Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota			Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota			n
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	16 Orang	185.499.900	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	16 Orang	185.499.900	Sesuai Kebutuhan
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	169.756.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	169.756.000	Sesuai Kebutuhan
C.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Liwa, LB**	**Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi**	**58,65%**	**767.150.000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Liwa, LB**	**Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi**	**19,55%**	**767.150.000**	**Sesuai Kebutuhan**
			Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**13,23%**	**4.233.064.000**			**Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**13,23%**	**4.233.064.000**	
			IKM	**B**	**135.000.000**			**IKM**	**B**	**135.000.000**	
I.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta**	**Liwa, LB**	**Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota**	**30 Orang**	**605.000.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta**	**Liwa, LB**	**Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota**	**30 Orang**	**605.000.000**	**Sesuai Kebutuhan**

	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					**Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**					
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	**50 Orang**	**147.489.000**			**Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota**	**50 Orang**	**147.489.000**	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	**10 Orang**	**126.496.000**			**Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**	**10 Orang**	**126.496.000**	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	**400 orang**	**120.000.000**			**Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota**	**400 orang**	**120.000.000**	
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	**20 Orang**	**113.320.000**			**Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota**	**20 Orang**	**113.320.000**	
1.	Penyediaan Alat Bantu	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga	30 Orang	98.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga	30 Orang	98.000.000	Sesuai Kebutuhan

			sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota					sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota			
2.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Liwa, LB	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	147.489.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Liwa, LB	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	147.489.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Liwa, LB	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	126.496.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Liwa, LB	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	126.496.000	Sesuai Kebutuhan
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang	120.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang	120.000.000	Sesuai Kebutuhan
4.	Pemberian Layanan Rujukan	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	113.320.000	Pemberian Layanan Rujukan	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	113.320.000	Sesuai Kebutuhan
II.	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota**	**550 Orang**	**4.529.909.000**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota**	**550 Orang**	**4.529.909.000**	**Sesuai Kebutuhan**

	Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					**Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**					
			Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	**20.000 Orang**				**Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota**	**20.000 Orang**	**2.860.000.000**	
			Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	**20 dokumen**				**Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota**	**20 dokumen**	**281.845.000**	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	**90 orang**				**Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota**	**90 orang**		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	**25.000 orang**				**Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA**	**25.000 orang**		
			Jumlah Orang yang	**17.600 orang**				**Jumlah Orang yang**	**17.600 orang**		

			mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					**mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota**			
			Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	**20 dokumen**				**Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota**	**20 dokumen**		
1.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota	550 Orang	135.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota	550 Orang	135.000.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Penyediaan Permakanan	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	20000 Orang	2.860.000.000	Penyediaan Permakanan	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	20000 Orang	2.860.000.000	Sesuai Kebutuhan
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan	90 orang	165.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan	90 orang	165.000.000	Sesuai Kebutuhan

			kabupaten/kota					kabupaten/kota			
4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Liwa, LB	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25.000 orang	531.064.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25.000 orang	531.064.000	
5	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	17.600 orang	557.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	17.600 orang	557.000.000	
6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	20 dokumen	281.845.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	20 dokumen	281.845.000	Sesuai Kebutuhan
D.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**LB dan Luar LB**	**Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid**	**100%**	**1.503.800.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**LB dan Luar LB**	**Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid**	**100%**	**1.503.800.000**	**Sesuai Kebutuhan**
		Liwa, LB	**Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial**	**70,24%**	**677.150.800**			**Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial**	**70,24%**	**677.150.800**	
I.	**Pemelihaaraan Anak-anak**	**Liwa, LB**	**Jumlah Anak terlantar yang**	**1250 Orang**	**327.151.000**	**Pemelihaaraan Anak-anak**	**Liwa, LB**	**Jumlah Anak terlantar yang**	**1250 Orang**	**327.151.000**	**Sesuai Kebutuh**

	Terlantar		**terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota**			**Terlantar**		**terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota**			**an**
1.	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Liwa LB	Jumlah Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	1250 Orang	327.151.000	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Liwa LB	Jumlah Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	1250 Orang	327.151.000	Sesuai Kebutuhan
II.	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Liwa LB**	**Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data**	**124.151 Orang**	**1.853.800.000**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Liwa LB**	**Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data**	**124151 Orang**	**1.853.800.000**	**Sesuai Kebutuhan**
		Liwa, LB	**Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota**	**118908 Orang**	**544.000.000**		Liwa, LB	**Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota**	**118908 Orang**	**544.000.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota**	**17600 Orang**	**79.800.000**		Liwa, LB	**Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota**	**17600 Orang**	**79.800.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota**	**150 Orang**	**880.000.000**		Liwa, LB	**Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota**	**150 Orang**	**880.000.000**	
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Liwa LB	Jumlah Fakir Miskin Cakupan	124151 Orang	544.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Liwa LB	Jumlah Fakir Miskin Cakupan	124151 Orang	544.000.000	Sesuai Kebutuha

	Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota yang di data			Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota yang di data			n
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Liwa LB	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	118908 Orang	79.800.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Liwa LB	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	118908 Orang	79.800.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Liwa LB	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	17600 Orang	880.000.000	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Liwa LB	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	17600 Orang	880.000.000	Sesuai Kebutuhan
4.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Liwa LB	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	150 Orang	350.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Liwa LB	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	150 Orang	350.000.000	Sesuai Kebutuhan
E.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Liwa LB**	**Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima**	**100%**	**817.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Liwa LB**	**Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima**	**100%**	**817.000.000**	**Sesuai Kebutuhan**
I.	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Liwa LB**	**Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat**	**1000 Orang**	**176.000.000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Liwa LB**	**Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat**	**1000 Orang**	**176.000.000**	**Sesuai Kebutuhan**

			(pengungsian) kewenangan kabupaten/kota					**(pengungsian) kewenangan kabupaten/kota**			
		Liwa, LB	**Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota**	**2 Unit**	**50.000.000**			**Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota**	**2 Unit**	**50.000.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota**	**35 orang**	**60.000.000**			**Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota**	**35 orang**	**60.000.000**	
1.	Penyediaan Makanan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	1000 Orang	176.000.000	Penyediaan Makanan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	1000 Orang	176.000.000	Sesuai Kebutuhan
2.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Liwa, LB	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	2 Unit	50.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Liwa, LB	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	2 Unit	50.000.000	Sesuai Kebutuhan
3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Liwa, LB	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	60.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Liwa, LB	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	60.000.000	
II.	**Penyelengaraan Pemberdayaan Msyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Liwa LB**	**Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga**	**90 orang**	**531.000.000**	**Penyelengaraan Pemberdayaan Msyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Liwa LB**	**Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga**	**90 orang**	**531.000.000**	**Sesuai Kebutuhan**

			Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					**Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota**			
		Liwa, LB	**Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota**	**2 Kampung**	**200.000.000**			**Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota**	**2 Kampung**	**200.000.000**	
1.	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Liwa, LB	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	296.000.000	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Liwa, LB	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	296.000.000	Sesuai Kebutuhan
2.	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Liwa, LB	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	2 Kampung	235..000.000	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Liwa, LB	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	2 Kampung	235..000.000	Sesuai Kebutuhan
F	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Liwa LB**	**'% komponen utama taman makam pahlawan**	**78,57 %**	**75.645.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Liwa LB**	**'% komponen utama taman makam pahlawan**	**78,57 %**	**75.645.000**	
I	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**Liwa LB**	**Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta**	**1 dokumen**	**75.645.000**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**Liwa LB**	**Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta**	**1 dokumen**	**75.645.000**	**Sesuai Kebutuhan**

	Nasional Kabupaten/Kota		**pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota**			**Nasional Kabupaten/Kota**		**pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota**			
1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 dokumen	75.645.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 dokumen	75.645.000	Sesuai Kebutuhan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Saat ini proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 tentunya Dinas Sosial juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stackholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial terkait rencana pencapaian target RPD Kabupaten Lampung Barat dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Proporsi usulan masyarakat yang harus diakomodir oleh Dinas Sosial sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat yakni sebesar 30% dari keseluruhan Program dan Kegiatan pada SKPD.

Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dengan hal tersebut yang menyebabkan Dinas Sosial mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2023 Mengenai daftar usulan dari para *stakcholders* (masyarakat) terkait pelayanan.

Tabel 2.5 Usulan program dan kegiatan dari masyarakat pada tahun 2023 saat musrenbang di Seluruh Kecamatan Kabupaten Lampung Barat

No	Nomor Usulan	USULAN	PERMASALAHAN	Alamat
1	137003	Pelatihan Menjahit bagi Penyandang Disabilitas dan Ekstrauma	minimnya ilmu pelatihan menjahit bagi anak putus sekolah untuk berkarya mandiri	pekon suka maju tk kecamatan Lumbok Seminung
2	165598	Santunan bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu	Perlunya perhatian kepada anak yatim piatu	pekon kembahang, Kab. Lampung Barat
3	210395	Santunan bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu	Belum ada	Kelurahan Sekincau
4	233177	Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE MISKIN)	Penambahan Permodalan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau UKM	Pekon Tri mulyo, Kec Gedung Surian
5	235365	Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	ada masyarakat terkena gangguan jiwa	Pemangku Pungkalan dan Tamansari Barat, Kec. Suoh
6	285643	Pemutakhiran Data Penerima PBI JKN (KIS) Dinas Sosial	BPJS masih banyak yang tidak berfungsi	semua pemangku di Kec. Suoh
7	286127	Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE MISKIN)	kelompok sangat membutuhkan bantuan 3 organisasi	pekon sumber agung, Kec Suoh
8	311248	Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE MISKIN)	Kurangnya modal usaha di kube	Pekon Tiga Jaya Kec. Sekincau

9	382941	Pemutakhiran Data Penerima PBI JKN (KIS) Dinas Sosial	Banyak nya masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan	pekon gunung sugih, Kec. Balik Bukit
10	412896	Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE MISKIN)	Bantuan Modal Usaha (UMKM)	Pekon Bakhu, Kec Batu Ketulis

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia
5. Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga
7. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkelanjutan; dan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2023, didasarkan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026.

a. Tujuan

Meningkatnya PMKS Mandiri

b. Sasaran dan Indikator Sasaran Renja

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Sosial sebagai berikut:

"Meningkatnya PMKS yang berdaya" dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan PMKS yang Berdaya.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berikut ini adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025, dengan dasarkan pada dokumen RKPD, sebagaimana terlampir pada lampiran II .

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Renja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Sosial maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa, 20 Januari 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Barat,

JAIMIN,S.IP
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19650814 198503 1 002

LAMPIRAN I

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Lampung Barat

DINAS SOSIAL

No	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)/Subkegiatan (Output)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPD S.D TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD (RENJA) S/D TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (RENJA) TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPD S/D TAHUN 2024 (%)		PERNGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	KET
								KINERJA		RUPIAH	KINERJA		RUPIAH	KINERJA		RUPIAH	KINERJA		RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA		RUPIAH	KINERJA	RUPIAH		
1	2					3	4	5			6			7			8			9=8/7x100%		10=6+8			11=10/5x100%		12	13
						URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																						
						Sosial				**49.712.816.000**			**5.165.533.973**			**4.610.224.900**			**4.610.224.900**				**9.775.758.873**				
	1	**6**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip OPD**	**79.20**	**%**	**15.643.194.900**	**81,05**	**%**	**2.869.330.683**	**78,9**	**%**	**3.082.279.600**	**78,9**	**%**	**3.082.279.600**	**100%**	**100%**	**79.20**	**%**	**5.951.610.283**	**100%**	**38%**	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**16**	**dokumen**	**40.671.000**	**4**	**dokumen**	**5.000.000**	**4**	**dokumen**	**5.000.000**	**4**	**dokumen**	**5.000.000**	**100%**	**100%**	**8**	**dokumen**	**10.000.000**	**50%**	**25%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	**24**	**dokumen**	**98.240.000**	**6**	**dokumen**	**23.035.000**	**6**	**dokumen**	**23.035.000**	**6**	**dokumen**	**23.035.000**	**100%**	**100%**	**12**	**dokumen**	**46.070.000**	**50%**	**47%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**56**	**dokumen**	**140.080.000**	**14**	**dokumen**	**8.460.000**	**14**	**dokumen**	**8.460.000**	**14**	**dokumen**	**8.460.000**	**100%**	**100%**	**28**	**dokumen**	**16.920.000**	**50%**	**12%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	dokumen	40.671.000	4	dokumen	5.000.000	4	dokumen	5.000.000	4	dokumen	5.000.000	100%	100%	8	dokumen	10.000.000	50%	25%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	8	dokumen	24.560.000	2	dokumen	4.385.000	2	dokumen	4.385.000	2	dokumen	4.385.000	100%	100%	4	dokumen	8.770.000	50%	36%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	dokumen	24.560.000	2	dokumen	7.775.000	2	dokumen	7.775.000	2	dokumen	7.775.000	100%	100%	4	dokumen	15.550.000	50%	63%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	4	dokumen	24.560.000	1	dokumen	5.430.000	1	dokumen	5.430.000	1	dokumen	5.430.000	100%	100%	2	dokumen	10.860.000	50%	44%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	dokumen	24.560.000	1	dokumen	5.445.000	1	dokumen	5.445.000	1	dokumen	5.445.000	100%	100%	2	dokumen	10.890.000	50%	44%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	13.160.000	4	Laporan	3.460.000	4	Laporan	3.460.000	4	Laporan	3.460.000	100%	100%	8	Laporan	6.920.000	50%	53%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	Laporan	126.920.000	10	Laporan	5.000.000	10	Laporan	5.000.000	10	Laporan	5.000.000	100%	100%	20	Laporan	10.000.000	50%	8%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**29**	**Orang**	**11.149.887.800**	**26**	**Orang**	**2.328.989.656**	**27**	**Orang**	**2.519.783.700**	**27**	**Orang**	**2.519.783.700**	**100%**	**100%**	**27**	**Orang**	**4.848.773.356**	**93%**	**43%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**4**	**Laporan**		**1**	**Laporan**		**1**	**Laporan**		**1**	**Laporan**		**100%**		**2**	**Laporan**	**-**	**50%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	**8**	**Laporan**		**2**	**Laporan**		**2**	**Laporan**		**2**	**Laporan**		**100%**		**4**	**Laporan**	**-**	**50%**		DINAS SOSIAL	

							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**4**	**dokumen**		**1**	**dokumen**		**1**	**dokumen**		**1**	**dokumen**		**100%**		**2**	**dokumen**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29	Orang	11.112.887.800	26	Orang	2.321.034.656	27	Orang	2.511.828.700	27	Orang	2.511.828.700	100%	100%	27	Orang	4.832.863.356	93%	43%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	15.000.000	1	Laporan	3.000.000	1	Laporan	3.000.000	1	Laporan	3.000.000	100%	100%	2	Laporan	6.000.000	50%	40%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	8	Laporan	9.000.000	2	Laporan	2.455.000	2	Laporan	2.455.000	2	Laporan	2.455.000	100%	100%	4	Laporan	4.910.000	50%	55%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.02	4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	dokumen	13.000.000	1	dokumen	2.500.000	1	dokumen	2.500.000	1	dokumen	2.500.000	100%	100%	2	dokumen	5.000.000	50%	38%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**4**	**dokumen**	**67.455.000**	**1**	**dokumen**	**10.260.000**	**1**	**dokumen**	**10.275.000**	**1**	**dokumen**	**10.275.000**	**100%**	**100%**	**2**	**dokumen**	**20.535.000**	**50%**	**30%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	67.455.000	1	dokumen	10.260.000	1	dokumen	10.275.000	1	dokumen	10.275.000	100%	100%	2	dokumen	20.535.000	50%	30%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.05**		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**4**	**dokumen**	**175.484.000**	**1**	**dokumen**	**13.161.000**	**1**	**dokumen**	**13.161.000**	**1**	**dokumen**	**13.161.000**	**100%**	**100%**	**2**	**dokumen**	**26.322.000**	**50%**	**15%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**12**	**Orang**	**60.000.000**	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-			**0**	**Orang**	-	**0%**	**0%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	dokumen	175.484.000	1	dokumen	13.161.000	1	dokumen	13.161.000	1	dokumen	13.161.000	100%	100%	2	dokumen	26.322.000	50%	15%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.05	9	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12	Orang	60.000.000	0	Orang	-	0	Orang		0	Orang				0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**4**	**Paket**	**1.353.995.500**	**1**	**Paket**	**200.506.700**	**1**	**Paket**	**211.439.500**	**1**	**Paket**	**211.439.500**	**100%**	**100%**	**2**	**Paket**	**411.946.200**	**50%**	**30%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**4**	**Paket**		**0**	**Paket**		**1**	**Paket**		**1**	**Paket**		**100%**		**1**	**Paket**	-	**25%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**48**	**Paket**		**12**	**Paket**		**12**	**Paket**		**12**	**Paket**		**100%**		**24**	**Paket**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**32**	**dokumen**		**8**	**dokumen**		**8**	**dokumen**		**8**	**dokumen**		**100%**		**16**	**dokumen**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**48**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**		**24**	**Laporan**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**48**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**		**24**	**Laporan**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	72.704.500	1	Paket	6.730.500	1	Paket	6.730.500	1	Paket	6.730.500	100%	100%	2	Paket	13.461.000	50%	19%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	55.000.000	0	Paket	-	1	Paket	1.500.000	1	Paket	1.500.000	100%	100%	1	Paket	1.500.000	25%	3%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	48	Paket	169.100.000	12	Paket	37.005.000	12	Paket	30.405.000	12	Paket	30.405.000	100%	100%	24	Paket	67.410.000	50%	40%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	32	dokumen	49.280.000	8	dokumen	8.280.000	8	dokumen	12.000.000	8	dokumen	12.000.000	100%	100%	16	dokumen	20.280.000	50%	41%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	36.174.000	12	Laporan	6.950.000	12	Laporan	6.950.000	12	Laporan	6.950.000	100%	100%	24	Laporan	13.900.000	50%	38%	DINAS SOSIAL	

	1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	971.737.000	12	Laporan	141.541.200	12	Laporan	153.854.000	12	Laporan	153.854.000	100%	100%	24	Laporan	295.395.200	50%	30%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**36**	**Unit**	**455.094.000**	**0**	**Unit**	-	**2**	**Unit**	**23.000.000**	**2**	**Unit**	**23.000.000**	**100%**	**100%**	**2**	**Unit**	**23.000.000**	**6%**	**5%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	10	Unit	200.000.000	0	Unit	-	0	Unit		0	Unit				0	Unit	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.07	3	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	15	Unit	32.700.000	0	Unit	-	1	Unit	7.000.000	1	Unit	7.000.000	100%	100%	1	Unit	7.000.000	7%	21%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang desediakan	17	Unit	222.394.000	0	Unit	-	1	Unit	16.000.000	1	Unit	16.000.000	100%	100%	1	Unit	16.000.000	6%	7%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**48**	**Laporan**	**807.777.000**	**12**	**Laporan**	**109.142.802**	**12**	**Laporan**	**123.902.800**	**12**	**Laporan**	**123.902.800**	**100%**	**100%**	**24**	**Laporan**	**233.045.602**	**50%**	**29%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**48**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**		**24**	**Laporan**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**48**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**		**24**	**Laporan**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	30.000.000	12	Laporan	5.000.000	12	Laporan	5.000.000	12	Laporan	5.000.000	100%	100%	24	Laporan	10.000.000	50%	33%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	Laporan	191.280.000	12	Laporan	43.860.802	12	Laporan	52.765.000	12	Laporan	52.765.000	100%	100%	24	Laporan	96.625.802	50%	51%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	Laporan	586.497.000	12	Laporan	60.282.000	12	Laporan	66.137.800	12	Laporan	66.137.800	100%	100%	24	Laporan	126.419.800	50%	22%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**74**	**Unit**	**1.294.510.600**	**74**	**Unit**	**170.775.525**	**74**	**Unit**	**144.222.600**	**74**	**Unit**	**144.222.600**	**100%**	**100%**	**148**	**Unit**	**314.998.125**	**200%**	**24%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	44	Unit	982.130.000	36	Unit	124.565.995	36	Unit	120.750.000	36	Unit	120.750.000	100%	100%	72	Unit	245.315.995	164%	25%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	28	Unit	66.000.000	20	Unit	10.260.000	20	Unit	10.200.000	20	Unit	10.200.000	100%	100%	40	Unit	20.460.000	143%	31%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara /direhabilitasi	2	Unit	246.380.600	2	Unit	35.949.530	2	Unit	13.272.600	2	Unit	13.272.600	100%	100%	2	Unit	49.222.130	100%	20%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**% PSKS yang Aktif**	**33,51**	**%**	**1.698.023.600**	**33,51**	**%**	-	**33,51**	**%**	-	**33,51**	**%**	-	**100%**		**67,023555**	**%**	-	**200%**	**0%**	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota**	**180**	**Orang**	**1.698.023.600**	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-			**0**	**Orang**	-	**0%**	**0%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	**16**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**			**0**	**Orang**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	**4**	**Lembaga**		**0**	**Lembaga**		**0**	**Lembaga**		**0**	**Lembaga**			**0**	**Lembaga**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	180	Orang	277.000.000	0	Orang	-	0	Orang		0	Orang				0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	

	1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	16	Orang	741.999.600	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-			0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	4	Lembaga	679.024.000	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-			0	Lembaga	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	4			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi**	**78,20**	**%**	**3.068.600.000**	**36,69**	**%**	**599.296.500**	**39,10**	**%**	**169.095.000**	**39,10**	**%**	**169.095.000**	**100%**	**100%**	**75,79**	**%**	**768.391.500**	**97%**	**25%**	DINAS SOSIAL	
							Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**52,93**	**%**	**16.874.769.000**	**0,80%**	**%**	**1.361.332.950**	**0,80%**	**%**	**1.136.468.500**	**0,80%**	**%**	**1.136.468.500**	**100%**	**100%**	**0,016**	**%**	**2.497.801.450**	**0%**	**15%**	DINAS SOSIAL	
							IKM	**B**	**Poin**	**516.944.500**	**B**	**Poin**	-	**B**	**Poin**	-	**B**	**Poin**	-	**100%**		**B**	**Poin**	-	**100%**	**0%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota**	**120**	**Orang**	**2.397.990.000**	**30**	**Orang**	**755.527.000**	**0**	**Orang**	**199.095.000**	**0**	**Orang**	**199.095.000**	**0%**	**100%**	**30**	**Orang**	**954.622.000**	**25%**	**40%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	**200**	**Orang**		**18**	**Orang**		**8**	**Orang**		**8**	**Orang**		**100%**	**0%**	**26**	**Orang**	-	**13%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	**40**	**Orang**		**1050**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0%**	**0%**	**1050**	**Orang**	-	**2625%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	**1600**	**Orang**	-	**400**	**Orang**		**1000**	**Orang**		**1000**	**Orang**		**100%**	**0%**	**1400**	**Orang**	-	**88%**			
							Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	**80**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0%**	**0%**	**0**	**Orang**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	120	Orang	392.000.000	30	Orang	84.566.000	0	Orang		0	Orang				30	Orang	84.566.000	25%	22%	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual. dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	200	Orang	589.956.000	18	Orang	251.840.000	8	Orang	169.095.000	8	Orang	169.095.000	100%	100%	26	Orang	420.935.000	13%	71%	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Orang	505.984.000	1050	Orang	262.890.500	0	Orang		0	Orang				1050	Orang	262.890.500	2625%	52%	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1600	Orang	456.770.000	400	Orang	156.230.500	1000	Orang	30.000.000	1000	Orang	30.000.000	100%	100%	1400	Orang	186.230.500	88%	41%		
	1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	80	Orang	453.280.000	0	Orang	-	0	Orang		0	Orang				0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	

	1	6	4	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota**	**2150**	**Orang**	**18.062.323.500**	**0**	**Orang**	**1.205.102.450**	**0**	**Orang**	**1.106.468.500**	**0**	**Orang**	**1.106.468.500**	**0%**	**100%**	**0**	**Orang**	**2.311.570.950**	**0%**	**13%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	**80000**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**				**0**	**Orang**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	**90**	**Orang**		**90**	**Orang**		**90**	**Orang**		**90**	**Orang**		**100%**		**90**	**Orang**	-	**100%**			
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	**25.000**	**Orang**		**28639**	**Orang**		**25000**	**Orang**		**25000**	**Orang**		**100%**		**25000**	**Orang**	-	**100%**			
							Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	**17.600**	**Orang**		**15488**	**Orang**		**15000**	**Orang**		**15000**	**Orang**		**100%**		**15000**	**Orang**	-	**85%**			
							Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	**80**	**dokumen**		**0**	**dokumen**		**0**	**dokumen**		**0**	**dokumen**				**0**	**dokumen**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota	2150	Orang	516.944.500	0	Orang	-	0	Orang		0	Orang				0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	80000	Orang	11.440.000.000	0	Orang	-	750	Orang	208.688.000	750	Orang	208.688.000	100%	100%	750	Orang	208.688.000	1%	2%	DINAS SOSIAL	
0	1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	90	Orang	625.743.000	90	Orang	135.602.500	90	Orang	158.936.000	90	Orang	158.936.000	100%	100%	90	Orang	294.538.500	100%	47%		
	1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25.000	Orang	2.124.256.000	28639	Orang	521.515.000	25000	Orang	308.334.500	25000	Orang	308.334.500	100%	100%	25000	Orang	829.849.500	100%	39%		
	1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	17.600	Orang	2.228.000.000	15488	Orang	547.984.950	15000	Orang	430.510.000	15000	Orang	430.510.000	100%	100%	15000	Orang	978.494.950	85%	44%		
	1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	80	dokumen	1.127.380.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-			0	dokumen	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	5			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid**	**100**	**%**	**5.808.100.000**	**100**	**%**	-	**100**	**%**	-	**100**	**%**	-	**100%**		**100**	**%**	-	**100%**	**0%**	DINAS SOSIAL	
							Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	**70,2388**	**%**	**2.708.604.000**	**6,1**	**%**	**249.390.000**	**0**	**%**	-	**0**	**%**	-			**6,1**	**%**	**249.390.000**	**9%**	**9%**	DINAS SOSIAL	

	1	6	5	2.01		**Pemeliharaan Anak anak Terlantar**	**Jumlah Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota**	**5000**	**Orang**	**1.308.604.000**	**25**	**Orang**	**66.708.000**	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-			**25**	**Orang**	**66.708.000**	**1%**	**5%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.01	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	5000	Orang	1.308.604.000	25	Orang	66.708.000	0	Orang		0	Orang				25	Orang	66.708.000	1%	5%	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data**	**124151**	**Orang**	**7.208.100.000**	**0**	**Orang**	**182.682.000**	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-			**0**	**Orang**	**182.682.000**	**0%**	**3%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	**118908**	**Keluarga**		**0**	**Keluarga**		**0**	**Keluarga**		**0**	**Keluarga**				**0**	**Keluarga**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	**17600**	**Keluarga**		**0**	**Keluarga**		**0**	**Keluarga**		**0**	**Keluarga**				**0**	**Keluarga**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	**600**	**Orang**		**110**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**				**110**	**Orang**	-	**18%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02	**1**	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	496604	Orang	2.127.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-			0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	118908	Keluarga	306.200.000	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-			0	Keluarga	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	17600	Keluarga	3.374.900.000	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-			0	Keluarga	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	600	Orang	1.400.000.000	110	Orang	182.682.000	0	Orang	-	0	Orang	-			110	Orang	182.682.000	18%	13%	DINAS SOSIAL	
	1	6	6			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima**	**100**	**%**	**3.092.000.000**	**100**	**%**	**-**	**100**	**%**	**129.440.000**	**100**	**%**	**129.440.000**	**100%**	**100%**	**100**	**%**	**129.440.000**	**100%**	**4%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	6	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota**	**4000**	**Orang**	**1.047.000.000**	**400**	**Orang**	**-**	**200**	**Orang**	**129.440.000**	**200**	**Orang**	**129.440.000**	**100%**	**100%**	**600**	**Orang**	**129.440.000**	**15%**	**12%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	**8**	**Unit**		**0**	**Unit**		**0**	**Unit**		**0**	**Unit**				**0**	**Unit**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	**105**	**Orang**												**0**		-	**0%**			
	1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	4000	Orang	675.000.000	0	Orang	-	200	Orang	129.440.000	200	Orang	129.440.000	100%	100%	200	Orang	129.440.000	5%	19%	DINAS SOSIAL	
	1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	8	Unit	192.000.000	0	Unit	-	0	Unit		0	Unit				0	Unit	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	

	1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	105	Orang	180.000.000												0		-	0%	0%		
	1	6	6	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten Kota**	**Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota**	**90**	**Orang**	**2.045.000.000**	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-			**0**	**Orang**	-	**0%**	**0%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	**8**	**Kampung**		**0**	**Kampung**		**0**	**Kampung**		**0**	**Kampung**			**0**	**Kampung**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	6	2.02	1	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	8	Kampung	905.000.000	0	Kampung	-	0	Kampung		0	Kampung				0	Kampung	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	6	2.02	2	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang	1.140.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-			0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	7			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**% komponen utama taman makam pahlawan**	**78,57**	**%**	**302.580.000**	**78,57**	**%**	86.183.840	**78,57**	**%**	**92.941.800**	**78,57**	**%**	**92.941.800**	**100%**	**100%**	**157,14286**	**%**	**179.125.640**	**200%**	**59%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	7	2.07		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota**	**1**	**dokumen**	**302.580.000**	**1**	**dokumen**	86.183.840	**1**	**dokumen**	**92.941.800**	**1**	**dokumen**	**92.941.800**	**100%**	**100%**	**2**	**dokumen**	**179.125.640**	**200%**	**59%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	7	2.07	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1	dokumen	302.580.000	1	dokumen	86.183.840	1	dokumen	92.941.800	1	dokumen	92.941.800	**100%**	**100%**	2	dokumen	179.125.640	200%	59%	DINAS SOSIAL	

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

JAIMIN, S.IP
NIP. 19650814 198503 1002

PERSIAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						**7.079.133.400,00**							**9.758.423.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.079.133.400,00**							**9.758.423.500,00**	
	-	**-**						**7.079.133.400,00**							**9.758.423.500,00**	
1.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi*** ***IKM*** ***Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya***	**B Poin** **78,20 %** **52,93 %**			**19,55 %** **B Poin** **13,23 %**	**2.702.437.700,00**						**B Poin** **19,55 %** **13,23 %**	**4.792.360.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota* *Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota* *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* *Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota*	-			50 Orang 20 Orang 10 Orang 30 Orang	875.012.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	364.296.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	381.745.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	463.267.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		126.496.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				25000 Orang	30.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		87.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota* *Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota* *Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota*	-			20 Orang 550 Orang 20000 Orang	1.827.425.700,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	4.428.064.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				550 Orang	173.535.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		155.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1850 Orang	460.968.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		2.860.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	205.336.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		325.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				106 Orang	557.076.700,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		531.064.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				71 Orang	430.510.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		557.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial*** ***Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid***	**70,24 % 100 %**			**70,24 % 100 %**	**245.957.600,00**						**70,24 % 100 %**	**571.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data* *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota* *Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota* *Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota*	-			124151 Orang 17600 Keluarga 118908 Keluarga 150 Orang	245.957.600,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	571.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				124151 Orang	245.957.600,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		571.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima***	**100 %**			**100 %**	**269.965.000,00**						**100 %**	**248.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota* *Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota*	-			1000 Orang 2 Unit	269.965.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	248.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				400 Orang	198.440.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		193.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	71.525.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase komponen utama taman makam pahlawan***	**78,57 %**			**78,57 %**	**160.034.400,00**						**78,57 %**	**75.645.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota*	-			1 dokumen	160.034.400,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	75.645.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	160.034.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		75.645.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial***	**78,95 %**			**78,95 %**	**3.700.738.700,00**						**78,95 %**	**4.071.418.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	-			70 Unit	202.600.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	332.701.800,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	139.300.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		266.620.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			1 dokumen 3 Orang	37.733.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	58.871.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	22.733.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		43.871.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	15.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		15.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* *Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*	-			1 Paket 12 Laporan 12 Laporan 12 Paket 1 Paket 8 dokumen	271.060.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	352.649.500,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.730.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		6.730.500,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	44.770.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		45.650.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	12.060.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.950.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		10.426.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun*	-			4 dokumen 14 dokumen 6 dokumen	70.879.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	86.141.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	30.339.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		22.851.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			18 Unit	89.950.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	28.047.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	36.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		5.900.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	53.150.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		22.147.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	131.673.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	215.820.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	-			70 Unit	202.600.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	332.701.800,00	DINAS SOSIAL
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	52.450.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		54.031.800,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	131.673.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	215.820.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	56.440.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		50.820.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	-			70 Unit	202.600.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	332.701.800,00	DINAS SOSIAL
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	10.850.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		12.050.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	131.673.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	215.820.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70.233.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		155.000.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* *Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*	-			1 Paket 12 Laporan 12 Laporan 12 Paket 1 Paket 8 dokumen	271.060.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	352.649.500,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.550.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		274.843.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun*	-			4 dokumen 14 dokumen 6 dokumen	70.879.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	86.141.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	6.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		6.740.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	9.275.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		6.740.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.815.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		6.740.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		6.740.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4.620.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		4.600.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	6.230.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		31.730.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*"Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran* *Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	-			2 Laporan 28 Orang 1 Laporan 1 dokumen	2.876.258.200,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	2.977.128.200,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	2.865.753.200,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		2.965.628.200,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		4.500.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	3.005.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.585.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	20.060.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	20.585.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		20.060.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H							**7.079.133.400,00**							**9.758.423.500,00**	

RENCANA KERJA (RENJA)

TA. 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas Rahmat dan Karunianya, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat terwujud.

Renja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial, Rencana Kerja tahun lalu sebagai alat yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial periode 2023, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan pembangunan serta visi kabupaten lampung barat. Selain itu Renja ini juga disusun berdasarkan pada RPJMD Periode tahun lalu sebagai wujud Inflementasi pelaksanaan agenda dan sekaligus dimaksud untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Lampung Barat 2023-2026.

Mengingat hal tersebut maka semua Bidang, Seksi dan Staf yang ada di lingkungan Dinas Sosial harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientas pada peningkatan kinerja, untuk mencapai Misi Dinas Sosial “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Lampung Barat yang Berdaya Saing”.

Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang dapat memberikan arahan, menjadi pegangan dalam rangka menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 terlaksana sesuai dengan target tujuan,sasaran terima kasih diucapkan kepada seluruh Pejabat Kabupaten Lampung Barat, yang telah membantu dalam proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaaten Lampung Barat

periode 2025, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Barat,

JAIMIN, S.I.P
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19650814 198503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II 5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 5
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 8
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31
BAB III 34
TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH 34
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat 35
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025 35
BAB IV 36
PENUTUP 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun sejak awal tahapan dalam perencanaan penganggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasipembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencanapembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengahdaerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Hasil evaluasi Renja Tahun lalu dan Hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan. Dengan akan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah. Tentunya, Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah otonom telah menjabarkan sasaran-sasaran pokok, arah kebijakan, program-program dan kegiatan pembangunan yang akan dicapai untuk kurun waktu selama empat tahun.

Dalam kurun waktu tersebut diharapkan akan diperoleh kemajuan dan perkembangan di semua sektor pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Dalam kaitan tersebut maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2007 sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing

menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD untuk periode 4 tahun dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahunnya. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kinerja seluruh OPD di daerah yang bersangkutan.

Renja OPD Dinas Sosial akan digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menentukan skala prioritas yang selanjutnya akan dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan demikian Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD Dinas Sosial menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja dinas agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur. Lebih Lanjut perumusan Rancangan Awal Renja OPD merupakan dokumen tahunan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai selanjutnya dituangkan dalam Dokumen perencanaan yang lebih konkret dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD Dinas Sosial berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
9. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan,Tata cara Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang,dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
11. Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja OPD dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki satuan kerja dan mengupayakan sumberdaya lainnya untuk terlibat secara aktif

dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Renja dinas ditujukan untuk mengaplikasikan Program Kerja Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang menjadi ruang lingkup Dinas Sosial ke dalam program-program dan kegiatan untuk direalisasikan. Sehingga diharapkan tujuan pembangunan dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renja 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
Memuat: latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Mmemuat: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RPKD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH
Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai dengan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah Program termasuk program rutin setelah refocusing banyak 4 (empat) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Alokasi dana Tahun 2023 sebesar Rp. 5.261.236.326,- (lima milyar dua ratus dua enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp 5.165.533.973 (lima milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 98,18 persen dengan kriteria penilaian realisasi anggaran **"SANGAT TINGGI"**

Dari seluruh sub kegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya tercapai 100 persen. Berdasarkan indikator sebagaimana yang termuat dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026 tercapai 100%.

Rata-rata pencapaian indicator keluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 100 persen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewengangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 telah menetapkan tujuan

dan sasaran perangkat daerah sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat, ditetapkan Tujuan Dinas Sosial yaitu "**Meningkatnya PMKS Mandiri"**. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkanlah tersebut, Dinas Sosial telah menetapkan Sasaran Strategis, yaitu "**Meningkatnya PMKS yang berdaya"**.

Berikut ini sajian indikator beserta target dan realisasinya yang tertuang dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Terget OPD	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
	Persentase Peningkatan PMKS yang Berdaya	(Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana) / 5	83.91%	87.34%	104.09%

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2023 total target capaian sebesar 419,55% dapat terealisasi sebesar 436,69% sehingga jika dibagi 5 indikator maka realisasi capaiannya sebesar 87.34%. Berikut perhitungan untuk masing-masing formulasi pengukuran indikator sasaran:

1. Penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar 19,55% dapat direalisasikan sebesar 36,69% melebihi dari target yang ditentukan, hal ini disebabkan adanya bantuan dari kementerian social berupa alat bantu disabilitas sebanyak 206 dan pengadaan dari APBD sebanyak 38 unit (466). Adapun rincian PMKS penyandang disabilitas yang tertangani adalah sebagai berikut:
    1) 82 orang Penerima kursi roda
    2) 45 kaca mata
    3) 46 Alat bantu dengar
    4) 1 bantuan permodalan
    5) 8 perawatan Orang ODGJ
    6) 26 tongkat
    7) 36 Sembako dan nutrisi untuk disabilitas

2. Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebanyak 9 orang dan dapat terpenuhi 100% berupa bantuan sembako dan nutrisi tambahan
3. Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti jumlah target sebanyak 49 orang dapat terpenuhi 100% dengan jenis bantuan dan rincian berupa 20 unit kursi roda ditambah dengan bantuan sembako, 7 unit penerima bantuan tongkat dan sembako, serta 23 orang lansia penerima sembako dan nutrisi tambahan.
4. Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti berjumlah 2 orang dapat terpenuhi seluruhnya barupa bantuan sembako dan nutrisi tambahan
5. Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana targetnya yang ditentukan sebanyak 200 paket untuk 400 orang dapat terpenuhi 100%

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memperhatikan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial 2023–2026, dirumuskan dalam kerangka pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang komprehensif dan utuh sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Beberapa isu-isu penting yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat diantaranya:

1. Masih Tingginya Angka Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Barat.
2. Masih Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Belum Mendapat Perhatian dari Pemerintah.
3. Kondisi Geografis kabupaten Lampung Barat, yang merupakan Daerah rawan bencana terutama longsor dan Gempa.
4. Kesenjangan Kesejahteraan Sosial yang cukup Tinggi antara Masyarakat mampu dan tidak mampu.

Dalam menghadapi permasalahan yang ada, perlu dilakukan analisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT, yaitu Strength/Kekuatan, Weakness/Kelemahan, Opportunity/Peluang dan Threath/Ancaman/Tantangan sebagai faktor penentu keberhasilan, dapat digambarkan kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan/*Strength*

1. Dukungan anggaran yang relatif besar.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas.
4. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Dinas Sosial dan OPD lainnya.

b. Kelemahan/ *Weakness*

1. Masih rendahnya SDM yang profesional dibidang kesejahteraan sosial.
2. Kurang memiliki SDM yang terampil dibidang komputerisasi dan pelayanan sosial
3. Masih kurang akuratnya data PMKS

c. Peluang/*Opportunity*

1. Infrastruktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan.
2. Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM.
3. Adanya potensi SDM mitra Dinas Sosial tingkat kecamatan an pekon yang dapat diberdayakan.

d. Ancaman/Tantangan/*Threath*

1. Perkembangan teknologi informasi.
2. Meningkatnya daya kritis masyarakat.

Dengan mengetahui faktor internal dan eksternal tersebut, dapat dilakukan strategi dan kebijakan guna mengatasi permasalahan dan dapat dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya sasaran, tujuan, misi, dan visi. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat diarahkan untuk mendorong peningkatan profesionalisme kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung terselenggaranya pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan hal tersebut diatas dan menyikapi dinamika permasalahan sosial, Dinas Sosial mempunyai tugas “Melaksankan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang sosial. Terkait dengan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Sosial;
4. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Sosial;
5. Pelayanan administrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
5. Bidang Pemberdayaan Sosial;

Sehubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, maka DinasSosial bertanggung jawab dengan program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan diselenggarakan, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian PMKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan kelembagaan kesejahteraa sosial yang ada di masyarakat, serta peran aktif dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yaitu Penanggulangan Kemiskinan terkait penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lampung Barat. Apabila melihat usulan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dan usulan Musrenbang Kabupaten Lampung Barat maka anggaran tersebut cukup memadai, sehingga diharapkan beberapa target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dapat tercapai sesuai RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025. Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Liwa, LB**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**78,95**	**3.930.973.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Liwa, LB**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**78,95**	**3.930.973.000**	
I.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**6.740.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**6.740.000**	**Sesuai kebutuhan**
			Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	**6 dokumen**	**26.960.000**			**Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun**	**6 dokumen**	**26.960.000**	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**14 dokumen**	**34.870.000**			**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**14 dokumen**	**34.870.000**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	6.740.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	6.740.000	Sesuai kebutuhan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	6.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	6.740.000	Sesuai kebutuhan
3.	Koordinasi dan Penyusunan	Liwa, LB	Jumlah dokumen Perubahan RKA	2 dokume	6.740.000	Koordinasi dan Penyusunan	Liwa, LB	Jumlah dokumen Perubahan RKA	2 dokume	6.740.000	Sesuai kebutuha

	Dokumen Perubahan RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	n		Dokumen Perubahan RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	n		n
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.740.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.740.000	Sesuai kebutuhan
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.740.000	Sesuai kebutuhan
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.140.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.140.000	Sesuai kebutuhan
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	31.730.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	31.730.000	Sesuai kebutuhan
II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**28 orang**	**2.875.753.200**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**28 orang**	**2.875.753.200**	**Sesuai kebutuhan**
			Jumlah Laporan	**1**				**Jumlah Laporan**	**1**		

			Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Laporan**	**4.000.000**			**Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Laporan**	**4.000.000**	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**2 Laporan**	**2.500.000**			**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**2 Laporan**	**2.500.000**	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**1 Dokumen**	**3.500.000**			**Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**1 Dokumen**	**3.500.000**	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Liwa, LB	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang	2.865.753.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Liwa, LB	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang	2.865.753.200	Sesuai kebutuhan
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	Sesuai kebutuhan
3.	Koordinasi dan Penyusunan	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan	2 Lapora	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan	2 Lapora	2.500.000	Sesuai kebutuha

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	n		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	n		n
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3.500.000	Sesuai kebutuhan
III.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**1 Dokumen**	**19.060.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**1 Dokumen**	**19.060.000**	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	19.060.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	19.060.000	
IV.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**1 dokumen**	**43.871.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**1 dokumen**	43.871.000	**Sesuai kebutuhan**
		Luar LB	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**3 Orang**	**15.000.000**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**Luar LB**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**3 Orang**	15.000.000	**Sesuai kebutuhan**
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	43.871.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	43.871.000	Sesuai kebutuhan
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Luar LB	Jumlah Pegawai Berdasarkan	3 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Luar LB	Jumlah Pegawai Berdasarkan	3 Orang	15.000.000	Sesuai kebutuha

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			n
IV.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan**	**1 Paket**	**350.918.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan**	**1 Paket**	**350.918.000**	**Sesuai kebutuhan**
		Liwa, LB	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**1 Paket**	**21.984.000**		**Liwa, LB**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan**	**1 Paket**	**19.984.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan**	**12 Paket**	**8.800.000**		**Liwa, LB**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan**	**12 Paket**	**18.700.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan**	**8 dokumen**	**43.650.000**		**Liwa, LB**	**Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan**	**8 dokumen**	**40.650.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**12 Laporan**	**14.000.000**		**Liwa, LB**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**12 Laporan**	**12.000.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**12 Laporan**	**9.426.000**		**Liwa, LB**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**12 Laporan**	**8.426.000**	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Liwa, LB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	21.984.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Liwa, LB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	21.984.000	Sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan	Liwa,	Jumlah Paket	1 Paket		Penyediaan	Liwa,	Jumlah Paket	1 Paket		Sesuai

	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LB	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		8.800.000	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LB	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		8.800.000	kebutuhan
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Liwa, LB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	43.650.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Liwa, LB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	43.650.000	Sesuai kebutuhan
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Liwa, LB	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen	14.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Liwa, LB	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen	14.000.000	Sesuai kebutuhan
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Liwa, LB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.426.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Liwa, LB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.426.000	Sesuai kebutuhan
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB dan Luar LB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	253.058.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB dan Luar LB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	253.058.000	Sesuai kebutuhan
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**LB dan Luar LB**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**8 Unit**	**81.900.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**LB dan Luar LB**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Unit**	**81.900.000**	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	LB dan Luar LB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	40.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	LB dan Luar LB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 Unit	40.000.000	Sesuai kebutuhan
2.	Pengadaan Mebeleur	LB dan Luar LB	'Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	4 Unit	5.900.000	Pengadaan Mebeleur	LB dan Luar LB	'Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	3 Unit	5.900.000	Sesuai kebutuhan
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LB dan Luar LB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang desediakan	2 Unit	36.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LB dan Luar LB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang desediakan	5 Unit	36.000.000	Sesuai kebutuhan
VI.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Liwa, LB**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa**	**12 Lapora**	**206.820.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Liwa, LB**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa**	**12 Lapora**	**206.820.000**	**Sesuai kebutuh**

	Pemerintahan Daerah		**Surat Menyurat**	**n**		**Urusan Pemerintahan Daerah**		**Surat Menyurat**	**n**		**an**
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	**12 Laporan**				**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan**	**12 Laporan**		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	**12 Laporan**				**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan**	**12 Laporan**		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	Sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	48.820.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	48.820.000	Sesuai kebutuhan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	150.000.000	Sesuai kebutuhan
VII.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**70 Unit**	**327.951.800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**70 Unit**	**327.951.800**	**Sesuai kebutuhan**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Liwa, LB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	42 Unit	256.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Liwa, LB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	42 Unit	256.420.000	Sesuai kebutuhan

	Lapangan					Lapangan					
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Liwa, LB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	17.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Liwa, LB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26 Unit	17.500.000	Sesuai kebutuhan
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Liwa, LB	'Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara /direhabilitasi	2 Unit	54.031.800	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Liwa, LB	'Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara /direhabilitasi	2 Unit	54.031.800	Sesuai kebutuhan
B.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Liwa, LB**	**% PSKS yang aktif**	**33,51%**	**427.255.900**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Liwa, LB**	**% PSKS yang aktif**	**33,51%**	**427.255.900**	**Sesuai Kebutuhan**
I.	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota**	**45 Orang**	**72.000.000**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota**	**45 Orang**	**72.000.000**	**Sesuai Kebutuhan**
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	**16 Orang**	**185.499.900**			**Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**16 Orang**	**185.499.900**	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	**3 Lembaga**	**169.756.000**			**Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota**	**3 Lembaga**	**169.756.000**	
1.	Peningkatan Kemampuan	Liwa, LB	Jumlah Orang Mendapat	45 Orang	72.000.000	Peningkatan Kemampuan	Liwa, LB	Jumlah Orang Mendapat	45 Orang	72.000.000	Sesuai Kebutuha

	Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota			Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota			n
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	16 Orang	185.499.900	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	16 Orang	185.499.900	Sesuai Kebutuhan
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	169.756.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	169.756.000	Sesuai Kebutuhan
C.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Liwa, LB**	**Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi**	**58,65%**	**767.150.000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Liwa, LB**	**Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi**	**19,55%**	**767.150.000**	**Sesuai Kebutuhan**
			Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**13,23%**	**4.233.064.000**			**Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**13,23%**	**4.233.064.000**	
			IKM	**B**	**135.000.000**			**IKM**	**B**	**135.000.000**	
I.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta**	**Liwa, LB**	**Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota**	**30 Orang**	**605.000.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta**	**Liwa, LB**	**Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota**	**30 Orang**	**605.000.000**	**Sesuai Kebutuhan**

	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					**Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**					
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	**50 Orang**	**147.489.000**			**Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota**	**50 Orang**	**147.489.000**	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	**10 Orang**	**126.496.000**			**Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**	**10 Orang**	**126.496.000**	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	**400 orang**	**120.000.000**			**Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota**	**400 orang**	**120.000.000**	
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	**20 Orang**	**113.320.000**			**Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota**	**20 Orang**	**113.320.000**	
1.	Penyediaan Alat Bantu	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga	30 Orang	98.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga	30 Orang	98.000.000	Sesuai Kebutuhan

			sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota					sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota			
2.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Liwa, LB	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	147.489.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Liwa, LB	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	147.489.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Liwa, LB	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	126.496.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Liwa, LB	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	126.496.000	Sesuai Kebutuhan
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang	120.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang	120.000.000	Sesuai Kebutuhan
4.	Pemberian Layanan Rujukan	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	113.320.000	Pemberian Layanan Rujukan	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	113.320.000	Sesuai Kebutuhan
II.	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota**	**550 Orang**	**4.529.909.000**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota**	**550 Orang**	**4.529.909.000**	**Sesuai Kebutuhan**

	Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					**Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**					
			Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	**20.000 Orang**				**Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota**	**20.000 Orang**	**2.860.000.000**	
			Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	**20 dokumen**				**Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota**	**20 dokumen**	**281.845.000**	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	**90 orang**				**Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota**	**90 orang**		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	**25.000 orang**				**Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA**	**25.000 orang**		
			Jumlah Orang yang	**17.600 orang**				**Jumlah Orang yang**	**17.600 orang**		

			mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					**mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota**			
			Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	**20 dokumen**				**Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota**	**20 dokumen**		
1.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota	550 Orang	135.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota	550 Orang	135.000.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Penyediaan Permakanan	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	20000 Orang	2.860.000.000	Penyediaan Permakanan	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	20000 Orang	2.860.000.000	Sesuai Kebutuhan
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Liwa, LB	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan	90 orang	165.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan	90 orang	165.000.000	Sesuai Kebutuhan

			kabupaten/kota					kabupaten/kota			
4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Liwa, LB	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25.000 orang	531.064.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25.000 orang	531.064.000	
5	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	17.600 orang	557.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	17.600 orang	557.000.000	
6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	20 dokumen	281.845.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	20 dokumen	281.845.000	Sesuai Kebutuhan
D.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**LB dan Luar LB**	**Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid**	**100%**	**1.503.800.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**LB dan Luar LB**	**Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid**	**100%**	**1.503.800.000**	**Sesuai Kebutuhan**
		Liwa, LB	**Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial**	**70,24%**	**677.150.800**			**Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial**	**70,24%**	**677.150.800**	
I.	**Pemelihaaraan Anak-anak**	**Liwa, LB**	**Jumlah Anak terlantar yang**	**1250 Orang**	**327.151.000**	**Pemelihaaraan Anak-anak**	**Liwa, LB**	**Jumlah Anak terlantar yang**	**1250 Orang**	**327.151.000**	**Sesuai Kebutuh**

	Terlantar		**terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota**			**Terlantar**		**terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota**			**an**
1.	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Liwa LB	Jumlah Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	1250 Orang	327.151.000	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Liwa LB	Jumlah Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	1250 Orang	327.151.000	Sesuai Kebutuhan
II.	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Liwa LB**	**Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data**	**124.151 Orang**	**1.853.800.000**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Liwa LB**	**Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data**	**124151 Orang**	**1.853.800.000**	**Sesuai Kebutuhan**
		Liwa, LB	**Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota**	**118908 Orang**	**544.000.000**		Liwa, LB	**Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota**	**118908 Orang**	**544.000.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota**	**17600 Orang**	**79.800.000**		Liwa, LB	**Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota**	**17600 Orang**	**79.800.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota**	**150 Orang**	**880.000.000**		Liwa, LB	**Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota**	**150 Orang**	**880.000.000**	
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Liwa LB	Jumlah Fakir Miskin Cakupan	124151 Orang	544.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Liwa LB	Jumlah Fakir Miskin Cakupan	124151 Orang	544.000.000	Sesuai Kebutuha

	Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota yang di data			Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota yang di data			n
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Liwa LB	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	118908 Orang	79.800.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Liwa LB	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	118908 Orang	79.800.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Liwa LB	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	17600 Orang	880.000.000	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Liwa LB	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	17600 Orang	880.000.000	Sesuai Kebutuhan
4.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Liwa LB	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	150 Orang	350.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Liwa LB	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	150 Orang	350.000.000	Sesuai Kebutuhan
E.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Liwa LB**	**Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima**	**100%**	**817.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Liwa LB**	**Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima**	**100%**	**817.000.000**	**Sesuai Kebutuhan**
I.	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Liwa LB**	**Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat**	**1000 Orang**	**176.000.000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Liwa LB**	**Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat**	**1000 Orang**	**176.000.000**	**Sesuai Kebutuhan**

			(pengungsian) kewenangan kabupaten/kota					**(pengungsian) kewenangan kabupaten/kota**			
		Liwa, LB	**Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota**	**2 Unit**	**50.000.000**			**Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota**	**2 Unit**	**50.000.000**	
		Liwa, LB	**Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota**	**35 orang**	**60.000.000**			**Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota**	**35 orang**	**60.000.000**	
1.	Penyediaan Makanan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	1000 Orang	176.000.000	Penyediaan Makanan	Liwa, LB	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	1000 Orang	176.000.000	Sesuai Kebutuhan
2.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Liwa, LB	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	2 Unit	50.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Liwa, LB	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	2 Unit	50.000.000	Sesuai Kebutuhan
3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Liwa, LB	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	60.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Liwa, LB	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	60.000.000	
II.	**Penyelengaraan Pemberdayaan Msyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Liwa LB**	**Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga**	**90 orang**	**531.000.000**	**Penyelengaraan Pemberdayaan Msyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Liwa LB**	**Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga**	**90 orang**	**531.000.000**	**Sesuai Kebutuhan**

			Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					**Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota**			
		Liwa, LB	**Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota**	**2 Kampung**	**200.000.000**			**Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota**	**2 Kampung**	**200.000.000**	
1.	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Liwa, LB	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	296.000.000	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Liwa, LB	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	296.000.000	Sesuai Kebutuhan
2.	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Liwa, LB	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	2 Kampung	235..000.000	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Liwa, LB	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	2 Kampung	235..000.000	Sesuai Kebutuhan
F	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Liwa LB**	**'% komponen utama taman makam pahlawan**	**78,57 %**	**75.645.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Liwa LB**	**'% komponen utama taman makam pahlawan**	**78,57 %**	**75.645.000**	
I	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**Liwa LB**	**Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta**	**1 dokumen**	**75.645.000**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**Liwa LB**	**Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta**	**1 dokumen**	**75.645.000**	**Sesuai Kebutuhan**

	Nasional Kabupaten/Kota		**pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota**			**Nasional Kabupaten/Kota**		**pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota**			
1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 dokumen	75.645.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Liwa, LB	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 dokumen	75.645.000	Sesuai Kebutuhan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Saat ini proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 tentunya Dinas Sosial juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stackholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial terkait rencana pencapaian target RPD Kabupaten Lampung Barat dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Proporsi usulan masyarakat yang harus diakomodir oleh Dinas Sosial sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat yakni sebesar 30% dari keseluruhan Program dan Kegiatan pada SKPD.

Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dengan hal tersebut yang menyebabkan Dinas Sosial mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2023 Mengenai daftar usulan dari para *stakcholders* (masyarakat) terkait pelayanan.

Tabel 2.5 Usulan program dan kegiatan dari masyarakat pada tahun 2023 saat musrenbang di Seluruh Kecamatan Kabupaten Lampung Barat

No	Nomor Usulan	USULAN	PERMASALAHAN	Alamat
1	137003	Pelatihan Menjahit bagi Penyandang Disabilitas dan Ekstrauma	minimnya ilmu pelatihan menjahit bagi anak putus sekolah untuk berkarya mandiri	pekon suka maju tk kecamatan Lumbok Seminung
2	165598	Santunan bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu	Perlunya perhatian kepada anak yatim piatu	pekon kembahang, Kab. Lampung Barat
3	210395	Santunan bagi Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu	Belum ada	Kelurahan Sekincau
4	233177	Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE MISKIN)	Penambahan Permodalan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau UKM	Pekon Tri mulyo, Kec Gedung Surian
5	235365	Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	ada masyarakat terkena gangguan jiwa	Pemangku Pungkalan dan Tamansari Barat, Kec. Suoh
6	285643	Pemutakhiran Data Penerima PBI JKN (KIS) Dinas Sosial	BPJS masih banyak yang tidak berfungsi	semua pemangku di Kec. Suoh
7	286127	Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE MISKIN)	kelompok sangat membutuhkan bantuan 3 organisasi	pekon sumber agung, Kec Suoh
8	311248	Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE MISKIN)	Kurangnya modal usaha di kube	Pekon Tiga Jaya Kec. Sekincau

9	382941	Pemutakhiran Data Penerima PBI JKN (KIS) Dinas Sosial	Banyak nya masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan	pekon gunung sugih, Kec. Balik Bukit
10	412896	Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE MISKIN)	Bantuan Modal Usaha (UMKM)	Pekon Bakhu, Kec Batu Ketulis

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia
5. Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga
7. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkelanjutan; dan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2023, didasarkan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026.

a. Tujuan

Meningkatnya PMKS Mandiri

b. Sasaran dan Indikator Sasaran Renja

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Sosial sebagai berikut:

"Meningkatnya PMKS yang berdaya" dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan PMKS yang Berdaya.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berikut ini adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025, dengan dasarkan pada dokumen RKPD, sebagaimana terlampir pada lampiran II .

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Renja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Sosial maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa, 20 Januari 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lampung Barat,

JAIMIN,S.IP
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19650814 198503 1 002

LAMPIRAN I

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Lampung Barat

DINAS SOSIAL

No	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)/Subkegiatan (Output)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPD S.D TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD (RENJA) S/D TAHUN LALU 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD (RENJA) TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPD S/D TAHUN 2024 (%)		PERNGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	KET
								KINERJA		RUPIAH	KINERJA		RUPIAH	KINERJA		RUPIAH	KINERJA		RUPIAH	KINERJA	RUPIAH	KINERJA		RUPIAH	KINERJA	RUPIAH		
1	2					3	4	5			6			7			8			9=8/7x100%		10=6+8			11=10/5x100%		12	13
						URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																						
						Sosial				**49.712.816.000**			**5.165.533.973**			**4.610.224.900**			**4.610.224.900**				**9.775.758.873**				
	1	**6**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip OPD**	**79.20**	**%**	**15.643.194.900**	**81,05**	**%**	**2.869.330.683**	**78,9**	**%**	**3.082.279.600**	**78,9**	**%**	**3.082.279.600**	**100%**	**100%**	**79.20**	**%**	**5.951.610.283**	**100%**	**38%**	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**16**	**dokumen**	**40.671.000**	**4**	**dokumen**	**5.000.000**	**4**	**dokumen**	**5.000.000**	**4**	**dokumen**	**5.000.000**	**100%**	**100%**	**8**	**dokumen**	**10.000.000**	**50%**	**25%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	**24**	**dokumen**	**98.240.000**	**6**	**dokumen**	**23.035.000**	**6**	**dokumen**	**23.035.000**	**6**	**dokumen**	**23.035.000**	**100%**	**100%**	**12**	**dokumen**	**46.070.000**	**50%**	**47%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**56**	**dokumen**	**140.080.000**	**14**	**dokumen**	**8.460.000**	**14**	**dokumen**	**8.460.000**	**14**	**dokumen**	**8.460.000**	**100%**	**100%**	**28**	**dokumen**	**16.920.000**	**50%**	**12%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	dokumen	40.671.000	4	dokumen	5.000.000	4	dokumen	5.000.000	4	dokumen	5.000.000	100%	100%	8	dokumen	10.000.000	50%	25%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	8	dokumen	24.560.000	2	dokumen	4.385.000	2	dokumen	4.385.000	2	dokumen	4.385.000	100%	100%	4	dokumen	8.770.000	50%	36%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	dokumen	24.560.000	2	dokumen	7.775.000	2	dokumen	7.775.000	2	dokumen	7.775.000	100%	100%	4	dokumen	15.550.000	50%	63%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	4	dokumen	24.560.000	1	dokumen	5.430.000	1	dokumen	5.430.000	1	dokumen	5.430.000	100%	100%	2	dokumen	10.860.000	50%	44%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	dokumen	24.560.000	1	dokumen	5.445.000	1	dokumen	5.445.000	1	dokumen	5.445.000	100%	100%	2	dokumen	10.890.000	50%	44%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	13.160.000	4	Laporan	3.460.000	4	Laporan	3.460.000	4	Laporan	3.460.000	100%	100%	8	Laporan	6.920.000	50%	53%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	Laporan	126.920.000	10	Laporan	5.000.000	10	Laporan	5.000.000	10	Laporan	5.000.000	100%	100%	20	Laporan	10.000.000	50%	8%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**29**	**Orang**	**11.149.887.800**	**26**	**Orang**	**2.328.989.656**	**27**	**Orang**	**2.519.783.700**	**27**	**Orang**	**2.519.783.700**	**100%**	**100%**	**27**	**Orang**	**4.848.773.356**	**93%**	**43%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**4**	**Laporan**		**1**	**Laporan**		**1**	**Laporan**		**1**	**Laporan**		**100%**		**2**	**Laporan**	**-**	**50%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	**8**	**Laporan**		**2**	**Laporan**		**2**	**Laporan**		**2**	**Laporan**		**100%**		**4**	**Laporan**	**-**	**50%**		DINAS SOSIAL	

							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**4**	**dokumen**		**1**	**dokumen**		**1**	**dokumen**		**1**	**dokumen**		**100%**		**2**	**dokumen**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29	Orang	11.112.887.800	26	Orang	2.321.034.656	27	Orang	2.511.828.700	27	Orang	2.511.828.700	100%	100%	27	Orang	4.832.863.356	93%	43%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	15.000.000	1	Laporan	3.000.000	1	Laporan	3.000.000	1	Laporan	3.000.000	100%	100%	2	Laporan	6.000.000	50%	40%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	8	Laporan	9.000.000	2	Laporan	2.455.000	2	Laporan	2.455.000	2	Laporan	2.455.000	100%	100%	4	Laporan	4.910.000	50%	55%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.02	4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	dokumen	13.000.000	1	dokumen	2.500.000	1	dokumen	2.500.000	1	dokumen	2.500.000	100%	100%	2	dokumen	5.000.000	50%	38%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**4**	**dokumen**	**67.455.000**	**1**	**dokumen**	**10.260.000**	**1**	**dokumen**	**10.275.000**	**1**	**dokumen**	**10.275.000**	**100%**	**100%**	**2**	**dokumen**	**20.535.000**	**50%**	**30%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	67.455.000	1	dokumen	10.260.000	1	dokumen	10.275.000	1	dokumen	10.275.000	100%	100%	2	dokumen	20.535.000	50%	30%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.05**		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**4**	**dokumen**	**175.484.000**	**1**	**dokumen**	**13.161.000**	**1**	**dokumen**	**13.161.000**	**1**	**dokumen**	**13.161.000**	**100%**	**100%**	**2**	**dokumen**	**26.322.000**	**50%**	**15%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**12**	**Orang**	**60.000.000**	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-			**0**	**Orang**	-	**0%**	**0%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	dokumen	175.484.000	1	dokumen	13.161.000	1	dokumen	13.161.000	1	dokumen	13.161.000	100%	100%	2	dokumen	26.322.000	50%	15%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.05	9	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12	Orang	60.000.000	0	Orang	-	0	Orang		0	Orang				0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**4**	**Paket**	**1.353.995.500**	**1**	**Paket**	**200.506.700**	**1**	**Paket**	**211.439.500**	**1**	**Paket**	**211.439.500**	**100%**	**100%**	**2**	**Paket**	**411.946.200**	**50%**	**30%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**4**	**Paket**		**0**	**Paket**		**1**	**Paket**		**1**	**Paket**		**100%**		**1**	**Paket**	-	**25%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**48**	**Paket**		**12**	**Paket**		**12**	**Paket**		**12**	**Paket**		**100%**		**24**	**Paket**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**32**	**dokumen**		**8**	**dokumen**		**8**	**dokumen**		**8**	**dokumen**		**100%**		**16**	**dokumen**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**48**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**		**24**	**Laporan**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**48**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**		**24**	**Laporan**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	72.704.500	1	Paket	6.730.500	1	Paket	6.730.500	1	Paket	6.730.500	100%	100%	2	Paket	13.461.000	50%	19%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	55.000.000	0	Paket	-	1	Paket	1.500.000	1	Paket	1.500.000	100%	100%	1	Paket	1.500.000	25%	3%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	48	Paket	169.100.000	12	Paket	37.005.000	12	Paket	30.405.000	12	Paket	30.405.000	100%	100%	24	Paket	67.410.000	50%	40%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	32	dokumen	49.280.000	8	dokumen	8.280.000	8	dokumen	12.000.000	8	dokumen	12.000.000	100%	100%	16	dokumen	20.280.000	50%	41%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	36.174.000	12	Laporan	6.950.000	12	Laporan	6.950.000	12	Laporan	6.950.000	100%	100%	24	Laporan	13.900.000	50%	38%	DINAS SOSIAL	

	1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	971.737.000	12	Laporan	141.541.200	12	Laporan	153.854.000	12	Laporan	153.854.000	100%	100%	24	Laporan	295.395.200	50%	30%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**36**	**Unit**	**455.094.000**	**0**	**Unit**	-	**2**	**Unit**	**23.000.000**	**2**	**Unit**	**23.000.000**	**100%**	**100%**	**2**	**Unit**	**23.000.000**	**6%**	**5%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	10	Unit	200.000.000	0	Unit	-	0	Unit		0	Unit				0	Unit	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.07	3	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	15	Unit	32.700.000	0	Unit	-	1	Unit	7.000.000	1	Unit	7.000.000	100%	100%	1	Unit	7.000.000	7%	21%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang desediakan	17	Unit	222.394.000	0	Unit	-	1	Unit	16.000.000	1	Unit	16.000.000	100%	100%	1	Unit	16.000.000	6%	7%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**48**	**Laporan**	**807.777.000**	**12**	**Laporan**	**109.142.802**	**12**	**Laporan**	**123.902.800**	**12**	**Laporan**	**123.902.800**	**100%**	**100%**	**24**	**Laporan**	**233.045.602**	**50%**	**29%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**48**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**		**24**	**Laporan**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**48**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**		**24**	**Laporan**	-	**50%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	30.000.000	12	Laporan	5.000.000	12	Laporan	5.000.000	12	Laporan	5.000.000	100%	100%	24	Laporan	10.000.000	50%	33%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	Laporan	191.280.000	12	Laporan	43.860.802	12	Laporan	52.765.000	12	Laporan	52.765.000	100%	100%	24	Laporan	96.625.802	50%	51%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	Laporan	586.497.000	12	Laporan	60.282.000	12	Laporan	66.137.800	12	Laporan	66.137.800	100%	100%	24	Laporan	126.419.800	50%	22%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**74**	**Unit**	**1.294.510.600**	**74**	**Unit**	**170.775.525**	**74**	**Unit**	**144.222.600**	**74**	**Unit**	**144.222.600**	**100%**	**100%**	**148**	**Unit**	**314.998.125**	**200%**	**24%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	44	Unit	982.130.000	36	Unit	124.565.995	36	Unit	120.750.000	36	Unit	120.750.000	100%	100%	72	Unit	245.315.995	164%	25%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	28	Unit	66.000.000	20	Unit	10.260.000	20	Unit	10.200.000	20	Unit	10.200.000	100%	100%	40	Unit	20.460.000	143%	31%	DINAS SOSIAL	
	1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara /direhabilitasi	2	Unit	246.380.600	2	Unit	35.949.530	2	Unit	13.272.600	2	Unit	13.272.600	100%	100%	2	Unit	49.222.130	100%	20%	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**% PSKS yang Aktif**	**33,51**	**%**	**1.698.023.600**	**33,51**	**%**	-	**33,51**	**%**	-	**33,51**	**%**	-	**100%**		**67,023555**	**%**	-	**200%**	**0%**	DINAS SOSIAL	
	1	**6**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota**	**180**	**Orang**	**1.698.023.600**	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-			**0**	**Orang**	-	**0%**	**0%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	**16**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**			**0**	**Orang**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	**4**	**Lembaga**		**0**	**Lembaga**		**0**	**Lembaga**		**0**	**Lembaga**			**0**	**Lembaga**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	180	Orang	277.000.000	0	Orang	-	0	Orang		0	Orang				0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	

	1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	16	Orang	741.999.600	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-			0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	4	Lembaga	679.024.000	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-			0	Lembaga	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	4			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi**	**78,20**	**%**	**3.068.600.000**	**36,69**	**%**	**599.296.500**	**39,10**	**%**	**169.095.000**	**39,10**	**%**	**169.095.000**	**100%**	**100%**	**75,79**	**%**	**768.391.500**	**97%**	**25%**	DINAS SOSIAL	
							Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**52,93**	**%**	**16.874.769.000**	**0,80%**	**%**	**1.361.332.950**	**0,80%**	**%**	**1.136.468.500**	**0,80%**	**%**	**1.136.468.500**	**100%**	**100%**	**0,016**	**%**	**2.497.801.450**	**0%**	**15%**	DINAS SOSIAL	
							IKM	**B**	**Poin**	**516.944.500**	**B**	**Poin**	-	**B**	**Poin**	-	**B**	**Poin**	-	**100%**		**B**	**Poin**	-	**100%**	**0%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota**	**120**	**Orang**	**2.397.990.000**	**30**	**Orang**	**755.527.000**	**0**	**Orang**	**199.095.000**	**0**	**Orang**	**199.095.000**	**0%**	**100%**	**30**	**Orang**	**954.622.000**	**25%**	**40%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	**200**	**Orang**		**18**	**Orang**		**8**	**Orang**		**8**	**Orang**		**100%**	**0%**	**26**	**Orang**	-	**13%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	**40**	**Orang**		**1050**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0%**	**0%**	**1050**	**Orang**	-	**2625%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	**1600**	**Orang**	-	**400**	**Orang**		**1000**	**Orang**		**1000**	**Orang**		**100%**	**0%**	**1400**	**Orang**	-	**88%**			
							Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	**80**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0%**	**0%**	**0**	**Orang**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	120	Orang	392.000.000	30	Orang	84.566.000	0	Orang		0	Orang				30	Orang	84.566.000	25%	22%	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual. dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	200	Orang	589.956.000	18	Orang	251.840.000	8	Orang	169.095.000	8	Orang	169.095.000	100%	100%	26	Orang	420.935.000	13%	71%	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Orang	505.984.000	1050	Orang	262.890.500	0	Orang		0	Orang				1050	Orang	262.890.500	2625%	52%	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1600	Orang	456.770.000	400	Orang	156.230.500	1000	Orang	30.000.000	1000	Orang	30.000.000	100%	100%	1400	Orang	186.230.500	88%	41%		
	1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	80	Orang	453.280.000	0	Orang	-	0	Orang		0	Orang				0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	

	1	6	4	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota**	**2150**	**Orang**	**18.062.323.500**	**0**	**Orang**	**1.205.102.450**	**0**	**Orang**	**1.106.468.500**	**0**	**Orang**	**1.106.468.500**	**0%**	**100%**	**0**	**Orang**	**2.311.570.950**	**0%**	**13%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	**80000**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**				**0**	**Orang**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	**90**	**Orang**		**90**	**Orang**		**90**	**Orang**		**90**	**Orang**		**100%**		**90**	**Orang**	-	**100%**			
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	**25.000**	**Orang**		**28639**	**Orang**		**25000**	**Orang**		**25000**	**Orang**		**100%**		**25000**	**Orang**	-	**100%**			
							Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	**17.600**	**Orang**		**15488**	**Orang**		**15000**	**Orang**		**15000**	**Orang**		**100%**		**15000**	**Orang**	-	**85%**			
							Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	**80**	**dokumen**		**0**	**dokumen**		**0**	**dokumen**		**0**	**dokumen**				**0**	**dokumen**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota	2150	Orang	516.944.500	0	Orang	-	0	Orang		0	Orang				0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	80000	Orang	11.440.000.000	0	Orang	-	750	Orang	208.688.000	750	Orang	208.688.000	100%	100%	750	Orang	208.688.000	1%	2%	DINAS SOSIAL	
0	1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	90	Orang	625.743.000	90	Orang	135.602.500	90	Orang	158.936.000	90	Orang	158.936.000	100%	100%	90	Orang	294.538.500	100%	47%		
	1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25.000	Orang	2.124.256.000	28639	Orang	521.515.000	25000	Orang	308.334.500	25000	Orang	308.334.500	100%	100%	25000	Orang	829.849.500	100%	39%		
	1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	17.600	Orang	2.228.000.000	15488	Orang	547.984.950	15000	Orang	430.510.000	15000	Orang	430.510.000	100%	100%	15000	Orang	978.494.950	85%	44%		
	1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	80	dokumen	1.127.380.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-			0	dokumen	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	5			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid**	**100**	**%**	**5.808.100.000**	**100**	**%**	-	**100**	**%**	-	**100**	**%**	-	**100%**		**100**	**%**	-	**100%**	**0%**	DINAS SOSIAL	
							Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	**70,2388**	**%**	**2.708.604.000**	**6,1**	**%**	**249.390.000**	**0**	**%**	-	**0**	**%**	-			**6,1**	**%**	**249.390.000**	**9%**	**9%**	DINAS SOSIAL	

	1	6	5	2.01		**Pemeliharaan Anak anak Terlantar**	**Jumlah Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota**	**5000**	**Orang**	**1.308.604.000**	**25**	**Orang**	**66.708.000**	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-			**25**	**Orang**	**66.708.000**	**1%**	**5%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.01	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	5000	Orang	1.308.604.000	25	Orang	66.708.000	0	Orang		0	Orang				25	Orang	66.708.000	1%	5%	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data**	**124151**	**Orang**	**7.208.100.000**	**0**	**Orang**	**182.682.000**	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-			**0**	**Orang**	**182.682.000**	**0%**	**3%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	**118908**	**Keluarga**		**0**	**Keluarga**		**0**	**Keluarga**		**0**	**Keluarga**				**0**	**Keluarga**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	**17600**	**Keluarga**		**0**	**Keluarga**		**0**	**Keluarga**		**0**	**Keluarga**				**0**	**Keluarga**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	**600**	**Orang**		**110**	**Orang**		**0**	**Orang**		**0**	**Orang**				**110**	**Orang**	-	**18%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02	**1**	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	496604	Orang	2.127.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-			0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	118908	Keluarga	306.200.000	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-			0	Keluarga	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	17600	Keluarga	3.374.900.000	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-			0	Keluarga	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	600	Orang	1.400.000.000	110	Orang	182.682.000	0	Orang	-	0	Orang	-			110	Orang	182.682.000	18%	13%	DINAS SOSIAL	
	1	6	6			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima**	**100**	**%**	**3.092.000.000**	**100**	**%**	**-**	**100**	**%**	**129.440.000**	**100**	**%**	**129.440.000**	**100%**	**100%**	**100**	**%**	**129.440.000**	**100%**	**4%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	6	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota**	**4000**	**Orang**	**1.047.000.000**	**400**	**Orang**	**-**	**200**	**Orang**	**129.440.000**	**200**	**Orang**	**129.440.000**	**100%**	**100%**	**600**	**Orang**	**129.440.000**	**15%**	**12%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	**8**	**Unit**		**0**	**Unit**		**0**	**Unit**		**0**	**Unit**				**0**	**Unit**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
							Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	**105**	**Orang**												**0**		-	**0%**			
	1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	4000	Orang	675.000.000	0	Orang	-	200	Orang	129.440.000	200	Orang	129.440.000	100%	100%	200	Orang	129.440.000	5%	19%	DINAS SOSIAL	
	1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	8	Unit	192.000.000	0	Unit	-	0	Unit		0	Unit				0	Unit	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	

	1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	105	Orang	180.000.000												0		-	0%	0%		
	1	6	6	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten Kota**	**Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota**	**90**	**Orang**	**2.045.000.000**	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-	**0**	**Orang**	-			**0**	**Orang**	-	**0%**	**0%**	DINAS SOSIAL	
							Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	**8**	**Kampung**		**0**	**Kampung**		**0**	**Kampung**		**0**	**Kampung**			**0**	**Kampung**	-	**0%**		DINAS SOSIAL	
	1	6	6	2.02	1	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	8	Kampung	905.000.000	0	Kampung	-	0	Kampung		0	Kampung				0	Kampung	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	6	2.02	2	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang	1.140.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-			0	Orang	-	0%	0%	DINAS SOSIAL	
	1	6	7			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**% komponen utama taman makam pahlawan**	**78,57**	**%**	**302.580.000**	**78,57**	**%**	86.183.840	**78,57**	**%**	**92.941.800**	**78,57**	**%**	**92.941.800**	**100%**	**100%**	**157,14286**	**%**	**179.125.640**	**200%**	**59%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	7	2.07		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota**	**1**	**dokumen**	**302.580.000**	**1**	**dokumen**	86.183.840	**1**	**dokumen**	**92.941.800**	**1**	**dokumen**	**92.941.800**	**100%**	**100%**	**2**	**dokumen**	**179.125.640**	**200%**	**59%**	DINAS SOSIAL	
	1	6	7	2.07	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1	dokumen	302.580.000	1	dokumen	86.183.840	1	dokumen	92.941.800	1	dokumen	92.941.800	**100%**	**100%**	2	dokumen	179.125.640	200%	59%	DINAS SOSIAL	

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

JAIMIN, S.IP
NIP. 19650814 198503 1002

PERSIAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						**7.079.133.400,00**							**9.758.423.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.079.133.400,00**							**9.758.423.500,00**	
	-	**-**						**7.079.133.400,00**							**9.758.423.500,00**	
1.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi*** ***IKM*** ***Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya***	**B Poin** **78,20 %** **52,93 %**			**19,55 %** **B Poin** **13,23 %**	**2.702.437.700,00**						**B Poin** **19,55 %** **13,23 %**	**4.792.360.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota* *Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota* *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* *Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota*	-			50 Orang 20 Orang 10 Orang 30 Orang	875.012.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	364.296.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	381.745.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	463.267.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		126.496.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				25000 Orang	30.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		87.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota* *Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota* *Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota*	-			20 Orang 550 Orang 20000 Orang	1.827.425.700,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	4.428.064.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				550 Orang	173.535.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		155.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1850 Orang	460.968.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		2.860.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	205.336.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		325.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				106 Orang	557.076.700,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		531.064.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				71 Orang	430.510.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		557.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial*** ***Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid***	**70,24 % 100 %**			**70,24 % 100 %**	**245.957.600,00**						**70,24 % 100 %**	**571.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data* *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota* *Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota* *Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota*	-			124151 Orang 17600 Keluarga 118908 Keluarga 150 Orang	245.957.600,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	571.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				124151 Orang	245.957.600,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		571.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima***	**100 %**			**100 %**	**269.965.000,00**						**100 %**	**248.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota* *Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota*	-			1000 Orang 2 Unit	269.965.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	248.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				400 Orang	198.440.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		193.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	71.525.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 3. Memantapkan kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase komponen utama taman makam pahlawan***	**78,57 %**			**78,57 %**	**160.034.400,00**						**78,57 %**	**75.645.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota*	-			1 dokumen	160.034.400,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	75.645.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	160.034.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		75.645.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial***	**78,95 %**			**78,95 %**	**3.700.738.700,00**						**78,95 %**	**4.071.418.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	-			70 Unit	202.600.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	332.701.800,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	139.300.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		266.620.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			1 dokumen 3 Orang	37.733.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	58.871.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	22.733.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		43.871.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	15.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		15.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* *Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*	-			1 Paket 12 Laporan 12 Laporan 12 Paket 1 Paket 8 dokumen	271.060.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	352.649.500,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.730.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		6.730.500,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	44.770.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		45.650.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	12.060.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.950.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		10.426.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun*	-			4 dokumen 14 dokumen 6 dokumen	70.879.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	86.141.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	30.339.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		22.851.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			18 Unit	89.950.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	28.047.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	36.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		5.900.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	53.150.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		22.147.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	131.673.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	215.820.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	-			70 Unit	202.600.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	332.701.800,00	DINAS SOSIAL
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	52.450.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		54.031.800,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	131.673.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	215.820.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	56.440.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		50.820.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	-			70 Unit	202.600.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	332.701.800,00	DINAS SOSIAL
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	10.850.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		12.050.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	131.673.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	215.820.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70.233.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		155.000.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* *Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*	-			1 Paket 12 Laporan 12 Laporan 12 Paket 1 Paket 8 dokumen	271.060.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	352.649.500,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.550.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		274.843.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun*	-			4 dokumen 14 dokumen 6 dokumen	70.879.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	86.141.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	6.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		6.740.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	9.275.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		6.740.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.815.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		6.740.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		6.740.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4.620.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		4.600.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	6.230.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		31.730.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*"Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran* *Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	-			2 Laporan 28 Orang 1 Laporan 1 dokumen	2.876.258.200,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	2.977.128.200,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	2.865.753.200,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		2.965.628.200,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		4.500.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	3.005.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.585.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	20.060.000,00	DINAS SOSIAL
	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	20.585.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		20.060.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H							**7.079.133.400,00**							**9.758.423.500,00**	

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD

TA. 2025

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

JANUARI
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya penyusunan Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat untuk tahun 2025 ini telah selesai kami susun sesuai dengan harapan.

Prinsip yang diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun rencana kinerja dilakukan secara terkoordinir, berkesinambungan dan terintegrasi sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif,efisien transparan dan akuntabel.

Besar harapan pemerintah dan masyarakat agar mengoptimalkan peran dari masing-masing untuk mewujudkan pembangunan pada tahun 2025 yang telah disepakati secara konsensus dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dengan tetap berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat 2023-2026.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan.

Liwa, 30 Januari 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. DAMAN NASIR..M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680701 198901 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar I

Daftar Isi II

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.. 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rensta OPD 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi OPD... 8

2.4 Review terhadap rancangan awal OPD 10

2.5 Penelaahan Usulan Pogram dan Kegiatan Masyarakat 11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD……. 11

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasiona 12

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 13

3.3 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan 16

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah…… 20

BAB V PENUTUP ……. 21

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Rencana Kerja OPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mengacu pada rencana awal RKPD, Renstra dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya. Masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang tenaga Kerja
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
5. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan,Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

15. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 tahun 2010;
17. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Tata Ruang wilayah kabupaten Lampung Barat Tahub 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat periode 2023 – 2026 dan sebagai bahan landasan pelaksanaan penyelenggaraan fungsi Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja serta target indikator Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Terwujudnya pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara umum melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.
2. Mengukur Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.
3. Mengukur tingkat capaian target kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
3.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja OPD) Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah perubahan sebanyak 5 program, jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan dan jumlah Sub kegiatan termasuk Sub kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 31 Sub-kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja Operasional setelah perubahan sebesar Rp 3.154.739.411,- terealisasi sebesar Rp. 3.028.714.656,- atau 96 persen. Secara umum capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan tercapai 100 %.

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2023 dengan capaian strategis sebagai berikut :

Tabel I. Pengukuran Sasaran Strategis TA. 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatnya Pertumbuhan investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 95 Milyar	Rp. 119.705.298.159,-
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	IKM	79	90,64

Berdasarkan tabel diatas capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara umum tercapai lebih dari 100 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu idealnya diperlukan adanya indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan outcome (manfaat) dari suatu kumpulan sasaran / program / kegiatan /sub kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya Sistem Pengukuran Kinerja yang berlaku untuk satuan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat, terus berusaha mewujudkan kemudahan dalam pelayanan perizinan bagi dunia usaha, sehingga memberikan kesempatan yang luas dan transparan kepada masyarakat dalam mengurus segala macam jenis perizinan dan non perizinan.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Lampung Barat relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha dan ini harus diimbangi dengan kemudahan-kemudahan prosedur penerbitan izin.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kabupaten Lampung Barat dimana sebagian besar daerahnya adalah perbukitan / pegunungan dan kawasan maka ini menjadi suatu tantangan

tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memunculkan ide/inovasi guna menarik para investor agar dapat ikut membantu mengembangkan daerah Kabupaten Lampung Barat, maka dirasa sangat diperlukan dukungan data investasi dan peluang investasi guna memetakan daerah-daerah yang dapat dilirik para investor untuk menanamkan modalnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada permasalahan- permasalahan sebagaimana berikut :

Pada sisi internal, diantaranya :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
2. Belum ada kendaraan operasional roda empat untuk pelaksanaan survey permohonan perizinan dan pengawasan bersama tim teknis.
3. Penerapan teknologi informasi pada pelayanan perizinan dan nonperizinan belum optimal.
4. Belum diterapkannya pemberian insentif/tunjangan khusus bagi aparatur pelaksana perizinan dan nonperizinan.
5. Belum optimalnya promosi penanaman modal dan kerja sama antar instansi dalam rangka menarik Investasi.

Sementara itu, dari sisi eksternal, antara lain :

1. Masih terbatasnya informasi kepada masyarakat di daerah–daerah tertentu yang memiliki keterbatasan akses untuk mengurus perizinan, dikarenakan tidak mengetahui cara mengurus proses perizinan secara online, dan masih ada sebagian kecil masyarakat masih menganggap dalam mengurus perizinan merupakan sesuatu yang sulit.
2. Masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia.
3. Masih belum sepenuhnya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan pembangunan menyadari perlunya membuat izin bagi bangunannya.
4. Belum adanya kebijakan insentif daerah bagi investor.
5. Akses dan potensi daerah yang belum terkelola dengan baik.
6. Percepatan layanan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari tim teknis.
7. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha.

Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya yaitu dengan :

a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada dan berlaku;
b. Tersedianya media informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi;
c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah kompeten dan profesional;
d. Tersedianya data potensi dan eksisting perizinan dan non perizinan yang up to date, valid dan terukur.
e. Tersedianya sarana dan prasana dalam mendukung pelayanan (Kendaraan Operasional).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD

Hasil review terhadap rancangan awal OPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Terdapat beberapa sub kegiatan yang belum terdanai di tahun 2024 diantaranya pegadaan laptop beserta printer guna mendukung pelaksanaan administrasi perkatoran, maka pada tahun 2025 pengadaan ini diajukan kembali.

   Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada kegiatan musrenbang tahun 2025 terdapat usulan dari Kecamatan Batu Ketulis Pekon Bakhu yaitu Gerai Layanan Keliling Layanan Perizinan dimana usulan tersebut banyaknya masyarakat yang belum memiliki PBG sebanyak 250 buah.

BAB III

TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Visi dan Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan, Indikator dan Target Nasional pada Tahun 2024 yang Terkait dengan BKPM

Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB)yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha: a. jumlah prosedur b. waktu (hari)	Menuju 40 - -	Menuju 40 - -	Menuju 40 - -	Menuju 40 - -	Menuju 40 - -
		Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	886,0	991,3	1.128,3	1.294,1	1.500,0
		Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (%)	47,4	47,8	48,3	48,9	49,5
		Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	246,3	316,3	422,2	573,2	782,0
		Kontribusi realisasi investasi luar Jawa(%)	45,6	46,2	47,4	48,5	49,7
		Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	bertahap	bertahap	bertahap	bertahap	Selesai

Sumber: Lampiran III dokumen RPJMN Tahun 2020-2024
Keterangan: a) Capaian tiga triwulan pertama tahun 2019
b) Proanosa/estimasi tahun 2019

Sumber: https://www.bkpm.go.id

B. Peta Arah Kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

1. Peningkatan Inovasi dalam Rangka Pencapaian Target Penanaman Modal, Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal

pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

Sumber:*https://www.bkpm.go.id*

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) Tahunan sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan , berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sektor Perizinan Penanaman modal;

Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;

Table, Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana table berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah		Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 95 Milyar	Rp. 99,75 M	Rp. 104,64 M	Rp. 109,87 M
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 95 Milyar	Rp. 99,75 M	Rp. 104,64 M	Rp. 109,87 M
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sektor Perizinan Penanaman modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	82	85	88,5
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	82	85	88,5

3.3 Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA dengan kegiatan :

1. Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
e. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
f. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
d. Sub. Keg. Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Sub. Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub. Keg. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

b. Sub. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

c. Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

d. Sub. Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu

e. Sub. Keg. Pnyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub. Kegiatan Jasa Surat Menyurat

b. Sub Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik

c. Sub. Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan

b. Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

d. Sub. Keg. Pemeiharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub. Keg. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

b. Sub. Keg. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis resiko Terintegrasi secara Elektronik;

b. Sub. Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko;

c. Sub. Kegiatan Pemantauan analisis , evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko.

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha

b. Sub. Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengolahan,Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan tahun anggaran 2025 terlampir

BAB V

PENUTUP

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk tahun 2025.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi acuan dalam rencana penetapan kebijakan Anggaran Belanja Daerah Lampung Barat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 diharapkan dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 30 Januari 2024
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. DAMAN NASIR.,M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680701 198901 1002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan(output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) s.d Tahun 2026 (Akhir periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)			Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024			Target Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	%		K		Rp	K		%		
2					3	4	5			6			7			8			9 = 8 / 7x100%			10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			12	13
02					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																									
02	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**36.279.194.101**			**3.028.714.656**			**3.473.454.300**			**3.473.454.300**						**6.502.168.956**					
02	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**79,25**	**Point**	**22.575.266.434**	**82.61**	**Point**	**1.968.036.889**	**79**	**Point**	**2.453.603.300**	**79**	**Point**	**2.453.603.300**	**100%**	**Point**	**100%**	**79**	**Point**	**4.421.640.189**	**79**	**Point**	**100%**	**DPMPTSP**	
02	**18**	**01**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**38**	**Dokumen**	**151.586.308**	**11**	**Dokumen**	**18.163.000**	**8**	**Dokumen**	**18.680.400**	**8**	**Dokumen**	**18.680.400**	**100%**	**Dokumen**	**100%**	**19**	**Dokumen**	**36.843.400**	**11**	**Dokumen**	**100%**	**DPMPTSP**	
						Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	**20**			**4**	**Dokumen**		**5**	**Dokumen**		**5**	**Dokumen**		**100%**	**Dokumen**		**9**	**Dokumen**		**5**	**Dokumen**		**DPMPTSP**	
						Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**48**			**13**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**	**Laporan**		**25**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**DPMPTSP**	
02	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	38	Dokumen	21.051.149	11	Dokumen	4.340.000	8	Dokumen	4.346.000	8	Dokumen	4.346.000	100%	Dokumen	100%	19	Dokumen	8.686.000	11	Dokumen	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	11.904.721	1	Dokumen	1.846.100	1	Dokumen	1.847.800	1	Dokumen	1.847.800	100%	Dokumen	100%	2	Dokumen	3.693.900	1	Dokumen	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	11.665.737	1	Dokumen	1.809.000	1	Dokumen	1.845.200	1	Dokumen	1.845.200	100%	Dokumen	100%	2	Dokumen	3.654.200	1	Dokumen	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	10.482.415	1	Dokumen	1.625.300	1	Dokumen	1.627.000	1	Dokumen	1.627.000	100%	Dokumen	100%	2	Dokumen	3.252.300	1	Dokumen	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	10.184.170	1	Dokumen	1.579.000	1	Dokumen	1.759.800	1	Dokumen	1.759.800	100%	Dokumen	100%	2	Dokumen	3.338.800	1	Dokumen	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	12.687.376	1	Laporan	1.966.600	1	Laporan	2.254.800	1	Laporan	2.254.800	100%	Laporan	100%	2	Laporan	4.221.400	1	Laporan	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Laporan	73.610.740	12	Laporan	4.997.000	12	Laporan	4.999.800	12	Laporan	4.999.800	100%	Laporan	100%	24	Laporan	9.996.800	12	Laporan	100%	**DPMPTSP**	
02	**18**	**01**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Reliasasi Anggaran**	**4**	**Dokumen**	**14.420.905.193**	**1**	**Dokumen**	**1.660.618.074**	**1**	**Dokumen**	**2.096.224.000**	**1**	**Dokumen**	**2.096.224.000**	**100%**	**Dokumen**	**100%**	**2**	**Dokumen**	**3.756.842.074**	**1**	**Dokumen**	**100%**	**DPMPTSP**	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**4**	**Laporan**		**1**	**Laporan**		**1**	**Laporan**		**1**	**Laporan**		**100%**	**Laporan**		**2**	**Laporan**		**1**	**Laporan**		**DPMPTSP**	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan(output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) s.d Tahun 2026 (Akhir periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)			Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024			Target Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K		%		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Twirulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	**68**	**Laporan**		**17**	**Laporan**		**17**	**Laporan**		**17**	**Laporan**		**100%**	**Laporan**		**34**	**Laporan**		**17**	**Laporan**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**29**	**Orang**		**21**	**Orang**		**22**	**Orang**		**22**	**Orang**		**100%**	**Orang**		**43**	**Orang**		**24**	**Orang**		**DPMPTSP**	
02	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang	14.389.319.228	21	Orang	1.652.312.074	22	Orang	2.087.293.000	22	Orang	2.087.293.000	100%	Orang	100%	28	Orang	3.739.605.074	24	Orang	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4	Laporan	14.355.952	1	Laporan	2.498.000	1	Laporan	2.690.000	1	Laporan	2.690.000	100%	Laporan	100%	1	Laporan	5.188.000	1	Laporan	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Twirulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Twirulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	5.745.251	17	Laporan	3.810.000	17	Laporan	4.101.200	17	Laporan	4.101.200	100%	Laporan	100%	1	Laporan	7.911.200	17	Laporan	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,02	02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Reliasasi Anggaran	4	Dokumen	11.484.762	1	Dokumen	1.998.000	1	Dokumen	2.139.800	1	Dokumen	2.139.800	100%	Dokumen	100%	1	Dokumen	4.137.800	1	Dokumen	100%	**DPMPTSP**	
02	**18**	**1**	**2**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD**	**4**	**Dokumen**	**31.311.200**	**1**	**Dokumen**	**6.413.500**	**1**	**Dokumen**	**6.952.800**	**1**	**Dokumen**	**6.952.800**	**100%**	**Dokumen**	**100%**	**2**	**Dokumen**	**13.366.300**	**1**	**Dokumen**	**100%**	**DPMPTSP**	
02	18	1	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	4	Dokumen	**31.311.200**	1	Dokumen	6.413.500	1	Dokumen	6.952.800	1	Dokumen	6.952.800	100%	Dokumen	100%	2	Dokumen	13.366.300	1	Dokumen	100%	**DPMPTSP**	
02	**18**	**1**	**2,1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai**	**4**	**Dokumen**	**95.400.000**	**1**	**Dokumen**	**4.194.900**	**1**	**Dokumen**	**24.138.600**	**1**	**Dokumen**	**24.138.600**	**100%**	**Dokumen**	**100%**	**2**	**Dokumen**	**28.333.500**	**1**	**Dokumen**	**100%**	**DPMPTSP**	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**16**	**Orang**			**Orang**		**4**	**Orang**		**4**	**Orang**		**100%**	**Orang**		**1**	**Orang**		**4**	**Orang**		**DPMPTSP**	
02	18	1	2,05	01	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	Dokumen	20.700.000	1	Dokumen	4.194.900	1	Dokumen	4.138.600	1	Dokumen	4.138.600	100%	Dokumen	100%	2	Dokumen	8.333.500	1	Dokumen	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	Orang	74.700.000		Orang		4	Orang	20.000.000	4	Orang	20.000.000	100%		100%	4	Orang	20.000.000			100%	**DPMPTSP**	
02	**18**	**01**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**4**	**Paket**	**820.811.145**	**2**	**Paket**	**100.948.118**	**2**	**Paket**	**98.435.200**	**2**	**Paket**	**98.435.200**	**100%**	**Dokumen**	**100%**	**4**	**Paket**	**199.383.318**	**2**	**Dokumen**	**100%**	**DPMPTSP**	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		**Paket**			**Paket**		**0**	**Paket**		**0**	**Paket**		**0%**	**Paket**		**0**	**Paket**		**3**	**Paket**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		**Paket**			**Paket**		**0**	**Paket**		**0**	**Paket**		**0%**	**Paket**		**0**	**Paket**		**3**	**Paket**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**8**	**Paket**		**2**	**Laporan**		**1**	**Laporan**		**1**	**Laporan**		**100%**	**Laporan**		**3**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**5**	**Dokumen**		**5**	**Dokumen**		**5**	**Dokumen**		**5**	**Dokumen**		**100%**	**Dokumen**		**10**	**Dokumen**		**5**	**Dokumen**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**	**Laporan**		**24**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**DPMPTSP**	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan(output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) s.d Tahun 2026 (Akhir periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)			Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024			Target Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K		%		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**	**Laporan**		**24**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**DPMPTSP**	
02	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	11.680.001	2	Paket	2.054.000	2	Paket	2.678.000	2	Paket	2.678.000	100%	Paket	100%	4	Paket	4.732.000	2	Paket	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	6.491.387		Paket		0	Paket	0	0	Paket	0	0%		0%	0	Paket	0			100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	7.490.062		Paket		0	Paket	0	0	Paket	0	0%		0%	0	Paket	0			100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	173.722.590	2	Paket	16.033.400	1	Paket	16.510.000	1	Paket	16.510.000	100%	Paket	100%	3	Paket	32.543.400	2	Paket	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	27.907.971	5	Dokumen	4.860.000	5	Dokumen	5.760.000	5	Dokumen	5.760.000	100%	Dokumen	100%	10	Dokumen	10.620.000	5	Dokumen	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	29.148.326	12	Laporan	5.316.000	12	Laporan	5.500.000	12	Laporan	5.500.000	100%	Laporan	100%	24	Laporan	10.816.000	12	Laporan	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	551.996.808	12	Laporan	72.684.718	12	Laporan	67.987.200	12	Laporan	67.987.200	100%	Laporan	100%	24	Laporan	140.671.918	12	Laporan	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48	Dokumen	6.187.000																			
02	18	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	6.187.000																			
02	**18**	**01**	**2,1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**36**	**Unit**	**1.738.600.000**	**2**	**Unit**	**3.600.000**	**8**	**Unit**	**20.800.000**	**8**	**Unit**	**20.800.000**	**100%**	**Unit**	**100%**	**10**	**Unit**	**24.400.000**	**2**	**Unit**	**100%**	**DPMPTSP**	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Diadakan	**1**	**Unit**			**Unit**			**Unit**			**Unit**		**0%**	**Unit**		**0**	**Unit**			**Unit**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**57**	**Unit**			**Unit**		**0**	**Unit**		**0**	**Unit**		**0%**	**Unit**		**0**	**Unit**		**11**	**Unit**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**3**	**Unit**			**Unit**		**0**	**Unit**		**0**	**Unit**		**0%**	**Unit**		**0**	**Unit**		**2**	**Unit**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	**4**	**Unit**			**Unit**		**0**	**Unit**		**0**	**Unit**		**0%**	**Unit**		**0**	**Unit**		**1**	**Unit**		**DPMPTSP**	
02	18	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Diadakan	1	Unit	**355.000.000**										**0%**										
02	18	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Set	508.800.000		Unit		0	Unit	0	0	Unit	0	**0%**		0%	0	Unit	0			100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	564.800.000	2	Unit	3.600.000	8	Unit	20.800.000	8	Unit	20.800.000	100%	Unit	100%	10	Unit	24.400.000	2	Unit	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	270.000.000		Unit		0	Unit	0	0	Unit	0	**0%**		0%	0	Unit	0			100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1	Unit	40.000.000		Unit		0	Unit	0	0	Unit	0	**0%**		0%	0	Unit	0			100%	**DPMPTSP**	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan(output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) s.d Tahun 2026 (Akhir periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)			Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024			Target Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K		%		
02	**18**	**01**	**2,1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**48**	**Laporan**	**4.159.859.822**	**12**	**Laporan**	**102.856.559**	**12**	**Laporan**	**116.712.300**	**12**	**Laporan**	**116.712.300**	**100%**	**Laporan**	**100%**	**24**	**Laporan**	**219.568.859**	**12**	**Laporan**	**100%**	**DPMPTSP**	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**48**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**	**Laporan**		**24**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**48**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**100%**	**Laporan**		**24**	**Laporan**		**12**	**Laporan**		**DPMPTSP**	
02	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7.953.195	12	Laporan	1.625.000	12	Laporan	1.725.000	12	Laporan	1.725.000	100%	Laporan	100%	24	Laporan	3.350.000	12	Laporan	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3.288.360.596	12	Laporan	16.210.859	12	Laporan	22.559.800	12	Laporan	22.559.800	100%	Laporan	100%	24	Laporan	38.770.659	12	Laporan	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	863.546.031	12	Laporan	85.020.700	12	Laporan	92.427.500	12	Laporan	92.427.500	100%	Laporan	100%	24	Laporan	177.448.200	12	Laporan	100%	**DPMPTSP**	
02	**18**	**01**	**2,1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**2**	**Unit**	**1.156.792.766**	**1**	**Unit**	**71.242.738**	**1**	**Unit**	**71.660.000**	**1**	**Unit**	**71.660.000**	**100%**	**Unit**	**100%**	**2**	**Unit**	**142.902.738**	**1**	**Unit**	**100%**	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan Pajak	11	Kendaraan			**Unit**		11	**Unit**		11	**Unit**		100%	**Unit**		**11**	**Unit**		11	**Unit**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**11**	**Unit**		**11**	**Unit**		**11**	**Unit**		**11**	**Unit**		**100%**	**Unit**		**22**	**Unit**		**11**	**Unit**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**9**	**Unit**		**10**	**Unit**		**11**	**Unit**		**11**	**Unit**		**100%**	**Unit**		**21**	**Unit**		**10**	**Unit**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang	**2**	**Unit**			**Unit**		**0**	**Unit**		**0**	**Unit**		**0%**	**Unit**		**0**	**Unit**		**0**	**Unit**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang	**1**	**Unit**			**Unit**		**0**	**Unit**		**0**	**Unit**		**0%**	**Unit**		**0**	**Unit**		**0**	**Unit**		**DPMPTSP**	
02	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	721.083.297	11	Unit	53.845.488	11	Unit	54.300.000	11	Unit	54.300.000	100%	Unit	100%	22	Unit	108.145.488	11	Unit	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	Unit	68.140.094	10	Unit	7.160.000	11	Unit	7.910.000	11	Unit	7.910.000	100%	Unit	100%	21	Unit	15.070.000	10	Unit	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	324.569.375	1	Unit	10.237.250	1	Unit	9.450.000	1	Unit	9.450.000	100%	Unit	100%	2	Unit	19.687.250	1	Unit	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2	Unit	10.750.000		Unit		0	Unit	0	0	Unit	0	0%	Unit	0%	0	Unit	0	2	Unit	100%	**DPMPTSP**	
02	18	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1	Unit	32.250.000		Unit		0	Unit	0	0	Unit	0	0%	Unit	0%	0	Unit	0	1	Unit	100%	**DPMPTSP**	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan(output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) s.d Tahun 2026 (Akhir periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)			Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024			Target Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K		%		
02	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**20**	**%**	**950.000.000**		**%**		**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0%**	**%**	**0%**	**20**	**%**	**0**	**20**	**%**	**100%**	**DPMPTSP**	
02	**18**	**02**	**2**		**Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman**	**9**	**Kegiatan Usaha**	**950.000.000**				**0**		**0**	**0**		**0**	**0%**		**0%**	**0**		**0**	**0**		**100%**	**DPMPTSP**	
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insesntif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	**2**	**Dokumen**			**Kegiatan Usaha**		**0**	**Kegiatan Usaha**		**0**	**Kegiatan Usaha**		**0%**	**Kegiatan Usaha**		**1**	**Kegiatan Usaha**		**1**	**Kegiatan Usaha**		**DPMPTSP**	
02	18	03	2,01	01	Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	Dokumen	630.000.000				0			0			0%			0			0			**DPMPTSP**	
02	18	02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	9	Kegiatan Usaha	320.000.000		Kegiatan Usaha		0	Kegiatan Usaha	0	0	Kegiatan Usaha	0	0%	Kegiatan Usaha	0%	1	Kegiatan Usaha	0	1	Kegiatan Usaha	100%	**DPMPTSP**	
02	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Minat Investasi**	**20**	**%**	**8.563.800.000**	**109**	**%**	**379.232.687**	**15**	**%**	**350.000.000**	**15**	**%**	**350.000.000**	**100%**	**%**	**100%**	**15**	**%**	**729.232.687**	**10**	**%**	**100%**	**DPMPTSP**	
02	**18**	**03**	**2**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota**	**4**	**Dokumen**	**8.563.800.000**	**1**	**Dokumen**	**379.232.687**	**1**	**Dokumen**	**350.000.000**	**1**	**Dokumen**	**350.000.000**	**100%**	**Dokumen**	**100%**	**2**	**Dokumen**	**729.232.687**	**1**	**Dokumen**	**100%**	**DPMPTSP**	
						Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	**1**	**Dokumen**			**Dokumen**		**0**	**Dokumen**		**0**	**Dokumen**		**0%**	**Dokumen**		**0**	**Dokumen**		**0**	**Dokumen**		**DPMPTSP**	
02	18	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	Dokumen	210.000.000		Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	**0%**		0%	0	Dokumen	0			100%	**DPMPTSP**	
02	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	10	Dokumen	8.353.800.000	1	Dokumen	379.232.687	1	Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	350.000.000	100%	Dokumen	100%	2	Dokumen	729.232.687	1	Dokumen	100%	**DPMPTSP**	
02	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan**	**100**	**%**	**2.283.950.590**	**100**	**%**	**224.694.300**	**100**	**%**	**220.673.000**	**100**	**%**	**220.673.000**	**100%**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**445.367.300**	**100**	**%**	**100%**	**DPMPTSP**	
02	**18**	**04**	**2**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik**	**7.020**	**Pelaku Usaha**	**2.283.950.590**	**3.930**	**Pelaku Usaha**	**224.694.300**	**0**	**Pelaku Usaha**	**220.673.000**	**1500**	**Pelaku Usaha**	**220.673.000**	**0%**	**Pelaku Usaha**	**100%**	**5.430**	**Pelaku Usaha**	**445.367.300**	**1500**	**Pelaku Usaha**	**100%**	**DPMPTSP**	
						Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	**270**	**Kegiatan Usaha**		**58**	**Kegiatan Usaha**		**0**	**Kegiatan Usaha**		**30**	**Kegiatan Usaha**		**0%**	**Kegiatan Usaha**		**88**	**Kegiatan Usaha**		**30**	**Kegiatan Usaha**		**DPMPTSP**	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan(output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) s.d Tahun 2026 (Akhir periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)			Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024			Target Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K		%		
						Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	**51**	**Orang**			**Orang**		**0**	**Orang**		**150**	**Orang**		**0%**	**Orang**		**150**	**Orang**		**16**	**Orang**		**DPMPTSP**	
						Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	**9**	**Kegiatan Usaha**			**Kegiatan Usaha**		**0**	**Kegiatan Usaha**		**0**	**Kegiatan Usaha**		**0%**	**Kegiatan Usaha**		**0**	**Kegiatan Usaha**		**1**	**Kegiatan Usaha**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem PerizinanBerusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7020	Pelaku Usaha					**1500**	**Pelaku Usaha**		**1500**	**Pelaku Usaha**												
						Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat TerhadapPelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	Orang					**150**	**Orang**		**150**	**Orang**												
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen PerizinanBerusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	60	Kegiatan Usaha					**30**	**Kegiatan Usaha**		**30**	**Kegiatan Usaha**												
02	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi Secara Elektronik	7.020	Pelaku Usaha	485.090.000	3.930	Pelaku Usaha	178.138.300	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0	0%	Pelaku Usaha	0%	3.930	Pelaku Usaha	178.138.300	400	Pelaku Usaha	56%	**DPMPTSP**	
02	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan Penanaman Modal	60	Kegiatan Usaha	73.565.000	58	Kegiatan Usaha	46.556.000	0	Kegiatan Usaha	0	0	Kegiatan Usaha	0	0%	Kegiatan Usaha	0%	58	Kegiatan Usaha	46.556.000	30	Kegiatan Usaha	100%	**DPMPTSP**	
02	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat TerhadapPelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20	Orang	25.950.000	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0%	Orang	0%	0	Orang	0	150	Jenis	100%	**DPMPTSP**	
02	18	04	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Daerah	9	Kegiatan Usaha	145.120.900	0	Kegiatan Usaha	0	0	Kegiatan Usaha	0	0	Kegiatan Usaha	0	0%	Kegiatan Usaha	0%	1	Kegiatan Usaha	0	1	Kegiatan Usaha	100%	**DPMPTSP**	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan(output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) s.d Tahun 2026 (Akhir periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)			Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024			Target Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K		%		
02	18	04	2,01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem PerizinanBerusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6620	Pelaku Usaha	1.191.890.590				1500	Pelaku Usaha	167.088.000	1500	Pelaku Usaha	167.088.000	100%	Pelaku Usaha	100%	1.500	Pelaku Usaha	167.088.000	400	Pelaku Usaha	23%	DPMPTSP	
02	18	04	2,01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui SistemPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	525	Pelaku Usaha	94.483.950				150	Pelaku Usaha	20.000.000	150	Pelaku Usaha	20.000.000	100%	Pelaku Usaha	100%	150	Pelaku Usaha	20.000.000	400	Pelaku Usaha	29%	DPMPTSP	
02	18	04	2,01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen PerizinanBerusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	210	Kegiatan Usaha	267.850.150				30	Kegiatan Usaha	33.585.000	30	Kegiatan Usaha	33.585.000	100%	Pelaku Usaha	100%	30	Pelaku Usaha	33.585.000					
02	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1**	**100**	**%**	**1.605.772.077**	**100**	**%**	**423.636.600**	**85**	**%**	**415.178.000**	**85**	**%**	**415.178.000**	**100%**	**%**	**100%**	**85**	**%**	**838.814.600**	**75**	**%**	**100%**	**DPMPTSP**	
02	**18**	**05**	**2**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal**	**37**	**Kegiatan Usaha**	**1.605.772.077**		**Kegiatan Usaha**	**423.636.600**	**0**	**Kegiatan Usaha**	**415.178.000**	**0**	**Kegiatan Usaha**	**415.178.000**	**0%**	**Kegiatan Usaha**	**100%**	**0**	**Kegiatan Usaha**	**838.814.600**	**8**	**Kegiatan Usaha**	**100%**	**DPMPTSP**	
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	**840**	**Pelaku Usaha**		**180**	**Pelaku Usaha**		**0**	**Pelaku Usaha**		**0**	**Pelaku Usaha**		**0%**	**Pelaku Usaha**		**180**	**Pelaku Usaha**		**500**	**Pelaku Usaha**		**DPMPTSP**	
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	**57**	**Kegiatan Usaha**		**25**	**Kegiatan Usaha**		**0**	**Kegiatan Usaha**		**0**	**Kegiatan Usaha**		**0%**	**Kegiatan Usaha**		**25**	**Kegiatan Usaha**		**13**	**Kegiatan Usaha**		**DPMPTSP**	
02	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal	37	Kegiatan Usaha	224.160.300		Kegiatan Usaha		0	Kegiatan Usaha	0	0	Kegiatan Usaha	0	0%	Kegiatan Usaha	0%	0	Kegiatan Usaha	0	8	Kegiatan Usaha	100%	DPMPTSP	
02	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210	Pelaku Usaha	216.822.000	180	Pelaku Usaha	394.222.600	0	Pelaku Usaha	0	0	Pelaku Usaha	0	0%	Pelaku Usaha	0%	180	Pelaku Usaha	394.222.600	500	Pelaku Usaha	100%	DPMPTSP	
02	18	05	2,01	03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	13	Kegiatan Usaha	80.875.000	25	Kegiatan Usaha	29.414.000	0	Kegiatan Usaha	0	0	Kegiatan Usaha	0	0%	Kegiatan Usaha	0%	25	Kegiatan Usaha	29.414.000	13	Kegiatan Usaha	100%	DPMPTSP	
02	18	05	2,01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha BerbasisRisiko (Pelaku Usaha	630	Pelaku Usaha	789.448.902				127	Pelaku Usaha	300.000.000	127	Pelaku Usaha	300.000.000	100%										

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan(output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) s.d Tahun 2026 (Akhir periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)			Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024			Target Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																										
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		%	K		Rp	K		%		
02	18	05	2,01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari PelakuUsaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatanusaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan	44	Kegiatan Usaha	294.465.875				11	Kegiatan Usaha	115.178.000	11	Kegiatan Usaha	115.178.000	100%											
02	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPTSP**	**100**	**%**	**300.405.000**	**100**	**%**	**33.114.180**	**100**	**%**	**34.000.000**	**100**	**%**	**34.000.000**	**100%**	**%**	**100%**	**100**	**%**	**67.114.180**	**100**	**%**	**100%**	**DPMPTSP**	
02	**18**	**06**	**2**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan**	**1**	**Dokumen**	**300.405.000**	**1**	**Dokumen**	**33.114.180**	**0**	**Dokumen**	**34.000.000**	**0**	**Dokumen**	**34.000.000**	**0%**	**Dokumen**	**100%**	**1**	**Dokumen**	**67.114.180**	**1**	**Dokumen**	**100%**	**DPMPTSP**	
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan BerbasisSistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	**3**	**Dokumen**					**1**	**Dokumen**		**1**	**Dokumen**		**100%**										
02	18	06	2,01	01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	Dokumen	72.000.000	1	Dokumen	33.114.180	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0%	Dokumen	0%	1	Dokumen	33.114.180	1	Dokumen	100%	**DPMPTSP**	
02	18	06	2,01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan BerbasisSistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan BerbasisSistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3	Dokumen	228.405.000				1	Dokumen	34.000.000	1	Dokumen	34.000.000	100%	Dokumen	100%	1	Dokumen	34.000.000	1	Dokumen	100%	**DPMPTSP**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**5.420.062.902,00**							**10.611.294.811,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.420.062.902,00**							**10.611.294.811,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**5.420.062.902,00**							**10.611.294.811,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP***	**79,50 %**			**79,50 %**	**2.667.362.870,00**						**79,50 %**	**7.114.408.564,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen 11 Dokumen 12 Laporan	25.707.800,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	48.796.785,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	4.695.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.776.525,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.330.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.832.220,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.093.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.755.289,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.135.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.374.369,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.010.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.278.362,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.254.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.084.163,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	10.190.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		23.695.857,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.220.708.070,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	4.392.298.631,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.211.570.270,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.382.678.224,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.748.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.372.515,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	4.190.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.749.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.199.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.498.012,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.072.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	7.780.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7.072.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.780.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	24.327.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	24.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	4.327.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	20.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	151.726.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	255.363.209,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.678.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.557.477,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	16.510.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		56.735.640,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5.760.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.500.169,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.877.955,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	121.278.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		177.691.968,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	56.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	35.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		56.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	131.162.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.990.932.235,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.725.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.422.372,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	22.559.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.725.492.251,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	106.877.200,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		263.017.612,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	71.660.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	339.237.404,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	54.300.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		219.626.517,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	7.910.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		20.754.012,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	9.450.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		98.856.875,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Persentase Peningkatan Minat Investasi***	**20 %**			**20 %**	**1.899.984.832,00**						**20 %**	**2.395.800.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota*	-			1 Dokumen 0 Dokumen	1.899.984.832,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	-	2.395.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1.899.984.832,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN		2.395.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan***	**100,00 %**			**100,00 %**	**498.090.000,00**						**100,00 %**	**562.259.240,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal*	-			2200 Kegiatan Usaha	498.090.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	562.259.240,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2200 Pelaku Usaha	398.600.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat		429.804.790,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				175 Pelaku Usaha	25.700.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat		34.539.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				70 Kegiatan Usaha	73.790.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat		97.915.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**320.625.000,00**						**-**	**460.522.007,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	320.625.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	-	460.522.007,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				6 Kegiatan Usaha.	62.276.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN		64.287.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				172 Pelaku Usaha	228.349.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN		288.590.082,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				10 Kegiatan Usaha	30.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN		107.644.625,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**34.000.200,00**						**-**	**78.305.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	34.000.200,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN	-	78.305.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	34.000.200,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Calon Investor PMA/PMDN		78.305.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							**5.420.062.902,00**							**10.611.294.811,00**	

RENCANA KERJA | TAHUN 2025

Badan RISET DAN INOVASI DAERAH
Kabupaten Lampung Barat

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen rencana daerah yang mana terdapat penyesuian – penyesuian dengan keadaan yang dibutuhkan pada tahun berjalan sehingga berperan vital dalam mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD satu tahun kedepan. Renja OPD mempunyai fungsi penting yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah. Renja OPD memuat rencana pelayanan baik kepada masyarakat maupun pada sesama OPD lainya yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan mensikapi adanya perubahan terhadap agenda pembangunan yang lebih mengedepankan pada pencapaian kesejahteraan dan pemerintahan yang berdayasaing, maka untuk menghadapi tantangan dan perubahan di tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan strategi sebagai upaya pencapaian sasaran telah merumuskan rencana kerja OPD tahun 2025 kedalam 2 Program dengan sumberdana berasal dari APBD Kabupaten Lampung Barat.

Melalui Penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini diharapkan Visi OPD dan Visi Kabupaten Lampung Barat periode 2023 - 2026 akan tercapai.

KEPALA BADAN

RISET DAN INOVASI DAERAH

PAIJO, SKM, M.Kes

NIP. 19640902 198803 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ..... I – 1
1.2. Landasan Hukum ..... I – 1
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I – 3
1.4. Sistematika Penulisan ..... I – 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... II – 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... II – 9
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ..... II – 11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II – 11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II – 11

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III – 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... III – 3
3.3. Program dan Kegiatan ..... III – 7

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

AllTogetherBetter BALITBANG

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Rencana kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat.

Pembentukan institusi yang menangani kegiatan Penelitian dan Pengembangan merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Balitbangda sebagai institusi penelitian dan pengembangan di daerahharus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan berdasarkan sebuah kajian kepada Bupati selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan dituntut untuk siap dan sanggup dalam menyusun suatu perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) ini disusun berdasarkan visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat, RPJMD Kabupaten Lampung Barat, Hasil Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten Lampung Barat. Renja OPD ditujukan untuk menjabarkan Tujuan, sasaran, program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pegawasan Penyelengraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 - 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan aktifitas di Kabupaten Lampung Barat, sehingga terwujud sinergitas antar pelaku dan kegiatan pembangunan khususnya pembangunan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN I
LAMPIRAN II

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat hubungannya dengan proses evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya. Evaluasi dapat mengidentifikasikan dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi itu sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan Rencana Strategis Balitbang Tahun 2023 – 2026, Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki sasaran strategis Meningkatnya kualitas hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dengan 2 (dua) Indikator sebagai berikut :

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
2. Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 2 program, jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan dan jumlah Sub kegiatan termasuk Sub kegiatan rutin sebanyak 28 Sub-kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk belanja langsung sebesar Rp. 3.150.373.100 *(Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah)* terealisasi sebesar Rp. 3.088.390.847 (*Tiga Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) atau 98,03 persen dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 persen.

Dari seluruh Sub kegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya mencapai 100 persen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu idealnya diperlukan adanya indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan outcome (manfaat) dari suatu kumpulan sasaran / program / kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya Sistem Pengukuran Kinerja yang berlaku untuk satuan kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat.

Kelitbangan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat baru dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat, Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan atas Rekomendasi dari BRIN, berubah nomenklatur menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah .

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
i. pelaksanaan administrasi badan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pelayanan yang dilakukan hingga pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

a. Menyampaikan rekomendasi hasil penelitian serta kajian sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan hasil kajian sebagai berikut :
   - Kajian Cita Rasa dan Mutu Kopi Robusta Liwa dari Berbagai Metode Pengolahan
   - Strategi Pengembangan UKM di Kabupaten Lampung Barat
   - Identifikasi Pemeliharaan Tanaman Kopi Guna Peningkatan Produksi
   - Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Rumah Kreatif
   - Kajian Komoditas Unggulan Kecamatan se Kabupaten Lampung Barat
   - Analisa Pemetaan Data Potensi PAD dari Seluruh OPD Penghasil di Kabupaten Lampung Barat
   - Penguatan Kerjasama Kelitbangan dalam rangka Rencana Pembentukan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) khusus kopi di Kab. Lampung Barat
   - Kajian Design Penahan Longsor di Kabupaten Lampung Barat Berbasis Kearifan Lokal
   - Kajian Model Pengembangan Agribisnis Kopi Berdaya Saing dan Berkelanjutan.
   - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dengan judul Kajian Design Pengolahan Kualitas Air Minum di kabupaten Lampung Barat
   - Penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dengan fokus Judul Kajian Pengembangan Tata Kelola Kopi Melalui Kelembagaan
   - Kajian Keberagaman Geologi (Geoheritage) Lampung Barat
   - Pembuatan Rencana Induk Geopark
   - Survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat

b. Memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan berupa penyampaian informasi hasil penelitian melalui publikasi. Publikasi dilakukan melalui media berbentuk jurnal kelitbangan yang terbit 6 bulan sekali.
c. Dalam hal kemitraan, Balitbang menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan Perguruan Tinggi, Tenaga Ahli Profesional, dan Lembaga Litbang Pusat maupun Daerah.
d. Mengawal Kebijakan Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi, Tangguh Bencana dan Literasi
e. Memberikan bimbingan teknis terkait penginputan data Inovasi Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Riset dan Inovasi Daerah menghadapi permasalahan dan tantangan, antara lain :

- Hasil Penelitian dan Pengembangan belum ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan
- SDM Balitbang masih kurang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas (belum memiliki fungsional peneliti) serta belum memiliki dewan riset
- Perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, namun kelembagaan yang menaungi belum memadai sarana dan prasarana pendukungnya
- Kompleknya permasalahan di Kabupaten Lampung Barat baik dari aspek sosial, ekonomi, ekologi yang memerlukan penelitian dan pengembangan
- Rendahnya implementasi hasil penelitian di tingkat lapangan
- Belum optimalnya pengembangan teknologi tepat guna
- Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dinilai belum dapat mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh OPD lain.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD BRIDA Kab. Lampung Barat dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan terlihat seperti pada tabel berikut :

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			6.156.457.699		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			6.156.457.699	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	79,75 poin	2.782.896.699	Kecamatan Balik Bukit	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	79,75 poin	2.782.896.699	Kecamatan Balik Bukit
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	17.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	17.000.000	Kecamatan Balik Bukit
	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	5 dokumen				Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	5 dokumen		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	7.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	1.500.000	Kecamatan Balik Bukit
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	5.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	5.000.000	Kecamatan Balik Bukit

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	2.322.981.699	Kecamatan Balik Bukit	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	2.069.075.220	Kecamatan Balik Bukit
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	2.317.481.699	Kecamatan Balik Bukit	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	2.317.481.699	Kecamatan Balik Bukit

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.500.000	Kecamatan Balik Bukit	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.500.000	Kecamatan Balik Bukit
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 dokumen	2.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 dokumen	2.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	43.500.000	Kecamatan Balik Bukit	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	43.500.000	Kecamatan Balik Bukit
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	42.500.000	Kecamatan Balik Bukit	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	42.500.000	Kecamatan Balik Bukit
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	158.185.000	Kecamatan Balik Bukit	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	158.185.000	Kecamatan Balik Bukit
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen		

	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 laporan				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 laporan		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.725.000	Kecamatan Balik Bukit	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.725.000	Kecamatan Balik Bukit
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	22.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	22.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	3.960.000	Kecamatan Balik Bukit	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	3.960.000	Kecamatan Balik Bukit
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4.499.000	Kecamatan Balik Bukit	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4.499.000	Kecamatan Balik Bukit
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 laporan	125.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 laporan	125.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	105.240.000	Kecamatan Balik Bukit	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	105.240.000	Kecamatan Balik Bukit

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.800.000	Kecamatan Balik Bukit	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.800.000	Kecamatan Balik Bukit
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	19.200.000	Kecamatan Balik Bukit	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	19.200.000	Kecamatan Balik Bukit
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	83.240.000	Kecamatan Balik Bukit	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	83.240.000	Kecamatan Balik Bukit
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	8 unit	93.990.000	Kecamatan Balik Bukit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	8 unit	93.990.000	Kecamatan Balik Bukit

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	67.550.000	Kecamatan Balik Bukit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	67.550.000	Kecamatan Balik Bukit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	6.440.000	Kecamatan Balik Bukit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	6.440.000	Kecamatan Balik Bukit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	Kecamatan Balik Bukit
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan,Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	24 lapooran	3.373.561.000	Kecamatan Balik Bukit	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan,Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	24 lapooran	3.373.561.000	Kecamatan Balik Bukit
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	18 laporan	368.561.000	Kecamatan Balik Bukit	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	18 laporan	368.561.000	Kecamatan Balik Bukit

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	15 laporan	233.561.000	Kecamatan Balik Bukit	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	15 laporan	233.561.000	Kecamatan Balik Bukit
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 laporan	53.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 laporan	53.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	2 dokumen	82.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	2 dokumen	82.0 00.000	Kecamatan Balik Bukit
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 dokumen	2.205.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 dokumen	2.205.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	2.205.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	2.205.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 dokumen	600.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 dokumen	600.000.000	Kecamatan Balik Bukit

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	200.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	200.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup	1 dokumen	400.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup	1 dokumen	400.000.000	Kecamatan Balik Bukit
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah hasil laporan inovasi dan teknologi yang terverifikasi pengembangannya	1 dokumen	198.357.000	Kecamatan Balik Bukit	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah hasil laporan inovasi dan teknologi yang terverifikasi pengembangannya	1 dokumen	198.357.000	Kecamatan Balik Bukit
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	200.000.000	Kecamatan Balik Bukit	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	200.000.000	Kecamatan Balik Bukit

Terhadap perubahan yang mengakibatkan adanya penambahan kegiatan, indikator, target dan pendanaannya tersebut, maka secara simultan juga dilakukan revisi terhadap Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023 – 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari musrenbang 2024, belum ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat terkait tentang Penelitian dan Pengembangan untuk pembangunan daearah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau biasa disebut sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tujuan RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 (goals) tujuan tertampung dalam 7 agenda pembangunan. 7 agenda tersebut adalah (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sehubungan dengan Tupoksi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dikaitkan dengan RPD Kab. Lampung Barat 2023 - 2026 dan RPJMN 2020 – 2024 dan kedudukan BRIDA sebagai unsur penunjang maka yang

berhubungan langsung dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah agenda pembangunan 7 poin1 yaitu Reformasi Kelembagaan Birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas.

.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan , serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
i. pelaksanaan administrasi badan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati..

Sedangkan susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub bagian Umum dan Perencanaan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Kelompok Jabatan Fungsional
d. Unit Pelaksana Teknis Daerah

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 – 5 tahun kedepan. Dengan diformulasikan tujuan ini maka Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan tujuan Kabupaten Lampung Barat 2023 – 2026. Dengan adanya penetapan tujuan, akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Sasaran adalah target yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun 2025, terlihat seperti pada Tabel 3.1

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2023	2024	2025	2026	2027
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daera		Indeks Inovasi Daerah (Predikat)	Sangat Inovatif/ 61 poin	Sangat Inovatif/ 62 poin	Sangat Inovatif/ 63 poin	Sangat Inovatif/ 64 poin	
		Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	25	50	75	100	-
			Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Daerah	28	28	28	28	-

3.3 Pogram dan Kegiatan

a. Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan, maka disusun program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penelitian dan Pengembangan

b. Rencana Kerja Tahun 2025

Perencanaan Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan gambaran dari tujuan jangka menengah, sasaran tahunan dan indikator kinerja sasaran. Renstra tersebut sebagai dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah dan kerangka untuk perencanaan kinerja dan anggaran tahunan. Pada tahun 2025 dan prakiraan maju di tahun 2026 target yang direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026.

Adapun kebijakan operasional dalam mewujudkan visi dan misi Badan Badan Riset dan Inovasi Daerah, dalam Rencana Kerja Tahun 2025 direalisasikan melalui program prioritas dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2
PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
A.	**Program Penelitian dan Pengembangan**	**Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan,Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti**	**22 Laporan**
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil kegiatan penunjang kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	18 hasil kelitbangan
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum*	*15 Laporan*
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	*Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan*	*1 Laporan*

	Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	*pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi*	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola*	*2 dokumen*
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 dokumen
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	*Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan*	*1 dokumen*
3.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 dokumen
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	*Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan*	*1 dokumen*
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	*Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup*	*2 dokumen*
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah hasil laporan inovasi dan teknologi yang terverifikasi pengembangannya	1 Dokumen
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*	*1 dokumen*

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat terlihat pada Lampiran 2.

Dari rencana kerja yang telah dirumuskan, secara rinci dapat dijelaskan detail sub kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Detail Sub Kegiatan Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Detail Sub Kegiatan Tahun 2024
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan 11 dokumen yaitu renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan,
5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan dokumen RKA 1 dokumen
5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dokumen perubahan RKA 1 dokumen
5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA 1 dokumen
5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan DPA 1 dokumen
5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 dokumen
5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja 12 laporan yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP, Ev Renja tw 1, ev renja tw 2, ev renja tw 3, ev renja tw 4, Ev Rencana aksi tw 1, ev rencana aksi tw 2, ev

		rencana aksi tw 3, ev rencana aksi tw 4, laporan akhir tahun
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN 27 orang
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2 laporan
5.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 laporan
5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
5.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan RKBMD 1 dokumen
5.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan laporan penata usahaan barang milik daerah milik SKPD 2 laporan
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
5.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen
5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat fungsional pegawai berdasarkan tupoksinya 5 orang
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik instalasi listrik/ penerangan kantor 1 paket berupa 12 jenis komponen listrik
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan 1 paket yang terdiri dari 7 jenis
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan berupa surat kabar 4 SKHU

5.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum kunjungan tamu 300 orang
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah 22 kali
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat 600 surat
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayarkan 3 rekening
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa untuk 3 sub bidang urusan
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit minibus
5.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5 unit (2 laptop, 2 printer dan 1 ganset)
5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor 1 unit
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang bidang pemerintahan umum berupa Rekomendasi FGD sebanyak 3 laporan dan Rekomendasi tenaga ahli 12 laporan
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi terkait Optimalisasi Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal berupa rapat koordinasi dan FGD (1 laporan)

5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pelaksanaan diseminasi melalui jurnal (2 kali terbit dalam setahun)
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan dan Operasional UPT Kebun Raya Liwa
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Litbang tentang Kajian terkait pangan lokal yang akan direkomendasikan dalam pemenuhan gizi 1 dokumen
5.05.02.2.03.07	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup	Fasilitasi dan pengembangan geopark (1 dokumen)
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan IGA kepada 80 orang pamong Inovasi dan

BAB V
PENUTUP

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan Rencana Strategis Kabupaten Lampung Barat dan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2023-2026, maka disusunlah Rencana Kerja OPD untuk tahun 2025.

Demikian rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 untuk dipedomani pada tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan renja OPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama, mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEPALA BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH

PAIJO, SKM, M.Kes
NIP. 19640902 198803 1 006

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	80 poin	10.005.448.900	80,01 poin	2.226.160.022	79,50 poin	2.450.797.700	79,50 poin	2.450.797.700	100%	100%	80,01 poin	4.676.957.722	100%	47%	BRIDA	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 dokumen	84.600.000	11 dokumen	11.500.000	11 dokumen	11.500.000	11 dokumen	11.500.000	100%	100%	22 dokumen	23.000.000	58%	27%	BRIDA	
			Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	20 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		100%		10 dokumen		50%		BRIDA	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 dokumen		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100%		24 laporan		50%		BRIDA	
	5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 dokumen	19.000.000	11 dokumen	1.500.000	11 dokumen	1.500.000	11 dokumen	1.500.000	100%	100%	22 dokumen	3.000.000	58%	16%	BRIDA	
	5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	4.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	100%	100%	2 dokumen	2.000.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	4.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	100%	100%	2 dokumen	2.000.000	50%	50%	BRIDA	

	5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	100%	100%	2 dokumen	2.000.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	4.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	100%	100%	2 dokumen	2.000.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	100%	100%	2 laporan	2.000.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 laporan	45.600.000	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.000.000	100%	100%	24 laporan	10.000.000	50%	22%	BRIDA	
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	7.739.370.000	25 orang/bulan	1.994.690.109	25 orang/bulan	2.143.320.800	25 orang/bulan	2.143.320.800	100%	100%	50 orang/bulan	4.138.010.909	63%	53%	BRIDA	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100%		2 laporan		50%		BRIDA	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		100%		4 laporan		50%		BRIDA	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100%		2 laporan		50%		BRIDA	
	5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	7.717.370.000	25 orang/bulan	1.989.190.109	25 orang/bulan	2.137.820.800	25 orang/bulan	2.137.820.800	100%	100%	50 orang/bulan	4.127.010.909	63%	53%	BRIDA	

	5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	10.000.000	1 laporan	2.500.000	1 laporan	2.500.000	1 laporan	2.500.000	100%	100%	2 laporan	5.000.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 laporan	4.000.000	2 laporan	1.000.000	2 laporan	1.000.000	2 laporan	1.000.000	100%	100%	4 laporan	2.000.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 laporan	8.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	100%	100%	2 laporan	4.000.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 dokumen	8.000.000	3 dokumen	2.000.000	3 dokumen	2.000.000	3 dokumen	2.000.000	100%	100%	6 dokumen	4.000.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	4.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	100%	100%	2 dokumen	2.000.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 laporan	4.000.000	2 laporan	1.000.000	2 laporan	1.000.000	2 laporan	1.000.000	100%	100%	4 laporan	2.000.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	104.000.000	1 dokumen	955.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	100%	100%	2 dokumen	1.955.000	50%	2%	BRIDA	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang		0 orang		5 orang		0 orang	-			0 orang				BRIDA	
	5.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	4.000.000	1 dokumen	955.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	100%	100%	2 dokumen	1.955.000	50%	49%	BRIDA	
	5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	100.000.000	0 orang	-	5 orang	-	0 orang	-	0%	0%	0 orang	-	0%	0%	BRIDA	

	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	775.075.000	1 paket	96.090.384	1 paket	128.528.000	1 paket	128.528.000	100%	100%	2 paket	224.618.384	50%	29%	BRIDA	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		1 paket		1 paket		1 paket		100%		2 paket		50%		BRIDA	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		100%		8 dokumen		50%		BRIDA	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		100%		24 laporan		50%		BRIDA	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan		22 laporan		27 laporan		27 laporan		100%		49 laporan		25%		BRIDA	
	5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	10.900.000	1 paket	2.725.000	1 paket	2.725.000	1 paket	2.725.000	100%	100%	2 paket	5.450.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	170.335.000	1 paket	18.817.500	1 paket	19.115.000	1 paket	19.115.000	100%	100%	2 paket	37.932.500	50%	22%	BRIDA	
	5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 dokumen	15.840.000	4 dokumen	3.960.000	4 dokumen	3.960.000	4 dokumen	3.960.000	100%	100%	8 dokumen	7.920.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 laporan	18.000.000	12 laporan	4.499.000	12 laporan	4.499.000	12 laporan	4.499.000	100%	100%	24 laporan	8.998.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	560.000.000	22 laporan	66.088.884	27 laporan	98.229.000	27 laporan	98.229.000	100%	100%	49 laporan	164.317.884	25%	29%	BRIDA	
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	27 unit	272.000.000	0 unit	-	1 unit	16.000.000	1 unit	16.000.000	0%	100%	1 unit	16.000.000	4%	6%	BRIDA	
	5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 unit	130.000.000	0 unit	-	1 unit	16.000.000	1 unit	16.000.000	0%	0%	1 unit	16.000.000	8%	12%	BRIDA	
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	661.403.900	1 laporan	76.501.794	1 laporan	95.343.900	1 laporan	95.343.900	100%	100%	2 laporan	171.845.694	50%	26%	BRIDA	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		100%		6 laporan		50%		BRIDA	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100%		2 laporan		50%		BRIDA	
	5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	11.200.000	1 laporan	2.800.000	1 laporan	2.800.000	1 laporan	2.800.000	100%	100%	2 laporan	5.600.000	50%	50%	BRIDA	
	5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	76.800.000	3 laporan	13.762.394	3 laporan	19.005.000	3 laporan	19.005.000	100%	100%	6 laporan	32.767.394	50%	43%	BRIDA	
	5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	573.403.900	1 laporan	59.939.400	1 laporan	73.538.900	1 laporan	73.538.900	100%	100%	2 laporan	133.478.300	50%	23%	BRIDA	
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	32 unit	361.000.000	8 unit	44.422.735	8 unit	53.105.000	8 unit	53.105.000	100%	100%	16 unit	97.527.735	50%	27%	BRIDA	
	5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	225.240.000	2 unit	37.568.055	2 unit	35.150.000	2 unit	35.150.000	100%	100%	4 unit	72.718.055	50%	32%	BRIDA	
	5.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	25.760.000	5 unit	5.979.680	5 unit	6.440.000	5 unit	6.440.000	100%	100%	10 unit	12.419.680	50%	48%	BRIDA	
	5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	110.000.000	1 unit	875.000	1 unit	11.515.000	1 unit	11.515.000	100%	100%	2 unit	12.390.000	50%	11%	BRIDA	
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan,Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	94 Laporan	6.861.882.900	22 laporan	862.230.825	22 laporan	2.053.377.107	22 laporan	2.053.377.107	100%	100%	44 laporan	2.915.607.932	47%	42%	BRIDA	

	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	70 Laporan	1.769.882.900	17 laporan	298.054.698	18 laporan	368.074.000	18 laporan	368.074.000	100%	100%	35 laporan	666.128.698	50%	38%	BRIDA	
	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	60 Laporan	1.604.382.900	15 laporan	238.561.600	15 laporan	233.561.000	15 laporan	233.561.000	100%	100%	30 laporan	472.122.600	50%	29%	BRIDA	
	5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	4 laporan	100.000.000	0	-	1 laporan	52.513.000	1 laporan	52.513.000	100%	100%	1 laporan	52.513.000	25%	53%	BRIDA	
	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	8 laporan	460.000.000	2 laporan	59.493.098	2 laporan	82.000.000	2 laporan	82.000.000	100%	100%	4 laporan	141.493.098	50%	31%		
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 dokumen	912.000.000	0 dokumen	-	2 dokumen	1.124.459.107	1 dokumen	1.124.459.107	50%	100%	1 dokumen	1.124.459.107	25%	123%	BRIDA	
	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 dokumen	200.000.000	0	-	1 dokumen	-	0 dokumen	-	0%	0%	0 dokumen	-	0%	0%	BRIDA	
	5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	200.000.000	0	-	1 dokumen	1.124.459.107	1 dokumen	1.124.459.107	100%	100%	1 dokumen	1.124.459.107	100%	100%	BRIDA	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	12 dokumen	2.920.000.000	2 dokumen	523.281.527	4 dokumen	485.844.000	2 dokumen	485.844.000	50%	100%	4 dokumen	1.009.125.527	33%	35%	BRIDA	
	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 dokumen	640.000.000	0	-	1 dokumen	-	0 dokumen	-	0%	0%	0 dokumen	-	0%	0%	BRIDA	

	5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 dokumen	260.000.000	0	-	1 dokumen	-	0 dokumen	-	0%	0%	0 dokumen	-	0%	0%	BRIDA	
	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup	4 dokumen	750.000.000	1 dokumen	373.291.827	1 dokumen	335.844.000	1 dokumen	335.844.000	100%	100%	2 dokumen	709.135.827	50%	95%	BRIDA	
	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Pekerjaan Umum	4 dokumen	300.000.000	1 dokumen	149.989.700	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	100%	100%	2 dokumen	299.989.700	50%	100%	BRIDA	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah hasil laporan inovasi dan teknologi yang terverifikasi pengembangannya	4 laporan	800.000.000	1 laporan	40.894.600	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	100%	100%	2 laporan	115.894.600	50%	14%	BRIDA	
	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 laporan	800.000.000	1 laporan	40.894.600	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	100%	100%	2 laporan	115.894.600	50%	14%	BRIDA	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**5.836.295.459,00**							**5.821.349.939,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.836.295.459,00**							**5.821.349.939,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**5.836.295.459,00**							**5.821.349.939,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Balitbang***	**79,75 %**			**79,75 %**	**2.763.048.989,00**						**79,75 %**	**2.778.396.699,00**	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			5 dokumen 11 dokumen 12 dokumen	32.064.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	12.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	22.064.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			1 laporan 1 laporan 2 laporan 25 orang/bulan	2.322.981.699,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	2.322.981.699,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.317.481.699,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.317.481.699,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			3 dokumen	2.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	2.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			1 dokumen 5 orang	43.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	43.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	42.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		42.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-			4 dokumen 12 laporan 1 paket 1 paket 22 laporan	158.059.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	158.185.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.725.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.725.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		22.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	3.960.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.960.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	124.874.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		125.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*	-			2 unit	37.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	37.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	-			1 laporan 1 laporan 3 laporan	105.045.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	105.240.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.800.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	19.005.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		19.200.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	83.240.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		83.240.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	-			8 unit	61.599.290,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	93.990.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	35.150.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		67.550.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	6.440.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.440.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.009.290,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan,Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti***	**24 Laporan**			**24 Laporan**	**3.073.246.470,00**						**24 Laporan**	**3.042.953.240,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan*	-			18 laporan	454.346.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi	-	383.138.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				15 Laporan	304.769.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi		233.561.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	56.887.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi		56.887.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	92.690.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi		92.690.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	-			1 dokumen	1.510.927.470,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Pengelolaan KRL	-	1.709.815.240,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1.510.927.470,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Pasar Liwa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Pengelolaan KRL		1.709.815.240,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	-			3 dokumen	906.048.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi	-	750.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi		200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	556.048.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi		400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi		150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah hasil laporan inovasi dan teknologi yang terverifikasi pengembangannya*	-			1 laporan	201.925.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi	-	200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	201.925.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Aparatur Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi		200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	J U M L A H							**5.836.295.459,00**							**5.821.349.939,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
INSPEKTORAT

RENCANA KERJA

renja-pd 2025

JL. TULIP NO. 3 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT
TELP. (0728) 21159 FAX. (0728) 21567
KODE POS 34811

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang merupakan implementasi tahunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian besar harapan kami agar Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan bagi yang memerlukan.

Liwa, 1 Desember 2024

PLT. INSPEKTUR

IMAT SUKRI, S.Sos., MP

NIP. 19670518 199211 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... *i*
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematikan Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10
2.3. Isu-isu penting penyelengaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 22
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 26
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34
4.1. Rencana Kerja 34
4.2. Pendanaan Perangkat Daera 37
BAB V PENUTUP 38
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang merinci lebih lanjut Renstra dimana dokumen tersebut menggambarkan kondisi yang akan dicapai oleh OPD dalam periode 1 (satu) tahun. Sebagai konsekuensi logisnya maka Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dituntut untuk memerumuskan dan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selaras dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Lampung Barat 2023–2026. Hal ini mengingat peran Inspektorat baik sebagai sub sistem pengawasan yang tak dapat dipisahkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lampung Barat maupun sebagai elemen pengawasan fungsional internal dalam sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun dengan tujuan agar Inspektorat Kabupaten Lampung Barat bersama seluruh Institusi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengawasi dan mengawal terlaksananya semua program dan kegiatan pembangunan daerah sehingga menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, serta mudah dipantau dan terukur pencapaian hasilnya.

Dalam Otonomi Daerah, kewenangan telah diberikan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada setiap daerah. Selain itu juga telah diamanatkan agar dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan daerah harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, dengan kata lain bahwa masyarakat harus diberdayakan

melalui aktifnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan di daerah.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat harus segera direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan–perubahan yang terarah menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka mengakomodasikan kondisi tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu institusi Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat dengan mengoptimalkan pemanfaatan semua potensi sumberdaya yang ada secara berkelanjutan serta memanfaatkan semua peluang yang dimilikinya.

Inspektorat Kabupaten Lampung Barat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Bupati;
d. Penyusunan Laporan hasil pengawasan;

e. Pelayanan administrasi Inspektorat;
f. Pelaksanaan funsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Inspektorat Kabupaten Lampung Barat memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

a. Inspektur;
b. Sekretariat, yang terdiri dari :
    1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
    1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
    2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
    3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
    4. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
    5. Inspektur Pembantu Wilayah V
d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Adapun bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat sebagai berikut :

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

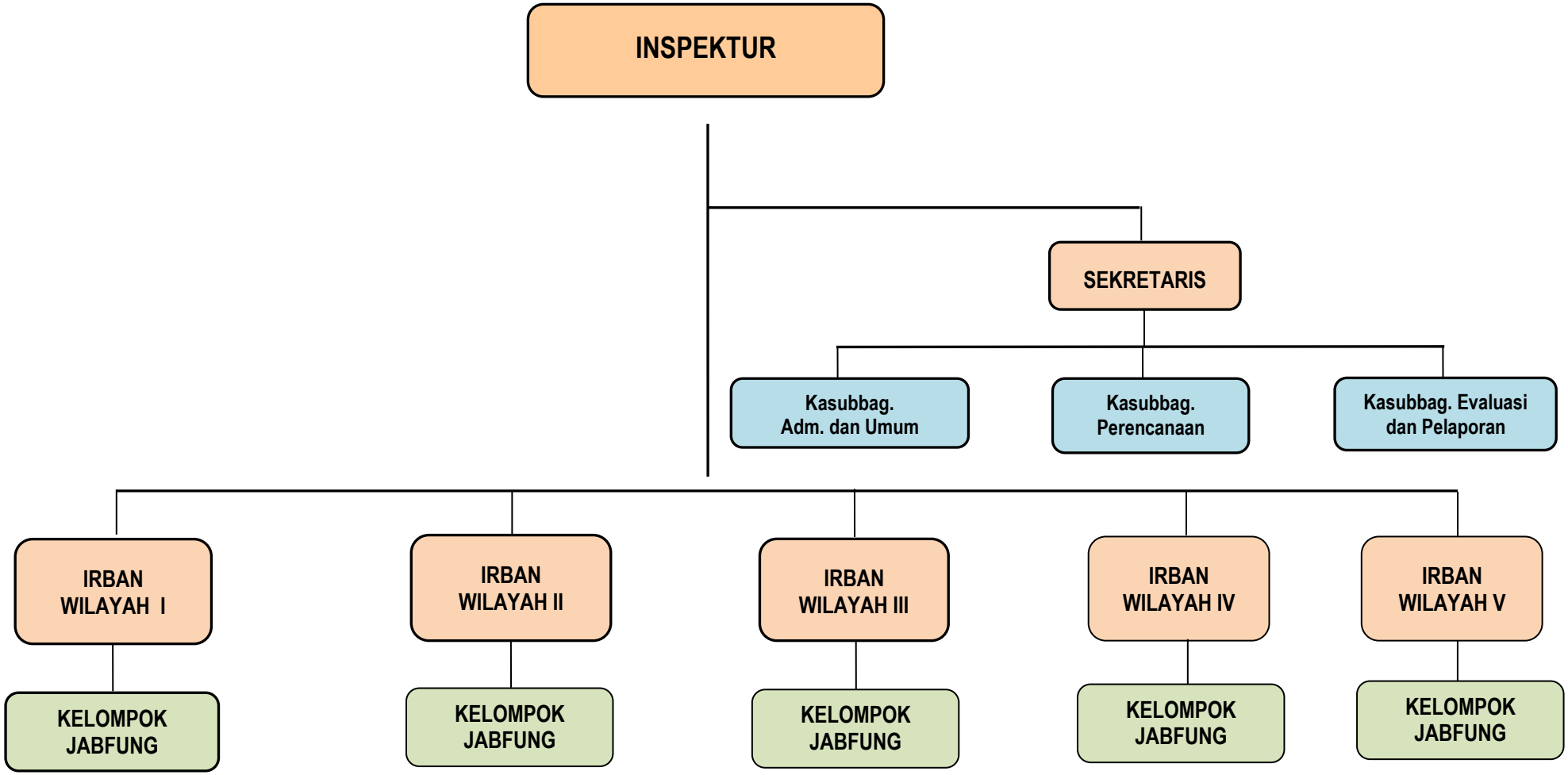

1.2. Landasan Hukum

1) Landasan Idiil Pancasila;
2) Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945;
3) Undang–undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat;
4) Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5) Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah;

13) Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.
18) Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), disusun dengan maksud untuk menetapkan pedoman pelaksanaan arah pengawasan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki serta partisipasi masyarakat yang juga ikut melakukan pengawasan terhadap seluruh kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

2) Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Tersedianya dokumen perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2023, yang menjadi acuan bagi Inspektorat dalam menetapkan perencanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, dan pembinaan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat
b. Tersusunnya tujuan dan sasaran serta indikator pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan.
c. Tersusunnya program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang akan menjadi acuan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, dan pembinaan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu Tahun 2025.
d. Sebagai acuan bagi Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun Laporan Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mencapai Indikator Utama pada Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 3 (tiga) Program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 10 (sepuluh) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan . Alokasi dana tahun 2024 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. **9.235.389.152,-** (*Sembilan milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilanb ribu seratus lima puluh dua rupiah*) terealisasi sebesar Rp. **8.988.785.887,-** (*Delapan milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*) atau 97,33 persen.

Dari seluruh Kegiatan terdapat 5 (lima) kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen, yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Administras Kepegawaian, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Pendapingan Asistensi.

Namun secara umum rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2024 adalah sebesar 100 persen.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja perangkat daerah. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lampung Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing–masing kelompok indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran instansi yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing–masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Kriteria capaian hasil pengukuran kinerja dengan klarifikasi/rentang dapat terlihat dalam table sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - 85 %	Berhasil
3.	55 % - 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Tidak Berhasil

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 dapat terlihat dalam table berikut ini :

Tabel A.1

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET	REALISASI BERDASARKAN KONDISI REAL
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif dan Akuntabel	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal B	OPD dengan nilai SAKIP B / Jumlah OPD x 100%	85 %	100%
		Level Kapabilitas APIP	Bobot Fokus Penilaian / Interval Skor x 100%	Level 3	Level 3
		Maturitas SPIP	Bobot Fokus Penilaian / Interval Skor x 100%	Level 3	Level 3

Tabel 6.3
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN SERTA FORMULASI PERHITUNGAN TARGET PROGRAM

NAMA PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	TARGET	REALISASI
Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang di Tindak Lanjuti	(Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan) / (Jumlah Temuan Selesai Ditindak Lanjuti) x 100%	85 %	85 %
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang memiliki kompetensi sesuai jenjang jabatan	(Jumlah APIP Yang Memiliki Kompetensi) / (Jumlah APIP) x 100%	100 %	75 %
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terlaksananya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Dokumen Perencanaan yang selaras Renja OPD dengan RPJMD	(Jumlah Dokumen Perencanaan) / (35 KKR 6 LHR) x 100	85 %	85 %

dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan unsur Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dapat dikategorikan “Cukup Baik”. Dengan demikian diharapkan di masa yang akan datang semua kegiatan yang telah ditetapkan -unsur efektif dan efisien.

2.3 Isu-isu penting penyelengaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Keberhasilan manajemen dan eksistensi sebuah organisasi dapat dilihat dari seberapa jauh kemampuan organisasi tersebut untuk beradaptasi terhadap lingkungannya yang bersifat dinamis. *Environment scan* meliputi kondisi eksternal dan internal. Kondisi Internal terdiri dari Kelemahan (*weakness*) dan Kekuatan (*strenghts*) sedangkan kondisi eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Inspektorat Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai satuan kerja yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dibuat dapat direalisasikan serta dapat berdaya guna bagi kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

Untuk lebih meningkatkan kinerjanya Inspektorat Kabupaten Lampung Barat perlu difasilitasi melalui dana untuk melaksanakan pengawasan, dengan semakin banyaknya kegiatan yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dana yang

dialokasikan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat juga dapat ditingkatkan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya hal ini juga terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada lampirannya yang merupajan penjelasan dari ruang lingkup peraturan dimaksud yaitu pada point 54 yang berbunyi :

> ".....Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan survei penilaian integritas dalam APBD sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi sebagai berikut :
>
> Pemerintah kabupaten/kota :
>
> 1) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
> 2) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
> 3) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Namun sampai dengan saat ini alokasi anggaran minimal yang sesuai dengan ketentuan tersebut belum dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah, meskipun demikian Inspektorat Kabupaten Lampung Barat tetap berusaha untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara maksimal.

1. Isu-isu penting yang dihadapi Inspektorat
    a. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, baik dari segi kuantitas maupaun kualitas / kompetensi. Menurut analisis jabatan bahwa pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat minimal sebanyak 67 orang yang terdiri dari 10 orang pejabat struktural, 27 orang pejabat fungsional Auditor, 13 orang pejabat fungsional P2UPD dan 17 orang staf.
    b. Persepsi sebagian unsur pemerintahan (Instansi/organisasi perangkat daerah dan legislatif) serta masyarakat tentang peran Inspektorat hanya melakukan langkah refresif berupa pemeriksaan/audit). Hal ini menghambat Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang seyogyanya juga melakukan langkah persuasif yaitu melakukan langkah-langkah evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja satuan kerja sehingga indikasi terjadinya penyimpangan dapat dihindari sejak dini.
    c. Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan kurang mendapat respon yang baik dari OPD sehingga pada Rapat Koordinasi di tingkat Provinsi, Regional maupun nasional temuan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih banyak yang belum ditindaklanjuti.
    d. Kurangnya sarana komputer/Note Book dan mobilitas untuk memperlancar pelaksanaan tugas. Kondisi saat ini sarana komputer yang ada sangat minim dan kondisinya kurang bagus. Sedangkan sarana mobilitas yang ada saat ini hanya 1 unit kendaraan dinas Inspektur, 1 unit kendaraan operasional Sekretaris Inspektorat dan 7 unit kendaraan roda dua, sementara untuk melakukan pemeriksaan di kecamatan dan pekon menggunakan kendaraan sewa/rental dan kendaraan umum.

e. Peran Inspektorat sampai saat ini masih dianggap hanya melakukan langkah represif berupa pembinaan. Hal ini menghambat Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang seyogyanya juga dapat melakukan langkah persuasif yaitu melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja satuan kerja sehingga indikasi terjadinya penyimpangan dapat dihindari sedini mungkin.
f. Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat dan APIP kurang mendapat respon yang baik dari OPD. Temuan-temuan bersifat keuangan yang merugikan negara/daerah yang melibatkan pegawai belum dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pelaksanaan Rapat Baperjakat.

2. Permasalahan

Hingga saat ini permasalahan yang masih menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dalam upaya mengefektifkan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan antara lain :

a. Belum terpenuhinya jumlah kelompok jabatan fungsional yang meliputi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (JFAK).
b. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensi.
c. Persepsi sebagian unsur pemerintahan (Instansi/satuan kerja dan legislatif) serta masyarakat tentang peran Inspektorat masih seperti era reformasi (Inspektorat yang hanya melakukan langkah represif berupa pemeriksaan/ audit). Hal ini menghambat Inspektorat dalam penyelenggaraan

pengawasan pemerintahan yang seyogyanya juga melakukan langkah persuasif yaitu melakukan langkah-langkah evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja satuan kerja sehingga indikasi terjadinya penyimpangan dapat dihindari sejak dini

d. Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan kurang mendapat respon yang baik dari OPD sehingga pada Rapat Koordinasi di tingkat provinsi, regional maupun nasional temuan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih banyak yang belum ditindak lanjuti.

3. Tantangan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat menghadapi beberapa tantangan sehingga hasil yang diperoleh belum dapat maksimal. Adapun tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya sumber daya manusia sehingga pelaksanaan tugas pemeriksaan masih melibatkan pejabat struktural dan staf. Jumlah ideal pegawai berdasarkan evaluas jabatan dan analisis beban kerja adalah sebanyak 57 orang sedangkan jumlah pegawai yang ada saat ini sebanyak 33 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 24 orang.
b. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja yakni ruang kerja, peralatan kantor berupa komputer/note book, printer, kursi kerja, ruang rapat, ruang pemeriksaan dan kendaraan operasional pemeriksaan. Kondisi ini tentu saja menghambat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga sebagian besar pegawai menggunakan laptop dan printer milik pribadi. Mobil opersional juga saat ini sudah tidak dapat digunakan lagi untuk operasional pemeriksaan di lapangan.
c. Kurangnya adanya dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk

menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana kerja yang telah diusulkan setiap tahun dengan alasan keterbatasan anggaran sehingga untuk melaksanakan tugas operasional pemeriksaan terutama laptop/note book, printer dan peralatan pemeriksaan fisik di lapangan menggunakan peralatan milik pribadi masing-masing pegawai.

d. Mekanisme pengelolaan keuangan dan barang belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini berkaitan dengan point b diatas. Pengelolaan keuangan dan barang serta tindak lanjut hasil pemeriksaan belum dilaksanakan secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi/sistem informasi teknologi sehingga pencatatan, pembukuan dan pengadministrasian serta tindak lanjut hasil pemeriksaan masih dilakukan secara manual.
e. Rekomendasi hasil temuan pemeriksaan belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan bagi pengambil kebijakan/keputusan. Hal ini menyebabkan penanganan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan khususnya temuan yang bersifat keuangan kurang mendapatkan respon dari OPD.
f. Kualitas sumber daya yang ada belum optimal. Tingkat pemahaman dan pengetahuan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan berbeda-beda sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan tentunya menjadi kendala pada saat menentukan rekomendasi. Kesempatan mengikuti diklat bagi pegawai masih terbatas dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas.

4. Peluang

Selain tantangan yang dihadapi, Inspektorat juga mempunyai beberapa peluang yang mendukung tercapainya seluruh target program dan kegiatan. Adapun peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

a. Adanya peraturan/ketentuan hukum serta sistem dan norma tentang pengawasan. Hal ini menjadi acuan dan pedoman bagi tim pemeriksa yang belum fungsional dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Partisipasi masyarakat ini ditampung pada kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Dalam hal ini masyarakat dapat membuat pengaduan apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan dan atau penggunaan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
c. Banyaknya tawaran untuk mengikuti Diklat/bimtek/workshop baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri maupun yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Perguruan Tinggi dan Lembaga Swasta.
d. Harmonisasi dan Komunikasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawas Eksternal (BPK-RI). Telah dibentuk Forum Komunikasi APIP yang terdiri dari Inspektorat Provinsi Lampung dan seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan Pengawas Eksternal (BPK-RI).

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 telah dilakukan reviu terhadap Rancangan Awal RKPD. Hal tersebut dilaksanakan agar Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang telah disusun selaras dengan Rancangan RKPD. Reviu dilaksanakan penyelarasan

Tujuan, Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat :
   "Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa"
2. Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Barat :
   "Terwujudnya Pengawasan dan Pemeriksaan yang efektif

   Pada sasaran ini indikator sasarannya meliputi :

   a. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal BB, target pada tahun 2024 adalah sebesar 80% OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik sesuai standar penilaian/evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022 target indikator sasaran tersebut telah terealisasi sebesar 166% atau 29 OPD telah memperoleh nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP minimal BB dari target 16 OPD (60%).
   b. Level Kapabilitas APIP, target pada tahun 2024 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Barat adalah level 3 namun berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas (Qualiti Assurance) oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lampung Barat atas pelaksanaan penilaian internal tahun 2023 masih berada pada level 3.
   c. Maturitas SPIP, target pada tahun 2024 adalah level 3. Berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dengan pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung bahwa level Maturitas SPIP Kabupaten Lampung Barat adalah pada level 3 selanjutnya hasil penilaian tersebut akan dilakukan ekspose di BPKP RI disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penyusunan program/kegiatan dalam rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah semestinya menampung usulan dari para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat, LSM asosiasi-asosiasi dan pihak terkait lainnya, namun untuk Inspektorat Kabupaten Lampung Barat tidak terdapat program/kegiatan yang yang merupakan usulan dari masyarakat.

Peyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini berpedoman kepada Permendagri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat ini masih berdasarkan Permendagri Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rancangan awal rencana kerja untuk tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 mengingat peraturan yang relevan untuk pelaksanaan penyusunan Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 belum terbit. Dalam peraturan tersebut terdapat 6 Fokus dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah RPD).
2. Pemeriksaan dangan tujuan tertentu, yaitu :
    a. Pemeriksaan investigative dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
    b. Penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hokum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatory/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi :
    a. Kinerja Rutin Pengawasan
        1) Reviu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi serta meyakinkan penyusunan RPD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran manjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
3) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran membberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan susuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
5) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan Negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan Negara bukan pajak;
7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) fisik dengan sasaran menyajikan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK fisik telah memenuhi persyaratan dokumentasi;
8) Evaluasi SIstem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah dilingkungan pemerintah daerah.

9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serat tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional
   1) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hokum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   2) Operasional sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan public dimasing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
   3) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
   4) Dana desa, pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5) Bantuan operasional sekolah (BOS), inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telag mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawalan Reformasi Birokrasi
   a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
   b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :
      1) System pengendalian intern pemerintah;
      2) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
      3) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara;
      4) Penilaian internal zona integritas;
      5) Penanganan benturan kepentingan;
      6) Penanganan laporan pengaduan (shistle blower system); dan
      7) Penanganan pengaduan masyarakat.
5. Penegakan Integritas
   a. Dukungan pelaksanaan survey penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
   b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
   a. Penerapan Manajemen Risiko;

b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
c. Audit Kinerja;
d. Audit Investigasi;
e. Pemeriksaan DAK Fisik;
f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
g. Pendidikan Sertifikasi dibidang pengawasan lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang mendatang, yang sejalan dengan visi dan misi organisasi, serta didasarkan pada isu–isu dan analisis strategis. Penetapan tujuan adalah untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi, meletakkan kerangka prioritas untuk memberikan arah bagi program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi.

Berdasarkan pernyataan visi, misi, hasil analisis strategis dan prioritas yang telah ditetapkan, maka dapat dirumuskan tujuan dan indikator tujuan Inspektorat Kabuapten Lampung Barat Tahun 2025 sebelum dilakukan penyelarasan dengan Renstra Inspektorat 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

“Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”

Indikator Tujuan :

“Nilai SAKIP (Predikat) BB di Tahun 2025“

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih pendek dari tujuan (bulan/triwulan/semester/tahun). Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis, yang memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Keberhasilan pencapaian berbagai sasaran sangat penting karena hal ini menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang, meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja organisasi serta sebagai alat pemicu semua bagian dari organisasi. Dengan demikian agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus memiliki aktor spesifik, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil.

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal, maka untuk merealisasikan pernyataan visi, misi Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang telah dijabarkan kedalam tujuan, maka untuk mencapai tujuan tersebut perlu dirumuskan sasaran-sasaran.

Adapun sasaran dan Indikator sasaran jangka menengah sebelum dilakukan penyelarasan dengan Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026 Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Sasaran :

“ Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akuntabel “

Indikator Sasaran

1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal B
2. Level Kapabilitas APIP
3. Maturitas SPIP

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akuntabel	1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal BB	85%	85%	90%	95%	
		2. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
		3. Maturitas SPIP	Level 3 dengan catatan	Level 3	Level 3	Level 3	

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Inspektorat merupakan institusi pengawasan terhadap seluruh kegiatan program pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, serta melakukan pembinaan terhadap seluruh aparatur pemerintah, sehubungan dengan hal tersebut peran Inspektorat sangatlah penting untuk menyukseskan terlaksananya seluruh program pembangunan yang telah direncanakan.

Pada RPD Kabupaten Lampung Barat 2023–2026 terdapat begitu banyak program–program pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, hal ini membuat peran Inspektorat menjadi sangat penting dan menuntut kinerja yang lebih tinggi lagi guna melakukan tugas dan fungsinya sebagai institusi pengawasan.

Inspektorat sebagai salah satu bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berupaya untuk meningkatkan sinergi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah agar dalam pencapaian tujuan dan sasaran lebih efektif, efisien dan akuntabel. Pengawasan tersebut harus dapat bersinergi dengan Inspektorat Provinsi dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya seperti BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung serta lainnya. Bersinergi dalam arti terdapat kesinambungan, baik program, jadual maupun aparat yang melakukan pemeriksaan dengan pola pengaturan yang baik.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan ketentuan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program : Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Kerjasama Pengawasan Internal

7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan :

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah.
2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan :

1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
3. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja tahunan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat pada untuk tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah direncanakan akan melaksanakan 3 Program, 10 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan
Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program : Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Kerja Sama Pengawasan Internal
7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan :

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah.
2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan :

1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
3. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis.

Dana indikatif yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.682.579.100,- (*Delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah*).

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi juga dimaksudkan sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sehingga dapat diharapkan adanya umpan balik guna perbaikkan kinerja di masa mendatang.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas maka Rencana Kerja (Renja) berfungsi sebagai pertanggung jawaban meningkatkan kualitas kinerja yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

Harapan kami, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 menjadi pedoman

dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Gevernance)* maupun pemerintahan yang bersih *(Clean Gevernment)* di Kabupaten Lampung Barat sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan kepada seluruh *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan Inspektorat Kabupaten lampung Barat dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 5 Desember 2024

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

MAT SUKRI, S.Sos., MP
NIP. 19670518 199211 1 001

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						**12.626.108.850,00**							**12.435.502.750,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**12.626.108.850,00**							**12.435.502.750,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**12.626.108.850,00**							**12.435.502.750,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Inspektorat Daerah*** ***Nilai SAKIP Inspektorat Daerah***	**83,50 %**			**83 %** **83 %**	**8.814.299.250,00**						**83,50 %**	**8.560.798.750,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokuem koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD* *Jumlah dokuem koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD* *Jumlah dokuem koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD* *Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan lap.capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 7 Dokumen 6 Dokumen 2 Laporan	76.559.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	72.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen Dokumen	45.737.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.060.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.687.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.150.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.052.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3.516.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	12.507.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		13.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 80 orang	7.260.278.750,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	7.260.498.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	7.249.698.750,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.249.698.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.430.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	2.900.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	3.250.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			2 Dokumen 20 orang	512.880.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	513.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	27.024.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				63 Orang	485.856.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		485.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	-			6 Dokumen 12 laporan 12 laporan 14 paket 10 Paket	439.831.800,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	40.450.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.456.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	22.015.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		22.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.960.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.427.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	403.973.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	170.129.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	21.400.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	148.729.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		175.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	106.650.300,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	94.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	44.785.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	60.065.300,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		47.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	247.970.400,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	329.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	42.190.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		43.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	30.280.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		31.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	175.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		255.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditidaklanjuti***	**85 %**			**85 %**	**3.014.134.800,00**						**85 %**	**3.050.704.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pengawasan internal yang terbentuk Jumlah Laporan hasil pengawasan desa Jumlah Laporan Hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*	-			4 laporan 1 kesepakatan 86 laporan 134 laporan 4 laporan 12 laporan 5 laporan	2.574.619.300,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	2.611.154.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	130.815.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		135.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				27 Laporan	979.077.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		990.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				15 Laporan	254.987.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		255.989.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				12 Laporan	245.556.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		255.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				66 Laporan	300.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		310.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	414.660.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		414.665.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				7 Dokumen	249.523.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu* *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang tertanganiJumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang tertangani*	-			30 laporan 4 laporan	439.515.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	439.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	81.895.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		81.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				30 Laporan	357.620.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		357.650.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan***	**96,55 %**			**96,55 %**	**797.674.800,00**						**96,55 %**	**824.000.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* *Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* *Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah*	-			5 kegiatan 39 perangkat daerah 39 perangkat daerah	797.674.800,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	824.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				5 perangkat daerah	349.959.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		375.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				6 Kegiatan	363.164.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		364.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				39 perangkat daerah	84.551.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		85.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H							**12.626.108.850,00**							**12.435.502.750,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS KETAHANAN PANGAN

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2025

LIWA, 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat 2023-2026, disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 untuk memberikan arahan yang memudahkan pencapaian target sasaran secara terukur.

Renja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diberi amanat untuk menyusun Rencana Kinerja yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja SKPD ini menggambarkan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan telah diselaraskan dengan program Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta memperhatikan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan Bidang Ketahanan Pangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencan Kerja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diperlukan masukan dan saran yang bersifat membangun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya. Atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak diucapkan terimakasih.

Liwa, 16 Februari 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

DINAS
KETAHANAN PANGAN

MAIDAR, SH. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690417 199803 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR ---------- ii
DAFTAR ISI ---------- iii

BAB I PENDAHULUAN ----------
1.1 Latar Belakang ---------- 1
1.2 Landasan Hukum---------- 3
1.3 Maksud dan tujuan ---------- 4
1.4 Sitematika Penulisan---------- 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat DaerahTahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah -------- 6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah-------- 7
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ---------- 16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ---------- 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN --
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ---------- 38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ---------- 39
3.3 Program dan kegiatan ---------- 39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ---------- 44

BAB V PENUTUP ---------- 51

LAMPIRAN

Lampiran I Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024
Lampiran II Rancangan Awal RKPD 2025

BAB.I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 salah satunya memprioritaskan peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah yakni dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat ketahaan pangan tersebut, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat beranekaragam. Potensi sumberdaya alam tersebut sangat menunjang pembangunan ekonomi, termasuk sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan di Lampung Barat yang merupakan faktor utama penggerak ekonomi masyarakat terutama dalam rangka mencukupi kebutuhan termasuk pangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat diptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, dimana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan

kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan berperan secara aktif untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Renstra tahun 2023 - 2026, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan yang tercermin dari tertanganinya desa rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan serta kebutuhan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen dan pihak-pihak yang harus berperan dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan penjabaran yang lebih merinci pengaturan baik aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan sesuai amanat UU No.18/2012. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/HK.140/ 4/2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan

10. Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka menyusun rencana teknis kegiatan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergi yang akan dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.
2. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) inii adalah:
   a. Menetapkan program dan kegiatan sebagai Rencana Aksi (*Action Plan*) dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra);
   b. Mengakomodir masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan

Kabupaten Lampung Barat yang perlu diselesaiakan, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kinerja pada aspek ketersediaan,distribusi, sereta konsumsi dan kemanana pangan;

c. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Untuk memberikan pedoman bagi aparatur dan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan PanganKabupaten Lampung Baratdalam melaksanaan pelayanan administrasi sebagai fungsi utamanya, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Mastyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

BAB.II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 Bab III mengenai pengukuran kinerja di dalam pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam penetapan kinerja, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Tahun 2023	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya penanganan daeerah rawan pangan	Jumlah desa yang bebas dari status rawan pangan	2	2	- 100 % - Didasarkan hasil dari analisa Peta rawan pangan kabupaten Turunnya pekon pancur mas menjadi prioritas 2 dari prioritas 1, dan Pekon atar bawang dari prioritas 2 menjadi prioritas 3.

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Penanganan daerah rawan pangan dengan indikator penurunan daerah rawan pangan, untuk tahun 2023 dengan target 2 pekon tercapai sesuai target dengan turunnya pekon pancur mas menjadi prioritas 2 dari prioritas 1, dan Pekon atar bawang dari prioritas 2 menjadi prioritas 3.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program 4 program 12 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan Alokasi dana Tahun 2022 Untuk Belanja Langsung sebesar Rp. **3.035.545.309,00** (Belanja Pegawai Rp. 2.078.184.609,00, Belanja Barang dan Jasa Rp. 957.360.700,00. Terealisasi sebesar Rp. 2.931.587.688,00 (Belanja Pegawai Rp. 2,004,872,645.00 , Belanja Barang dan Jasa Rp. 926,715,023,00)

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara Umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan, demikian juga sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan hasil cukup baik, capaian kinerja yang relatif tinggi menunjukkan telah terlaksananya kegiatan dengan baik dan sesuaidengan yang direncanakan/ ditargetkan. Tetapi penetapan target capaian kinerja untuk tahun mendatang masih perlu adanya peningkatan.

Aspek Ketersediaan Pangan

Pada aspek ini menggambarkan tingkat kesetabilan akan ketersedian pangan ditingkat masyarakat dan penduduk lampung barat dari segi ketersedian energy dan ketersedian protein , jika ketersedian pangan setabil maka kemudahan akan akses dan pemanfaatan pangan ditingkat masyarakat tentunya juga akan stabil, berdasarkan hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Lampung Barat.

Grafik 1 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (Ketersedian).

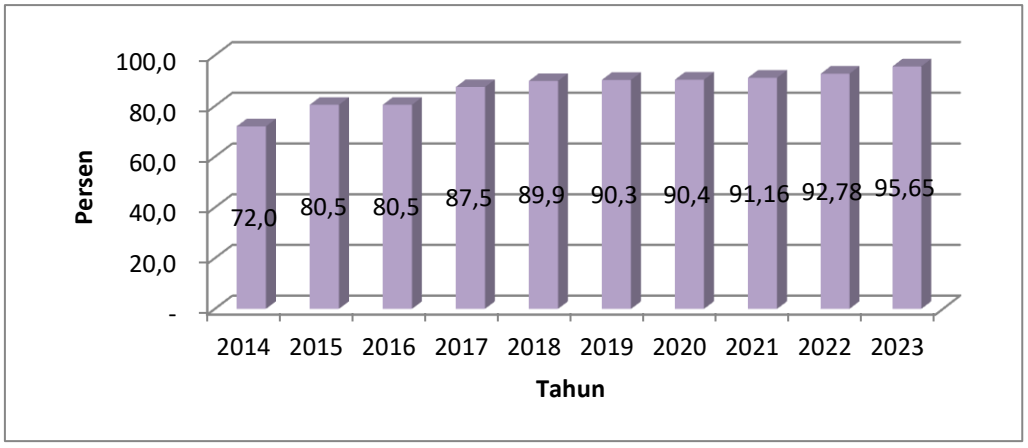

Bila dilihat dari persentase AKE dapat diketahui bahwa ketersediaan pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 memiliki ketersediaan energi sebesar 3.184 kalori/kapita/hari dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.400 kalori/kapita/hari dengan skor PPH Ketersediaan 95,65 yang menyatakan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Lampung Barat belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100. belum ideal Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Beberapa komposisi skor PPH Ketersediaan untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut belum mencapai skor maksimal. Hal ini berakibat tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan.
2. Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang. Faktor penyebab utama lebih didominasi dari ketersediaan/produksi lokal padi-padian (beras), umbi-umbian, minyak dan lemak, gula (gula pasir), sayuran dan buah.
3. Penyebab belum idealnya kualitas ketersediaan pangan ini juga disebabkan pada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimal. Kondisi ini dikarenakan produksi untuk masing-masing kelompok pangan tersebut relaif masih rendah.

Trend perkembangan ktersediaan energi, protein Ketersediaan dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 2 Perkembangan Ketersediaan Energi dan protein Penduduk Lampung Barat Tahun 2014-2022 (Kkal/kapita/hari).

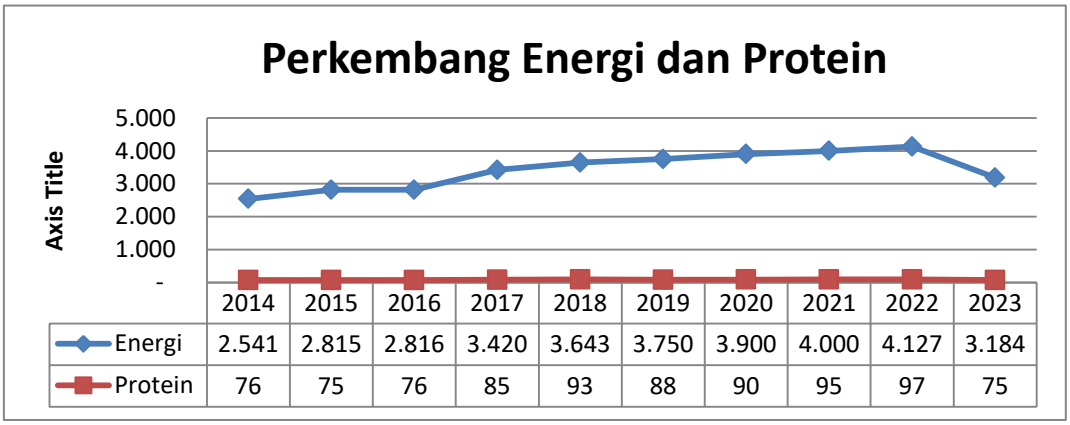

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Energi	2.541	2.815	2.816	3.420	3.643	3.750	3.900	4.000	4.127	3.184
Protein	76	75	76	85	93	88	90	95	97	75

Aspek Distribusi dan Akses Pangan

Pada aspek ini memberikan gambaran tetang kemudahan akses pangan bagi masyarakat, hal tersbut tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli masyarakat akan komoditi pangan Kesetabilan harga pada tingkat konsumen tidak terlepas dari kestabilan pasokan pangan baik yang bersumber dari produksi dalam daerah dan yang berasal dari luar daerah. Jika dilihat dari tingkat produsi beras lampung barat selama tahun 2023 yang mencapai 92.042 Ton, dengan jumlah beras yang masuk ke lampung barat sebesar 11.930 Ton maka tingkat pasokan pangan pokok (beras) sebesar 103,972 Ton. Pada tahun 2023 dilampung barat harga rata – rata beras medium ditingkat konsumen sebesar Rp.11.693/kg, dengan tingkat koevisien variasi (CV) di 1,36 %, Tingkat kesetabilan harga gabah ditingkat petani merupakan vaktor penentu dari tingkat kesetabilan harga dan daya beli masyarakat, dikarnakan mayoritas penduduk lampung barat berprofesi sebagai petani (baik petani Sawah maupun perkebunan) pada tahun 2023 harga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani yang ditargetkan Rp.5.000/kg (sesuai dengan HPP Pemerintah) mencapai Rp. 6.461/kg . hal tersebut dapat terlihat dari perkembanhan harga pangan pokok (beras) dan gabah pada table berikut :

Grafik 3. Perkembangan harga gabah dan beras di tingkat petani

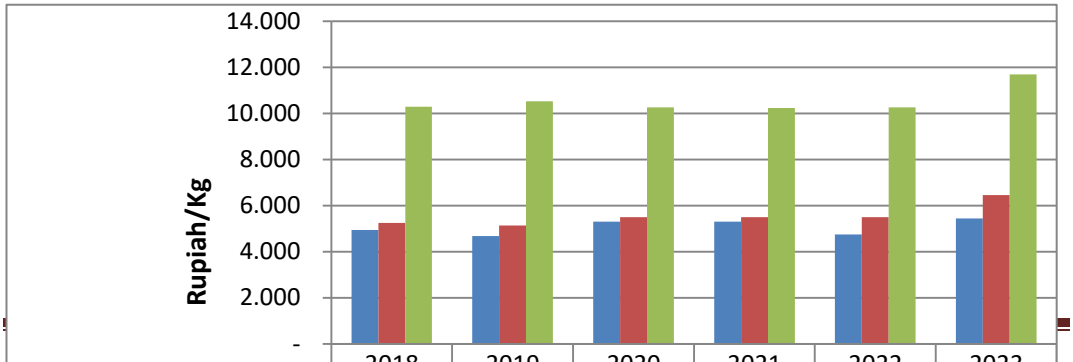

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GKP TK PETANI	4.950	4.685	5.300	5.300	4.750	5.450
GKG TK PENGGILINGAN	5.250	5.137	5.500	5.500	5.500	6.461
BERAS UMUM TK KONSUMEN	10.293	10.521	10.256	10.233	10.264	11.693

Pada tahun 2022 harga beras kualitas medium rata-rata sebesar Rp.10.264/Kg, harga tertinggi Rp.10.687/Kg dan terendah Rp.10.083/Kg. Secara umum koefisien vaiasi (CV) harga beras antar waktu cukup stabil, ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan stabilisasi harga pangan pokok cukup berhasil dengan CV = 1.36%. Perkembangan harga beras periode Januari - Desember 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Perkembangan harga pangan strategis tahun 2023

NO	Bulan	Harga pokok strategis di kecamatan														
		Beras			Jagung		Ubi kayu	Ubi jalar	Cabe		Daging		Gula	Telor	Bawang	Minyak
		Super	Medium	Asalan	Mutu	Asalan			Keriting	Rawit	Ayam	Sapi			Merah	Goreng
1	Januari	12,036	10,750	10,111	7,423	6,239	3,300	4,267	43,750	46,150	38,982	138,750	14,267	28,867	38,733	17,050
2	Februari	12,325	11,145	10,488	7,300	6,594	3,357	4,567	41,183	42,417	38,286	137,708	14,267	28,533	35,973	16,583
3	Maret	12,348	11,235	10,338	7,500	6,510	3,462	4,667	35,683	30,583	39,482	139,886	14,283	29,317	32,980	16,700
4	April	12,225	11,122	10,319	7,444	6,727	3,179	4,333	30,783	23,683	40,018	140,341	14,417	29,783	33,683	17,233
5	Mei	12,402	11,255	10,672	7,643	6,333	3,286	4,667	26,000	21,000	40,000	140,568	14,333	30,150	37,467	16,150
6	Juni	12,279	11,242	10,672	9,727	6,333	3,286	4,600	32,400	28,983	40,367	142,386	14,467	31,467	36,950	16,150
7	Juli	12,427	11,275	10,975	14,273	6,688	3,111	4,722	33,233	32,533	40,029	139,886	14,660	31,463	34,027	17,267
8	Agustus	12,580	11,508	11,146	14,341	6,600	3,111	4,900	37,964	31,150	41,050	139,318	14,667	31,153	31,693	15,783
9	September	13,491	12,453	11,792	7,800	6,400	3,111	4,900	47,705	28,650	40,500	139,318	14,817	29,383	31,693	15,800
10	Oktober	13,793	12,658	11,975	7,900	6,200	3,111	4,900	41,661	41,367	40,450	139,318	15,000	27,500	19,807	15,900
11	November	13,958	12,748	12,275	7,900	6,200	3,111	4,900	83,429	73,850	42,083	139,318	15,300	28,283	19,807	16,367
12	Desember	14,008	12,848	12,275	7,900	6,200	3,111	4,900	87,625	53,000	40,450	139,318	15,300	28,283	29,043	16,367

Perkembangan harga gabah ditingkat petani perlu dimonitor setiap saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Barat karena merupakan komoditas utama sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Lampung Barat. Selain itu, gabah merupakan komoditas pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh mayoritas petani. Terganggunya kondisi ketersediaan, pasokan dan harga gabah dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap komoditas gabah, antara lain melalui penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ditingkat petani. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan. Kebijakan perberasan sangat efektif dalam mengendalikan stabilitas harga di tingkat petani, baik gabah ataupun beras.

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani pada tahun 2023 berkisar antara Rp.5.450kg s.d Rp.6.461/kg dengan harga rata-rata sebesar Rp.5.955/kg. Perubahan harga GKP di tingkat petani relatif kecil, dan cenderung stabil.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) tahun 2032 telah ditetetapkan sebesar Rp.5.000. Jika dibandingkan dengan ketetapan HPP tersebut maka harga aktual di Lampung Barat telah berada di atas HPP. Tingkat kesatabilan harga pangan pokok di tingkat konsumen dapat dilihat dari table berikut

Grafik 4 : Perkembangan Timgkat Kestabilan Harga Pangan Pokok

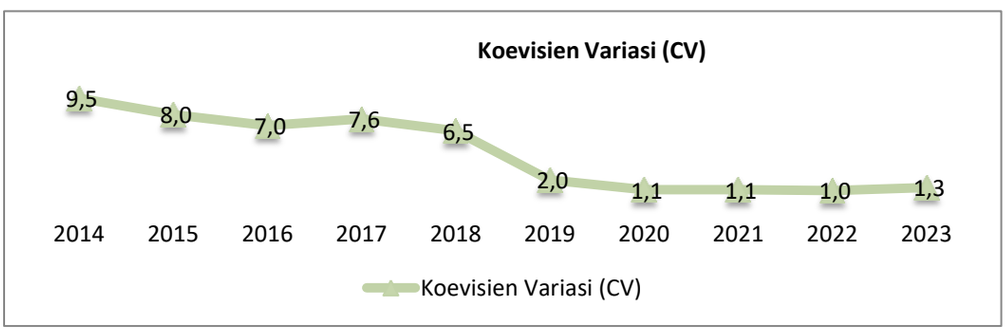

Aspek Konsumsi Pangan

Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat meliputi kuantitas dan kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi berimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas atau keragaman dan keseimbangan gizi, yang ditunjukkan dengan skor pola pangan harapan (PPH).

Konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Perkembangan pencapaian skor PPH konsumsi disajikan pada table berikut :

Berdasarkan tabel, kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH, tahun 2017 - 2023 terjadi kenaikan skor PPH konsumsi dari 85,9 menjadi 89.3. Perkembangan pencapaian skor PPH Konsumsi digambarkan dalam grafik berikut :

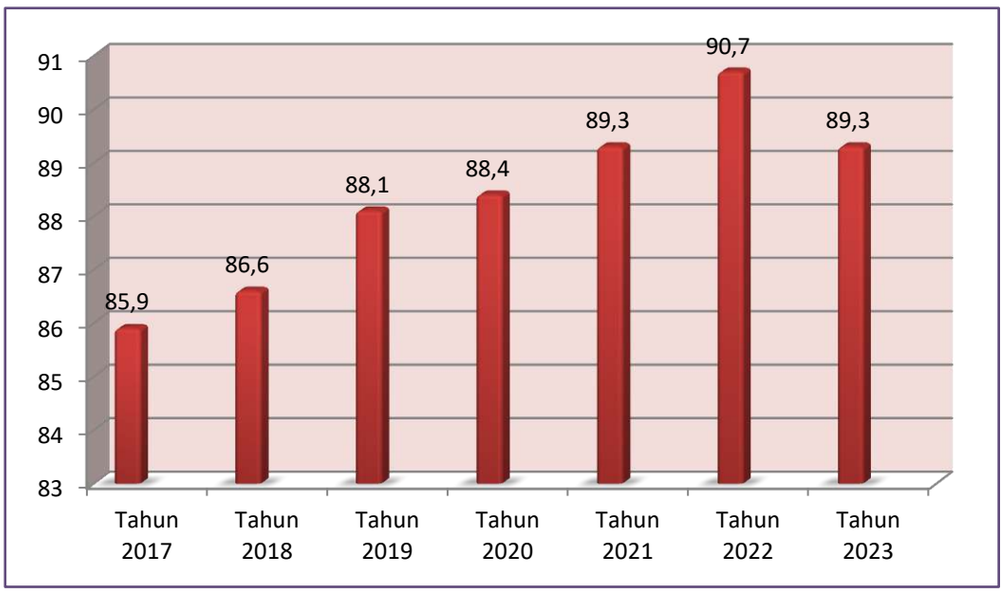

Grafik 5. Grafik perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2023

Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target capaian tahun 2025.

Gambaran pemenuhan kuantitas konsumsi pangan diketahui dari tingkat konsumsi energi dan protein, yaitu proporsi konsumsi energi atau protein aktual terhadap Angka Kecukupan Gizi/AKG (rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG XI Tahun 2018, yaitu Angka Kecukupan Energi/AKE 2.100 kkal/kapita/hari, dan Angka Kecukupan Protein/AKP sebesar 57 gram/kapita/hari).

Dari hasil analisa pola konsumsi pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk per kapita per hari di tingkat rumah tangga dilihat dari masing-masing kelompok pangan masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian dalam pemenuhan kebutuhan energi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Konsumsi Energi Setiap Kelompok Pangan Tahun 2023

Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (kkal/kapita/ hari) aktual tahun 2023	Konsumsi Energi (kkal/kapita/ hari) Ideal	Tingkat Kecukupan Energi (%)
Padi- padian	1.322	1.050	63
Umbi-umbian	73	126	3.5
Pangan Hewani	174	252	8.3
Minyak dan Lemak	289	210	13.7
Buah Biji Berminyak	24	63	1.1
Kacang-kacangan	91	105	4.3
Gula	76	105	3.6
Sayur dan buah	145	126	6.9
Lain-lain	65	63	3.1
Jumlah	**2.259**	2.100	107.6

Untuk mencapai konsumsi energi yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah biji berminyak, kacang-kacangan,gula, sayur, buah dan lain-lain. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan.

Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Upaya pemerintah dalam rangka penurunan konsumsi beras melalui peningkatan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian masih mengalami hambatan, antara lain:

(a) Produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian yan cukup mahal;

(b) Teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran dan lain-lain) belum memasuki tahap industrialisasi masyarakat belum mampu mengaksesnya;

(c) Berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior.

Grafik 6 : Perkembangan konsumsi energi masyarakat Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2023

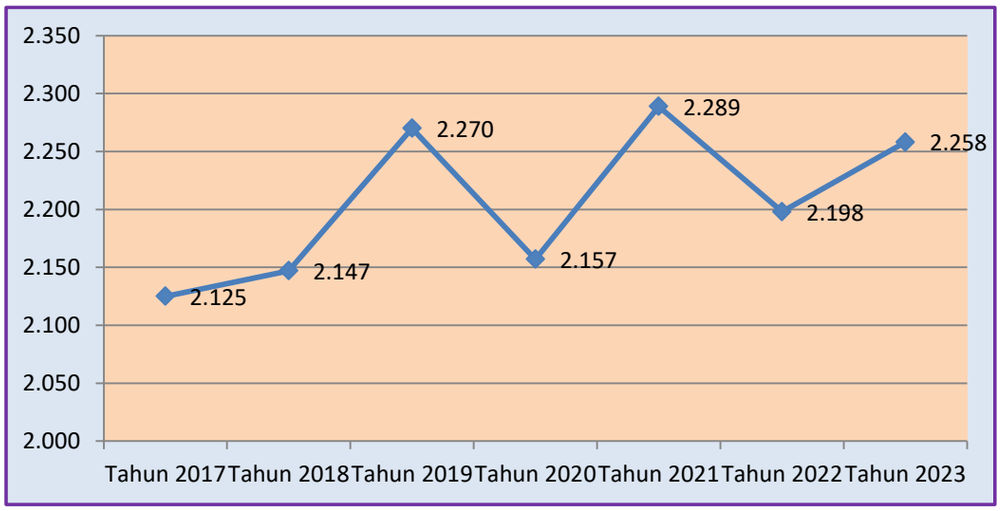

Konsumsi energi pada tahun 2023 mengalami Kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017. Sama halnya dengan penurunan skor PPH, kemungkinan faktor penyebabnya adalah penurunan daya beli masyarakat. Konsumsi protein sebagian besar masih belum beragam sesuai dengan Pola Pangan Harapan, dan masih di dominansi oleh pangan hewani. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian konsumsi pangan hewani, antara lain: pengaruh kondisi sosial-budaya, ekonomi dan ketersediaan pangan hewani. Keanekaragaman sosial ekonomi masyarakat menjadi peluang dan potensi untuk mengembangkan pangan yang beragam, dan keanekaragaman pola makan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan.

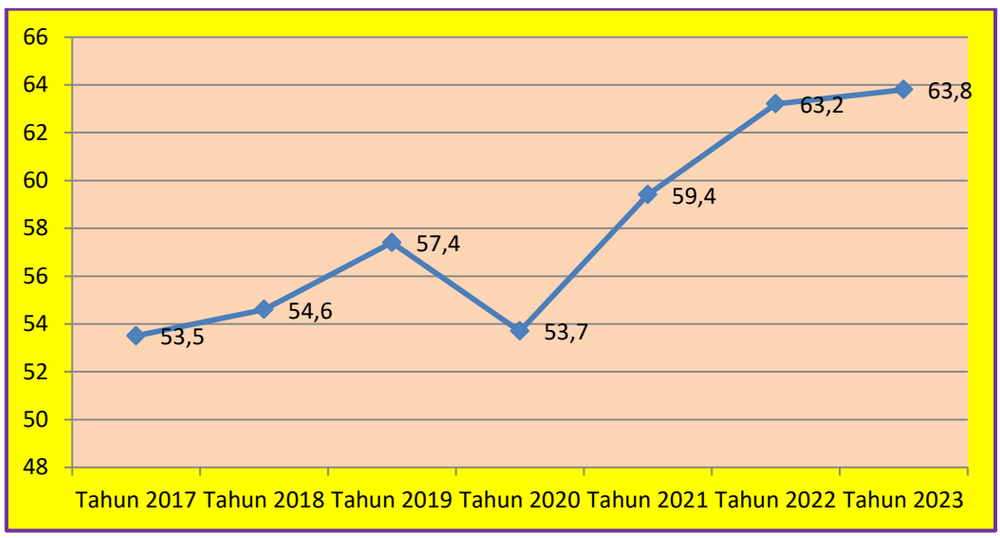

Garfik 7 : Perkembangan rata-rata konsumsi protein (gram/kap/hr) Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 – 2023

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan.Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat serta kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kerawanan pangan

   Potensi kerawanan pangan di Lampung Barat masih cukup tinggi baik kerawanan kronik maupun transien yang diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah daearah. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

2. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

   Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, kondisi geografis yang berbukit-bukit, letak administrasi penduduk yang berada di daearah yang sulit dijangkau, dan iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada

saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

   Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaan konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai kondisi wilayahnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut :

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat
Dinas Ketahanan Pangan

REVIU AWAL RKPD						Tujuan / Sasaran / Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/sasaran Program/Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif
Kode	Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ sasaran Program/ Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif					
02..	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Index Ketahanan Pangan	Lampung barat	72,9 %	6.470.198.200	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Index Ketahanan Pangan	Lampung barat	72,9 %	6.470.198.200
02..09	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	% Daerah Rawan Pangan	Lampung Barat	11,02 %	6.470.198.200	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	% Daerah Rawan Pangan	Lampung Barat	11,02 %	6.470.198.200
02.09.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	Lampung Barat	80 %	3.596.000.648	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	Lampung Barat	80 %	3.596.000.648

02.09.01. 2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Lampung Barat	40	Dokumen	138,999,600	Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Lampung Barat	40	Dokumen	138,999,600
02.09.01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Barat	11	Dokumen	60,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Barat	11	Dokumen	60,000,000
02.09.01. 2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lampung Barat	1	Dokumen	9.999.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lampung Barat	1	Dokumen	9.999.800
02.09.01. 2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lampung Barat	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lampung Barat	1	Dokumen	5,000,000

02.09.01. 2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Lampung Barat	1	Dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Lampung Barat	1	Dokumen	2,000,000
02.09.01. 2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Lampung Barat	1	Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Lampung Barat	1	Dokumen	1,000,000
02.09.01. 2.01. 06	Koordinasi Penyususnan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Barat	12	laporan	1,000,000	Koordinasi Penyususnan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lampung Barat	12	laporan	1,000,000

02.09.01. 2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Barat	12	laporan	59.999.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Barat	12	laporan	59.999.800
02.09.01. 2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Lampung Barat	43	Dokumen	2.655.679.968	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Lampung Barat	43	Dokumen	2.655.679.968
02.09.01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Barat	12	Orang Bulan	2.615.339.968	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Barat	12	Orang Bulan	2.615.339.968
02.09.01. 2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Barat	12	Dokumen	9.999.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Barat	12	Dokumen	9.999.000
02.09.01. 2.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Lampung Barat	12	Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Lampung Barat	12	Dokumen	10,000,000
02.09.01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Barat	1	Dokumen	3.414.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Barat	1	Dokumen	3.414.000

02.09.01. 2.02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Lampung Barat	3	Dokumen	12.625.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Lampung Barat	3	Dokumen	12.625.000
02.09.01. 2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lampung Barat	2	laporan	1.960.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lampung Barat	2	laporan	1.960.000
02.09.01. 2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lampung Barat	1	Dokumen	2.342.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lampung Barat	1	Dokumen	2.342.000
02.09.01. 2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lampung Barat	2	Dokumen	2.263.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Lampung Barat	2	Dokumen	2.263.000

02.09.01. 2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Lampung Barat	1	Dokumen	1,030,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Lampung Barat	1	Dokumen	1,030,000
02.09.01. 2.03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung Barat	1	Laporan	1,233,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lampung Barat	1	Laporan	1,233,000
02.09.01. 2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung Barat	37	Dokumen	81.047.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lampung Barat	37	Dokumen	81.047.000
02.09.01. 2.05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lampung Barat	25	Dokumen	51.047.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lampung Barat	25	Dokumen	51.047.000
02.09.01. 2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lampung Barat	3	Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Lampung Barat	3	Orang	30.000.000
02.09.01. 2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	Lampung Barat	32	Paket	400.604.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	Lampung Barat	32	Paket	400.604.200

02.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lampung Barat	1	Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lampung Barat	1	Paket	10,000,000
02.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	Lampung Barat	1	Paket	83.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	Lampung Barat	1	Paket	83.500.000
02.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Lampung Barat	1	Paket	12.400.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Lampung Barat	1	Paket	12.400.000
02.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lampung Barat	1	Paket	62.762.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lampung Barat	1	Paket	62.762.000
02.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lampung Barat	2	Paket	50,029,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Lampung Barat	2	Paket	50,029,000
02.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Lampung Barat	1	Dokumen	10.080.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Lampung Barat	1	Dokumen	10.080.000

02.09.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lampung Barat	12	Laporan	9.999.800	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lampung Barat	12	Laporan	9.999.800
02.09.01.2.06.09	Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Barat	12	Laporan	161.834.000	Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lampung Barat	12	Laporan	161.834.000
02.09.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Lampung Barat	16	unit	54.700.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Lampung Barat	16	unit	54.700.000
02.09.01.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Lampung Barat	16	unit	54.700.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Lampung Barat	16	unit	54.700.000
02.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedian jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Barat	29	Laporan	73.548.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedian jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Barat	29	Laporan	73.548.400
02.09.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lampung Barat	12	Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lampung Barat	12	Laporan	5,000,000

02.09.01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lampung Barat	12	Laporan	20,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lampung Barat	12	Laporan	20,400,000
02.09.01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lampung Barat	12	Laporan	48.148.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lampung Barat	12	Laporan	48.148.400
02.09.01. 2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Lampung Barat	35	Unit	189.158.480	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Lampung Barat	35	Unit	189.158.480
02.09.01. 2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lampung Barat	19	Unit	115.965.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lampung Barat	19	Unit	115.965.400
02.09.01. 2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lampung Barat	11	Unit	9.980.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lampung Barat	11	Unit	9.980.000

02.09.01.2.09. 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lampung Barat	5	unit	63.213.080	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lampung Barat	5	unit	63.213.080
02.09.02.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersedian Energi dan Angka Ketersedian Protein	Lampung Barat	2400 dan 69	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	209.999.700	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersedian Energi dan Angka Ketersedian Protein	Lampung Barat	2400 dan 69	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	209.999.700
02.09.02.2.01	KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Infrastruktur Kemendirian pangan yang tersedia	Lampung Barat	6	Unit	209.999.700	KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Infrastruktur Kemendirian pangan yang tersedia	Lampung Barat	6	Unit	209.999.700
02.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Lampung Barat	5	Unit	150,000,000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Lampung Barat	5	Unit	150,000,000

02.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur Logistik	Lampung Barat	2	Laporan	59.999.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur Logistik	Lampung Barat	2	Laporan	59.999.700
02..09.03	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	Lampung Barat	84.6	Point	1.998.197.852	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	Lampung Barat	84.6	Point	1.998.197.852
02..09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Koefisien variasi Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumsn dan perbandingan harga gabah di tingkat petani	Lampung Barat	CV < 10	%	590.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Koefisien variasi Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumsn dan perbandingan harga gabah di tingkat petani	Lampung Barat	CV < 10	%	590.000.000
02..09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan singkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Lampung Barat	4	Laporan	90,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan singkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Lampung Barat	4	Laporan	90,000,000

02..09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di kabupaten/kota	Lampung Barat	4	Laporan	150,000,000	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di kabupaten/kota	Lampung Barat	4	Laporan	150,000,000
02..09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Lampung Barat	1	Unit	100,000,000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Lampung Barat	1	Unit	100,000,000
02..09.03.2.01.13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	12	Dokumen	70,000,000	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	12	Dokumen	70,000,000
02..09.03.2.01.15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Infromasi Harga dan Pasokan Pangan	Lampung Barat	12	Dokumen	100,000,000	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Infromasi Harga dan Pasokan Pangan	Lampung Barat	12	Dokumen	100,000,000
02..09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	Lampung Barat	75	Ton	504.196.000	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	Lampung Barat	75	Ton	504.196.000
02..09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlkah cadangan pangan pemerintah kabupaten	Lampung Barat	75	Ton	322.549.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlkah cadangan pangan pemerintah kabupaten	Lampung Barat	75	Ton	322.549.000

02..09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota yang terpelihara	Lampung Barat	75	Ton	151.648.000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota yang terpelihara	Lampung Barat	75	Ton	151.648.000
02..09.03.2.02.05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota yang terpelihara	Lampung Barat	25	Ton	29.999.000	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota yang terpelihara	Lampung Barat	25	Ton	29.999.000
02..09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapain Target Konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka Kecukupan gizi	1. Skor Angka Kecukupan Konsumsi Energi 2. Skor Angka Kecukupan Konsumsi Protein	Lampung Barat	2150 dan 57	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	905.001.852	Kegiatan Pelaksanaan Pencapain Target Konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka Kecukupan gizi	1. Skor Angka Kecukupan Konsumsi Energi 2. Skor Angka Kecukupan Konsumsi Protein	Lampung Barat	2150 dan 57	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	905.001.852
02..09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi Pangan Perkapita pertahun	Lampung Barat	1	Dokumen	100.001.740	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi Pangan Perkapita pertahun	Lampung Barat	1	Dokumen	100.001.740
02..09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasisi sumberdaya lokal	Lampung Barat	4	Laporan	705.000.212	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasisi sumberdaya lokal	Lampung Barat	4	Laporan	705.000.212

02..09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Lampung Barat	2	Laporan	99.999.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Lampung Barat	2	Laporan	99.999.000
02..09.03.3.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten	Lampung Barat	-	Dokumen	0	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten	Lampung Barat	-	Dokumen	0
02..09.03.3.02.05	Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/kota melalui peraturan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/kota melalui peraturan kabupaten/kota	Lampung Barat	0	Dokumen	0	Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/kota melalui peraturan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/kota melalui peraturan kabupaten/kota	Lampung Barat	0	Dokumen	0
02.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	Lampung Barat	4	Pekon	900,000,000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	Lampung Barat	4	Pekon	900,000,000

02.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun	Lampung Barat	1	Peta	75,000,000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun	Lampung Barat	1	Peta	75,000,000
02.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta dan analisa ketahanan Pangan dan Kerentanan pangan yang dimutakhirkan	Lampung Barat	1	Dokumen	75,000,000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta dan analisa ketahanan Pangan dan Kerentanan pangan yang dimutakhirkan	Lampung Barat	1	Dokumen	75,000,000
02.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	Lampung Barat	3	Pekon	250,000,000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	Lampung Barat	3	Pekon	250,000,000
02.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Lampung Barat	4	Laporan	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Lampung Barat	4	Laporan	75,000,000
02.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervesi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Lampung Barat	2	Dokumen	125,000,000	Pelaksanaan Intervesi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Lampung Barat	2	Dokumen	125,000,000
02.09.04.2.02.05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Lampung Barat	1	Dokumen	50,000,000	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Lampung Barat	1	Dokumen	50,000,000

02..09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Lampung Barat	> 80	%	340,000,000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Lampung Barat	> 80	%	340,000,000
02..09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	Lampung Barat	2	Jenis	340,000,000	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	Lampung Barat	2	Jenis	340,000,000
02..09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi kemamanan pangan segar asala tumbuhan daerah	Lampung Barat	1	Dokumen	85,000,000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi kemamanan pangan segar asala tumbuhan daerah	Lampung Barat	1	Dokumen	85,000,000
02..09.05.2.01.06	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan Pangan Segar asal tumbuhan	Lampung Barat	1	Dokumen	75,000,000	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan Pangan Segar asal tumbuhan	Lampung Barat	1	Dokumen	75,000,000
02..09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Lampung Barat	1	Dokumen	84,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Lampung Barat	1	Dokumen	84,000,000

02..09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Lampung Barat	1	Laporan	46,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Lampung Barat	1	Laporan	46,000,000
02..09.05.2.01.09	Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Lampung Barat	1	Dokumen	50,000,000	Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Lampung Barat	1	Dokumen	50,000,000
02..09.05.3.02	Kegiatan Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Lampung Barat	0	Laporan	0	Kegiatan Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Lampung Barat	0	Laporan	0
02..09.05.3.02.01	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah dokumen hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan	Lampung Barat	0	Dokumen	0	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah dokumen hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan	Lampung Barat	0	Dokumen	0

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Mastyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, LSM, KTNA, PKK, Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang pekon, kecamatan dan kabupaten/kota.

BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mempunyai visi pembangunan tahun 2020-2024, yaitu:

"Terwujudnya ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan"

Badan Ketahanan Pangan berperan sebagai "*lead institution*" dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;
3. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan KetahananPangan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;

2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

A. TUJUAN

Mengacu kepada sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan untuk mencapainya maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah :

"Meningkatnya Ketahanan Pangan"

B. SASARAN

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut : "Menurunnya Tingkat Kerawan Pangan"

C. INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran selama 4 tahun maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator kinerja tujuan : Index ketahanan Pangan

Indikator kinerja sasaran : % Daerah Rawan Pangan

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran disajikan pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS	TARGET (%)			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	% Daerah Rawan Pangan	$\frac{\text{Jumlah Desa Rawan Pangan Prioritas 1, 2, 3}}{\text{Jumlah Total Desa}} \times 100$	14,70	12,50	11,02	9,55

Untuk mencapai target sasaran tersebut di atas diperlukan dukungan kebijakan antara lain

a) Peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan
b) Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan
c) Peningkatan kerjasama lintas wilayah/kabupaten
d) Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat
e) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan
f) Dorongan terciptanya kebijakan ekonomi daerah dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

3.3 Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada urusan pemerintah bidang ketahanan pangan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirin Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
02.09.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
02.09.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
02.09.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02.09.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
02.09.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
02.09.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
02.09.01.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
02.09.01.2.01. 06	Koordinasi Penyususnan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD
02.09.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
02.09.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan
02.09.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
02.09.01.2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
02.09.01.2.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
02.09.01.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
02.09.01.2.02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
02.09.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD
02.09.01.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran
02.09.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
02.09.01.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
02.09.01.2.03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
02.09.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
02.09.01.2.05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
02.09.01.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
02.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah

02.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
02.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
02.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
02.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
02.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
02.09.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu
02.09.01.2.06.09	Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
02.09.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
02.09.01.2.07. 05	Pengadaan Mebel
02.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02.09.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02.09.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
02.09.01.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
02.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02.09.01.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
02.09.01.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
02.09.01.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
02.09.02.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
02.09.02.2.01	KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
02.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
02.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Pangan Lainnya
02..09.03	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
02..09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
02..09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
02..09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota

02..09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
02..09.03.2.01.13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/kota
02..09.03.2.01.15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
02..09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
02..09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
02..09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
02..09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
02..09.03.2.02.05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
02..09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapain Target Konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka Kecukupan gizi
02..09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
02..09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
02..09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
02..09.03.3.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
02..09.03.3.02.05	Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/kota melalui peraturan Kabupaten/kota
02.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
02.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
02.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
02.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
02.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
02.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervesi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
02.09.04.2.02.05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
02..09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
02..09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab
02..09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota
02..09.05.2.01.06	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
02..09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota
02..09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan

	segar asal tumbuhan
02..09.05.2.01.09	Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
02..09.05.3.02	Kegiatan Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro
02..09.05.3.02.01	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Lampung Barat disusun berdasarkan RPJMD 2023-2026 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026. Untuk mencapai target tujuan dan sasaran terebut maka didukung oleh Program dan kegiatan, berikut target kinerja dan anggaran.

Tabel IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /sub kegiatan	Target Kinerja		Anggaran
02.09.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	72,9	%	6.470.198.200
02.09.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11,02	%	6.470.198.200
02.09.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80	%	3.596.000.648
02.09.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40	Dokumen	138,999,600
02.09.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11	Dokumen	60,000,000
02.09.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	9.999.800
02.09.01.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000

02.09.01.2.01. 06	Koordinasi Penyususnan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	2,000,000
02.09.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	1,000,000
02.09.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	12	laporan	1,000,000
02.09.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	laporan	59.999.800
02.09.01.2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	43	Dokumen	2.655.679.968
02.09.01.2.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Orang Bulan	2.615.339.968
02.09.01.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Dokumen	9.999.000
02.09.01.2.02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12	Dokumen	10,000,000
02.09.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Dokumen	3.414.000
02.09.01.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	Dokumen	12.625.000
02.09.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	laporan	1.960.000
02.09.01.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	2.342.000
02.09.01.2.03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Dokumen	2.263.000
02.09.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Dokumen	1,030,000
02.09.01.2.05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Laporan	1,233,000
02.09.01.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37	Dokumen	81.047.000

02.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	25	Dokumen	51.047.000
02.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Orang	30.000.000
02.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	32	Paket	400.604.200
02.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	10,000,000
02.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	83.500.000
02.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	12.400.000
02.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Paket	62.762.000
02.09.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Paket	50,029,000
02.09.01.2.06.09	Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Dokumen	10.080.000
02.09.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	12	Laporan	9.999.800
02.09.01.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	Laporan	161.834.000
02.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedian jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	unit	54.700.000
02.09.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16	unit	54.700.000
02.09.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	29	Laporan	73.548.400
02.09.01.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	5,000,000
02.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	12	Laporan	20,400,000
02.09.01.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Laporan	48.148.400
02.09.01.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	189.158.480

02.09.01.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	Unit	115.965.400
02.09.02.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersedian Energi dan Angka Ketersedian Protein	11	Unit	9.980.000
02.09.02.2.01	KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Infrastruktur Kemendirian pangan yang tersedia	5	unit	63.213.080
02.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	2400 dan 69	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	209.999.700
02.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur Logistik	6	Unit	209.999.700
02..09.03	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	5	Unit	150,000,000
02..09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Koefisien variasi Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumsn dan perbandingan harga gabah di tingkat petani	2	Laporan	59.999.700
02..09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan singkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	84.6	Point	1.998.197.852
02..09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di kabupaten/kota	CV < 10	%	590.000.000
02..09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4	Laporan	90,000,000
02..09.03.2.01.13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	4	Laporan	150,000,000
02..09.03.2.01.15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Infromasi Harga dan Pasokan Pangan	1	Unit	100,000,000
02..09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	12	Dokumen	70,000,000
02..09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	12	Dokumen	100,000,000

02..09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlkah cadangan pangan pemerintah kabupaten	75	Ton	504.196.000
02..09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota yang terpelihara	75	Ton	322.549.000
02..09.03.2.02.05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota yang terpelihara	75	Ton	151.648.000
02..09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapain Target Konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka Kecukupan gizi	1. Skor Angka Kecukupan Konsumsi Energi 2. Skor Angka Kecukupan Konsumsi Protein	25	Ton	29.999.000
02..09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi Pangan Perkapita pertahun	2150 dan 57	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	905.001.852
02..09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasisi sumberdaya lokal	1	Dokumen	100.001.740
02..09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	4	Laporan	705.000.212
02..09.03.3.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten	2	Laporan	99.999.000
02..09.03.3.02.05	Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/kota melalui peraturan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/kota melalui peraturan kabupaten/kota	-	Dokumen	0
02.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	0	Dokumen	0
02.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun	4	Pekon	900,000,000
02.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta dan analisa ketahanan Pangan dan Kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1	Peta	75,000,000
02.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	1	Dokumen	75,000,000
02.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	3	Pekon	250,000,000
02.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervesi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4	Laporan	75,000,000

02.09.04.2.02.05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2	Dokumen	125,000,000
02..09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	1	Dokumen	50,000,000
02..09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	> 80	%	340,000,000
02..09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi kemamanan pangan segar asala tumbuhan daerah	2	Jenis	340,000,000
02..09.05.2.01.06	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan Pangan Segar asal tumbuhan	1	Dokumen	85,000,000
02..09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	1	Dokumen	75,000,000
02..09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	Dokumen	84,000,000
02..09.05.2.01.09	Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	Laporan	46,000,000
02..09.05.3.02	Kegiatan Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	1	Dokumen	50,000,000
02..09.05.3.02.01	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah dokumen hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan	0	Laporan	0
			0	Dokumen	0

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan Program unggulan Dinas Ketahanan Pangan, serta mengakomodir penyelesaian masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Ketahanan PanganKabupaten Lampung Barat, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Ketahanan Pangan Lampung Barat tidak terlepas dari dukungan pendanaan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Pendanaan tersebut merupakan stimulator (pengungkit) untuk tumbuhnya investasi swasta dan swadaya masyarakat yang bermuara pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Agar Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Ketahanan Pangandi Kabupaten Lampung Barat, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, kemauan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh aparatur Dinas Ketahanan PanganKabupaten Lampung Barat saja tetapi oleh segenap *stakeholder* baik pusat, provinsi maupun yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 16 Februari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MAIDAR, SH. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690417 199803 1 006

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024
Kabupaten Lampung Barat
DINAS KETAHANAN PANGAN

kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun lalu (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
02.	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
2,09	Bidang Pangan																	
02.09.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	80 %	14.778.000.000	70 %	Rp 2.270.414.368	80 %	Rp 2.474.724.700	- %	Rp -	- %	Rp -	70 %	Rp 2.270.414.368	88 %	Rp 2.270.414.368	DKP LB	
02.09.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	156 Dokumen	556.000.000	39 Dokumen	Rp 15.855.800	39 Dokumen	Rp 15.855.400	- Dokumen	Rp -	39 Dokumen	Rp -	39 Dokumen	Rp 15.855.800	39 Dokumen	Rp 15.855.800	DKP LB	
02.09.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44 Dokumen	240.000.000	11 Dokumen	Rp 5.000.000	11 Dokumen	Rp 5.000.000	- Dokumen	Rp -	11 Dokumen	Rp -	11 Dokumen	Rp 5.000.000	11 Dokumen	Rp 5.000.000	DKP LB	
02.09.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	Rp 2.720.000	1 Dokumen	Rp 2.719.800	- Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 2.720.000	1 Dokumen	Rp 2.720.000	DKP LB	
02.09.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	Rp 954.000	1 Dokumen	Rp 954.000	- Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp 954.000	1 Dokumen	Rp 954.000	DKP LB	
02.09.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	Rp 666.800	1 Dokumen	Rp 666.800	- Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 666.800	1 Dokumen	Rp 666.800	DKP LB	
02.09.01.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	Rp 515.000	1 Dokumen	Rp 514.800	- Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp 515.000	1 Dokumen	Rp 515.000	DKP LB	
02.09.01.2.01. 06	Koordinasi Penyususnan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	Rp 1.000.000	12 Dokumen	Rp 1.000.000	- Dokumen	Rp -	12 Dokumen	Rp -	12 Dokumen	Rp 1.000.000	12 Dokumen	Rp 1.000.000	DKP LB	
02.09.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 dokumen	240.000.000	12 Dokumen	Rp 5.000.000	12 dokumen	Rp 5.000.000	- dokumen	Rp -	12 dokumen	Rp -	12 dokumen	Rp 5.000.000	12 dokumen	Rp 5.000.000	DKP LB	
02.09.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	172 Dokumen	10.142.000.000	28 Dokumen	Rp 1.996.922.645	16 Dokumen	Rp 2.196.973.300	- Dokumen	Rp -	16 Dokumen	Rp -	28 Dokumen	Rp 1.996.922.645	16 Dokumen	Rp 1.996.922.645	DKP LB	
02.09.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang Bulan	10.000.000.000	12 Orang bulan	Rp 1.989.432.645	12 Orang Bulan	Rp 2.191.473.300	- Orang Bulan	Rp -	12 Orang Bulan	Rp -	12 Orang Bulan	Rp 1.989.432.645	12 Orang Bulan	Rp 1.989.432.645	DKP LB	
02.09.01.2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	40.000.000		Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	DKP LB	
02.09.01.2.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	Rp 1.990.000	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	12 Dokumen	Rp 1.990.000	- Dokumen	Rp 1.990.000	DKP LB	
02.09.01.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	Rp 2.500.000	1 Dokumen	Rp 2.500.000	- Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 2.500.000	1 Dokumen	Rp 2.500.000	DKP LB	
02.09.01.2.02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	40.000.000	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	-	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	DKP LB	

02.09.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Dokumen	4.000.000	2	Dokumen	Rp	1.000.000	2	Dokumen	Rp	1.000.000	-	Dokumen	Rp	-	2	Dokumen	Rp	-	2	Dokumen	Rp	1.000.000	2	Dokumen	Rp	1.000.000	DKP LB	
02.09.01.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dokumen	8.000.000	1	Dokumen	Rp	2.000.000	1	Dokumen	Rp	2.000.000	-	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen	Rp	2.000.000	1	Dokumen	Rp	2.000.000	DKP LB	
02.09.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8	Dokumen	8.000.000	-	Dokumen	Rp	-	2	Dokumen	Rp	-	-	Dokumen	Rp	-	2	Dokumen	Rp	-	-	Dokumen	Rp	-	2	Dokumen	Rp	-	DKP LB	
02.09.01.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	4.000.000	-	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen		-	-	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen	Rp	-	-	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen	Rp	-	DKP LB	
02.09.01.2.03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4.000.000	-	Laporan	Rp	-	1	Laporan		-	-	Laporan	Rp	-	1	Laporan	Rp	-	-	Laporan	Rp	-	1	Laporan	Rp	-	DKP LB	
02.09.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132	Dokumen	520.000.000	25	Orang	Rp	11.173.000	25	Dokumen	Rp	11.181.000	-	Dokumen	Rp	-	25	Dokumen	Rp	-	25	Dokumen	Rp	11.173.000	25	Dokumen	Rp	11.173.000	DKP LB	
02.09.01.2.05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	Dokumen	200.000.000	25	Orang	Rp	11.173.000	25	Dokumen	Rp	11.181.000	-	Dokumen	Rp	-	25	Dokumen	Rp	-	25	Dokumen	Rp	11.173.000	25	Dokumen	Rp	11.173.000	DKP LB	
02.09.01.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32	Orang	320.000.000	-	orang	Rp	-	-	Orang	Rp	-	-	Orang	Rp	-	-	Orang	Rp	-	-	Orang	Rp	-	-	Orang	Rp	-	DKP LB	
02.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	124	Paket	1.800.000.000	29	Paket/Laporan	Rp	80.884.500	29	Paket	Rp	108.976.000	-	Paket	Rp	-	29	Paket	Rp	-	29	Paket	Rp	80.884.500	29	Paket	Rp	80.884.500	DKP LB	
02.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	40.000.000	1	Paket	Rp	4.506.000	1	Paket	Rp	4.210.000	-	Paket	Rp	-	1	Paket	Rp	-	1	Paket	Rp	4.506.000	1	Paket	Rp	4.506.000	DKP LB	
02.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	4	Paket	200.000.000	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	DKP LB	
02.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	80.000.000	-	Paket	Rp	-	-	Paket		-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	DKP LB	
02.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	200.000.000	1	Paket	Rp	11.246.000	1	Paket	Rp	11.251.000	-	Paket	Rp	-	1	Paket	Rp	-	1	Paket	Rp	11.246.000	1	Paket	Rp	11.246.000	DKP LB	
02.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	200.000.000	2	Paket	Rp	12.332.500	2	Paket	Rp	12.960.000	-	Paket	Rp	-	2	Paket	Rp	-	2	Paket	Rp	12.332.500	2	Paket	Rp	12.332.500	DKP LB	
02.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Paket	240.000.000	1	Paket	Rp	10.080.000	1	Paket	Rp	10.080.000	-	Paket	Rp	-	1	Paket	Rp	-	1	Paket	Rp	10.080.000	1	Paket	Rp	10.080.000	DKP LB	
02.09.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	40.000.000	12	Laporan	Rp	5.280.000	12	Laporan	Rp	5.280.000	-	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	5.280.000	12	Laporan	Rp	5.280.000	DKP LB	
02.09.01.2.06.09	Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	800.000.000	12	Laporan	Rp	37.440.000	12	Laporan	Rp	65.195.000	-	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	37.440.000	12	Laporan	Rp	37.440.000	DKP LB	
02.09.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	4	Paket	200.000.000	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	DKP LB	
02.09.01.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Paket	200.000.000	-	Paket	Rp	-	-	Paket		-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	-	Paket	Rp	-	DKP LB	
02.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedian jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144	Laporan	700.000.000	36	Laporan	Rp	85.779.363	36	Laporan	Rp	63.325.000	-	Laporan	Rp	-	36	Laporan	Rp	-	36	Laporan	Rp	85.779.363	36	Laporan	Rp	85.779.363	DKP LB	

02.09.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	20.000.000	12	Laporan	Rp	2.500.000	12	Laporan	Rp	2.500.000	-	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	2.500.000	12	Laporan	Rp	2.500.000	DKP LB	
02.09.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	80.000.000	12	Laporan	Rp	13.331.963	12	Laporan	Rp	18.000.000	-	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	13.331.963	12	Laporan	Rp	13.331.963	DKP LB	
02.09.01.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	600.000.000	12	Laporan	Rp	69.947.400	12	Laporan	Rp	42.825.000	-	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	-	12	Laporan	Rp	69.947.400	12	Laporan	Rp	69.947.400	DKP LB	
02.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	140	Unit	852.000.000	30	Unit	Rp	79.799.060	30	Unit	Rp	78.414.000	-	Unit	Rp	-	30	Unit	Rp	-	30	Unit	Rp	79.799.060	30	Unit	Rp	79.799.060	DKP LB	
02.09.01.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	76	Unit	612.000.000	19	Unit	Rp	73.609.060	19	Unit	Rp	71.950.000	-	Unit	Rp	-	19	Unit	Rp	-	19	Unit	Rp	73.609.060	19	Unit	Rp	73.609.060	DKP LB	
02.09.01.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44	Unit	40.000.000	11	Unit	Rp	6.190.000	11	Unit	Rp	6.464.000	-	Unit	Rp	-	11	Unit	Rp	-	11	Unit	Rp	6.190.000	11	Unit	Rp	6.190.000	DKP LB	
02.09.01.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	unit	200.000.000	-	Unit	Rp	-	-	unit		-	-	unit	Rp	-	-	unit	Rp	-	-	unit	Rp	-	-	unit	Rp	-	DKP LB	
02.09.02.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersedian Energi dan Angka Ketersedian Protein	2400 dan 69	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	1.240.000.000	-	Kkal/Kap/Hr dan gr/kap/hr	Rp	83.340.500	2400 dan 69	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	Rp	92.925.900	-	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	Rp	-	2400 dan 69	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	Rp	-	-	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	Rp	83.340.500	2400 dan 69	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	Rp	83.340.500	DKP LB	
02.09.02.2.01	KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH	Jumlah Infrastruktur Kemendirian pangan yang tersedia	24	Unit	1.240.000.000	6	Unit	Rp	83.340.500	6	Unit	Rp	92.925.900	-	Unit	Rp	-	6	Unit	Rp	-	6	Unit	Rp	83.340.500	6	Unit	Rp	83.340.500	DKP LB	
02.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	20	Unit	1.000.000.000	5	Unit	Rp	47.293.500	5	Unit	Rp	52.142.400	-	Unit	Rp	-	5	Unit	Rp	-	5	Unit	Rp	47.293.500	5	Unit	Rp	47.293.500	DKP LB	
02.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur Logistik	8	Laporan	240.000.000	1	Laporan	Rp	36.047.000	2	Laporan	Rp	40.783.500	-	Laporan	Rp	-	2	Laporan	Rp	-	1	Laporan	Rp	36.047.000	2	Laporan	Rp	36.047.000	DKP LB	
02..09.03	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	85	Point	8.970.000.000	89	Point	Rp	532.520.800	84	Point	Rp	263.756.000	-	Point	Rp	-	84	Point	Rp	-	89	Point	Rp	532.520.800	84	Point	Rp	532.520.800	DKP LB	
02..09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Koefisien variasi Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumsn dan perbandingan harga gabah di tingkat petani	CV < 10	%	1.520.000.000	0	%	Rp	111.359.000	CV < 10	%	Rp	89.600.000	-	%	Rp	-	CV < 10	%	Rp	-	0	%	Rp	111.359.000	CV < 10	%	Rp	111.359.000	DKP LB	
02..09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan singkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	8	Laporan	120.000.000	-	Laporan	Rp	-	-	Laporan	Rp	-	-	Laporan	Rp	-	-	Laporan	Rp	-	-	Laporan	Rp	-	-	Laporan	Rp	-	DKP LB	
02..09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di kabupaten/kota	12	Laporan	360.000.000	-	Laporan	Rp	-	4	Laporan	Rp	60.000.000	-	Laporan	Rp	-	4	Laporan	Rp	-	-	Laporan	Rp	-	4	Laporan	Rp	-	DKP LB	
02..09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1	Unit	200.000.000	-	Unit	Rp	-	-	Unit	Rp	-	-	Unit	Rp	-	-	Unit	Rp	-	-	Unit	Rp	-	-	Unit	Rp	-	DKP LB	
02..09.03.2.01.13	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	200.000.000	-	Dokumen	Rp	-	-	Dokumen	Rp	-	-	Dokumen	Rp	-	-	Dokumen	Rp	-	-	Dokumen	Rp	-	-	Dokumen	Rp	-	DKP LB	
02..09.03.2.01.15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Infromasi Harga dan Pasokan Pangan	48	Dokumen	400.000.000	1	Dokumen	Rp	111.359.000	12	Dokumen	Rp	-	-	Dokumen	Rp	-	12	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen	Rp	111.359.000	12	Dokumen	Rp	111.359.000	DKP LB	
02..09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	4	Dokumen	240.000.000	-	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen	Rp	29.600.000	-	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen	Rp	-	-	Dokumen	Rp	-	1	Dokumen	Rp	-	DKP LB	
02..09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	100	Ton	3.000.000.000	25	Ton	Rp	297.020.100	50	Ton	Rp	50.000.000	-	Ton	Rp	-	50	Ton	Rp	-	25	Ton	Rp	297.020.100	50	Ton	Rp	297.020.100	DKP LB	
02..09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlkah cadangan pangan pemerintah kabupaten	100	Ton	1.000.000.000	25	Ton	Rp	297.020.100	25	Ton	Rp	-	-	Ton	Rp	-	25	Ton	Rp	-	25	Ton	Rp	297.020.100	25	Ton	Rp	297.020.100	DKP LB	
02..09.03.2.02.04	Pemelihraaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota yang terpelihara	100	Ton	1.000.000.000	-	Ton	Rp	-	50	Ton	Rp	50.000.000	-	Ton	Rp	-	50	Ton	Rp	-	-	Ton	Rp	-	50	Ton	Rp	-	DKP LB	
02..09.03.2.02.05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota yang terpelihara	100	Ton	1.000.000.000	-	Ton	Rp	-	25	Ton	Rp	-	-	Ton	Rp	-	25	Ton	Rp	-	-	Ton	Rp	-	25	Ton	Rp	-	DKP LB	

02..09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapain Target Konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai angka Kecukupan gizi	1. Skor Angka Kecukupan Konsumsi Energi 2. Skor Angka Kecukupan Konsumsi Protein	2150 dan 57	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	4.200.000.000	-	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	Rp 124.141.700	2150 dan 57	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	Rp 124.156.000	-	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	Rp -	2150 dan 57	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	Rp -	-	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	Rp 124.141.700	2150 dan 57	Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	Rp 124.141.700	DKP LB	
02..09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi Pangan Perkapita pertahun	4	Dokumen	600.000.000	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	DKP LB	
02..09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasisi sumberdaya lokal	16	Laporan	3.200.000.000	4	Laporan	Rp 124.141.700	4	Laporan	Rp 124.156.000	-	Laporan	Rp -	4	Laporan	Rp -	4	Laporan	Rp 124.141.700	4	Laporan	Rp 124.141.700	DKP LB	
02..09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	8	Laporan	400.000.000	-	Laporan	Rp -	-	Laporan	Rp -	-	Laporan	Rp -	-	Laporan	Rp -	-	Laporan	Rp -	-	Laporan	Rp -	DKP LB	
02..09.03.3.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten	1	Dokumen	250.000.000	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	DKP LB	
02..09.03.3.02.05	Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/kota melalui peraturan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/kota melalui peraturan kabupaten/kota	1	Dokumen	250.000.000	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	DKP LB	
02.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	9	Pekon	2.100.000.000	2	Pekon	Rp 45.312.000	2	Pekon	Rp 28.766.400	-	Pekon	Rp -	2	Pekon	Rp -	2	Pekon	Rp 45.312.000	2	Pekon	Rp 45.312.000	DKP LB	
02.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun	4	Peta	600.000.000	1	Peta	Rp 27.674.000	1	Peta	Rp 28.766.400	-	Peta	Rp -	1	Peta	Rp -	1	Peta	Rp 27.674.000	1	Peta	Rp 27.674.000	DKP LB	
02.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta dan analisa ketahanan Pangan dan Kerentanan pangan yang dimutakhirkan	4	Dokumen	600.000.000	1	Dokumen	Rp 27.674.000	1	Dokumen	Rp 28.766.400	-	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 27.674.000	1	Dokumen	Rp 27.674.000	DKP LB	
02.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	9	Pekon	1.500.000.000	2	Pekon	Rp 17.638.000	2	Pekon	Rp -	-	Pekon	Rp -	2	Pekon	Rp -	2	Pekon	Rp 17.638.000	2	Pekon	Rp 17.638.000	DKP LB	
02.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	8	Laporan	300.000.000	1	Laporan	Rp 17.638.000	-	Laporan	-	-	Laporan	Rp -	-	Laporan	Rp -	1	Laporan	Rp 17.638.000	-	Laporan	Rp 17.638.000	DKP LB	
02.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervesi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4	Dokumen	1.000.000.000	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	-	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	DKP LB	
02.09.04.2.02.05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2	Dokumen	200.000.000	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	-	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	DKP LB	
02..09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	> 80	%	780.000.000	-	%	Rp -	> 80	%	Rp 42.337.200	-	%	Rp -	> 80	%	Rp -	-	%	Rp -	> 80	%	Rp -	DKP LB	
02..09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	2	Jenis	780.000.000	-	Jenis	Rp -	2	Jenis	Rp 42.337.200	-	Jenis	Rp -	2	Jenis	Rp -	-	Jenis	Rp -	2	Jenis	Rp -	DKP LB	
02..09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi kemamanan pangan segar asala tumbuhan daerah	4	Dokumen	240.000.000	-	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 42.337.200	-	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp -	DKP LB	
02..09.05.2.01.06	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan Pangan Segar asal tumbuhan	2	Dokumen	120.000.000	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	-	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	-	Dokumen	Rp -	DKP LB	

02..09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	2 dokumen	200.000.000	- dokumen	Rp -	- Dokumen	-	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	DKP LB	
02..09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	100.000.000	- Dokumen	Rp -	- Laporan	-	- Laporan	Rp -	- Laporan	Rp -	- Laporan	Rp -	- Laporan	Rp -	DKP LB	
02..09.05.2.01.09	Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	120.000.000	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	-	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	DKP LB	
02..09.05.3.02	Kegiatan Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	4 Laporan	300.000.000	- Laporan	Rp -	- Laporan	Rp -	- Laporan	Rp -	- Laporan	Rp -	- Laporan	Rp -	- Laporan	Rp -	DKP LB	
02..09.05.3.02.01	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah dokumen hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan	4 Dokumen	300.000.000	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	-	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	- Dokumen	Rp -	DKP LB	

Liwa, 16 Februari 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Barat

MAIDAR.SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19690417 199803 1006

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KETAHANAN PANGANKAB. LAMPUNG BARAT

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Ketahanan Pangan						6.470.198.200,00							6.993.500.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.470.198.200,00							6.993.500.000,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						6.470.198.200,00							6.993.500.000,00	
1	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	80,00 %			80,00 %	3.596.000.648,00						80,00 %	3.938.500.000,00	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , Pengangaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			40 Dokumen	138.999.600,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	139.000.000,00	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	9.999.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	59.999.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengelolan Administrasi Keunagan Perangkat Daerah	-			43 Dokumen	2.655.679.968,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	2.742.500.000,00	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22/14 Orang/bulan	2.615.339.968,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		2.700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.999.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.414.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	12.625.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		13.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.960.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.342.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2.263.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	3.000.000,00	
	2	09	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.030.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		1.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.233.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		1.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			37 Dokumen	81.047.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	135.000.000,00	
	2	09	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25 Dokumen	51.047.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	30.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	-			32 Paket	400.604.200,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	470.000.000,00	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	83.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12.400.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	62.762.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	50.029.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.080.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.999.200,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	161.834.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	54.700.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	60.000.000,00	
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	54.700.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			29 Laporan	73.548.400,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	126.000.000,00	
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20.400.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		21.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	48.148.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			35 Unit	189.158.480,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	263.000.000,00	
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	115.965.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		153.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	9.980.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	63.213.080,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Sebarus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersedian Energi dan Angka Ketersedian Protein Angka Ketersedian Energi dan Angka Protein	2400Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr 2400Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr			2400 Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr 2400 Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	209.999.700,00						2400Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr 2400Kkal/kap/hr dan 69 gr/kap/hr	210.000.000,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kemendirian pangan yang tersedia	-			1 Unit	209.999.700,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	210.000.000,00	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				6 Unit	150.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				2 Laporan	59.999.700,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi Skor PPH Konsumsi	84,60Point 84.6Point			84,10 Point 84.1 Point	1.999.197.852,00						84,60Point 84.6Point	2.160.000.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien variasi Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumsn dan perbandingan harga gabah di tingkat petani	-			< 10 %	590.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	590.000.000,00	
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				4 Laporan	90.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														

							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				4 laporan	150.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																
							Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																
							Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																
							Informasi Harga dan Pasokan Pangan				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	-			10 Ton	504.196.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	650.000.000,00	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				25 Ton	322.549.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				75 Ton	151.648.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																
							Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				25 Ton	29.999.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Angka Kecukupan Konsumsi Energi dan Skor Angka Kecukupan Konsumsi Protein	-			2150 / 57 Kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	905.001.852,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	920.000.000,00	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	100.001.740,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	705.000.212,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		710.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				2 Laporan	99.999.900,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan Jumlah Penanganan Desa Rawan Pangan prioritas 1, 2 dan 3	9Pekon 9Pekon			2 Pekon 2 Pekon	325.000.000,00						3Pekon 3Pekon	325.000.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun	-			1 Dokumen	75.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	75.000.000,00	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Intervensi Penanganan Desa rawanan pangan	-			2 Pekon	250.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	250.000.000,00	
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				4 Laporan	75.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																

							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				2 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	80 > %			80 > %	340.000.000,00						80 > %	360.000.000,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	-			2 Jenis	340.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat	-	360.000.000,00	
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	84.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	46.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup SDM 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
										J U M L A H	**6.470.198.200,00**							**6.993.500.000,00**	

Liwa, 16 Februari 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Barat

MAIDAR.SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19690417 199803 1006

RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPUNG BARAT

BEGUAI JEJAMA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATENLAMPUNGBARAT
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii

BAB I. PENDAHULUAN I-1
1.1. LatarBelakang..... I-1
1.2. LandasanHukum I-2
1.3. MaksuddanTujuan I-4
1.4. SistematikaPenulisan I-5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU TAHUN 2021 ..... II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkata Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstra Perangkat Daerah II-1
2.2. AnalisisKinerjaPelayananPerangkat Daerah..... II-3
2.3.Isu-isu PentingPenyelenggaraanTugasPokokdan FungsiPerangkat Daerah II-6
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-8

BAB III. TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III-1
3.1. Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah III-1
3.2. Program dan Kegiatan III-3

BABIV. PENUTUP..... IV-1

Lampiran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda 2023-2026, pada Tahun 2025 sasaran yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Barat adalah “MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN”.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembungunan Daerah Kabupaten Lampung adalah menyajikan data/informasi hasil kegiatan dan sekaligus evaluasi yang mengungkapkan keberhasilan yang dicapai, analisis kinerja serta program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menentukan kebijakan dimasa yang akan datang. Program kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi program kegiatan yang telah berjalan, sedang dilaksanakan dan rencana program kegiatan pada tahun mendatang dengan sasaran yang hendak dicapai menggunakan indikator serta rencana target capaian serta estimasi prakiraan maju yang merujuk pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Demikian rumusan Rencana Kerja Bappeda untuk Tahun 2025 dengan harapan memberikan kontribusi yang besar dan mengakomodasikan berbagai perubahan di Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, Februari 2025

Plt. Kepala Bappeda

Kabupaten Lampung Barat,

INDRA GUNAWAN, M.P

NIP. 197004041997031005

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (***Good Governance***) dan pemerintahan yang bersih (***Clean Government***).

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Peembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan Renja Perangkat Daerat dibahas pada Forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan dan Program dari Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat, sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
n. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat Periode 2023-2026 dan sebagai landasan pelaksanaan penyelenggaraan fungsi OPD dalam pencapaian kinerja dan target indikator Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pencapaian Tujuan dan Program Kabupaten Lampung Barat secara umum melalui pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
2. Mengukur efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Mengukur tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
4. Mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat setelah dievaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja.

5. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisi hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi tentang review program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah dibandingkan dengan Program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, sosial, keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang lainnya.

BAB III. TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Berisi tentang kebijakan nasional yang berdampak kepada penyusunan program atau kegiatan Organisasi Perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memuat rumusan tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

3.2. Program dan Kegiatan

a. Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang direncanakan pada tahun 2025.

BAB.V. PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II (HASIL ENTRY SIPD)

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pencapaian Tujuan akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Lampung Barat khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Sebagaimana RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 serta Renstra Bappeda Tahun 2023-2026, maka acuan perencanaan untuk Tahun 2025 menggunakan asumsi RPD Tahun 2023-2026 dan kebijakan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 serta sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2045. Selanjutnya keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada Tahun Anggaran 2025

Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 akan melaksanakan program dan kegiatan yang terdiri dari **3 (tiga) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dengan 115 (seratus lima belas) Sub Kegiatan** yaitu :

No.	Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9 Kegiatan
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 Kegiatan
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Kegiatan
	Jumlah	**16 Kegiatan**

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan
2	Administrasi Keuangan	8 Sub Kegiatan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4 Sub Kegiatan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11 Sub Kegiatan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Sub Kegiatan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Sub Kegiatan
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Kegiatan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Sub Kegiatan
9	Penyusunan Perencanaan Pendanaan	7 Sub Kegiatan
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Sub Kegiatan
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Sub Kegiatan
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Sub Kegiatan
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Sub Kegiatan
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Sub Kegiatan
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Sub Kegiatan
	Jumlah	**115 Sub Kegiata**

Sedangkan pada Renja Bappeda Tahun 2025, terdapat terdapat **3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dengan 55 (Lima Puluh Lima) Sub Kegiatan** yaitu :

No.	Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8 Kegiatan
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3 Kegiatan
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Kegiatan
	Jumlah	**14 Kegiatan**

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan
2	Administrasi Keuangan	4 Sub Kegiatan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Sub Kegiatan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Sub Kegiatan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Sub Kegiatan
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan
9	Penyusunan Perencanaan Pendanaan	4 Sub Kegiatan
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Sub Kegiatan
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Sub Kegiatan
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6 Sub Kegiatan
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	6 Sub Kegiatan
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Sub Kegiatan
	Jumlah	**55 Sub Kegiatan**

Dilihat dari tabel diatas, Renja Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 baik program, kegiatan maupun Sub Kegiatan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Bappeda

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dan telah sesuai dengan hasil pemetaan Kepmen 050.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota *(welfare state)*.

Untuk mencapai Tujuan Program Bappeda Kabupaten Lampung Barat melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bappeda dengan program tingkat Kabupaten Lampung Barat menjadi mutlak.

Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 2 (dua) urusan yaitu urusan penataan ruang, dan perencanaan pembangunan. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :

1. Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD ”;
2. Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;

3. Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
4. Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”.
5. Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD”;
6. Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
7. Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
8. Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
9. Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-OPD”;
10. Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;
11. Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;
12. Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing OPD”;
13. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi OPD”.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 telah menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Bappeda Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintah bidang Perencanaan

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Bappeda Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada Tahun 2025, perkiraan Tahun 2025, permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Kualitas pelayanan Publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik.
b. Daya saing Ekonomi Kabupaten lampung barat,.
c. Tingkat kemiskinan Masyarakat.
d. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di semua sektor (kewilayahan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan data dan informasi).

Dalam menghadapi permasalahan yang ada, perlu dilakukan analisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT, yaitu Strength/Kekuatan, Weakness/ Kelemahan, Opportunity/Peluang dan Threath/Ancaman/Tantangan sebagai faktor penentu keberhasilan.

Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan.

a. Kekuatan

1. Dukungan anggaran yang relatif besar.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi Bappeda.

4. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara aparatur Bappeda.

b. Kelemahan

1. Masih rendahnya pemahaman staf tentang tugas pokok dan fungsinya.
2. Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Aparatur dari segi kualitas.

Kondisi Ekternal terdiri dari Peluang dan Ancaman

a. Peluang

1. Infrastruktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan.
2. Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM.
3. Adanya potensi aparatur yang dapat dikembangkan.

b. Ancaman/Tantangan

1. Perkembangan teknologi informasi.
2. Meningkatnya daya kritis masyarakat.

Sehingga dengan mengetahui apakah faktor internal dan eksternal tersebut, dapat dilakukan strategi dan kebijakan guna mengatasi permasalahan dan dapat dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya sasaran, tujuan, misi, dan visi.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan Bappeda Kabupaten Lampung Barat diarahkan untuk mendorong peningkatan profesionalisme kinerja Bappeda Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda Kabupaten Lampung Barat, maka dapat ditetapkan arah kebijakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan agenda kinerja aparatur dalam pelaksanaan administrasi perkantoran tepat waktu;
2. Menetapkan dan melaksanakan agenda koordinasi pembangunan dengan stakeholder terkait;
3. Melaksanakan program pengembangan data dan informasi;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nama Perangkat Daerah : BAPPEDA

RENJA KERKA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**7.179.206.320,00**							**7.581.579.873,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.179.206.320,00**							**7.581.579.873,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**7.179.206.320,00**							**7.581.579.873,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.512.324.020,00**						**-**	**3.837.576.003,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	77.017.700,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	66.496.270,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	55.063.700,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		43.999.670,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.106.200,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		1.915.100,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.221.400,00	Kab. Lampung Barat, Air Hitam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.018.500,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.618.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.619.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.947.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.679.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.060.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.266.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		10.999.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 26 Orang/Bulan	2.756.901.700,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	3.032.615.733,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				312 Orang/bulan	2.751.401.900,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.026.566.733,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.100.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.999.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.199.000,00	BAPPEDA

	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.750.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.177.800,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	5.694.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.178.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		3.495.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.999.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.199.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	28.916.400,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	31.851.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.872.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		3.203.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.354.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		5.889.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	20.690.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		22.759.000,00	BAPPEDA

	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	289.891.820,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	294.202.000,00	BAPPEDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.742.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		4.116.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.912.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		15.378.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.919.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		36.643.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	11.550.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		12.292.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	16.310.720,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		16.181.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	190.457.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		209.592.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	87.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	95.700.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	87.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		95.700.000,00	BAPPEDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72.033.600,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	79.099.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		3.300.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	23.600.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		25.960.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	45.433.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		49.839.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.385.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	231.918.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	147.350.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		179.080.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	18.150.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		19.965.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.885.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		32.873.000,00	BAPPEDA

2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase OPD yang mencapai target kinerja***	**90,00 %**			**90,00 %**	**2.045.801.300,00**						**90,00 %**	**1.843.459.390,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)* *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*	-			1 Berita Acara 6 Dokumen 1 Berita Acara 3 Berita acara	1.301.094.300,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.133.459.390,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	55.565.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		50.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				15 Berita Acara	149.924.900,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		164.917.390,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	529.995.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		568.542.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				5 Dokumen	565.609.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		350.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan* *Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi*	-			1 Buku 50 Orang	137.650.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	110.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				50 Orang	64.580.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.000.000,00	BAPPEDA

	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				70 Buku	73.070.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*	-			6 Laporan 3 Laporan	607.057.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	600.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	218.539.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		250.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	388.518.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		350.000.000,00	BAPPEDA
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA*** ***Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat***	**100 %** **100,00 %**			**95 %** **95 %**	**1.621.081.000,00**						**100 %** **100,00 %**	**1.900.544.480,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*undefined* *Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia* *Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*	-			undefined undefined 8 Dokumen/Laporan 7 Dokumen/Laporan	625.772.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	735.921.480,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	39.451.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		39.377.000,00	BAPPEDA

	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	98.454.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		93.979.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	131.143.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		217.800.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	47.061.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		51.801.310,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 laporan Laporan	31.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		26.956.380,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	277.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		306.007.790,00	BAPPEDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA* *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA* *Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*	-			4 Perangkat Daerah 1 dokumen 1 Laporan 4 Perangkat Daerah 7 Dokumen/Laporan	527.477.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	607.470.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	68.887.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		95.477.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	32.645.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		50.221.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	206.927.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		214.776.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen Dokumen	85.938.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		100.342.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan Laporan	33.044.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		36.348.000,00	BAPPEDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan Laporan	100.036.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		110.306.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan*	-			1 dokumen 1 dokumen 1 Laporan 1 Laporan 4 dokumen 4 Perangkat Daerah 4 Perangkat Daerah 4 Perangkat Daerah	467.831.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	557.153.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen Dokumen	100.314.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		150.874.000,00	BAPPEDA

	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan Laporan	16.328.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		23.564.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan Laporan	114.710.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		124.714.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen Dokumen	100.900.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		110.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan Laporan	27.623.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		28.844.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan Laporan	107.956.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		119.157.000,00	BAPPEDA
	J U M L A H							**7.179.206.320,00**							**7.581.579.873,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.060.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.266.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		10.999.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			1 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 26 Orang/Bulan	2.756.901.700,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	3.032.615.733,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				312 Orang/bulan	2.751.401.900,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.026.566.733,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.100.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.999.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.199.000,00	BAPPEDA

	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.750.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.177.800,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	5.694.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.178.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		3.495.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.999.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.199.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	28.916.400,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	31.851.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.872.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		3.203.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.354.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		5.889.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	20.690.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		22.759.000,00	BAPPEDA

	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	289.891.820,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	294.202.000,00	BAPPEDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.742.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		4.116.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.912.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		15.378.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.919.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		36.643.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	11.550.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		12.292.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	16.310.720,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		16.181.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	190.457.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		209.592.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	87.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	95.700.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	87.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		95.700.000,00	BAPPEDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72.033.600,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	79.099.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		3.300.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	23.600.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		25.960.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	45.433.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		49.839.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.385.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	231.918.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	147.350.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		179.080.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	18.150.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		19.965.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.885.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		32.873.000,00	BAPPEDA

2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase OPD yang mencapai target kinerja***	**90,00 %**			**90,00 %**	**2.045.801.300,00**						**90,00 %**	**1.843.459.390,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)* *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*	-			1 Berita Acara 6 Dokumen 1 Berita Acara 3 Berita acara	1.301.094.300,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.133.459.390,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	55.565.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		50.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				15 Berita Acara	149.924.900,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		164.917.390,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	529.995.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		568.542.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				5 Dokumen	565.609.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		350.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan* *Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi*	-			1 Buku 50 Orang	137.650.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	110.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				50 Orang	64.580.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.000.000,00	BAPPEDA

	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				70 Buku	73.070.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*	-			6 Laporan 3 Laporan	607.057.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	600.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	218.539.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		250.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	388.518.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		350.000.000,00	BAPPEDA
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA*** ***Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat***	**100 %** **100,00 %**			**95 %** **95 %**	**1.621.081.000,00**						**100 %** **100,00 %**	**1.900.544.480,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*undefined* *Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia* *Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*	-			undefined undefined 8 Dokumen/Laporan 7 Dokumen/Laporan	625.772.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	735.921.480,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	39.451.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		39.377.000,00	BAPPEDA

	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	98.454.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		93.979.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	131.143.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		217.800.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	47.061.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		51.801.310,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 laporan Laporan	31.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		26.956.380,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	277.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		306.007.790,00	BAPPEDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA* *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA* *Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*	-			4 Perangkat Daerah 1 dokumen 1 Laporan 4 Perangkat Daerah 7 Dokumen/Laporan	527.477.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	607.470.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	68.887.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		95.477.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	32.645.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		50.221.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	206.927.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		214.776.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen Dokumen	85.938.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		100.342.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan Laporan	33.044.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		36.348.000,00	BAPPEDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan Laporan	100.036.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		110.306.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan*	-			1 dokumen 1 dokumen 1 Laporan 1 Laporan 4 dokumen 4 Perangkat Daerah 4 Perangkat Daerah 4 Perangkat Daerah	467.831.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	557.153.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen Dokumen	100.314.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		150.874.000,00	BAPPEDA

	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (R
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan Laporan	16.328.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		23.564.000
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan Laporan	114.710.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		124.714.000
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen Dokumen	100.900.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		110.000.000
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan Laporan	27.623.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		28.844.000
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan Laporan	107.956.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		119.157.000
	J U M L A H							**7.179.206.320,00**							**7.581.579.873**

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Mengacu kepada sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 maka yang menjadi tujuan BAPPEDA untuk kurun waktu 2023-2026 adalah: "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan", dengan indikator :

1. Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP
2. Nilai Komponen Pengukuran kinerja pada SAKIP

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	1. Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	23,25
			2. Nilai komponen pengukuran kinerja pada SAKIP	18,43

3.2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

KODE					Program/ Kegiatan	Keluaran Kegiatan	
						Tolak Ukur	Target
1					2	3	4
05					**URUSAN PENUNJANG**		
05	**01**				**PERENCANAAN**		
05	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	**100%**
05	**01**	**01**	**01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen
05	01	01	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen
05	01	01	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen
05	01	01	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen
05	01	01	01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen
05	01	01	01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen
05	01	01	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen
05	01	01	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Laporan
05	**01**	**01**	**02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	**Dokumen**
05	01	01	02	01	Sub Kegiatan Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun	312 Orang
05	01	01	02	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan
05	01	01	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	2 Laporan
05	01	01	02	08	Sub Kegiatan Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen
05	**01**	**01**	**03**		**Kegiatan Administrasi**	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang	**Dokumen**

KODE					Program/ Kegiatan	Keluaran Kegiatan	
						Tolak Ukur	Target
1					2	3	4
					Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	disusun	
05	01	01	03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen
05	01	01	03	02	Sub kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerahh	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerahh	1 Dokumen
05	**01**	**01**	**05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	**Dokumen**
05	01	01	05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian yang disusun	1 Dokumen
05	01	01	05	05	Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen
05	01	01	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat	4 Orang
05	**01**	**01**	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya	**Dokumen**
05	01	01	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket
05	01	01	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor	11 Paket
05	01	01	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah cetak dan penggandaan	1 Paket
05	01	01	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	1 Dokumen
05	01	01	06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan
05	01	01	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	1 Laporan
05	**01**	**01**	**07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipenuhi**	**Dokumen**

KODE					Program/ Kegiatan	Keluaran Kegiatan	
						Tolak Ukur	Target
1					2	3	4
					Pemerintah Daerah		
05	01	01	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peratan dan mesin lainnya yang dilaksanakan	2 Unit
05	**01**	**01**	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang yang dilaksanakan**	**Dokumen**
05	01	01	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	1 Laporan
05	01	01	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Laistrik	Jumlah rekening listrik	1 rekening
						Jumlah rekening air	1 rekening
						Jumlah rekening telpon	1 rekening
05	01	01	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan
05	**01**	**01**	**09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen pemeliharaan BMD yang disusun**	**Dokumen**
05	01	01	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil pickup yang dibayar pajaknya	1 mobil
						Jumlah motor yang dibayar pajaknya	7 unit
						Jumlah minibus yang dibayar pajaknya	3 Unit
05	01	01	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	26 Unit
05	01	01	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Gedung
05	**01**	**02**			**Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**
05	**01**	**02**	**01**		**Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun**	**Dokumen**
05	01	02	01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Peserta Konsultasi Publik yang dilaksanakan	1 Berita Acara
05	01	02	01	04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	15 Berita acara
05	01	02	01	05	Sub Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah Peserta	2 Berita

KODE					Program/ Kegiatan	Keluaran Kegiatan	
						Tolak Ukur	Target
1					2	3	4
					Musrenbang Kabupaten/Kota	Musrenbang	Aacara
05	01	02	01	07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen
05	**01**	**02**	**02**		**Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun**	**Dokumen**
05	01	02	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	50 Orang
05	01	02	02	02	Sub Kegiatan Penyusunan profil pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1 Buku
05	**01**	**02**	**03**		**Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun**	**Dokumen**
05	01	02	03	01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	3 Laporan
05	01	02	03	03	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 Laporan
05	**01**	**03**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun**	
05	**01**	**03**	**01**		**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan**	**dokumen**

KODE					Program/ Kegiatan	Keluaran Kegiatan	
						Tolak Ukur	Target
1					2	3	4
						Manusia yang dilaksanakan	
05	01	03	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilaksanakan	2 Dokumen
05	01	03	01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daersah Bidang Pemerintahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daersah Bidang Pemerintahan yang disusun	2 Laporan
05	01	03	01	04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahahan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahahan yang dilaksanakan	2 Laporan
05	01	03	01	05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilaksanakannya	2 Dokumen
05	01	03	01	07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	2 Laporan
05	01	03	01	08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	4 Laporan
05	**01**	**03**	**02**		**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya**	**Dokumen**

KODE					Program/ Kegiatan	Keluaran Kegiatan	
						Tolak Ukur	Target
1					2	3	4
						Alam) yang dilaksanakan	
05	01	03	02	01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilaksanakan	2 Dokumen
05	01	03	02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daersah Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daersah Bidang Perekonomian yang dilaksanakan	2 Laporan
05	01	03	02	04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dilaksanakan	4 Laporan
05	01	03	02	05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilaksanakan	1 Dokumen
05	01	03	02	07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang dilaksanakan	1 Laporan
05	01	03	02	08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang dilaksanakan	1 Laporan
05	**01**	**03**	**03**		**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan**	**Dokumen**

KODE					Program/ Kegiatan	Keluaran Kegiatan	
						Tolak Ukur	Target
1					2	3	4
						kewilayahan 6 koordinasi, asistensi 16 kali, laporan monev dan evaluasi 2 yang dilaksanakan	
05	01	03	03	01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilaksanakan	1 Dokumen
05	01	03	03	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan	1 Laporan
05	01	03	03	04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	1 Laporan
05	01	03	03	05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang dilaksanakan	1 Dokumen
05	01	03	03	07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang dilaksanakan	1 Laporan
05	01	03	03	08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang dilaksanakan	1 Laporan
	Jumlah						

Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 untuk dipedomani pada tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama, mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Hasil kinerja Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja OPD tahun berikutnya sehingga kinerja OPD dapat terukur dan berkesinambungan.

Plt. Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Barat,

INDRA GUNAWAN, M.P
NIP. 197004041997031005

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**7.179.206.320,00**							**7.581.579.873,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.179.206.320,00**							**7.581.579.873,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**7.179.206.320,00**							**7.581.579.873,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.512.324.020,00**						**-**	**3.837.576.003,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	77.017.700,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	66.496.270,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	55.063.700,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		43.999.670,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.106.200,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		1.915.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.221.400,00	Kab. Lampung Barat, Air Hitam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.018.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.618.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.619.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.947.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.679.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.060.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.266.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		10.999.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 26 Orang/Bulan	2.756.901.700,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	3.032.615.733,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				312 Orang/bulan	2.751.401.900,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.026.566.733,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.999.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.199.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.177.800,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	5.694.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.178.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		3.495.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.999.800,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		2.199.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	28.916.400,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	31.851.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.872.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		3.203.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.354.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		5.889.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	20.690.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		22.759.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	289.891.820,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	294.202.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.742.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		4.116.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.912.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		15.378.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.919.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		36.643.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	11.550.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		12.292.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	16.310.720,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		16.181.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	190.457.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		209.592.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	87.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	95.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	87.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		95.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72.033.600,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	79.099.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		3.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	23.600.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		25.960.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	45.433.600,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		49.839.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.385.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-	-	231.918.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	147.350.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		179.080.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	18.150.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		19.965.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.885.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	-		32.873.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase OPD yang mencapai target kinerja***	**90,00 %**			**90,00 %**	**2.045.801.300,00**						**90,00 %**	**1.843.459.390,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)* *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*	-			1 Berita Acara 6 Dokumen 1 Berita Acara 3 Berita acara	1.301.094.300,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.133.459.390,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	55.565.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				15 Berita Acara	149.924.900,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		164.917.390,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	529.995.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		568.542.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				5 Dokumen	565.609.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan* *Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi*	-			1 Buku 50 Orang	137.650.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				50 Orang	64.580.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				70 Buku	73.070.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*	-			6 Laporan 3 Laporan	607.057.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	218.539.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	388.518.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang perencanaan bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA*** ***Persentase Indikator Kinerja Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat***	**100 %** **100,00 %**			**95 %** **95 %**	**1.621.081.000,00**						**100 %** **100,00 %**	**1.900.544.480,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*undefined* *Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia* *Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*	-			undefined undefined 8 Dokumen/Laporan 7 Dokumen/Laporan	625.772.000,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	735.921.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	39.451.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		39.377.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	98.454.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		93.979.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	131.143.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		217.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	47.061.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		51.801.310,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 laporan Laporan	31.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		26.956.380,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	277.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		306.007.790,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA* *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA* *Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*	-			4 Perangkat Daerah 1 dokumen 1 Laporan 4 Perangkat Daerah 7 Dokumen/Laporan	527.477.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	607.470.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	68.887.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		95.477.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	32.645.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		50.221.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	206.927.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		214.776.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen Dokumen	85.938.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		100.342.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan Laporan	33.044.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		36.348.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan Laporan	100.036.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		110.306.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur* *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan*	-			1 dokumen 1 dokumen 1 Laporan 1 Laporan 4 dokumen 4 Perangkat Daerah 4 Perangkat Daerah 4 Perangkat Daerah	467.831.500,00			-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	557.153.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen Dokumen	100.314.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		150.874.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan Laporan	16.328.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		23.564.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan Laporan	114.710.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		124.714.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen Dokumen	100.900.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan Laporan	27.623.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		28.844.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan Laporan	107.956.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi 4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		119.157.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H							**7.179.206.320,00**							**7.581.579.873,00**	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Jl. Raden Intan Kompleks Perkantoran Pemda
Kabupaten Lampung Barat
Way Mengaku – Balik Bukit

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka *good governance* tersebut dan sejalan dengan cita-citareformasi bangsa, dituntut suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu indikator yang merupakan cerminan suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah bagaimana pemerintahan tersebut melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab dan transparan.

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dimaksudkan selain dari pemenuhan kewajiban sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dan permendagri no 86 tahun 2017 juga dimaksudkan menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam rangka penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan Renja – OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, kami mengucapkan terima kasih. Akhirnya, semoga penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung BaratTahun 2025 ini dapat bermanfaat.

Liwa, 3 Februari 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

SYAFARUDDIN,SPd.,M.Pd.I
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770521 200501 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2 Analis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 13

BAB III. TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 14
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 14
3.3 Program dan Kegiatan Subkegiatan 15

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **19**

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN I : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA S.D TAHUN 2024

LAMPIRAN II : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Da e r a h adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya, Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas penyusunan Renja sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan Publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimanaOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sebagai bahan utama Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2025.

Untuk itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Lampung Barat menyusun Renja-OPD yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi, visi,misi, program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah pada Tahun 2025, yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan teknis kegiatan tahunan untuk menjabarkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran/hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu pendek dari tujuan.

Indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan DAK. Oleh karenanya landasan penyusunan rencana kerja ini adalah :

1. Undang- undang nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten daerah Tingkat ll Lampung Barta (Lembar Negara Republik Indonesaia Tahun 1991 No 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang- undang nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
8. Undang- undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia;
9. Undang- undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang- undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan;
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
15. Peraturan mentri dalam negeri no 86 tahun 2017 penggantian peraturan mentri dalam no 54 tahun 2010 pada tanggal 18 september 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD serta tata cara perubahan RPJMD dan RKPD.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara PelaksanaanTugas Dan Kewenangan Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat;
19. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lampung Barat 2010-2030.(Lembaran daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 Nomor1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung barat Nomor 341);
20. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat 2005-2025.(Lembaran daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 nomor 1, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten lampung barat Nomor 353);
21. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2017-2022(Lembar Daerah Kabupaten Barta Tahun 2018 Nomor 1 , Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 793);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 ini adalah dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan tahunan menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan bagian dari tindak lanjut pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana Kerja (Renja) ini adalah :

- Merumuskan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 sesuai dengan sasaran, tujuan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat.
- Mengidentifikasi rencana pencapaian target dan indikator kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2025.
- Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

1.1 Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) Dinas Perpustakaan danKearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja – OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

3.3. Program dan Kegiatan dan Subkegiatan

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V: PENUTUP

Lampiran I Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Lampiran II Perubahan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu danCapaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Pada Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk rutin sebanyak 3 Progam dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 9 Kegiatan. dan jumlah sub kegiatan termaksud rutin sebanyak 29 sub kegiatan. Alokasi dana Tahun 2024 untuk Belanja Sebesar Rp.14.273.299.922,- Terealisasi sebesar Rp.13.976.672.026,- Atau 97,92 persen.

2.2 Analisis Kinerja OPD

Wilayah Kabupaten Lampung Barat begitu luas dimana terdiri dari 15 kecamatan serta sumber daya alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam. Dan Kabupaten Lampung Barat adalah Kabupaten yang sedang berkembang baik dalam segi politik, ekonomi dan sosial budaya, dalam menuju perkembangannnya itu terutama bagi perekonomian, dari tahun ke tahun.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat, melaksanakan urusan bidang Perpustakaan dan kearsipan dalam melaksanakan kinerjanya berpedoman kepada dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Juga Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang membidangi urusan Perpustakaan dan

Kearsipan Pengembangan perpustakaan, pada Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat belum mampu memenuhi kondisi ideal sesuai dengan perkembangan saat ini. Secara khusus identifikasi tentang beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

   Saat ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan D a e r a h Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan aparatur mengingat volume dan beban pekerjaan yang membutuhkan dukungan lebih banyak personil. Selain itu, sejalan dengan perkembangan pendayagunaan aparatur negara, aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat perlu lebih meningkatkan kualitas menyangkut tugas BidangPerpustakaan dan Kearsipan.

2. Sarana dan Prasarana Kantor.

   Pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan D a e r a h Kabupaten Lampung Barat. mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Perpustakaan, Pembanguna Gedung Layanan Perpustakaan berstandar Nasioanal. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan D a e r a h Kabupaten Lampung Barat juga masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan memuaskan diantaranya kurangnya bahan-bahan koleksi pustaka dan tenaga kerja Pustakawan dan tenaga kerja Arsiparis.

3. Regulasi.

   Meski Peraturan Perundangan untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, yakni peraturan perundangan yang saling menunjang dan memperkuat telah memadai, namun pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.

4. Koordinasi dengan *Stake Holder*.

   Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Harus diakui saat ini koordinasi antar *stake holder* masih belum optimal, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas. Koordinasi dan rekonsiliasi antar *stakeholders* ini diupayakan terus ditingkatkan.

5. Kurangnya Koleksi bacaan mempengaruhi minat masyarakat mengunjungi perpustakaan.

   Dalam rangka mencerdaskan masyarakat Kabupaten Lampung Barat dengan cara mendapat informasi gratis dengan berkunjung ke Perpustakaan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan penambahan koleksi bahan pustaka perpustakaan umum dan perpustakaan anak sesuai dengan perkembangan waktu dan sesuai keinginan pengunjung.

6. Wilayah Binaan yang luas mempersulit monitoring kegiatan.

   Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat Memiliki 3 Unit Mobil Pusling. Dengan adanya mobil Pusling tersebut dapat digunakan untuk menjangkau wilayah binaan yang luas.

7. Promosi layanan dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang belum maksimal sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk memanfaatkan informasi dan bahan bacaan yang tersedia.

8. Tempat Ruang Baca yang kurang reperensitativ

   Sampai saat ini gedung Perpustakaan sudah memiliki sarana untuk pelayanan umum namum Gedung/ Prasarana perpustakaan belum memenuhi standar gedung Perpustakaan Umum Daerah yang Representativ. Sehingga kedepan perlu adanya pembangunan Gedung Perpustakaan yang sesuai dengan Standar Gedung Perpustakaan umum Daerah.

9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2017 membuka layanan perpustakaan mulai pukul 07.30 s/d 16.30 WIB dengan memberikan fasilitas internet gartis sehingga pengunjung dapat mencari atau mendapatkan informasi terkait yang diinginkan, serta melakukan promosi keberadaan dan fungsi perpustakaan melalui brosur-brosur dan leaflet.

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan pada sebelumnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi melaksanakan segala urusan pelayanan Perpustakaan dan Arsip. Jika dikaitkan dengan beberapa faktor penghambat diantaranya tidak adanya tenaga pustakawan dan kurangnya SDM untuk mendukung Kegiatan yang ada di Dinas Perpustakaan Sehingga pelayanan kurang maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa isu strategis sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Lampung Barat. Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan Non Formal (Kearsipan dan Perpustakaan) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Pelaksanaan pembangunan kearsipan dan perpustakaan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, Sumber Daya manusia dan Tata Kelola yang meliputi antara lain Pengembangan depo Arsip, Tenaga Arsiparis dan Pustakawan serta sarana dan prasarana, perbaikan sistem pelayanan dan juga pengembangan Perpustakaan Desa guna menumbuhkan minat baca masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

Merubah mainset perpustakaan hanya sebagai tempat meminjam buku kearah teknologi informasi yang berkesinambungan Misalnya dengan mengutamakan pengadaan IT, pembuatan website dan perpustakaan terkoneksi baik dengan perpustakaan pekon dan perpustakaan sekolah antara lain :

1. Perpustakaan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi apapun dan sebagai salah satu media informasi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat.
2. Perpustakaan sebagai tempat mengaplikasikan segala bentuk ilmu pengetahuan. Misalnya dengan mengadakan pelatihan apapun guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

4. Mengamankan arsip dan membuat database dengan mengalihmediakan kearah teknologi melalui penyimpanandengan CD maupun scan.
5. Melestarikan arsip penting Pemerintah Kabupaten Lampung Barat guna mendukung jalannya pembangunan kedepan. Contoh : arsip arsip Surat Keputusan dan Sejarah Kabupaten Lampung Barat.
6. Penataan arsip sesuai dengan klasifikasi dan masalah sehingga memudahkan dalam pencarian kembali bila dibutuhkan sewaktu-waktu.

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

a. Tantangan

Tantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat kepada keberhasilan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat :

1. Bagaimana meningkatkan pelayanan administrasi perpustakan yang cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Kurangnya Bahan Koleksi Pustaka;
3. Rendahnya Kesadaran Aparatur/Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Kearsipan;
4. Kurangnya Tenaga Pengelola Perpustakaan dan Pengelola Kearsipan, termasuk Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis;
5. Belum adanya tempat Penyimpanan arsip (Depot Arsip) yang memadai;
6. Kurangnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan yang memadai;
7. Gedung Perpustakaan dan Kearsipan belum memadai.

b. Peluang

Beberapa Peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat dalam Mencapai Tujuan dan Sasarannya adalah:

1. Adanya Komitmen pimpinan dan Komitmen staf
2. Tersedianya Anggaran, Program dan Kegiatan;
3. Tersedianya Mobil Perpustakaan Keliling
4. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program atau kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampiran tabel berikut, Tabel T-C.31.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program kegiatan dari masyarakat yang merupakan salah satu instrumen penyusunan perencanaan pembangunan dengan sistem partisipasi langsung masyarakat dengan melalui Musrenbang yang dimulai dengan Musrenbang tingkat Kelurahan / Pekon, Kecamatan serta Kabupaten .

Setelah mengikuti beberapa kegiatan musrenbang maka terdapat usulan dari masyarakat yang terkait dengan pembentukan taman bacaan dan bantuan koleksi buku bagi perpustakaan pekon.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Melaksanakan penyelamatan, penataan dan pelestarian arsip serta pengadaan bahan pustaka yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Mewujudkan Sumberdaya kearsipan dan perpustakaan yang berdaya guna dan berhasilguna sesuai dengan kebutuhan.
3. Memajukan masyarakat membaca serta masyarakat sadar arsip.
4. Mewujudkan layanan prima dibidang arsip dan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
5. Mewujudkan kerjasama kearsipan dan perpustakaan secara berkesinambungan dengan instansi / pihak terkait baik dalam maupun luar negeri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

a. Tujuan

Mengaju kepada sasaran RPD, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 4 Tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat Dengan Indikator Tujuan Indeks Kegemaran Memaca dengan target 3,74 % dan Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan dan target 5%.
2. Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah Dengan Indikator Tujuan Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku dengan target 35 %

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat dalam jangka waktu tahunan, sampai empat tahun mendatang. Sasaran didalam Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023- 2026 adalah:

Dari penjabaran tujuan, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Minat Baca masyarakat dengan Indikator sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Literasi dengan Indikator Sasaran Indeks Baca dan Target Tahun 2025 (3,74 %)

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran di sajikanpada tabel berikutnya :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan dan Literasi	Indeks Baca	3.74%
2	Meningkatkan Tata Kearsipan Pemerintah Daerah	Kualitas Pengelolaan Arsip	35	Kualitas Pengelolaan Arsip		35

Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah mendorong terhadap capaian kinerja Pembangunan Daerah pada RPD 2023-2026

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menegah yang selanjutnta akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipaan Daerah Kabupaten Lampung Barat selama empat tahun.

3.2 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Berdasarkan Renstra 2023-2026, maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 antara lain :

Program **: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program **: Pembinaan Perpustakaan**

Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
4. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
5. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan TingkatDaerah Kabupaten/Kota
6. Pengembangan Bahan Pustaka
7. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
8. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
3. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Program **: Pengelolaan Arsip**

Kegiatan :Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
3. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan NasionalTingkat Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daeah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
2. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga KearsipanDaerah Kabupaten/Kota

Program : **Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Kegiatan : Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun

1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun

Kegiatan : Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Medis yang dikelola olehLembaga Kearsipan Kabupaten/Kota

1. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran II.

Berdasarkan Renstra 2023-2026, maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 antara lain :

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub.kegiatan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kebutuhan dana Rp. 18.651.000,-
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengankebutuhan dana Rp. 1.500.000,-
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD dengan kebutuhan dana Rp. 1.500.000,-
4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan kebutuhan dana Rp. 1.500.000,-
5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dengan kebutuhan dana Rp. 1.500.000,-
6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan kebutuhan dana Rp. 1.500.000,-
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan kebutuhan dana Rp. 1.499.700,-

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub.kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan kebutuhan dana Rp. 1.953.709.125,-
2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan kebutuhan dana Rp. 1.000.000,-
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan kebutuhan dana Rp. 1.999.800,-
4. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan kebutuhan dana Rp. 500.000,-

Kegiatan : **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub.kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi dengankebutuhan dana Rp.0.00,-

Kegiatan : **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub.kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantordengan kebutuhan dana Rp. 4.686.000,-
2. Peralatan dan perlengkapan kantor dengan kebutuhan dana Rp. 51.420.000,-
3. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan dengan kebutuhan danaRp. 35.904.800,-
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengankebutuhan dana Rp. 5.500.000,-
5. Fasilitas kunjungan tamu dengan kebutuhan dana Rp. 7.438.000,-
6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan kebutuhan dana Rp. 30.360.000,-

Kegiatan : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub.kegiatan : 1. Pengadaan Mebeler dana Rp.21.498,00.-
2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan kebutuhan dana Rp.2.100.000,-

Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub.kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan kebutuhan dana Rp. 1.250.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengankebutuhan dana Rp. 89.250.000,-
3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan kebutuhan dana Rp.61.710.100,-

Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub.kegiatan : 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan kebutuhan dana Rp. 235.500.000,-
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan kebutuhan dana Rp. 4.750.000,-
3. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan kebutuhan dana Rp.0.00,-

Program : **Pembinaan Perpustakaan**

Kegiatan : **Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota**

Sub.kegiatan :

1. Pembinaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan dengan kebutuhan dana Rp. 131.171.000,-
2. Pengembangan perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kebutuhan dana Rp. 109.435.000,-
3. Penyusunan data dan informasi perpustakaan Rp. 22.500.000,-
4. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota dengankebutuhan dana Rp. 50.000.000,-
5. Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka dengan kebutuhan dana Rp. 220.477.630,-
6. Pengembangan Bahan Pustaka dengan kebutuhan dana Rp.0.00,-
7. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Rp. 280.550.000,-
8. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kebutuhan dana Rp. 0.00,-
9. Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik dengan kebutuhan dana Rp. 0.00,-

Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dengan kebutuhan dana Rp. 140.000.000,-
2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Rp. 78.747.000,-
3. Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca dengan kebutuhan dana Rp.373.725.000,-
4. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Rp. 154.350.000,-

Program :

Pengelolaan Arsip

Kegiatan :

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

1. Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis dengan kebutuhan danaRp. 0.00,-
2. Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis dengan kebutuhan dana Rp. 0.00,-
3. Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota dengan kebutuhan dana Rp. 84.241.000,-

Kegiatan : **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**

Sub.kegiatan :
1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN dengan kebutuhan dana Rp. 45.282.000,-
2. Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota dengan kebutuhan dana Rp. 64.001.000,-

Program : **Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Kegiatan : **Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun**

Sub.kegiatan :
1. Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dengan kebutuhan dan Rp. 31.778.000,-

Kegiatan : **Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota**

Sub.kegiatan :
1. Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip dengnan kebutuhan dana Rp.0.00

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Perpustakaann dan Kearsipan Daerah, maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Barat hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa 3 Februari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

SYAFARUDDIN,S.Pd.,M.Pd.I
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770521 200501 1 003

LAMPIRAN II
Perubahan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026
Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2025	Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penagung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						4,272,484,155							7,730,900,000	- 2,456,060,432
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Urusan yang Dilaksanakan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	2,536,226,525						1 Bidang Urusan	3,305,900,000	
2.23.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	27,650,700						25 Dokumen	50,800,000	
2.23.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	18,651,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	8 Dokumen	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	1 Dokumen	3,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	1 Dokumen	3,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1,499,700	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	12 Dokumen	6,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**1,957,208,925**						**4 Dokumen**	**2,207,000,000**	
2.23.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Dibayarkan	20 Org/Bulan	14 Dokumen	20 Orang/Bulan	14 Dokumen	1,953,708,125	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	20 Orang/bulan	2,200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1,999,800	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	2 Dokumen	1,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penagung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	1 Dokumen	2,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang Diliaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahnya**	**7 Pegawai**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	-			-	-	**Aparatur**	**1 Dokumen**	**25,000,000**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2.23.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan Magang dan Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Pegawai	7 Pegawai	7 Pegawai	7 Pegawai	-	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	7 Pegawai	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Sub Organisasi yang Dilaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Sub Organisasi**	**6 Sub Organisasi**	**6 Paket**	**6 Sub Organisasi**	**135,308,800**			-	-	**Aparatur**	**6 Paket**	**335,100,000**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
2.23.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4,686,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	1 Paket	13,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.02	Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	51,420,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	2 Paket	70,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	35,904,800	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	1 Paket	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5,500,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	4 Dokumen	8,100,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7,438,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	12 Laporan	14,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30,360,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	12 Laporan	170,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan**	**23 unit**	**45 Unit**	**5 Unit**	**45 Unit**	**23,598,000**						**5 Unit**	**140,000,000**	
2.23.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	21 unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit	21,498,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	0	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	21 unit	21 unit	21 unit	2,100,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	18 unit	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sub Organisasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**3 sub organisasi**	**4 Sub Organisasi**	**4 Sub Organisasi**	**4 Sub Organisasi**	**152,210,100**						**4 Sub Organisasi**	**215,000,000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penagung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat Tulis Kantor	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1,250,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	2 laporan	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	89,250,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	5 laporan	45,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	61,710,100	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	4 laporan	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara**	**35 unit**	**35 Unit**	**35 Unit**	**35 Unit**	**140,250,000**						**36 Unit**	**335,000,000**	
2.23.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil dan Motor yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	25 unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	235,500,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	25 Unit	225,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	4,750,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	7 Unit	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Depo Arsip Daerah dan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehab	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	4 Unit	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**1,510,955,630**						**5%**	**3,450,000,000**	
2.23.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten yang Dibina**	**150 Perpustakaan**	**150 Perpustakaan**	**150 Perpustakaan**	**150 Perpustakaan**	**764,133,630**						**150 Perpustakaan**	**2,000,000,000**	
2.23.02.2.01.0004	Sug Kegatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang Dibina	40 Perpustakaan Sekolah	40 Perpustakaan Sekolah	40 Perpustakaan Sekolah	40 Perpustakaan Sekolah	131,171,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Publik	40 Perpustakaan Sekolah	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0011	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 Perpustakaan	40 Perpustakaan	40 Perpustakaan	40 Perpustakaan	109,435,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Publik	40 Perpustakaan	450,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	22,500,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	1 Buku	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.23.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang Dikelola	5000 Buku	5000 Buku	5000 Buku	5000 Buku	220,477,630	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	5000 Buku	50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.19	Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	280,550,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	-	2 layanan	150.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	jumlah layanan perpustakaan elektronik yg dipelihara dengan manajemen layanan	2 Layanan Digital	-	2 layanan	2 layanan	-	-	-	-	-	-	2 layanan	800.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0000	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus/Pekon Tingkat Kabupaten yang Dibina	5 pekon	5 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	-	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Publik	5 perpustakaan	150.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	-	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Publik	60 Orang	150.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.0000	Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang Diadakan	2500 Buku	-	2500 Buku	-	-	-	-	-	-	-	2500 Buku	150.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02	**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peningkatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5000 pemustaka**	**5000 Pemustaka**	**5000 Pemustaka**	**5000 Pemustaka**	**766,822,000**						**5000 Pemustaka**	**1,450,000,000**	
2.23.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Keliling Berbasis Inklusi Sosial	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	140,000,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Publik	15 Perpustakaan	200.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	5 unit	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	78,747,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	5 Perpustakaan	600,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02.0009	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Pemberian Penghargaan dan Promosi Gerakan Budaya Gemar Membaca	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	373,725,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Publik	6 Orang	450.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	300 orang Lokus	300 orang Lokus	300 orang Lokus	300 orang Lokus	154,350,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Publik	300 orang Lokus	325,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**														
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Kualitas Pengelolaan Arsip**	**5 dokumen**	**30**	**35**	**30**	**193,334,000**					**Aparatur**	**35**	**975,000,000**	
2.24.02.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola**	**100 dokumen**	**100 berkas**	**100 berkas**	**100 berkas**	**84,241,000**					**Aparatur**	**100 berkas**	**280,000,000**	
2.24.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Duplikat Dokumen Sejarah Prestasi Pemerintah Daerah yang Terawat dengan Baik	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	-	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	50 Berkas	50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penegung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.24.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Pengelola Arsip yang Dibina	50 dokumen	50 berkas	50 berkas	50 berkas	-	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	50 berkas	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten	50 dokumen	50 laporan	50 laporan	50 laporan	84,241,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	50 laporan	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDM Pengelola Arsip Dilingkat Kabupaten/Kota**	**50 orang**	**1 laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**109,283,000**						**1 laporan**	**415,000,000**	
2.24.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Pengadaan Sistem Informasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45,282,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	1 Laporan	250,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Kearsipan	50 orang	1 laporan	1 laporan	1 laporan	64,001,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	1 laporan	165,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Jumlah Dokumen Perlindungan dan Penyelamat Arsip Daerah**	**5 dokumen**	**5 arsip**	**5 arsip**	**5 arsip**	**31,778,000**						**5 arsip**	**280,000,000**	
2.24.03.2.01	**Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**Jumlah Dokumen yang Disusun**	**50 dokumen**	**50 arsip**	**50 arsip**	**50 arsip**	**31,778,000**						**50 arsip**	**80,000,000**	
2.24.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Dokumen Arsip (JRA) yang Disusun	50 unit	50 arsip	50 arsip	50 arsip	31,778,000	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	50 arsip	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.2.04	**Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Kearsipan dan Lamban Prestasi**	**5 unit**	**5 arsip**	**5 arsip**	**5 arsip**	-						**5 arsip**	**200,000,000**	
2.24.03.2.04.02	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Fasilitas Kearsipan dan Lamban Prestasi	5 unit	5 arsip	5 arsip	5 arsip	-	Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat	Dana Transfer umum- DAU	-	-	Aparatur	5 arsip	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub.Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023 s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program,Kegiatan dan Sub.kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan SubKegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2	23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**									
			2	23	01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bidang Urusan yang Dilaksanakan**	**1 Bidang Urusan**	**4 Bidang Urusan**	**1 Bidang Urusan**	**100%**	**91.12%**	**1 Bidang Urusan**	**100%**	**100%**
	2	**23**	**01**	**2**	**01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun**	**25 Dokumen**	**100 Dokumen**	**25 Dokumen**	**100%**	**98.32%**	**25 Dokumen**	**100%**	**100%**
2	23	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	8 Dokumen	32 Dokumen	8 Dokumen	100%	100%	8 Dokumen	100%	100%
2	23	01	2	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen	100%	100%
2	23	01	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen	100%	100%
2	23	01	2	01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen	100%	100%
2	23	01	2	01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peribahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen	100%	100%
2	23	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	100%	100%	1 Dokumen	100%	100%
2	23	01	2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	12 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	100%	94.71%	12 Laporan	100%	100%
	2	23	01	2	02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**	**4 Dokumen**	**16 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100%**	**90.88%**	**4 Dokumen**	**100%**	**100%**
2	23	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Dibayarkan	20 Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	100%	90.86%	20 Orang/Bulan	100%	100%

Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub.Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023 s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program,Kegiatan dan Sub.kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan SubKegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23	01	2	02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	100%	100%	1 Laporan	100%	100%
2	23	01	2	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Disusun	2 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	100%	100%	2 Laporan	100%	100%
2	23	01	2	02	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang Disusun	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen	100%	100%
	2	23	01	2	05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang Dilaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahnya**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**0%**	**0.00%**	**1 Dokumen**	**100%**	**100%**
2	23	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan Magang dan Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	28 Orang	7 Orang	0%	0.00%	7 Orang	100%	100%
	2	23	01	2	06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Sub Organisasi yang Dilaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Paket**	**24 Paket**	**6 Paket**	**100%**	**98.77%**	**6 Paket**	**100%**	**100%**
2	23	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	100%	100%	1 Paket	100%	100%
2	23	01	2	06	02	Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	1 Paket	0%	0%	1 Paket	100%	100%
2	23	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	1 Paket	100%	98.62%	1 Paket	100%	100%
2	23	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	16 Dokumen	4 Dokumen	100%	98.23%	4 Dokumen	100%	100%

Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub.Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023 s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program,Kegiatan dan Sub.kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan SubKegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%
2	23	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilaksanakan	12 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	100%	98.67%	12 Laporan	100%	100%
	2	23	01	2	07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan**	**45 Unit**	**78 Unit**	**5 Unit**	**100%**	**99.39%**	**45 Unit**	**100%**	**100%**
2	23	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	45 Unit	111 Unit	45 Unit	0%	0.00%	45 Unit	100%	100%
2	23	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	78 Unit	21 Unit	100%	99.39%	21 Unit	100%	100%
	2	23	01	2	08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sub Organisasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**4 Sub organisasi**	**16 Sub organisasi**	**4 Sub organisasi**	**100%**	**87.12%**	**4 Sub organisasi**	**100%**	**100%**
2	23	01	2	8	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat Tulis Kantor	2 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	100%	90.85%	2 Laporan	100%	100%
2	23	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	5 Laporan	20 Laporan	5 Laporan	100%	78.44%	5 Laporan	100%	100%
2	23	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	16 Laporan	4 Laporan	100%	93%	4 Laporan	100%	100%
	2	23	01	2	09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara**	**35 Unit**	**141 Unit**	**35 Unit**	**100%**	**85.77%**	**35 Unit**	**100%**	**100%**
2	23	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil dan Motor yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	25 Unit	100 Unit	25 Unit	100%	85.12%	25 Unit	100%	100%
2	23	01	2	09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	28 Unit	7 Unit	100%	100%	7 Unit	100%	100%
2	23	01	2	09	010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Depo Arsip Daerah dan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehab	3 Unit	13 Unit	3 Unit	0%	0.00%	3 Unit	100%	100%

Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub.Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023 s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program,Kegiatan dan Sub.kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan SubKegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2	23	02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**5%**	**20%**	**5%**	**100%**	**99.26%**	**5%**	**100%**	**100%**
	2	23	02	2	01	**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten yang Dibina**	**150 Perpustakaan**	**600 Perpustakaan**	**150 Perpustakaan**	**100%**	**94.84%**	**150 Perpustakaan**	**100%**	**99%**
2	23	02	2	01	01	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	2 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	0%	0.00%	2 Laporan	100%	100%
2	23	02	2	01	02	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 Perpustakaan	160 Perpustakaan	40 Perpustakaan	0%	0.00%	40 Perpustakaan	100%	100%
2	23	02	2	01	04	Sug Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang Dibina	40 Perpustakaan	160 Perpustakaan	40 Perpustakaan	100%	100%	40 Perpustakaan	100%	100%
2	23	02	2	01	05	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus/Pekon Tingkat Kabupaten yang Dibina	5 Perpustakaan	20 Perpustakaan	5 Perpustakaan	0%	0.00%	5 Perpustakaan	100%	100%
2	23	02	2	01	06	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	240 Orang	60 Orang	100%	97.11%	60 Orang	100%	100%
2	23	02	2	01	08	Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang Diadakan	2500 Eksamplar	10000 Eksamplar	2500 Eksamplar	0%	0%	2500 Eksamplar	100%	100%
2	23	02	2	01	09	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang Dikelola	5000 Eksamplar	20000 Eksamplar	5000 Eksamplar	100%	91.71%	5000 Eksamplar	100%	99%

Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub.Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023 s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program,Kegiatan dan Sub.kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan SubKegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23	02	2	01	10	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan. Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku	4 Buku	1 Buku	0%	0%	1 Buku	100%	100%
	2	23	02	2	02	**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peningkatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5000 Pemustaka**	**20000 Pemustaka**	**5000 Pemustaka**	**100%**	**99.40%**	**5000 Pemustaka**	**100%**	**100%**
2	23	2	2	02	02	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	5 Perpustakaan	20 Perpustakaan	5 Perpustakaan	100%	99.40%	5 Perpustakaan	100%	100%
2	23	02	2	02	03	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Pemberian Penghargaan dan Promosi Gerakan Budaya Gemar Membaca	6 Orang	24 Orang	6 Orang	0%	0%	6 Orang	100%	100%
2	23	02	2	02	04	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Keliling Berbasis Inklusi Sosial	15 Perpustakaan	60 Perpustakaan	15 Perpustakaan	100%	99.12%	15 Perpustakaan	100%	100%
				2	24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**									
			2	24	02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Kualitas Pengelolaan Arsip**	**30**	**130**	**25**	**100%**	**99.51%**	**30**	**100%**	**100%**
	2	24	02	2	01	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola**	**100 Berkas**	**400 Berkas**	**100 Berkas**	**100%**	**99.51%**	**100 Berkas**	**100%**	
2	24	02	2	01	01	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Duplikat Dokumen Sejarah Prestasi Pemerintah Daerah yang Terawat dengan Baik	50 Berkas	200 Berkas	50 Berkas	0%	0.00%	50 Berkas	100%	100%
2	24	02	2	01	02	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Pengelola Arsip yang Dibina	50 Berkas	200 Berkas	50 Berkas	0%	0.00%	50 Berkas	100%	100%
2	24	02	2	01	03	Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten	50 Laporan	200 Laporan	50 Laporan	100%	99.47%	50 Laporan	100%	100%

Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub.Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023 s/d Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program,Kegiatan dan Sub.kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan SubKegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	24	04	2	03	**Kegiatan Pengeloaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDM Pengelola Arsip Ditingkat Kabupaten/Kota**	**1 Laporan**	**4 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**99.53%**	**1 Laporan**	**100%**	**100%**
2	24	02	2	03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Melalui JIKN	5 Pengguna	20 Pengguna	5 Pengguna	100%	99.53%	5 Pengguna	100%	100%
2	24	02	2	03	02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Kearsipan	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	0%	0%	1 Laporan	100%	100%
			2	24	03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Jumlah Dokumen Perlindungan dan Penyelamat Arsip**	**5 Arsip**	**20 Arsip**	**5 Arsip**	**0%**	**0%**	**5 Arsip**	**100%**	**100%**
	2	24	03	2	01	**Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**Jumlah Dokumen yang Disusun**	**50 Arsip**	**200 Arsip**	**50 Arsip**	**0%**	**0%**	**200 Arsip**	**100%**	**100%**
2	24	03	2	01	01	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi 10 Tahun	50 Arsip	200 Arsip	50 Arsip	0%	0%	200 Arsip	100%	100%
	2	24	03	2	04	**Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Kearsipan dan Lamban Prestasi**	**5 Arsip**	**20 Arsip**	**5 Arsip**	**0%**	**0%**	**5 Arsip**	**100%**	**100%**
2	24	03	2	04	02	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Fasilitas Kearsipan dan Lamban Prestasi	5 Arsip	20 Arsip	5 Arsip	0%	0%	5 Arsip	100%	100%

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 ayat (1) disebutkan baha Perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama Bulan Desember, Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat merupakan kewajiban dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat periode 2023 - 2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Renja ini merupakan kerangka kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang selanjutnya akan menjadi acuan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025. Renja ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas.

Liwa, 02 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Barat,

HAIZA RINSA, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710405 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 15

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegitan masyarakat..... 17

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 19

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 19

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah..... 20

3.3 Program dan Kegiatan..... 22

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... 25

BAB V.PENUTUP..... 35

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat perlu menyusun Rencana kerja (Renja).

Rencana kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan rincian rencana tahunan dari renstra. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat merupakan dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai penjabaran dari rumusan keinginan dan upaya untuk mewujudkan kondisi yang dicita-citakan secara bertahap melalui sumber dana APBD sesuai dengan yang diprioritaskan.

Untuk mencapai target rencana selama empat tahun yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja tahunan menggambarkan kondisi yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam periode tahun yang bersangkutan.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan suatu perwujudan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi pemerintah dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Good Governance.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
m. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangungan dan Keuangan Daerah;Peratuaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LembagaTeknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010, Nomor 12);
s. Peraturan Daerah KabupatenLampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
t. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor1);
u. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
v. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

w. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 050/43/KPTS/III.08 /2022 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud penyusunan Laporan ini adalah merupakan wujud pertanggunjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat sebagai instansi pemerintah dalam rangka Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pelayanan Polisi Pamong Pamong Praja, Menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat.

B. TUJUAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung adalah menyajikan data/informasi hasil kegiatan dan sekaligus evaluasi yang mengungkapkan keberhasilan yang dicapai, analisis kinerja serta program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Program kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi program kegiatan yang telah berjalan, sedang dilaksanakan dan rencana program kegiatan pada tahun mendatang dengan sasaran yang hendak dicapai menggunakan indikator serta rencana target capaian serta estimasi prakiraan maju yang merujuk pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BABI. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan FungsiOPD

2.4. Reviw terhadap Rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2. Program Dan Kegiatan

BABIV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan renja Satpol-PP tahun 2023 dan pencapaian renstra Satpol-PP sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2023 Realisasi kinerja sebesar 100% dan perkiraan pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran 68%.

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi kinerja sebanyak 14 Dokumen dan perkiraan pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023 realisasi Kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran 66%
b. Kegiatan Administrasi Keungan Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi kinerja sebanyak 20 Dokumen dan perkiraan pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023 realisasi Kinerja sebesar 73% dan realisasi anggaran 70%
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi kinerja sebesar 100% dan perkiraan pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023 realisasi Kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran 70%
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Realisasi kinerja sebanyak 2 Jenis

dan perkiraan pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023 realisasi Kinerja sebesar 90% dan realisasi anggaran 71%

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Realisasi kinerja sebesar 100% dan perkiraan pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023 realisasi Kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran 68%
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Realisasi kinerja sebanyak 37 Unit dan perkiraan pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023 realisasi Kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran 68%

2. Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum

Pada Tahun 2023 Realisasi kinerja sebesar 20% dan perkiraan pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran 56%.

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 realisasi Kinerja sebanyak 376 kali dan perkiraan pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023 realisasi Kinerja sebesar 88% dan realisasi anggaran 60%
b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2023 realisasi Kinerja sebesar 100% dan perkiraan pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023 realisasi Kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran %

3. Program Pencegahan,Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pada Tahun 2023 Realisasi kinerja sebesar 20% dan perkiraan pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran 64%.

a. KegiatanPencegahan,Pengendalian,Pemadaman ,Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 realisasi Kinerja sebesar 100% dan perkiraan pencapaian renstra sampai dengan Tahun 2023 realisasi Kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran 68%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan, begitu juga sasaran yang ditetapkan dapat dilaksanakan, tingkat pencapaian sasaran ditentukan dari pencapaian masing-masing indikator yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan dana yang berasal dari APBD.

Analisis capaian kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat putusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan / kegagalannya, untuk itu perlu dibuat analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan yang meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.

Analisis ini pula menjelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan menggunakan informasi / data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis (RPD)

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Priode 2023-2026. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang Mendukung dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu dibidang Ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai misi, program dan kegiatan sebagai berikut :

Untuk Menjalankan dan Mewujutkan Tujuan dan Sasaran RPD, Satpol PP melaksanakan dan menjalankan beberapa Program, kegiatan dan Subkegiatan Sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
4. Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat
Subkegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Subkegiatan:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan:

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan Pengawalan
2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Wali Kota

Subkegiatan:

1. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan: Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Subkegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

III. Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan non Kebakaran

Kegiatan: Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan:

1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan: Investigasi Kejadian Kebakaran

Subkegiatan:

1. Investigasi Kejadian Kebakaran. meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Subkegiatan:

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Kegiatan: Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Subkegiatan:

1. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

Faktor-faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja dari Rencana Kerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat secara garis besar didukung oleh adanya penggunaan SDM yang optimal, sarana dan prasarana yang menunjang serta perencanaan kegiatan yang baik dan matang sehingga menghasilkan capaian kinerja yang memuaskan. Selain itu keterlibatan pihak luar seperti tokoh masyarakat, lembaga masyarakat sendiri telah memberikan masukan yang berguna demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dirumuskan isu – isu strategis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun mendatang yang merupakan kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan harus di antisipasi pada kegiatan tahun 2024.

- Pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban secara berencana, bertahap dan terus menerus, dipacu dengan bidang bidang lainnya, karena dengan suasana yang tentram dan tertib maka masyarakat akan bergairah unuk mentaati Peraturan per undang-undangan yang berlaku .
- Upaya-upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .
- Dalam pencapaian suasana tentram dan tertib di masyarakat ada beberapa kendala antara lain :

  a). Peran serta dan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan termasuk lembaga adat guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lampung Barat.

  b). Masih adanya pelanggaran di fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bermobil, gepeng, WTS/Waria, pejaja brosur, pengamen, anak jalanan, kelompok funck, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lampung Barat

  c). Temuan lapangan pada saat operasi

  1.Pelanggaran terhadap perda masih sering terjadi

  2.Kurangnya sosialisasi perda dari aparatur kepada masyarakat

  3.Disiplin pegawai belum optimal dengan masih adanya pegawai yang terjaring dalam operasi disiplin Pegawai.

  e). Jumlah Anggota Satuan Pol PP Kab. Lampung Barat Masih Kurang jika dibandingkan dengan Rasio Jumlah Penduduk dan beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin berat.

f). Sarana Pendukung kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja belum terpenuhi :

1. 1 unit Mobil Dalmas
2. 1 unit truk pengangkut
3. 6 unit Motor Untuk Patroli
4. 3 Unit Mobil pemadam kebakaran

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat di buat berdasarkan penelaahan beberapa bahan kajian diantaranya :

a. Sistem perencanaan pembangunan nasional
b. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
c. Rencana pembangunan jangka menengah nasional
d. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal
e. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Barat
f. Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lampung Barat
g. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Barat
h. Potensi dan permasalahan yang menyangkut Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten lampung Barat

i. Monitoring evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.
j. Musyawarah pembangunan-pembangunan di tingkat kecamatan.
k. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola; keberlanjutan, Adat dan Budaya; Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah; Penanggulangan Kemiskinan; Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur yang terintegrasi; Sumberdaya Alam Berkelanjutan; Lingkungan Hidup dan Kebencanaan; serta Ketentraman ketertiban dan kenyamanan lingkungan Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

a. Program pro rakyat;

b. Program keadilan untuk semua; dan

c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG's)

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan Prioritas pembangunan nasional pada Satuan polisi pamong prajayaitu dibidang ketentraman ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang merupakan tugas dan fungsiSatpol-PP Kabupaten Lampung Barat pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang

konkrit dan terukur merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional

Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban pada Tahun 2025 masih akan di hadapkan pada penertiban dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu Ketentraman dan Ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Lampung Barat. Dalam upaya menciptakan Ketertiban perlindungan Hukum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupaya mengeluarkan aturan-aturan yang merupakan produk Hukum yang wajib ditaati oleh masyarakat dan atau aparatur pemerintah dalam kaitannya dengan operasional pelayanan kepada masyarkat . Terkait dengan upaya mewujudkan pemulihan dan perbaikan dalam hal Ketentraman dan Ketertiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat melaksanakan langkah-langkah yang menyangkut strategi dan arah kebijakan pembangunan di lingkungan masyarakat .

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan.

Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis akan tampak pada pernyataan tujuan, sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kegiatan. Adapun tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

a. Mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian masalah kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda
b. Meningkatkan system koordinasi yang terintergrasi dengan instansi terkait

c. Terwujudnya ketentraman ketertiban umum dan keamanan yang mengarah kepada kondisi Kabupaten Lampung Barat yang kondusif, rukun, damai, nyaman dan sejahtera
d. Terwujudnya kesadaran, kepatuhan hukum masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan Perda dan Perbup
e. Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan aparatur, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga trantibum dan pemberantasan penyakit masyarakat
f. Terwujudnya kesiapsiagaaan, pengendalian bencana dan penanggulangan musibah kebakaran yang handal dan profesional
g. Terwujudnya kualitas penerapan administrasi perkantoran, sarana-prasarana, akuntabilitas kinerja, dan keuangan yang akuntabel, efektif dan efisien

Sasaran.

Dari tujuan yang ditetapkan, maka yang menjadikan sasaran utama dari pelaksanaan tugas kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung barat.

a. Meningkatnya kondusifitas keamanan, ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan
b. Meningkatnya kepatuhan hukum masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan Perda dan Perbup
c. Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan aparatur, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga trantibum dan pemberantasan penyakit masyarakat
d. Meningkatnya kesiapsiagaan, pengendalian bencana dan penanggulangan musibah bencana kebakaran yang handal dan profesional

e. Meningkatnya kualitas pelaksanaan administrasi perkantoran, sarana-prasarana, capaian kinerja dan keungan yang akuntabel, efektif dan efesien

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah tujuan dan sasaran pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat serta berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka disusun program-program yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Berdasarkan 3 Program kebijakan yang telah dirumuskan, maka disusun 14 kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

10. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
11. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
12. Investigasi Kejadian Kebakaran
13. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
14. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Berdasarkan 14 Kegiatan kebijakan yang telah dirumuskan, maka disusun 43 Subkegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Koordinasi dan Penyusunan
10. Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
12. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
13. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
14. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
15. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20. Fasilitasi Kunjungan Tamu
21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

23. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
28. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
33. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
34. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
35. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
36. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
37. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
38. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
39. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
40. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
41. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
42. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
43. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
44. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
45. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
46. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
47. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

48. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
49. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
50. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
51. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
52. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
53. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bias membantu perangkat daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana perangkat daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, disamping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula. Sehubungan diuraikan dalam Bab III, bahwa dalam 4 tahun ke depan tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat.

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2025 ini seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung kesuksesan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat serta merealisasikan target pada urusan wajib pelayanan dasar, untuk lebih jelasnya pada tabel dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut keterkaitan sasaran, indicator sasaran, target yang ditetapkan pada tahun 2025 serta program dan kegiatan pendukungnya disertai dengan sumber pendanaannya

Rencana kerja dan pendanaan ini, nantinya dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja dan rencana aksi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Lampung Barat

Tabel Detail Subkegiatan Tahun 2025

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus SubKegiatan (Tahun)
		Tahun 2025
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan***
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*

1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran***
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan,dan Penanganan BahanBerbahaya dan BeracunKebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota**	***Persentase Tingkat WaktuTanggap (Response TimeRate) Daerah LayananWilayah ManajemenKebakaran (WMK)***

1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran*
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*
1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	***Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian*
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	***Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*

1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)*
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal*
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar***
01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD*
01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD*
01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*

01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response TimeRate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*
01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*
01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*
01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah LayananWilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*
01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*
01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*

01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan*
01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*
01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time***

		Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*
01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*
01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*
01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***

01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan***
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*

1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran***

1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan,dan Penanganan BahanBerbahaya dan BeracunKebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota**	***Persentase Tingkat WaktuTanggap (Response TimeRate) Daerah LayananWilayah ManajemenKebakaran (WMK)***
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran*
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*
1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	***Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian*

1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	***Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)*
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal*
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar***
01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*

01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD*
01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD*
01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan* *DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
01.2.02	**Administrasi Keuangan** **Perangkat Daerah**	***Persentase Penurunan*** ***Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response TimeRate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*

01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*
01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*
01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah LayananWilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*
01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*
01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*

01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*

BAB V
PENUTUP

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 1 point 11 bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksananan Pembangunan Daerah.

Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat dalam menjalani tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan OPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Liwa, 02 Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

HAIZA RINSA, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710405 199101 1 001

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 **SATUAN**

POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. LAMPUNG BARAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU UDIKATIF	SUMBER DANA		TOLAK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*3*	*9*	*10*
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**15.176.300.300,00**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**				**20.587.125.000,00**
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan***		**100 %**	**2.923.578.100,00**	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		***Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan***	**100 %**	**3.601.000.000,00**
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***		**20 %**	**2.613.523.100,00**	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**	**Masyarakat dan Aparatur**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***	**15%**	**3.036.000.000,00**
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	312.255.300,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	425.000.000,00
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Dokumen	61.514.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	1 Dokumen	115.000.000,00
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	300 Orang	191.302.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	300 Orang	126.000.000,00
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Dokumen	60.340.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*	1 Dokumen	115.000.000,00
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	12 laporan	1.988.111.800,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	12 laporan	2.255.000.000,00
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***		**20 %**	**230.830.000,00**		**Masyarakat, Aparatur dan Pelajar**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***	**15%**	**375.000.000,00**
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	12 Laporan	115.830.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat, Aparatur dan Pelajar	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*	12 Laporan	210.000.000,00
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	12 Laporan	115.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat, Aparatur dan Pelajar	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	12 Laporan	165.000.000,00
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***		**20 %**	**79.225.000,00**		**Aparatur PPNS dan ASN**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***	**15%**	**190.000.000,00**
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karie	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	12 Laporan	79.225.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur PPNS dan ASN	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*	12 Laporan	190.000.000,00

1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran***		**100 %**	**2.520.105.600,00**			***Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran***	**100 %**	**4.495.000.000,00**
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**100 %**	**2.338.724.100,00**		**Masyarakat dan Aparatur**	***Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**100 %**	**3.425.000.000,00**
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	12 Laporan	1.938.533.100,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	12 Laporan	2.500.000.000,00

1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Dokumen	48.776.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran*	1 Dokumen	110.000.000,00
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	39 Unit	351.415.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*	39 Unit	815.000.000,00
1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	***Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**100 %**	**38.345.000,00**		**Masyarakat dan Aparatur**	***Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**100 %**	**60.000.000,00**
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Dokumen	38.345.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian*	1 Dokumen	60.000.000,00
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	***Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**100 %**	**84.558.000,00**		**Masyarakat, Aparatur dan Pelajar**	***Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**100 %**	**960.000.000,00**
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pe	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	280 Orang	84.558.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat, Aparatur dan Pelajar	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*	280 Orang	960.000.000,00
1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	***Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**100 %**	**58.478.500,00**		**Masyarakat dan Aparatur**	***Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**100 %**	**50.000.000,00**
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Laporan	58.478.500,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Aparatur	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal*	1 Laporan	50.000.000,00
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar***		**79,60 %**	**9.732.616.600,00**			***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar***	**79,75%**	**12.491.125.000,00**
01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**20 % 100 %**	**38.109.800,00**		**Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**15 % 100 %**	**98.125.000,00**

01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	11 Dokumen Dokumen	20.125.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	11 Dokumen Dokumen	20.125.000,00
01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Dokumen	3.190.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	5.000.000,00
01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Dokumen	2.460.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	5.000.000,00
01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Dokumen	3.080.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	5.000.000,00
01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Dokumen	2.920.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	5.000.000,00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	2 Laporan	1.334.800,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	6.000.000,00
01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	12 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12 Laporan	52.000.000,00
01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**20 % 100 %**	**8.966.663.800,00**		**Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**15 % 100 %**	**10.816.000.000,00**
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	99 Orang/bulan	8.957.983.800,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	99 Orang/bulan	10.800.000.000,00
01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Laporan	2.150.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	5.000.000,00
01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	18 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	18 Laporan	6.000.000,00
01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	2 Dokumen	1.530.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	2 Dokumen	5.000.000,00
01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**20 % 100 %**	**309.035.000,00**		**Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**15 % 100 %**	**686.000.000,00**
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Paket	203.095.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	550.000.000,00
01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Dokumen	33.190.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	38.000.000,00

01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	8 Orang	72.750.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	8 Orang	98.000.000,00
01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**20 % 100 %**	**180.364.000,00**		**Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**15 % 100 %**	**188.000.000,00**
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Paket	8.180.600,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	18.000.000,00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	2 Paket	25.594.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	30.000.000,00
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	6 Dokumen	6.480.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	6 Dokumen	30.000.000,00
01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	12 Laporan	4.675.400,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	15.000.000,00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	24 Laporan	135.434.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	24 Laporan	95.000.000,00
01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**20 % 100 %**	**56.850.000,00**		**Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**15 % 100 %**	**113.000.000,00**
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Unit	35.600.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	15.000.000,00
01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**20 % 100 %**	**71.845.000,00**		**Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**15 % 100 %**	**219.500.000,00**
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	12 Laporan	1.350.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	2.500.000,00
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	12 Laporan	17.300.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	22.000.000,00
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	12 Laporan	53.195.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	195.000.000,00
01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**20 % 100 %**	**109.749.000,00**		**Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**15 % 100 %**	**370.500.000,00**
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	11 Unit	99.750.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	11 Unit	245.500.000,00
01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	1 Unit	9.999.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	125.000.000,00

01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***		**20 % 100 %**	**56.850.000,00**		**Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar**	***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)***	**15 % 100 %**	**113.000.000,00**
01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	25 Unit	21.250.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur ASN Satpol PP dan Damkar	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	25 Unit	98.000.000,00
J U M L A H					**15.176.300.300,00**					**20.587.125.000,00**

Lampiran - Lampiran

RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD. DPRD adalah mitra sejajar Bupati yang memiliki hubungan saling melengkapi, sehingga diharapkan akan lebih memudahkan pelaksanaan paradigma pembangunan dan tercapainya Good Governance.

DPRD sebagai lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat dalam penyampaian aspirasinya, dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, dituntut berperan aktif dalam pelaksanaannya karena hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan tugas dan fungsi itu, maka program dan kegiatan yang dianggarkan Sekretariat DPRD adalah program dan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah seperti program peningkatan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas SDM, juga yang tak kalah penting adalah program dan kegiatan yang mendukung Kinerja DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dimana Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang akan dijadikan acuan bagi organisasi dalam upaya penyelarasan, keserasian, kesinambungan dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

RENSTRA PD akan diturunkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara RI No.5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lapung Barat Tahun 2021 Nomor 14)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dan sebagai landasan pelaksanaan penyelenggaraan fungsi Sekretariat DPRD dalam pencapaian target kinerja dan target indikator Sekretariat DPRD untuk tahun anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Lampung Barat secara umum melalui pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat;
2. Mengukur efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.
3. Mengukur tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
4. Mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat setelah dievaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja.

5. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat;

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025.

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisi analisis terhadap kinerja pelayanan Perangat Daerah.

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi

Perangkat Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi tentang review program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah dibandingkan dengan Program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berisi usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, sosial, keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang lainnya.

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisi tentang kebijakan nasional yang berdampak kepada penyusunan program atau kegiatan Perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memuat rumusan tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif yang direncanakan pada tahun 2024.

BAB. V. PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan. Alokasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp.37.360.246.766 ,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta dua ratus emapt puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp.36.800.091.750,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 98,50 % (Sembilan puluh delapan koma lima puluh persen).

Dari seluruh Sub kegiatan semua terealisasi fisik atau kinerja keluarannya mencapai 100 persen.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pelayanan yang diberikan adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkanlah tersebut, Sekretariat DPRD telah menetapkan Sasaran Strategis, yaitu **“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD”** dengan Indikator Kinerja Utama **“Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD”** dengan Target

95,00. Sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD mengarah pada satu sasaran yaitu meningkatnya pelayanan baik itu pelayanan administrasi, keuangan maupun pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Point	95,00	95,00	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Target 95,00 dengan capaian kinerja 100 %.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Pencapaian atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD, yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dapat terealisasi sesuai target yaitu Predikat BAIK, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Adanya dukungan pendanaan kegiatan yang relatif besar.
2. Meningkatnya kemampuan dan kualitas aparatur Sekretariat DPRD sehingga meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur.
3. Meningkatnya pemahaman anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Namun disisi lain masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain :

1. Pelaksanaan Kegiatan Dewan yang tidak sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan Dewan yang telah ditetapkan. Sehingga terkadang fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kegiatan DPRD tersebut kurang maksimal.
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung kinerja DPRD.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah :

1. Memberikan pemahaman terhadap Anggota DPRD terkait dengan pelaksanaan kegiatan DPRD yang sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan penyampaian informasi kegiatan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD kepada masayarakat.
3. Meningkatkan kompetensi dan profesional aparatur Sekretariat DPRD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan dengan nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk dicarikan pemecahannya.

Isu-isu strategis yang muncul berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat;
2. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi terkait dengan kinerja anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;

3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD;
4. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD;
5. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitas penyusunan progam dan anggaran DPRD yang efektif, efisien dan sistematis.;

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, maka dapat ditetapkan strategi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kesekretariatan dan keuangan;
2. Meningkatkan dukungan layanan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat;
4. Meningkatkan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD**	**80,50**	**25.796.581.780**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD**	**80,50**	**25.796.581.780**	
I.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**11 Dokumen**	**25.524.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**11 Dokumen**	**25.524.000**	**Sesuai kebutuhan**
			Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	**5 Dokumen**	**76.900.000**			**Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun**	**5 Dokumen**	**76.900.000**	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**13 Dokumen**	**101.100.000**			**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13 Dokumen**	**101.100.000**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	25.524.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	25.524.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16.821.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16.821.400	Sesuai kebutuhan

3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.165.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.165.400	Sesuai kebutuhan
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.437.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.437.600	Sesuai kebutuhan
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14.318.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14.318.600	Sesuai kebutuhan
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	14.157.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	14.157.000	Sesuai kebutuhan
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	101.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Liwa, LB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	101.100.000	Sesuai kebutuhan
II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**35 Orang**	**3.046.369.900**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**35 Orang**	**3.046.369.900**	**Sesuai kebutuhan**
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	**12 Dokumen**	**14.560.000**			**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD**	**12 Dokumen**	**14.560.000**	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir	**1 Laporan**	**12.232.600**			**Tersedianya Laporan Keuangan Akhir**	**1 Laporan**	**12.232.600**	

			Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					**Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	**3 Dokumen**	**22.850.000**			**Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**	**3 Dokumen**	**22.850.000**	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	**2 Laporan**	**13.000.000**			**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**2 Laporan**	**13.000.000**	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**1 Dokumen**	**12.302.000**			**Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	**1 Dokumen**	**12.302.000**	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Liwa, LB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3.046.369.900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Liwa, LB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3.046.369.900	Sesuai kebutuhan
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.560.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.560.000	Sesuai kebutuhan
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.232.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.232.600	Sesuai kebutuhan
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	3 Dokumen	22.850.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	3 Dokumen	22.850.000	Sesuai kebutuhan

	Pemeriksaan		Tindak Lanjut Pemeriksaan			Pemeriksaan		Tindak Lanjut Pemeriksaan			
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	13.000.000	Sesuai kebutuhan
6.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.302.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.302.000	Sesuai kebutuhan
III.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**1 Dokumen**	**10.527.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**1 Dokumen**	**10.527.000**	**Sesuai kebutuhan**
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Liwa, LB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.527.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Liwa, LB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.527.000	Sesuai kebutuhan
IV.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**6 Dokumen**	**7.032.500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**6 Dokumen**	**7.032.500**	**Sesuai kebutuhan**
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**16 orang**	**145.520.000**			**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**16 orang**	**145.520.000**	
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	7.032.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Liwa, LB	6 Dokumen	6 Dokumen	7.032.500	Sesuai kebutuhan
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar LB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	16 orang	145.520.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar LB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	16 orang	145.520.000	Sesuai kebutuhan

			dan Pelatihan					dan Pelatihan			
IV.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**13 Paket**	**225.226.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**13 Paket**	**225.226.000**	**Sesuai kebutuhan**
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**3 Paket**	**192.500.000**			**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**3 Paket**	**192.500.000**	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**6 Paket**	**393.152.000**			**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**6 Paket**	**393.152.000**	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**2 Paket**	**34.700.000**			**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**2 Paket**	**34.700.000**	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**29 Paket**	**300.975.000**			**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**29 Paket**	**300.975.000**	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**95 Dokumen**	**2.502.180.000**			**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**95 Dokumen**	**2.502.180.000**	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**1 Laporan**	**208.200.000**			**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**1 Laporan**	**208.200.000**	

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**10 Laporan**	**163.312.000**				**10 Laporan**	**163.312.000**	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Liwa, LB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	225.226.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Liwa, LB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	225.226.000	Sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Liwa, LB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	192.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Liwa, LB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	192.500.000	Sesuai kebutuhan
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Liwa, LB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	393.152.000				6 Paket	393.152.000	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Liwa, LB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	34.700.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Liwa, LB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	34.700.000	Sesuai kebutuhan
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Liwa, LB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	300.975.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Liwa, LB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	300.975.000	Sesuai kebutuhan
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	95 Dokumen	2.502.180.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Liwa, LB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	95 Dokumen	2.502.180.000	Sesuai kebutuhan

7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Liwa, LB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	208.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Laporan	208.200.000	Sesuai kebutuhan
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB dan Luar LB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	163.312.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB dan Luar LB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	163.312.000	Sesuai kebutuhan
V.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**1 Laporan**	**10.900.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Liwa, LB**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**1 Laporan**	**10.900.000**	**Sesuai kebutuhan**
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**1 Laporan**	**166.062.000**			**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**1 Laporan**	**166.062.000**	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**1 Laporan**	**295.757.100**			**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**1 Laporan**	**295.757.100**	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.900.000	Sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	166.062.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	166.062.000	Sesuai kebutuhan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	295.757.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Liwa, LB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	295.757.100	Sesuai kebutuhan
VI.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Liwa, LB**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan**	**3 Unit**	**208.185.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Liwa, LB**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan**	**3 Unit**	**208.185.000**	**Sesuai kebutuhan**

	Pemerintahan Daerah		**Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**			**Pemerintahan Daerah**		**Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**26 Unit**	**343.555.000**			**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**26 Unit**	**343.555.000**	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	**69 Unit**	**21.500.000**			**Jumlah Mebel yang Dipelihara**	**69 Unit**	**21.500.000**	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**33 Unit**	**105.335.500**			**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**33 Unit**	**105.335.500**	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**5 Unit**	**279.344.880**			**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**5 Unit**	**279.344.880**	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Liwa, LB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	208.185.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Liwa, LB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	208.185.000	Sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Liwa, LB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	343.555.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Liwa, LB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	343.555.000	Sesuai kebutuhan
3.	Pemeliharaan Mebel	Liwa, LB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	69 Unit	21.500.000	Pemeliharaan Mebel	Liwa, LB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	69 Unit	21.500.000	Sesuai kebutuhan
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Liwa, LB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	105.335.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Liwa, LB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	105.335.500	Sesuai kebutuhan
5.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Liwa, LB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	5 Unit	279.344.880	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Liwa, LB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	5 Unit	279.344.880	Sesuai kebutuhan

	Bangunan Lainnya		si			Bangunan Lainnya		si			
VII.	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Liwa, LB**	**Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD**	**35 Orang**	**14.922.113.300**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Liwa, LB**	**Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD**	**35 Orang**	**14.922.113.300**	**Sesuai kebutuhan**
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	**4 Paket**	**465.250.000**			**Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan**	**4 Paket**	**465.250.000**	
			Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	**35 Orang**	**452.406.000**			**Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD***	**35 Orang**	**452.406.000**	
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Liwa, LB	Jumlah Anggota DPRD yang Mariner Hak Keuangan DPRD	35 Orang	14.922.113.300	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Liwa, LB	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang	14.922.113.300	Sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Liwa, LB	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	465.250.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Liwa, LB	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	465.250.000	Sesuai kebutuhan
3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Luar LB	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	35 Orang	452.406.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Luar LB	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	35 Orang	452.406.000	Sesuai Kebutuhan
VIII.	**Layanan Administrasi DPRD**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD**	**1 Dokumen**	**77.245.000**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD**	**1 Dokumen**	**77.245.000**	**Sesuai Kebutuhan**
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	**12 Laporan**	**148.765.000**			**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD**	**12 Laporan**	**148.765.000**	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	**3 Paket**	**792.000.000**			**Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan**	**3 Paket**	**792.000.000**	
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	77.245.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	77.245.000	Sesuai Kebutuhan

2.	Fasilitasi Fraksi DPRD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	148.765.000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Liwa, LB	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	148.765.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Liwa, LB	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	792.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Liwa, LB	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	792.000.000	Sesuai Kebutuhan
B.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100.00%**	**18.122.461.394**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100.00%**	**18.122.461.394**	**Sesuai Kebutuhan**
			Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	**100.00%**	**3.856.615.000**			**Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat**	**100.00%**	**3.856.615.000**	
I.	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**	**1 Dokumen**	**15.101.000**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**	**1 Dokumen**	**15.101.000**	**Sesuai Kebutuhan**
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	**5 Dokumen**	**137.643.500**			**Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**	**5 Dokumen**	**137.643.500**	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	**2 Dokumen**	**558.073.000**			**Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi**	**2 Dokumen**	**558.073.000**	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	**-**	**-**			**Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD**	**-**	**-**	
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	15.101.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	15.101.000	Sesuai Kebutuhan

2.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	137.643.500	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	137.643.500	Sesuai Kebutuhan
3.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	558.073.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	558.073.000	Sesuai Kebutuhan
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	-	-	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	-	-	Sesuai Kebutuhan
II.	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS**	**1 Dokumen**	**49.482.500**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Liwa, LB**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS**	**1 Dokumen**	**49.482.500**	**Sesuai Kebutuhan**
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	**1 Dokumen**	**49.482.500**			**Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**	**1 Dokumen**	**49.482.500**	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	**1 Dokumen**	**76.760.000**			**Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD**	**1 Dokumen**	**76.760.000**	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	**1 Dokumen**	**76.760.000**			**Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan**	**1 Dokumen**	**76.760.000**	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	**1 Dokumen**	**76.760.000**			**Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD**	**1 Dokumen**	**76.760.000**	
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	49.482.500	Pembahasan KUA dan PPAS	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	49.482.500	Sesuai Kebutuhan
2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	49.482.500	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	49.482.500	Sesuai Kebutuhan
3.	Pembahasan APBD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	76.760.000	Pembahasan APBD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	76.760.000	Sesuai Kebutuhan
4.	Pembahasan APBD Perubahan	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	76.760.000	Pembahasan APBD Perubahan	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	76.760.000	Sesuai Kebutuhan

5.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 Dokumen	76.760.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Liwa, LB	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 Dokumen	76.760.000	Sesuai Kebutuhan
III.	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Lampung Barat**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum**	**5 Laporan**	**158.397.000**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Lampung Barat**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum**	**5 Laporan**	**158.397.000**	**Sesuai Kebutuhan**
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	**5 Laporan**	**158.381.000**			**Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat**	**5 Laporan**	**158.381.000**	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	**5 Laporan**	**158.711.000**			**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian**	**5 Laporan**	**158.711.000**	
1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Lampung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	158.397.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Lampung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	158.397.000	Sesuai Kebutuhan
2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lampung Barat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 Laporan	158.381.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lampung Barat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 Laporan	158.381.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Lampung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5 Laporan	158.711.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Lampung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5 Laporan	158.711.000	Sesuai Kebutuhan
IV.	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**LB dan Luar LB**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD**	**-**	**-**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**LB dan Luar LB**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD**	**-**	**-**	**Sesuai Kebutuhan**

			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	**6 Dokumen**	**2.583.830.000**			**Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD**	**6 Dokumen**	**2.583.830.000**	
			Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	**12 Dokumen**	**3.401.559.200**			**Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan**	**12 Dokumen**	**3.401.559.200**	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	**6 Orang**	**227.972.894**			**Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli**	**6 Orang**	**227.972.894**	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	**1 Dokumen**	**42.335.000**			**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**	**1 Dokumen**	**42.335.000**	
	Orientasi DPRD	Liwa LB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	Orientasi DPRD	Liwa LB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	Sesuai Kebutuhan
1.	Pendalaman Tugas DPRD	Luar LB	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.583.830.000	Pendalaman Tugas DPRD	Luar LB	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.583.830.000	Sesuai Kebutuhan
2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Liwa LB	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	3.401.559.200	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Liwa LB	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	3.401.559.200	Sesuai Kebutuhan
4.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Liwa LB	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	227.972.894	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Liwa LB	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	227.972.894	Sesuai Kebutuhan
5.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Liwa LB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	42.335.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Liwa LB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	42.335.000	Sesuai Kebutuhan
V.	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Liwa LB	**Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD**	**3 Dokumen**	**204.224.000**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Liwa**	**Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD**	**3 Dokumen**	**204.224.000**	**Sesuai Kebutuhan**
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	**1 Dokumen**	**9.287.000**			**Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun**	**1 Dokumen**	**9.287.000**	

			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	**3 Dokumen**	**3.434.794.000**			**Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses**	**3 Dokumen**	**3.434.794.000**	
1.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Liwa LB	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	204.224.000	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Liwa	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	204.224.000	Sesuai Kebutuhan
2.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Liwa LB	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	9.287.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Liwa	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	9.287.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Pelaksanaan Reses	Liwa LB	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.434.794.000	Pelaksanaan Reses	Liwa	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.434.794.000	Sesuai Kebutuhan
VI.	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Liwa LB**	**Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun**	**-**	**-**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Liwa LB**	**Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun**	**-**	**-**	**Sesuai Kebutuhan**
1.	Penyusunan Kode Etik DPRD	Liwa LB	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	-	Penyusunan Kode Etik DPRD	Liwa LB	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	-	Sesuai Kebutuhan
VII.	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Liwa LB**	**Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun**	**4 Dokumen**	**455.055.800**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Liwa LB**	**Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun**	**4 Dokumen**	**455.055.800**	**Sesuai Kebutuhan**
1.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Liwa LB	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen	455.055.800	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Liwa LB	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen	455.055.800	Sesuai Kebutuhan
VIII.	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Liwa**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**	**13 Dokumen**	**6.419.109.000**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Liwa**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**	**13 Dokumen**	**6.419.109.000**	**Sesuai Kebutuhan**
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	**1 Laporan**	**47.800.000**			**Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun**	**1 Laporan**	**47.800.000**	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	**15 Dokumen**	**141.744.000**			**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah**	**15 Dokumen**	**141.744.000**	

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	**10 Dokumen**	**3.269.199.000**			**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**10 Dokumen**	**3.269.199.000**	
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Liwa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dokumen	6.419.109.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Liwa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dokumen	6.419.109.000	Sesuai Kebutuhan
2.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Liwa	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	47.800.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Liwa	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	47.800.000	Sesuai Kebutuhan
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Liwa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	16 Dokumen	141.744.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Liwa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	16 Dokumen	141.744.000	Sesuai Kebutuhan
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10 Dokumen	3.269.199.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10 Dokumen	3.269.199.000	Sesuai Kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas memberikan pelayanan secara administrasi dan teknis kepada anggota DPRD, tidak memiliki program, kegiatan ataupun sub kegiatan yang merupakan usulan dari masyarakat seperti organisasi agama, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Terkait dengan Kebijakan Nasional, tidak terdapat keterkaitan secara langsung kebijakan nasional terhadap penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Namun, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu kepada RPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 yang berpedoman kepada dokumen perencanaan nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat terkait dan mendukung Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, didasarkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

a. Tujuan

Tujuan dari Renja Sekretariat DPRD adalah menciptakan keselarasan dan konsistensi antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya dengan program dan kegiatan dalam Renstra guna terwujudnya Tujuan Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan yaitu **“Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas”**

b. Sasaran

Adapun sasaran dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2024, yaitu **“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD ”.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi dan kebijakan yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yang direncanakan pada tahun 2025 disusun berdasarkan pada beberapa faktor, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, tujuan ke 4 “Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan

Transparan. Dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan”.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan sebagai panduan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Tuntutan masyarakat akan peningkatan peran dan fungsi lembaga DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah menjadi lembaga yang Profesional, produktif dan berwawasan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, Sekretariat DPRD menyusun rencana program yang terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:

1. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Dari kedua Program yang telah disusun diatas maka Sekretariat DPRD menetapkan beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025, sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terdiri dari 9 (sembilan) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan, yaitu :

I.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

III.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
IV.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
V.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
VI.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Pemeliharaan Mebel
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
VIII.	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
IX.	**Layanan Administrasi DPRD**
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD
2.	Fasilitasi Fraksi DPRD
3.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan, yaitu:

I.	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2.	Pembahasan Rancangan Perda
3.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

II.	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**
1.	Pembahasan KUA dan PPAS
2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3.	Pembahasan APBD
4.	Pembahasan APBD Perubahan
5.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
III.	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**
1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
IV.	**Peningkatan Kapasitas DPRD**
1.	Pendalaman Tugas DPRD
2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
3.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
V.	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
1.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah
2.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3.	Pelaksanaan Reses
VI.	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**
1.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
VII.	**Fasilitasi Tugas DPRD**
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD akan melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal mana kala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan.

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat. Dengan pagu anggaran Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan seperti yang tertuang dalam lampiran Renja ini.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**APBD KABUPATEN**
I.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**APBD KABUPATEN**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD KABUPATEN
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	APBD KABUPATEN
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	APBD KABUPATEN
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	APBD KABUPATEN
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	APBD KABUPATEN
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD KABUPATEN
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD KABUPATEN
II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**APBD KABUPATEN**
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD KABUPATEN
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	APBD KABUPATEN
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	APBD KABUPATEN
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	APBD KABUPATEN
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	APBD KABUPATEN
6.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	APBD KABUPATEN

III.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**APBD KABUPATEN**
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	APBD KABUPATEN
IV.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**APBD KABUPATEN**
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	APBD KABUPATEN
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	APBD KABUPATEN
V.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**APBD KABUPATEN**
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	APBD KABUPATEN
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD KABUPATEN
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APBD KABUPATEN
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD KABUPATEN
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	APBD KABUPATEN
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	APBD KABUPATEN
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	APBD KABUPATEN
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD KABUPATEN
VI.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**APBD KABUPATEN**
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD KABUPATEN
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD KABUPATEN
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD KABUPATEN
VII.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**APBD KABUPATEN**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD KABUPATEN
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD KABUPATEN
3.	Pemeliharaan Mebel	APBD KABUPATEN
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD KABUPATEN
5.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	APBD KABUPATEN
VIII.	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**APBD KABUPATEN**
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	APBD KABUPATEN
2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	APBD KABUPATEN
3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	APBD KABUPATEN

IX.	**Layanan Administrasi DPRD**	**APBD KABUPATEN**
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	APBD KABUPATEN
2.	Fasilitasi Fraksi DPRD	APBD KABUPATEN
3.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	APBD KABUPATEN
B.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**APBD KABUPATEN**
I.	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**APBD KABUPATEN**
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	APBD KABUPATEN
2.	Pembahasan Rancangan Perda	APBD KABUPATEN
3.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	APBD KABUPATEN
II.	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**APBD KABUPATEN**
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	APBD KABUPATEN
2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	APBD KABUPATEN
3.	Pembahasan APBD	APBD KABUPATEN
4.	Pembahasan APBD Perubahan	APBD KABUPATEN
5.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	APBD KABUPATEN
III.	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**APBD KABUPATEN**
1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	APBD KABUPATEN
2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	APBD KABUPATEN
3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	APBD KABUPATEN
IV.	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**APBD KABUPATEN**
1.	Pendalaman Tugas DPRD	APBD KABUPATEN
2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	APBD KABUPATEN
3.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	APBD KABUPATEN
4.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	APBD KABUPATEN
5.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	APBD KABUPATEN
V.	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**APBD KABUPATEN**
1.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	APBD KABUPATEN
2.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	APBD KABUPATEN
3.	Pelaksanaan Reses	APBD KABUPATEN
VI.	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**APBD KABUPATEN**
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	APBD KABUPATEN
VII.	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**APBD KABUPATEN**
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
2.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	APBD KABUPATEN
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	APBD KABUPATEN
4.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	APBD KABUPATEN

BAB V
PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang prima Sekretariat DPRD guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat berusaha mencapai tujuan tersebut melalui program dan kegiatan yang ada guna terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Kami menyadari Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang kami susun ini belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu kritik yang konstruktif akan sangat mendukung perbaikan-perbaikan rencana kerja Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Demikian dan terimakasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

PIRWAN, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690310 199803 1 006

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024

Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 (5+7+9)
	04					URUSAN PENDUKUNG												
	04	02				SEKRETARIAT DPRD												
A	04	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	81,00	114.545.236.470	80,00	21.600.411.455	80,00	21.600.411.455	100	100	80,00	21.600.411.455	
I	04	02	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44 Dokumen	104.500.000	11 Dokumen	14.675.000	11 Dokumen	14.675.000	100	100	11 Dokumen	14.675.000	
							Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	20 Dokumen	308.110.000	5 Dokumen	63.402.500	5 Dokumen	63.402.500	100	100	5 Dokumen	63.402.500	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52 Dokumen	519.210.370	13 Dokumen	99.725.000	13 Dokumen	99.725.000	100	100	13 Dokumen	99.725.000	
1	04	02	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 Dokumen	104.500.000	11 Dokumen	14.675.000	11 Dokumen	14.675.000	100	100	11 Dokumen	14.675.000	SET-DPRD
2	04	02	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	63.500.000	1 Dokumen	10.792.500	1 Dokumen	10.792.500	100	100	1 Dokumen	10.792.500	SET-DPRD
3	04	02	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	61.355.000	1 Dokumen	13.605.000	1 Dokumen	13.605.000	100	100	1 Dokumen	13.605.000	SET-DPRD
4	04	02	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	62.625.000	1 Dokumen	13.125.000	1 Dokumen	13.125.000	100	100	1 Dokumen	13.125.000	SET-DPRD
5	04	02	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	59.760.000	1 Dokumen	13.010.000	1 Dokumen	13.010.000	100	100	1 Dokumen	13.010.000	SET-DPRD
6	04	02	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	60.870.000	1 Laporan	12.870.000	1 Laporan	12.870.000	100	100	1 Laporan	12.870.000	SET-DPRD
7	04	02	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52 Laporan	519.210.370	13 Laporan	99.725.000	13 Laporan	99.725.000	100	100	13 Laporan	99.725.000	SET-DPRD
II	04	02	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	12.240.000.000	37 Orang	2.912.600.600	37 Orang	2.912.600.600	100	100	37 Orang	2.912.600.600	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	55.000.000	12 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	8	100	1 Dokumen	10.000.000	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 (5+7+9)
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**4 Laporan**	**54.300.000**	**1 Laporan**	**10.800.000**	**1 Laporan**	**10.800.000**	**100**	**100**	**1 Laporan**	**10.800.000**	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	**4 Dokumen**	**52.500.000**	**1 Dokumen**	**10.000.000**	**1 Dokumen**	**10.000.000**	**100**	**100**	**1 Dokumen**	**10.000.000**	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**8 Laporan**	**55.000.000**	**2 Laporan**	**11.000.000**	**2 Laporan**	**11.000.000**	**100**	**100**	**2 Laporan**	**11.000.000**	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**4 Dokumen**	**54.000.000**	**1 Dokumen**	**3.948.000**	**1 Dokumen**	**3.948.000**	**100**	**100**	**1 Dokumen**	**3.948.000**	
1	04	02	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	12.240.000.000	37 Orang	2.912.600.600	37 Orang	2.912.600.600	100	100	37 Orang	2.912.600.600	SET-DPRD
2	04	02	01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	55.000.000	12 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	8	100	1 Dokumen	10.000.000	SET-DPRD
3	04	02	01	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	54.300.000	1 Laporan	10.800.000	1 Laporan	10.800.000	100	100	1 Laporan	10.800.000	SET-DPRD
4	04	02	01	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	52.500.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	100	100	3 Dokumen	10.000.000	SET-DPRD
5	04	02	01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	55.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	11.000.000	100	100	2 Laporan	11.000.000	SET-DPRD
6	04	02	01	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	3.948.000	1 Dokumen	3.948.000	100	100	1 Dokumen	3.948.000	SET-DPRD
III	**04**	**02**	**01**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**4 Dokumen**	**45.000.000**	**1 Dokumen**	**5.370.000**	**1 Dokumen**	**5.370.000**	**100**	**100**	**1 Dokumen**	**5.370.000**	
1	**04**	**02**	**01**	**03**	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	**45.000.000**	1 Dokumen	5.370.000	1 Dokumen	5.370.000	100	100	1 Dokumen	5.370.000	SET-DPRD
IV	**04**	**02**	**01**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**24 Dokumen**	55.000.000	**6 Dokumen**	**7.320.000**	**6 Dokumen**	**7.320.000**	**100**	**100**	**6 Dokumen**	**7.320.000**	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**40 Orang**	1.535.350.000	**16 Orang**	**145.520.000**	**16 Orang**	**145.520.000**	**100**	**100**	**16 Orang**	**145.520.000**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 (5+7+9)
1	04	02	01	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	**55.000.000**	6 Dokumen	7.320.000	6 Dokumen	7.320.000	100	100	6 Dokumen	7.320.000	SET-DPRD
2	04	02	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	1.535.350.000	16 Orang	145.520.000	16 Orang	145.520.000	100	100	16 Orang	145.520.000	SET-DPRD
V	**04**	**02**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**57 Paket**	**591.785.000**	**- Paket**	**-**	**- Paket**	**-**	**0**	**0**	**- Paket**	**-**	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**36 Paket**	**2.054.912.500**	**5 Paket**	**143.706.250**	**5 Paket**	**143.706.250**	**100**	**100**	**5 Paket**	**143.706.250**	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**25 Paket**	**935.000.000**	**- Paket**	**-**	**- Paket**	**-**	**0**	**0**	**- Paket**	**-**	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**8 Paket**	**149.160.000**	**2 Paket**	**19.500.000**	**2 Paket**	**19.500.000**	**100**	**100**	**2 Paket**	**19.500.000**	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**138 Paket**	**1.501.100.000**	**28 Paket**	**202.885.000**	**28 Paket**	**202.885.000**	**100**	**100**	**28 Paket**	**202.885.000**	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**125 Dokumen**	**6.604.192.600**	**90 Dokumen**	**1.298.050.000**	**90 Dokumen**	**1.298.050.000**	**100**	**100**	**90 Dokumen**	**1.298.050.000**	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**4 Laporan**	**1.000.000.000**	**1 Laporan**	**109.550.000**	**1 Laporan**	**109.550.000**	**100**	**100**	**1 Laporan**	**109.550.000**	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**48 Laporan**	**4.521.710.000**	**12 Laporan**	**51.372.000**	**12 Laporan**	**51.372.000**	**100**	**100**	**12 Laporan**	**51.372.000**	
1	04	02	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	57 Paket	591.785.000	- Paket	-	- Paket	-	0	0	- Paket	-	SET-DPRD
2	04	02	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	2.054.912.500	5 Paket	143.706.250	5 Paket	143.706.250	100	100	5 Paket	143.706.250	SET-DPRD
3	04	02	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	935.000.000	- Paket	-	- Paket	-	0	0	- Paket	-	SET-DPRD
4	04	02	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	149.160.000	2 Paket	19.500.000	2 Paket	19.500.000	100	100	2 Paket	19.500.000	SET-DPRD
5	04	02	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	138 Paket	1.501.100.000	28 Paket	202.885.000	28 Paket	202.885.000	100	100	28 Paket	202.885.000	SET-DPRD
6	04	02	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	125 Dokumen	6.604.192.600	90 Dokumen	1.298.050.000	90 Dokumen	1.298.050.000	100	100	90 Dokumen	1.298.050.000	SET-DPRD
7	04	02	01	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	109.550.000	1 Laporan	109.550.000	100	100	1 Laporan	109.550.000	SET-DPRD
8	04	02	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	4.521.710.000	12 Laporan	51.372.000	12 Laporan	51.372.000	100	100	12 Laporan	51.372.000	SET-DPRD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 (5+7+9)
VI	**04**	**02**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan**	**3 Unit**	**2.000.000.000**	**- Unit**	**-**	**- Unit**	**-**	**0**	**0**	**- Unit**	**-**	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**45 Paket**	**1.275.000.000**	**- Paket**	**-**	**- Paket**	**-**	**0**	**0**	**- Paket**	**-**	
1	04	02	01	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	2.000.000.000	- Unit	-	- Unit	-	0	0	- Unit	-	SET-DPRD
2	04	02	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Paket	1.275.000.000	- Paket	-	- Paket	-	0	0	- Paket	-	SET-DPRD
VII	**04**	**02**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**4 Laporan**	**56.000.000**	**1 Laporan**	**7.250.000**	**1 Laporan**	**7.250.000**	**100**	**100**	**1 Laporan**	**7.250.000**	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**4 Laporan**	805.000.000	**1 Laporan**	**165.000.000**	**1 Laporan**	**165.000.000**	**100**	**100**	**1 Laporan**	**165.000.000**	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**4 Laporan**	1.425.000.000	**1 Laporan**	**183.195.800**	**1 Laporan**	**183.195.800**	**100**	**100**	**1 Laporan**	**183.195.800**	
1	04	02	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	56.000.000	1 Laporan	7.250.000	1 Laporan	7.250.000	100	100	1 Laporan	7.250.000	SET-DPRD
2	04	02	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	805.000.000	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	165.000.000	100	100	1 Laporan	165.000.000	SET-DPRD
3	04	02	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.425.000.000	1 Laporan	183.195.800	1 Laporan	183.195.800	100	100	1 Laporan	183.195.800	SET-DPRD
VIII	**04**	**02**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**3 Unit**	**1.285.000.000**	**3 Unit**	**137.400.000**	**3 Unit**	**137.400.000**	**100**	**100**	**3 Unit**	**137.400.000**	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**26 Unit**	**1.595.000.000**	**26 Unit**	**305.600.000**	**26 Unit**	**305.600.000**	**100**	**100**	**26 Unit**	**305.600.000**	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	**80 Unit**	**130.000.000**	**29 Unit**	**12.900.000**	**29 Unit**	**12.900.000**	**100**	**100**	**29 Unit**	**12.900.000**	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**45 Unit**	**560.000.000**	**33 Unit**	**87.365.875**	**33 Unit**	**87.365.875**	**100**	**100**	**33 Unit**	**87.365.875**	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**7 Unit**	**3.025.000.000**	**5 Unit**	**100.191.130**	**5 Unit**	**100.191.130**	**100**	**100**	**5 Unit**	**100.191.130**	
1	04	02	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1.285.000.000	3 Unit	137.400.000	3 Unit	137.400.000	100	100	3 Unit	137.400.000	SET-DPRD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 (5+7+9)
2	04	02	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	1.595.000.000	26 Unit	305.600.000	26 Unit	305.600.000	100	100	26 Unit	305.600.000	SET-DPRD
3	04	02	01	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	130.000.000	29 Unit	12.900.000	29 Unit	12.900.000	100	100	29 Unit	12.900.000	SET-DPRD
4	04	02	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	560.000.000	33 Unit	87.365.875	33 Unit	87.365.875	100	100	33 Unit	87.365.875	SET-DPRD
5	04	02	01	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	3.025.000.000	5 Unit	100.191.130	5 Unit	100.191.130	100	100	5 Unit	100.191.130	SET-DPRD
IX	**04**	**02**	**01**	**15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD**	**35 Orang**	**61.150.000.000**	**35 Orang**	**14.539.113.300**	**35 Orang**	**14.539.113.300**	**100**	**100**	**35 Orang**	**14.539.113.300**	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	**19 Paket**	**2.766.250.000**	**- Paket**	**-**	**- Paket**	**-**	**0**	**0**	**- Paket**	**-**	
							Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	**35 Orang**	**1.360.156.000**	**- Orang**	**-**	**- Orang**	**-**	**0**	**0**	**- Orang**	**-**	
1	04	02	01	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang	61.150.000.000	35 Orang	14.539.113.300	35 Orang	14.539.113.300	100	100	35 Orang	14.539.113.300	SET-DPRD
2	04	02	01	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	19 Paket	2.766.250.000	- Paket	-	- Paket	-	0	0	- Paket	-	SET-DPRD
3	04	02	01	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	35 Orang	1.360.156.000	- Orang	-	- Orang	-	0	0	- Orang	-	SET-DPRD
X	**04**	**02**	**01**	**16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD**	**5 Dokumen**	**630.000.000**	**1 Dokumen**	**42.980.000**	**1 Dokumen**	**42.980.000**	**100**	**100**	**1 Dokumen**	**42.980.000**	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	**4 Laporan**	**695.000.000**	**1 Laporan**	**99.635.000**	**1 Laporan**	**99.635.000**	**100**	**100**	**1 Laporan**	**99.635.000**	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	**12 Paket**	**3.352.000.000**	**3 Paket**	**800.356.000**	**3 Paket**	**800.356.000**	**100**	**100**	**3 Paket**	**800.356.000**	
1	04	02	01	16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5 Dokumen	630.000.000	1 Dokumen	42.980.000	1 Dokumen	42.980.000	100	100	1 Dokumen	42.980.000	SET-DPRD
2	04	02	01	16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan	695.000.000	1 Laporan	99.635.000	1 Laporan	99.635.000	100	100	1 Laporan	99.635.000	SET-DPRD
3	04	02	01	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	3.352.000.000	3 Paket	800.356.000	3 Paket	800.356.000	100	100	3 Paket	800.356.000	SET-DPRD
B	**04**	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100 %**	**107.495.909.250**	**100 %**	**10.777.365.200**	**100 %**	**10.777.365.200**	**100**	**100**	**100 %**	**10.777.365.200**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 (5+7+9)
							Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	**100 %**	**12.675.443.000**	**100 %**	**1.870.147.000**	**100 %**	**1.870.147.000**	**100**	**100**	**100 %**	**1.870.147.000**	
I	**04**	**02**	**02**	**01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**	**4 Dokumen**	**65.500.000**	**1 Dokumen**	**10.788.000**	**1 Dokumen**	**10.788.000**	100	100	**1 Dokumen**	**10.788.000**	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	**28 Dokumen**	**595.000.000**	**7 Dokumen**	**60.590.000**	**7 Dokumen**	**60.590.000**	100	100	**7 Dokumen**	**60.590.000**	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	**8 Dokumen**	**3.405.000.000**	**1 Dokumen**	**237.152.000**	**1 Dokumen**	**237.152.000**	100	100	**1 Dokumen**	**237.152.000**	
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	**1 Dokumen**	**200.000.000**	**- Dokumen**	-	**- Dokumen**	-	0	0	**- Dokumen**	-	SET-DPRD
1	04	02	02	01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen	65.500.000	1 Dokumen	10.788.000	1 Dokumen	10.788.000	100	100	1 Dokumen	10.788.000	SET-DPRD
2	04	02	02	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	28 Dokumen	595.000.000	7 Dokumen	60.590.000	7 Dokumen	60.590.000	100	100	7 Dokumen	60.590.000	SET-DPRD
3	04	02	02	01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	3.405.000.000	2 Dokumen	237.152.000	2 Dokumen	237.152.000	100	100	2 Dokumen	237.152.000	SET-DPRD
4	04	02	02	01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0	0	0 Dokumen	-	SET-DPRD
II	**04**	**02**	**02**	**02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS**	**4 Dokumen**	**137.500.000**	**1 Dokumen**	**29.187.500**	**1 Dokumen**	**29.187.500**	**100**	**100**	**1 Dokumen**	**29.187.500**	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	**4 Dokumen**	**137.500.000**	**1 Dokumen**	**29.187.500**	**1 Dokumen**	**29.187.500**	**100**	**100**	**1 Dokumen**	**29.187.500**	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	**4 Dokumen**	**282.000.000**	**1 Dokumen**	**46.780.000**	**1 Dokumen**	**46.780.000**	**100**	**100**	**1 Dokumen**	**46.780.000**	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	**4 Dokumen**	**285.260.000**	**1 Dokumen**	**47.405.000**	**1 Dokumen**	**47.405.000**	**100**	**100**	**1 Dokumen**	**47.405.000**	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	**4 Dokumen**	**282.000.000**	**1 Dokumen**	**47.155.000**	**1 Dokumen**	**47.155.000**	**100**	**100**	**1 Dokumen**	**47.155.000**	
1	04	02	02	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 4 Dokumen	137.500.000	1 Dokumen	29.187.500	1 Dokumen	29.187.500	100	100	1 Dokumen	29.187.500	SET-DPRD
2	04	02	02	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 4 Dokumen	137.500.000	1 Dokumen	29.187.500	1 Dokumen	29.187.500	100	100	1 Dokumen	29.187.500	SET-DPRD
3	04	02	02	02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	4 4 Dokumen	282.000.000	1 Dokumen	46.780.000	1 Dokumen	46.780.000	100	100	1 Dokumen	46.780.000	SET-DPRD
4	04	02	02	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 4 Dokumen	285.260.000	1 Dokumen	47.405.000	1 Dokumen	47.405.000	100	100	1 Dokumen	47.405.000	SET-DPRD
5	04	02	02	02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	4 4 Dokumen	282.000.000	1 Dokumen	47.155.000	1 Dokumen	47.155.000	100	100	1 Dokumen	47.155.000	SET-DPRD
III	**04**	**02**	**02**	**03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum**	**20 Laporan**	**835.000.000**	**3 Laporan**	**99.674.900**	**3 Laporan**	**99.674.900**	**100**	**100**	**3 Laporan**	**99.674.900**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 (5+7+9)
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	**20 Laporan**	**835.000.000**	**3 Laporan**	**99.729.000**	**3 Laporan**	**99.729.000**	**100**	**100**	**3 Laporan**	**99.729.000**	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	**20 Laporan**	**835.000.000**	**3 Laporan**	**99.729.000**	**3 Laporan**	**99.729.000**	**100**	**100**	**3 Laporan**	**99.729.000**	
1	04	02	02	02	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	835.000.000	3 Laporan	99.674.900	3 Laporan	99.674.900	100	100	3 Laporan	99.674.900	SET-DPRD
2	04	02	02	02	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	835.000.000	3 Laporan	99.729.000	3 Laporan	99.729.000	100	100	3 Laporan	99.729.000	SET-DPRD
3	04	02	02	02	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	835.000.000	3 Laporan	99.729.000	3 Laporan	99.729.000	100	100	3 Laporan	99.729.000	SET-DPRD
IV	**04**	**02**	**02**	**04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD**	**1 Dokumen**	**450.000.000**	**0 Dokumen**	**-**	**0 Dokumen**	**-**	**0**	**0**	**0 Dokumen**	**-**	
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	**24 Dokumen**	**14.700.000.000**	**4 Dokumen**	**1.760.000.000**	**4 Dokumen**	**1.760.000.000**	**100**	**100**	**4 Dokumen**	**1.760.000.000**	
							Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	**48 Dokumen**	**10.912.000.000**	**12 Dokumen**	**1.670.656.000**	**12 Dokumen**	**1.670.656.000**	**100**	**100**	**12 Dokumen**	**1.670.656.000**	
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	**24 Orang**	**1.285.000.000**	**6 Orang**	**145.052.300**	**6 Orang**	**145.052.300**	**100**	**100**	**6 Orang**	**145.052.300**	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	**4 Dokumen**	**13.519.287.250**	**1 Dokumen**	**46.140.000**	**1 Dokumen**	**46.140.000**	**100**	**100**	**1 Dokumen**	**46.140.000**	
1	04	02	02	04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	450.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0	100	0 Dokumen	-	SET-DPRD
2	04	02	02	04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24 Dokumen	14.700.000.000	4 Dokumen	1.760.000.000	4 Dokumen	1.760.000.000	100	100	4 Dokumen	1.760.000.000	SET-DPRD
3	04	02	02	04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	48 Dokumen	10.912.000.000	12 Dokumen	1.670.656.000	12 Dokumen	1.670.656.000	100	100	12 Dokumen	1.670.656.000	SET-DPRD
4	04	02	02	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	24 Orang	1.285.000.000	6 Orang	145.052.300	6 Orang	145.052.300	100	100	6 Orang	145.052.300	SET-DPRD
5	04	02	02	04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	13.519.287.250	1 Dokumen	46.140.000	1 Dokumen	46.140.000	100	100	1 Dokumen	46.140.000	SET-DPRD
V	**04**	**02**	**02**	**05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD**	**18 Laporan**	**1.665.750.000**	**3 Laporan**	**176.645.000**	**3 Laporan**	**176.645.000**	**100**	**100**	**3 Laporan**	**176.645.000**	
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	**4 Dokumen**	**225.000.000**	**1 Dokumen**	**4.717.000**	**1 Dokumen**	**4.717.000**	**100**	**100**	**1 Dokumen**	**4.717.000**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 (5+7+9)
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	**11 Dokumen**	**12.052.000.000**	**3 Dokumen**	**2.300.001.000**	**3 Dokumen**	**2.300.001.000**	**100**	**100**	**3 Dokumen**	**2.300.001.000**	
1	04	02	02	05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	18 Laporan	1.665.750.000	3 Laporan	176.645.000	3 Laporan	176.645.000	100	100	3 Laporan	176.645.000	SET-DPRD
2	04	02	02	05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	4.717.000	1 Dokumen	4.717.000	100	100	1 Dokumen	4.717.000	SET-DPRD
3	04	02	02	05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	11 Dokumen	12.052.000.000	3 Dokumen	2.300.001.000	3 Dokumen	2.300.001.000	100	100	3 Dokumen	2.300.001.000	SET-DPRD
VI	**04**	**02**	**02**	**06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD**	**2 Dokumen**	**190.098.000**	**-** **Dokumen**	**-**	**-** **Dokumen**	**-**	**0**	**0**	**-** **Dokumen**	**-**	
1	04	02	02	06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	190.098.000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0	0	- Dokumen	-	SET-DPRD
VII	**04**	**02**	**02**	**07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun**	**16 Dokumen**	**1.763.443.000**	**4 Dokumen**	**199.491.000**	**4 Dokumen**	**199.491.000**	**100**	**100**	**4 Dokumen**	**199.491.000**	
1	04	02	02	07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	16 Dokumen	1.763.443.000	4 Dokumen	199.491.000	4 Dokumen	199.491.000	100	100	4 Dokumen	199.491.000	SET-DPRD
VIII	**04**	**02**	**02**	**08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**	**62 Dokumen**	**30.415.000.000**	**8 Dokumen**	**2.739.310.000**	**8 Dokumen**	**2.739.310.000**	100	100	**8 Dokumen**	**2.739.310.000**	
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	**4 Laporan**	**177.000.000**	**1 Laporan**	**32.968.000**	**1 Laporan**	**32.968.000**	100	100	**1 Laporan**	**32.968.000**	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	**64 Dokumen**	**915.000.000**	**16 Dokumen**	**131.579.000**	**16 Dokumen**	**131.579.000**	100	100	**16 Dokumen**	**131.579.000**	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	**49 Dokumen**	**24.007.014.000**	**9 Dokumen**	**2.633.575.000**	**9 Dokumen**	**2.633.575.000**	100	100	**9 Dokumen**	**2.633.575.000**	
1	04	02	02	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	62 Dokumen	30.415.000.000	8 Dokumen	2.739.310.000	8 Dokumen	2.739.310.000	100	100	8 Dokumen	2.739.310.000	SET-DPRD
2	04	02	02	08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4 Laporan	177.000.000	1 Laporan	32.968.000	1 Laporan	32.968.000	100	100	1 Laporan	32.968.000	SET-DPRD
3	04	02	02	08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	16 Dokumen	915.000.000	16 Dokumen	131.579.000	16 Dokumen	131.579.000	100	100	16 Dokumen	131.579.000	SET-DPRD
4	04	02	02	08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	49 Dokumen	24.007.014.000	9 Dokumen	2.633.575.000	9 Dokumen	2.633.575.000	100	100	9 Dokumen	2.633.575.000	SET-DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 (5+7+9)

37.360.246.766
36.800.091.750
98,501

Keterangan
11

Keterangan
11

Keterangan
11

Keterangan
11

Keterangan
11

Keterangan
11

Keterangan
11

Keterangan
11

Keterangan
11

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024

Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 ÷ 8		11 = (10/5)*100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	04					URUSAN PENDUKUNG																	
	04	02				SEKRETARIAT DPRD																	
A	04	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	81,00 Point	114.545.236.470	80,61 Point	21.309.444.260	80,50 Point	23.736.552.305	80,50 Point	23.736.552.305	100,00	100,00	80,61 Ponit	45.045.996.565	99,52 %	39,33 %		
I	04	02	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44 Dokumen	104.500.000	11 Dokumen	14.675.000	11 Dokumen	23.205.000	11 Dokumen	23.205.000	100,00	100,00	22 Dokumen	37.880.000	50,00 %	36,25 %		
							Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	20 Dokumen	308.110.000	5 Dokumen	63.402.500	5 Dokumen	69.909.400	5 Dokumen	69.909.400	100,00	100,00	10 Dokumen	133.311.900	50,00 %	43,27 %		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52 Dokumen	519.210.370	13 Dokumen	99.506.000	13 Dokumen	99.725.000	13 Dokumen	99.725.000	100,00	100,00	26 Dokumen	199.231.000	50,00 %	38,37 %		
1	04	02	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 Dokumen	104.500.000	11 Dokumen	14.675.000	11 Dokumen	23.205.000	11 Dokumen	23.205.000	100,00	100,00	22 Dokumen	37.880.000	48,89 %	36,25 %	SET-DPRD	
2	04	02	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	63.500.000	1 Dokumen	10.792.500	1 Dokumen	15.292.400	1 Dokumen	15.292.400	100,00	100,00	2 Dokumen	26.084.900	50,00 %	41,08 %	SET-DPRD	
3	04	02	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	61.355.000	1 Dokumen	13.605.000	1 Dokumen	15.605.000	1 Dokumen	15.605.000	100,00	100,00	2 Dokumen	29.210.000	50,00 %	47,61 %	SET-DPRD	
4	04	02	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	62.625.000	1 Dokumen	13.125.000	1 Dokumen	13.125.000	1 Dokumen	13.125.000	100,00	100,00	2 Dokumen	26.250.000	50,00 %	41,92 %	SET-DPRD	
5	04	02	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	59.760.000	1 Dokumen	13.010.000	1 Dokumen	13.017.000	1 Dokumen	13.017.000	100,00	100,00	2 Dokumen	26.027.000	50,00 %	43,55 %	SET-DPRD	
6	04	02	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	60.870.000	1 Laporan	12.870.000	1 Laporan	12.870.000	1 Laporan	12.870.000	100,00	100,00	2 Laporan	25.740.000	50,00 %	42,29 %	SET-DPRD	
7	04	02	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52 Laporan	519.210.370	13 Laporan	99.506.000	13 Laporan	99.725.000	13 Laporan	99.725.000	100,00	100,00	26 Laporan	199.231.000	50,00 %	38,37 %	SET-DPRD	
II	04	02	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	12.240.000.000	35 Orang	2.767.645.133	35 Orang	3.046.369.900	35 Orang	3.046.369.900	100,00	100,00	35 Orang	5.814.015.033	87,50 %	47,50 %		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	55.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	100,00	100,00	24 Dokumen	20.000.000	50,00 %	36,36 %		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	54.300.000	1 Laporan	10.800.000	1 Laporan	10.800.000	1 Laporan	10.800.000	100,00	100,00	2 Laporan	21.600.000	50,00 %	39,78 %		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	18.500.000	1 Dokumen	18.500.000	100,00	100,00	2 Dokumen	28.500.000	50,00 %	54,29 %		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	55.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	11.000.000	100,00	100,00	4 Laporan	22.000.000	50,00 %	40,00 %		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = (10/5)*100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**4 Dokumen**	**54.000.000**	**1 Dokumen**	**3.948.000**	**1 Dokumen**	**9.448.000**	**1 Dokumen**	**9.448.000**	**100,00**	**100,00**	**2 Dokumen**	**13.396.000**	**50,00 %**	**24,81 %**		
1	04	02	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	12.240.000.000	35 Orang	2.767.645.133	35 Orang	3.046.369.900	35 Orang	3.046.369.900	100,00	100,00	35 Orang	5.814.015.033	87,50 %	47,50 %	SET-DPRD	
2	04	02	01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	55.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	100,00	100,00	24 Dokumen	20.000.000	50,00 %	36,36 %	SET-DPRD	
3	04	02	01	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	54.300.000	1 Laporan	10.800.000	1 Laporan	10.800.000	1 Laporan	10.800.000	100,00	100,00	2 Laporan	21.600.000	50,00 %	39,78 %	SET-DPRD	
4	04	02	01	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	52.500.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	18.500.000	3 Dokumen	18.500.000	100,00	100,00	6 Dokumen	28.500.000	50,00 %	54,29 %	SET-DPRD	
5	04	02	01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	55.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	11.000.000	100,00	100,00	4 Laporan	22.000.000	50,00 %	40,00 %	SET-DPRD	
6	04	02	01	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	54.000.000	1 Dokumen	3.948.000	1 Dokumen	9.448.000	1 Dokumen	9.448.000	100,00	100,00	2 Dokumen	13.396.000	50,00 %	24,81 %	SET-DPRD	
III	**04**	**02**	**01**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**4 Dokumen**	**45.000.000**	**1 Dokumen**	**5.370.000**	**1 Dokumen**	**9.570.000**	**1 Dokumen**	**9.570.000**	**100,00**	**100,00**	**2 Dokumen**	**14.940.000**	**50,00 %**	**33,20 %**		
1	**04**	**02**	**01**	**03**	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	5.370.000	1 Dokumen	9.570.000	1 Dokumen	9.570.000	100,00	100,00	2 Dokumen	14.940.000	50,00 %	33,20 %	SET-DPRD	
IV	**04**	**02**	**01**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**24 Dokumen**	**55.000.000**	**6 Dokumen**	**7.320.000**	**6 Dokumen**	**7.320.000**	**6 Dokumen**	**7.320.000**	**100,00**	**100,00**	**12 Dokumen**	**14.640.000**	**50,00 %**	**26,62 %**		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**40 Orang**	**1.535.350.000**	**20 Orang**	**186.006.000**	**16 Orang**	**145.520.000**	**16 Orang**	**145.520.000**	**100,00**	**100,00**	**36 Orang**	**331.526.000**	**90,00 %**	**21,59 %**		
1	04	02	01	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	55.000.000	6 Dokumen	7.320.000	6 Dokumen	7.320.000	6 Dokumen	7.320.000	100,00	100,00	12 Dokumen	14.640.000	50,00 %	26,62 %	SET-DPRD	
2	04	02	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	1.535.350.000	20 Orang	186.006.000	16 Orang	145.520.000	16 Orang	145.520.000	100,00	100,00	36 Orang	331.526.000	90,00 %	21,59 %	SET-DPRD	
V	**04**	**02**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**57 Paket**	**591.785.000**	**12 Paket**	**15.924.000**	**12 Paket**	**27.226.000**	**12 Paket**	**27.226.000**	**100,00**	**100,00**	**24 Paket**	**43.150.000**	**42,11 %**	**7,29 %**		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**36 Paket**	**2.054.912.500**	**5 Paket**	**143.100.000**	**2 Paket**	**83.500.000**	**2 Paket**	**83.500.000**	**100,00**	**100,00**	**7 Paket**	**226.600.000**	**19,44 %**	**11,03 %**		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**25 Paket**	**935.000.000**	**- Paket**	**-**	**- Paket**	**-**	**- Paket**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0 Paket**	**-**	**0,00 %**	**- ,00 %**		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**8 Paket**	**149.160.000**	**2 Paket**	**20.325.000**	**2 Paket**	**34.750.000**	**2 Paket**	**34.750.000**	**100,00**	**100,00**	**4 Paket**	**55.075.000**	**50,00 %**	**36,92 %**		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**138 Paket**	**1.501.100.000**	**28 Paket**	**202.885.000**	**25 Paket**	**202.885.000**	**25 Paket**	**202.885.000**	**100,00**	**100,00**	**53 Paket**	**405.770.000**	**38,41 %**	**27,03 %**		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**125 Dokumen**	**6.604.192.600**	**90 Dokumen**	**1.319.650.000**	**90 Dokumen**	**1.298.025.000**	**90 Dokumen**	**1.298.025.000**	**100,00**	**100,00**	**90 Dokumen**	**2.617.675.000**	**72,00 %**	**39,64 %**		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**4 Laporan**	**1.000.000.000**	**1 Laporan**	**109.550.000**	**1 Laporan**	**129.590.400**	**1 Laporan**	**129.590.400**	**100,00**	**100,00**	**2 Laporan**	**239.140.400**	**50,00 %**	**23,91 %**		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = (10/5)*100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**48 Laporan**	**4.521.710.000**	**12 Laporan**	**70.823.600**	**12 Laporan**	**146.312.000**	**12 Laporan**	**146.312.000**	**100,00**	**100,00**	**24 Laporan**	**217.135.600**	**50,00 %**	**4,80 %**		
1	04	02	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	57 Paket	591.785.000	12 Paket	15.924.000	12 Paket	27.226.000	12 Paket	27.226.000	100,00	100,00	24 Paket	43.150.000	42,11 %	7,29 %	SET-DPRD	
2	04	02	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	2.054.912.500	5 Paket	143.100.000	2 Paket	83.500.000	2 Paket	83.500.000	100,00	100,00	7 Paket	226.600.000	19,44 %	11,03 %	SET-DPRD	
3	04	02	01	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	935.000.000	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	0,00	0,00	0 Paket	-	0,00 %	- ,00 %	SET-DPRD	
4	04	02	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	149.160.000	2 Paket	20.325.000	2 Paket	34.750.000	2 Paket	34.750.000	100,00	100,00	4 Paket	55.075.000	50,00 %	36,92 %	SET-DPRD	
5	04	02	01	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	138 Paket	1.501.100.000	28 Paket	202.885.000	25 Paket	202.885.000	25 Paket	202.885.000	100,00	100,00	53 Paket	405.770.000	38,41 %	27,03 %	SET-DPRD	
6	04	02	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	125 Dokumen	6.604.192.600	90 Dokumen	1.319.650.000	90 Dokumen	1.298.025.000	90 Dokumen	1.298.025.000	100,00	100,00	90 Dokumen	2.617.675.000	72,00 %	39,64 %	SET-DPRD	
7	04	02	01	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	109.550.000	1 Laporan	129.590.400	1 Laporan	129.590.400	100,00	100,00	2 Laporan	239.140.400	50,00 %	23,91 %	SET-DPRD	
8	04	02	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	4.521.710.000	12 Laporan	70.823.600	12 Laporan	146.312.000	12 Laporan	146.312.000	100,00	100,00	24 Laporan	217.135.600	50,00 %	4,80 %	SET-DPRD	
VI	**04**	**02**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan**	**3 Unit**	**2.000.000.000**	**- Unit**	**-**	**- Unit**	**-**	**- Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0 Unit**	**-**	**0,00 %**	**- ,00 %**		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**45 Paket**	**1.275.000.000**	**- Paket**	**-**	**- Paket**	**-**	**- Paket**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0 Paket**	**-**	**0,00 %**	**- ,00 %**		
1	04	02	01	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	2.000.000.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	0 Unit	-	0,00 %	- ,00 %	SET-DPRD	
2	04	02	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Paket	1.275.000.000	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	0,00	0,00	0 Paket	-	0,00 %	- ,00 %	SET-DPRD	
VII	**04**	**02**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**4 Laporan**	**56.000.000**	**1 Laporan**	**7.250.000**	**1 Laporan**	**10.900.000**	**1 Laporan**	**10.900.000**	**100,00**	**100,00**	**2 Laporan**	**18.150.000**	**50,00 %**	**32,41 %**		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**4 Laporan**	**805.000.000**	**1 Laporan**	**159.812.496**	**1 Laporan**	**146.269.000**	**1 Laporan**	**146.269.000**	**100,00**	**100,00**	**2 Laporan**	**306.081.496**	**50,00 %**	**38,02 %**		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**4 Laporan**	**1.425.000.000**	**1 Laporan**	**160.188.500**	**1 Laporan**	**169.995.800**	**1 Laporan**	**169.995.800**	**100,00**	**100,00**	**2 Laporan**	**330.184.300**	**50,00 %**	**23,17 %**		
1	04	02	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	56.000.000	1 Laporan	7.250.000	1 Laporan	10.900.000	1 Laporan	10.900.000	100,00	100,00	2 Laporan	18.150.000	50,00 %	32,41 %	SET-DPRD	
2	04	02	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	805.000.000	1 Laporan	159.812.496	1 Laporan	146.269.000	1 Laporan	146.269.000	100,00	100,00	2 Laporan	306.081.496	50,00 %	38,02 %	SET-DPRD	
3	04	02	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.425.000.000	1 Laporan	160.188.500	1 Laporan	169.995.800	1 Laporan	169.995.800	100,00	100,00	2 Laporan	330.184.300	50,00 %	23,17 %	SET-DPRD	
VIII	**04**	**02**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**3 Unit**	**1.285.000.000**	**3 Unit**	**128.000.000**	**3 Unit**	**137.400.000**	**3 Unit**	**137.400.000**	**100,00**	**100,00**	**3 Unit**	**265.400.000**	**100,00 %**	**20,65 %**		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**26 Unit**	**1.595.000.000**	**26 Unit**	**174.494.000**	**26 Unit**	**163.300.000**	**26 Unit**	**163.300.000**	**100,00**	**100,00**	**26 Unit**	**337.794.000**	**100,00 %**	**21,18 %**		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = (10/5)*100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	**80 Unit**	**130.000.000**	**29 Unit**	**12.900.000**	**29 Unit**	**12.900.000**	**29 Unit**	**12.900.000**	**100,00**	**100,00**	**58 Unit**	**25.800.000**	**72,50 %**	**19,85 %**		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**45 Unit**	**560.000.000**	**33 Unit**	**82.121.300**	**33 Unit**	**87.365.375**	**33 Unit**	**87.365.375**	**100,00**	**100,00**	**66 Unit**	**169.486.675**	**146,67 %**	**30,27 %**		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**7 Unit**	**3.025.000.000**	**5 Unit**	**174.578.069**	**5 Unit**	**100.191.130**	**5 Unit**	**100.191.130**	**100,00**	**100,00**	**7 Unit**	**274.769.199**	**100,00 %**	**9,08 %**		
1	04	02	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1.285.000.000	3 Unit	128.000.000	3 Unit	137.400.000	3 Unit	137.400.000	100,00	100,00	3 Unit	265.400.000	100,00 %	20,65 %	SET-DPRD	
2	04	02	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	1.595.000.000	26 Unit	174.494.000	26 Unit	163.300.000	26 Unit	163.300.000	100,00	100,00	26 Unit	337.794.000	100,00 %	21,18 %	SET-DPRD	
3	04	02	01	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	130.000.000	29 Unit	12.900.000	29 Unit	12.900.000	29 Unit	12.900.000	100,00	100,00	58 Unit	25.800.000	72,50 %	19,85 %	SET-DPRD	
4	04	02	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	560.000.000	33 Unit	82.121.300	33 Unit	87.365.375	33 Unit	87.365.375	100,00	100,00	66 Unit	169.486.675	146,67 %	30,27 %	SET-DPRD	
5	04	02	01	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	3.025.000.000	5 Unit	174.578.069	5 Unit	100.191.130	5 Unit	100.191.130	100,00	100,00	7 Unit	274.769.199	100,00 %	9,08 %	SET-DPRD	
IX	**04**	**02**	**01**	**15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD**	**35 Orang**	**61.150.000.000**	**35 Orang**	**############**	**35 Orang**	**14.922.113.300**	**35 Orang**	**14.922.113.300**	**100,00**	**100,00**	**35 Orang**	**29.054.171.562**	**100,00 %**	**47,51 %**		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	**19 Paket**	**2.766.250.000**	**- Paket**	**-**	**6 Paket**	**1.064.063.000**	**6 Paket**	**1.064.063.000**	**100,00**	**100,00**	**3 Paket**	**1.064.063.000**	**15,79 %**	**38,47 %**		
							Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	**35 Orang**	**1.360.156.000**	**35 Orang**	**263.601.200**	**35 Orang**	**301.656.000**	**35 Orang**	**301.656.000**	**100,00**	**100,00**	**35 Orang**	**565.257.200**	**50,00 %**	**41,56 %**		
1	04	02	01	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang	61.150.000.000	35 Orang	############	35 Orang	14.922.113.300	35 Orang	14.922.113.300	100,00	100,00	35 Orang	29.054.171.562	50,00 %	47,51 %	SET-DPRD	
2	04	02	01	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	19 Paket	2.766.250.000	- Paket	-	6 Paket	1.064.063.000	6 Paket	1.064.063.000	100,00	100,00	3 Paket	1.064.063.000	15,79 %	38,47 %	SET-DPRD	
3	04	02	01	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	35 Orang	1.360.156.000	35 Orang	263.601.200	35 Orang	301.656.000	35 Orang	301.656.000	100,00	100,00	35 Orang	565.257.200	50,00 %	41,56 %	SET-DPRD	
X	**04**	**02**	**01**	**16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD**	**5 Dokumen**	**630.000.000**	**1 Dokumen**	**42.519.200**	**2 Dokumen**	**302.158.000**	**2 Dokumen**	**302.158.000**	**100,00**	**100,00**	**3 Dokumen**	**344.677.200**	**60,00 %**	**54,71 %**		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	**4 Laporan**	**695.000.000**	**1 Laporan**	**99.635.000**	**1 Laporan**	**143.335.000**	**1 Laporan**	**143.335.000**	**100,00**	**100,00**	**2 Laporan**	**242.970.000**	**50,00 %**	**34,96 %**		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	**12 Paket**	**3.352.000.000**	**3 Paket**	**800.356.000**	**3 Paket**	**791.250.000**	**3 Paket**	**791.250.000**	**100,00**	**100,00**	**6 Paket**	**1.591.606.000**	**50,00 %**	**47,48 %**		
1	04	02	01	16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5 Dokumen	630.000.000	1 Dokumen	42.519.200	2 Dokumen	302.158.000	2 Dokumen	302.158.000	100,00	100,00	3 Dokumen	344.677.200	60,00 %	54,71 %	SET-DPRD	
2	04	02	01	16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan	695.000.000	1 Laporan	99.635.000	1 Laporan	143.335.000	1 Laporan	143.335.000	100,00	100,00	2 Laporan	242.970.000	50,00 %	34,96 %	SET-DPRD	
3	04	02	01	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	3.352.000.000	3 Paket	800.356.000	3 Paket	791.250.000	3 Paket	791.250.000	100,00	100,00	6 Paket	1.591.606.000	50,00 %	47,48 %	SET-DPRD	
B	**04**	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100 %**	**107.495.909.250**	**100 %**	**13.122.718.490**	**100 %**	**10.932.725.700**	**100 %**	**10.932.725.700**	**100,00**	**100,00**	**100 %**	**24.055.444.190**	**100,00 %**	**22,38 %**		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = (10/5)*100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	**100 %**	**12.675.443.000**	**100 %**	**2.367.929.000**	**100 %**	**2.315.808.200**	**100 %**	**2.315.808.200**	**100,00**	**100,00**	**100 %**	**4.683.737.200**	**100,00 %**	**36,95 %**		
I	**04**	**02**	**02**	**01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**	**4 Dokumen**	**65.500.000**	**1 Dokumen**	**10.788.000**	**1 Dokumen**	**14.023.000**	**1 Dokumen**	**14.023.000**	**100,00**	**100,00**	**2 Dokumen**	**24.811.000**	**50,00 %**	**37,88 %**		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	**28 Dokumen**	**595.000.000**	**7 Dokumen**	**60.590.000**	**7 Dokumen**	**124.682.500**	**7 Dokumen**	**124.682.500**	**100,00**	**100,00**	**14 Dokumen**	**185.272.500**	**50,00 %**	**31,14 %**		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	**8 Dokumen**	**3.405.000.000**	**2 Dokumen**	**236.927.600**	**2 Dokumen**	**403.471.000**	**2 Dokumen**	**403.471.000**	**100,00**	**100,00**	**4 Dokumen**	**640.398.600**	**50,00 %**	**18,81 %**		
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	**1 Dokumen**	**200.000.000**	**0 Dokumen**	**-**	**1 Dokumen**	**227.105.000**	**1 Dokumen**	**227.105.000**	**100,00**	**100,00**	**1 Dokumen**	**227.105.000**	**100,00 %**	**113,55 %**	SET-DPRD	
1	04	02	02	01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen	65.500.000	1 Dokumen	10.788.000	1 Dokumen	14.023.000	1 Dokumen	14.023.000	100,00	100,00	2 Dokumen	24.811.000	50,00 %	37,88 %	SET-DPRD	
2	04	02	02	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	28 Dokumen	595.000.000	7 Dokumen	60.590.000	7 Dokumen	124.682.500	7 Dokumen	124.682.500	100,00	100,00	14 Dokumen	185.272.500	50,00 %	31,14 %	SET-DPRD	
3	04	02	02	01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	3.405.000.000	2 Dokumen	236.927.600	2 Dokumen	403.471.000	2 Dokumen	403.471.000	100,00	100,00	4 Dokumen	640.398.600	50,00 %	18,81 %	SET-DPRD	
4	04	02	02	01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	227.105.000	1 Dokumen	227.105.000	100,00	100,00	1 Dokumen	227.105.000	100,00 %	113,55 %	SET-DPRD	
II	**04**	**02**	**02**	**02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS**	**4 Dokumen**	**137.500.000**	**1 Dokumen**	**29.187.500**	**1 Dokumen**	**32.887.500**	**1 Dokumen**	**32.887.500**	**100,00**	**100,00**	**2 Dokumen**	**62.075.000**	**50,00 %**	**45,15 %**		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	**4 Dokumen**	**137.500.000**	**1 Dokumen**	**29.187.500**	**1 Dokumen**	**32.887.500**	**1 Dokumen**	**32.887.500**	**100,00**	**100,00**	**2 Dokumen**	**62.075.000**	**50,00 %**	**45,15 %**		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	**4 Dokumen**	**282.000.000**	**1 Dokumen**	**46.780.000**	**1 Dokumen**	**65.105.000**	**1 Dokumen**	**65.105.000**	**100,00**	**100,00**	**2 Dokumen**	**111.885.000**	**50,00 %**	**39,68 %**		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	**4 Dokumen**	**285.260.000**	**1 Dokumen**	**47.405.000**	**1 Dokumen**	**67.605.000**	**1 Dokumen**	**67.605.000**	**100,00**	**100,00**	**2 Dokumen**	**115.010.000**	**50,00 %**	**40,32 %**		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	**4 Dokumen**	**282.000.000**	**1 Dokumen**	**47.155.000**	**1 Dokumen**	**65.855.000**	**1 Dokumen**	**65.855.000**	**100,00**	**100,00**	**2 Dokumen**	**113.010.000**	**50,00 %**	**40,07 %**		
1	04	02	02	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	137.500.000	1 Dokumen	29.187.500	1 Dokumen	32.887.500	1 Dokumen	32.887.500	100,00	100,00	2 Dokumen	62.075.000	50,00 %	45,15 %	SET-DPRD	
2	04	02	02	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	137.500.000	1 Dokumen	29.187.500	1 Dokumen	32.887.500	1 Dokumen	32.887.500	100,00	100,00	2 Dokumen	62.075.000	50,00 %	45,15 %	SET-DPRD	
3	04	02	02	02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	4 Dokumen	282.000.000	1 Dokumen	46.780.000	1 Dokumen	65.105.000	1 Dokumen	65.105.000	100,00	100,00	2 Dokumen	111.885.000	50,00 %	39,68 %	SET-DPRD	
4	04	02	02	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	285.260.000	1 Dokumen	47.405.000	1 Dokumen	67.605.000	1 Dokumen	67.605.000	100,00	100,00	2 Dokumen	115.010.000	50,00 %	40,32 %	SET-DPRD	
5	04	02	02	02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	4 Dokumen	282.000.000	1 Dokumen	47.155.000	1 Dokumen	65.855.000	1 Dokumen	65.855.000	100,00	100,00	2 Dokumen	113.010.000	50,00 %	40,07 %	SET-DPRD	
III	**04**	**02**	**02**	**03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum**	**20 Laporan**	**835.000.000**	**5 Laporan**	**111.667.500**	**4 Laporan**	**153.965.400**	**4 Laporan**	**153.965.400**	**100,00**	**100,00**	**9 Laporan**	**265.632.900**	**45,00 %**	**31,81 %**		
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	**20 Laporan**	**835.000.000**	**5 Laporan**	**111.759.000**	**4 Laporan**	**153.571.000**	**4 Laporan**	**153.571.000**	**100,00**	**100,00**	**9 Laporan**	**265.330.000**	**45,00 %**	**31,78 %**		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	**20 Laporan**	**835.000.000**	**5 Laporan**	**117.704.000**	**4 Laporan**	**152.041.000**	**4 Laporan**	**152.041.000**	**100,00**	**100,00**	**9 Laporan**	**269.745.000**	**45,00 %**	**32,30 %**		
1	04	02	02	02	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	835.000.000	5 Laporan	111.667.500	4 Laporan	153.965.400	4 Laporan	153.965.400	100,00	100,00	9 Laporan	265.632.900	45,00 %	31,81 %	SET-DPRD	
2	04	02	02	02	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	835.000.000	5 Laporan	111.759.000	4 Laporan	153.571.000	4 Laporan	153.571.000	100,00	100,00	9 Laporan	265.330.000	45,00 %	31,78 %	SET-DPRD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = (10/5)*100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	04	02	02	02	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	835.000.000	5 Laporan	117.704.000	4 Laporan	152.041.000	4 Laporan	152.041.000	100,00	100,00	9 Laporan	269.745.000	45,00 %	32,30 %	SET-DPRD	
IV	**04**	**02**	**02**	**04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD**	**1 Dokumen**	**450.000.000**	**0 Dokumen**	**-**	**1 Dokumen**	**398.985.000**	**1 Dokumen**	**398.985.000**	**100,00**	**100,00**	**1 Dokumen**	**398.985.000**	**100,00 %**	**88,66 %**		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	**24 Dokumen**	**14.700.000.000**	**5 Dokumen**	**2.122.286.590**	**4 Dokumen**	**1.764.250.000**	**4 Dokumen**	**1.764.250.000**	**100,00**	**100,00**	**9 Dokumen**	**3.886.536.590**	**37,50 %**	**26,44 %**		
							Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	**48 Dokumen**	**10.912.000.000**	**12 Dokumen**	**2.151.656.000**	**12 Dokumen**	**1.919.100.800**	**12 Dokumen**	**1.919.100.800**	**100,00**	**100,00**	**24 Dokumen**	**4.070.756.800**	**50,00 %**	**37,31 %**		
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	**24 Orang**	**1.285.000.000**	**6 Orang**	**145.052.300**	**6 Orang**	**145.052.000**	**6 Orang**	**145.052.000**	**100,00**	**100,00**	**12 Orang**	**290.104.300**	**50,00 %**	**22,58 %**		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	**4 Dokumen**	**13.519.287.250**	**1 Dokumen**	**24.310.000**	**1 Dokumen**	**46.139.800**	**1 Dokumen**	**46.139.800**	**100,00**	**100,00**	**2 Dokumen**	**70.449.800**	**50,00 %**	**0,52 %**		
1	04	02	02	04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	450.000.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	398.985.000	1 Dokumen	398.985.000	100,00	100,00	1 Dokumen	398.985.000	100,00 %	88,66 %	SET-DPRD	
2	04	02	02	04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24 Dokumen	14.700.000.000	5 Dokumen	2.122.286.590	4 Dokumen	1.764.250.000	4 Dokumen	1.764.250.000	100,00	100,00	9 Dokumen	3.886.536.590	37,50 %	26,44 %	SET-DPRD	
3	04	02	02	04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	48 Dokumen	10.912.000.000	12 Dokumen	2.151.656.000	12 Dokumen	1.919.100.800	12 Dokumen	1.919.100.800	100,00	100,00	24 Dokumen	4.070.756.800	50,00 %	37,31 %	SET-DPRD	
4	04	02	02	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	24 Orang	1.285.000.000	6 Orang	145.052.300	6 Orang	145.052.000	6 Orang	145.052.000	100,00	100,00	12 Orang	290.104.300	50,00 %	22,58 %	SET-DPRD	
5	04	02	02	04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	13.519.287.250	1 Dokumen	24.310.000	1 Dokumen	46.139.800	1 Dokumen	46.139.800	100,00	100,00	2 Dokumen	70.449.800	50,00 %	0,52 %	SET-DPRD	
V	**04**	**02**	**02**	**05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD**	**18 Laporan**	**1.665.750.000**	**4 Laporan**	**226.385.000**	**3 Laporan**	**185.194.000**	**3 Laporan**	**185.194.000**	**100,00**	**100,00**	**7 Laporan**	**411.579.000**	**38,89 %**	**24,71 %**		
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	**4 Dokumen**	**225.000.000**	**1 Dokumen**	**4.717.000**	**1 Dokumen**	**8.343.000**	**1 Dokumen**	**8.343.000**	**100,00**	**100,00**	**2 Dokumen**	**13.060.000**	**50,00 %**	**5,80 %**		
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	**11 Dokumen**	**12.052.000.000**	**3 Dokumen**	**2.314.463.800**	**1 Dokumen**	**836.173.000**	**1 Dokumen**	**836.173.000**	**100,00**	**100,00**	**4 Dokumen**	**3.150.636.800**	**36,36 %**	**26,14 %**		
1	04	02	02	05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	18 Laporan	1.665.750.000	4 Laporan	226.385.000	3 Laporan	185.194.000	3 Laporan	185.194.000	100,00	100,00	7 Laporan	411.579.000	38,89 %	24,71 %	SET-DPRD	
2	04	02	02	05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	4.717.000	1 Dokumen	8.343.000	1 Dokumen	8.343.000	100,00	100,00	2 Dokumen	13.060.000	50,00 %	5,80 %	SET-DPRD	
3	04	02	02	05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	11 Dokumen	12.052.000.000	3 Dokumen	2.314.463.800	1 Dokumen	836.173.000	1 Dokumen	836.173.000	100,00	100,00	4 Dokumen	3.150.636.800	36,36 %	26,14 %	SET-DPRD	
VI	**04**	**02**	**02**	**06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD**	**2 Dokumen**	**190.098.000**	**- Dokumen**	**-**	**1 Dokumen**	**199.491.000**	**1 Dokumen**	**199.491.000**	**100,00**	**100,00**	**1 Dokumen**	**199.491.000**	**50,00 %**	**104,94 %**		
1	04	02	02	06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	190.098.000	- Dokumen	-	1 Dokumen	199.491.000	1 Dokumen	199.491.000	100,00	100,00	1 Dokumen	199.491.000	50,00 %	104,94 %	SET-DPRD	
VII	**04**	**02**	**02**	**07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun**	**16 Dokumen**	**1.763.443.000**	**4 Dokumen**	**216.273.000**	**4 Dokumen**	**396.707.400**	**4 Dokumen**	**396.707.400**	**100,00**	**100,00**	**8 Dokumen**	**612.980.400**	**50,00 %**	**34,76 %**		
1	04	02	02	07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	16 Dokumen	1.763.443.000	4 Dokumen	216.273.000	4 Dokumen	396.707.400	4 Dokumen	396.707.400	100,00	100,00	8 Dokumen	612.980.400	50,00 %	34,76 %	SET-DPRD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD (Renstra) sampai dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = (10/5)*100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
VIII	**04**	**02**	**02**	**08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**	**62 Dokumen**	**30.415.000.000**	**12 Dokumen**	**3.657.414.100**	**8 Dokumen**	**2.712.706.000**	**8 Dokumen**	**2.712.706.000**	**100,00**	**100,00**	**20 Dokumen**	**6.370.120.100**	**32,26 %**	**20,94 %**		
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	**4 Laporan**	**177.000.000**	**1 Laporan**	**32.968.000**	**1 Laporan**	**38.735.000**	**1 Laporan**	**38.735.000**	**100,00**	**100,00**	**2 Laporan**	**71.703.000**	**50,00 %**	**40,51 %**		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	**64 Dokumen**	**915.000.000**	**16 Dokumen**	**126.919.000**	**16 Dokumen**	**131.579.000**	**16 Dokumen**	**131.579.000**	**100,00**	**100,00**	**32 Dokumen**	**258.498.000**	**50,00 %**	**28,25 %**		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	**49 Dokumen**	**24.007.014.000**	**13 Dokumen**	**3.619.051.600**	**9 Dokumen**	**2.972.879.000**	**9 Dokumen**	**2.972.879.000**	**100,00**	**100,00**	**22 Dokumen**	**6.591.930.600**	**44,90 %**	**27,46 %**		
1	04	02	02	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	62 Dokumen	30.415.000.000	12 Dokumen	3.657.414.100	8 Dokumen	2.712.706.000	8 Dokumen	2.712.706.000	100,00	100,00	20 Dokumen	6.370.120.100	32,26 %	20,94 %	SET-DPRD	
2	04	02	02	08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4 Laporan	177.000.000	1 Laporan	32.968.000	1 Laporan	38.735.000	1 Laporan	38.735.000	100,00	100,00	2 Laporan	71.703.000	50,00 %	40,51 %	SET-DPRD	
3	04	02	02	08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	64 Dokumen	915.000.000	16 Dokumen	126.919.000	16 Dokumen	131.579.000	16 Dokumen	131.579.000	100,00	100,00	32 Dokumen	258.498.000	50,00 %	28,25 %	SET-DPRD	
4	04	02	02	08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	49 Dokumen	24.007.014.000	13 Dokumen	3.619.051.600	9 Dokumen	2.972.879.000	9 Dokumen	2.972.879.000	100,00	100,00	22 Dokumen	6.591.930.600	44,90 %	27,46 %	SET-DPRD	

37.360.246.766
36.800.091.750
98,501

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD **47.775.658.174**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/ Renja Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasiona	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	**URUSAN PENDUKUNG**														
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**														**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD**	**81,00**	**80,61**	**80,50**	**80,75**	**25.796.581.780**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**80,75**	**27.479.394.278**	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**44 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**25.524.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**11 Dokumen**	**28.076.400**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	**20 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**76.900.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**5 Dokumen**	**84.590.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**52 Dokumen**	**13 Dokumen**	**13 Dokumen**	**13 Dokumen**	**101.100.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**13 Dokumen**	**111.210.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	25.524.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN		-	Aparatur	11 Dokumen	28.076.400	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.821.400	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN		-	Aparatur	1 Dokumen	18.503.540	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.165.400	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN		-	Aparatur	1 Dokumen	18.881.940	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.437.600	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN		-	Aparatur	1 Dokumen	15.881.360	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.318.600	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN		-	Aparatur	1 Dokumen	15.750.460	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.157.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN		-	Aparatur	1 Laporan	15.572.700	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	101.100.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN		-	Aparatur	13 Laporan	111.210.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**40 Orang**	**35 Orang**	**35 Orang**	**35 Orang**	**3.046.369.900**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**37 Orang**	**3.351.006.890**	**SEKRETARIAT DPRD**

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	**48 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**14.560.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**12 Dokumen**	**16.016.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**4 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**12.232.600**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**1 Laporan**	**13.455.860**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**3 Dokumen**	**22.850.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**3 Dokumen**	**25.135.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**8 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**13.000.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**2 Laporan**	**14.300.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**12.302.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**1 Dokumen**	**13.532.200**	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	3.046.369.900	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	37 Orang	3.351.006.890	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	14.560.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	12 Dokumen	16.016.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.232.600	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	1 Laporan	13.455.860	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	22.850.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	3 Dokumen	25.135.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	13.000.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	2 Laporan	14.300.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.302.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	1 Dokumen	13.532.200	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**10.527.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**1 Dokumen**	**11.579.700**	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.527.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	1 Dokumen	11.579.700	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**24 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**7.032.500**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**6 Dokumen**	**7.735.750**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**40 Orang**	**20 Orang**	**16 Orang**	**16 Orang**	**145.520.000**	**Luar Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**20 Orang**	**183.020.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	7.032.500	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	6 Dokumen	44.532.500	SEKRETARIAT DPRD

4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	20 Orang	16 Orang	16 Orang	145.520.000	Luar Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	20 Orang	183.020.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**57 Paket**	**12 Paket**	**12,00 Paket**	**13 Paket**	**225.226.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**14 Paket**	**247.748.600**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**36 Paket**	**5 Paket**	**2 Paket**	**3 Paket**	**192.500.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**5 Paket**	**211.750.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**25 Paket**	**- Paket**	**- Paket**	**6 Paket**	**393.152.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**6 Paket**	**432.467.200**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**8 Paket**	**2 Paket**	**2 Paket**	**2 Paket**	**34.700.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**2 Paket**	**38.170.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**138 Paket**	**28 Paket**	**25 Paket**	**29 Paket**	**300.975.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**36 Paket**	**331.072.500**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**125 Dokumen**	**90 Dokumen**	**90 Dokumen**	**95 Dokumen**	**2.502.180.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**100 Dokumen**	**2.752.398.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**4 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**208.200.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Laporan**	**229.020.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**48 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**10 Laporan**	**163.312.000**	**Lampung Barat dan Luar Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**12 Laporan**	**179.643.200**	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	57 Paket	12 Paket	12 Paket	13,00 Paket	225.226.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	14 Paket	247.748.600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	5 Paket	2 Paket	3 Paket	192.500.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	5 Paket	211.750.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	- Paket	- Paket	6 Paket	393.152.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	6 Paket	432.467.200	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	34.700.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	2 Paket	38.170.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	138 Paket	28 Paket	25 Paket	29 Paket	300.975.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	36 Paket	331.072.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	125 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	95 Dokumen	2.502.180.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	100 Dokumen	2.752.398.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	208.200.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	1 Laporan	229.020.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	163.312.000	Lampung Barat dan Luar Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	12 Laporan	179.643.200	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan**	**3 Unit**	**- Unit**	**- Unit**	**- Unit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- Unit**	**-**	**SEKRETARIAT DPRD**

		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**45 Paket**	**- Paket**	**- Paket**	**- Paket**	-	-	-	-	-	-	**- Paket**	-	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	-	-	-	-	-	-	- Unit	-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Paket	- Paket	- Paket	- Paket	-	-	-	-	-	-	- Paket	-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**4 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**10.900.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**1 Laporan**	**11.990.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**4 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**166.062.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Laporan**	**182.668.200**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**4 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**295.757.100**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Laporan**	**325.332.810**	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.900.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	1 Laporan	**11.990.000**	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	166.062.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	1 Laporan	**182.668.200**	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	295.757.100	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	1 Laporan	**325.332.810**	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**3 Unit**	**3 Unit**	**3 Unit**	**3 Unit**	**208.185.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Pimpinan DPRD**	**3 Unit**	**229.003.500**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**26 Unit**	**26 Unit**	**26 Unit**	**26 Unit**	**343.555.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**26 Unit**	**377.910.500**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	**80 Unit**	**29 Unit**	**29 Unit**	**69 Unit**	**21.500.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Aparatur**	**75 Unit**	**23.650.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**45 Unit**	**33 Unit**	**33 Unit**	**33 Unit**	**105.335.500**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**40 Unit**	**150.000.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**7 Unit**	**5 Unit**	**5 Unit**	**5 Unit**	**279.344.880**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**7 Unit**	**307.279.368**	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	208.185.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Pimpinan DPRD	3 Unit	229.003.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	343.555.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	26 Unit	377.910.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	29 Unit	29 Unit	69 Unit	21.500.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Aparatur	75 Unit	23.650.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	105.335.500	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	40 Unit	115.869.050	SEKRETARIAT DPRD

4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	279.344.880	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	7 Unit	307.279.368	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD**	**35 Orang**	**35 Orang**	**35 Orang**	**35 Orang**	**14.922.113.300**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**35 Orang**	**15.500.000.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	**19 Paket**	**0 Paket**	**6 Paket**	**4 Paket**	**465.250.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**4 Paket**	**511.775.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	**35 Orang**	**35 Orang**	**35 Orang**	**35 Orang**	**452.406.000**	**Luar Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**35 Orang**	**497.646.600**	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	14.922.113.300	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	35 Orang	15.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	19 Paket	0 Paket	6 Paket	4 Paket	465.250.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	4 Paket	511.775.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up DPRD*	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	452.406.000	Luar Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	35 Orang	497.646.600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD**	**5 Dokumen**	**1 Dokumen**	**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**77.245.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**1 Dokumen**	**84.969.500**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	**4 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**12 Laporan**	**148.765.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**12 Dokumen**	**163.641.500**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	**12 Paket**	**3 Paket**	**3 Paket**	**3 Paket**	**792.000.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**3 Paket**	**831.600.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	77.245.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	1 Dokumen	84.969.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	148.765.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	12 Dokumen	163.641.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	792.000.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	3 Paket	831.600.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**18.122.461.394**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**100 %**	**19.685.431.033**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.856.615.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**100 %**	**4.242.276.500**	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**15.101.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Dokumen**	**16.611.100**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	**28 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**5 Dokumen**	**137.643.500,00**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**5 Dokumen**	**151.407.850**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	**8 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**558.073.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**3 Dokumen**	**613.880.300**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	**1 Dokumen**	**0 Dokumen**	**1,00 Dokumen**	**- Dokumen**	**-**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**0 Dokumen**	**-**	**SEKRETARIAT DPRD**

4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.101.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	1 Dokumen	16.611.100	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	28 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	137.643.500,00	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	5 Dokumen	151.407.850	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	558.073.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	3 Dokumen	613.880.300	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	1,00 Dokumen	- Dokumen	-	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	0 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS**	**4 4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**49.482.500**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Dokumen**	54.430.750	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	**4 4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**49.482.500**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Dokumen**	54.430.750	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	**4 4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**76.760.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Dokumen**	84.436.000	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	**4 4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**76.760.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Dokumen**	84.436.000	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	**4 4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**76.760.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Dokumen**	84.436.000	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.482.500	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Dokumen**	54.430.750	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.482.500	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Dokumen**	54.430.750	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	76.760.000	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Dokumen**	84.436.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	76.760.000	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Dokumen**	84.436.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	76.760.000	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Dokumen**	84.436.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum**	**20 Laporan**	**5 Laporan**	**4 Laporan**	**5 Laporan**	**158.397.000**	**Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**5 Laporan**	174.236.700	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	**20 Laporan**	**5 Laporan**	**4 Laporan**	**5 Laporan**	**158.381.000**	**Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**5 Laporan**	174.219.100	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	**20 Laporan**	**5 Laporan**	**4 Laporan**	**5 Laporan**	**158.711.000**	**Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**5 Laporan**	174.582.100	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	158.397.000	Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	5 Laporan	174.236.700	SEKRETARIAT DPRD

4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	158.381.000	Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	5 Laporan	174.219.100	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	158.711.000	Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	5 Laporan	174.582.100	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD**	**1 Dokumen**	**0 Dokumen**	**1 Dokumen**	**0 Dokumen**	**-**	**Luar Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**1 Dokumen**	-	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	**24 Dokumen**	**5 Dokumen**	**4 Dokumen**	**6 Dokumen**	**2.583.830.000**	**Luar Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**6 Dokumen**	2.842.213.000	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	**48 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**3.401.559.200**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**12 Dokumen**	3.741.715.120	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	**24 Orang**	**6 Orang**	**6 Orang**	**6 Orang**	**227.972.894**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**6 Orang**	250.770.183	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**42.335.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**1 Dokumen**	46.568.500	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	-	Luar Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	1 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	2.583.830.000	Luar Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	6 Dokumen	2.842.213.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.401.559.200	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	12 Dokumen	3.741.715.120	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	24 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	227.972.894	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	6 Orang	250.770.183	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42.335.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	1 Dokumen	46.568.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD**	**18 Laporan**	**4 Laporan**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**204.224.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**3 Laporan**	224.646.400	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**9.287.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**1 Dokumen**	10.215.700	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	**11 Dokumen**	**3 Dokumen**	**1 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3.434.794.000**	**Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**3 Dokumen**	3.778.273.400	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	18 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	204.224.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	3 Laporan	224.646.400	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.287.000	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	1 Dokumen	10.215.700	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	11 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3.434.794.000	Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	3 Dokumen	3.778.273.400	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD**	**2 Dokumen**	**0 Dokumen**	**1 Dokumen**	**2 Dokumen**	**226.615.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD**	**0 Dokumen**	**-**	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	-	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD	0 Dokumen	-	SEKRETARIAT DPRD

4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun**	**16 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**455.055.800**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**4 Dokumen**	**500.561.380**	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	455.055.800	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	4 Dokumen	500.561.380	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**	**62 Dokumen**	**12 Dokumen**	**8 Dokumen**	**13 Dokumen**	**6.419.109.000**	**Luar Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**16 Dokumen**	7.061.019.900	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	**4 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**47.800.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**1 Laporan**	52.580.000	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	**64 Dokumen**	**16 Dokumen**	**16 Dokumen**	**15 Dokumen**	**141.744.000**	**Liwa, Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**15 Dokumen**	155.918.400	**SEKRETARIAT DPRD**
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	**49 Dokumen**	**13 Dokumen**	**9 Dokumen**	**10 Dokumen**	**3.269.199.000**	**Luar Lampung Barat**	**APBD KABUPATEN**	**-**	**-**	**Anggota DPRD dan Aparatur**	**10 Dokumen**	3.596.118.900	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	62 Dokumen	12 Dokumen	8 Dokumen	13 Dokumen	6.419.109.000	Luar Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	16 Dokumen	7.061.019.900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	47.800.000,00	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	1 Laporan	52.580.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	64 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	15 Dokumen	141.744.000,00	Liwa, Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	15 Dokumen	155.918.400	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	49 Dokumen	13 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	3.269.199.000,00	Luar Lampung Barat	APBD KABUPATEN	-	-	Anggota DPRD dan Aparatur	10 Dokumen	3.596.118.900	SEKRETARIAT DPRD

RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 2023-2026, pada tahun 2024 disusun Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan bahan penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dasar Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja OPD ini menggambarkan rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan telah diselaraskan dengan program pusat, propinsi dan kabupaten serta memperhatikan masukan dari masyarakat pelaku pembangunan pertanian.

Penyusunan Renja OPD ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyusunan Renja OPD selanjutnya.

Liwa, Maret 2024

KEPALA DINAS

Ir. NATA DJUDIN AMRAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 199203 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Barat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat/petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta mengisi dan memperluas pasar hasil pertanian. Dalam melaksanakan pembangunan pertanian tentu selalu berkaitan dengan petani sebagai pemeran utama pembangunan pertanian. Dalam kegiatannya, petani tidak dapat berjalan sendiri tetapi harus mendapat dukungan agar dapat berperan secara maksimal. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan modal, teknologi usaha tani, sarana dan prasarana pertanian maupun adanya lembaga-lembaga penunjang (baik pemerintah maupun swasta).

Untuk itu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga pemerintah yang menangani bidang pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura menyusun langkah awal dari penyusunan rencana kerja pembangunan yaitu Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2025. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah gambaran awal secara garis besar dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura yang berisikan rencana program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan gambaran awal penjabaran rencana kerja tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 2023-2026. Penyusunan Renja harus mengacu kepada Renstra agar supaya pelaksanaan pembangunan pertanian dapat terencana dan berkelanjutan sehingga pembangunan pertanian dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan terstruktur dengan tetap berorientasi pada pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif spesifik lokasi wilayah Kabupaten Lampung Barat

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur OPD dan kewenangan OPD adalah :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
m. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja OPD dimaksudkan untuk menyediakan bahan dalam rangka merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra OPD dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Tujuan dari penyusunan Renja OPD adalah memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Pogram dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 2 program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 8 kegiatan dan jumlah subkegiatan berjumlah 26 Subkegiatan. Alokasi anggaran dana tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 9.470.891.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.254.459.938,- atau sebesar 97,71%. Dari seluruh subkegiatan tidak terdapat yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dari rencana kerja yang telah disusun pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja, dan tingkat pencapaian sasaran instansi yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Kriteria Capaian hasil Pengukuran Kinerja dengan klarifikasi/rentang dapat terlihat dalam table sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - 85 %	Berhasil
3.	55 % - 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Tidak Berhasil

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dapat terlihat dalam table berikut ini :

Tabel
Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET	REALISASI BERDASARKAN KONDISI REAL	%
1	2	3	4		5	
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produksi (Ton) = Luas panen (Ha) X Produktivitas (Ton/Ha)	210350	171917.89	81,73

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja layanan utama yang dtelah ditetapkan pada tahun 2023 tidak tercapai sesuai target. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena :

1. Dasar data baku lahan sawah sebagai modal utama produksi padi mengalami perubahan. Turunnya lahan baku sawah dari 13.443 ha menjadi 10.464 ha. Penurunan baku lahan dikarenakan adanya Verifikasi luas baku lahan yang sebenarnya melalui pemetaan geospacial yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sehingga pengukuran luas lahan mendekati ukuran yang sebenarnya. Berdasarkan surat keputusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Lahan Sawah Nasional Tahun 2019 luas baku lahan baku sawah di Kabupeten Lampung Barat 10.464 ha.

   Kondisi baku lahan sawah di Kabupaten Lampung Barat kedepannya dimungkinkan akan mengalami kondisi yang mengkhawatirkan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan adanya kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan dibandingkan sawah akan menyebabkan banyaknya lahan sawah yang beralih fungsi menjadi pemukiman, tempat usaha selain pertanian dan atau menjadi kolam ikan. Keadaan tersebut perlu menjadi pemikiran bersama agar lahan sawah sebagai sumber produksi pangan dapat terjaga meskipun telah diterbitkan Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Turunnya produksi tanaman pangan khususnya padi, dimana padi merupakan komoditas utama sub sektor tanaman pangan. Hal ini disebabkan karena tingginya kebutuhan modal biaya dalam usaha tani padi dan ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk bersubsidi. Tingginya modal biaya disebabkan naiknya harga sarana produksi di tahun 2023. Apabila mengandalkan pupuk bersubsidi, budidaya padi tidak sesuai dengan baku teknis kebutuhan sarana produksi karena pada tahun 2023 kuota yang diperoleh sekitar 40% dari kebutuhan.
3. Terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian seperti: kolam, kebun, perumahan Dan lain-lain. Sehingga menyebabkan berkurangnya lahan produksi. Hal yang menyebabkan

terjadinya alih fungsi lahan diantaranya adalah kurang menguntungkan dari segi pendapatan untuk usaha tani budidaya padi.

4. Kenaikan harga sarana produksi (pupuk dan obat-obatan) yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan minimal sarana produksi dalam rangka mendukung budidaya usaha tani. Kenaikan biaya operasional khususnya kenaikan harga pupuk. Kenaikan harga pupuk mencapai 100% s.d. 150%. Hal ini berimbas dengan ketersediaan permodalan petani hortikultura. Dengan modal terbatas sedangkan harga sarana produksi meningkat, menyebabkan berkurangnya dosis pupuk dan obat obatan yang diberikan ke tanaman yang mengakibatkan menurunkan tingkat produksi tanaman. Tingginya permodalan hortikultura sedangkan risiko gagal juga tinggi. petani. Tanaman hortikultura yang berisiko tinggi seperti cabai, kentang. Jika harga jual rendah, petani rugi karena modal yang keluar sudah tinggi.
5. Produksi komoditas palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar) mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan komoditas palawija bukan merupakan komoditas utama yang dibudidayakan oleh petani. Budidaya palawija dilakukan untuk melakukan rotasi tanaman khususnya untuk pertanaman sayuran.

Sektor pertanian (dalam hal ini tanaman pangan dan hortikultura) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung perekonomian di kabupaten Lampung Barat dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2023 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan menyumbang kurang lebih 45% kepada PDRB Lampung Barat. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pelaksana teknis dalam sektor pertanian, menyumbang PDRB dari sub sektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura Semusim dan Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya.

Sub sektor Hortikultura merupakan penyumbang terbesar untuk PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal tersebut didukung oleh keadaan geografis Lampung Barat yang berbukit dengan ketinggian tempat diatas 700 mdpl. Kondisi geografis tersebut sangat berpotensi untuk budidaya hortikultura dataran tinggi. Hortikultura yang dibudidayakan di Lampung Barat terdiri dari hortikultura semusim dan hortikultura tahunan. Hortikultura semusim khususnya sayuran yang dibudidayakan sebagian petani di Lampung Barat antara lain Kubis, Wortel, Cabe Merah Besar, Cabai Rawit, Tomat, Sawi, Bawang Daun, kentang, dan Labu Siam. Terdapat komoditas yang sedang digalakkan untuk dikembangkan untuk yaitu bawang merah dimana tujuannya adalah memperluas daerah penghasil dan dapat berpengaruh dalam mengendalikan laju inflasi. Sentra utama sayuran di Lampung Barat adalah kecamatan Balik Bukit dan Sukau. Daerah lain yang menjadi sentra ukuran menengah adalah Lumbok Seminung, Sumberjaya, Batu Brak dan Kebun Tebu. Keragaan hortikultura semusim yang banyak dibudidayakan di Lampung Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Keragaan Hortikultura Semusim Unggulan yang Dibudidayakan di Kabupaten Lampung Barat

KERAGAAN HORTIKULTURA SEMUSIM UNGGULAN TAHUN 2023				
No.	**Komoditas**	**Tanam (Ha)**	**Panen (Ha)**	**Produksi (Ton)**
1	BAWANG DAUN	134	146	1.471
2	BAWANG MERAH	45	14	163
3	KEMBANG KOL	16	21	248
4	KENTANG	5	10	117
5	KUBIS	363	402	7.245
6	PETSAI/SAWI	308	313	45.976
7	WORTEL	348	363	7.183
8	BUNCIS	184	191	2.938
9	CABE BESAR	64	92	1.440
10	CABAI KERITING	199	246	4.983
11	CABE RAWIT	242	293	2.736
12	LABU SIAM	104	127	2.377
13	TOMAT	268	296	7.962
		2.146	***2.365***	***83.368***

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi tertinggi pada komoditas kubis. Sebaran sentra terbesar produksi kubis ada di kecamatan Balik Bukit, Sukau, Lumbok Seminung, dan Batu Brak. Kubis adalah komoditas khas dataran tinggi. Produksi tersebar ke dua adalah wortel. Sentra wortel pada tahun 2023 adalah Balik Bukit, Sukau, Lumbok Seminung dan Batu Brak. Produksi komoditas unggulan prioritas nasional pada tingkat sedang, bukan yang tertinggi. Komoditas unggulan nasional antara lain cabai (cabe besar dan keriting) dengan sentra produksi di kecamatan Balik Bukit, Sukau, Sumberjaya dan Lumbok Seminung; cabai rawit dengan sentra produksi di kecamatan Sukau, Balik Bukit, Sumberjaya, Lumbok Seminung dan Kebun Tebu; dan Bawang Merah dengan sentra produksi di kecamatan Lumbok Seminung.

Hortikultura tahunan dalam hal ini khususnya buah-buahan merupakan penyumbang terbesar untuk PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Buah-buahan yang banyak dikembangkan dan bernilai komersial di Lampung Barat antara lain alpukat, durian, jeruk, manggis, pepaya, pisang dan salak. Komoditi alpukat sejak tahun 2019 dikembangkan varietas unggulan melalui penangkaran bibit dan sudah mempunyai sertifikat sebagai varietas lokal Lampung Barat. Keragaan buah-buahan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Keragaan Hortikultura Tahunan Unggulan yang Dibudidayakan di Kabupaten Lampung Barat

KERAGAAN HORTIKULTURA TAHUNAN UNGGULAN TAHUN 2023				
No.	**Komoditas**	**Tanam Baru (Pohon/Rumpun)**	**Tanaman Sedang Menghasilkan (Pohon/Rumpun)**	**Produksi (Ton)**
1	ALPUKAT	4.781	33.082	4.368
2	DURIAN	1.985	17.304	1.796
3	JERUK SIAM/KEPROK	2.415	13.307	1.458
4	MANGGIS	1.215	13.167	843
5	PEPAYA	64.361	69.644	2.072
6	PISANG	18.610	153.363	14.279
7	SALAK	114,00	29.243	434
		93.481	***329.110***	***25.248***

Alpukat sebagai komoditas unggulan daerah produksinya sebesar 4.368 ton dengan sentra produksi di kecamatan Lumbok Seminung, Belalau, Sukau dan Balik Bukit. Produksi Durian sebesar 1.796 ton dengan sentra produksi di kecamatan Way Tenong, Lumbok Seminung, Kebun Tebu dan SUkau. Produksi jeruk siam/keprok sebesar 1.458 ton dengan sentra produksi di kecamatan Suoh, Gedung Surian, Kebun Tebu dan Balik Bukit. Produksi manggis sebesar 843 ton dengan sebaran produksi di kecamatan Sukau, Batu Ketulis dan Belalau. Produksi pepaya sebesar 2.072 ton dengan sentra produksi di kecamatan Sukau, Way Tenong dan Lumbok Seminung. Produksi pisang sebesar 14.279 ton, yang sentra produksi tersebar di kecamatan Sumberjaya, Kebun Tebu dan Suoh. Komoditas pisang dalam 4 tahun mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan. Hal ini dikarenakan produksi yang dihasilkan terserap ke pasar baik untuk lokal dan luar Lampung Barat. Produksi salak sebesar 434 ton yang sentra produksinya tersebar di kecamatan Kebun Tebu, Suoh dan Air Hitam.

Selain komoditas hortikultura, komoditas tanaman pangan merupakan penyumpang PDRB di kabupaten Lampung Barat. Terutama komoditas padi perlu dilakukan penanganan secara khusus karena merupakan salah satu dari komoditas prioritas nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok. Selain padi sub sektor tanaman pangan terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubijalar. Keragaan Tanaman Pangan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Keragaan Tanaman Pangan di Kabupaten Lampung Barat

KERAGAAN TANAMAN PANGAN TAHUNAN TAHUN 2023				
No.	**Komoditas**	**Tanam (Ha)**	**Panen (Ha)**	**Produksi (Ton)**
1	Padi	17.943	15.634	83.981
2	Jagung	260	215	899
3	Kedelai	2	2	3
4	Kacang Tanah	133	164	200
5	Ubi Kayu	117	128	3.043
6	Ubi Jalar	261	337	3.570
		18.715	***16.479***	***91.696***

Komoditas padi terdiri dari padi sawah dan padi ladang (lahan kering). Sentra produksi padi tersebar di kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh, Sukau, Kebun Tebu dan Balik Bukit. Jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar dalam sub sektor Tanaman Pangan masuk dalam kelompok Palawija. Palawija tidak termasuk komoditas tanaman pangan yang prioritas untuk dibudidayakan. Palawija difungsikan untuk menjadi tanaman selingan, khususnya untuk petani yang membudidayakan hortikultura semusim. Budidaya palawija dilakukan untuk rotasi tanaman di lahan hortikultura semusim dengan tujuan memutus rantai pertumbuhan hama dan penyakit.

Pelaksanaan pembangunan pertanian di Lampung Barat tidak terlepas dari ketersediaan lahan pertanian sebagai sarana pengembangan pertanian. Keragaan lahan di Kabupaten Lampung Barat secara rinci dapat dilhat pada tabel berikut :

Tabel 4. Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Lampung Barat (Hektar)

Kecamatan	Penggunaan Lahan	
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah
(1)	(2)	(3)
040 Balik Bukit	735	15.990
041 Sukau	1.551	7.924
042 Lumbok Seminung	268	3.086
050 Belalau	449	23.074
051 Sekincau	50	7.342
052 Suoh	1.844	24.251
053 Batu Brak	383	10.262
054 Pagar Dewa	288	15.380
055 Batu Ketulis	182	20.264
056 Bandar Negeri Suoh	2.029	5.303
060 Sumber Jaya	438	3.147
061 Way Tenong	574	11.518
062 Gedung Surian	535	5.298
063 Kebun Tebu	932	14.623
064 Air Hitam	206	5.182
JUMLAH	**10.465**	**172.644**

Potensi penggunaan lahan di kabupaten Lampung Barat yang merupakan wilayah budidaya seluas 183.108 hektar dengan rincian lahan sawah seluas 10.465 hektar dan pertanian bukan sawah seluas 172.644 hektar. Lahan pertanian bukan sawah terdiri dari lahan untuk Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Perkebunan, Hutan Rakyat, Padang Penggembalaan, Hutan Negara dan Lainnya (tambak, kolam dan empang). Potensi lahan pertanian bukan sawah yang dapat dikembangkan untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura adalah lahan tegal/kebun. Komoditas tanaman pangan yang dibudidayakan adalah palawija (jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar). Komoditas hortikultura yang dikembangkan adalah hortikultura baik sayuran dan buah-buahan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan produksi, dimana Produk yang dihasilkan terutama hasil pertanian mengalami harga yang berfluktuasi. Hal ini dikarenakan ketidakselarasan antara permintaan dan produksi yang dihasilkan
2. Ketidakselarasan antara kualitas produksi dan hasil produksi karena Kualitas produk pertanian yang masih rendah
3. Produksi tanaman pangan dan hortikultura yang belum optimal
4. Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang belum optimal
5. Ketersediaan lahan budidaya pertanian yang minim.

2.4 Review terhadap RPD

Sejalan dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yaitu "**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas"** yang mempunyai sasaran "Meningkatnya Pendapatan Perkapita", tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Lampung Barat adalah Meningkatnya Nilai Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang akan dicapai melalui sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Melihat dari uraian diatas perlu diperhatikan bahwa perhatian terhadap sektor pertanian perlu ditingkatkan karena besarnya kontribusi pertanian dalam perekonomian Lampung Barat.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memperhatikan hasil Musrenbang tingkat kecamatan, usulan – usulan dari masyarakat pada umumnya telah diakomodir dalam program dan kegiatan dinas. Usulan kegiatan yang masuk dipisahkan berdasarkan alokasi dananya baik yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten. Untuk usulan kegiatan yang dimasukkan dalam alokasi APBD Kabupaten harus diakomodir di dalam Renja. Pada dasarnya usulan dari masyarakat sudah bersinergi dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pertanian di tingkat kabupaten tidak terlepas dari tujuan untuk mendukung keberhasilan pembangunan baik di tingkat provinsi dan nasional. Pokok-pokok visi dalam Renstra Kementrian Pertanian 2020-2024 yang harus di dukung oleh daerah antara lain :

a. Mewujudkan ketahanan pangan
b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-OPD

Dalam rangka mendukung keberhasilan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yaitu "**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas"** dengan sasaran Peningkatan Pendapatan Perkapita,.

Untuk mencapai Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas , tujuan yang ditetapkan Dinas adalah Meningkatnya Nilai Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta memperhatikan program utama pembangunan pertanian secara nasional, maka program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2025 adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
        6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
        4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
        2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
        5) Fasilitas Kunjungan Tamu
        6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1) Penyediaan jasa surat menyurat
        2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
        3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
    a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
        1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
        2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
        3) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
        4) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
    b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
        1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
        2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
    a. Pengembangan Prasarana Pertanian
        1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
    b. Pembangunan Prasarana Pertanian
        1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
    a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
        1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
    a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
        1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
        2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
        3) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
        4) Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah tindak lanjut pelaksanaan setiap tahun dari Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2023-2026. Renstra adalah penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat. Berlandaskan tujuan dan sasaran Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat menyusun Rencana Kinerja sebagai berikut :

1. Tujuan dari Renja Tahun 2025 adalah Meningkatnya Nilai Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp. 1.078.715.258.334,-
2. Sasaran Renja tahun 2025 adalah Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan indicator kinerja Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar 216.149 Ton

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025, direncanakan akan dicapai dengan program- program sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Pagu Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	74,16 %	8.667.216.400
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	1,33%	770.777.000
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	1,30%	709.714.000
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan	100 %	134.059.500
5.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut	200 KT	765.387.500
		Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	8 KT	
		Peningkatan kelas Madya ke Utama	2 KT	
			Rencana Anggaran	**11.047.154.400**

Untuk rincian kegiatan per program dapat dilihat pada Lampiran II Renja ini.

V. PENUTUP

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekwensi yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa, Maret 2024

KEPALA DINAS

Ir. NATA DJUDIN AMRAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 199203 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Lampung Barat

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
A.	**3. 27. 01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH**	**78,26 Point**	**38.623.329.100**	**73,61 Point**	**8.272.511.520**	**78,06 Point**	**9.103.404.500**	**78,06 Point**	**8.489.844.400**	**100,00**	**93,26**	**78,06 Point**	**16.762.355.920**	**99,74**	**43,40**	**Dinas TPH**	
a.	**3. 27. 01. 2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**38 Dokumen**	**831.303.000**	**11 Dokumen**	**168.884.000**	**8 Dokumen**	**194.718.000**	**8 Dokumen**	**58.890.000**	**100,00**	**30,24**	**19 Dokumen**	**227.774.000**	**50,00**	**27,40**		
			Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	**16 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**100,00**		**8 Dokumen**		**50,00**			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**52 Dokumen**		**13 Dokumen**		**13 Dokumen**		**13 Dokumen**		**100,00**		**26 Dokumen**		**50,00**			
	3. 27. 01. 2.01 01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	19.000.000	11 Dokumen	4.000.000	8 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	4.000.000	100,00	80,00	19 Dokumen	8.000.000	50,00	42,11		
	3. 27. 01. 2.01 02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	1.980.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	100,00	100,00	2 Dokumen	3.980.000	50,00	49,75		
	3. 27. 01. 2.01 03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	100,00	100,00	2 Dokumen	4.000.000	50,00	50,00		
	3. 27. 01. 2.01 04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	100,00	100,00	2 Dokumen	4.000.000	50,00	50,00		
	3. 27. 01. 2.01 05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	100,00	100,00	2 Dokumen	4.000.000	50,00	50,00		
	3. 27. 01. 2.01 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52 Laporan	780.303.000	13 Laporan	156.904.000	13 Laporan	181.718.000	13 Laporan	46.890.000	100,00	25,80	26 Laporan	203.794.000	50,00	26,12		
b.	**3. 27. 01. 2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**98 Orang/bulan**	**33.419.332.100**	**104 Orang/bulan**	**7.465.983.650**	**98 Orang/bulan**	**7.891.257.500**	**95 Orang/bulan**	**7.787.727.900**	**96,94**	**98,69**	**95 Orang/bulan**	**15.253.711.550**	**96,94**	**45,64**		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**4 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00**		**2 Laporan**		**50,00**			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**8 Laporan**		**2 Laporan**		**2 Laporan**		**2 Laporan**		**100,00**		**4 Laporan**		**50,00**			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**4 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00**		**2 Dokumen**		**50,00**			
	3. 27. 01. 2.02 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	33.395.332.100	104 Orang/bulan	7.461.438.650	98 Orang/bulan	7.885.257.500	95 Orang/bulan	7.783.182.900	96,94	98,71	95 Orang/bulan	15.244.621.550	96,94	45,65		
	3. 27. 01. 2.02 05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	8.000.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.500.000	100,00	75,00	2 Laporan	3.000.000	50,00	37,50		
	3. 27. 01. 2.02 07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	8 Laporan	10.000.000	2 Laporan	1.545.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	1.545.000	100,00	61,80	4 Laporan	3.090.000	50,00	30,90		
	3. 27. 01. 2.02 08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	100,00	100,00	2 Dokumen	3.000.000	50,00	50,00		
c.	**3. 27. 01. 2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**4 Dokumen**	**145.000.000**	**1 Dokumen**	**10.000.000**	**1 Dokumen**	**40.000.000**	**1 Dokumen**	**25.000.000**	**100,00**	**62,50**	**2 Dokumen**	**35.000.000**	**50,00**	**24,14**		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**21 Orang**		**- Orang**		**5 Orang**		**3 Orang**		**60,00**		**3 Orang**		**14,29**			
	3. 27. 01. 2.05 05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	100,00	100,00	2 Dokumen	20.000.000	50,00	50,00		
	3. 27. 01. 2.05 09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 orang	105.000.000	- orang	-	6 Orang	30.000.000	3 Orang	15.000.000	50,00	50,00	3 Orang	15.000.000	14,29	14,29		
d.	**3. 27. 01. 2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**8 Paket**	**845.205.000**	**2 Paket**	**147.801.670**	**2 Paket**	**207.870.000**	**2 Paket**	**128.529.500**	**100,00**	**61,83**	**4 Paket**	**276.331.170**	**50,00**	**32,69**		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**2 Paket**		**- Paket**		**0 Paket**		**Paket**		**-**		**- Paket**		**-**			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**12 Paket**		**3 Paket**		**3 Paket**		**3 Paket**		**100,00**		**6 Paket**		**50,00**			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**16 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**100,00**		**8 Dokumen**		**50,00**			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**4 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00**		**2 Laporan**		**50,00**			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**80 Laporan**		**20 Laporan**		**20 Laporan**		**18 Laporan**		**90,00**		**38 Laporan**		**47,50**			
	3. 27. 01. 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	21.531.000	2 Paket	5.027.420	2 Paket	5.031.000	2 Paket	5.031.000	100,00	100,00	4 Paket	10.058.420	50,00	46,72		
	3. 27. 01. 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.850.000	- Paket	-	Paket		Paket		-	-	- Paket	-	-	-		
	3. 27. 01. 2.06 05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	183.460.000	3 Paket	32.098.500	3 Paket	46.155.000	3 Paket	32.095.000	100,00	69,54	6 Paket	64.193.500	50,00	34,99		
	3. 27. 01. 2.06 06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	15.840.000	4 Dokumen	3.960.000	4 Dokumen	3.960.000	4 Dokumen	3.960.000	100,00	100,00	8 Dokumen	7.920.000	50,00	50,00		
	3. 27. 01. 2.06 08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	14.400.000	1 Laporan	3.600.000	1 Laporan	3.600.000	1 Laporan	3.600.000	100,00	100,00	2 Laporan	7.200.000	50,00	50,00		
	3. 27. 01. 2.06 09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	599.124.000	20 Laporan	103.115.750	20 Laporan	149.124.000	18 Laporan	83.843.500	90,00	56,22	38 Laporan	186.959.250	47,50	31,21		
e.	**3. 27. 01. 2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang**	**19 Unit**	**127.850.000**	**1 Unit**	**3.650.000**	**9 Unit**	**90.000.000**	**1 Unit**	**16.000.000**	**11,11**	**17,78**	**2 Unit**	**19.650.000**	**10,53**	**15,37**		
	3. 27. 01. 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	127.850.000	1 Unit	3.650.000	9 Unit	90.000.000	1 Unit	16.000.000	11,11	17,78	2 Unit	19.650.000	10,53	15,37		
f.	**3. 27. 01. 2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**4 Laporan**	**1.211.524.500**	**1 Laporan**	**203.887.200**	**1 Laporan**	**282.634.000**	**1 Laporan**	**223.137.000**	**100,00**	**78,95**	**2 Laporan**	**427.024.200**	**50,00**	**35,25**		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**4 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00**		**2 Laporan**		**50,00**			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**4 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00**		**2 Laporan**		**50,00**			
	3. 27. 01. 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.850.000	1 Laporan	350.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	100,00	100,00	2 Laporan	850.000	50,00	45,95		
	3. 27. 01. 2.08 02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	219.060.000	1 Laporan	59.160.000	1 Laporan	59.760.000	1 Laporan	59.760.000	100,00	100,00	2 Laporan	118.920.000	50,00	54,29		
	3. 27. 01. 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	990.614.500	1 Laporan	144.377.200	1 Laporan	222.374.000	1 Laporan	162.877.000	100,00	73,24	2 Laporan	307.254.200	50,00	31,02		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
g.	**3. 27. 01. 2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**104 Unit**	**2.043.114.500**	**104 Unit**	**272.305.000**	**104 Unit**	**396.925.000**	**96 Unit**	**250.560.000**	**92,31**	**63,13**	**96 Unit**	**522.865.000**	**92,31**	**25,59**		
	3. 27. 01. 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit	1.635.241.000	74 Unit	226.000.000	74 Unit	333.775.000	74 Unit	198.500.000	100,00	59,47	74 Unit	424.500.000	100,00	25,96		
	3. 27. 01. 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	72.200.000	21 Unit	12.355.000	21 Unit	19.650.000	21 Unit	18.110.000	100,00	92,16	21 Unit	30.465.000	100,00	42,20		
	3. 27. 01. 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	9 Unit	335.673.500	1 Unit	33.950.000	9 Unit	43.500.000	1 Unit	33.950.000	11,11	78,05	1 Unit	67.900.000	11,11	20,23		
B.	**3. 27. 02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian**	**4,87 %**	**3.972.624.000**	**- %**	**-**	**1,3 %**	**867.586.000**	**1,3 %**	**296.747.000**	**100,00**	**34,20**	**1,30 %**	**296.747.000**	**26,69**	**7,47**	**Dinas TPH**	
a.	**3. 27. 02 2.01.**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**	**48 Laporan**	**2.235.908.500**	**- Laporan**	**-**	**12 Laporan**	**416.075.000**	**12 Laporan**	**107.985.000**	**100,00**	**25,95**	**12 Laporan**	**107.985.000**	**25,00**	**4,83**		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	**144 Laporan**		**- Laporan**		**36 Laporan**		**36 Laporan**		**100,00**		**36 Laporan**		**25,00**			
	3. 27. 02 2.01 01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	48 Laporan	595.986.000	- Laporan	-	12 Laporan	88.615.000	12 Laporan	54.460.000	100,00	61,46	12 Laporan	54.460.000	25,00	9,14		
	3. 27. 02 2.01 02.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	144 Laporan	1.639.922.500	- Laporan	-	36 Laporan	327.460.000	36 Laporan	53.525.000	100,00	16,35	36 Laporan	53.525.000	25,00	3,26		
b.	**3. 27. 02 2.02.**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman**	**7 Dokumen**	**1.736.715.500**	**- Dokumen**	**-**	**1 Dokumen**	**451.511.000**	**1 Dokumen**	**188.762.000**	**100,00**	**41,81**	**1 Dokumen**	**188.762.000**	**14,29**	**10,87**		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	**8 Dokumen**		**- Dokumen**		**2 Dokumen**		**2 Dokumen**		**100,00**		**2 Dokumen**		**25,00**			
	3. 27. 02 2.02 02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG	7 Dokumen	736.716.500	- Dokumen	-	1 Dokumen	159.652.000	1 Dokumen	88.762.000	100,00	55,60	1 Dokumen	88.762.000	14,29	12,05		
	3. 27. 02 2.02 03.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	8 Dokumen	999.999.000	- Dokumen	-	2 Dokumen	291.859.000	2 Dokumen	100.000.000	100,00	34,26	2 Dokumen	100.000.000	25,00	10,00		
C.	**3. 27. 03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian**	**16,55 %**	**4.798.685.600**	**%**	**-**	**4,15 %**	**1.176.925.000**	**4,15 %**	**50.000.000**	**100,00**	**4,25**	**4,15 %**	**50.000.000**	**25,08**	**1,04**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
	3. 27. 03 2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola**	**1 Dokumen**	**250.000.000**	**- Dokumen**	**-**	**1 Dokumen**	**50.000.000**	**1 Dokumen**	**50.000.000**	**100,00**	**100,00**	**1 Dokumen**	**50.000.000**	**100,00**	**20,00**		
	3. 27. 03 2.01 01.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	2 Dokumen	250.000.000	- Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	100,00	100,00	1 Dokumen	50.000.000	50,00	20,00		
b.	**3. 27. 03 2.02**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara**	**32 Unit**	**4.548.685.600**	**- Unit**	**-**	**7 Unit**	**1.126.925.000**	**0 Unit**	**-**	**-**	**-**	**- Unit**	**-**	**-**	**-**	
	3. 27. 03 2.02 09.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	32 Unit	4.548.685.600	- Unit	-	7 Unit	1.126.925.000	0 Unit	-	-	-	- Unit	-	-	-		
D.	**3. 27. 05.**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan**	**100 %**	**584.171.000**	**- %**	**-**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**59.867.250**	**100,00**	**39,91**	**100 %**	**59.867.250**	**100,00**	**10,25**	**Dinas TPH**	
a.	**3. 27. 05. 2.01.**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan**	**800 Ha**	**584.171.000**	**- Ha**	**-**	**200 Ha**	**150.000.000**	**105 Ha**	**59.867.250**	**52,50**	**39,91**	**105 Ha**	**59.867.250**	**13,13**	**10,25**		
	3. 27. 05. 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	800 Ha	584.171.000	- Ha	-	200 Ha	150.000.000	105 Ha	59.867.250	52,50	39,91	105 Ha	59.867.250	13,13	10,25		
E.	**3. 27. 07.**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut**	**800 KT**	**4.733.680.500**	**14 KT**	**1.198.379.500**	**200 KT**	**1.313.363.500**	**200 KT**	**710.082.100**	**100,00**	**54,07**	**214 KT**	**1.908.461.600**	**26,75**	**40,32**	**Dinas TPH**	
			Peningkatan kelas Lanjut ke Madya	**32 KT**		**KT**		**8 KT**		**8 KT**		**100,00**		**8 KT**		**25,00**			
			Peningkatan kelas Madya ke Utama	**8 KT**		**KT**		**2 KT**		**2 KT**		**100,00**		**2 KT**		**25,00**			
a.	**3. 27. 07. 2.01.**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di**	**15 Unit**	**4.733.680.500**	**- Unit**	**1.198.379.500**	**15 Unit**	**1.313.363.500**	**15 Unit**	**710.082.100**	**100,00**	**54,07**	**15 Unit**	**1.908.461.600**	**100,00**	**40,32**		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	**625 Unit**		**- Unit**		**625 Unit**		**625 Unit**		**100,00**		**625 Unit**		**100,00**			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan	**15 Unit**		**15 Unit**		**15 Unit**		**0 Unit**		**-**		**15 Unit**		**100,00**			
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	**28 Unit**		**14 Unit**		**7 Unit**		**4 Unit**		**57,14**		**18 Unit**		**64,29**			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Renja) s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (Renja) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD (Renja) s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD (Renstra) s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dibentuk	**16 Unit**		**- Unit**		**4 Unit**		**4 Unit**		**100,00**		**4 Unit**		**25,00**			
	3. 27. 07. 2.01.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	2.470.373.000	- Unit	-	15 Unit	531.030.500	15 Unit	256.916.000	100,00	48,38	15 Unit	256.916.000	100,00	10,40		
	3. 27. 07. 2.01.02.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	625 Unit	1.033.462.500	- Unit	-	625 Unit	268.086.000	625 Unit	217.861.500	100,00	81,27	625 Unit	217.861.500	100,00	21,08		
	3. 27. 07. 2.01.03.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	15 Unit	426.000.000	15 Unit	172.500.000	15 Unit	172.500.000	0 Unit	-	-	-	15 Unit	172.500.000	100,00	40,49		
	3. 27. 07 2.01 05.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	28 Unit	803.845.000	14 Unit	1.025.879.500	6 Unit	220.818.000	4 Unit	162.187.600	66,67	73,45	18 Unit	1.188.067.100	64,29	147,80		
	3. 27. 07. 2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dibentuk	16 Unit	470.411.000	- Unit	-	4 Unit	120.929.000	3 Unit	73.117.000	75,00	60,46	3 Unit	73.117.000	18,75	15,54		
			Total Anggaran	**52.712.490.200**		**9.470.891.020**		**12.611.279.000**		**9.606.540.750**					**19.077.431.770**				
										Kinerja Sub Kegiatan		**82,52**	**67,81**			**47,72**	**33,63**		
										Kinerja Kegiatan		**83,13**	**51,91**			**48,54**	**22,49**		
										Kinerja Program		**100,00**	**45,14**			**46,89**	**20,50**		

PERSIAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						**11.063.480.400,00**							**13.235.166.300,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.063.480.400,00**							**13.235.166.300,00**	
	-	**-**						**11.063.480.400,00**							**13.235.166.300,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian***	**1,33 %**			**1,33 %**	**770.777.000,00**						**1,33 %**	**1.036.082.500,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan* *Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura* *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	441.865.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani	-	601.876.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		163.799.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	145.449.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		269.598.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan				12 Laporan	106.419.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		54.732.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura				12 Laporan	129.997.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		113.747.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman* *Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	-			2 Dokumen 1 Dokumen	328.912.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani	-	434.206.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	114.762.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		184.206.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	214.150.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian***	**1,30 %**			**1,30 %**	**709.714.000,00**						**1,30 %**	**1.163.785.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*	-			1 Dokumen	200.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	-			3 Unit	509.714.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani	-	1.163.785.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	509.714.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		1.163.785.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase luas lahan (area) bencana pertanian yang dikendalikan***	**100 %**			**100 %**	**134.059.500,00**						**100 %**	**150.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	-			200 Ha	134.059.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani	-	150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				200 Ha	134.059.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Peningkatan kelas Lanjut ke Madya*** ***Peningkatan kelas Madya ke Utama*** ***Peningkatan kelas Pemula ke Lanjut***	**32 Kelompok Tani** **8 Kelompok Tani** **800 Kelompok Tani**			**8 Kelompok Tani** **2 Kelompok Tani** **200 Kelompok Tani**	**765.387.500,00**						**8 Kelompok Tani** **2 Kelompok Tani** **200 Kelompok Tani**	**1.170.314.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* *Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk* *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* *Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi*	-			15 Unit 625 Unit 2 Unit 0 Unit 4 Unit	765.387.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani	-	1.170.314.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	312.223.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		634.215.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				625 Unit	217.861.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		217.861.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				7 Unit	162.186.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		200.068.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				2 Unit	73.117.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Kelompok Tani		118.169.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
5.	**-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH***	**74,16 %**			**74,16 %**	**8.683.542.400,00**						**74,16 %**	**9.714.984.800,00**	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *JJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	-			1 Laporan 20 Laporan 3 Paket 0 Paket 2 Paket 4 Dokumen	149.444.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Kantor DInas	-	213.060.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	45.865.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Kantor DInas		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	3.960.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Kantor DInas		3.960.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.600.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Kantor DInas		3.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	90.519.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Kantor DInas		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*	-			9 Unit	88.890.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Asset Dinas	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	88.890.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Asset Dinas		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	244.917.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Kantor DInas	-	317.340.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Kantor DInas		500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	66.840.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Kantor DInas		66.840.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	177.577.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Kantor DInas		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	284.650.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	503.870.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				74 Unit	183.300.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		401.320.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	16.950.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		18.050.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun*	-			8 Dokumen 13 Dokumen 4 Dokumen	86.436.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur	-	74.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	22.436.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Empulau Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	284.650.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-	-	503.870.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	84.400.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	-		84.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun*	-			8 Dokumen 13 Dokumen 4 Dokumen	86.436.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur	-	74.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		60.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		3.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran JJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	-			1 Laporan 1 Dokumen 104 Orang/Bulan 2 Laporan	7.789.205.400,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur	-	8.566.214.800,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				104 Orang/bulan	7.783.205.400,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		8.560.214.800,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		2.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		1.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	-			6 Orang 1 Dokumen	40.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur	-	40.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	30.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur		30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *JJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	-			1 Laporan 20 Laporan 3 Paket 0 Paket 2 Paket 4 Dokumen	149.444.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Kantor DInas	-	213.060.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.500.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan 1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Aparatur dan Kantor DInas		5.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	J U M L A H							**11.063.480.400,00**							**13.235.166.300,00**	